

BAHASA DAN SUSASTRA DALAM GUNTINGAN

NOMOR 218

OKTOBER 2003

KOMPAS bahasa Inggris bahasa Inggris tidak mem...
ESAI SASTRA dari **Berita Buana** FIKSI - TERJEMAHAN
Merdeka "KEDAULATAN RAKYAT" tidak meng...
TEMPO HARIAN TERBIT
PELITA **SUARA KARYA**
SUARA MERDEKA BAHASA - PENGAJARAN SUSASTRA DAN SASTRAWAN
SUARA PEMBARUAN THE JAKARTA POST HARIAN HALUAN PUISI - LOMBA
MANUSKRIP MELAYU SUSASTRA RUSIA dan me...
Pikiran Rakyat **SASTRAWAN DAN AGAMA** BAHASA IRIAN JAYA
FIKSI - KRITIK **SOSIOLOGI SASTRA** PUISI CINA
BAHASA INDONESIA **SUSASTRA - PENGAJARAN** PUISI MELAYU
TINJAUAN BUKU **SUSASTRA LAMA** DAN WANITA
SUSASTRA DAN FILM **BAHASA - PEMAKAIAN**

Dunia tidak da...
 cara-car...
 kate...
 ngkah baiknya...
 mer...
 gria...
 hui baha...
 nee...
 an sejenak...
 yang terkandung da...
 kem...
 Inggris...
 Bahasa...
 ESAI...
 dan tidak mem...
 samping toleransi...
 kelengkapan bahasa Ind...
 yang sudah...
 uk melaya...
 juga...
 ka...
 pada...
 mpatai...
 ah kedua...
 lebih di...
 yang tidak san...
 bahasa...
 susast...
 masannya...
 Spanyol, Arab, Ru...
 Perdana Ment...
 Church...
 SUSASTRA LAMA...
 mengirimnya ke me...
 san pertempuran. Bayangkan...
 saja potensi dan dinam...
 bisa diampun... dan dilepa...



PERPUSTAKAAN PUSAT PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA
 Jalan Daksinapati Barat IV
 Jakarta 13220, Telepon 4896558, 4706287, 4706288

BAHASA DAN SUSASTRA DALAM GUNTINGAN

Penanggung Jawab : Drs. Mustakim, M.Hum.
Ketua : Drs. Sukasdi
Redaksi : Dra. Mariamah
 Susiati M.P.
 Sri Sudharti
Pembantu : Anwar May
Pembuat Subjek : Mariamah

KATA PENGANTAR

Perpustakaan Pusat Bahasa sebagai perpustakaan khusus bidang kebahasaan dan kesastraan mempunyai tanggung jawab untuk menyebarkan informasi yang berkaitan dengan kebahasaan dan kesastraan.

Bahasa dan Susastra dalam Guntingan adalah buletin yang isinya berupa guntingan artikel surat kabar dan majalah tentang bahasa dan sastra. *Bahasa dan Susastra dalam Guntingan* dan diterbitkan secara rutin tiap bulan. Setiap artikel disertai dengan keterangan nama surat kabar berikut sumbernya. Isinya *Bahasa dan Susastra dalam Guntingan* disusun berdasarkan alfabet subjek. Di samping itu, *Bahasa dan Susastra dalam Guntingan* juga dilengkapi dengan indeks kumulatif nama pengarang dan judul artikel yang diterbitkan setahun sekali, pada akhir tahun. *Bahasa dan Susastra dalam Guntingan*, Nomor 218, Oktober 2003 berisi 310 artikel, yaitu bahasa 139 artikel dan sastra 171 artikel .

Semoga buletin ini dapat menambah informasi bagi pembaca, terutama kalangan peneliti, pengamat, peminat bahasa dan sastra.

Jakarta, November 2003

Tim Penyusun

KATA PENGANTAR

Penyusunan buku ini didasarkan atas hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dan beberapa orang lainnya yang berkecimpung dalam dunia pendidikan di Indonesia.

Keberhasilan buku ini sangat tergantung kepada tanggapan dan kritik yang akan datang dari para pembaca. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan tanggapan dan kritik yang membangun dari para pembaca. Untuk itu, penulis sangat mengharapkan tanggapan dan kritik yang membangun dari para pembaca. Untuk itu, penulis sangat mengharapkan tanggapan dan kritik yang membangun dari para pembaca.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku ini.

Bandung, Desember 2002

Penulis

Handwritten notes and markings on the right margin, including a large bracket and several small symbols.

DAFTAR ISI

BAHASA

BAHASA DAERAH KRITIK

Hilang Rasa Hormat terhadap Bahasa Daerah/Suyatmin Widodo 1

BAHASA INDONESIA-INTERFERENSI

Masyarakat Masih Cenderung Berbahasa Campur-Campur/

Dian Fajarwati 3

BAHASA INDONESIA-ISTILAH DAN UNGKAPAN

Surat dari Iwan Jaya Azis/*Kompas* 4

265.000 Istilah Asing Akan Dibakukan/*Suara Pembaharuan* 6

2.500 Tahun yang Lalu/Sudjoko 7

Pemanfaatan Teks Permainan Bahasa/*Republika* 9

BAHASA INDONESIA-JURNALISTIK

Banyak Media Massa Merusak Bahasa/*Suara Pembaharuan* 10

Pers Mempunyai Peranan Besar dalam Pembinaan Bahasa/*Pelita* 11

BAHASA INDONESIA-KEMAHIRAN

Guru Bahasa Kurang Mahir Menulis/*Terbit* 12

BAHASA INDONESIA-KEMAMPUAN

Bahasa Indonesia Masuk Pasar Bebas/Dendy Sugono 13

Penggunaan Bahasa Indonesia Bisa Kurangi Konflik Komunal/
Kompas 15

Tugas Ahli Bahasa Berat/*Sinar Pagi* 16

Kemampuan Berbahasa, Kunci Keberhasilan Komunikasi/

Sri Hidayati 17

BAHASA INDONESIA-KONGRES

Komenlinguistik Menyambut Kongres Bahasa Indonesia VIII	
Tahun 2003/Nuraidar Agus	18
Kongres Bahasa VIII Segera Digelar/Warta Kota	19
Penerbitan Buku Sastra tak Diimbangi Oplah/Kompas	20
Kongres Bahasa VIII, 14--17 Oktober 2003/Republika	21
Kongres Bahasa Sebagai Proyek/Rosidi, Ajip	22
Bahasa Nasional Mau Kita Apakan?: Menyambut Kongres	
Bahasa 2003/Dardjowidjojo, Soenjono	25
40 Negara Pelajari Bahasa Indonesia/Suara Pembaharuan	27
Penakaian Bahasa Asing Makin Kuat/Suara Pembaharuan	29
Kongres Bahasa Indonesia/Kompas	30
Menghargai Sastra dan Bahasa Indonesia Lisan/Republika	31
Pekerja Asing Wajib Kuasai Bahasa Indonesia/Berita Kota	33
Pameran Buku Bahasa/Media Indonesia	34
Pers Bertanggung Jawab Mendidik Bangsa Berbahasa/	
Haryadi, Tomi	35
Undang-Undang Bahasa/Media Indonesia	36
Mari Kita Rawat Bahasa Indonesia/Media Indonesia	37
Pelestarian Bahasa Tak Mesti dengan UU/Kompas	39
Perlu UU Bahasa untuk Menindak Pelanggaran Bahasa/	
Suara Pembaharuan	40
Bahasa Indonesia Dapat Menjadi Persatuan Bangsa/	
Media Indonesia	42

Penggunaan Bahasa Indonesia Bisa Kurangi Konflik Komunal/ <i>Kompas</i>	43
Sosialisasi Pedoman Bahasa Lebih Penting/ <i>Suara Pembaharuan</i>	44
Mendiknas: Sudah Cukup Kuat Peraturan Mengenai Bahasa/ <i>Suara Pembaharuan</i>	45
Serahkan Hadiah/ <i>Media Indonesia</i>	47
Tidak Perlu ada UU Bahasa/ <i>Terbit</i>	48
Kongres Bahasa VIII/ <i>Anwar, H. Rosihan</i>	49
Gereja dan Bahasa Indonesia/ <i>Weinata Sairin</i>	51
BAHASA INDONESIA-LARAS	
Bahasa Hukum, Tak Semua Orang Paham/ <i>Jupriyadi</i>	53
BAHASA INDONESIA-PELAJARAN	
Selamatkan Bahasa Indonesia dengan Dialog dalam Pengajaran	
Bahasa Indonesia/ <i>Kompas</i>	54
Belajar Bahasa dari Meniru Orang Lain/ <i>Nurwind</i>	55
Pelajaran Bahasa Indonesia Gersang dan Membosankan?/ <i>Republika</i>	56
BAHASA INDONESIA-PEMAKAIAN	
Pemakaian Bahasa Asing Makin Kuat/ <i>Suara Pembaharuan</i>	59
Bahasa Baik dan Benar/ <i>Warta Kota</i>	60
BAHASA INDONESIA-PEMBAKUAN	
Bahasa Indonesia Baku: Kurang Menarik untuk Bahasa	
Jurnalistik/ <i>Media Indonesia</i>	61
Tumbuhkan Kesadaran Berbahasa Indonesia yang Baik dan Benar/ <i>Pelita</i>	62

Merasa Tidak Patut/Yudhoyono	63
Masyarakat Kita Masih Sering Salah Berbahasa/ Hazwan Iskandar Jaya	64
BAHASA INDONESIA-PEMBINAAN	
Kecintaan, Kebanggaan, dan Kesetiaan Itu/ Sucipto Hadi Purnomo	65
Kita Tak Merawat/Sucipto Hadi Purnomo	67
BAHASA INDONESIA-PENGAJARAN	
Guru Bahasa Kurang Mahir Menulis/ <i>Terbit</i>	71
Teks Kosong Jiwa Kosong/Riris K. Toha BR Sarumpaet	72
Pengajaran Bahasa Tidak Bisa Dilepaskan dari Sastra/ <i>Terbit</i>	75
Pelajaran Bahasa Indonesia Juga Terkandung Makna Kebangsaan/ <i>Kompas</i>	76
Belajar Bahasa Juga Berpikir Teratur/Boedi Ismanto	77
BAHASA INDONESIA-PENGARUH BAHASA ASING	
Peniadaan Bahasa Serapan?/ <i>Warta Kota</i>	78
BAHASA INDONESIA-PENGARUH BAHASA LAIN	
Bukan "Puritanisme"/Sudjoko	79
Bahasa Asing Bukan Ancaman/ <i>Suara Pembaharuan</i>	82
BAHASA INDONESIA-PERATURAN	
Tenaga Asing Harus Mampu Gunakan Bahasa Indonesia/ <i>Terbit</i>	83
Pelestarian Bahasa Tak Mesti dengan UU/ <i>Kompas</i>	85
Mencari Jalan Mewibawakan Bahasa Indonesia/Doddi AF dan Tomi Haryadi	86

Mendiknas: Sudah Cukup Kuat Peraturan Mengenai Bahasa/ <i>Suara Pembaharuan</i>	88
Mendiknas: Tak Perlu UU Tertib Berbahasa Indonesia/ <i>Berita Kota</i>	90
Mendiknas Tolak Ide Penyusunan UU Bahasa/ <i>Berita Buana</i>	91
Tak Perlu UU Bahasa/ <i>Pos Kota</i>	92
UU Bahasa Ditujukan Bukan untuk Perorangan/ <i>Media Indonesia</i>	93
Perluakah Undang-Undang Bahasa Dibuat?/ <i>Kedaulatan Rakyat</i>	94
BAHASA INDONESIA-PILIHAN KATA	
Indonesia Perlu Nama Baru?/Koesalah Soebagyo Toer	96
Pahlawan Revolusi/Ayatrohedi	98
Meslota, Surat-e, dan a-belalai/Andre Moller	100
BAHASA INDONESIA-RAGAM	
Harga Diri dan Budaya 'Samudana'/R Kunjana Rahardi	102
Berbahasa Indonesia yang Baik, Komunikatif Perlu Disadari, Berbahasa itu Cerminan Bangsa/Purwantoko	104
Senyuman dalam Wadah Kebahasaan/R Kunjana Rahardi,	105
BAHASA INDONESIA-RAGAM LISAN	
Enam Tokoh Berbahasa Indonesia Lisan Terbaik/ <i>Kompas</i>	107
Lima Tokoh Peroleh Penghargaan Berbahasa Terbaik/ <i>Warta Kota</i>	109
Penghargaan Pembangkit Senyuman/Yusril Ihza Mahendra	111
SBY dan Cak Nur Terima Penghargaan Berbahasa Lisan Terbaik/ <i>Berita Kota</i>	112
Budaya Lisan Tahap Kedua/Garin Nugroho,	113

Tokoh Berbahasa Indonesia Lisan Terbaik/		
Susilo Bambang Yudhoyono		114
BAHASA INDONESIA-RAGAM REMSI		
Pembekalan Bahasa untuk Pejabat/Teguh Santoso		115
BAHASA INDONESIA-RAGAM SASTRA		
Lelucon dan Latar Indeksal/R Kunjana Rahardi		116
BAHASA INDONESIA-RAGAM TULIS		
Sembilan Tokoh Menerima Penghargaan Bahasa dan Sastra/		
<i>Sinar Pagi</i>		118
BAHASA INDONESIA-SEJARAH DAN KRITIK		
Opini Bahasa/Bakdi Soemanto		119
BAHASA INDONESIA-SEMANTIK		
Konteks Tuturan, Konteks Referensi, dan konteks Indeksal/		
R Kunjana Rahardi		121
Makna Bahasa Lebih Terasa di Era Otda/Wardiman Djojonegoro		123
BAHASA INDONESIA-TEMU ILMIAH		
Menurun, Peduli Bahasa Indonesia/ <i>Kedaulatan Rakyat</i>		124
Masuk Bursa/Liek Wilardjo		125
BAHASA INDONESIA-UJIAN, SOAL		
Nilai UAN Mengarang Akan Terpisah/ <i>Media Indonesia</i>		127
Kompetensi Penerjemah Akan Diuji/ <i>Media Indonesia</i>		128
BAHASA INDONESIA-UNIVERSAL		
Bahasa Jadi Bahasa Internasional Bukan Karena Banyak		
Penuturnya/ <i>Kompas</i>		130

BAHASA INGGRIS-PENGAJARAN

Pelajaran Bahasa Terintegrasi Lunturkan Bahasa Lokal/

Kalam Republika 131

BULAN BAHASA

Memberi Tanda pada Peringatan Bulan Bahasa/

Kedaulatan Rakyat 133

Bahasa Belang Bonteng/Salomo Simanungkalit 135

BAHASA JAWA

Pembelajaran Bahasa Jawa Tak Membumi/*Kedaulatan Rakyat* 137

BUTA HURUF

714.000 Penduduk Kalbar Masih Buta Huruf/*Kompas* 138

CERITA PENDEK INDONESIA-SAYEMBARA

Cerpen Pemenang Lomba Cerpen Pemuda Diterbitkan/

Kalam Republika 139

Hamsad Menentang Pakaian Dalam/*Republika* 140

FIKSI JERMAN-TERJEMAHAN INDONESIA

Padamkan Mataku, Rike/Dwi Arjanto 141

HADIAH NOBEL

Novelis JM Coetzee Meriah Nobel/*Suara Pembaharuan* 143

Penulis Afsei Menangkan Hadiah Nobel Sastra/*Media Indonesia* 144

Coetzee Raih Nobel Sastra 2003/*Warta Kota* 145

Menangkan Nobel Sastra/Coetzee, JM 146

HADIAH SASTRA

Novel "Lubang Buaya" Lebih Faktual Ketimbang Fiksi/

Warta Kota 147

Terpilih, Lima Unggulan KSI Award 2003/Warta Kota	148
Nomine KSI Award/Kalam Republika	149
Menghargai Sastra dan Bahasa Indonesia Lisan/Nonang MR	150
Akhirnya Dini Menerima SEA Write Awards/Sotyati	152
Setelah 43 Tahun Hamsad Berkarya/Arif Firmansyah	154
ISTILAH DAN UNGKAPAN	
Glosarium Ekbis 'KR'/Kedaulatan Rakyat	156
Kosa Kata/Kedaulatan Rakyat	156
Glosarium Ekbis 'KR'/Kedaulatan Rakyat	156
Glosarium Ekbis 'KR'/Kedaulatan Rakyat	157
Glosarium Ekbis 'KR'/Kedaulatan Rakyat	157
Kosa Kata/Kedaulatan Rakyat	157
Kosa Kata/Kedaulatan Rakyat	158
Glosarium Ekbis 'KR'/Kedaulatan Rakyat	158
Glosarium Ekbis 'KR'/Kedaulatan Rakyat	158
Kosa Kata/Kedaulatan Rakyat	159
Glosarium Ekbis 'KR'/Kedaulatan Rakyat	159
Glosarium Ekbis 'KR'/Kedaulatan Rakyat	159
Glosarium Ekbis 'KR'/Kedaulatan Rakyat	160
Kosa Kata/Kedaulatan Rakyat	160
Glosarium Ekbis 'KR'/Kedaulatan Rakyat	160
Istilah-Istilah Khusus/Koran Tempo	161
KEBUDAYAAN	
Orang Malagasy dan Kebudayaannya/Timbul Haryono	162

KEBUDAYAAN-KONGRES	
750 Tokoh Ikuti Kongres Kebudayaan/ <i>Kedaulatan Rakyat</i>	166
Dokumen Kongres Kebudayaan/ <i>Koran Tempo</i>	167
Kongres Budayawan Pelat Merah/ <i>Febrianti</i>	168
Kongres Kebudayaan Bukan Acara Ritual dan Formal/ <i>Suara Pembaharuan</i>	170
Kongres V Kebudayaan Dibuka 20 Oktober/ <i>Suara Pembaharuan</i>	171
12 Tahun Menunggu Kongres Kebudayaan/ <i>Kalam Republika</i>	172
Kongres Kebudayaan Seremonial Pelat Merah/ <i>Edy A Effendi</i>	173
Enam Pekerja Seni Terima Penghargaan/ <i>Suara Pembaharuan</i>	175
Hanya Perhelatan 'Plat Merah'?/ <i>Kedaulatan Rakyat</i>	177
Hendaknya Jangan Hanya Bisa Dipahami Budayawan/ <i>Kompas</i>	178
Menbudpar Resmikan Kongres Kebudayaan/ <i>Media Indonesia</i>	179
'Bangsa yang Diazab'/ <i>Republika</i>	181
Enam Seniman Dapat Anugerah Seni/ <i>Media Indonesia</i>	182
Indonesia Butuhkan Pusat Kebudayaan/ <i>Republika</i>	183
Martabat Bangsa Ditentukan Kebudayaan/ <i>Media Indonesia</i>	185
Dibahas, Pembentukan Pusat Kebudayaan Indonesia/ <i>Kompas</i>	186
Kongres Kebudayaan V Dikhawatirkan Tidak Hasilkan Rekomendasi Konkret/ <i>Media Indonesia</i>	188
Perkara Identitas dan Integrasi Indonesia/ <i>F Dewi Ria Utari</i>	190
Pusat Kebudayaan Tidak Masuk Rekomendasi/ <i>Suara Pembaharuan</i>	192
18 Rekomendasi Harus Ditindaklanjuti/ <i>Media Indonesia</i>	193
Rekomendasi Kongres Kebudayaan/ <i>Doddi AF dan Ade Alawi</i>	194
'Bola Panas' Ardika/ <i>Republika</i>	197

Catatan Kritis Kongres Kebudayaan V/Nasrul Azwar, Agus Hernawan, dan Sudarmoko	198
Kongres Kebudayaan Sebuah Langkah Patah-Patah/Khairul Jasmi	201
KEMAMPUAN BERBAHASA (MENULIS)	
Kemampuan Menulis Sarjana Indonesia Rendah/ <i>Suara Pembaharuan</i>	204
KEPENGARANGAN	
Musim Pasang Penulis Perempuan/ <i>Kedaulatan Rakyat</i>	205
MEMBACA	
Tulisanmu di Hatiku/Hawe Setiawan	206
PENERJEMAHAN	
Dilantik, Penerjemahan Pemprov DKI	208
SASTRA ACEH	
Wajah Aceh dalam Puisi/ <i>Koran Tempo</i>	209
Rencong dan Keresahan Seorang Penyair Aceh/Rif Firmansyah	210
Realisme Setengah Hati/Binhad Nurrohmat	212
"The Father of Balinese Studies Telah Pergi/ I Nyoman Darma Putra	215
Opera Cina dan Pentas Tradisi Lisan/F Dewi Ria Utari	217
SASTRA INDONESIA-FIKSI	
Cerita/Hasif Amini	219
Ketika Nyanyian Sastra Terasa Sumbang/Revitriyoso Husodo	221
Linearitas Cerita, Sublimasi Bahasa/Satmoko Budi Santoso	223
Nh Dini, Warga Lokal 'Setting' Menarik/ <i>Kedaulatan Rakyat</i>	225

Kecil-Kecil Jadi Novelis/Hadriani P dan Angela	226
Novel Pertama Berbuah Skenario/Angela	228
Pengelana yang Tak Pernah Membuang Jangkar/Arif Firmansyah		229
K Usman Pamerkan Cerpen/Warta Kota	231
Novel Berilustrasi Busana Tokoh/ <i>Kompas</i>	232
Fira Basuki, Perempuan Pengarang Novel/Arwan Tuti Artha		233
Membayangkan Indonesia Masa Depan/Marulam Tumanggor		235
Agnes Jessica Luncurkan Dua Novel/ <i>Kalam Republika</i>		238
Gus Mus Hijrah ke Cerpen/ <i>Kompas</i>	239
Pergelaran 'Gus Mus Hijrah ke Cerpen'/ <i>Kedaulatan Rakyat</i>		240
Cinta Dalam 'Sastra Daur Ulang'/Koniah A Khafidz	241
Gus Mus Tampil Sangat Memikat/ <i>Kedaulatan Rakyat</i>	243
SASTRA INDONESIA-FORNOGRAFI		
Seks dan Politik dalam Sastra Indonesia/Faruk	244
SASTRA INDONESIA-KONGRES		
Tradisi Lisan Takkan Hilang/ <i>Kompas</i>	247
SASTRA INDONESIA-KRITIK		
Agar Diskusi Sastra Lebih Menarik dan Hidup/Doddi	248
Kegiatan Sastra Kampus, dari Titik Nol/ <i>Kedaulatan Rakyat</i>		250
Menimbang Pembaca/Alia Swastika	251
Sastra Indonesia Mencari Eksistensi/ <i>Kedaulatan Rakyat</i>		253
Sastra, Seks dan Jebakan Kapitalisme/Endriani DS	254
Mengkritisi Sastra Seks dan Kekerasan/Isbedy Stiawan ZS		257

SASTRA INDONESIA-PENGAJARAN	
Sekolah Kurang Dukung Regenerasi Sastra/ <i>Media Indonesia</i>	260
Minim, Bobot Pengajaran Sastra/ <i>Kedaulatan Rakyat</i>	261
SASTRA INDONESIA-PUISI	
Pembelaan Atas Puisi/ <i>Bambang Agung</i>	262
Sitor Situmorang: <i>Spiritualisme/Lasti Kurnia</i>	269
Komunitas Sastra Anak Muda/ <i>Latief</i>	271
Penyair/ <i>Taufiq Ismail</i>	272
SASTRA INDONESIA-SAYEMBARA	
Pemenang Cerita Pendek Remaja 2003/ <i>Kompas</i>	273
SASTRA INDONESIA-SEJARAH	
Ide Liar Itu pun Datang Menyewa Gerbong untuk Pernikahan/ <i>Hamsad Rangkuti</i>	274
SASTRA INDONESIA-SEJARAH DAN KRITIK	
Fiksi dan Masalah Keyakinan Estetik/ <i>Ahmadun Yosi Herfanda</i>	276
Terry Eagleton dan Kematian Sastra/ <i>Hawe Setiawan</i>	279
SASTRA INDONESIA-TEMU ILMIAH	
ATL Gelar Seminar dan Festival Pesisir/ <i>Suara Pembaharuan</i>	282
Diplomasi Sastra Jerman/ <i>Kedaulatan Rakyat</i>	283
SASTRA ISLAM-FIKSI	
Fiksi Islami Masih Menjual/ <i>Irwan Kelana</i>	284
SASTRA JAWA	
Sastra Jawa Perlu Dihidupkan/ <i>Kedaulatan Rakyat</i>	286
SASTRA KEAGAMAAN	
Kejar 10 Buku Cerpen/ <i>Republika</i>	287

Sastra Religius Ahmad Tohari Dalam Ideologi Islami/Restoe Prawironegoro Ibrahim	288
Musim Semi Fiksi Islami/Rian Suryalibrata dan Angela	291
SASTRA MELAYU	
Bukti Kekayaan Kesusastraan Melayu Rendah/Nova Christina	294
SASTRA MELAYU-TEMU ILMIAH	
Menegaskan Kembali Jati Diri Sastra Melayu/Hamdy Salad	297
SASTRA NOBEL	
Lelaki Putih di Dunia Hitam/Hikmat Darmawan	299
SASTRA PELAJARAN	
Belajar Menulis Bersama Sastrawan Dunia/Santi Mulyani	301
SUMPAAH PEMUDA	
Memberi Makna (Lain) Sumpah Pemuda/Rusman Ghazali	303
Sumpah Untuk Indonesia/I B Putera Manuaba	305
Semangat Sumpah Pemuda Setelah 75 tahun/Kedaulatan Rakyat	307
Sumpah Pemuda? Banyak yang Lupa/Warta Kota	309
TERJEMAHAN	
Dilantik, Penerjemahan Pemprov DKI/Berita Buana	311

buah langkah yang berpangkal pada demi 'pelestarian' dan pengembangan bahasa Jawa guna mempertahankan keberadaannya sebagai bagian dari sistem kebudayaan masyarakat Jawa.

Dalam upaya memperjuangkan pelestarian dan pengembangannya yang tidak hanya basabasi, sesungguhnya nasib bahasa tidak bisa sepenuhnya diserahkan pada masyarakat penuturnya. Dalam bahasa lain, pelestarian dan pengembangan bahasa Jawa juga sangat tergantung *political will* dari eksekutif (Pemda) dan legislatif (DPRD). Walaupun tetap saja peran serta masyarakat luas harus dominan. Artinya, baik penyelenggara pemerintahan daerah (eksekutif dan legislatif) maupun masyarakat dituntut melakukan gerakan secara bersama-sama.

Dewan Bahasa Daerah

Semua orang tentu sepakat bahwa memang tanggung jawab bersama untuk melestarikan dan mengembangkan bahasa Jawa. Tetapi, dalam praktiknya kalau dilempar begitu rupa tanpa dengan *political will* dari penyelenggara pemerintahan yang berpengaruh secara politik, gerakan untuk melestarikan dan mengembangkan bahasa Jawa sangatlah sulit untuk bisa diharapkan. Kelahiran produk hukum di daerah - Peraturan Daerah (Perda) - yang berlaku efektif untuk memayungi 'pengelolaan' aset daerah yang namanya bahasa Jawa diperlukan kehadirannya. Dalam Perda tersebut, barangkali, perlu dimunculkan dewan bahasa daerah (DBD) yang mampu merepresentasikan seluruh elemen atau konstituen bahasa Jawa.

Dibentuknya DBD atau apapun namanya bertugas untuk menggagas, membuat kebijakan-kebijakan dan menjalankannya, serta melakukan evaluasi terhadap pelestarian dan pengembangan bahasa Jawa. Dewan tersebut bisa dibentuk baik di daerah kabupaten atau kota dan propinsi. Kenapa lembaga tersebut harus dibentuk? Sebab selama ini apa yang dilakukan Pemda saja belum cukup memadai untuk menentukan haluan pengembangan dan pelestarian bahasa daerah. Di samping masyarakat (pelaku bahasa Jawa) yang paling tahu mengenai apa yang dibutuhkan demi lestari dan berkembangnya baik nilai-nilai maupun wujud dari ekspresi bahasa belum optimal perannya. Oleh karena itu, lembaga tersebut dibutuhkan untuk mengelola aspirasi dan kepentingan konstituen bahasa Jawa.

Perihal keanggotaannya bisa melibatkan wakil yang merepresentasikan pengguna bahasa Jawa. Sekadar menyebut beberapa contoh yang bisa dijadikan unsur pembentuknya, antara lain: guru bahasa daerah, pakar, sas-trawan-seniman (kesenian tradisional), bu-

dayawan, penerbitan (media massa), tokoh masyarakat, dan LSM. Yang penting dalam pembentukannya, secara prinsipil, DBD terbentuk dengan sandaran prasyarat: *pertama*, representasi, mewakili konstituen masyarakat pengguna atau penutur bahasa Jawa. Mereka sendirilah yang nantinya menyusun wilayah tugas dan format wewenang serta orientasi kelembagaan dan program-programnya. *Kedua*, legitimasi, lembaga atau dewan tersebut mendapatkan pengakuan dari sejahat mungkin seluruh elemen atau parapihak (konstituen) bahasa Jawa. Karenanya, sosialisasi pemahaman atas gagasan tersebut pada semua elemen merupakan keniscayaan.

Dengan adanya DBD tersebut, kita bisa berharap bahasa Jawa bisa diselamatkan, atau paling tidak upaya memperpanjang usia bahasa Jawa itu bisa dilakukan. Melalui lembaga itu, masyarakat mampu berperan, *pertama*, membangun konsolidasi dan sinergi dari berbagai elemen masyarakat dalam upaya pelestarian dan pengembangan bahasa Jawa. *Kedua*, menyampaikan aspirasi dan mendorong DBD melakukan langkah, baik berupa kebijakan maupun program-program pelestarian dan pengembangan bahasa Jawa pada Pemda dan DPRD (penyelenggara pemerintah daerah). *Ketiga*, mengusulkan rumusan-rumusan, usulan, dan rekomendasi penanganan pelestarian dan pengembangan bahasa Jawa (dari penentuan *policy*, pelaksanaan, dan evaluasi).

Terbentuknya lembaga tersebut jelas harus merupakan perwujudan peran serta masyarakat dalam mengaktualisasikan prakarsanya. Sejalan dengan otonomi daerah, saat itulah kesempatan emas yang harus dikelola masyarakat secara terus menerus terhadap aset daerah (bahasa Jawa juga harus dipahami demikian). Melalui DBD itulah segala isu yang berhubungan dengan pembinaan bahasa Jawa diketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik di tingkat Kabupaten/Kota maupun Propinsi.

DBD itu yang jelas harus berdaya, mempunyai posisi tawar (*bargaining position*) untuk 'mendesakkan' aspirasi, sehingga penyelenggara pemerintahan membuat kebijakan yang pro-pelestarian dan pengembangan bahasa Jawa, sekalipun dukungan dana diperoleh dari APBD (dana masyarakat yang dikelola pemerintah). Kita tunggu saja respons masyarakat untuk mewujudkannya, sebagai langkah awal untuk paling tidak memperpanjang usia bahasa Jawa sebagai wujud rasa hormat kita pada bahasa guna mencegah agar kebudayaan yang melingkupinya tidak amburadul. **C-o**

**) Penulis adalah alumnus Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta.*

BAHASA INDONESIA-INTERFERENSI

Masyarakat Masih Cenderung Berbahasa Campur-campur

MASYARAKAT kita pada umumnya belum maksimal dalam berbahasa Indonesia. Sebab, bahasa Indonesia bukanlah bahasa yang mereka kenal pertama kali. Pada umumnya justru bahasa daerah yang lebih dominan. Dengan melihat kasus masyarakat Yogyakarta, misalnya, mereka masih cenderung menggunakan bahasa campur-campur. Paling dominan adalah bahasa Jawanya. Apabila harus menggunakan bahasa Indonesia secara murni, memang suhunya dan kurang tepat. Yogyakarta sebagai kota pelajar, sangat memungkinkan munculnya bahasa gaul atau bahasa campur-campur itu. Sebab, mereka yang tinggal di Yogyakarta bisa berasal dari berbagai-bagai daerah. Mereka belajar di Yogyakarta dan bergaul satu sama lain dengan bahasa.

Tetapi, dari lingkungan keluarga pada umumnya bahasa komunikasi yang dipergunakan adalah bahasa daerah. Tetapi, sekarang

ini kecenderungan komunikasi menggunakan bahasa Indonesia juga sudah mulai terjadi pada lingkungan keluarga muda. Karena mereka tinggal di lingkungan yang majemuk seperti di sebuah pemukiman baru, mereka mau tidak mau harus berkomunikasi dengan bahasa Indonesia.

Masuknya bahasa daerah dalam penggunaan bahasa, sebenarnya juga sebuah pembelajaran dan biasanya banyak orang ingin tahu apa artinya. Sebagai presenter, biasanya saya tidak jarang memasukkan bahasa daerah sebagai variasi spontan. Tetapi kalau pada acara-acara protokoler, tentu penggunaan bahasa Indonesia murni, yang baik dan benar, sangat relevan. Jadi, bahasa Indonesia akan banyak muncul secara murni pada acara-acara formal. Karena menyesuaikan situasinya. □ <d .

(Dian Fajarwati, Presenter)

Kedaulatan Rakyat, 25 Oktober 2003

Surat dari Iwan Jaya Azis

K. 13/10/03

BARU-baru ini dosen Fakultas Ekonomi UI Faisal Basri menerima surat elektronik dari Dr Iwan Jaya Azis. Bunyinya, "Sal, tolong kirim saya padanan-padanan bahasa Indonesia istilah ekonomi yang kamu kerjakan dulu dengan Pusat Bahasa."

Kisah ini dituturkan sendiri oleh Faisal dalam diskusi bahasa *Kompas* pekan lalu. Ia sungguh kaget mendapat pesan begitu dari seorang doktor ekonomi terdepan Indonesia yang sangat pintar dan sedang mengajar di Universitas Cornell, Ithaca, Amerika Serikat itu. Kaget sebab lingkaran pergaulan Iwan saat ini adalah ekonom-ekonom Amerika kelas pemenang Nobel. Mana mungkin mereka mau mendengar koleganya yang asli Indonesia itu menyebut *masuk bursa* untuk *go public*, *pembeli* untuk *buyers*, *pinjaman* untuk *loan*, *keuangan* untuk *financial*. Mahasiswanya pun pada berbahasa Inggris.

Jadi, untuk apa padanan Indonesia itu bagi seorang Iwan? Mau seminar di Jakarta? Bukankah wartawan ekonomi dan keuangan, demikian pula analis pasar maupun sintesis pasar, serta segenap dosen dan peneliti ekonomi di seluruh Indonesia (kecuali Faisal Basri) gemar bergincu dengan kosakata Inggris kalau sedang bicara dan menulis?

Hampir semua pembaca koran menyaksikan betapa kosakata Inggris sedang mengalami inflasi yang tak terkendali di halaman-halaman atau berita-berita ekonomi. Narasumber dan wartawannya seperti bicara sesama mereka di ruang terbatas.

Yang lebih parah di pihak wartawan sebab mestinya dia tahu bahwa ia menulis berita untuk masyarakat luas, dari yang awam sampai yang melek, dari yang jelata sampai yang ningrat. Mestinya, kalau sedikit rajin, berpengetahuan, dan percaya diri dengan bahasanya sendiri, wartawan-wartawan ekonomi, analis dan sintesis pasar, dosen-dosen dan peneliti-peneliti itu memadankan istilah-istilah teknis tersebut ke dalam bahasa Indonesia.

Akan tetapi, ini sukar diharapkan sebab kata *pembeli* dan *pilihan* yang dikenal di pasar pagi sekalipun harus diganti dengan *buyers* dan *opsi*. Jadi, urusannya adalah kemalasan, kebodohan, dan pembodohan.

Penonton televisi mengalami hal serupa. Setiap pagi dan sore sebuah stasiun televisi yang menamai acaranya dengan *Headline News*, *Market Review*, dan menyusul *Southeastern Economic Review* menayangkan laporan-laporan keuangan dan saham. Di sana muncrat istilah-istilah persahamaan dan keuangan yang semuanya terdiri dari kata-kata Inggris. Tak jarang para penyiar yang berbahasa Indonesia dialek Wall Street itu, demikian pula analis-analis yang diundang berbincang-bincang, menyemburkan kata-kata Inggris bahkan untuk apa saja yang tak ada

kaitannya dengan peristilahan teknis.

Tampaknya mereka tak pernah belajar jurnalistik sebab hampir dapat dipastikan, puluhan juta penonton harus mengernyitkan dahi karena tidak paham apa yang mereka dengar. Para penyiar dan analis itu seolah-olah sedang ceramah kepada 10.000 orang, jumlah investor di Indonesia dewasa ini, yang mengerti pasar modal saja.

Ini mungkin yang membuat nasib pasar modal Indonesia sedemikian jelek, hanya diminati 10.000 orang dari 200 juta lebih penduduknya. Di Thailand, sekitar 70 persen dari penduduk usia dewasa adalah investor di pasar modal. Pemerintah juga punya saham dalam pembodohan ini. Kebijakan bidang ekonomi dan keuangan yang dikeluarkan pemerintah dalam 20 tahun terakhir tak pernah bebas dari istilah-istilah teknis berbahasa Inggris. Ambil contoh produk pemerintah bernama Program Pemulihan Ekonomi. Inpres yang menjadi landasan bagi semua departemen dan masyarakat luas Indonesia itu mendaftarkan istilah teknis ekonomi berbahasa Inggris tanpa padanan Indonesia yang jumlahnya sekitar 25 persen.

Sumber perusak lainnya adalah buku-buku dasar yang dipakai banyak mahasiswa yang menggantungkan bacaan dari teks terjemahan. Tatkala muncul kebutuhan pasar menerbitkan buku-buku terjemahan, sejumlah orang yang tak mengerti ilmu ekonomi menanggung kesempatan dalam penerjemahan itu. Para penerjemah mengganti kata demi kata hingga yang muncul istilah-istilah yang janggal dan aneh. Terjadi benturan. Mereka yang membaca dari sumber aslinya menolak dan tidak memperbaiki, tapi memilih menggunakan saja istilah aslinya. Yang pernah belajar dan bermain di luar negeri tak mau peduli sebab ia tak berurusan dengan 200 juta penduduk negerinya, tapi dengan segelintir orang sebangsa dan seabrek pemain yang lintas negeri.

◆◆◆
BEBERAPA kamus istilah ekonomi telah diterbitkan. Sekelumit media mencencil padanan itu, tapi tidak ketat menggunakan hasil pekerjaan mereka sendiri dalam publikasinya. Dengan melibatkan beberapa ekonom, Pusat Bahasa selama lima tahun telah mengusahakan padanan Indonesia istilah ekonomi itu. Kampanye untuk penggunaannya sudah dilakukan, tetapi resistensi di kalangan ekonom sangat tinggi. "Misalnya bagi saya lebih bermartabat bila *international economics* dipadankan dengan *ekonomi antarbangsa*, bukan *ekonomi internasional*," kata Faisal. "Malaysia jauh maju dalam hal ini."

Sikap tak peduli dan resistensi di "kalangan pemain utama" tampaknya bakal menyuburkan gejala berbahasa belang belonteng ini,

apalagi dengan berlanjutnya arus masuk modal asing yang makin memperbesar hegemoni bahasa Inggris di seluruh dunia.

Apa yang dapat dilakukan?

Pertama, lembaga-lembaga yang memiliki otoritas harus disadarkan terlebih dulu. Sosialisasi penggunaan istilah Indonesia yang baik dan benar terutama harus dititikberatkan kepada mereka.

Kedua, penyediaan infrastruktur berupa kamus istilah teknis yang memungkinkan masyarakat mengefahui atau bisa mencari padanan-padanan yang dapat membuat mereka mengerti.

Yang paling penting setelah otoritas itu dalam kesadaran ini, adalah media massa. Permasalahannya, sejauh mana politik media massa menyentuh urusan ini. (SAL)

Kompas, 13 Oktober 2003

265.000 Istilah Asing Akan Dibakukan

JAKARTA - Kepala Pusat Bahasa Dandy Sugono menyatakan, lembaganya akan segera membakukan 265.000 istilah asing menjadi bahasa Indonesia. Dia menyadari bahwa kebutuhan mengenai hal tersebut sangat mendesak karena saat ini ratusan ribu istilah asing banyak digunakan masyarakat rumpun Melayu.

Dia mengungkapkan itu, kemarin, dalam Kongres VIII Bahasa Indonesia yang berlangsung di Jakarta.

Menurut Dandy, istilah-istilah asing itu akan diresmikan pada tahun depan bersamaan dengan Sidang Majelis Bahasa Brunei, Indonesia dan Malaysia yang akan berlangsung di Malaysia. "Jadi istilah itu tidak saja dibakukan oleh Indonesia, tetapi juga Malaysia dan Brunei," katanya.

Dia berharap dalam kongres tersebut berhasil dirumuskan metode mengajar yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Terlebih lagi, sambungnya, dalam bidang pendidikan sangat dibutuhkan metode menulis dan membaca secara cepat.

"Dengan begitu orang mengerti manfaat pengajaran bahasa Indonesia dan semua menjadi optimal. Juga harus dipikirkan bagaimana meningkatkan kualitas pengajaran kita," tegasnya.

Penambahan istilah dalam bidang teknologi informasi dan ilmu pengetahuan, menurut dia, sudah sangat mendesak. Banyak istilah asing yang belum baku digunakan karena tidak ada kata yang tepat dalam bahasa Indonesia.

Kenyataan itu, lanjutnya, menyebabkan banyak kalangan, terutama akademisi, menggunakan istilah asing yang tidak baku. Selain itu

pengajaran bahasa Indonesia di dunia pendidikan tidak membuat orang terlatih untuk menulis dan memahami tulisan secara cepat.

Pengajaran bahasa Indonesia, tuturnya, dianggap tidak bermanfaat dan merupakan pemborosan. Malahan beberapa kalangan pendidikan berharap pelajaran tersebut dihapus. Untuk itu perlu dirumuskan metode mengajar yang benar sehingga pelajaran bahasa Indonesia dan sastra menjadi menyenangkan dan dirasakan manfaatnya.

Melalui diskusi panel bertema "Masalah Pengajaran Bahasa Indonesia dalam Dunia Pendidikan", terungkap pula perlunya penambahan kosakata dan perubahan metode mengajar. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Satriyo S Brodjonegoro mengemukakan, pengajaran bahasa Indonesia dirasakan sangat tidak bermanfaat untuk diberikan dalam pendidikan tinggi.

Tidak Optimal

Pelajaran yang diberikan hanya berupa pengulangan dari jenjang pendidikan sebelumnya, seperti mempelajari awalan, akhiran, ataupun peribahasa yang sudah didapati sebelumnya. "Hal itu membuat pengajaran tersebut tidak optimal, sehingga ada beban ketika melaksanakannya. Karena dianggap beban, akhirnya ada yang minta dihapus," ungkapnya.

Lemahnya pengajaran bahasa Indonesia di dunia pendidikan juga diakui Suminto A Sayuti dari Universitas Negeri Yogyakarta. Menurut dia, aspek pengajaran bahasa dan sastra Indonesia masih sangat bersifat kognitif. "Tujuan un-

tuk meningkatkan apresiasi sastra tidak dapat dicapai karena terlalu kuatnya unsur kognitif. Selain itu, kita juga tidak mempunyai guru bahasa Indonesia yang berkualitas," tukasnya.

Keinginan untuk mencari metode yang lebih baik dalam pengajaran bahasa Indonesia juga disampaikan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) A Malik Fajar. Dalam makalahnya yang dibacakan Dirjen Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda (Dirjen PLSP) Fasli Jalal, Mendiknas berharap kongres kali ini minimal harus dapat memberikan saran mengenai metode pengajaran yang sesuai.

"Paling tidak ada saran untuk mengubah citra buruk bahwa pelajaran bahasa Indonesia itu menakutkan, gersang, terlalu teoritis, dapat hilang. Jadikanlah pengajaran bahasa Indonesia menjadi sesuatu yang menarik, menyenangkan, bermanfaat dan mencerdaskan," katanya.

Dia berharap pula agar pengajaran sastra atau pengajaran bahasa, terutama di jenjang pendidikan dasar dan menengah, jangan diarahkan untuk menjadi ahli bahasa ataupun sastrawan.

Satriyo sendiri menawarkan solusi dengan mengubah metode pengajaran melalui pengajaran sesuai kebutuhan. "Jadi bahasa Indonesia diajarkan sesuai dengan bidang studi yang diambil. Bahasa Indonesia untuk mahasiswa ekonomi, MIPA (matematika dan ilmu pengetahuan alam) serta politik berbeda, sehingga mereka dapat merasakan manfaatnya," tegasnya. (AS/M-7)

reka sendiri. Makanya, baru di masa Soeharto nama *kampus* kita kenal. Sampai sekarang kita tidak tahu bahwa ini sebenarnya kata dari bahasa dusun di sebelah Kali Tiber di Italia.

Selagi 2.500 tahun yang lalu Roma masih kerajaan, ada yang disebut *senatus*, suatu dewan tetua yang di masa republik terdiri dari 300 anggota. Wibawanya sangat besar. Tahu-tahu saja, kita juga bikin *senat*. Ini juga dewan tetua yang, bersama rektor, membina perguruan tinggi. Dari mana istilah ini? Tidak dari Romawi, tetapi dari Belanda.

Penyelewengan terjadi ketika muncul badan yang bernama *senat mahasiswa*. Eh, belum lagi berjenggot dan berkumis, anggotanya sudah menyebut diri senator!

SUDJOKO

Munsi, Tinggal di Bandung

Kompas, 18 Oktober 2003

BAHASA

2.500 Tahun yang Lalu

SEORANG teman berkata, "Mas, mana bisa kata-kata *kampus* dan *senat* itu berasal dari zaman purba? Di Romawi belum ada universitas!" Ahaa! Arek ini seperti kita semua, menyangka bahwa dua kata ini istilah perguruan tinggi.

Jawab saya, "Yah, kata *sarjana* juga sudah lama sekali dikenal rakyat sebelum kita punya universitas."

Bahasa tidak mungkin hidup dari kata-kata baru melulu. Bahasa harus menggunakan kosakata yang sudah umum ratusan tahun yang lalu. Bahkan ribuan tahun yang lalu. Soal makna kata, itu bisa saja diubah orang, dan memang biasa begitu. Lihat saja kata *elite*. Ini enak saja kita kenakan kepada kaum durjana.

Kampus itu asalnya hanyalah lapangan rumput yang cukup luas. Begitulah di Roma 2.500 tahun yang lalu. Tempat itu penting sebab sering dipakai tentara. Misalnya untuk membentuk pasukan tiap kali Roma mau perang, dan untuk latihan perang. Dengan *kampus* inilah Roma meluaskan wilayahnya.

Kini, *kamp* dan *Kampf* berarti perang atau perjuangan. Tempat tentara berkemah di lapangan kita sebut *kamp* atau *camp*. Belum lagi *campaign*, yang setelah Romawi bubar, berarti gerak tentara dalam perang di medan terbuka. Sekian abad kemudian ini juga berarti kegiatan partai politik untuk menang "perang". Kita tunggu saja, Indonesia akan ramai lagi dengan *kampanye*.

Sementara itu terkuburlah kata *campus*. Padahal, gengsi *campus* sudah ditingkatkan oleh Romawi sendiri. Di *Campus Martius*, misalnya, didirikan kuil Apollo dan mazbah Martius, alias dewa Mars. Di abad ke-1 sebelum Masehi sudah banyak bangunan di situ, misalnya pemandian umum, gedung sandiwara, gedung olahraga, dan banyak kuil lain. Jadi *campus* itu sudah tidak lagi buat urusan perang melulu.

Perubahan lain terjadi di abad ke-18, di Amerika. Universitas Princeton mengajukan pertanyaan yang tidak terlalu aneh: "Tanah kita tempat semua gedung ini harus punya nama. Universitas kita bukanlah sembarang sekolah. Jadi nama dunia kita juga jangan yang biasa-biasa saja."

Buat kita, keinginan seperti ini sudah biasa. Kita juga suka mencari nama yang tidak biasa, sebisa-bisa nama Barat, misalnya *supermall*. Mencomot dari bahasa Sanskerta juga lazim, misalnya *payudara* dari *payodhara*. Tadinya cuma *susu* atau *etek* saja.

Bahasa dulu kala memang punya pesona tersendiri. Begitu pula bagi Princeton. Maka tahun 1774 lembaga itu memberi nama *campus* kepada wilayahnya sendiri. Bangunlah kata purba ini dari kuburan, sambil menyandang makna yang baru sama sekali. Dia menjadi pusat pendidikan tinggi.

Sejak itu kata *campus* sangat bergengsi di Amerika. Eropa sendiri bagaimana? Tidak acuh. Itu sebabnya bahasa Belanda tidak mengenal kata *campus* atau *kampus*. Keruan saja di Indonesia tidak ada *kampus* selama Belanda bercokol di sini.

Di zaman Presiden Soekarno pun belum ada kata *kampus*. Cuma, kebetulan saja tahun 1956 Bung Karno mengundang dua puluh profesor Universitas Kentucky untuk mengajar di Institut Teknologi Bandung. Tahun berikutnya sejumlah dosen ITB pergi ke Amerika untuk belajar. Baru di sanalah mereka jumpa dengan istilah *campus*. Cerita selanjutnya dapat kita

Pemanfaatan Teks Permainan Bahasa

Teks permainan bahasa, bisa jadi, salah satu alternatif pemanfaatan satu jenis teks sebagai bahan pengajaran bahasa. Khususnya, teks permainan bahasa dengan berbagai genrenya seperti wacana yang ditemui dalam grafiti (tulisan di tembok), kartun, stiker, kaos oblong, peribahasa jenaka, atau teka teki.

Permainan bahasa, menurut I Dewa Putu Wijana, dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, adalah bentuk penggunaan bahasa yang tidak semestinya. Di dalamnya mengandung berbagai penyimpangan, seperti penyimpangan fonologis, gramatikal, kekacauan hubungan bentuk dan makna, dan bermacam-macam pelanggaran yang bersifat pragmatis yang dimaksudkan untuk mencapai bermacam-macam tujuan. Tujuan dimaksud, seperti melucu, mengkritik, menasihati, atau melarang yang sering kali tidak mudah diidentifikasi.

Permainan bahasa dalam berbagai macam wujud, kata dia, dikenal secara luas oleh para pemakai bahasa. "Tidak seorang pun, lebih-lebih di abad ke-21 ini, tidak terlibat dalam permainan bahasa, bagaimanapun kecilnya derajat keterlibatan itu," katanya.

Apa alasan yang mendasari sehingga teks permainan bahasa direkomendasikan sebagai salah satu alternatif bahan ajar pengajaran bahasa? Ia memberikan sekurangnya tiga alasan.

Pertama, permainan bahasa sudah sangat akrab dikenal oleh setiap pemakai bahasa. Kedua, permainan bahasa — seperti yang diisyaratkan oleh namanya — amat kaya akan manipulasi-manipulasi linguistik di dalam berbagai tataran (otografis, fonologis, gramatika, dan pragmatis). Bila dicermati, ia merupakan fenomena linguai yang sangat besar manfaatnya untuk menerangkan konsep-konsep linguistik di dalam pengajaran ilmu bahasa yang selama ini luput dari perhatian para ahli.

Alasan ketiga, aneka substansi yang menjadi topik perbincangan permainan bahasa di dalam berbagai genrenya akan lebih memungkinkan pengajaran bahasa memberikan pengetahuan yang tidak semata-mata bersifat kognitif, tapi mampu pula menyentuh ranah afektif dan psikomotorik para pembelajar bahasa. Ini diwujudkan dengan keterlibatannya dalam bermain dan mengkreasikan wacana-wacana permainan bahasa.

Menurut dia, keberhasilan sebuah proses belajar mengajar tidak semata-mata ditentukan oleh pengajar yang handal, input yang baik, fasilitas pengajaran yang memadai, tapi pemilihan bahan ajar yang tepat dan berkualitas juga memegang peranan yang cukup dominan. Bahan-bahan ajar yang terseleksi secara baik akan memberikan banyak manfaat.

Manfaat tersebut, antara lain anak didik akan tertarik dan tumbuh minatnya untuk memahami dan menguasai bahan yang diajarkan. Anak didik akan merasakan proses belajar mengajar atau pengalihan ilmu itu sebagai aktivitas yang menyenangkan, bukannya sebagai kegiatan yang menjemukan. ■ bur

R, 24-10-2003

Republika, 24 Oktober 2003

Banyak Media Massa Merusak Bahasa

JAKARTA - Tidak lebih dari 30 persen media massa, baik cetak maupun elektronik yang menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Masih banyak media yang merusak bahasa, salah satu akibat tidak terpenuhinya standar profesi yang dituntut dari seorang wartawan, kata Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Tarman Azzam.

Berbicara pada sesi diskusi dalam Kongres VIII Bahasa Indonesia, Rabu (15/10), di Jakarta, dia berpendapat, "Untuk membuat media sebagai pembelajaran bahasa bagi masyarakat, perlu ada terobosan dari pakar bahasa."

Hadir sebagai pembicara anggota Badan Pertimbangan Bahasa Parni Hadi. Keduanya berbicara dalam konteks peranan media massa dalam meningkatkan mutu bahasa Indonesia.

Menurut Tarman, bila para pakar bahasa mau terlibat aktif mengoreksi media, bukan tidak mungkin media akan lebih memperhatikan penggunaan bahasa. "Kalau ada bahasa yang salah, langsung tunjuk hidung. Sebutkan media mana yang salah, dan mana yang benar. Dengan begitu ada rasa malu bila menggunakan bahasa yang salah," tukasnya.

Dia menjelaskan, bahasa pers bukanlah bahasa lisan dan juga bukan bahasa tulisan. Dan setiap media mempunyai kekhasan tersendiri.

"Bahasa koran, radio dan televisi, semuanya berbeda. Kalau televisi, akan menjadi pemborosan bila menggunakan pengulangan karena mereka menggunakan gambar. Sementara di radio, pengulangan merupakan hal yang wajar karena orang mendengar dan belum tentu mendengar sejak awal. Jadi bahasa yang digunakan media sangat khas, tetapi juga mengikuti aturan yang benar," paparnya.

Sedangkan Parni menyatakan kekecewaannya bahwa pembahasan mengenai bahasa yang digunakan media tidak pernah membawa perubahan.

"Setiap ada kongres bahasa, selalu membicarakan masalah bahasa media. Saya khawatir bila kongres bahasa hanya menjadi proyek, sementara tidak ada sumbangan berarti bagi perkembangan bahasa Indonesia," ucapnya.

Dia menyarankan agar sanksi dalam kesalahan berbahasa harus segera dijalankan. Berdasarkan UU Penyiaran maka berhak ditindak bagi pelanggar bahasa. Tetapi yang menjadi persoalan adalah siapa yang berani dan bisa melaksanakan UU itu.

Terlepas dari persoalan tersebut, Parni mengungkapkan, seringkali bahasa yang baik dan benar sangat kaku. Padahal bahasa media tidak perlu baik dan benar saja, tetapi sekaligus menghibur.

"Bahasa Indonesia yang baik dan benar sangat kaku.

Selain itu seringkali saya melihat Pusat Bahasa terlalu mencari-cari kata yang baku, padahal kata tersebut sudah sering digunakan masyarakat," tuturnya.

Dia mencontohkan kata "diperbalahkan", yang menjadi kata baku dari "diperdebatkan". Padahal selama ini masyarakat sudah terbiasa menggunakan kata "diperdebatkan". Pencarian kata yang mengharuskan mencari padanan dalam bahasa daerah, kemudian negara ASEAN, baru negara lain membuat kata-kata baku tidak populer dan aneh.

Bahasa baku menjadi kaku ketika digunakan juga disampaikan Faizah Sunoto Rivai, pengajar bahasa Indonesia di Italia sejak 1964.

Dia mengungkapkan sering mendapat protes dari mahasiswa.

"Sepulang dari Indonesia mereka protes bahwa tidak ada kata 'tidak' dalam bahasa Indonesia. Kata yang ada adalah 'enggak'. Mereka protes karena dari pejabat hingga masyarakat, semua menggunakan kata 'enggak'," tuturnya. Untuk itu Fauziah mencoba strategi baru dalam mengajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing.

"Saya mengajarkan bahasa Indonesia yang dipakai orang Indonesia sehari-hari, dan juga dalam situasi formal. Dengan begitu mereka tidak menjadi bingung," katanya.

(AS/M-7)

Pers Mempunyai Peranan Besar dalam Pembinaan Bahasa

Jakarta, Pelita

Secara Universal, di negara dan bangsa manapun, peranan pers khususnya media cetak sangat besar dalam pembinaan bahasa. Di Indonesia pun pers merupakan institusi pertama yang sangat terkait pada maju mundurnya penggunaan bahasa dengan kaidah-kaidah yang benar.

Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat H Tarman Azzam mengatakan pada Kongres Bahasa ke-8 di Jakarta, Kamis (16/10). Kualitas pers cetak Indonesia telah sangat maju dibandingkan beberapa tahun lalu. Namun bila dilihat dari segi oplag, ternyata tiras media massa cetak secara nasional relatif tidak bertambah. Malah untuk ukuran surat-kabar harian justeru mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir.

Hal tersebut dikarenakan tumbuh berkembangnya media elektronik radio dan televisi. Masyarakat agaknya lebih suka mendengar dan menonton daripada membaca. "Hal ini terjadi akibat berkembang pesatnya televisi swasta, para *audience* akhirnya lebih menyukai siaran TV karena mengandung banyak sekali informasi dan hiburan, ujar Tarman Azzam.

Dia menambahkan, membaca belum menjadi kebiasaan yang membudaya dalam masyarakat Indonesia. Membaca agaknya pekerjaan yang jauh lebih berat dibandingkan mendengar dan menonton. Ditambah daya beli orang Indonesia relatif masih rendah sedangkan harga buku, koran, majalah dan bacaan lainnya masih relatif mahal.

Belum semua penerbitan pers dikelola secara sungguh-sungguh profesional. Bahkan masih cukup banyak praktisi pers cetak tidak memenuhi standar kompetensi profesi. Hal ini akibat Dewan Pers belum menetapkan standar yang baku atas kompetensi profesi pers dan standar organisasi wartawan yang harus dihormati dan ditaati secara nasional. Sehingga masih banyak para redaktur media cetak menggunakan bahasa Indonesia yang serampangan.

Media cetak lebih memilih bahasa yang mudah dipahami ditambah disiplin ilmiah para praktisi pers bermacam ragam. Kurangnya partisipasi para pakar bahasa dan institusi yang kompeten dalam mengkritisi bahasa media massa cetak. Terakhir kebijakan politik nasional belum membuka peluang yang besar kepada publik untuk menik-

mati bahan bacaan yang bermutu, tersedia luas dan murah meriah.

Namun pada dasarnya menurut Tarman Azzam masih cukup banyak media cetak yang berdisiplin dalam penggunaan bahasa Indonesia secara benar. Malahan beberapa penerbitan pers menyumbangkan halaman mereka secara kontinyu untuk pengembangan dan bimbingan bahasa Indonesia dalam upaya mendidik publik agar terbiasa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Pers juga telah mempopulerkan beberapa kata istilah yang kemudian memperkayakan bahasa Indonesia. Misalnya kata 'Anda' lalu berkembang menjadi kata umum dalam pergaulan dan memenuhi kaidah bahasa Indonesia. Selain itu, pers melakukan prakarsa, kreatifitas dan inovasi dengan mengambil beberapa istilah asing yang di-Indonesia-kan.

Jadi jika pers melakukan tindakan serampangan dalam menggunakan bahasa jurnalistiknya, niscaya hal itu merupakan tindakan yang juga akan merusak kaidah-kaidah bahasa. Tetapi tidak jarang pula inovasi pers itu sekaligus dapat memperkaya bahasa Indonesia. (mth)

Pelita, 17 Oktober 2003

Guru bahasa kurang mahir menulis

JAKARTA — Kemahiran menulis para guru SLTA bidang studi bahasa dan sastra di Indonesia sangat rendah. Kendati mereka lulusan jurusan atau fakultas sastra, tetapi kemampuan untuk menulis dan mengajarkan sastra kepada siswanya sangat minim. Keadaan ini tak lain karena selama ini bobot SKS untuk mata kuliah sastra kecil, hanya 10 SKS dari 150 SKS yang ada.

Karena itu, wajar saja kalau Sastrawan Taufik Ismail merasa prihatin dengan kondisi kemampuan guru bidang studi bahasa di SLTA di hampir seluruh Indonesia. Apalagi, setelah dirinya melakukan penelitian di 12 kota besar di seluruh Indonesia, sebagian besar guru-guru bidang studi bahasa dan sastra kemampuannya menulisnya rendah.

Kegelisahan dan keprihatinan Taufik Ismail tersebut dikemukakan ketika menjelaskan rencana Kongres Bahasa Indonesia VIII, Selasa (7/10), yang dihadiri Kepala Pusat Bahasa Dendy Sugono dan Sesjen Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) Baedhawi. Kongres itu akan berlangsung 14-18 Oktober 2003 bertempat di Hotel Indonesia.

Menurut Taufik, kemampuan guru-guru bidang studi bahasa dan sastra itu bukan hanya rendah untuk menulis, melainkan juga tidak mampu mengajarkan kepada siswanya bagaimana untuk menulis. Padahal, apresiasi siswa SLTA untuk menulis atau

karena itu, sebaiknya pemerintah melakukan regulasi pendidikan guru bidang studi bahasa dan sastra di perguruan tinggi pencetak tenaga kependidikan. Paling tidak, kalau pun porsi sks untuk mata kuliah sastra 10 sks, tapi penekanan kepada mahasiswa untuk menulis harus lebih besar dibandingkan teori sastra.

mengarang sangat besar. Sayangnya, mereka tidak ada pembimbingnya.

"Karena itu, sebaiknya pemerintah melakukan regulasi pendidikan guru bidang studi bahasa dan sastra di perguruan tinggi pencetak tenaga kependidikan. Paling tidak, kalau pun porsi sks untuk mata kuliah sastra 10 sks, tapi penekanan kepada mahasiswa untuk menulis harus lebih besar dibandingkan teori sastra, tegasnya.

Dia yakin kalau itu dilakukan tidak mustahil lulusan LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan) atau PTK yang mencetak calon tenaga kependidikan bidang studi bahasa dan sastra tidak hanya mampu mengajar bahasa dan sastra secara teori, tetapi juga mampu menulis khususnya sastra.

Di sisi lain, Departemen Pendidikan Nasional memiliki kebijakan untuk meningkatkan apresiasi para guru bidang studi bahasa dan sastra SLTA di seluruh Indonesia terhadap

sastra. Depdiknas mulai 1999/2000 lalu membentuk tim khusus yang diketuai Taufik sendiri untuk memberikan pelatihan kepada guru-guru SLTA.

Alhasil, jelas sastrawan tersebut, sedikitnya sudah 1000 guru bidang studi bahasa dan sastra di 12 kota besar di Indonesia sudah dapat menulis. Para guru ini pun sudah mampu memberikan dan mengajarkan kepada siswanya bagaimana menulis. Hasilnya, para siswanya pun menjadi senang menulis atau mengarang.

Keterpurukan kemampuan menulis di kalangan guru dan siswa SLTA tersebut diperparah lagi tandas Taufik dengan langkahnya buku-buku sastra di sekolah. Karena itu, pihaknya meminta Depdiknas untuk mengadakan buku-buku sastra di sekolah. Kalau pun sekarang ini sudah mulai berjalan, tetapi jumlahnya harus diperbanyak lagi. (mya)

Bahasa Indonesia Masuk Pasar Bebas

Dendy Sugono

BAGAIMANA bangsa Indonesia menatap masa depan?

bangun pemekaran pembelajaran- an bahasa Indonesia di seluruh dunia. Sekitar 30 negara di da- lamnya ada sejumlah univer-

stias, bahkan sekolah, yang mempelajari bahasa Indonesia. Kalau kita berbicara tentang kehidupan tahun 2010, siapa- kah pematin peran pada saat itu? Waktu 7 tahun dari sekarang berarti mereka yang kini berada pada pendidikan tinggi itulah yang bakal memainkan peran dalam tatanan kehidupan pasar

jarah yang panjang, apalagi ke- tika itu bahasa-bahasa tersebut didukung oleh kekuatan politik dan kekuasaan di seantero du- nya. Sebenarnya, tidak hanya faktor politik yang mendorong bahasa itu meluas ke seluruh dunia, tetapi juga faktor eko-

nomi. Pada akhir abad ke-20 telah terjadi perkembangan industri dan jasa di Asia sehingga mem- bawa negara-negara itu ke per- mukaan, seperti Jepang, Korea, serta Cina. Apa yang terjadi? Bahasa Jepang, Korea, dan Cina (Mandarin) menjadi ramai di- empuk penduduk besar dunia, empat penduduk besar dunia, merupakan pangsa pasar yang amat "unggul" negara in-

di bidang politik, bangsa kita belum terlalu mendapat perha- tian dalam memainkan peran percaturan politik dunia. Bah- kan, di dalam negeri pun masih terjadi pertikaian kepentingan ada di depan dalam pengem- bangannya ilmu dan teknologi. Ma- ka, kita harus memantapkan

potensi yang kita miliki. Jumlah penduduk besar harus dipan- raih peran pada tatanan ke- hidupan global. Jumlah pendu- duk besar tidak dipandang se- bagai potensi sumber daya ma- nusia kalau mutunya belum mampu bersaing secara global, tetapi dipandang sebagai pen- dukung keanekaragaman bud- aya dan sebagai penuntut bahasa- besar dunia urutan keempat se- telah Cina, Inggris, dan Spa- nyol.

Selain jumlah penuntut ba- hasa Indonesia dapat masuk pa- sar internasional, atas pertim- asan. Kita harus meningkatkan mutu pendidikan. Karena ba- hasa Indonesia menjadi bahasa pengantar, kunci keberhasilan pendidikan terletak pada pe- nguasaan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, pendidikan ba- hasa Indonesia harus ditingkat- kan mutunya. Pendidikan ba- hasa Indonesia harus membawa peserta didik mampu berpikir

dan berkomunikasi dengan ba- hasa Indonesia yang baik. Itu untuk kepentingan penyajian

ATANAN kehidupan bahasa masuk pasar bebas, apa- lagi bahasa Indonesia? Mana yang bisa bersaing dengan bahasa Inggris yang telah masuk pasar bebas, bahkan 2010 telah dimulai bagi negara- negara maju di kawasan Asia Pasifik. Apa yang akan kita per- buat?

Berbicara tentang pasar be- bas, orang akan segera berpikir tentang kemampuan ekonomi kita di tengah-tengah perkem- bangan industri negara-negara maju yang memiliki ekonomi yang lebih mantap. Pemikiran semacam itu akan segera me- lahirkan pandangan bahwa ke- mampuan ekonomi kita tak akan dapat menguasai ekonomi dunia kecuali akan menjadi konsumen bagi negara maju ka- rena jumlah penduduk

Bahasa Jepang, Korea, dan Cina (Mandarin) menjadi ramai di- empuk penduduk besar dunia, merupakan pangsa pasar yang amat "unggul" negara in- dustri maju.

Di bidang politik, bangsa kita belum terlalu mendapat perha- tian dalam memainkan peran percaturan politik dunia. Bah- kan, di dalam negeri pun masih terjadi pertikaian kepentingan ada di depan dalam pengem- bangannya ilmu dan teknologi. Ma- ka, kita harus memantapkan

potensi yang kita miliki. Jumlah penduduk besar harus dipan- raih peran pada tatanan ke- hidupan global. Jumlah pendu- duk besar tidak dipandang se- bagai potensi sumber daya ma- nusia kalau mutunya belum mampu bersaing secara global, tetapi dipandang sebagai pen- dukung keanekaragaman bud- aya dan sebagai penuntut bahasa- besar dunia urutan keempat se- telah Cina, Inggris, dan Spa- nyol.

Selain jumlah penuntut ba- hasa Indonesia dapat masuk pa- sar internasional, atas pertim- asan. Kita harus meningkatkan mutu pendidikan. Karena ba- hasa Indonesia menjadi bahasa pengantar, kunci keberhasilan pendidikan terletak pada pe- nguasaan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, pendidikan ba- hasa Indonesia harus ditingkat- kan mutunya. Pendidikan ba- hasa Indonesia harus membawa peserta didik mampu berpikir

dan berkomunikasi dengan ba- hasa Indonesia yang baik. Itu untuk kepentingan penyajian



AIC

sumber daya manusia Indonesia dalam menghadapi tantangan global.

Untuk perluasan bahasa In-

donesia ke dunia internasional, pengembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa asing tentu terus diupayakan. Penyediaan bahan ajar bahasa Indonesia untuk orang asing, alat tes bahasa Indonesia untuk orang asing, dan hal lain untuk memotivasi dan membantu orang asing yang belajar bahasa Indonesia.

Ihwal bahasa Indonesia untuk orang asing itu akan dibahas dalam Kongres Bahasa Indonesia VIII, 14-17 Oktober 2003, di Hotel Indonesia. Kongres ini adalah forum yang amat strategis untuk mendengar dan

memperbincangkan persoalan kebahasaan, kesastraan, dan media massa secara menyeluruh bertalian dengan masyarakat, bangsa, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Kongres ini akan hadir peserta dari berbagai kelompok dan khalayak dari seluruh Indonesia dan dari luar negeri, mereka akan menentukan perencanaan ke depan tentang bahasa kebangsaan kita.

DENDY SUGONO
Kepala Pusat Bahasa,
Departemen Pendidikan Nasional,
Jakarta

Kompas, 13 Oktober 2003

Penggunaan Bahasa Indonesia Bisa Kurangi Konflik Komunal

JAKARTA, KOMPAS — Penggunaan bahasa Indonesia secara nasional merupakan anugerah bagi bangsa Indonesia. Bangsa ini tidak akan memiliki kesulitan dalam melakukan komunikasi dengan seluruh suku bangsa yang ada. Tidak heran jika penggunaan bahasa Indonesia bisa mengurangi potensi munculnya konflik komunal yang sering kali muncul sebagai akibat kesalahpahaman.

Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Susilo Bambang Yudhoyono dalam Kongres Bahasa Indonesia VIII di Jakarta, Kamis (16/10). Diskusi panel dipandu oleh mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Wardiman Djojonegoro.

"Konflik komunal yang terjadi di Indonesia kondisinya dapat diperburuk jika kita tidak memiliki bahasa Indonesia yang menjadi pemersatu. Karena, pe-

merintah tentunya akan menghadapi banyak kesulitan jika ditambah adanya bahasa yang berbeda," ujar Bambang.

Menurut Bambang, untuk melihat integrasi kebangsaan melalui dukungan bahasa Indonesia dapat dilihat melalui tiga pendekatan. Pertama, melihat pendekatan konsep integrasi. Kedua, adanya konflik jati diri atau identitas. Ketiga, bahasa Indonesia dalam konteks perkembangan kehidupan nasional dan hubungan global.

"Konflik jati diri, misalnya, dilakukan oleh kelompok subnasionalis yang ingin memisahkan diri. Kondisi seperti ini bisa diperburuk juga jika bahasa yang dipakainya berbeda," ujarnya.

Bambang mengakui, ada juga negara yang tidak memiliki bahasa sendiri namun mampu membangun jati diri negaranya, seperti Belgia yang memakai

bahasa Belanda, Perancis, dan Jerman, namun tetap kuat menjadi satu negara. Atau Amerika Serikat yang mampu membangun kebangsaannya meskipun memiliki bahasa yang berbeda-beda.

Terkait dengan proses desentralisasi, Bambang menilai, bahasa Indonesia juga memiliki tantangan. Jangan sampai atas nama hak asasi manusia dan otonomi daerah, daerah-daerah membangkitkan kembali penggunaan bahasa daerahnya untuk menggantikan penggunaan bahasa Indonesia.

"Kalau ini yang terjadi, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan akan menghadapi tantangan yang berat. Memang tidak ada pelarangan untuk menggunakan bahasa daerah. Namun, penggunaan bahasa—termasuk bahasa Indonesia—harus disesuaikan dengan tempat dan waktunya." (MAM)

Tugas Ahli Bahasa Berat

JAKARTA (SP)

Mendiknas Malik Fadjar menegaskan, tugas ahli bahasa dan pendidik terutama guru bahasa ke depan sangat berat dalam membentuk dan mengembangkan peradaban sehingga mampu melahirkan generasi berjiwa kebangsaan yang tinggi.

Demikian pidato Malik Fadjar sebelum menutup Kongres Bahasa Indonesia VIII di Jakarta, Jumat (17/10). Kongres ini berlangsung dari 14-17 Oktober 2003.

"Tantangan paling berat bagi ahli dan guru bahasa adalah bagaimana memasukkan bahasa Indonesia ke dalam jiwa dan sekaligus mewujudkan peradaban kita. Selain itu bagaimana menciptakan bahasa Indonesia yang dapat memuliakan kehidupan. Ini pekerjaan yang tidak mudah," jelasnya.

Oleh karena itu, menurut Malik, ada beberapa langkah yang harus ditempuh oleh para ahli dan guru bahasa secara bersama-sama dalam menjawab tantangan tersebut dan sekaligus menanamkan dan menumbuhkan keaksaraan secara fungsional. Langkah yang dimaksudkan adalah bagaimana menekankan kemampuan komunikasi dengan pendekatan bahasa Indonesia yang bulat, utuh dan padu dalam setiap mata pelajaran, bagaimana memainkan temuan-temuan dari kekayaan bahasa.

Selain itu, bagaimana me-

mainkan peran dalam pemugaran, pemeliharaan dan perbaikan dari bahasa Indonesia sehingga menjadi bahasa yang hidup sebagai ketahanan negara dan sebagainya. "Ini harus terus dicermati oleh para ahli, guru bahasa, pusat bahasa. Sebab masalah ini penting dalam konteks membangun masyarakat dalam menghadapi persaingan di era globalisasi. Karena bahasa Indonesia harus mampu mendukung pertumbuhan sumber daya manusia," katanya.

Dari kongres bahasa Indonesia pada bagian khusus dirumuskan, peranan bahasa Indonesia perlu dimantapkan sehingga tidak saja menjadi alat pemersatu, pembentuk jati diri dan kemandirian bangsa dalam menghadapi budaya global serta wahana komunikasi le- arah kehidupan yang lebih baik dan beradab tetapi juga menjadi salah satu bahasa dunia, setidaknya di kawasan Asia Tenggara. Agar bahasa Indonesia mencapai peran sebagaimana dimaksudkan perlu perencanaan strategis jangka pendek, menengah dan jangka panjang dalam pembinaan dan pengembangan.

Selain itu, pematapan peran bahasa Indonesia memerlukan kerjasama semua kelompok, institusi pemerintah maupun non pemerintah. Dalam pematapan peran bahasa Indonesia perlu didukung Undang-Undang yang mengaturnya. • dry

SP, 18-10-2003

Kemampuan Berbahasa, Kunci Keberhasilan Komunikasi

BERBAHASA Indonesia yang baik, sebenarnya tidak hanya tugas bagi guru Bahasa Indonesia dalam dunia pendidikan. Berbahasa Indonesia yang baik menyentuh semua lini kehidupan, juga berbagai mata pelajaran. Bisa dibayangkan, bagaimana siswa akan bisa menerima materi pelajaran, manakala gurunya kacau berbahasa Indonesia? Kemampuan berbahasa yang baik butuh proses pembelajaran. Kunci keberhasilan menyampaikan materi sebenarnya terletak pada kemampuan berkomunikasi!

Kemampuan berkomunikasi, dalam hal ini dengan bahasa Indonesia sangat penting. Komunikasi tidak akan berjalan dengan baik, tanpa tingkat kebahasaan yang baik pula. Untuk itu, khususnya guru memang harus memilih kata-kata yang tepat, disampaikan secara terstruktur dan harapannya bisa diterima dengan baik.

Dari pengalaman di dunia pengajaran, biasanya materi pelajaran akan gagal diterima siswa manakala, gurunya tidak mampu berbahasa Indonesia dengan baik. Sering muncul keluhan siswa, "Guru sebenarnya pintar, tapi tidak bisa menyampaikan pada siswa," atau

ungkapan, "*Pinter guru dipek dewe, ora iso mulang*," katanya. Ungkapan itu, kalau ditelusur sebenarnya dari kegagalan berkomunikasi dengan siswa.

Kemampuan berbahasa Indonesia yang baik, menurut saya tidak bisa diperoleh seketika, khususnya bahasa Indonesia. Kemampuan berbahasa yang baik, terstruktur, gramatikal haruslah dipelajari. Maka saya merasa senang sekali, dalam Oktober ada kegiatan Bulan Bahasa, dari mulai *story telling*, pidato dengan bahasa Jawa, mengekspresikan dengan Majalah Dinding, baca puisi. Semuanya berkaitan dengan bahasa, baik lisan maupun tertulis. Tidak melulu bahasa Indonesia karena kita punya bahasa ibu, bahasa daerah, serta bahasa internasional bahasa Inggris.

Bahasa satu dengan bahasa lainnya sebenarnya saling berinteraksi dan mengisi. Contoh konkret, kosa kata bahasa Indonesia juga banyak diserap dari bahasa Jawa, bahasa Inggris, serta bahasa lainnya. □ - m

(Dra Sri Hidayati, Guru SLTPN 3 Imogiri Bantul)

Kedaulatan Rakyat, 22 Oktober 2003

BAHASA INDONESIA-KONGRES

Pendidikan & Budaya**KOMENLINGUISTIK****Menyambut Kongres Bahasa Indonesia VIII Tahun 2003**

MENGAPA demikian? Karena surat kabar sering menggunakan ciksi dan tata bahasa yang dianggap tidak baku dan memperkenalkan penggunaan kata, singkatan, dan idiom-idiom baru dari luar khazanah bahasa Indonesia yang baku, yaitu dari bahasa asing atau bahasa daerah.

Sekalipun terdapat silang pendapat tentang peranan pers dalam mengembangkan bahasa Indonesia, tetapi kita seharusnya tidak menutup mata atas peran pers. Kilas balik, bahwa surat kabar pun berperan sebagai media pengembang dan pembinaan bahasa Indonesia. Anggapan ini didasarkan pada kenyataan sejarah bahwa bahasa cepat tumbuh dan berkembang seperti sekarang ini juga berkat media massa melalui tulisan-tulisan para cendekiawan, budayawan, dan pejuang pada zaman dulu.

Fenomena ini akan menjadi tantangan bagi kita bersama, yaitu bagaimana menjadikan media massa (media cetak dan elektronik) untuk saling membantu dan melengkapi dalam pembinaan bahasa Indonesia dan mampu mencapai sasaran efektif tanpa menjadi perusak bahasa. Bagaimanapun kita perlu memperhatikan dan menyikapi dengan positif hal tersebut dalam rangka peningkatan mutu berbahasa Indonesia dan perwujudan mencerdaskan kehidupan bangsa, karena Bahasa Indonesia adalah Milik Kita Bersama dan juga bahasa Indonesia sebagai Cerminan Budaya Bangsa. Mari kita menyambut Bulan Bahasa dan Sastra dalam Kongres Bahasa Indonesia tahun 2003! (Nuraidar Agus, SS, Pegawai Kantor Bahasa Manado)

Komentar, 2 Oktober 2003

Kongres Bahasa VIII Segera Digelar

Jalan MH Thamrin, Warta Kota

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) akan kembali menyelenggarakan Kongres Bahasa Indonesia (KBI). KBI kali ini merupakan KBI ke-8 dan akan berlangsung di Hotel Indonesia (HI), Jalan MH Thamrin, sejak 14 Oktober hingga 17 Oktober 2003.

Kongres yang akan dibuka oleh Presiden Megawati Soekarnoputri di Istana Merdeka pada 14 Oktober ini menurut Kepala Pusat Bahasa Dendy Sugono dalam jumpa pers di HI Selasa siang, akan diikuti 1.000 peserta dari dalam dan luar negeri dan akan menampilkan 181 makalah tentang bahasa dan sastra.

"Para peserta dari Indonesia datang dari seluruh Indonesia dan berasal dari berbagai kalangan yang mewakili dunia pemerintahan, dunia profesi, organisasi, pers, di samping para pakar bahasa dan sastra serta lintas bidang," kata Dendy yang didampingi Sesjen Depdiknas M Baidhowi, sastrawan Taufik Ismail yang mewakili panitia untuk bidang sastra, dan Parni Hadi yang mewakili dunia pers.

Dendy juga menyebutkan bahwa dalam KBI kali ini, media massa memperoleh tempat yang istimewa untuk dibahas dan diperdebatkan kedudukannya sebagai mitra kerja Pusat Bahasa karena pengaruhnya yang begitu besar. "Bagi Pusat Bahasa media massa merupakan mata tombak dalam rangkaian tugas pembinaan bahasa Indonesia yang menjadi tanggung jawabnya," katanya.

Dikatakan pula bahwa KBI VIII ini memiliki kekhasan yakni pejabat yang akan tampil berbicara adalah pejabat yang memiliki kaitan dengan masalah bahasa dan sastra. Mereka antara lain Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono yang akan berbicara mengenai fungsi bahasa dalam konteks kebangsaan dan Menteri Pariwisata dan Kebudayaan I Gde Ardika yang akan berbicara tentang kaitan seni dan sastra dengan dunia pariwisata.

Terkait dengan 181 makalah yang akan ditampilkan Dendy menjelaskan, sebanyak 20 makalah berasal dari para pakar atau akademisi dari luar Indonesia.

"Makalah-makalah yang datang dari luar Indonesia itu antara lain berasal dari Belanda, Jerman, Italia, Jepang, Korea, Amerika Serikat, Australia, dan negara tetangga di ASEAN," katanya.

Menanggapi pertanyaan tentang ada tidaknya rekomendasi kongres, dikatakan bahwa seperti kongres-kongres sebelumnya KBI VIII juga akan membuat rumusan kongres dan rekomendasi yang akan disampaikan kepada pemerintah maupun lembaga dan masyarakat. (wip/dob)

Warta Kota, 8 Oktober 2003

Penerbitan Buku Sastra Tak Diimbangi Oplah

JAKARTA, KOMPAS — Maraknya penerbitan buku-buku sastra belakangan ini menandakan bahwa kegiatan kesusastraan di Tanah Air terus menggeliat. Setiap tahun para pengarang menghasilkan puluhan judul buku baru. Namun, minat beli masyarakat masih belum mampu mendongkrak oplah yang rata-rata 3.000-an untuk setiap judul buku terbaru.

"Oplah tersebut tidak ada bedanya dengan situasi tahun 1940-an ketika penduduk negeri ini masih sekitar 70 juta jiwa. Jika dihubungkan antara jumlah penduduk dengan oplah, maka dengan penduduk 210 juta jiwa sekarang, oplah buku sastra terbaru mestinya mencapai 9.000-an," ujar sastrawan senior Taufiq Ismail dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (7/10), terkait penyelenggaraan Kongres Bahasa Indonesia VIII yang akan digelar di Hotel Indonesia Jakarta, 14-17 Oktober 2003. Taufiq didampingi Kepala Pusat Bahasa Dendy Sugono, anggota Badan Pertimbangan Bahasa Parni Hadi, serta Sekjen Depdiknas Baedhowi.

Menurut Dendy, kongres kali ini akan diikuti sekitar 1.000 pemerhati bahasa dari dalam dan luar negeri, membahas 80 makalah. Topik utamanya adalah peranan sastra dalam pembentukan masyarakat madani serta peran media massa dalam kehidupan berbahasa.

Meski demikian, dia melihat dunia sastra tetap bergairah dengan munculnya novelis-novelis muda, seperti Ayu Utami dan Dewi Lestari. Dunia

sastra tetap menggembirakan meski peminatnya tak mampu mendongkrak oplah," kata Taufiq.

Oplah tak berubah

Secara terpisah Sekjen Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) Pusat Robinson Rusdi menyebutkan, 4-5 tahun terakhir, jumlah oplah buku sastra terbaru memang tidak beranjak dari 3.000-an. Namun, jumlah judul terbaru setiap tahun bisa 70-100. Sebelumnya, jumlah judul sastra tidak sebanyak itu.

Dendy Sugono melihat media massa berperan strategis dalam menyebarkan istilah-istilah baru bahasa Indonesia. Begitu sebuah istilah dimuat di media massa, publik serta merta menirunya. Sayangnya, media massa ikut berperan merusak, terutama melalui ruang iklannya. Karena itu, kreator iklan juga perlu dilibatkan dalam sosialisasi penggunaan kata bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Tentang upaya menerampilkannya siswa berbahasa Indonesia yang baik dan benar, Baedhowi mengatakan, pelajaran mengarang telah dihidupkan lagi, bahkan dalam ujian akhir nasional ada tugas mengarang.

Penjelasan ini sejalan dengan upaya sastrawan, termasuk Taufiq Ismail, membangkitkan semangat cinta sastra di kalangan pelajar. Didukung oleh Depdiknas, sekitar 70 sastrawan dalam 2-3 tahun terakhir mengunjungi lebih dari 200 sekolah di berbagai wilayah Tanah Air. (NAR)

Kongres Bahasa VIII, 14 - 17 Oktober 2003

Kongres Bahasa VIII akan berlangsung 14 - 17 Oktober 2003 di Jakarta. Kongres, menurut Kepala Pusat Bahasa, Dendy Sugondo, akan menampilkan 81 makalah, sekitar 20 di antaranya berasal dari luar negeri. Diikuti sekitar 1.000 peserta, acara ini juga akan dihadiri sejumlah pejabat yang dilihat dari keahliannya, seperti Susilo Bambang Yudoyono dan Mensesneg Bambang Kesono.

Berbeda dengan sebelumnya, kongres kali ini menurut Dendy, memberikan tempat bagi media massa untuk dibahas dalam kedudukannya sebagai mitra kerja Pusat Bahasa. Dia mengatakan, dalam pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia, peran media massa sangat penting. "Kenyataannya, mutu penggunaan bahasa Indonesia dalam media massa sangat bervariasi," tuturnya. "Sebagian media menunjukkan tingkat penggunaan bahasa secara baik dan benar, tetapi sebagian lainnya masih menunjukkan tingkat penggunaan yang belum mencerminkan bahasa yang baik dan benar." ■ bur

Republika, 10 Oktober 2003

Kongres Bahasa sebagai Proyek

SEJAK 1978, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia dan Daerah yang biasa disingkat Pusat Bahasa, setiap lima tahun menyelenggarakan Kongres Bahasa Indonesia (KBI). Kongres itu selalu diselenggarakan di hotel berbintang pada bulan Oktober yang dinobatkan sebagai Bulan Bahasa, karena pada bulan Oktober Sum-pah Pemuda yang menetapkan Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang akan dijunjung para pemuda Indonesia diikrarkan.

Peserta bukan hanya dari seluruh tanah air Indonesia, tetapi juga dari luar negeri. Meski untuk peserta dan pemakalah luar negeri biasanya tidak disediakan biaya oleh panitia, tetapi para pemakalah dari dalam negeri mendapat penggantian ongkos perjalanan. Karena kebanyakan peserta itu PNS, maka dari lembaga tempatnya bekerja mereka niscaya mendapat ongkos jalan, artinya menjadi beban negara juga. Dan peserta kongres biasanya sekitar 1.000 orang. Meski kebanyakan mungkin dari Jakarta, entah berapa biaya yang harus disediakan untuk penggantian ongkos jalan, akomodasi, konsumsi, dan honorarium pemakalah dan moderator. Belum biaya lain-lain.



MENGADAKAN acara dengan melibatkan 1.000 orang merupakan *gawe* besar. Setiap kali lebih dari 100 orang menjadi pemakalah dan moderator. Mereka menulis makalah sesuai tema yang di-

OLEH AJIP ROSIDI

minta panitia. Artinya tiap kali menghadapi kongres, Pusat Bahasa yang menjadi panitia inti harus mencari dan menetapkan tema kongres yang dianggap sesuai kondisi saat itu.

Untuk KBI VIII pada bulan Oktober ini, temanya adalah "Pemberdayaan Bahasa Indonesia Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dalam Era Globalisasi". Adapun pada KBI VII (1998) tema yang dipilih "Pemantapan Peran Bahasa sebagai Sarana Pembangunan Bangsa dalam Era Globalisasi"; KBI VI (1993) bertema "Bahasa Indonesia Menjelang Tahun 2000", dengan subtema "Bahasa Indonesia Merupakan Sarana yang Kokoh dalam Pembangunan Bangsa", "Peningkatan Mutu Bahasa Indonesia Memperlancar Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi", dan "Peningkatan Kemampuan Masyarakat Berbahasa Indonesia Memperkaya Kehidupan Budaya Bangsa". Sedangkan tema KBI V (1988) "Menjunjung Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Persatuan dalam Konteks Pembangunan Nasional" dengan subtema "Peningkatan Mutu dan Peran Bahasa Indonesia Memperlancar Usaha Pencerdasan Bangsa", "Bahasa Indonesia Merupakan Sarana Pemantapan Pembangunan dan Ketahanan Nasional", dan "Kemampuan Berbahasa Indonesia Merupakan Jembatan Menuju Kesejahteraan yang Adil dan Merata", dan seterusnya.

Kalau dicermati, kita akan mendapat kesan, penentuan tema selain berbau slogan juga terlalu dicari-cari sehingga belum tentu makalah yang dibahas dalam KBI itu merupakan masalah nyata yang dihadapi bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa daerah yang ada di Indonesia. Akan tetapi, berbuat seperti itu memang umum pada masa Orde Baru.



MENGATUR waktu agar semua pemakalah bisa menyampaikan makalahnya dalam jumlah hari kongres yang terbatas, niscaya merupakan kesulitan tersendiri. Jalan yang ditempuh, membatasi

waktu pemakalah berbicara. Panitia dengan gesit menyampaikan peringatan kepada pemakalah sebelum berbicara bahwa waktu yang tersedia hanya 15 menit, sedangkan untuk pembahasan hanya disediakan waktu 35 menit.

Apa arti 15-50 menit untuk membahas masalah yang (dianggap) penting sehingga panitia mendatangkan pemakalah dari tempat yang jauh? Jelas, tak ada masalah yang akan terpecahkan dalam waktu begitu sempit. Tetapi mengapa Panitia tidak bertindak bijaksana dengan menyediakan waktu lebih leluasa? Jawabnya satu. Panitia menganggap perlu meminta pemakalah sebanyak mungkin agar kongres pantas dihadiri 1.000 orang sehingga dengan demikian menjadi "wajar" mendapat anggaran yang entah berapa besarnya.

Maklum, saat KBI ditetapkan untuk diselenggarakan setiap lima tahun adalah pada masa Orde Baru yang segala sesuatu dianggap "proyek". Melalui "proyek" itulah para PNS dan militer yang gajinya tidak cukup dapat menambah penghasilan. Dan salah satu ciri "proyek" ialah biaya harus tinggi. "Proyek" yang biayanya sedikit, sulit mendapat persetujuan departemen bersangkutan atau Bappenas, sebab bagian yang akan diperoleh niscaya hanya sedikit pula. Karena itu bila perlu biaya di-*mark-up* supaya semua pihak mendapat bagian yang pantas.



SETELAH reformasi, tampaknya kebiasaan membuat "proyek" tetap berlangsung. Memang, birokrasi Pemerintah Republik Indonesia yang sudah lama busuk karena KKN belum tersentuh reformasi. Para koruptor kakap yang sudah jelas dosanya pun hingga kini tak tersentuh hukum. Atau walaupun hukum mencoba menciduknya, akan dilepas kembali "demi hukum" dengan alasan yang dibuat-buat oleh para penegak hukum, seperti kasus bekas Presiden Soeharto. Padahal selama ini dia tidak juga diadili. Maka koruptor lain baik yang sudah aman karena jadi "mantan" atau pensiun maupun yang masih menduduki jabatan pemerintahan atau jabatan negara, takkan mungkin diadili.

Para pejabat kini merasa lebih leluasa melakukan KKN karena tahu hukum tidak jalan, apalagi mereka yang bertugas membuat undang-undang, karena mendapat kesempatan menyusun undang-undang yang mengesahkan perbuatannya yang merugikan negara. Maklum, semua orang tampaknya menganggap kekayaan negara sebagai harta *gonimah*, harus dibagi-bagi di antara mereka.

Saya berpendapat, KBI yang hendak dijadikan tradisi diselenggarakan lima tahun sekali patut ditinjau kembali manfaatnya. Jangan sampai kongres diadakan semata-mata karena waktunya sudah tiba lalu mencari-cari tema yang bagus untuk dijadikan tema kongres. Tak perlu pula

kongres dihadiri 1.000 orang apalagi bila mereka didatangkan hanya agar kongres tampak ramai dan megah, padahal mereka tak diberi kesempatan menyampaikan pikirannya secara leluasa.

KBI pertama diselenggarakan para pejuang kebangsaan di Solo tahun 1938. Sesudah Republik Indonesia berdiri, KBI kedua diselenggarakan di Medan tahun 1954. Jarak antara keduanya adalah 16 tahun. Kongres berikut diselenggarakan tahun 1978, artinya jaraknya dari yang kedua adalah 24 tahun. Dalam jarak sekian lama, telah timbul permasalahan bahasa Indonesia yang harus dibicarakan bersama dalam kongres sehingga dalam kongres kedua dan ketiga banyak masalah baru yang dibahas.

Namun sejak KBI diselenggarakan setiap lima tahun, tampak sekali tema yang dibicarakan terlalu dicari-cari sehingga KBI selama Orde Baru fungsinya sama dengan pemilu yang disebut waktu itu sebagai "pesta demokrasi", KBI tentu pantas disebut "pesta bahasa".

Mengadakan pesta tentu tak ada salahnya. Tapi dalam keadaan bangsa dan negara terpuruk saat utang bertimbun, mengadakan pesta niscaya tidak pantas. Kalau ada masalah yang harus dibicarakan tentang bahasa Indonesia (dan bahasa daerah), bisa saja diselenggarakan kongres atau apa namanya yang lebih kecil formatnya sehingga biaya yang diperlukan bisa dibatasi.

Pusat Bahasa harus mencermati persoalan bahasa apa yang harus atau perlu dibicarakan bersama dalam sebuah kongres atau apa pun namanya itu. Dan jangan mengada-ada dengan mencari-cari tema umum kongres. Masalah yang dihadapi oleh bahasa Indonesia atau bahasa-bahasa daerah, niscaya bermacam ragam yang tak dapat dicakup dalam sebuah tema. Karena itu kebiasaan menetapkan tema kongres (bukan hanya KBI yang melakukannya) hendaknya ditinggalkan.

Kebiasaan itu mulai muncul pada masa Demokrasi Terpimpin saat Presiden Soekarno menunjukkan kesenangannya terhadap slogan-slogan karena menganggap kesukaran nyata yang dihadapi dalam menyelenggarakan pemerintahan dapat diselesaikan dengan menciptakan slogan yang hebat. Kebiasaan itu diteruskan pada masa Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Setelah reformasi kebiasaan itu seharusnya dihentikan, paling tidak ditinjau dan dipikirkan kembali.

Selama ini Pusat Bahasa ti-

tidak menunjukkan pikiran yang strategis bertalian dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional maupun tentang bahasa-bahasa daerah yang kian merana. Menurut saya, hal itu disebabkan mereka yang duduk di Pusat Bahasa sejak didirikan hanya para ahli bahasa dan sastra, padahal bahasa bukan hanya milik dan urusan mereka saja. Bahasa itu milik masyarakat secara keseluruhan sebagai pengguna bahasa. Dalam masyarakat yang menggunakan bahasa, bukan hanya para ahli bahasa, tetapi juga para ahli bidang-bidang kehidupan lain.

Namun seperti telah saya kemukakan, Pusat Bahasa didirikan dalam masa Orde Baru yang menyerahkan perencanaan dan pengelolaan pembangunan kepada teknokrat yang dipimpin para teknokrat ekonomi. Maka untuk urusan bahasa pun diserahkan kepada para teknokrat bahasa.

Kita saksikan dan alami pembangunan yang diserahkan kepada teknokrat ekonomi berakhir dengan ambruknya perekonomian bangsa dan negara.

Karena itu sebaiknya komposisi kepengurusan Pusat Bahasa segera diubah sehingga yang duduk di sana memperhatikan dan memikirkan pembinaan dan pengembangan bahasa kita bukan hanya teknokrat bahasa, tetapi juga ahli-ahli bidang lain, misalnya ahli ilmu sosial, ahli ilmu politik, ahli filsafat, ahli agama, ahli sejarah, ahli teknologi, dan lain-lain.

Kebiasaan Pusat Bahasa sekarang yang sering dengan pedoman "berbahasa Indonesia yang baik dan benar" menyalah-nyalahkan bahasa yang digunakan dalam masyarakat, hanya menunjukkan arogansi seakan-akan bahasa itu mereka punya dan bahwa mereka adalah polisi yang paling berwenang dalam urusan bahasa. Apalagi karena patokan yang mereka susun tidak konsisten dan sering berubah-ubah, sedangkan contoh yang mereka berikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung banyak kekeliruan yang fatal.

AJIP ROSIDI
Sastrawan

Kompas, 10 Oktober 2003

Bahasa Nasional, Mau Kita Apakan?

Menyambut Kongres Bahasa 2003

Oleh SOENJONO DARDJOWIDJOJO

DARI tiga butir Sumpah Pemuda 1928—Satu Bangsa, Satu Bahasa, dan Satu Tanah Air—yang masih kukuh dipertahankan adalah Satu Bahasa; kedua lainnya mulai digoyang dari Sabang sampai Merauke. Keberhasilan kita memiliki bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional sebagian merupakan hasil perjuangan leluhur yang dapat melihat jauh ke depan arah bangsa ini. Di negara lain yang visinya lebih pendek, bahasa nasional masih belum berfungsi dalam arti sebenarnya. Marilah kita tengok mengapa demikian di negara tetangga kita: India, Filipina, Malaysia, dan Singapura.

East India Act untuk pendidikan India sudah disetujui Parlemen Inggris awal 1813. Tahun 1829, Gubernur Jenderal Inggris di India Lord William Bentinck menyatakan, bahasa Inggris adalah kunci bagi seluruh perbaikan; pendidikan umum dan obat mujarab regenerasi India.

Kepala Pendidikan Inggris di India Thomas Macaulay, tahun 1930-an, bahkan menyatakan, tugasnya untuk "menciptakan suatu kelas masyarakat di India, yang warna kulit dan darahnya India, tetapi selera, pandangan, moral, dan inteleginya Inggris." Didukung para nasionalis awal India seperti Nehru yang mengatakan, *Hindi is the national language, but English will continue as long as the non-Hindi speakers want*, kedudukan Hindi sebagai bahasa nasional belum terwujud, hingga kini!

Kedudukan bahasa nasional Filipina juga tidak jauh berbeda dengan Hindi. Tagalog sebagai bahasa nasional Filipina sebenarnya sudah dimasukkan ke dalam konstitusi oleh nasionalis Emilio Aguinaldo tahun 1897, diperkuat lagi dalam Dewan Konstitusi Filipina 1936. Tahun 1937 Presiden Quezon mengumumkan, Tagalog menjadi dasar bahasa nasional. Tetapi pada 1946, ketika Filipina menyatakan kemerdekaannya, Tagalog hanya dijadikan satu dari dua bahasa resmi negara itu, satunya lagi adalah bahasa Inggris! Kekhawatiran suku non-Tagalog akan dominasi Tagalog membuat Filipina tidak mampu memiliki bahasa nasional dalam arti sesungguhnya.

Malaysia semula juga hampir sama. Ketika mereka memilih lagu kebangsaan, Kongres Asosiasi Melayu tahun 1940 justru mendesak agar bahasa Inggris lebih disebarluaskan. Kini Malaysia lebih maju, apalagi dengan adanya perintah PM Mahathir Mohamad tahun 1990-an untuk lebih banyak memakai bahasa Melayu. Tetapi, kemajuan bahasa Melayu tampaknya telah menjadi bumerang dalam penggunaan bahasa Inggris. Karena itu, tahun 2002, Mahathir banting setir dan mengizinkan bahasa Inggris dipakai lagi sebagai bahasa pengantar di sekolah.

Setelah lepas dari Malaysia, Singapura mengambil sifat lebih pragmatis. Bahasa Melayu memang menjadi bahasa nasional, selain bahasa resmi lain, Tamil, Cina, dan bahasa Inggris. Tetapi, bahasa sehari-hari dan bahasa perdagangan dilaksanakan dalam bahasa Inggris. Dari empat stasiun TV yang ada, yang untuk non-Inggris hanya satu.

Syukur dijajah Belanda

Keadaan itu tidak terlepas dari tipe kolonialisme Inggris (dan AS) yang menurut sejarawan Inggris, Percival Spear, menawarkan dunia Barat ke alam Timur. Ini berbeda dengan pandangan filosofis bangsa Belanda yang cukup puas dengan eksploitasi ekonomi dari rakyat yang dijajahnya. Awal 1890 Kern dan Hurgronje sebenarnya telah mengusulkan pendidikan Barat di Indonesia. Tetapi, usul ini tidak mendapat tanggapan positif dari Pemerintah Hindia Belanda saat itu. Pendidikan SD di Indonesia baru dimulai 1907, SLTP tahun 1917, dan SLTA 1918. Pendidikan tinggi baru dimulai 1920.

Dari segi kemampuan berbahasa Inggris, rakyat India, Filipina, Malaysia, dan Singapura lebih mampu memakai bahasa internasional ini. Mereka lebih dapat menyerap perkembangan ilmu dan teknologi dan merebut pasar kerja kerah putih. Bila kita pergi ke Brunei, Malaysia, dan Singapura, misalnya, TKI kita umumnya menduduki jabatan fiskal (juru masak, pelayan, pembersih), sementara rekan dari Filipina menjadi kasir atau penjaga *front desk* di hotel.

Dari segi bahasa nasional, Indonesia sebenarnya bersyukur dijajah Belanda. Sikap Belanda yang mengabaikan pendidikan bangsa Indonesia tidak menumbuhkan cinta kepada bekas penjajahnya. Di negara-negara bekas Persemakmuran, kota seperti London seolah menjadi kiblat segala kemajuan. Sebaliknya, Indonesia tidak memiliki cinta seperti itu sehingga pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 tidak ada bahasa asing yang menyaingi bahasa Indonesia. Para pelopor nasional dalam Budi Utomo (1908) juga menyadari bahasa pemersatu bangsa bukanlah bahasa Belanda, tetapi bahasa Indonesia.

Lalu, mau kita apakan?

Setelah kini kita memiliki bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, lalu mau

kita apakan? Jawabannya pasti: harus kita kembangkan? Caranya? Di sinilah Indonesia, menurut saya, keliru, selama ini! Setelah Kongres Bahasa yang pertama tahun 1938, Komite Bahasa tahun 40-an menggariskan pengembangan kosakata bahasa Indonesia dengan: (a) mencari kata dari bahasa Indonesia, (b) bila tidak ada, mencari dari bahasa daerah, (c) bila juga tidak ada, mencari dari bahasa di Asia, dan (d) barulah mencari dari bahasa asing, khususnya bahasa Inggris. Alasan yang dikemukakan, bahasa nasional kita tidak boleh "tercemar" bahasa asing/Barat seperti bahasa Inggris.

Kebijakan tahun 1987 juga tidak jauh berbeda arahnya dengan Komite Bahasa tahun 40-an. Bila ada konsep baru yang masuk, urutan pencarian padanannya adalah dengan mencari kata (a) dalam bahasa Indonesia yang lazim dipakai; (b) dalam bahasa Indonesia yang tak lazim dipakai; (c) dalam bahasa serumpun yang lazim dipakai; (d) dalam bahasa serumpun yang tak lazim dipakai, dan barulah; (e) bahasa Inggris atau bahasa asing lain.

Dari dua kebijakan ini tampak bahwa arah pengembangan bahasa nasional kita selama ini bukan menuju ke kancah internasional, tetapi malah menyempit ke dunia sendiri. Sementara itu, arus globalisasi tidak mungkin dibendung lagi. Mungkinkah kita menentang arus dengan mengikuti pandangan salah satu pemuka kita yang menolak kata-kata seperti *metode*, *objektif*, dan *bangkrut* dan menggantinya dengan kata-kata "asli" *padika*, *kepros*, dan *jombrot*.

Menurutnya, orang Indonesia yang tidak mengerti makna kalimat "Jadi bisa saja kita langsung berkata bahwa cell untuk tembok yang terlalu cacil bagi mata lendis itu terlalu sungat..." adalah orang Indonesia yang malas memakai kamus!

Sikap nasionalistik yang sebenarnya *chauvinistic* ini melupakan fakta sejarah dunia. Dua bahasa yang saling bergengolan pastilah akan saling mempengaruhi. Bahkan bahasa internasional seperti bahasa Inggris pun tidak luput dari pengaruh asing: (a) kata serapan ke bahasa Inggris datang dari bahasa Latin awal

(Bersambung ke hal 5 kol 1-5)

KONGRES BAHASA INDONESIA VIII

40 Negara Pelajari Bahasa Indonesia

JAKARTA - Peran Indonesia dalam pergaulan masyarakat internasional menempatkan bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa yang penting untuk dipelajari di banyak negara di dunia, kata Kepala Pusat Bahasa, Dendy Sugono kepada *Pembinaan*, Senin (13/10). Lebih dari 40 negara tertarik mempelajari bahasa Indonesia, antara lain, Australia, Korea, Jepang, Cina, Rusia, Italia, Belanda, Inggris, Jerman, dan Amerika Serikat.

Oleh karena itu, Dendy melanjutkan, pengajaran bahasa Indonesia untuk penutur asing perlu dikembangkan demi perluasan penyebaran penggunaan bahasa Indonesia ke kawasan mancanegara.

Tantangan dan permasalahan yang menyangkut kebahasaan dan kesastraan itulah yang menjadi faktor pendorong perlunya diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia VIII tahun 2003. Kongres itu membahas secara menyeluruh berbagai masalah kebahasaan dan kesastraan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan, serta ketahanan budaya bangsa dalam era globalisasi.

"Dalam perkembangan kehidupan masyarakat Indonesia kini telah terjadi berbagai perubahan, baik sebagai akibat tatanan kehidupan dunia yang baru maupun sebagai akibat tatanan ekonomi dunia baru. Kondisi itu telah

menempatkan bahasa asing pada posisi strategis, yang memungkinkan bahasa itu memasuki berbagai sendi kehidupan bangsa Indonesia," ujar Dendy.

Ia berpendapat, gerakan reformasi yang bergulir sejak 1998 telah mengubah tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tatanan kehidupan yang serba sentralistik telah berubah ke desentralistik, termasuk penataan di bidang kebahasaan dan kesastraan.

Masalah kebahasaan di Indonesia tidak terlepas dari kehidupan masyarakat pendukungnya. Pada masa sebelum kemerdekaan bahasa Indonesia disadari betul sebagai lambang jati diri bangsa dan alat pemersatu berbagai kelompok etnis ke dalam satu kesatuan bangsa.

Ia menambahkan, melalui Sumpah Pemuda 1928, bahasa Indonesia telah diteguhkan sebagai salah satu pilar kebanggaan nasional dalam meraih kedaulatan bangsa. Setelah Proklamasi Kemerdekaan, sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945, Bab XV, Pasal 36, bahasa Indonesia mendapat kedudukan terhormat, yakni sebagai bahasa negara.

"Masalah bahasa dan sastra Indonesia menjadi kewe-

nangan pemerintah pusat, sedangkan masalah bahasa dan sastra daerah menjadi urusan pemerintah daerah," ujarnya.

Selain itu, menurut Dendy, kongres juga merupakan wahana untuk meningkatkan mutu bahasa dan penggunaannya dalam upaya meningkatkan mutu sumber daya manusia Indonesia dan mencerdaskan kehidupan bangsa menuju kehidupan global.

Pokok Bahasan

Tema Kongres Bahasa Indonesia VIII adalah "Pemberdayaan Bahasa Indonesia Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dalam Era Globalisasi". Agenda pembahasannya meliputi soal bahasa, yaitu bagaimana pemertanian peran bahasa Indonesia dalam menghadapi budaya global.

Juga dibahas peningkatan mutu bahasa Indonesia dalam

memanfaatkan perkembangan ilmu dan teknologi informasi, peningkatan mutu penggunaan bahasa Indonesia dalam upaya memantapkan kesadaran berbangsa. Peningkatan mutu pendidikan bahasa Indonesia dalam membangun kehidupan masyarakat madani dan melihat perkembangan pengajaran bahasa Indonesia sebagai bahasa asing (BIPA). Kongres juga berupaya meningkatkan mutu pengajaran bahasa asing di Indonesia, pemantapan peran bahasa daerah dalam memperkuat ketahanan budaya bangsa.

Sedangkan menyangkut sastra antara lain dibahas pemantapan peran sastra Indonesia dalam menghadapi budaya global, peningkatan mutu karya sastra Indonesia dalam kaitannya dengan pemanfaatan ilmu dan teknologi informasi, dan peningkatan apresiasi sastra Indonesia

dalam upaya memantapkan kesadaran bangsa. Peningkatan mutu pendidikan sastra Indonesia dalam membangun kehidupan masyarakat madani, pemantapan peran sastra daerah dalam memperkuat ketahanan budaya bangsa.

Mengenai bahasa media massa, dibahas peran media massa dalam meningkatkan mutu penggunaan bahasa Indonesia dan penyebaran hasil pengembangan bahasa, peran media massa dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penggunaan bahasa Indonesia yang baik, dan membuat peta dampak pemakaian bahasa Indonesia dalam media massa terhadap dunia pendidikan.

Peran media massa dalam memasyarakatkan dan meningkatkan apresiasi sastra, serta peran media massa di daerah dalam memelihara bahasa dan budaya daerah, juga dibahas. (AS/E-5)

Suara Pembaruan, 14 Oktober 2003

Pemakaian Bahasa Asing Makin Kuat

JAKARTA - Dalam lima tahun terakhir terasa kuatnya pemakaian bahasa asing sehingga banyak yang sangsi apakah bahasa Indonesia akan dapat bertahan, kata Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Malik Fadjar.

"Melalui kongres bahasa ini diharapkan dapat melestarikan bahasa Indonesia yang juga merupakan bahasa persatuan," ujar Mendiknas diwakili Dirjen Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Fasli Jalal dalam pembukaan Kongres Bahasa Indonesia VIII, di Jakarta, pagi tadi.

Kongres yang bertemakan "Pemberdayaan Bahasa Indonesia Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dalam Era Globalisasi" itu dibuka oleh Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat Jusuf Kalla.

Menurut Fasli, kongres kali ini merupakan kongres bahasa Indonesia pertama di abad 21. Lebih dari 1.000 orang mengikuti kongres bahasa tersebut. Di forum tersebut juga diberikan penghargaan kepada tokoh dengan bahasa lisan terbaik dan sastrawan.

Mereka yang mendapat penghargaan, yaitu Menteri

Koordinator bidang Politik dan Keamanan Susilo Bambang Yudhoyono, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Yusril Ihza Mahendra, Eep Saefullah Fatah, Nurcholish Madjid, Pradjoto, Duta Besar Inggris untuk Indonesia Richard Gozny, NH Dini, Dorothea Rosa Herliany, dan Oka Rosmini.

Jusuf Kalla saat membuka kongres mengatakan, bangsa ini patut bersyukur telah menemukan bahasa persatuan dan juga bahasa negara. "Banyak negara yang hingga saat ini belum dapat menemukan bahasa negaranya, sementara bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa persatuan sejak tahun 1928. Di era globalisasi ini kita tidak boleh kehilangan jati diri bangsa, dan kebhinekaan sebagai dinamika yang harus dijaga," tegasnya.

Sedangkan Mendiknas diwakili Fasli Jalal mengemukakan, selama ini pengajaran bahasa Indonesia pada hampir semua jenis dan jenjang pendidikan selalu mendapat sebutan mata pelajaran yang membosankan, menakutkan, gersang, dan terlalu teoritis.

(AS/M-7)



KOMPAS/DANU KUSWORO

Kongres Bahasa Indonesia — Sesuai pembukaan Kongres Bahasa Indonesia VIII, Menko Kesra Jusuf Kalla dan Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono terlihat serius mendengarkan penjelasan Kepala Pusat Bahasa Depdiknas Dendy Sugono di Hotel Indonesia, Selasa (14/10).

Menghargai Sastra dan Bahasa Indonesia Lisan

Ketiganya dinilai kreatif dan produktif.

Kreativitas yang terpuji berbuah penghargaan. Itulah yang dirasakan tiga sastrawan Indonesia: NH Dini, Dorothea Rosa Herliany, dan Oka Rusmini. Ketiga sastrawan ini mendapat penghargaan dari Pusat Bahasa atas karya mereka yang dinilai sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia.

Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Jusuf Kalla yang memberikan penghargaan kepada mereka, bersamaan dengan pelaksanaan Kongres Bahasa VIII di Jakarta, kemarin (14/10).

Ketua Bidang Informasi Kongres Bahasa VIII, Zainal Arifin, menyatakan tim juri yang terdiri atas Taufiq Ismail, Sapardi Djoko Damono, Riris Sarumpaet, Abdul Rozak Zeidan sepakat memilih ketiga sastrawan itu sebagai penerima penghargaan sastra dari Pusat Bahasa.

Abdul Rozak Zeidan, menegaskan yang menjadi kriteria penilaian adalah kreativitas, di samping pembaruan karya dan sumbangan mereka terhadap perkembangan sastra.

Terhadap NH Dini, Rozak mengatakan, sumbangan novelis ini dalam perkembangan sastra cukup besar. Bahkan, sampai sekarang mereka masih terus aktif menulis. Tentang tulisan-tulisan NH Dini, Rozak melihat bahwa NH Dini masih memiliki pengungkapan estetika yang bagus.

Tak hanya itu nilai lebih dari novelis ini. Selain daya estetika, menurut Rozak, NH Dini juga dianggap produktif. Dia mengakui, puncak sukses NH Dini, sebenarnya adalah novel *Pada Sebuah Kapal*. Meski demikian, NH Dini ternyata tak berhenti menulis dan terus memproduksi karya-karya sastra baru.

Penghargaan untuk Dorothea diberikan atas puisipuisinya yang dinilai bagus. Selain itu, tim juri melihat bahwa Dorothea mempunyai upaya membangun diri sebagai seorang penyair. "Dia tidak terkungkung sebagaimana seorang perempuan. Dorothea mempunyai keberanian mengungkapkan dengan cara beda dalam karya-karyanya," tuturnya.

Akan halnya dengan Oka Rusmini, penulis novel ini dianggap berkembang sebagai seorang penyair yang mencoba menulis dengan gaya puitik. Dalam novelnya *Tarian Bumi*, kata Rozak, ada suasana pemberontakan terhadap adat, lebih pada pergolakan seorang perempuan dalam konteks tradisi Bali. Novel itu dinilainya

memiliki daya paku cerita yang kuat. Tidak lepas dari keresahan seorang wanita yang harus keluar dari kasta.

Selain ketiga sastrawan, penghargaan juga diberikan kepada enam tokoh yang berbahasa Indonesia lisan terbaik. Keenam tokoh tersebut adalah Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono, Menkeh dan HAM Yusril Ihza Mahendra, Eep Saefulloh Fatah, Nurcholish Madjid, Pradjoto, dan Richard Gozney, Duta Besar Inggris untuk Indonesia. Nama yang disebut terakhir diberikan penghargaan sebagai tokoh asing berbahasa Indonesia terbaik.

Tampil mewakili penerima penghargaan, Susilo Bambang Yudhoyono bertanya, "Apakah tepat dan benar kami berbahasa lisan dengan baik?" Bagi kami, kata dia, tiada hari untuk terus memperbaiki dan menyempurnakan kemampuan bahasa Indonesia. "Karena kami yakin, universitas yang abadi adalah hidup dan kehidupan kita," ujarnya.

Karena itu, menurut dia, jalan yang paling benar adalah adalah terus belajar. Pendidikan berlangsung seumur hidup. Dia juga menganggap penghargaan ini menjadi tantangan berat. "Mudah-mudahan bahasa Indonesia kita makin baik dari hari ke hari," tuturnya.

Sementara Dubes Inggris Richard Gozney berharap ada rumusan bahasa Indonesia lagi yang menyesuaikan

kan perkembangan zaman. Ini terjadi karena banyak bahasa lokal maupun bahasa prokem yang sudah menjadi kosa kata baru dalam bahasa Indonesia. Dicontohkan oleh Richard, kata 'Wartel' (warung telekomunikasi-Red) tidak banyak diketahui oleh orang asing di Indonesia.

Mantan mendiknas Wardiman Djayadinigrat, saat membuka kongres kemarin menilai kendala pengembangan bahasa Indonesia datang dari cara mengajarkan bahasa itu ke masyarakat daerah. Sekitar 70 persen masyarakat Indonesia masih belum mampu menggunakan

bahasa nasional mereka dengan baik. Ini lantaran proses pendidikan bahasa di daerah-daerah masih kurang berjalan lancar. "Sebagian masyarakat kita sendiri ternyata masih menggunakan bahasa daerah," ujarnya.

Padahal bahasa Indonesia ini, katanya, sudah banyak menyebar di 40 negara. Negara-negara tersebut memasukkan bahasa Indonesia menjadi salah satu mata ajaran di beberapa lembaga pendidikan. "Ini menunjukkan perhatian masyarakat internasional terhadap bahasa Indonesia cukup besar." kata Wardiman. ■ bur/cho

Republika, 15 Oktober 2003

Pekerja Asing Wajib Kuasai Bahasa Indonesia

PEKERJA asing yang saat ini berdomisili di Indonesia wajib menguasai bahasa Indonesia. Kewajibannya itu harus tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga siapapun yang melanggar dapat dikenai sanksi.

Dr Ing Wardiman Djojonegoro kepada wartawan di sela-sela Kongres Bahasa VIII di Jakarta, Selasa (14/10) mengemukakan kewajiban kepada warganegara asing agar menguasai bahasa Indonesia itu harus dituangkan dalam konsep aturan dan perundang-undangan. Karenanya, pihak yang berkompeten seperti Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) dan Departemen Perindustrian dan Perdagangan (Depertindag) membahas masalah ini sebelum diberlakukan aturannya.

Tujuannya, kata dia, untuk mencari pemahaman yang bulat soal penggunaan bahasa Indonesia bagi para penutur asing. Selain itu, warga asing 'diwajibkan' menguasai bahasa Indonesia, antara lain untuk menjaga jangan sampai kesempatan dan peluang kerja yang seharusnya milik warganegara Indonesia justru dirampok mereka.

"Kita tidak seharusnya sangat terbuka dalam era globalisasi. Sebaliknya kita harus mempertahankan jati diri bangsa," ujar mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini.

Untuk itu, ia mengharapkan, sebaiknya pemerintah memberikan aturan terhadap para pekerja asing. Sehingga mereka memiliki kemampuan bahasa Indonesia

yang baik dan benar.

Diungkapkan Wardiman, saat ini kemampuan dan tingkat perkembangan bahasa Indonesia yang dipergunakan oleh masyarakat baru 83 persen. Itu sebabnya, penggunaan bahasa Indonesia di jajaran birokrat, pengusaha, dan pelajar belum mencapai standar.

Menurutnya, diperlukan upaya yang lebih keras lagi terhadap semua pihak untuk memasyarakatkan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Sementara itu, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Bahasa Dendy Sugono

mengungkapkan, banyaknya negara yang membuka studi mengenai Indonesia mendorong Panitia Kongres Bahasa Indonesia VIII mengagendakan pembuatan bahan ajar pelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA). Saat ini sudah terdapat 40 negara yang telah memiliki pusat studi tentang Indonesia di perguruan tingginya.

"Para penutur asing itu memiliki kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar," katanya.

Ia menjelaskan, Puslitbang Bahasa Depdiknas juga akan mengembangkan uji kemahiran

berbahasa Indonesia (UKBI). UKBI tidak hanya ditujukan bagi para warganegara asing yang akan bekerja di Indonesia. Bahkan, untuk warganegara Indonesia sendiri.

"Puslitbang Bahasa Depdiknas mengharapkan keberadaan UKBI bisa mengangkat citra bahasa Indonesia di kancah internasional," tandasnya.

Kongres Bahasa Indonesia VIII diikuti sekitar 1.000 peserta, baik dari dalam maupun luar negeri. Kegiatan ini berlangsung mulai 13 hingga 17 Oktober 2003.

© day

Berita Kota, 15 Oktober 2003

Media Indonesia, 15 Oktober



■ PAMERAN BUKU BAHASA: Beberapa peserta Kongres VIII Bahasa Indonesia melihat-lihat buku yang dipamerkan di luar ruang utama kongres di Hotel Indonesia, Jakarta, kemarin. Kongres ini akan berlangsung hingga 17 Oktober 2003.

Media Indonesia, 15 Oktober 2003

Pers Bertanggung Jawab Mendidik Bangsa Berbahasa

SELAIN fungsi kontrol, salah satu fungsi pers adalah mencerdaskan bangsa. Karena itu, pers mempunyai peran penting dalam mendidik bangsa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Akan tetapi, apa betul pers Indonesia telah berbahasa dengan baik dan benar sehingga layak dikatakan sebagai pendidik?

Bahasa yang digunakan pers—atau yang kerap disebut sebagai bahasa jurnalistik—menjadi salah satu bahasan utama yang muncul dalam Kongres Bahasa Indonesia VIII, di Jakarta, 14-17 Oktober 2003. Meski bahasa jurnalistik di Indonesia juga menggunakan bahasa Indonesia, tetapi dalam gaya berbahasa, terdapat banyak perbedaan dengan kaidah bahasa Indonesia yang baku.

Di sinilah permasalahannya. Di satu sisi bahasa jurnalistik tetap bersandar pada bahasa Indonesia, tetapi di sisi lain, seolah terdapat pengingkaran dengan seakan-akan menetapkan kaidahnya sendiri tanpa menghiraukan apa-apa yang telah diatur dalam tatanan bahasa Indonesia.

Akibatnya, dengan pengertian yang simpang siur terhadap apa yang dimaksud dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, Pusat Bahasa dan para pakar bahasa menjadi 'linglung' dalam mengambil sikap terhadap pers. Mereka terus bertanya sendiri apakah bahasa jurnalistik yang digunakan itu merupakan suatu kesalahan yang telah dilakukan pers terhadap bahasa Indonesia atau bukan.

Ketika membawakan makalah tentang bahasa jurnalistik dalam Kongres Bahasa Indonesia, Rabu (15/10), Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Tarman Azam mengatakan dengan tegas bahwa bahasa pers atau bahasa jurnalistik berbeda dengan bahasa Indonesia yang baku.

"Jangankan untuk menyamakan bahasa jurnalistik dengan

bahasa Indonesia yang baku, bahkan antara bahasa jurnalistik televisi, koran, majalah, radio, dan tabloid memiliki bentuk yang berbeda-beda."

Menurutnya, perbedaan itu disebabkan karena bahasa pers mempunyai unsur kedekatan dengan masyarakat. "Bahasa pers mempunyai unsur kedekatan dengan masyarakat. Akibatnya, dalam penggunaan akan kelihatan berbeda dengan bahasa Indonesia yang baku. Di seluruh dunia bahasa pers ini akan berbicara dengan cara yang sama."

Pada kesempatan yang sama, anggota Dewan Pertimbangan Bahasa, Parni Hadi, mengatakan dengan tegas sulit untuk membawa bahasa Indonesia yang baku untuk melakukan penulisan jurnalistik. Bahkan, ia menilai terkadang Pusat Bahasa dan pakar bahasa terlalu berlebihan dalam menegakkan penggunaan bahasa Indonesia kepada pers.

"Pusat Bahasa dan pakar bahasa terkadang berlebihan dalam memberlakukan bahasa Indonesia kepada pers. Saya khawatir jangan-jangan mereka harus mengubah persepsinya tentang bahasa Indonesia yang baik dan benar itu jika berbicara tentang bahasa jurnalistik," tandas Parni pada kesempatan yang sama.

Kurang menarik

Menurut Parni lebih lanjut, bahasa Indonesia yang baku memang kurang menarik untuk digunakan dalam bahasa jurnalistik, terutama televisi.

Tarman Azam mengeluarkan pendapat yang senada. "Sangat sulit untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baku ke dalam bahasa jurnalistik. Meski begitu, secara kaidah yang mendasar seperti tata bahasa dan EYD (Ejaan yang Disempurnakan), bahasa jurnalistik harus tetap berpegang kepada bahasa Indonesia."

Ia menegaskan, di seluruh dunia bahasa jurnalistik memiliki bentuk yang sama. Aspek lugas, tegas, dan mudah dimengerti

masyarakat merupakan parameter utama dalam bahasa jurnalistik. Kemudian, jelas Ketua PWI itu, bahasa resmi suatu negara menjadi rujukan dalam bahasa jurnalistiknya. Dengan menggunakan bahasa negara tersebut kesalahan-kesalahan dalam bahasa jurnalistik dapat ditindaklanjuti.

Ia mengatakan pers, baru dikatakan bersalah dalam berbahasa ketika apa yang dibahasakannya sudah tidak memberikan nilai pendidikan kepada masyarakat, dalam hal ini berhubungan dengan apa yang pantas dan tidak pantas untuk disampaikan.

"Kesalahan berbahasa dalam jurnalistik terjadi jika kaidah bahasa yang normal telah dilanggar. Misalnya, bahasa yang tidak senonoh dan tidak memberikan pendidikan yang baik bagi masyarakat. Jenis bahasa yang semacam itulah yang perlu ditindak," jelas Tarman kepada *Media* usai menyampaikan makalahnya di depan kongres tersebut.

Parni melanjutkan, jika pers melanggar, sanksi harus diberikan. Tetapi, sanksi yang diberikan kepada media elektronik yang melanggar kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, sebagaimana yang diatur Undang-Undang (UU) Penyiaran masih lemah.

"Merujuk pada UU No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, terutama pada Bab IV bagian kedua dalam Pasal 37,38, dan 39, maka sanksi yang diberikan kepada media elektronik yang melakukan pelanggaran penggunaan bahasa Indonesia hanya sebatas sanksi administratif yang sangat sederhana dan tidak spesifik merujuk pada kesalahan yang dilakukan," jelas Parni.

Meski dalam Bab V Pasal 55 tentang sanksi administratif sanksi tersebut dapat berupa pencabutan izin penyiaran, pada praktiknya sanksi hanya dilakukan dengan pembatasan durasi dan waktu siaran.

Undang-Undang Bahasa Perlu untuk Pengembangan dan Pelestarian Bahasa

JAKARTA (Media): Undang-Undang (UU) Bahasa akan menjadi salah satu agenda utama yang dibahas dalam Kongres VIII Bahasa Indonesia, yang berlangsung sejak kemarin hingga 17 Oktober 2003. UU Bahasa dianggap penting untuk mempertegas wewenang Pusat Bahasa dalam upaya pelestarian dan pengembangan bahasa Indonesia.

Selama ini, belum ada UU sebagai pelengkap UUD 1945 yang menaungi upaya pelestarian dan pengembangan bahasa Indonesia. Keberadaan UU Bahasa tersebut bukan untuk memberikan sanksi kepada mereka yang tidak menggunakan bahasa Indonesia dengan baik, namun lebih kepada penegasan tentang bagaimana dan apa yang akan dicapai dalam usaha memberikan ruang kepada bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu.

Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Dendy Sugono, di sela pembukaan Kongres VIII Bahasa Indonesia di Hotel Indonesia, Jakarta, kemarin. Acara yang dihadiri oleh 1.000 perwakilan dari berbagai daerah, lembaga, perguruan tinggi itu, dibuka oleh Menko Kesra Jusuf Kalla yang mewakili Wakil Presiden Hamzah Haz.

Dua agenda utama lainnya adalah rencana untuk melakukan penyerapan kata-kata bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia, dan meningkatkan peran media dalam mensosialisasikan bahasa yang baik melalui pemberitaan, untuk mendidik masyarakat berbahasa dengan baik.

"Dalam Kongres VIII Bahasa Indonesia ini akan dimunculkan pembicaraan serius terhadap perlu-tidaknya UU Bahasa. Se-

bab ketika kita perlu mempersoalkan orang yang menggunakan papan nama dengan menggunakan bahasa Inggris, bahasa Cina, dan lain-lain, kita (Pusat Bahasa) tidak memiliki landasan yuridis untuk itu," kata Dendy.

Padahal, lanjutnya, di dalam UUD 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Ia juga mengatakan dalam penjelasannya disebutkan bahwa pengaturannya akan diatur oleh perundang-undangan.

Selain itu, lembaga yang berwenang untuk masalah bahasa saat ini, jelas Dendy, masih tingkat eselon dua. Hal ini mengakibatkan sering kali Pusat Bahasa seperti tidak punya wewenang untuk melakukan upaya pelurusan pemakaian bahasa Indonesia.

Sementara itu, dalam sambutan tertulisnya, Mendiknas Malik Fadjar mengatakan, sudah saatnya Kongres Bahasa Indonesia diarahkan pada persoalan yang berkaitan tidak hanya dengan substansi kebahasaan saja, melainkan juga dengan aspek lainnya.

"Tema yang ditetapkan oleh Panitia Kongres yang berbunyi *Pemberdayaan Bahasa Indonesia Memberkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dalam Era Globalisasi* sudah tepat, karena yang

dibahas juga masalah ekonomi, sosial, politik, dan budaya yang erat kaitannya dengan kebahasaan itu," kata Malik Fadjar dalam sambutan yang dibacakan oleh Dirjen Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Fasli Djalal.

Kata serapan

Kongres Bahasa kali ini juga membahas kata serapan dalam bahasa Indonesia. Dalam praktiknya nanti, akan dilakukan cetak terbatas terhadap kata serapan yang diambil dari berbagai sumber, baik bahasa asing maupun bahasa daerah, kemudian dibagikan kepada masyarakat untuk diberi penilaian.

Kata serapan ini kelak tidak hanya digunakan oleh Indonesia saja, namun juga akan diadaptasi oleh bahasa Melayu di Malaysia dan Brunei Darussalam. Melalui Majelis Bahasa Brunei, Indonesia, Malaysia, akan dilakukan sidang untuk kata serapan tersebut di Malaysia tahun depan.

"Akan dihasilkan 265.000 istilah yang akan disahkan pada sidang di Malaysia, Maret 2004. Untuk Indonesia, istilah dari kata serapan itu akan digunakan setelah disetujui pada sidang tersebut," jelas Dendy.

Selama ini, tambah Dendy, proses mengadaptasi suatu bahasa asing, yang pertama dilakukan adalah mencari padanannya di dalam bahasa Indonesia. "Jika ternyata tidak ada, maka dicarikan ke dalam bahasa daerah. Apabila bahasa daerah pun tidak memiliki padanannya, maka baru digunakan bahasa asing yang dimodifikasi sehingga bisa dilafalkan sesuai dengan bahasa Indonesia." (TM/Daf/B-3)

Editorial

Mari Kita Rawat Bahasa Indonesia

ENAM tokoh dinobatkan sebagai penutur bahasa Indonesia lisan terbaik. Mereka adalah Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono, Menteri Kehakiman dan HAM Yusril Iha Mahendra, Rektor Universitas Paramadina Nurcholish Madjid, pengamat hukum dan perbankan Pradjoto, pengamat politik Eep Saefulloh Fatah, dan Dubes Inggris untuk Indonesia Richard Gozney.

Adalah Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional bersama tujuh organisasi media massa yang memberikan apresiasi itu. Penghargaan diumumkan pada pembukaan Kongres Bahasa Indonesia VIII di Jakarta, Selasa (14/10). Pemilihan ini menjadi sangat penting karena ada orang asing yang kepandaian berbahasa Indonesia-nya melebihi orang Indonesia pada umumnya.

Richard Gozney memang kita kenal sebagai diplomat asing yang paling populer di Indonesia. Popularitas Gozney tidak semata-mata karena kemampuan diplomasinya, tapi juga karena memang kefasihannya berbahasa Indonesia. Sehingga ia mempunyai lingkup pergaulan yang luas.

Jika kita perhatikan Gozney bicara dengan bahasa Indonesia, ia memang bukan penutur biasa, melainkan sebagai penutur yang telah memahami kode-kode budaya yang dikandung dalam sebuah bahasa. Sebab, selain vokal, penilaian juga meliputi intonasi, diksi, struktur kalimat, penalaran, dan sikap ketika berbicara.

Selain Gozney, kita juga bergembira karena ada dua menteri yang terpilih sebagai penutur bahasa Indonesia terbaik. Ini penting mengingat bahasa Indonesia di kalangan pejabat Indonesia sungguh sangat buruk.

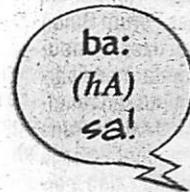
Bahkan, di masa Orde Baru pernah muncul ragam bahasa Indonesia pejabat. Yakni, bahasa Indonesia yang dipakai kalangan pejabat, yang khas karena bahasa yang mereka pakai mengabaikan kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang benar.

Karena itu, mestinya keterampilan dua menteri dalam berbahasa Indonesia bisa menjadi contoh pejabat-pejabat yang lain. Sebab, dalam masyarakat yang paternalistis, apa yang dilakukan para petinggi biasanya diikuti oleh para makmumnya.

Penghargaan itu juga mestinya menyadarkan kita semua bahwa bahasa Indonesia adalah milik bangsa ini yang sangat berharga. Ada benarnya pendapat yang mengatakan ketika unsur-unsur pengikat kita sebagai bangsa Indonesia memudar, satu-satunya milik kita yang masih utuh adalah bahasa Indonesia.

Kita bisa membayangkan betapa bangsa ini tanpa bahasa pemersatu. Sebab, ketika keutuhan Tanah Air mulai terancam dan kebersamaan sebagai bangsa meluruh dengan berbagai kerusuhan sosial, butir Sumpah Pemuda yang tetap abadi memang bahasa Indonesia.

Tetapi, sayangnya, bahasa ini kurang dirawat sebagaimana mestinya. Seolah-olah dianggap sebagai warisan yang datang dari langit. Banyak di antara kita yang tidak punya kebanggaan bicara bahasa Indonesia, yakni merusaknya dengan kata-kata asing. Bahkan, untuk kepentingan komersial, bahasa Indonesia sering terpaksa dikorbankan dan diganti dengan nama asing yang dianggap lebih punya nilai jual.



Bahasa menunjukkan bangsa. Dan, kesadaran seperti itu paling tidak di Asia telah diperlihatkan oleh China dan Jepang. Kita mestinya mengikuti semangat kedua negara itu. Sebab, dalam era global yang bisa 'menyelamatkan' masing-masing bangsa adalah identitas nasionalnya. Dan, bahasa Indonesia adalah salah satu identitas itu. Kita sesungguhnya masih beruntung. Sebab, India, Filipina, dan Singapura telah diterpa krisis identitas lewat bahasa mereka. Karena itu, mari kita rawat bahasa Indonesia dengan sepenuh hati.

Media Indonesia, 16 Oktober 2003

Perlu UU Bahasa untuk Menindak Pelanggaran Bahasa

Bahasa Indonesia Dapat Menghadapi Tantangan Globalisasi

JAKARTA – Perlu ada pa-
yung hukum yang jelas men-
genai kesalahan dalam
penggunaan bahasa Indone-
sia. Begitu banyak istilah
asing yang digunakan di tem-
pat-tempat umum, tanpa
aturan yang jelas. Padahal,
sebagai bahasa negara yang
dicantumkan dalam UUD
1945, sangatlah memungkin-
kan untuk membuat aturan
yang tegas.

Kepala Pusat Bahasa Den-
dy Sugono menyatakan hal
itu di sela-sela Kongres VIII
Bahasa Indonesia yang ber-
langsung di Jakarta, Rabu
(15/10). Menurut Dendy, su-
dah waktunya kita membe-

nah kesalahan dalam meng-
gunakan bahasa Indonesia
yang baik dan benar untuk
segala kesempatan.

"Kita bisa melihat papan
nama di jalan dengan meng-
gunakan bahasa asing, pada-
hal ktia sedang berada di In-
donesia. Tetapi, tidak bisa
menindak," katanya.

Ia meminta UU itu bukan
untuk menindak orang yang
berbicara dengan bahasa
tidak benar, tetapi lebih ditu-
jukan pada hal-hal yang ber-
sifat nasional, seperti dalam
papan nama dan perjanjian
dagang.

Ia berharap sembari me-
nunggu wacana perlunya UU
Bahasa itu muncul, media
massa ikut mengambil pe-
ranan. Pusat Bahasa tidak
mempunyai kemampuan un-
tuk hadir di tengah-tengah
masyarakat dan memberikan
pendidikan bahasa yang be-
nar. Sementara media, de-
ngan kemampuannya hadir

di tengah masyarakat, sangat
dipercaya masyarakat.

"Saya pernah berdebat
mengenai penggunaan ejaan
yang benar hanya karena ma-
syarakat lebih percaya de-
ngan apa yang dituliskan me-
dia dibandingkan Ejaan yang
Disempurnakan (EYD)," ka-
tanya.

Sangat Dinamis

Perlunya media menggu-
nakan bahasa yang benar ju-
ga dicetuskan Dubes Inggris
untuk Indonesia, Richard
Gozney. Ia menyatakan ke-
sulitannya membaca bebera-
pa media massa yang meng-
gunakan bahasa Indonesia
tidak baku. "Kalau membaca
koran tertentu saya harus
banyak membuka kamus.
Dan itu pun sering kali tidak
ada dalam kamus," katanya.

Ia juga mengatakan, ke-
khawatiran akan hilangnya
bahasa Indonesia akibat glo-
balisasi dan masuknya isti-

BAHASA INDONESIA-KONGRES

Pelestarian Bahasa Tak Mesti dengan UU

JAKARTA, KOMPAS — Pengembangan bahasa Indonesia hendaknya sejalan dengan upaya pelestarian bahasa etnik atau bahasa daerah. Bahasa Indonesia dan bahasa etnik saling memperkaya, dan memperkuat identitas bangsa. Namun, upaya pelestarian bahasa tak mesti ditempuh dengan Undang-Undang Bahasa.

Wacana tersebut mengemuka dalam hari kedua Kongres Bahasa Indonesia VIII di Hotel Indonesia, Jakarta, Rabu (15/10). Satu dari lima sesi persidangan kemarin secara khusus membahas peran bahasa dan sastra daerah dalam memperkuat ketahanan budaya bangsa.

Dipandu pakar bahasa, Anton M Moeliono, tampil empat panelis masing-masing. Benyamin Lakitan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Direktur Teknik Ditjen Otonomi Daerah Depdagri Wahyu Najib, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Ambo Enre Abdullah, dan ahli linguistik dari Universitas Sumatera Utara Prof Dr Sibarani MS.

Para pembicara sepakat bahwa era otonomi daerah memberi ruang penguatan lokalitas sebagai jawaban atas derasnya pengaruh globalisasi. Bahasa daerah sebagai bagian dari kekayaan lokal hendaknya dilestarikan sejalan dengan upaya

pelestarian bahasa Indonesia.

Hanya saja, menurut Sibarani, pelestarian bahasa daerah dan bahasa Indonesia tidak mesti ditempuh dengan menerapkan Undang-Undang Bahasa. Lakitan menilai, penerapan kurikulum berbasis kompetensi dalam pengajaran bahasa di sekolah-sekolah pun belum merupakan jaminan lestarnya sebuah bahasa daerah.

"Orang kadang terjebak dengan simplisitas bahwa suatu masalah bisa diselesaikan dengan undang-undang. Padahal, mungkin jauh lebih efektif jika persoalan mendasar yang disentuh," ujar Lakitan.

Gagasan tentang perlunya Undang-Undang Bahasa dimunculkan pakar linguistik, Prof Dr Harimurti Kridalaksana, dalam sesi sebelumnya. Mengacu pada Pasal 32, 36, 36 (c) UUD 1945 (hasil amandemen), Kridalaksana mengingatkan bahwa negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

Agar pasal tersebut operasional, sudah saatnya dipikirkan untuk membuat undang-undang organik tentang bahasa. Alasannya saat ini, apa yang disebut politik nasional itu masih berupa kesepakatan masyarakat dan belum menjadi dokumen formal. (NAR)

Kompas, 16 Oktober 2003

lah asing, tidak perlu terjadi. Bahasa Indonesia sangat dinamis dan mempunyai kemampuan menyerap bahasa asing yang tinggi. Ia mencontohkan istilah krismon, yang merupakan akronim dari krisis moneter. Kedua bahasa asing itu dapat masuk ke dalam bahasa Indonesia dan menjadi sangat Indonesia.

Demikian juga kata warung telekomunikasi, yang disingkat wartel. Ia menilai sungguh luar biasa menggunakan kata warung yang sangat Indonesia dengan telekomunikasi yang berasal dari istilah asing.

"Jadi, saya yakin kalau bahasa Indonesia dapat menghadapi tantangan globalisasi. Saya justru khawatir kalau bahasa daerah yang akan hilang, karena bahasa Indonesia sangat cepat masuk ke dalam setiap lapisan masyarakat. Pada 1970-an saya ke Irian, masih jarang

orang yang dapat menggunakan bahasa Indonesia. Tetapi baru-baru ini saya ke sana, ternyata yang terjadi kebalikannya, sudah jarang orang dapat berbahasa asli daerah," katanya.

Sulit

Menanggapi hal itu, Dedy meyakinkan akan terus berupaya melestarikan bahasa daerah. Pusat Bahasa kini berupaya memasukkan bahasa-bahasa daerah untuk memperkaya bahasa Indonesia. Setiap kata asing yang baru masuk, pertama akan dicari padanannya dalam bahasa daerah. Bila tidak ada, barulah didekatkan dengan bahasa asing.

"Jadi kita tetap mendahulukan bahasa daerah. Hanya untuk bidang informasi teknologi dan ilmu pengetahuan kita menggunakan istilah asing," katanya.

Agenda lain yang ingin

diajukan dalam kongres ini adalah mengenai peranan Pusat Bahasa sendiri. Dengan posisinya yang hanya menjadi bagian kecil dari departemen, sangat sulit bagi Pusat Bahasa untuk mengambil langkah aktif. Ia membandingkan dengan Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia yang mempunyai kewenangan sangat besar.

"Tiga hal strategis dikerjakan oleh mereka. Dari mulai bahasa dan sastra, perbukuan, hingga percetakan. Dengan begitu mereka sangat berperan dalam masalah bahasa dan sastra di negaranya. Sementara kita hanya masalah buku dan sastra, perbukuan dan percetakan diurus payung yang berbeda. Dengan posisi seperti itu, ditunjang dana yang tidak memadai, sulit bagi kami untuk mengambil peranan dalam mengembangkan bahasa dan sastra Indonesia," katanya. (AS/E-5)

Bahasa Indonesia Dapat menjadi Pemersatu Bangsa

JAKARTA (Media): Bahasa Indonesia dapat digunakan sebagai alat pencegah terjadinya konflik jati diri dalam tubuh bangsa Indonesia, seperti yang belakangan ini kerap terjadi. Kesamaan bahasa yang dimiliki seluruh rakyat Indonesia selama ini telah memfungsikan diri dalam menghindarkan perpecahan ketika timbul konflik komunal.

Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Susilo Bambang Yudhoyono, ketika menyampaikan makalahnya yang bertajuk *Bahasa Indonesia sebagai Pemerkuh Persatuan Bangsa dan Kesatuan Negara*, pada Kongres Bahasa Indonesia VIII, di Jakarta, kemarin.

Menurut Susilo, amat penting untuk menjadikan Bahasa Indonesia sebagai tuan rumah di negeri sendiri. Jika hal itu dilakukan, maka intervensi dan masuknya bahasa asing ke Indonesia tidak perlu disikapi sebagai suatu ancaman bagi keberadaan bahasa nasional tersebut.

"Sebagaimana yang terjadi di sejumlah negara seperti Yugoslavia, perbedaan bahasa sering menimbulkan terjadinya konflik komunal antarwarga negara. Karena perbedaan itu pula negara tersebut akhirnya terpecah belah dan tidak bisa dipertahankan untuk terus menjalankan negara secara bersama-sama."

Meski Indonesia memiliki banyak bahasa daerah, namun bukan merupakan ancaman terhadap keberadaan bahasa Indonesia. Jika memang bahasa daerah digunakan sesuai dengan tempat dan waktunya, maka kekayaan budaya itu dapat berjalan ber-

iringan dengan bahasa Indonesia.

"Tidak perlu ada konflik antar-bahasa karena semua itu merupakan bagian dari Indonesia. Yang terpenting, gunakan bahasa daerah pada tempatnya dan gunakan bahasa Indonesia pada kesempatan yang luas ketika banyak orang berbicara dengan bahasa Indonesia," ujarnya.

Pentingnya bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa, lanjut Susilo, mengharuskan bangsa Indonesia untuk meningkatkan eksistensi bahasa Indonesia dalam kehidupan bangsa.

"Kita perlu meletakkan bahasa Indonesia itu dalam 'taman sari'. Taman sari itu kemudian memungkinkan adanya bunga kecil-kecil yang akan memperindah taman itu. Bahasa Indonesia itu harus menjadi tuan rumah di negerinya sendiri," kata Susilo diiringi tepuk tangan hadirin.

Selain ke dalam, Susilo juga meminta masyarakat untuk menduniakan bahasa Indonesia ketika berada di forum internasional atau ketika berbicara dengan menggunakan bahasa asing. Cara itu, menurutnya mampu meningkatkan apresiasi masyarakat asing terhadap bahasa Indonesia.

"Kalau sedang melakukan

pembicaraan dengan orang asing, sering kali saya menyisipkan istilah-istilah umum bahasa Indonesia. Kata-kata, seperti apa kabar, selamat datang, merupakan kata yang dapat dengan mudah mereka kenali. Dengan jalan itu mereka dengan mudah mengenali bahasa Indonesia."

Editorial Media

Sementara itu, editorial harian *Media Indonesia* menjadi salah satu pembahasan dalam Kongres Bahasa. Melalui makalah berjudul *Bahasa Indonesia dalam Editorial Media Indonesia*, ahli bahasa Yusrita Yanti menyatakan, penggunaan bahasa dalam editorial *Media Indonesia* dinilai bisa menjadi bahan pengajaran bahasa Indonesia di sekolah maupun perguruan tinggi, karena memiliki kekayaan kosakata dan penggunaan bahasa yang lugas.

Ia menilai, kekayaan kosakata itu berasal dari pilihan kata yang tepat dan beragam, sehingga terbentuk tekstur yang cukup unik karena ingin menciptakan suatu tekstur tersendiri bagi pembaca. Keunikan itu menciptakan tautan pikiran pembaca pada suatu peristiwa dan kondisi tertentu.

"Penulis editorial dapat dikatakan mampu mengekspresikan ungkapan perasaan yang sedang dialami masyarakat Indonesia. Penataan kosakatanya diperluas menurut sinonim kata, makna konotasi, dan majasi, sehingga melahirkan bahasa Indonesia yang memesonakan, yang membuat pembaca berkeinginan untuk menelusuri tulisan itu lebih lanjut," tuturnya. (TM/Daf/B-3)

SOAL USULAN UU BAHASA

Sosialisasi Pedoman Bahasa Lebih Penting

JAKARTA - Poin penting yang perlu dilakukan untuk membuat orang berbahasa Indonesia dengan baik dan benar bukanlah payung hukum atau undang-undang. Sosialisasi pedoman dan metode pengajaran yang baik lebih penting untuk dilakukan.

Guru Besar Universitas Indonesia (UI) Harkristuti Harkrisnowo menyatakan hal itu ketika ditemui di Kongres Bahasa Indonesia (KBI) VIII yang berlangsung di Jakarta, Kamis (16/10). Harkristuti mengatakan, pedoman seperti Ejaan yang Disempurnakan (EYD) harus terus dikomunikasikan agar orang mengerti berbahasa yang baik dan benar.

"Saya tidak melihat pentingnya kita membuat UU mengenai pelanggaran berbahasa. Saya cenderung mengatakan, yang kita butuhkan adalah pedoman," katanya.

Bila mengacu pada UU, kesan yang muncul adalah kewajiban yang harus dilaksanakan. Selain itu UU umumnya memuat sanksi bagi pelanggarnya. Dengan begitu, bahasa yang menjadi alat komunikasi sehari-hari akan membuat orang makin sulit bergerak.

Sanksi Administratif

Pada kesempatan berbeda, kedua pembicara lainnya di KBI, yaitu Guru Besar Emeritus Universitas Gadjah Mada (UGM) Koesnadi Hardiasoemantri dan Rektor

Universitas Kristen (Unika) Atmajaya Harimurti Kridalaksana, sepakat menyatakan sanksi yang diperlukan bagi pelanggaran bahasa adalah sanksi administratif.

Koesnadi mencontohkan, bahasa yang salah akan banyak ditiru jika kesalahan itu dilakukan pejabat. Bawahan pejabat bersangkutan, hampir dapat dipastikan akan langsung mengikuti. "Media massa, baik media cetak maupun elektronik, jarang menyoroti penggunaan bahasa pejabat, sehingga kesalahan terus berlanjut. Jadi, kita tidak mempunyai mekanisme kontrol di sini," katanya.

Pemberian sanksi administratif, akan sangat efektif bila dikaitkan dengan kenaikan pangkat. Pejabat yang berbahasa Indonesia dengan baik dan benar akan mendapat nilai positif, sementara yang buruk akan mendapat nilai negatif.

"Cara penilaian meliputi penuturan maupun penulisan, dan disusun oleh Pusat Bahasa, kemudian diajukan ke Badan Kepegawaian Negara untuk dimasukkan ke dalam sistem jenjang kepegabatan," katanya.

Harimurti membagi kesalahan berbahasa menjadi dua ranah berbeda. Pertama, ranah privat bahasa, di mana tanggung jawab ada pada pendidikan keluarga dan pendidikan sekolah. Kebiasaan santun berbahasa atau tertib ber-

bahasa tulis, berada pada ranah itu dan sanksinya berupa sanksi keluarga dan sanksi edukatif.

Sementara bidang-bidang seperti kewajiban membina bahasa daerah, kewajiban mengembangkan sastra, penggunaan bahasa nasional atau asing dalam dunia diplomatik, kewajiban menggunakan bahasa baku dalam komunikasi resmi adalah ranah publik yang sanksinya bersifat administratif. Pembagian sanksi seperti itu lebih efektif dibandingkan hanya mementingkan sanksi yuridis.

Untuk mencegah munculnya kesalahan berbahasa sembari menunggu aturan, Koesnadi menawarkan dua cara. Pertama, cara preventif, dan kedua adalah cara kuratif. Cara preventif terkait dengan upaya memperkuat kemampuan bahasa yang baik dan benar melalui lembaga pendidikan. Sementara cara kuratif adalah memberikan koreksi pada tulisan pejabat yang bersangkutan, baik yang berupa laporan, sambutan, maupun makalah.

"Koreksi ini dapat dilakukan oleh tim khusus yang diadakan oleh lembaga pemerintahan yang bersangkutan. Dengan demikian tulisan tersebut telah memenuhi kaidah bahasa Indonesia dan dapat menjadi contoh," katanya. (AS/A-18)

Mendiknas: Sudah Cukup Kuat Peraturan Mengenai Bahasa

Perlunya UU Bahasa Selalu Muncul dalam Setiap Pertemuan Pakar Bahasa

JAKARTA - Bahasa Indonesia sudah dicantumkan dalam UUD 1945 dan selalu ada dalam perjalanan sejarah bangsa sehingga tidak perlu lagi ditegaskan dalam bentuk UU Bahasa. Peraturan yang ada sudah lebih dari cukup untuk menjamin terpeliharanya bahasa tersebut.

Menteri Pendidikan Nasional A Malik Fadjar menyampaikan hal tersebut usai menutup Kongres Bahasa Indonesia (KBI) VIII yang berlangsung di Jakarta, Jumat (17/10). Menurut Malik, bahasa sebagai bagian penting dari kehidupan tidak perlu lagi diatur dalam sebuah peraturan.

"Saya tidak melihat UU Bahasa sebagai hal penting yang harus dibuat. Bahasa Indonesia sudah ditetapkan sejak tahun 1928, kemudian masuk dalam UUD 1945. Sudah

hebat sekali peraturannya, jadi buat apa UU?" katanya.

Dia melihat hal yang seharusnya dicermati adalah bagaimana mengajarkan bahasa dan sastra di dunia pendidikan. Selama ini pelajaran tersebut tidak pernah mendapat tempat di hati para peserta didik. Beberapa langkah yang harus dicermati adalah bagaimana menanamkan dan menumbuhkan keberaksaraan fungsional, dan meningkatkan kemampuan berkomunikasi yang baik.

Juga bagaimana memainkan peranan terhadap pemeliharaan terhadap temuan-temuan kekayaan bangsa. "Inilah yang harus terus-menerus dicermati oleh para guru, pakar dan Pusat Bahasa," ujarnya.

Tuntutan

Sementara itu, Kepala Pusat Bahasa Dendy Sugono menyatakan, tuntutan adanya UU Bahasa muncul dari masyarakat. Ada kegelisahan melihat kondisi kita seperti sekarang ini. Banyak sekali terjadi kesalahan dalam menggunakan bahasa di wilayah publik, malahan mulai dilupa-

kan. Banyak papan nama yang tidak menggunakan bahasa Indonesia, padahal kita ada di Indonesia. "Juga bahasa mana yang harus digunakan ketika kita melakukan perjanjian dagang atau perjanjian di dunia internasional, tidak pernah dijelaskan harus memakai bahasa apa," katanya.

Hal itu harus ditetapkan dalam sebuah UU sehingga dapat menjadi landasan bagi terpeliharanya bahasa Indonesia. Terutama menjelang diberlakukannya pasar bebas, peraturan yang jelas mengenai bahasa mutlak diperlukan.

Proses yang ditempuh untuk memunculkan UU itu, diakui Dendy, masih panjang. Setelah KBI menghasilkan usulan perlunya UU Bahasa, Badan Pertimbangan Bahasa perlu mencari masukan apakah UU tersebut memang diperlukan masyarakat. Diperlukan waktu panjang untuk menyusun UU, terlebih UU yang sangat jauh dari perhatian publik. "Ini bukan UU politik ataupun ekonomi sehingga mungkin tidak begitu diperhatikan. Kami berharap paling tidak UU itu dapat mu-

lai berlaku saat pasar bebas dibuka, tahun 2010," katanya.

Menurut Ketua Tim Perumus KBI VIII, Abdul Wahab, usulan mengenai perlunya UU Bahasa selalu muncul dalam setiap pertemuan para pakar bahasa. Hal itu merupakan wujud dari keprihatinan mereka terhadap kondisi bahasa Indonesia. "Begitu banyak pelanggaran bahasa yang dilakukan tanpa ada sanksi yang jelas. Dan jangan dianggap bahwa UU Bahasa akan mengatur orang berbahasa dalam kehidupan sehari-hari, tetapi lebih ke wilayah formal dan pengembangan sastra," katanya.

UU itu lebih mengatur ke-

tertiban bahasa di wilayah publik. Juga untuk menjaga kelestarian bahasa daerah yang sekarang makin terlupakan. Padahal pengembangan bahasa daerah harus terus dilakukan.

Dalam kesempatan yang sama, Rektor Universitas Katolik (Unika) Atma Jaya Hari-murti Kridalaksana menyatakan, sudah waktunya Indonesia memiliki UU Bahasa. Negara-negara Eropa mempunyai perhatian serius terhadap perkembangan bahasa di negaranya, termasuk bahasa asli penduduk setempat.

"Seperti Swiss, mereka mempunyai aturan yang jelas mengenai pelestarian bahasa asli. Kemudian Amerika Serikat, malahan UU Bahasa ada hingga di tingkat negara bagian," katanya. (AS/A-7)

Suara Pembaruan, 18 Oktober 2003

Tidak perlu ada UU Bahasa

JAKARTA -- Banyak kesalahan dalam penggunaan bahasa Indonesia di masyarakat saat ini yang terabaikan. Apalagi ketika kita melakukan perjanjian dengan pihak asing umumnya tidak dijelaskan bahasa apa yang digunakan. Berbagai persoalan itulah yang di antaranya menjadi keprihatinan peserta Kongres Bahasa Indonesia VIII sehingga mereka mendesak perlunya Undang-Undang Bahasa.

Mendiknas A Malik Fajar saat ditanya mengenai hal itu se usai menutup Kongres Bahasa Indonesia VIII, kemarin, menegaskan bahasa sebagai bagian penting dari kehidupan tidak perlu lagi diatur dalam sebuah peraturan, apalagi harus dibuat Undang-Undang yang mengatur bahasa Indonesia.

"Saya tidak melihat UU Bahasa sebagai hal penting yang harus dibuat. Bahasa Indonesia sudah ditetapkan sejak tahun 1928, kemudian masuk dalam UUD 1945. Sudah hebat sekali peraturannya, jadi buat apa UU," katanya. Malik mengingatkan hal yang seharusnya dicermati adalah bagaimana mengajarkan bahasa dan sastra di dunia pendidikan. Selama ini pelajaran tersebut tidak pernah mendapat tempat di hati para peserta didik.

Beberapa langkah yang harus dicermati adalah bagaimana menanamkan dan menumbuhkan keberaksaraan fungsional dan meningkatkan kemampuan berkomunikasi yang baik. Di samping itu, tandasnya, bagaimana memainkan peranan terhadap pemeliharaan terhadap temuan-temuan kekayaan bangsa. Hal seperti inilah yang harus terus menerus dicermati oleh para guru, pakar dan Pusat Bahasa.

Kepala Pusat Bahasa Dendy Sugono menyatakan tuntutan adanya UU Bahasa muncul dari masyarakat. Ini karena ada kegelisahan mereka melihat kondisi bahasa Indonesia sekarang ini. Banyak sekali terjadi kesalahan dalam menggunakan bahasa di masyarakat yang mulai dilupakan. Banyak papan nama yang tidak menggunakan bahasa

Indonesia, padahal kita ada di Indonesia.

Hal seperti itu, kata Dendy, harus ditetapkan dalam sebuah UU sehingga dapat menjadi landasan bagi terpeliharanya bahasa Indonesia. Terutama menjelang diberlakukannya pasar bebas, peraturan yang jelas mengenai bahasa mutlak diperlukan.

Dia mengatakan KBI menghasilkan usulan perlunya UU Bahasa, Badan Pertimbangan Bahasa perlu mencari masukan apakah UU tersebut memang diperlukan masyarakat. Diperlukan waktu panjang untuk menyusun UU, terlebih UU yang sangat jauh dari perhatian publik.

"Ini bukan UU politik ataupun ekonomi sehingga mungkin tidak begitu diperhatikan. Kami berharap paling tidak UU itu dapat mulai berlaku saat pasar bebas dibuka tahun 2010," katanya.

Ketua Tim Perumus KBI VIII, Abdul Wahab, menyatakan usulan mengenai perlunya UU Bahasa selalu muncul dalam setiap pertemuan para pakar bahasa. Hal itu merupakan wujud dari keprihatinan mereka terhadap kondisi bahasa Indonesia. Sebab, banyak pelanggaran bahasa yang dilakukan tanpa ada sanksi yang jelas.

Namun demikian, UU Bahasa jangan dianggap akan mengatur orang berbahasa dalam kehidupan sehari-hari, tetapi lebih ke wilayah formal dan pengembangan sastra. UU itu lebih mengatur ketertiban bahasa di wilayah publik. Juga untuk menjaga kelestarian bahasa daerah yang sekarang makin terlupakan. Padahal pengembangan bahasa daerah harus terus dilakukan.

Pakar Bahasa dan Fakultas Sastra Universitas Indonesia yang juga Rektor Universitas Katolik (Unika) Atma Jaya Prof. Dr. Harimurti Kridalaksana menyatakan sudah waktunya Indonesia memiliki UU Bahasa. Negara-negara Eropa mempunyai perhatian serius terhadap perkembangan bahasa di negaranya, termasuk bahasa asli penduduk setempat. (mya)

H. ROSIHAN ANWAR

Kongres Bahasa VIII,

Bila Kongres Bahasa Indonesia diselenggarakan saya selalu diundang sebagai peserta atau pemakalah. Misalnya, pada Kongres Bahasa tahun 1978 saya menyajikan kertas dengan topik: Peran media massa dalam pertumbuhan bahasa Indonesia. Atau sebagai peserta saya aktif dalam diskusi. Di Kongres Bahasa pada sebuah sidang, teman saya Dr. Sudjoko dari ITB Bandung meminta agar dalam mencari istilah baru jangan lekas berpaling kepada bahasa Inggris, tetapi galilah dari perbendaharaan bahasa-bahasa daerah. Ketika dia menyebutkan beberapa istilah sebagai contoh saya interupsi, lalu mengusulkan agar dicantumkan pula kata dari bahasa Minang yaitu "kanciang". Kontan Dr. Sudjoko menyambut baik dan berucap pula "kanciang". Selebihnya saya tidak mengikuti diapakannya istilah itu.

Bila dulu setia datang di tiap Kongres Bahasa, sekali ini pada Kongres Bahasa Indonesia VIII (14-17 Oktober) di Hotel Indonesia, Jakarta, saya sama sekali absen, karena tidak diundang oleh panitia penyelenggara.

Alasannya tidak jelas. Mungkin karena sudah berusia tua. Beberapa waktu yang lalu saya ditanya secara tertulis apakah bersedia menjadi anggota Badan Pertimbangan Bahasa? Saya jawab bersedia. Tapi kemudian nama saya digugurkan dari daftar. Menteri Pendidikan berpendapat lebih baik cari orang lain yang lebih muda. Maka saya urung jadi anggota Badan Pertimbangan Bahasa kendati sudah menandatangani formulir setuju diangkat. Mengingat latar belakang tadi saya mengerti dan terima keadaan tidak diundang ke

Kongres Bahasa Indonesia. Kalau sudah tua tidak lagi masuk hitungan.

Dendy Sugono Kepala Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional menulis dalam *Kompas* (13-10) bahwa para peserta kongres ini "akan menentukan perencanaan ke depan tentang bahasa kebangsaan kita". Karena tidak mengikuti pembicaraan dalam kongres saya tidak punya bayangan mengenai rencana yang dimaksud. Dalam pada itu sebelum Kongres Bahasa dimulai, harian *Kompas* menyelenggarakan diskusi panel bertopik "Bahasa Indonesia dalam bahaya". Menurut pengamatannya, hegemoni bahasa Inggris mempunyai cengkeraman kuat yang membuat bahasa Indonesia yang dipakai di koran, radio dan televisi menjadi "bahasa Indo, bahasa belang bonteng yang tidak lagi dapat dikenali." Prof. Dr. Sudjoko yang pensiunan, tapi masih dipakai sebagai pakar bahasa mengunjuk kepada situasi koran yang "membetawi", banyak sekali kata yang berakhiran *-in* di situ. Saya juga mengamati gejala "membetawi" pada sementara koran. *Rakyat Merdeka* suka sekali dalam judul beritanya memakai logat Betawi. Itu juga termasuk bahasa belang bonteng. Tetapi seorang remaja mengoreksi saya "Bukan begitu, Pak, itu bahasa gaul namanya".



Cek dan Ricek No.269. 27 Oktober 2003

Gereja dan Bahasa Indonesia

Persatuan bangsa yang menjadi cita-cita dan kerinduan para pendiri negara kita, sering kali dipandang hanya dari satu segi, tidak dilihat secara holistik dan komprehensif. Pertentangan antar-suku, agama, ras dan golongan acap dianggap sebagai satu-satunya persoalan yang sangat krusial yang bisa memicu disintegrasikan bangsa. Padahal soal persatuan bangsa turut ditentukan juga oleh adanya bahasa nasional, yang menjadi bahasa persatuan di suatu negara.

Bagi masyarakat Indonesia, adanya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional sangat penting. Persatuan bangsa memang terus-menerus perlu dijaga, dipelihara dan dilestarikan, justru dalam konteks masyarakat Indonesia yang serbamacam. Salah satu sarana untuk pelestarian persatuan itu adalah bahasa Indonesia.

Dengan demikian, penyadaran untuk menggunakan serta menguasai bahasa nasional menjadi hal yang sangat penting, mendasar dan strategis. Dalam sebuah tulisan di tahun 1966 Prof. Dr. Ihromi, M.A. ahli bahasa Semit Universitas Indonesia dan pernah mengajar di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta menyatakan, bahasa Indonesia memainkan peranan yang sangat penting dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Menurut Dr. Ihromi, kesadaran tentang pentingnya peranan bahasa nasional lebih ditimbulkan lagi oleh penghargaan dari luar; terutama sekali melalui percakapan de-



WEINATA SAIRIN

ngan tokoh Gereja Sri Lanka. Tokoh Sri Lanka itu dalam percakapan dengan Dr. Ihromi mengagumi peranan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan mengkhawatirkan adanya pertentangan-pertentangan mengenai bahasa dan tulisan di Sri Lanka antara orang-orang yang berbahasa Singal dan Tamil.

Pemersatu

Dalam Kongres Bahasa Indonesia yang berlangsung di Jakarta tanggal 14 - 17 Oktober 2003 semangat para peserta untuk memahami bahasa Indonesia sebagai pemersatu bangsa benar-benar hidup dan mewarnai suasana kongres. Itulah sebabnya ketika seorang penceramah menyatakan agar bahasa daerah bisa juga digunakan dalam forum-forum peradilan misalnya, agar proses peradilan dapat lebih dipahami oleh penutur bahasa daerah tersebut, peserta dari *floor* dengan tegas menolak hal itu. Ia menyadarkan penceramah bahwa dalam konteks seperti itu, bahasa daerah bisa menjadi elemen yang merusak persatuan bangsa.

Dalam kongres

itu Menteri Pendidikan Nasional menegaskan bahwa bahasa Indonesia ada-

lah bahasa nasional yang sekaligus juga bahasa negara, sebab itu setiap orang dituntut untuk menguasai bahasa Indonesia agar ia dapat menjalankan kewajibannya dengan sebaik-baiknya. Bahasa asing memang perlu di era globalisasi, tetapi sejalan dengan itu, kata Menteri, kita harus menanamkan kecintaan, kebanggaan dan kesetiaan kita terhadap bahasa nasional dan bahasa daerah. Hubungan timbal balik antara bahasa asing, nasional dan daerah perlu diatur sehingga terjadi keseimbangan dan keharmonisan dalam pengajaran dan pemakaiannya.

Wacana yang berkembang dalam Kongres Bahasa selain pemikiran-pemikiran bagaimana pengajaran bahasa dan sastra dilakukan lebih baik di lembaga-lembaga pendidikan, adalah juga perlunya ada ketentuan perundangan yang mengatur tentang kebahasaan.

Pemikiran tentang undang-undang kebahasaan ini telah muncul sejak Kongres Bahasa 5 tahun yang lalu mengingat makin parahnya penggunaan bahasa Indonesia di masyarakat, termasuk yang dilakukan oleh para pemimpin.

Undang-undang tentang bahasa merupakan tindak lanjut dari rumusan pasal 36 C UUD 1945 yang berbunyi: "Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan diatur dengan undang-undang".

Suara Pembreuan, 25 Oktober 2003

PENULIS ADALAH TEOLOG,
SEKRETARIS UMUM MAJELIS
PENDIDIKAN KRISTEN (MPK)
DI INDONESIA.

Indonesia. Penerjemahan ini menggunakan *Good News Arabic*. Lembaga Alkitab Libanon 1997 dimaksudkan sebagai upaya mengkapl para mahasiswa teologi dalam studi mereka. Bahasa adalah cerminkan budaya bangsa, pemaknaan bahasa Indonesia secara baik dan benar seharusnya adalah bagian dari rasa bangga sebagai bangsa.

Namun kondisi realistik yang kita temui dalam pengalamannya masih perlu dipacu; tak jarang ada yang merasa rendah diri jika menggunakan bahasa Kristen Indonesia. Gereja dan umat Kristen Indonesia dapat memainkan peran signifikan dalam upaya mendorong masyarakat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. ♦

Selain memang ada tahap ideal diatas.

yang dapat dikatakan sebagai salah satu lembaga kristiani Indonesia yang baik dan benar. Lembaga Alkitab Indonesia menggunakan bahasa tulis yang dikeluarkan gereja-nesia; dokumen-dokumen ter-dengan Kamus Bahasa Indonesia; para pendeta dilengkapibahasa baru para pejabat bisa melakukan pelatihan ke-Gereja/lembaga kristiani dan benar.

an bahasa Indonesia yang baik atau dalam rangka pengguna-pelestarian bahasa Indonesia

Kesalahan penggunaan bahasa Indonesia terjadi hampir setiap saat, di setiap tempat di semua aras dan oleh setiap orang. Cobalah simak pembacaan berita pada televisi, begitutu sering terjadi kesalahan dan atau kerancuan dalam pengunaan bahasa Indonesia. Cobalah dengarkan pidato-pidato dan juga kotbah-kotbah di gereja: berapa banyak kesalahannya yang terjadi di sana, cobalah cermati ungkapan protokol/pembawa acara di suatu pesta atau di suatu acara gereja. Kerancuan penyebutan istilah/kata terjadi al pada kata: "identitas" (sering disebut "plaket" (sering identitas), "faksi" sering disebut plakat), "faksi" sering dikacaukan dengan fraksi.

Kekacauan penggunaan bahasa Ibrani dan Yunani ke bahasa Indonesia, penerjemahan Alkitab bahasa Indonesia telah menyelenggarakan ke-
Penerjemahan Alkitab dari daerah bahkan bahasa-bahasa asing.

Pada awal bulan ini LAI telah menyelenggarakan konferensi syukur berkenaan dengan terbitnya Alkitab dwibahasa: bahasa Arab dan

pelestarian bahasa Indonesia yang baik dan benar. Gereja, umat Kristen dan lembaga-lembaga kristiani bisa berperan banyak dalam rangka

yang saya kasih";
harusnya "Saudara-saudara saudara yang terkasih" sedangkan mengatakan "Saudara-saudara yang terkasih" serubah", yang seharusnya kata terjadi pada kata "me-
Kekacauan penggunaan bahasa Ibrani dan Yunani ke bahasa Indonesia, penerjemahan Alkitab bahasa Indonesia telah menyelenggarakan ke-
Penerjemahan Alkitab dari daerah bahkan bahasa-bahasa asing.

Pada awal bulan ini LAI telah menyelenggarakan konferensi syukur berkenaan dengan terbitnya Alkitab dwibahasa: bahasa Arab dan

Bahasa Hukum, Tak Semua Orang Paham

HARUSLAH diakui bahwa tidak semua orang bisa memahami bahasa hukum. Persoalannya bukan saja karena tidak banyak orang mempelajari hukum dengan bahasanya, tetapi karena bahasa hukum tampaknya hanya bisa dipahami oleh orang hukum itu sendiri. Kalau membaca ayat-ayat atau keputusan melalui akte notaris, misalnya, atau keputusan hukum tentang kasus tanah, tampak ada bahasa yang berbelit-belit. Bahasa hukum yang tampak berbelit-belit itu memang tidak bisa diubah begitu saja, tetapi sudah jelas bagi masyarakat hukum untuk memahaminya.

Sulitnya memahami bahasa hukum seakan-akan sama halnya dengan sulitnya memahami bahasa yang dipakai oleh para praktisi hukum untuk kepentingan produk hukum. Artinya, selain memakai istilah-istilah yang tidak dikenal masyarakat. Penyusunan kalimatnya acapkali tidak memenuhi standar kaidah bahasa yang baik dan benar.

Bahasa hukum juga sering tidak lugas dan bertele-tele atau bahkan menimbulkan banyak penafsiran. Dalam kenyataannya,

bahasa hukum itu menjadi eksklusif dan seolah-olah hanya menjadi milik kalangan hukum saja. Orang lain yang ingin mengetahui, harus bisa menyesuaikan. Bukan bahasa hukum itu yang harus diubah dan disesuaikan, sebab ini sudah jadi tradisi.

Akan tetapi, penggunaan bahasa hukum yang demikian itu sudah berlangsung cukup lama. Turun-temurun dari zaman penjajah hingga kemerdekaan sekarang ini. Hal ini dapat dilihat dari berbagai produk hukum yang ada, seperti *Wet Ordonansi*, atau Undang Undang, Putusan Hakim, Akte Notaris, dan lain sebagainya.

Dalam pandangan masyarakat, sesuatu yang sudah berlangsung lama itu dianggap sebagai suatu tradisi. Dipandang sebagai suatu kebenaran. Oleh sebab itu, patut dipertanyakan, bisakah bahasa hukum yang berlaku sekarang ini diubah atau diperbaiki agar bisa dipahami secara umum. Agar tidak eksklusif. Tentunya tergantung dari masyarakat hukum itu sendiri. □ - o

(Jupriyadi SH MHum, Pengamat Hukum)

TOPIK: SUDAHKAH KITA MENGGUNAKAN

BAHASA INDONESIA DENGAN BAIK?

Kedaulatan Rakyat, 24 Oktober 2003

Selamatkan Bahasa Indonesia dengan Dialog dalam Pengajaran Bahasa Indonesia

JAKARTA, KOMPAS — Untuk menerangkan siswa berbahasa Indonesia, para guru hendaknya mengubah metode pengajaran bahasa Indonesia dari monolog menjadi dialog. Siswa sebaiknya dilibatkan dalam proses membaca, menulis, dan berbicara, sehingga daya imajinasi mereka tergugah dalam mengartikulasi kata-kata bahasa Indonesia.

Sejalan dengan itu, politik bahasa harus mempertegas peniadaan kata serapan asing selama kata yang bersangkutan ada dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah.

Demikian wacana pada diskusi panel "Bahasa Indonesia dalam Bahaya" di Jakarta, Senin (6/10). Diskusi yang digelar harian *Kompas* tersebut menampilkan sejumlah pakar dan pemerhati bahasa, yakni Riris K Toha-Sarumpaet, Prof Sudjoko, Ayat Rohaedi, Hasan Alwi, dan Nirwan A. Arsuka. Hadir dan ikut berbicara Prof Liek Wilardjo, Bambang Kaswanti, serta Kepala Pusat Bahasa Dendy Sugono.

Bagian proses berpikir

Riris mengingatkan, belajar bahasa, kegiatan membaca, menulis, dan berbicara adalah bagian dari proses berpikir. Selama ini, guru tidak menempatkan siswa sebagai manusia

yang berpikir. Guru cenderung tampil sebagai penceramah di depan kelas, sementara siswa diminta untuk patuh mendengarkannya.

Mengacu pada kurikulum sekolah dasar, Riris menilai, pelajaran bahasa Indonesia melulu berupa pelajaran dan pengetahuan bahasa.

"Siswa tidak diarahkan berpikir, berlatih secara kritis dan inovatif mengenal diri dan kehidupan. Situasi demikian yang menempatkan guru sebagai penguasa sulit melahirkan pikiran yang jernih," katanya.

Menurut Riris, cara belajar yang demikian harus diganti dengan dialog agar siswa berperan serta dalam pembelajaran. Muaranya, para siswa bisa berartikulasi dan terampil memilih kata untuk menguraikan konsep.

Melalui dialog dalam pengajaran bahasa Indonesia, sesungguhnya keindonesiaan dapat ditanamkan. Ketika berbicara mengenai lokalitas, bacaan Indonesia adalah yang akan menentukan.

Tatkala berhadapan dengan globalisasi di mana keadaan dan istilah yang sering dimanfaatkan sebagai alasan, sebenarnya keindonesiaanlah yang tertantang.

"Artinya, sebagai tantangan, globalisasi hanya dapat diha-

dapi dengan lokalitas yang mantap. Masalahnya, mana mungkin ada kemantapan bila bacaan yang disodorkan pada siswa di kelas adalah teks kosong dan kering?" papar Riris.

Saling melengkapi

Para pembicara lainnya sepakat bahwa bahasa Indonesia dan bahasa asing, terutama bahasa Inggris, tidak perlu saling dibenturkan. Kedua bahasa tersebut saling melengkapi. Bagaimanapun, bahasa asing diperlukan sebagai modal pergaulan antarbangsa. Hanya saja penggunaan istilah dari bahasa asing harus memenuhi kaidah agar kata yang dimaksudkan tidak menjadi rancu.

Sudjoko menilai, selama ini kalangan media massa cenderung menggunakan bahasa Inggris untuk istilah tertentu dengan dalih istilah yang dimaksud tidak ada dalam bahasa Indonesia. Padahal, kalau saja wartawan rajin membuka kamus, pastilah kata yang dimaksud ada dalam bahasa Indonesia. Sebagai contoh, kata *standar* bisa diganti dengan *baku*.

Nirwan mengingatkan, bahasa bukanlah sekadar alat komunikasi, tetapi juga merupakan lumbung pengetahuan di mana kekayaan lokalitas ikut berperan. (NAR)

Masalah Kita

INTERAKSI: DEWAN - RAKYAT - PAKAR - BIROKRAT

Belajar Bahasa dari Meniru Orang Lain

MASYARAKAT dalam mempelajari bahasa, pada umumnya karena meniru-niru saja. Sebab, bahasa itu pada dasarnya adalah hal yang ditirukan. Sejak kecil kita pun menirukan orangtua kita dalam berkata-kata, dalam berbicara, dalam menyebut nama-nama. Itulah yang akhirnya menjadi referensi kita. Celakanya apabila yang ditiru itu salah, maka akan menyebarkan kesalahan pada orang lain.

Masyarakat kita sedikit sekali yang mempelajari tata bahasa, kaidah bahasa, ejaan, dan persoalan kebahasaan, sehingga kebanyakan tidak berdaya dalam menggunakan bahasa. Kebanyakan pegawai negeri juga hanya meniru yang sudah ada, misalnya ketika membuat surat dinas, atau

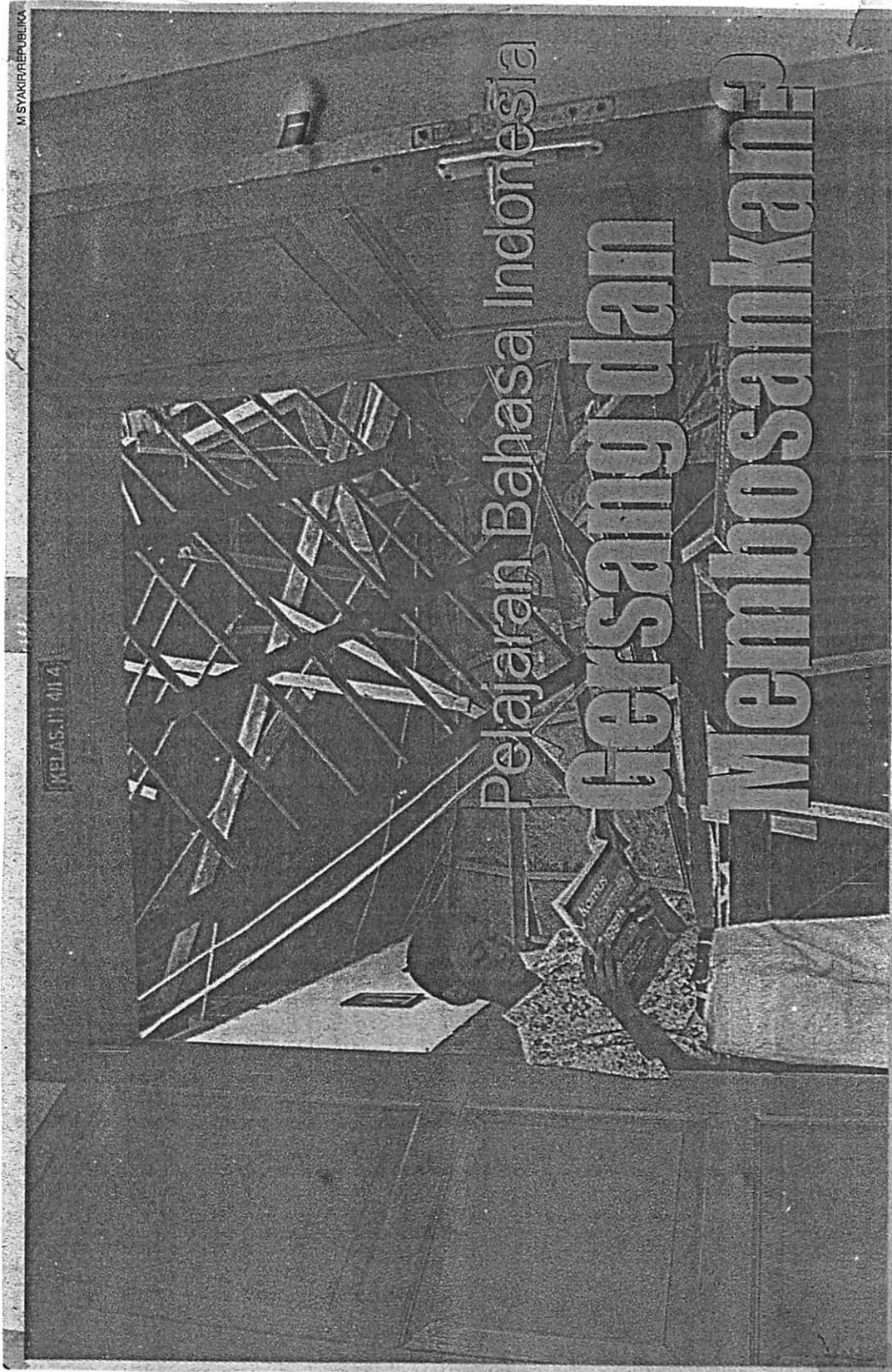


surat keputusan, sehingga apabila ada kesalahan bahasa, tentu tidak disadarinya sebagai kesalahan bahasa.

Oleh sebab itu, barangkali agar masyarakat kita baik bahasanya, haruslah diberi kebiasaan membaca tulisan yang baik bahasanya atau mendengar bahasa lisan yang baik. Hal ini agar masyarakat yang meniru, yang ditiru adalah contoh yang baik. Saya yakin masih banyak ahli bahasa, yang bisa diserap ilmunya, untuk masyarakat. Saya yakin, masih ada surat kabar atau majalah yang bahasanya baik, sehingga ketika dibaca masyarakat ada upaya pembelajaran bahasa yang baik. □ - o

(Nurwind, Pegawai Negeri Sipil)

Kedaulatan Rakyat, 24 Oktober 2003



M. SYAKIR/REPUBLIKA

MELAS/11/11/14

Pelajaran Bahasa Indonesia

Gersang dan Membosankan?

Pengajaran bahasa Indonesia pada hampir semua jenis dan jenjang pendidikan selalu mendapat sebutan mata pelajaran yang membosankan, menakutkan, gersang, terlalu teoritis, dan sebagainya. Singkat kata, pelajaran bahasa Indonesia tidak atau kurang diminati peserta didik.

Setidaknya, itu pula yang diakui Menteri Pendidikan Nasional, A Malik Fadjar dalam makalahnya pada Kongres Bahasa VIII yang berlangsung di Jakarta, 14-17 Oktober 2003. Dia bilang, "Berdasarkan informasi yang saya baca dan dengar, salah satu keluhan yang sangat gencar mengenai pengajaran bahasa Indonesia dalam sistem pendidikan kita ialah ketidaksesuaian alat ukur yang berupa-ujian akhir nasional dengan materi yang diberikan di sekolah."

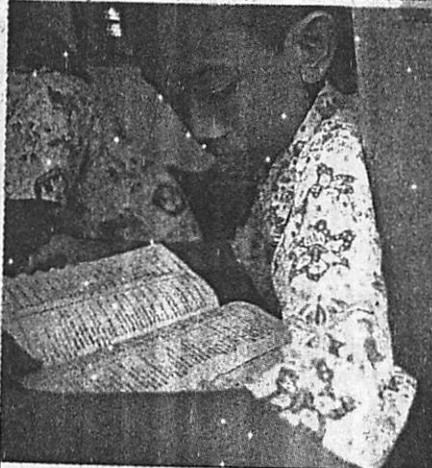
Tak hanya Malik Fadjar yang melihat masih lemahnya pengajaran bahasa Indonesia di sekolah. Suminto A Sa-yuti, seorang pendidik, pada kesempatan yang sama, juga punya pandangan serupa. Dia mengatakan, pengajaran bahasa dan sastra Indonesia yang selama ini dilaksanakan dalam sistem persekolahan belum mampu memenuhi harapan sebagian besar masyarakat. "Pengajaran bahasa dan sastra Indonesia belum sepenuhnya berhasil dalam menunaikan imperatif luhur yang diembannya, baik dalam perspektif edukatif maupun kultural," tuturnya.

Dalam perspektif pertama, menurut dia, sesungguhnya pelaksanaan pengajaran bahasa dan sastra Indonesia diharapkan mampu mencapai tingkatan yang terkait dengan upaya 'mencerdaskan kehidupan bangsa' menuju kehidupan yang lebih modern dan beradab. Sementara dalam perspektif kedua, pengajaran di bidang itu seharusnya mampu mencapai tingkatan kontributif sebagai unsur pembentuk jati diri dan kemandirian bangsa. Kedua perspektif tersebut, katanya, kini begitu terasa pentingnya.

Persoalannya, bagaimana menjadikan pengajaran ini sesuatu yang menarik, menyenangkan, bermanfaat, dan mencerdaskan? Sarwiji Suwandi, dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Sebelas Maret, Surakarta melihat terdapat banyak variabel yang terlibat dalam sebuah interaksi edukatif antara siswa dan guru.

R, 24-10-2003

M SYAKIR/REPUBLIKA



Guru hendaknya mampu menyiapkan atau mengembangkan materi ajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa.

Karena itu, banyak pula variabel yang turut menentukan keberhasilan belajar anak. Namun diakui, guru tetap dipandang sebagai variabel penting dan menduduki posisi sentral dalam menyukseskan keberhasilan proses belajar mengajar di sekolah.

Menurut dia, rendahnya mutu guru sebagai faktor determinan penyebab rendahnya mutu pengajaran. Sebaliknya, siswa-siswa yang berprestasi pada umumnya memiliki akses untuk berkembang dengan lebih baik di bawah asuhan guru-guru yang profesional serta memiliki kemampuan intelektual yang tinggi. "Demikian pula halnya dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia," tutur Ketua I Himpunan Pembina Bahasa Indonesia (HPNI) Cabang Surakarta itu.

Siswa, urai Sarwiji, sulit belajar sendiri tanpa bimbingan guru yang mampu mengemban tugasnya dengan baik. Para siswa dapat belajar dengan baik jika guru telah mempersiapkan lingkungan positif bagi mereka untuk

belajar. "Guru memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kemampuan komunikasi siswa. Untuk itu, guru lebih dulu harus memiliki kemampuan komunikatif itu," katanya.

Dia menyebut sejumlah peran penting yang diemban guru dalam upaya mengefektifkan pembelajaran bahasa Indonesia. Pertama, peranan guru sebagai perencana pembelajaran yang efisien dan efektif. Guru perlu menyusun rencana pembelajaran berbasis CTL (*Contextual Teaching and Learning*). Dalam kaitan ini, hal-hal pokok yang perlu diperhatikan antara lain penentuan kompetensi dasar yang akan dikembangkan, media pembelajaran yang akan digunakan, skenario pembelajaran, dan penilaian yang akan dievaluasi.

Berkenaan dengan perencanaan materi ajar, dia mengatakan, guru hendaknya mampu menyiapkan atau mengembangkan materi ajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Materi ajar harus benar-benar sesuai dengan jenis kegiatan pembelajaran (dialog, tanya jawab, bercerita, bermain peran, dan kegiatan berbahasa yang lain), dan tujuan pembelajaran bahasa yang menyangkut meningkatkan kemahiran berbahasa dan kemampuan mengapresiasi karya sastra. "Bahan ajar itu hendaknya disesuaikan pula dengan kondisi lingkungan sekolah dan kemampuan siswanya," katanya.

Untuk keperluan itu, menurut dia, kegiatan yang dapat dilakukan oleh guru adalah memilih teks dan menambah beberapa pertanyaan atau tugas, kemudian menjadikannya sebagai bahan ajar di kelas. Jika materi ajar yang relevan dengan tujuan pembelajaran belum tersedia, maka hal yang dapat dilakukan adalah memodifikasi bahan ajar yang berasal dari bahan autentik (buku, karya sastra, koran, majalah, alam, nara sumber, pengalaman dan minat anak, atau hasil karya siswa).

Kedua, peran guru sebagai fasilitator yang kreatif dan dinamis. Peranan ini, kata dia, berkaitan erat dengan arah kegiatan belajar mengajar untuk

meningkatkan kemahiran berbahasa siswa. Guru diharapkan dapat menggunakan pendekatan dan strategi pembelajaran atau manajemen kelas yang bervariasi, mengatur kelas dalam suasana yang menyenangkan, serta menyiapkan dan menggunakan media pembelajaran yang menarik dan menantang partisipasi aktif siswa dalam kegiatan komunikasi.

Ketiga, peranan guru sebagai model. Menurut dia, salah satu unsur penting yang perlu diperhatikan dalam penerapan pendekatan kontekstual adalah pemodelan (*modeling*), yaitu terdapatnya model yang bisa ditiru siswa. Dalam konteks pembelajaran bahasa Indonesia, kata Sarwiji, guru hendaknya berperan sebagai figur yang dapat diteladani.

Namun, katanya lagi, yang perlu diingat bahwa guru bukan satu-satunya model. Model dapat dirancang dengan melibatkan siswa. Model juga dapat didatangkan dari luar. "Guru bahasa Indonesia dapat mendatangkan wartawan atau sastrawan, menunjukkan kolom berita atau kaya ilmiah, dan sebagainya," Sarwiji menjelaskan.

Keempat, peran guru sebagai motivator. Dia mengatakan, aktivitas siswa dalam menggunakan bahasa untuk berkomunikasi sangat dipengaruhi oleh penguatan yang diberikan guru. Selain itu, perlu juga dihindari kecenderungan guru sebagai 'hakim bahasa'.

Hal lain adalah peran guru sebagai evaluator. Menurut dia, selain penilaian hasil, penilaian proses sangat diperlukan dalam proses belajar mengajar. Dengan penilaian proses, katanya, perkembangan kemahiran berbahasa atau kompetensi komunikatif siswa dapat diketahui. Dalam hubungan ini, peranan guru dalam memberikan umpan balik terhadap kesalahan berbahasa siswa sangat bermakna.

Dengan demikian, diharapkan pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah menjadi menyenangkan, perlahan-lahan mengubah kesan gersang dan membosankan. ■ bur 24/10 2003

BAHASA INDONESIA-PEMAKAIAN

Pemakaian Bahasa Asing Makin Kuat

JAKARTA - Dalam lima tahun terakhir terasa kuatnya pemakaian bahasa asing sehingga banyak yang sangsi apakah bahasa Indonesia akan dapat bertahan, kata Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Malik Fadjar.

"Melalui kongres bahasa ini diharapkan dapat melestarikan bahasa Indonesia yang juga merupakan bahasa persatuan," ujar Mendiknas diwakili Dirjen Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Fasli Jalal dalam pembukaan Kongres Bahasa Indonesia VIII, di Jakarta, pagi tadi.

Kongres yang bertemakan "Pemberdayaan Bahasa Indonesia Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dalam Era Globalisasi" itu dibuka oleh Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat Jusuf Kalla.

Menurut Fasli, kongres kali ini merupakan kongres bahasa Indonesia pertama di abad 21. Lebih dari 1.000 orang mengikuti kongres bahasa tersebut. Di forum tersebut juga diberikan penghargaan kepada tokoh dengan bahasa lisan terbaik dan sastrawan.

Mereka yang mendapat penghargaan, yaitu Menteri

Koordinator bidang Politik dan Keamanan Susilo Bambang Yudhoyono, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Yusril Ihza Mahendra, Eep Saefullah Fatah, Nurcholish Madjid, Pradjoto, Duta Besar Inggris untuk Indonesia Richard Gozny, NH Dini, Dorothea Rosa Herliany, dan Oka Rosmini.

Jusuf Kalla saat membuka kongres mengatakan, bangsa ini patut bersyukur telah menemukan bahasa persatuan dan juga bahasa negara. "Banyak negara yang hingga saat ini belum dapat menemukan bahasa negaranya, sementara bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa persatuan sejak tahun 1928. Di era globalisasi ini kita tidak boleh kehilangan jati diri bangsa, dan kehinekaan sebagai dinamika yang harus dijaga," tegasnya.

Sedangkan Mendiknas diwakili Fasli Jalal mengemukakan, selama ini pengajaran bahasa Indonesia pada hampir semua jenis dan jenjang pendidikan selalu mendapat sebutan mata pelajaran yang membosankan, menakutkan, gersang, dan terlalu teoritis.

(AS/M-7)

Suara Pembaruan, 14 Oktober 2003

Ebiet Buat Lagu dalam Bahasa Baik dan Benar

TEMBANG-TEMBANG lawas Ebiet G Ade yang mengalun di ruang Bali, Hotel Indonesia, Rabu (15/10), membuat para ahli bahasa Indonesia terkesima. Namun, suasana hening itu hanya sesaat. Ketika Ebiet menyelesaikan satu lagunya, gemuruh tepuk tangan membahana. Penonton pun langsung minta lagu lagi.

"Di dalam dunia musik, *nyetem* lagu di atas panggung *pamali*. *Eh* salah, itu bukan bahasa Indonesia. *Nyetem* lagu di atas panggung tabu," kata Ebiet. Dan penyanyi balada ini pun langsung 'menyetel' suaranya yang cocok untuk lagu *Camelia*.

Di atas panggung, Ebiet G Ade berulang kali meralat kata-kata yang diucapkannya. Maklum saja, suami Yayuk Sugianto ini tampil sebagai salah satu pengisi acara 'Malam Keakraban Kongres Bahasa Indonesia VIII'. Jadi ia berhati-hati dalam berbahasa. "Mohon maaf kalau lirik lagu atau bahasa yang saya buat tidak tepat. Tapi saya sudah coba buat dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar," ujarnya lagi.

Ebiet yang sedianya hanya menyanyikan tiga lagu akhirnya bersedia menambah tiga lagu lagi sesuai permintaan penonton. Lagu-lagu yang dibawakannya seperti *Berita Kepada Kawan*, *Titip Rindu Buat Ayah*, dan *Dosa Siapa*.

Selain Ebiet G Ade, malam keakraban itu juga diisi dengan penampilan Sutardji Calzoum Bachri dan SMK Penabur Jakarta.

Kepala Pusat Bahasa Dendy Sugono yang membuka acara itu mengatakan bahwa pertunjukan di panggung merupakan perpaduan ilmu dan seni. Misalnya, rangkaian kata-kata dalam puisi adalah seni, dan dari puisi bisa digubah menjadi musik. (tan)



Ebiet G Ade

Warta Kota/henry lopulalan

WK, 17/10/03

Bahasa Indonesia Baku

Kurang Menarik untuk Bahasa Jurnalistik

JAKARTA (Media): Pusat Bahasa dan pakar bahasa sering kali cenderung berlebihan dan kaku dalam mendorong pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar kepada media. Padahal, bahasa Indonesia yang baku kurang menarik untuk digunakan dalam bahasa jurnalistik, terutama televisi.

Sementara itu, sanksi yang diberikan kepada media elektronik yang melanggar kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, sebagaimana diatur Undang-Undang (UU) Penyiaran, masih lemah.

Pernyataan tersebut disampaikan anggota Badan Pertimbangan Bahasa Parni Hadi, saat berlangsungnya Kongres Bahasa Indonesia VIII hari kedua di Jakarta, kemarin. Pada kesempatan itu, bersama Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Tarman Azzam, ia membawakan pembahasan tentang *Peran Media Cetak dan Elektronik dalam Peningkatan Mutu Penggunaan Bahasa Indonesia*.

"Merujuk pada UU No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, terutama pada Bab IV bagian kedua dalam pasal 37, 38, dan 39, maka sanksi yang diberikan kepada media elektronik yang melakukan pelanggaran penggunaan bahasa Indonesia hanya sebatas sanksi administratif yang sangat sederhana dan tidak spesifik merujuk pada kesalahan yang dilakukan," jelas Parni.

Meski dalam bab V pasal 55 tentang sanksi administratif sanksi terberat dapat berupa pencabutan izin penyiaran, pada praktiknya sanksi hanya dilakukan dengan pembatasan durasi dan waktu siaran.

"Sekarang ini, kalau ada televisi yang melanggar penggunaan bahasa Indonesia yang benar maka sanksi terberat hanya berupa pelarangan tayang dalam jangka waktu tertentu saja. Dan itu pun tidak ada yang berani menegakkan sanksi tersebut karena lembaga yang berwenang untuk itu kurang memiliki kekuatan," kata Parni.

Namun, jelas Parni, penentuan salah bahasa menurut Pusat Bahasa sering dinilai insan pertelevisian sebagai suatu hal yang berlebihan. Malahan insan pertelevisian tidak menyadari dan mengakui hal tersebut sebagai suatu kesalahan dengan asumsi bahasa jurnalistik televisi merupakan suatu kaidah tersendiri.

"Dalam hal ini saya khawatir jangan-jangan Pusat Bahasa dan para ahli bahasa yang harus mengubah paradigma apa yang disebut sebagai bahasa Indonesia yang baik dan benar itu. Saya yakin, mereka sudah tahu bahwa bahasa berkembang sesuai dinamika masyarakat penggunaannya," lanjutnya.

Dengan maksud memberikan opsi terhadap pernyataannya itu, ia juga menyetujui apabila penegakan penggunaan bahasa Indonesia dipertegas dengan menjadikan Pusat Bahasa sebagai lembaga nondepartemen yang lebih berwibawa. Diharapkan,

Pusat Bahasa lebih memiliki 'gigi' untuk menindak pelanggaran tersebut.

Bahasa jurnalistik berbeda

Pada kesempatan yang sama, Tarman Azzam menegaskan bahasa jurnalistik berbeda dengan bahasa lisan sebagaimana yang terdapat dalam bahasa Indonesia yang baku. Ia mengatakan, jangan untuk menyamakan bahasa jurnalistik dengan bahasa Indonesia yang baku, bahkan antara bahasa jurnalistik televisi, koran, majalah, radio, dan tabloid memiliki bentuk yang berbeda-beda.

"Sangat sulit untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baku ke dalam bahasa jurnalistik. Meski begitu, secara kaidah yang mendasar seperti tata bahasa dan EYD (Ejaan yang Disempurnakan), bahasa jurnalistik harus tetap berpegang kepada bahasa Indonesia."

Ia menegaskan, di seluruh dunia bahasa jurnalistik memiliki bentuk yang sama. Aspek lugas, tegas, dan mudah dimengerti masyarakat merupakan parameter utama dalam bahasa jurnalistik. Kemudian, jelas Ketua PWI itu, bahasa resmi suatu negara menjadi rujukan dalam bahasa jurnalistiknya. Dengan menggunakan bahasa negara tersebut kesalahan-kesalahan dalam bahasa jurnalistik dapat ditindaklanjuti.

"Kesalahan berbahasa dalam jurnalistik terjadi jika kaidah bahasa yang normal telah dilanggar. Misalnya, bahasa yang tidak senonoh dan tidak memberikan pendidikan yang baik bagi masyarakat." (TM/B-3)

Mendiknas di Kongres Bahasa Indonesia

Tumbuhkan Kesadaran Berbahasa Indonesia yang Baik dan Benar

Jakarta, Pelita

Menteri Pendidikan H A Malik Fadjar mengatakan kongres bahasa Indonesia akan selalu diadakan guna menumbuhkan kesadaran berbangsa dan berbahasa Indonesia dengan baik dan benar.

"Kongres Bahasa Indonesia diselenggarakan dalam situasi dan waktu yang berbeda-beda dan dengan tujuan yang berbeda-beda pula," ujarnya pada pembukaan Kongres Bahasa ke-8 di Hotel Indonesia kemarin. Kongres bertema "Pemberdayaan Bahasa Indonesia Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa dalam Era Globalisasi" itu berlangsung hingga 17 September 2003.

Menurut Mendiknas, berbeda-beda kongres ini terjadi karena disesuaikan dengan situasi yang ada seperti pada Kongres Bahasa Indonesia pertama diselenggarakan pada zaman penjajah. Sudah tentu tujuan yang dicapai waktu itu berbeda dengan Kongres Bahasa Indonesia berikutnya.

Karena yang diutamakan pada waktu itu ialah menggalang kekuatan nasional untuk mencapai kemerdekaan. Kongres-kongres bahasa selanjutnya yang diselenggarakan pada zaman kemerdekaan atau setelah kita merdeka pasti berorientasi pada hal lain dan diarahkan untuk

tujuan yang sesuai dengan prioritas pembangunan pada masa itu.

Begitu juga dengan Kongres Bahasa Indonesia ke-8 yang diselenggarakan pada tanggal 14-17 Oktober 2003, lebih menitik beratkan pada rasa cinta akan bangsa dan bahasa sendiri pada saat era globalisasi saat ini. Walaupun demikian H A Malik Fadjar mengatakan setiap diadakannya kongres akan tetap ada benang merah yang sampai saat ini selalu dipertahankan yaitu kesadaran berbangsa dan berbahasa Indonesia.

Hal itu dilakukan sampai pada saat ini, karena Kongres Bahasa Indonesia memang merupakan salah satu bentuk perwujudan kesadaran dan kepedulian bangsa Indonesia terhadap amanat Sumpah Pemuda yang merupakan dasar pemikiran dan titik tolak penyelenggara Kongres Bahasa Indonesia selama ini.

Bahasa Indonesia selain merupakan bahasa nasional juga merupakan bahasa negara. Oleh karena itu, sangatlah wajar kalau setiap orang dituntut untuk menguasai bahasa Indonesia agar ia dapat menjalankan kewajibannya dengan sebaik-baiknya dan dapat menjaga serta menikmati haknya sebagai seorang warga ne-

gara. Dalam hubungan itulah pendidikan dalam arti luas mempunyai peran kunci dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

H A Malik Fadjar juga mengatakan selama ini bangsa Indonesia termasuk pemerintah telah berupaya dengan berbagai cara terutama melalui pendidikan formal guna menghasilkan warga negara Indonesia yang sesuai dengan rumusan yang tercantum dalam undang-undang tentang Sistem Pendidikan

Nasional.

Tapi sampai saat ini tampaknya sulit untuk menemukan orang Indonesia yang puas dengan prestasi yang telah kita capai. Oleh karena itu, Kongres Bahasa Indonesia ke VIII ini diharapkan mampu membawa angin segar dan menciptakan suasana yang cerah dalam dunia pendidikan.

Khususnya untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia yang selama terkesan teori. Hal ini tidak hanya berlaku pada bangku sekolah tapi juga dalam masyarakat sehingga dapat menghadapi tantangan-tantangan yang dihadapi. Selain itu ada baiknya juga untuk mengingat kembali sebuah ungkapan yang berbunyi "Bahasa mencerminkan bangsa", ujar H A Malik Fadjar menutup pembicaraan. (mth)

101, 10/10/03

Sosok**Merasa tidak Patut**

KEHADIRAN Menko Polkam Soesilo Bambang Yudhoyono dalam pembukaan Kongres Bahasa Indonesia (KBI) VIII di Hotel Indonesia, Jakarta, beberapa waktu lalu, mengundang perhatian banyak peserta yang kebanyakan berasal dari daerah.



■ MEDIA/ SAYUTI

■ SB Yudhoyono

Penampilan pria berperawakan tinggi dan tegap kelahiran Pacitan, Jawa Timur, siang itu kelihatan berbeda. Setelan jas hitam yang dikenakannya itu rupanya karena Soesilo menjadi satu dari enam tokoh yang memperoleh penghargaan Tokoh Berbahasa Indonesia Lisan Terbaik.

Apa pendapat Yudhoyono tentang penghargaan yang diterimanya tersebut? Ia justru mempertanyakan soal patut-tidaknya ia dan sejumlah tokoh lain telah menggunakan bahasa Indonesia lisan dengan baik.

"Bagi kami, tiada hari tanpa terus-menerus memperbaiki, belajar, dan menyempurnakan kemampuan dan cara berbahasa Indonesia kami. Karena, kami yakin universitas yang abadi itu adalah hidup dan kehidupan kita," katanya.

Yudhoyono yang di masa kecil dan remaja gemar menulis puisi dan membuat cerpen itu mengatakan kalau ingin menyempurnakan kemampuan berbahasa, kemampuan berkomunikasi, dan sekaligus kepribadian, jalan yang paling benar adalah terus melakukan tugas belajar dalam pengertian luas, yakni pendidikan seumur hidup.

Ia mengakui penghargaan tersebut menjadi tantangan berat bagi para penerimanya untuk tetap mampu menggunakan bahasa Indonesia secara baik. (Ant/B-3)

Media Indonesia, 18 Oktober 2003

Masyarakat Kita Masih Sering Salah Berbahasa

TAMPAKNYA, banyak orang yang menganggap enteng pelajaran bahasa Indonesia, sehingga berakibat pada ketakampuannya berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Seakan-akan sebagai orang Indonesia, secara otomatis sudah mahir berbahasa Indonesia. Tak perlu dipelajari. Dengan alasan inilah masyarakat kita sebagian besar masih sering salah dalam berbahasa. Artinya, bahasa mereka masih *belang berteng*, campur-campur, dan seakan miskin penguasaan kata-katanya.

Tentu tidak semuanya begitu. Hanya sebagian besar masih seperti itu. Media massa, juga harus mulai menyadari perannya sehingga tidak menyebarkan kesalahan berbahasa pada masyarakat. Sekarang ini, media massa sudah mulai berupaya baik, memilih kata dan menggunakan bahasa pers secara hati-hati, dibandingkan dulu. Banyak ahli bahasa menuduh koran adalah biang kerok ke-

salahan berbahasa. Agar masyarakat kita baik dalam berbahasa, perlu kiranya memahami kaidah-kaidah. Terutama dalam penulisan dan pengucapan. Jangan mengucapkan 'mensikapi' karena yang benar adalah 'menyikapi'. Bila para pejabat pun tidak menyadari akan hal ini, ya masyarakat masih akan meniru. Atau, malah disalahkan ketika masyarakat mengucapkan yang betul.

Dalam tulisan, juga Yogyakarta tak boleh diganti dengan Jogjakarta. Sebab, yang standar dan yang baku adalah Yogyakarta. Itulah ejaan yang dibenarkan dan yang berlaku sampai kapan pun. Seperti menulis nama diri kita sendiri, ejaannya harus sesuai. Mengapa harus diganti-ganti? Sedang Jogja, dimaksudkan sebagai *brand*, bukan pengganti ejaan Yogyakarta. □-c

(*Hazwan Iskandar Jaya, Aktivistis Lembaga Swadaya Masyarakat*)

Kedaulatan Rakyat, 20 Oktober 2003

Kecintaan, Kebanggaan, dan Kesetiaan Itu

SELAIN Jus Badudu, agaknya nama Anton M Moeliono tak boleh dilupakan ketika harus mempersoalkan "bahasa Indonesia yang baik dan benar". Maktumlah, lewat pemikiran kritis dan tindak berbahasa, keduanya telah merepresentasikan jargon yang masih dipopulerkan oleh Pusat Bahasa itu.

Lahir di Bandung, 21 Februari 1929, pemilik nama lengkap Anton Moedardo Moeliono itu mengaku sewaktu muda tak bermaksud menapaki dunia bahasa. "Secara kebetulan saya membaca iklan beasiswa ikatan dinas masuk ke Fakultas Sastra (FS) Universitas Indonesia (UI) untuk pegawai bidang bahasa. Namun zaman ikut menentukan perkembangan dan pengembangan diri saya. Setelah lulus, sambil menjadi dosen saya juga menjadi tenaga tidak tetap di Lembaga Bahasa dan Kebudayaan," kisah Anton yang meraih gelar sarjana tahun 1956 itu.

Dari sana kepakarannya terus mengembang. Tahun 1965, ayah Miriam Dian Pramesti dan Isbia Nilam Paramita, ini memperoleh gelar Master of Arts in General Linguistics di Cornell University, AS. Pada 1970, dia mengaku berkenalan dengan kelompok linguistik Amerika yang mengajarnya perencanaan bahasa. "Sejak itulah saya mengembangkan wawasan bagaimana semestinya bahasa Indonesia diperlakukan," kata peraih gelar doktor Ilmu Sastra, Bidang Linguistik UI (1981) dan guru besar bahasa Indonesia dan linguistik FS UI sejak 1982 itu.

Kemunculannya secara rutin di *TVRI* lewat acara "Pembinaan Bahasa Indonesia" selama belasan tahun, lebih dari satu dekade, rupanya telah melambungkan namanya sebagai ahli bahasa.

Kata-katanya yang terpilih dan kalimat-kalimatnya yang tertata membuat Anton tak hanya dikenal sebagai ahli, tetapi juga penutur bahasa Indonesia "yang baik dan benar".

"Saya sebenarnya tidak bemiati mengajarkan bahasa Indonesia, kecuali mengembangkan sikap yang baik terhadap bahasa Indonesia. Saya ingin menegakkan trilogi bahasa Indonesia, yakni aku cinta bahasa Indonesia, aku bangga pada bahasa Indonesia, dan aku setia pada bahasa Indonesia tanpa pernah melakukan selingkuh," kata lelaki yang kini mengajar di Unika Atmajaya Jakarta itu.

Anton juga pernah memegang jabatan Ketua Program Pascasarjana Ilmu Sastra (1982 - 1983), Ketua Program Studi Linguistik Pascasarjana (1987 - 2000), Ketua Jurusan Sastra Germania (1989 - 1990) dan tahun 1991-1995 merangkap jabatan Ketua Program Studi Sastra Belanda.

"Saya merasa bersyukur telah diberi kesempatan mempelajari sembilan bahasa, termasuk bahasa etnik saya, Jawa dan Sunda," kata lelaki yang pernah menjadi profesor tamu di Goethe Universität Frankfurt dan Katholieke Universiteit Brabant Tilburg itu.

Di Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, tempatnya

mengabdikan sejak 1960, Anton berturut-turut menjadi Kepala Bidang Perkamusan, Ketua Komisi Istilah Seksi Linguistik, dan Wakil Ketua Komisi Istilah. "Di bidang perkamusan dan peristilahan, sesungguhnya saya banyak berguru pada WJS Poerwadarminta. Kebetulan saat itu beliau menyusun kamus, sehingga saya kemudian mengembangkan minat dan perhatian pada peristilahan," kata Anton yang pernah menjadi Ketua Panitia Ejaan Baru dan Ketua Panitia Kerja Sama Kebahasaan itu.

Dia memegang jabatan Kepala Pusat Bahasa pada 1984 - 1989. Dia juga pernah menjadi Direktur Indonesian Linguistics De-

velopment Project (Proyek Kerja Sama Universitas Leiden-Pusat Bahasa) dan menjadi direktur eksekutifnya pada tahun 1990 - 1992. Sejak 1993 sampai sekarang dia aktif sebagai konsultan bahasa, terutama di bidang peristilahan.

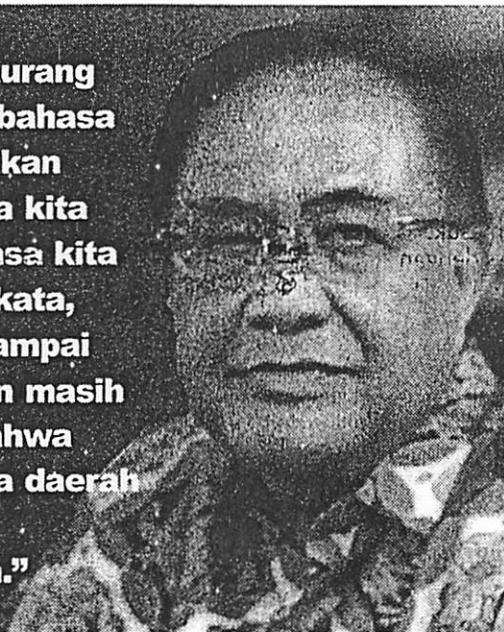
Anton M Moeliono juga berkiprah di Universitas Atma Jaya. Dialah salah satu perintis dan pendiri Yayasan Atma Jaya dan menjadi anggota yayasan tersebut sejak 1962 sampai 1999. Di situ dia pernah menjadi

Ketua Badan Harian Yayasan Atma Jaya, di samping sebagai Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan dan Ketua Jurusan Pendidikan

Bahasa Inggris. Selaku warga Atma Jaya, dia pernah terpilih menjadi Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik dan diangkat menjadi profesor tidak tetap Program Studi Linguistik Terapan Bahasa Inggris, Program Pendidikan Pascasarjana. Sejak 2000 lalu menjadi guru besar tetap FKIP Atma Jaya dan merangkap sebagai Ketua Program Studi Linguistik Terapan. Anton M Moeliono juga aktif di bidang organisasi, terutama di bidang kebahasaan.

Sebagai pakar bahasa, peraih gelar doktor *honoris causa* Ilmu Sastra dari Melbourne University (1995) ini juga telah menghasilkan karya buku yang sampai saat ini masih digunakan sebagai acuan, antara lain *Santun Bahasa* (1984), *Masalah Bahasa yang Dapat Anda Atasi Sendiri* (1988), dan *Kembara Bahasa: Kumpulan Karangan Tersebar* (1989). Selain itu, ia menjadi penyunting beberapa buku mengenai ejaan, pembentukan istilah, dan penyunting penyelia *Kamus Besar Bahasa Indonesia* edisi I (1988). (Sucipto Hadi Purnomo-72)

"Jadi, kita kurang menghargai bahasa Indonesia bukan hanya karena kita merasa bahasa kita kurang kosakata, melainkan sampai sekarang pun masih dikatakan bahwa peran bahasa daerah hanya untuk memperkaya."



SMSUCIPTO HP

Suara Merdeka, 26 Oktober 2003

Anton M Moeliono:

Kita Tak Merawat

KETIKA unsur-unsur pengikat kita sebagai bangsa Indonesia memudar, satu-satunya milik kita yang masih utuh adalah bahasa Indonesia. Ketika keutuhan Tanah Air kian terancam dan kebersamaan sebagai bangsa meluruh dengan berbagai kerusufan dan pertikaian, butir Sumpah Pemuda yang masih abadi adalah bahasa Indonesia. Sayang, kita terlihat tak bersungguh-sungguh merawatnya. Seolah-olah bahasa Indonesia itu karunia yang begitu saja turun dari langit. Di sela-sela Kongres Bahasa Indonesia VIII di Jakarta, *Suara Merdeka* mewawancarai Prof Dr Anton M Moeliono tentang situasi kebahasaan kekinian. Berikut petikan wawancara dengan salah satu ikon bahasa Indonesia yang baik dan benar itu.

Anda melihat ada bahaya atau hegemoni yang bisa membuat bahasa Indonesia terancam untuk memainkan peranannya sebagai pengikat bangsa ini?

Ancaman terhadap keutuhan negara kesatuan republik ini oleh gerakan-gerakan separatis dan pertarungan antaretnis, sebagaimana yang terjadi di Papua, Aceh, Ambon, dan Poso, sesungguhnya berkaitan dengan memudarnya rasa kebangsaan. Keadaan sosial, budaya, ekonomi, dan politik saat ini membuat banyak orang Indonesia tidak bangga lagi menjadi orang Indonesia. Seluruh dunia tahu, Indonesia adalah negara paling korup, terkorup keempat. Jadi, memang tidak ada unsur-unsur budaya yang dapat kita banggakan, sedikit-tidaknya di mata dunia. Satu-satunya hal yang masih dapat kita miliki bersama — karena kita tidak memiliki agama bersama, busana bersama, dan adat istiadat bersama — adalah bahasa Indonesia. Namun dalam hal memiliki, kita tidak selalu berarti merawatnya, mengembangkannya. Hanya memiliki; sama saja dengan orang Indonesia memperlakukan kereta api. Kita bangga memiliki barang mahal, tetapi tidak bisa merawatnya. Bahasa Indonesia kita jadikan sebagai lambang identitas keindonesiaan, tetapi kita tidak merawatnya.

Dengan demikian, ancaman terbesar terhadap bahasa Indonesia sesungguhnya berasal dari pendukungnya?

... Saya yakin, andaikata kita ingin memelihara, memanfaatkan semua kesempatan untuk merawatnya, pasti keadaannya tidak seperti sekarang. Saya hanya menyentuh hal yang sangat sederhana, yakni Kongres Bahasa Indonesia; apa, kedudukan, peranan, dan fungsinya di mata penguasa sekarang? Kongres ini tidak dibuka oleh presiden. Ketika didelegasikan kepada wakil presiden, apakah wakil presiden yang membukanya? Apakah menteri pendidikan ada pada saat pembukaan? Saya justru melihat kongres ini sekadar sebagai ajang penyaluran rasa, unek-unek, hasrat, dan frustrasi lewat makalah, tanya jawab, dan diskusi panel. Akan tetapi, semua itu belum menyentuh tatanan mapan.

Jangan-jangan itu juga menjadi bukti bahwa kita makin tak bangga terhadap bahasa Indonesia?

Sikap budaya kita terhadap bahasa Indonesia sebenarnya belum mantap. Kita beranggapan bahasa Indonesia terancam oleh pengaruh-pengaruh yang merusak bahasa Indonesia, sehingga seakan-akan bahasa Indonesia keberadaannya diancam dan menjadi rusak, terutama, oleh bahasa Inggris. Hal yang tidak pernah dipikirkan, baik di dalam kongres bahasa daerah maupun di dalam perumusan MPR, ialah sikap orang Indonesia yang mempunyai bahasa etnik yang kuat terhadap bahasa Indonesia. Jadi, kita kurang menghargai bahasa Indonesia bukan hanya karena kita merasa bahasa kita kurang kosakata, melainkan sampai sekarang pun masih dikatakan bahwa peran bahasa daerah hanya untuk memperkaya. Saya sangat melawan pendapat seperti itu.

Bukankah selama ini, pengembangan penggunaan bahasa Indonesia memang telah menyebabkan bahasa daerah kian terpinggirkan, sehingga sekadar menjadi pemerikaya bahasa Indonesia?

Kita harus mengikis pendapat bahwa kalau bahasa daerah kemasukan unsur Indonesia, berarti ada erosi bahasa daerah, ada perusakan bahasa daerah, sebagaimana yang sering dikemukakan dalam beberapa

kongres bahasa daerah. Bahasa Indonesia juga memperkaya bahasa daerah. Itu yang perlu kita terima supaya ada keseimbangan, sehingga jarak perbedaan antara bahasa Indonesia dan bahasa daerah berkurang. Bahasa daerah dapat lestari justru karena ada bahasa Indonesia.

Oleh karena itu, yang perlu diketengahkan oleh media massa adalah penumbuhan sikap budaya baru sehingga kita tidak melihat hubungan bahasa Indonesia dan bahasa daerah sebagai pertentangan, untung-rugi, tetapi sebagai simbiosis, sehingga tidak ada lagi masalah hegemoni.

Pengembangan kosakata Indonesia selama ini terlihat bukan mengarah ke kancah internasional, melainkan menyempit ke dunia sendiri. Bukankah itu cermin sikap nasionalistik yang chauvanistic dan justru membangun kebuntuan komunikasi?

Sinyalmen seperti itu dapat dibenarkan beberapa tahun lalu. Anda harus ingat, pada

tahun 1972 ketika kami menyusun kerja sama bahasa dengan Malaysia, itu masuk dalam suasana awal Orde Baru. Pada waktu itu kami ingin menunjukkan bahwa pembangunan pun didukung oleh ahli bahasa. Kami ingin mempersembahkan sesuatu terhadap perkembangan bahasa Indonesia, sehingga semangat saat itu adalah menggali dari sumber sendiri, membuktikan bahwa bahasa Indonesia mampu untuk mengungkapkan dunia modern.

Sekarang?

Setelah tiga puluh tahun berlalu, apa yang Anda tengarai kami sadari. Dalam waktu dekat ini akan terbit edisi ketiga *Pedoman Umum Istilah* yang menunjukkan pengubahan orientasi. Kita tidak bisa menutup mata terhadap pengaruh budaya asing, terutama bahasa Inggris. Oleh karena itu, sakarang dianjurkan tidak lagi ditekankan untuk selalu menerjemahkan konsep dan istilah asing ke Indonesia. Mungkin lebih efisien dan efektif menyerapnya lewat penyesuaian. Jadi, tidak perlu payah-payah memikirkan kata Indonesia untuk *press*, *microfone*, dan *computer*. Itu berarti, tidak benar lagi sikap para ahli perancang bahasa untuk tetap menganjurkan pertama-tama menggali dari sumber etnik dahulu.

Seorang peneliti asing pernah mengatakan, jika ingin memahami Indonesia, masuklah dari kekecualiannya. Rupa-rupanya dalam bahasa Indonesia, kekecualiannya yang lebih sering mengemuka.

Justru pada tahun 1988 Pusat Bahasa ingin menunjukkan, dengan menerbitkan *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*, bahwa bahasa Indonesia mempunyai aturan dan kaidah yang dapat mempunyai daya serap, perampatan, dan generalisasi yang lebih umum daripada yang disangka orang. Selama ini, buku pelajaran bahasa Indonesia dan buku tata bahasa Indonesia lebih banyak menge-

mukan perkecualian dan kekecualian suatu kaidah. Itu yang ingin kami atasi dengan mengatakan, mungkin dahulu kita salah lihat.

Anda juga pernah mengatakan para cendekiawan kita miskin, terutama dalam aspek kebahasaan.

Tentu ada hubungan timbal balik antara yang dimiliki dan si pemiliknya. Orang yang gajinya hanya Rp 50.000 sebulan, dia memiliki apa? Dia bisa berbuat apa dengan Rp 50.000 itu? Itu tidak berarti bahwa ada milik lain yang lebih besar yang dapat diraih. Jadi, kalau ada orang Indonesia sering mengeluh dan menyatakan bahasa Indonesia masih muda, masih harus berkembang, sehingga banyak menyerap, memperkaya dari bahasa daerah dan bahasa asing, itu berarti mengakui kemiskinannya. Jadi, kalau dianggap bahasa Indonesia itu miskin, bukan bahasanya yang miskin, melainkan orangnya yang miskin wawasan, miskin daya cipta.

Mengatakan bahasa Indonesia, sebagaimana juga terhadap benda lain, lebih rendah dari bahasa asing, tidaklah adil. Sekalipun demikian, harus kita akui, bahasa Indonesia belum diajarkan dengan efisien dan efektif.

Selalu saja bermunculan ungkapan baru yang nimalar, seperti "mengentaskan kemiskinan" dan mengejar ketinggalan. Benarkah itu cermin kecenderungan kita untuk menjadi manusia nimalar?

Tak hanya nimalar, kita juga nirdaya. Tidak berdaya untuk: secara kritis menghadapi lingkungan kita. Kalau ada orang yang mengatakan "mengentaskan kemiskinan", orang Jawa mengatakan *ngentaske* sesuatu dalam arti mengangkat sesuatu dari satu tempat ke tempat lain. Jadi, "mengentaskan kemiskinan" hanyalah memindahkan kemiskinan, dari satu tempat ke tempat lain.

Kemarin Kepala Pusat Bahasa (Dr Dendy Sugono-Red) juga mengatakan, kita jangan "mengejar ketertinggalan", tetapi mesti "mengejar kemajuan". Salah nalar itu terjadi disebabkan oleh nirdaya kritik. Di seluruh dunia, bagi manusia, yang dianggap sebagai kemuncaknya adalah kecerdasan yang berkembang, akal budinya lengkap. Di Indonesia bukan itu yang terpenting, melainkan ketakwaan. Kita masuk perangkap, apa yang harus kita kembangkan sekarang. Mungkin dari sudut agama, tidak apa-apa bodoh asal kita takwa dan beriman, kita menjadi saleh.

Pusat Bahasa, lewat berbagai produknya, justru berkesan tidak membumi sehingga kosakata dan istilah yang diperkenalkan banyak yang tidak berterima. Mengapa begitu?

Pusat Bahasa memang begitu adanya. Sebabnya, ia dilirik dengan setengah mata; diakui keberadaannya; tetapi tidak diakui kewenangannya. Itu berbeda dari ketika masyarakat memandang Direktorat Jenderal Pajak sebagai sesuatu yang ditakuti. Kalau

Dirjen Pajak menetapkan 10% pajak pertambahan nilai atau pendapatan, tetap diikuti walau dengan bersungut-sungut. Tidak pernah ada warga masyarakat yang mengatakan, misalnya biaya STNK yang terus naik itu, sebagai sesuatu yang buruk kemudian tidak dipatuhi.

Pusat Bahasa tidak mempunyai kuasa itu. Jadi, apa-apa yang dianjurkan bisa diperolok-olok, "Ah Pusat Bahasa mengada-ada!" Mengapa muncul anggapan produk Pusat Bahasa terlalu muluk? Karena orang Indonesia belum terbiasa dengan hidup jaga mutu, jaga harga, dan jaga nama. *Pokoke dadi*, asal jadi. Cita-cita untuk hidup berkualitas masih jarang. Oleh karena itu, istilah yang ditawarkan masih dianggap terlalu indah, elok, terlalu resmi, kurang santun, kurang komunikatif, kurang membumi, karena gagasan itu dalam pergaulan memang tidak ada.

Apakah menjadi perlu kehadiran undang-undang bahasa? Apa perlu ekspresi budaya diatur-atur lewat sebuah undang-undang?

Segala-galanya kan unsur budaya. Jika bahasa itu unsur budaya, dan ekonomi, politik, ilmu pengetahuan, dan agama juga unsur budaya, kenapa mesti ada kekhawatiran terhadap undang-undang kebahasaan. Dari bisa menggunakan bahasa bebas tanpa sanksi apa pun kemudian diatur, tentu saja akan banyak resistensi, seakan-akan bahasa itu dikekang dan dipangkas kekreatifannya. Saya kira undang-undang-undang bahasa itu perlu, sebagaimana Malaysia dan Australia mempunyai *language act*. Kebetulan kedua negara itu juga berbilang bangsa dan berbilang bahasa.

Pusat Bahasa lewat Kamus Besar Bahasa Indonesia juga masih memperlihatkan inkonsistensi dalam hal penulisan kata dan istilah. Itukah petunjuk ketidakmampuan bahasa Indonesia?

Bukan ketidakmampuan bahasa Indonesia, melainkan ketidakmampuan kebijakan. Kita harus mengakui, kepakaran kita dalam berbagai bidang bahasa masih terbatas. Kita bangga *Kamus Besar Bahasa Indonesia* yang terbit tahun 1998 menjadi tonggak sejarah, tetapi harap diingat, di Indonesia banyak hal dan produk akhir yang bergantung pada orangnya, pada atasan.

Kalau Anda mencatat, dan saya akui apa yang Anda catat, berturut-turut terjadi perubahan, itu harus dipulangkan pada taraf keahlian perkamusian yang belum sempurna. Jika di dunia pendidikan ada pemeo "ganti menteri ganti aturan", di Pusat Bahasa pun itu berlaku.

Bukankah itu sangat membingungkan

pemakainya?

Tidak perlu sangat membingungkan andaikata pemakainya kritis. Salah satu penyakit besar yang telah menjadi epidemi orang Indonesia adalah terlalu cepat mengatakan, "Saya bingung, saya kebingungan." Mengapa bingung? Kita dikurniai akal budi. Kalau ada kaidah yang bertentangan, jangan bingung, tetapi nilailah. Tentu saja (kamus) edisi yang berikut akan mengatasi edisi sebelumnya. Jangan mengatakan edisi ini begini, edisi itu begitu. Tentu saja sikap yang sehat, karena sudah ada edisi ketiga, mengikuti edisi terbaru. (Sucipto Hadi Purnomo-72)



SM/SUCIPTO HP

Suara Merdeka, 26 Oktober 2003

Guru bahasa kurang mahir menulis

JAKARTA — Kemahiran menulis para guru SLTA bidang studi bahasa dan sastra di Indonesia sangat rendah. Kendati mereka lulusan jurusan atau fakultas sastra, tetapi kemampuan untuk menulis dan mengajarkan sastra kepada siswanya sangat minim. Keadaan ini tak lain karena selama ini bobot SKS untuk mata kuliah sastra kecil, hanya 10 SKS dari 150 SKS yang ada.

Karena itu, wajar saja kalau Sastrawan Taufik Ismail merasa prihatin dengan kondisi kemampuan guru bidang studi bahasa di SLTA di hampir seluruh Indonesia. Apalagi, setelah dirinya melakukan penelitian di 12 kota besar di seluruh Indonesia, sebagian besar guru-guru bidang studi bahasa dan sastra kemampuannya menulisnya rendah.

Kegelisahan dan keprihatinan Taufik Ismail tersebut dikemukakan ketika menjelaskan rencana Kongres Bahasa Indonesia VIII, Selasa (7/10), yang dihadiri Kepala Pusat Bahasa Dendy Sugono dan Sesjen, Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) Baedhowi. Kongres itu akan berlangsung 14-18 Oktober 2003 bertempat di Hotel Indonesia.

Menurut Taufik, kemampuan guru-guru bidang studi bahasa dan sastra itu, bukan hanya rendah untuk menulis, melainkan juga tidak mampu mengajarkan kepada siswanya bagaimana untuk menulis. Padahal, apresiasi siswa SLTA untuk menulis atau

Karena itu, sebaiknya pemerintah melakukan regulasi pendidikan guru bidang studi bahasa dan sastra di perguruan tinggi pencetak tenaga kependidikan. Paling tidak, kalau pun porsi sks untuk mata kuliah sastra 10 sks, tapi penekanan kepada mahasiswa untuk menulis harus lebih besar dibandingkan teori sastra.

mengarang sangat besar. Sayangnya, mereka tidak ada pembimbingnya.

"Karena itu, sebaiknya pemerintah melakukan regulasi pendidikan guru bidang studi bahasa dan sastra di perguruan tinggi pencetak tenaga kependidikan. Paling tidak, kalau pun porsi sks untuk mata kuliah sastra 10 sks, tapi penekanan kepada mahasiswa untuk menulis harus lebih besar dibandingkan teori sastra," tegasnya.

Dia yakin kalau itu dilakukan tidak mustahil lulusan LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan) atau PT yang mencetak calon tenaga kependidikan bidang studi bahasa dan sastra tidak hanya mampu mengajar bahasa dan sastra secara teori, tetapi juga mampu menulis khususnya sastra.

Di sisi lain, Departemen Pendidikan Nasional memiliki kebijakan untuk meningkatkan apresiasi para guru bidang studi bahasa dan sastra SLTA di seluruh Indonesia terhadap sastra. Depdiknas mulai

1999/2000 lalu membentuk tim khusus yang diketuai Taufik sendiri untuk memberikan pelatihan kepada guru-guru SLTA.

Alhasil, jelas sastrawan tersebut, sedikitnya sudah 1000 guru bidang studi bahasa dan sastra di 12 kota besar di Indonesia sudah dapat menulis. Para guru ini pun sudah mampu memberikan dan mengajarkan kepada siswanya bagaimana menulis. Hasilnya, para siswanya pun menjadi senang menulis atau mengarang.

Keterpurukan kemampuan menulis di kalangan guru dan siswa SLTA tersebut diperparah lagi, tandas Taufik, dengan langkanya buku-buku sastra di sekolah. Karena itu, pihaknya meminta Depdiknas untuk mengadakan buku-buku sastra di sekolah. Kalau pun sekarang ini sudah mulai berjalan, tetapi jumlahnya harus diperbanyak lagi. (mya)

Terbit, 8 Oktober 2003

Bahasa Indonesia di Sekolah

Teks Kosong Jiwa Kosong

Riris K Toha Br Sarumpaet

SEJAK kita bangun dari tidur hingga menutupkan mata untuk beristirahat malam, kita bergaul dengan kata. Sebetulnya kita hidup dalam lautan kata. Terbitan yang meluap, majalah berkilap, koran-koran, monitor, siaran televisi, iklan, pidato di segala tempat, siaran radio, lagu-lagu, perjumpaan, pembicaraan, mimpi, rencana, sampai kepada pikiran yang tersembunyi sekalipun semuanya adalah gelimangan kata, buah pikiran yang menunjukkan kemanusiaan kita.

ITULAH petanda kehidupan, keberaksaraan yang dalam hal perkembangan bahasa Indonesia saat ini dapat dipertanyakan. Soalnya, dalam gairah meraup kebebasan masa kini tampak pengguna bahasa Indonesia berada dalam kegalauan lokal dan global sehingga lahirlah bahasa gado-gado yang sudah sampai ke taraf mengkhawatirkan. Dari manakah sumber keadaan ini?

Kalau seorang mahasiswa pascasarjana di dalam ruang kuliah Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya bertanya kepada dosennya, "Gimana caranya *nyatuin* dan *nyimpulin* pendapat para ahli yang *segitu* banyak?", bolehkah kita mempertanyakan keberhasilan pengajaran bahasa Indonesia di sekolah menengah? Atau, karena kewalahan, secara apriori langsung saja masalah itu kita lemparkan pada masyarakat yang melahirkannya untuk kemudian menerimanya?

Apabila kita percaya pada bahasa sebagai buah pikiran, alat logika untuk meramu idiom demi penyampaian pikiran dan perasaan, dan berbahasa de-

ngan begitu adalah representasi pikiran dan gagasan, bagaimanapun cara berbahasa haruslah dikaitkan dengan kemampuan berpikir. Kecermatan dan kesantunan berbahasa seseorang adalah cerminan nalar dan budayanya, mengisyaratkan kelebihan dan kekurangannya, yang bagaimanapun menunjukkan kemanusiaannya. Oleh karena itu, apa yang terjadi dalam gelimang kata dan pikir di Indonesia saat ini amat berhubungan dengan pengajaran bahasa di sekolah.

Walaupun masyarakat percaya pada bahasa sebagai alat komunikasi, wahana terpenting untuk mengungkapkan makna, beberapa contoh menunjukkan bahwa buku pelajaran bahasa Indonesia:

1. lebih menekankan pengetahuan bahasa (seperti *kalimat tanya, tanda baca, imbuhan*) daripada keterampilan berbahasa;

2. pada umumnya menggunakan teks-teks kosong "dengan perubahan atau pengubahan seperlunya" atau "dengan mengubahsuaikan" (ungkapan ini ditemukan di buku *Pelajaran Bahasa dan Sastra*

Indonesia untuk kelas 1 SLTP terbitan Yudhistira, 1994) yang amat steril dan membosankan dipakai sebagai sumber dan landasan pembelajaran;

3. mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak merangsang pikiran apalagi perasaan dan menutup hampir semua cerita dengan pertanyaan "apakah yang patut kita tiru dari cerita itu?" (pada buku *Aku Cinta Bahasa Indonesia 3A* oleh Surono terbitan Tiga Serangkai, 1998), hal yang sekaligus menunjukkan pelajaran Bahasa Indonesia sebagai pelajaran Budi Pekerti dengan tokoh-tokoh yang dipajang dan tidak pernah beraksi, yang selalu suka menolong, gemar mengalah, dan pasti patuh;

4. mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak ber-alasan. Misalnya, "Bacalah dengan suara lantang, kemudian resapilah isi ceritanya dan katakan kembali dengan kata-kata kalian sendiri." (dalam buku *Bahasaku, Bahasamu, Bahasa Kita Bersama 6B* oleh G Sukadi dan Th M Issri Windarjati terbitan Gramedia, 1990).

Sulit untuk memahami apa manfaat membaca sebuah syair, "Syair Ken Tambuhan", dengan suara lantang dan harus disuarakan secara bersama-sama pula untuk kemudian mencoba meresapi isi cerita syair tersebut. Tambahan lagi, perintah juga kerap menjengkelkan. Alih-alih membicarakan kehidupan manusia dalam novel, siswa hanya disuruh membacakan "petikan novel di atas dengan intonasi menarik" (lihat buku *Mari Berbahasa Indonesia 2A* oleh Subroto dan kawan-kawan terbitan Erlangga, 1996). Timbul pertanyaan, ukuran menarik yang manakah yang dibutuhkan dalam pembacaan *Durga Umayi* karya YB Mangunwijaya tersebut?;

5. yang mengusahakan bahan

bacaan yang menarik dan baik, seperti pada judul *Mencari Bentuk Diskursus Kesenian Indonesia*, masih saja penulis buku hanya mengutamakan tugas membaca dan memahami teks, tidak menanyakan hal-hal yang mendasar perihal kesenian, perubahan masyarakat, tetapi hanya berkuat pada kehendak memamerkan kata-kata yang hebat dengan mencari maknanya. Demikian juga dalam membaca *Peranan ABRI setelah 50 Tahun Merdeka*, diksi *disharmoni*, *memberdayakan*, *kemangggalan* misalnya, tidak pernah disinggung hingga pada konsep dasarnya. Siswa tidak diperkenalkan pada *dwifungsi* atau bagaimana pemberantasan buta huruf dilaksanakan oleh ABRI (dalam buku *Fasih Berbahasa Indonesia 3A* oleh Gorys Keraf dan Frans Asisi Datang terbitan Erlangga, 1996);

6. banyak mengajukan judul dan isi bacaan yang sangat kentara hanya mempertimbangkan kepentingan penulis yang dengan demikian, melupakan kebutuhan siswa. Surat keputusan, instruksi presiden, peraturan, konsep mengenai pendidikan dan bahasa dipakai sebagai bahan bacaan untuk siswa sekolah rendah, seperti yang dijumpai pada buku *Bahasaku, Bahasamu, Bahasa Kita Bersama 6B* tadi;

7. tidak selalu berisi bahan yang sesuai dengan konteks siswa. Misalnya pemaksaan pemanfaatan kata "glajal bapa itu lemah" pada latihan pengucapan untuk anak kelas 1 SD. Saksikan juga judul "Robert Wolter Monginsidi Menjalani Hukum-an Mati".

Hal yang lebih rumit dan teknis tanpa kaitan dan arahan diajukkan pada siswa kelas dua SD seperti berikut: "Ucapkan dengan lagu tanya yang baik.

Susi, membaca, ya?

Ali, membaca, ya?

Sedang membaca, Ali?

Sedang membaca, Susi?

Iwan, membaca dongeng, ya?

Sedang membaca cerita, Ri-na?

Membaca apa, Susi?

Membaca dongeng, Andi?"

(buku *Aku Cinta Bahasa Indonesia 2A* oleh FX Surana terbitan Solo, 1990).

Ilustrasi yang ada juga tidak tepat dan mengelabui. Misalnya kereta api yang semestinya ke-

reta api di Jakarta, yang tampak dalam gambar adalah kereta api di Amerika Serikat sejenis Amtrak. Demikian juga suasana rapat OSIS yang sangat kaku, teratur, berjarak, dan sudah pasti tidak wajar. Ini kemudian dilengkapi dengan gambaran kelas PELAJARAN BAHASA INDONESIA (1) dengan dua baris siswa menghadap punggung bapak guru yang sedang menulis di papan tulis.



DARI kacamata pendidikan, contoh-contoh tadi menunjukkan kegagalan kita meletakkan bahasa sebagai alat pikir sekaligus alat pengenalan diri. Kita lupa bahwa belajar bahasa, kegiatan membaca, menulis, dan berbicara adalah bagian dari proses berpikir. Guru, penguasa yang membelakangi murid dan tokoh utama dalam kelas, dari contoh-contoh di atas adalah gambaran ketidakpedulian kita pada siswa.

Dalam kelas pengajaran bahasa Indonesia, gurulah yang bermonolog, dialah yang berhak berjalan di kelas, dialah anutan tunggal, sedangkan siswa mendengar, mencoba menyimak, menerima perintah, dan menjadi patuh. Bila kita simak kurikulum Sekolah Dasar, pelajaran Bahasa Indonesia itu melulu pelajaran dan pengetahuan bahasa, bukan ajang berpikir tempat siswa berlatih dan berkenalan dengan kemungkinan dan kebolehan berpikir kritis, kreatif, inovatif, apalagi mengenal diri dan kehidupan.

Kita selalu mengatakan bahasa sebagai alat menyampaikan pikiran dan pikiran yang jernih akan membuahkan bahasa yang jelas, tepat, sesuai, dan indah. Definisi itu tanpa malu-malu menunjukkan sudut pandang kependidikan kita: orang dewasa yang dengan sikap mengancam sekaligus menunjukkan kekuasaan berkata pada siswa bahwa yang utama adalah pikiran yang jernih. Kita lupa pikiran yang jernih hanya akan ada dan akan lahir dari lingkungan, tempat, latar, serta situasi yang dapat mengimbangi kejernihannya.

Kurikulum yang gamang, guru-guru yang berkusa tetapi tidak menguasai bahan, masyarakat yang tidak sadar akan pentingnya bahasa sebagai jati

diri, semuanya melengkapi lautan kata yang membanjiri anak-anak. Artinya, contoh-contoh dari buku pelajaran bahasa Indonesia di atas sulit melahirkan siswa yang berpikiran jernih. Tambahan lagi, manakah mungkin siswa bisa berpikir kritis dan kreatif kalau penguasa tunggal dalam kelas adalah guru, kalau yang bergema di kelas adalah monolog, dan bukan dialog?

Dialog mengisyaratkan keterlibatan dua pihak. Dalam hal pendidikan bahasa di sekolah, siswa haruslah diperlakukan sebagai subyek, "diizinkan masuk secara aktif dalam dunia yang sedang dibacanya, dan membuat bacaannya itu menjadi bagian dari dirinya." Inilah oleh Paulo Freire disebut sebagai membaca dan menulis yang harus keluar dari gerakan dinamis, *membaca dunia*, yaitu berbincang tentang pengalaman, berbicara bebas dan spontan, dan tidak memisahkan membaca dan menulis kata dari membaca dan menulis dunia.

Buku-buku pelajaran bahasa Indonesia yang dicontohkan tadi jelas tidak mengutamakan anak, tidak memfasilitasi pembelajaran karena yang didahulukan adalah pemertahanan tradisi kemudahan bagi orang dewasa sehingga tampaklah kita sebagai polisi lalu lintas linguistik yang mengira diri sebagai pemilik dan sumber kearifan.

Dalam urgensi membaca kata dan menulis dunia, dalam upaya mempersatukan siswa dengan apa yang dipelajarinya, terasa benar kecerobohan kita. Karena demi target dan melulu bertumpu pada keberhasilan kognitif, kita telah menyalakan kesempatan memahami anak sambil menariknya dari keunikannya. Ketika berbicara mengenai Malin Kundang, kita hanya bertanya tentang perilaku yang harus dihindari dan bukan membicarakannya serta memperkenalkannya sebagai kisah kemanusiaan, keserakahan dan kelemahan universal yang justru harus dikenali sebagai bagian dari diri.

Pantun-pantun lama dikutip dan dihafalkan, namun tidak pernah dipertanyakan keindahan kesamaan bunyinya, kesan yang diberikannya, dan bagaimana orang Indonesia secara turun-temurun sesungguhnya

telah dididik dan dibesarkan dengan moralitas yang khas justru bukan dengan hardikan atau pukulan, tetapi sindiran dan lelucon.

Padahal, karya-karya sastra yang dikutip dalam bahan ajar justru paling tepat dipakai sebagai bahan untuk memperkenalkan siswa pada lokalitasnya, pada keunikan yang memperjelas kemanusiaannya. Diskusi spontan, kisah-kisah siswa yang didengarkan di kelas, yang dapat dihubungkan dengan keadaan masyarakat bahkan karya, semuanya,—dengan bimbingan yang mempercayai kelebihan dan kemampuan siswa sehingga merangsang kreativitas dan orisinalitas—dapat membangun pribadi dan kepercayaan diri.

Dengan membaca, menulis, dan berbicara, siswa dapat dan harus didorong untuk menemukan dan mengembangkan pikiran dan suaranya, mulai menata dan memberi makna pada kehidupannya, dari mulai belajar mengenai dan dalam kehidupan. Ia menjadi hidup dan, dengan begitu, ia menyumbang pada kehidupan. Ketika siswa dapat mendengarkan pikiran dan suaranya sendiri, ia menemukan kehendak hidup, tujuan hidup, dan mendapatkan identitasnya. Orang yang seperti inilah yang sampai pada penemuan nilai hidup, yang akan bercita-cita, hanya karena ia sudah mengenal siapa dia dan apa yang hendak dilakukannya dengan kehidupan dan kesempatannya.



SEBENARNYA di tangan guru, dari bacaan, dalam pergaulan dan diskusi di kelas mengenai kehidupan, mengenai apa itu Indonesia dapat ditambahkan. Juga kesadaran akan betapa nikmat bisa berbahasa

dan mengajukan pikiran dan perasaan, serta alangkah bahagia punya sebuah pendapat. Pada dan melalui dialog dalam pelajaran bahasa Indonesia sesungguhnya keindonesiaan dapat ditanamkan.

Ketika berbicara mengenai lokalitas, siapa dan di mana kita dalam kehidupan, bacaan yang Indonesia yang menentukan. Manakala berhadapan dengan globalisasi, keadaan dan istilah yang sering dimanfaatkan sebagai alasan sekaligus momok, sebenarnya hanya keindonesiaan kitalah yang sedang ditantang. Artinya, sebagai tantangan, globalisasi hanya dapat kita hadapi dengan lokalitas yang justru harus mantap. Pertanyaannya, dari manakah kemandirian dan kepenuhan jiwa apabila bacaan yang disodorkan kepada siswa adalah teks yang kosong, kering, tak bermakna belaka?

Ini sekaligus hendak menggarisbawahi kegagalan pengajaran bahasa Indonesia dalam ranah lokalitas tadi. Guru yang hanya mengajar tanpa sadar betul akan apa yang sedang dikerjakannya, bahan yang hanya kaya di permukaan, tetapi melupakan cara belajar anak dan apa kebutuhan mereka, telah menghasilkan anak-anak yang hanya kaya akan kata tetapi tak mengenal dunianya.

Dengan demikian, ketika hantu globalisasi bergentayangan, anak-anak yang tidak terlalu sadar akan keindonesiaannya, yang juga tidak cukup memahami moralitasnya yang khas, akan dengan mudah beralih pada segala sesuatu yang baru, yang mudah, dan yang menyenangkan. Di sanalah ia meninggalkan lokalitasnya dan masuk pada dunia global. Dengan menyaksikan masyarakat yang tidak memiliki rasa ba-

hasa, kita juga tidak punya rasa bangga akan bahasa sendiri. Sejak awal kita tidak cukup dibimbing mencari keunikan kita, menghargai kelebihan dan kekurangan kita. Maka, lahir-lah masyarakat gado-gado dengan bahasa campur baur dan integritas campur sari yang bagaimanapun secara psikologis adalah gambaran dari kumpulan orang-orang yang tidak punya diri dan sakit.

Perlu ditambahkan, sakit mancanegara dan berbahasa sesuka hati juga diizinkan bahkan dipupuk oleh pendidikan luar sekolah, pendidikan anak balita yang kini sangat menguntungkan di Indonesia. Kesadaran memberikan yang terbaik pada anak sedini mungkin telah dikuasai pendidikan berbahasa Inggris. Itulah upaya membekali anak dengan alat untuk melesat ke dunia luas, dunia global yang mungkin karena kekuasaannya mampu memusnahkan jati diri dan kesadaran lokalitas para orangtua.

Dunia anak usia dini ini, masa terbaik untuk menyemaikan nilai-nilai moral dan tindakan kebajikan, dengan kekenesan berbahasa Inggris sekaligus tentu saja menghidupi budaya yang dibawahnya, tentu saja telah dipakai justru untuk meniadakan keindonesiaannya.

Globalisasi yang dirajai dan dilandasi pasar ini telah hanya memanfaatkan anak, siswa, sebagai komoditas. Bukan sebagai manusia. Di sini tampak keberaksaraan, pengajaran, dan penyekolahan sangatlah memerdekakan sekaligus mendominasi.

Bukan hanya bahasa Indonesia yang kini berada dalam bahaya. Kemajuan, kebebasan, kecanggihan dalam segala segi kehidupan, pemikiran dan pertimbangan pendidikan, ekonomi, budaya, bahkan politik, dan lautan kata madu dan racun telah mengisyaratkan kejatuhan bangsa Indonesia.

Pengajaran bahasa tidak bisa dilepaskan dari sastra

JAKARTA — Selama ini pengajaran Bahasa Indonesia di hampir semua jenis dan jenjang pendidikan selalu dianggap sebagai mata pelajaran yang membosankan, menakutkan, gersang, terlalu teoritis dan sebagainya. Dengan kata lain, pengajaran Bahasa Indonesia tidak atau kurang diminati peserta didik.

Untuk itulah, Kongres Bahasa Indonesia VIII diharapkan dapat memberikan jalan keluar atau sekurang-kurangnya saran untuk mengubah citra buruk tersebut menjadi sesuatu yang memesonakan.

Menurut Mendiknas Malik Fadjar setiap kali menggunakan kata Bahasa Indonesia termasuk pengajarannya, kecuali konteks bahasanya, harus diartikan sebagai bahasa dan sastra. Ini disebabkan bahasa dan sastra itu ibarat dua sisi sebuah mata uang.

"Jika hanya ada satu saja, uang itu bukanlah mata uang yang berguna. Jadi pengajaran bahasa Indonesia harus seiring dan sejalan dengan pengajaran sastra atau sebaliknya," ujarnya dalam pemaparan makalah mengenai Bahasa Indonesia, Pendidikan Nasional dan Kehidupan Berbangsa dalam Kongres Bahasa Indonesia VIII

kemarin.

Dengan demikian, janganlah pengajaran sastra atau pengajaran bahasa terutama pada jenjang pendidikan dasar dan menengah diarahkan untuk mencetak sastrawan atau ahli bahasa (linguis).

Bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi tidak hanya dibutuhkan warga negara Indonesia. Warga negara asing pun cukup banyak yang berminat untuk mempelajari dan menguasai Bahasa Indonesia.

"Berdasarkan informasi yang saya terima, pengajaran bahasa Indonesia di luar negeri perkembangannya cukup menggembirakan. Karena itu kongres ini diharapkan dapat memberi masukan yang memungkinkan kita untuk memperbaiki citra Indonesia di luar negeri."

Seperti halnya beberapa negara asing selain negara yang berbahasa Inggris mampu memperkenalkan budayanya di Indonesia melalui kursus bahasa asing yang diselenggarakan oleh negara yang bersangkutan. Untuk itu Pengajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) baik di dalam maupun luar negeri perlu direncanakan atau diprogramkan lebih rinci. (ari)

Pelajaran Bahasa Indonesia Juga Terkandung Makna Kebangsaan

◆ Kongres Bahasa Indonesia VIII Berakhir

JAKARTA, KOMPAS — Peran guru Bahasa Indonesia sebetulnya sangat penting dalam mendidik dan mencerdaskan bangsa. Apa yang diajarkan bukan sekadar pelajaran untuk pengetahuan saja, tetapi bahasa Indonesia langsung dipergunakan untuk bahasa pergaulan nasional. Artinya, dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia yang diberikan oleh guru juga terkandung makna kebangsaan.

Hal ini disampaikan Menteri Pendidikan Nasional Abdul Malik Fadjar ketika menutup Kongres Bahasa Indonesia VIII di Jakarta, Jumat (17/10). "Mengajarkan bahasa Indonesia itu sekaligus memberikan gambaran jiwa kebangsaan. Ini tidak mudah, namun bisa dilakukan," ujarnya.

Seorang guru Bahasa Indonesia seharusnya mampu menciptakan karya yang bisa dimunculkan setiap angkatan. "Ini tantangan ke depan yang harus kita hadapi semua. Kita sadar bahasa dapat melahirkan generasi yang mampu menunjukkan orang-orang yang ber peradaban," ujarnya.

Menurut Malik, tantangan ini

memang menjadi kerisauan yang harus dijawab dengan kerja konkret. Untuk itu, para pakar bahasa dan sastra nasional harus mau turun dan terlibat aktif dalam pengajaran.

"Hanya dengan begitu bahasa Indonesia dapat memperoleh bentuk suasana yang lebih hidup dan bisa mengembangkan kehidupan yang lebih bermakna," ujarnya.

Menurut Malik, ada lima langkah yang perlu diambil. Pertama, menanamkan dan menumbuhkan keberaksaraan secara fungsional. Kedua, menekankan kemampuan berkomunikasi yang baik. Ketiga, menjalankan pendekatan keilmuan. Keempat, memainkan peran pemeliharaan terhadap temuan dan kelayakan bahasa. Kelima, memainkan peran pemugaran, pemeliharaan, dan perbaikan bahasa sehingga menjadi bahasa yang hidup di era globalisasi untuk ketahanan nasional.

Bersifat kohesif

Dari seminar kebahasaan di Universitas Negeri Semarang (Unes), kemarin, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan-

an Fuad Hassan mengingatkan bahwa kehidupan kebangsaan Indonesia yang satu dan bersatu tak bisa lepas dari peran bahasa Indonesia. Artinya, tanpa adanya bahasa Indonesia sulit membayangkan tiap orang Indonesia—yang berbeda suku dan bahasa—dapat saling berkomunikasi satu sama lain.

"Bahasa Indonesia bersifat kohesif. Coba, apa jadinya dengan kehidupan kebangsaan kita tanpa adanya bahasa Indonesia," kata Fuad Hassan.

Menurut Fuad, bahasa Indonesia bukan saja hidup sebagai bahasa umum, tetapi juga ditetapkan sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi. "Bahasa Indonesia sudah dipakai secara luas dalam politik kenegaraan, dalam kesusastraan, dan dalam seluruh jenjang pendidikan. Ini artinya, bahasa Indonesia memenuhi syarat sebagai bahasa nasional," katanya.

Bagi Fuad, kritik bahwa bahasa Indonesia tidak bisa lugas dan jenis bahasa yang tidak bisa tertib sepenuhnya salah. "Bukan bahasanya yang salah, namun penggunaannya yang sembronon," ujarnya. (MAM/ATO)

Belajar Bahasa Juga Berpikir Teratur

BELAJAR bahasa itu juga ada kaitannya dengan proses berpikir. Ketika kita harus menyusun kalimat, tidak bisa kalimat itu asal menjajarkan kata saja. Sebab, ada logika bahasa. Apabila kata-kata itu disusun asal-asalan, akan menyiratkan ketidakteraturan pikiran. Pikiran yang akan kita sampaikan melalui bahasa menjadi tidak teratur.



Betapa pentingnya bahasa itu dipahami, sehingga apabila masyarakat kita secara tekun belajar bahasa dengan intens, akan melatih cara berpikir teratur. Akan teratur pula penyampaian pemikiran-pemikiran itu melalui bahasa. Sebab, bahasa akan tampak teratur jika pikiran penuturnya juga teratur. Ini tak beda dengan menulis

puisi, kekuatannya ada pada bahasa agar puisi itu bisa memberi kesan berbobot.

Coba saja kita dengar orang mabuk yang berbicara asal *nerocos*, tentu karena pikirannya kacau. Berbeda dengan orang yang menyiapkan diri bicara di depan banyak orang. Mau tidak mau harus memilih kata-kata yang pas, yang sesuai, dan berusaha untuk tidak banyak membuat kesalahan bahasa. Hanya saja, kesadaran kebanyakan masyarakat kita untuk itu masih sangat kecil. Sebab, kalau kita baca tulisan-tulisan di berbagai tempat yang jelas dibuat masyarakat, banyak kesalahannya. Terutama ejaannya. □ - o

(Boedi Ismanto, Penyair)

Kedaulatan Rakyat, 24 Oktober 2003

BAHASA INDONESIA-PENGARUH BAHASA ASING

Peniadaan Bahasa Serapan?

PEKAN lalu saya membaca berita di sebuah media massa cetak tentang usulan agar ada keputusan politik untuk meniadakan bahasa serapan. Untuk itu, diusahakan agar kata-kata dari bahasa asing dicari padanannya dalam bahasa Indonesia. Perlu dicatat, usulan itu muncul dalam sebuah pertemuan para munsyi (ahli bahasa) pada bulan Oktober yang dinobatkan sebagai bulan bahasa ini.

Usulan itu sebenarnya tidak baru. Karena tidak baru itulah, usulan tersebut sebenarnya juga tidak realistis. Kalau realistis, tentulah hal seperti itu sudah terlaksana. Apakah kalau tidak terlaksana kita menuding diri kita malas mencari padanan? Tudingan

Warta Kota, 13 Oktober 2003

Bukan "Puritanisme"

Yang Memperkaya dan Memperjaya

Bahasa Kita

Sudjoko

RUJUKAN diskusi bahasa *Kompas* menyebutkan bahasa Latin melindas "bahasa-bahasa Eropa dan Mediterania". Dalam makul (makalah kuliah), saya selalu menulis Laut Tengah. Asal *Mediterania* itu kata Latin purba *terra* 'tanah' dan *medius* 'tengah', 'madya'. *Eropa* berasal dari kata Yunani purba dan Latin purba. Kebetulan saja makul (dulu ditulis *ma'kul*) berarti masuk akal (makal), *logical, rational, credible, acceptable*.

SEKIAN abad kemudian bahasa Latin dilindas bahasa-bahasa yang dulu dilindasnya. Masih untung ada yang melindunginya dari kehancuran mutlak.

Yang kini beredar di dunia hanyalah sejumlah kata Latin, dan jumlahnya besar, yang sebagian sudah diindonesiakan. Misalnya *republik, kampus, senat* yang berasal dari kata-kata purba 2.500 tahun yang lalu tetapi kita sangka modern.

Tetapi kata bukanlah bahasa. Menyebut seratusan kata Arab kita mampu. Berbahasa Arab, tidak. Begitu pula, seribu kata (meng)Inggris dalam bahasa kita bukanlah bukti bahwa kita paham bahasa Inggris. Kita cuma disangka, atau dianggap, paham bahasa Inggris dan rupanya inilah yang terutama kita cari. Mengapa ini dicari? Ah, kita tahu sendirilah. Tetapi kalau diuji—dan saya sering mengujinya—barulah ketahuan bahwa kita bego Inggris.

Bahasa kampung

Awalnya, Roma hanyalah segugus kampung. Jauh sebelum tarikh Masehi, di sekitar Sungai Tiber, 25 kilometer dari muara-

nya, muncul beberapa kampung. Kelak kampung-kampung ini disebut Roma. Pedunnya punya bahasa sendiri, yang kelak disebut bahasa Latin sebab dipakai di suatu wilayah kecil yang bernama Latium. Jadi bahasa Latin semula hanyalah salah satu dari sekian bahasa di Italia. Malah bahasa Yunani pun bercokol di jazirah tersebut sebagai bahasa yang sangat berwibawa.

Pedusun istimewa di pinggir-an Tiber ini lambat laun mampu menguasai Eropa dan luar Eropa. Bahasa Latin pun menjadi hebat, ilmiah. Tahun 1500 hampir semua buku terbitan Eropa (35.000 judul) berbahasa Latin. Pustaka berbahasa Latin masih jaya di Eropa abad ke-18. Tetapi ini bukan adibahasa yang dipakai Cicero dan lain-lain di Romawi. Ini sudah banyak bercampur dengan apa yang disebut *vulgar Latin*. Saya tidak tahu bahasa Latin, jadi saya tidak bisa menerangkan ini.

Pokoknya, begitulah riwayat suatu bahasa kampung di Kali Tiber. Rupanya, bahasa kampung, bahasa jelata, terutama kosakatanya, tidak dapat kita remehkan.

Bahasa kampung jadi serbaguna

Tahun 1579, seorang EK, penyunting *The Sheperdes Calender*, menulis sebagai berikut:

"For in my opinion it is one special prayse of many which are dew to this Poete, that he has labored to restore, as is their rightfull heritage, such good and natural English words as have been long time out of use and almost cleane disherited. Which is the onely cause that our Mother tongue, which truly of it self is both ful enough for prose and stately enough for verse, hath long time ben counted more bare and barrein of both."

Bahasa di atas tentulah bukan bahasa Inggris sekarang. Tidak ada di Inggris dan Amerika yang mau menganjurkan bahasa "asli" itu, entah seberapa aslinya. Maka Lee Emory menulis dalam *The American Heritage Dictionary*, "The English recognized the legitimacy of their native tongue for all modes of communication, including those technical fields formerly dominated by Latin and Greek."

Jauh sebelumnya, yakni di Zaman Gelap, para pendekar bahasa Spanyol, Perancis, Jerman, dan lain-lain telah berbuat sama. Jadi, bahasa-bahasa yang tertindas tadi tidak mati semua, biarpun *long out of use and almost cleane disherited*. Sementara itu ada saja pencinta bahasa yang memeliharanya. Di antara pendekarnya terdapat William Shakespeare dan Martin Luther. Luther menterjemahkan *Alkitab*. Hanya empat persen dari kosakata Shakespeare berbau Latin. Walhasil, bahasa Shakespeare tidak dimengerti kaum pandai di masa hidupnya.

Tak sanggup melawan?

Rujukan diskusi *Kompas* menyebutkan, "Hegemoni bahasa Inggris yang didukung oleh modal saat ini memang hampir tak dapat dibendung oleh bahasa-bahasa mana pun di dunia. Bahasa Jerman dan bahasa Perancis yang dikenal kukuh kewalahan juga dibuatnya."

Arti *kewalahan* 'tidak sanggup melawan'. Tidak ada bukti bahwa bahasa Perancis dan Jerman "kewalahan" menghadapi bahasa Inggris. Tiap hari saya membaca koran-koran Belanda. Sama sekali tidak ada bukti bahwa bahasa Belanda "kewalahan" menghadapi bahasa Inggris. Ini tentu mengagumkan sebab Belanda itu tetangga Inggris, cuma di seberang negara Inggris. Seandainya Nederland itu dihuni bangsa kita, mampuslah sudah bahasa Indonesia dan semua bahasa daerah. Dan kita punya alasan gampang untuk menerangkannya.

Tentu saja ada kata-kata Inggris yang masuk ke bahasa Belanda. Misalnya *computer*. Tetapi kekuasaan, *hegemonia* (Yunani kuno untuk *pimpinan*), tidak ada.

Lain halnya bahasa Indonesia, milik bangsa yang amat jauh dari Inggris. Kita sudah bisa berkata, "Indonesianya tidak ada". Ini pun dengan nada mengolok-olok bahasa Indonesia dan sekaligus bangsa serta leluhur kita. Maksud kita sebenarnya bukan Indonesianya tidak ada, tetapi "Di dalam kepalku tidak ada".

Tokoh kita pun suka berkata—misal dalam suatu musyawarah besar dengan ratusan hadirin—"Bahasa kita miskin". Tak ada dari ratusan hadirin di TIM hari itu yang membantah. Ya, mana mau orang pandai berkata, "Kepalku miskin kata pribumi." Mana ada yang mau mengaku, "Aku tidak punya kamus (Indonesia, Jawa, Sunda, Aceh, dan lain-lain)."

Dan macam-macam saja yang orang ajukan untuk meremehkan bahasa-bahasa di Nusantara. Si Inggris 'lebih tepat'-lah, yang Inggris 'sudah internasional'-lah, Indonesianya primordial-lah, kata ini-itu di *Kamus Umum Bahasa Indonesia* tidak dikenallah, dan seterusnya. Ini bukan lagi kewalahan alias tidak sanggup melawan. Ini tidak mau melawan. Ini sengaja me-

lahap kosakata Inggris tanpa batas (biarpun Indonesianya ada, dan diketahui umum, kata-kata (meng)Inggris juga yang dipakai dan sering dalam judul berita sehingga mencolok). Dengan rasa bangga lagi. Malah dengan rasa maju, rasa pintar, rasa modern. Jadi ini bukan perkara bahasa. Ini terutama perkara jiwa, perkara sikap. Ini gejala kolonialisme sukarela, *voluntary colonialism*.

Yang sok Inggris

Yang kuminggris di Indonesia bukanlah cuma pemodal atau kaum yang didukung modal. Mereka itu terutama jutaan orang yang ingin sekali dianggap tidak bodoh, tidak kumpungan. Mereka ingin kerèn, ingin keminter, ingin dianggap beda dari jelata. Cuma jadi pelajar, mahasiswa, dan sarjana saja tidak cukup. Bahasa juga mesti menunjukkannya. Caranya mudah, menabur kata-kata (meng)Inggris dalam berbahasa Indonesia.

Berikut kutipan dari koran: *Manajer Proyek Modernisasi Becak Puspar UGM, Dr Danang Parikesit mengatakan, untuk mensosialisasikan penggunaan becak baru tersebut, Puspar UGM bekerjasama dengan Baitul Maal Muamalat Yogyakarta akan memberikan becak itu kepada 20 tukang becak untuk dioperasionalisasikan.*

Menurut dia, modernisasi desain itu lebih diarahkan pada modifikasi bentuk agar tarikannya lebih ringan, operasionalnya lebih efisien dan kompetitif, tetap tidak berpolusi ...

Berita koran itu dibaca beribu-ribu orang. Bayangkan akibatnya.

Terkadang kita memberanikan diri juga menulis satu atau beberapa kalimat Inggris. Dan biasanya ini buruk, salah, ya a bahasanya, ya ejaannya.

Contohnya:
I'm so sorry, there is my joul. But thank's you so much, Yes You can have reunion, But, can you have a time? OK, I ve suggested Mas Marno.

Contoh lain:
Actually, i dont like her style to perfomance. But i think she have unfair treaten by Islamic Organization and the people of muslim society. Many Indone-sian singers more sexy and more skin to show than Inul but why

they never protest to them, example Krisdayanti or Andien.

Ini tulisan sarjana yang berkedudukan tinggi di negara kita. Banyak sarjana adikota menulis seperti ini. Untung saja mereka pamer sebab dari sini ketahuan mengapa kebanyakan sarjana kita gagal TOEFL.

Hasilnya

Setelah rajin memborong nekakata Inggris untuk menghujani bahasa kita, apa hasilnya? Berikut ini beberapa ungkapan Inggris dari aneka *textbook* yang dipakai para dosen kita, dan terjemahan mereka sendiri:

- *in either case...* pada kasus (peristiwa) lainnya

- *to reason passionately...* untuk berintelek-intelek

- *certain key social values...* nilai sosial kunci tertentu

- *The pieces began to fall in place...* Pecahlah keadaan secara tak sengaja.

- *The logic is quite simple...* Logika oleh karena adanya penyederhanaan dari hal tersebut.

- *It would go much too far to discuss here the Greek origins...* Yang berasal dari Yunani kini lebih jauh akan didiskusikan.

- *The farmer paid the President a visit...* Petani membayar Presiden untuk suatu kunjungan.

- *We need but look at the personalities and events...* Kita tidak lebih dari pada sekadar mempelajari tokoh-tokoh dan peristiwa.

Jadi apa yang kita lihat di sini? Mengerti kata tidak berarti mengerti bahasa. Mengerti ribuan kata Inggris tidak berarti mengerti bahasa Inggris. Pengindonesiaan keruntang-pukang seperti di atas mengisi kuliah para dosen.

Kata jelata

Berikut ini ada sejumlah kata dari bahasa jelata kita mengenai waktu, kedokteran, juga ekonomi. Kalau anda sempat, silakan tulis kata Inggrisnya. Kata, bukan keterangan Inggrisnya: *lusa, seganu* (kemarin dulu), *keti* (seratus ribu), *renyang* (rasa tak enak badan), *meriang* (agak demam), *meradang* (badan tambah panas), *pengar* (rasa berat kepala), *kokol* (gigil amat kuat), *biut* (tak mau sembuh-sembuh). *banasai* (su-

dah lama sakit), *royan* (sejenis penyakit pada perempuan selepas bersalin), *berganduh* (bertukar tambah), *cepo* (tak punya uang), *tukon* (barang dagangan), *jomblo* (tidak laku), *kamanigan* (mau terlalu untung, malah buntung), *mutakil* (mencari untung secara licik), *angkil* (uang saku), dan *jujul* (uang kembalian).

Bahasa daerah

Sebagai warga Bandung, boleh dikata tiap hari saya mendengarkan siaran khusus berbahasa Jawa dan Sunda. Acaranya sekian jam sehari. Siaran teratur bahasa Minang juga ada. Isinya banyak percakapan ramah dengan pendengar dan banyak lagu daerah. Sambutannya ramai. Lucunya, diminati pendengar yang tak mampu bicara Jawa juga. Para penyiar

selalu gembira ditelepon orang Sunda, Minang, Batak, dan lain-lain. Eddy Silitonga malah pandai berbahasa Jawa dan merekam lagu-lagu Jawa. Bahasa kaum muda banyak terdengar. Isi siaran radio di kota-kota lain saya tidak tahu.

Koran *Suara Merdeka* di Semarang selalu muat karangan berbahasa Jawa. Inilah penyelamat bahasa daerah, dan kosakata daerah. Inilah sumber kekayaan bahasa Indonesia, khususnya kosakata Indonesia. Puritanisme bahasa, apa pun maksudnya, merugikan.

Perawat bahasa

Tidak mungkin semua pihak diminta memelihara bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa koran, bahasa majalah, bahasa radio, bahasa iklan, dan lain-lain merasa harus meng-

utamakan bahasa pembaca. Kalau pembacanya lebih suka bahasa yang membetawi, ya korannya bisa memutuskan untuk membetawi. Misalnya, banyak sekali kata yang berakhiran *-in* di situ. Jadi biarlah keinginan mereka. Mereka harus jualan, mereka ingin laris, dan alatnya ialah bahasa yang cocok. "Ke Carrefour aja, ah...! Murah abiiis!"

Malah untungnya bagi kekayaan bahasa Indonesia ada, terutama kosakatanya. Kata *curhat*, misalnya, mula-mula saya tahu dari bahasa teruna di koran. Sekarang, ini bukan kata kaum remaja lagi. Kata ini telah memperkaya bahasa Indonesia.

Yang bisa ditugasi memelihara bahasa baik—benar-benar ditugasi oleh pemimpin—ialah guru sekolah, dosen, penulis buku ajar, hakim, pengacara, menteri, dan lain-lain. Semua makul karangan dosen, misalnya, diharuskan berbahasa baik.

Dalam makul ini dianjurkan mengutamakan kata-kata pribumi. Dosen bisa diwajibkan memiliki kamus. Kewajiban dan anjuran datang dari menteri pendidikan.

Kompas, 13 Oktober 2003

Bahasa Asing Bukan Ancaman

JAKARTA - Bahasa asing jangan dianggap ancaman bagi kelanjutan bahasa Indonesia. Dengan menggunakan bahasa asing sesuai lingkungan, orang justru akan menghormati bahasa Indonesia. Dengan begitu, bahasa Indonesia tetap menjadi tuan rumah di negeri sendiri sekaligus membuat orang asing tertarik mengenali bahasa kita.

Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan hal itu pada Kongres VIII Bahasa Indonesia yang berlangsung di Jakarta, Kamis pekan lalu. Pada kongres tersebut, Susilo menyampaikan makalah bertajuk "Bahasa Indonesia sebagai Pemerkukuh Persatuan Bangsa dan Kesatuan Negara". Ia berpendapat, dalam situasi tertentu kita tidak dapat berkeras menggunakan bahasa Indonesia.

"Kalau sedang melakukan pembicaraan dengan orang asing, saya memang tidak menggunakan bahasa Indonesia, tetapi sering kali saya siapkan istilah-istilah umum bahasa Indonesia. Kata-kata, seperti 'apa kabar', 'Selamat datang', 'Bali yang indah', merupakan kata yang dengan mudah diingat. Dengan jalan itu mereka mudah mengenali bahasa Indonesia," katanya.

Cara-cara seperti itu mampu meningkatkan apre-

siasi masyarakat asing terhadap bahasa Indonesia, sehingga kekhawatiran bahasa Indonesia dapat hilang karena banyaknya kata asing dapat tidak terjadi.

Susilo menambahkan, kesamaan bahasa yang dimiliki seluruh rakyat Indonesia telah menghindarkan bangsa ini dari perpecahan ketika timbul konflik komunal. "Seperti yang terjadi di berbagai negara, seperti Yugoslavia. Perbedaan bahasa sering menimbulkan terjadinya konflik komunal antarwarga negara. Karena perbedaan itu pula negara tersebut akhirnya terpecah-belah dan tidak dapat dipertahankan untuk terus menjalankan negara secara bersama-sama," katanya.

Sebagai negara yang memiliki bahasa nasional sendiri, Indonesia tergolong beruntung. Bahasa Indonesia merupakan sarana pemersatu yang dapat diandalkan untuk mencegah timbul dan berkembangnya konflik komunal. Meski Indonesia memiliki banyak bahasa daerah, namun bahasa daerah bukan merupakan ancaman terhadap keberadaan bahasa Indonesia. Jika memang bahasa daerah digunakan sesuai dengan tempat dan waktunya, maka kekayaan budaya itu dapat berjalan beriringan dengan bahasa Indonesia.

(AS/A-18)

SP, 20/10/03

Tenaga asing harus mampu gunakan bahasa Indonesia

JAKARTA — Pemerintah perlu menerapkan aturan khusus yang terkait dengan penggunaan bahasa Indonesia bagi tenaga asing yang akan bekerja di Indonesia. Aturan tersebut merupakan syarat bagi mereka yang akan bekerja di Indonesia, yaitu tenaga asing harus mau menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar sehari-hari selama bekerja di Indonesia.

Aturan ini perlu segera dibuat oleh pihak terkait, seperti Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pusat Bahasa, pihak imigrasi dan lainnya. Hal ini mengingat persaingan pasar bebas sudah berada di ambang pintu dan persaingan tenaga kerja makin ketat sehingga yang pasti tenaga asing akan membanjir di Indonesia.

Menurut mantan Mendiknas Prof Wardiman Djonegoro, membanjirnya tenaga asing di Indonesia sudah terlihat nyata pada tahun 1997. Bahkan, hampir sebagian besar dunia periklanan di Indonesia diisi oleh tenaga asing dari Philipina.

"Kalau AFTA yang sebentar lagi akan memasuki Indonesia, dan ribuan tenaga asing membanjir di Indonesia, maka bukan tidak mungkin akan membuat tenaga kerja dari dalam negeri akan *complain* dan protes kepada pemerintah," ujarnya di sela Kongres Bahasa Indonesia VIII yang dibuka oleh Menko Kesra Yusuf Kalla, Selasa (14/10).

Wardiman mengatakan jauh hari pihaknya sudah mengingatkan kepada pihak-pihak terkait akan ancaman datangnya tenaga kerja asing dan

membuat makin kecil peluang tenaga kerja dari dalam negeri.

Menurutnya, membanjirnya tenaga asing sebenarnya membuka peluang pula bagi makin diperlukannya tenaga pengajar Bahasa Indonesia. Manfaat lainnya, bila orang asing fasih menggunakan bahasa Indonesia, maka kesempatan pula baginya untuk memanfaatkan bidang politik.

Untuk itulah, maka penggunaan Bahasa Indonesia perlu makin dipersebarluaskan. Sebab saat ini saja belum seluruh masyarakat Indonesia mampu menggunakan Bahasa Indonesia. Hanya sekitar 83 persen penduduk yang mampu menggunakan Bahasa Indonesia, sementara sisanya 17 persen belum mampu menggunakan Bahasa Indonesia.

Di luar negeri hanya sekitar 40 universitas yang membuka pelajaran Bahasa Indonesia. "Jumlah ini saya rasa masih sangat sedikit, kalau kita ingin bahasa Indonesia makin banyak dipahami dan digunakan masyarakat dunia," ujarnya.

Nama asing

Dalam sambutan Wakil Presiden

Hamzah Haz yang dibacakan Menko Kesra Yusuf Kalla mengatakan Bahasa Indonesia memainkan peran yang amat penting sebagai penggalang dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Tatanan kehidupan dunia juga sudah berubah, globalisasi pasar bebas makin dekat. Kondisi ini akan mempengaruhi cara berperilaku dan berbahasa. Masyarakat akan makin banyak yang menggunakan bahasa asing, ujarnya.

Menurut Yusuf, perlu dibuat standar kemampuan Bahasa Indonesia agar komunikasi dalam kancah perdagangan bebas juga makin lancar. Makin canggihnya teknologi informasi, maka makin membuat perubahan terhadap budaya dan bahasa, termasuk pengaruhnya terhadap Bahasa Indonesia semakin besar.

Dampak pengaruh global inilah — apalagi sejak terjadi reformasi di tahun 1997, orang hampir lupa cara berbahasa Indonesia. Ini terlihat dari banyaknya penggunaan nama-nama asing di tempat umum. Untuk itulah, eksistensi Bahasa Indonesia harus makin dimantapkan. (ari)

Untuk itulah, maka penggunaan Bahasa Indonesia perlu makin disebarluaskan. Sebab saat ini saja belum seluruh masyarakat Indonesia mampu menggunakan Bahasa Indonesia. Hanya sekitar 83 persen penduduk yang mampu menggunakan Bahasa Indonesia, sementara sisanya 17 persen belum mampu menggunakan Bahasa Indonesia.

Tempo, 15 Oktober 2003

Pelestarian Bahasa Tak Mesti dengan UU

JAKARTA, KOMPAS — Pengembangan bahasa Indonesia hendaknya sejalan dengan upaya pelestarian bahasa etnik atau bahasa daerah. Bahasa Indonesia dan bahasa etnik saling memperkaya dan memperkuat identitas bangsa. Namun, upaya pelestarian bahasa tak mesti ditempuh dengan Undang-Undang Bahasa.

Wacana tersebut mengemuka dalam hari kedua Kongres Bahasa Indonesia VIII di Hotel Indonesia, Jakarta, Rabu (15/10). Satu dari lima sesi persidangan kemarin secara khusus membahas peran bahasa dan sastra daerah dalam memperkuat ketahanan budaya bangsa.

Dipandu pakar bahasa, Anton M Moeliono, tampil empat panelis masing-masing Benyamin Lakitan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Direktur Teknik Ditjen Otonomi Daerah Depdagri Wahyu Najib, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Ambo Enre Abdullah, dan ahli linguistik dari Universitas Sumatera Utara Prof Dr Sibarani MS.

Para pembicara sepakat bahwa era otonomi daerah memberi ruang penguatan lokalitas sebagai jawaban atas derasnya pengaruh globalisasi. Bahasa daerah sebagai bagian dari kekayaan lokal hendaknya dilestarikan sejalan dengan upaya

pelestarian bahasa Indonesia.

Hanya saja, menurut Sibarani, pelestarian bahasa daerah dan bahasa Indonesia tidak mesti ditempuh dengan menirakan Undang-Undang Bahasa. Lakitan menilai, penerapan kurikulum berbasis kompetensi dalam pengajaran bahasa di sekolah-sekolah pun belum merupakan jaminan lestarynya sebuah bahasa daerah.

"Orang kadang terjebak dengan simplisitas bahwa suatu masalah bisa diselesaikan dengan undang-undang. Padahal, mungkin jauh lebih efektif jika persoalan mendasar yang disentuh," ujar Lakitan.

Gagasan tentang perlunya Undang-Undang Bahasa dimunculkan pakar linguistik, Prof Dr Harimurti Kridalaksana, dalam sesi sebelumnya. Mengacu pada Pasal 32, 36, 36 (c) UUD 1945 (hasil amandemen), Kridalaksana mengingatkan bahwa negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

Agar pasal tersebut operasional, sudah saatnya dipikirkan untuk membuat undang-undang organik tentang bahasa. Alasannya saat ini, apa yang disebut politik nasional itu masih berupa kesepakatan masyarakat dan belum menjadi dokumen formal. (NAR)

K, 16/10/03

Mencari Jalan Mewibawakan Bahasa Indonesia

ILMU yang pertama kali diajarkan Tuhan kepada Nabi Adam —nenek moyang manusia— adalah bahasa. Demikian pernyataan yang termaktub dalam Kitab Suci Alquran surat *Al Baqarah*. Sementara itu, para linguis melansir bahwa bahasa aktivitas manusia mencapai 75% adalah kegiatan berbahasa. Artinya, bahasa merupakan variabel kebudayaan yang paling penting posisinya dalam peradaban manusia.

Di sisi lain, kita pun kemudian ikut meyakini kebenaran bahwa bahasa adalah cerminan jiwa seseorang, adalah identitas bangsa, adalah jendela dunia, dan masih banyak lagi. Menyadari posisi bahasa begitu penting, maka setiap negara selalu melindungi eksistensi bahasanya dengan seperangkat hukum.

Saat para pendiri bangsa mengikrarkan Sumpah Pemuda, mereka pun sudah menyadari betapa pentingnya bahasa, sehingga bahasa Indonesia menjadi salah satu butir sumpah itu. Tetapi, kemudian sangat disayangkan eksistensi bahasa Indonesia baru dilindungi oleh konstitusi Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Belum ada kekuatan hukum lain yang ikut melindungi UUD 1945 dalam upaya melindungi bahasa Indonesia.

Adalah Kongres Bahasa Indonesia (KBI) VIII yang berlangsung 14-17 Oktober ini yang meniupkan angin segar. Kongres yang berlangsung di Hotel Indonesia, Jakarta, dengan peserta tidak kurang dari 1.000 orang, itu salah satu bahasan utamanya menyangkut kemungkinan dibuatnya Undang-undang (UU) Bahasa Indonesia untuk mempertegas wewenang Pusat Bahasa dalam upaya pelestarian dan pengembangan bahasa Indonesia.

Kepala Pusat Bahasa Departemen

Pendidikan Nasional Dendy Sugono dalam KBI VIII menyatakan keberadaan UU Bahasa bukan untuk memberikan sanksi kepada mereka yang tidak menggunakan bahasa Indonesia dengan baik, namun lebih kepada penegasan tentang bagaimana dan apa yang akan dicapai dalam usaha memberikan ruang kepada bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu.

"Dalam Kongres Bahasa Indonesia ini akan dimunculkan pembicaraan serius terhadap perlutidaknya UU Bahasa. Sebab, ketika kita perlu mempersoalkan orang yang menggunakan papan nama dengan menggunakan bahasa Inggris, bahasa China, dan lain-lain, kita (Pusat Bahasa) tidak memiliki landasan yuridis untuk itu," kata Dendy.

Pembuatan UU Bahasa ini seyogianya disambut baik oleh semua kalangan, mengingat kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sangatlah vital bagi kelangsungan bangsa dan negara Indonesia.

Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia di antaranya merupakan bahasa resmi negara, bahasa pengantar dalam pemerintahan, bahasa persatuan nasional, bahasa pengantar pendidikan dan ilmu pengetahuan, bahasa pergaulan masyarakat Indonesia.

Di tengah mencuatnya isu disintegrasi, pembuatan UU Bahasa semakin urgen dan menemukan pembenaran yang sah, mengingat perekat persatuan dan kesatuan Indonesia yang paling utuh dan ampuh tinggalah bahasa Indonesia.

KBI VIII selain membahas pembuatan UU Bahasa, juga membahas rencana pembuatan sistem dan mekanisme penyerapan kosakata bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Pembahasan ini juga amat penting

mengingat eksistensi kosakata asing tidak bisa dihindari di era globalisasi.

Pengaruh kehidupan global dengan semakin meningkatnya interaksi bangsa Indonesia dengan peradaban dunia, kosakata asing atau istilah-istilah baru dari asing, tak bisa dielakkan lagi.

Pembahasan terakhir dalam KBI VIII menyangkut upaya meningkatkan peran media dalam mensosialisasikan bahasa Indonesia yang baik melalui pemberitaan untuk mendidik masyarakat berbahasa dengan baik.

Posisi media massa di era globalisasi informasi ini sangat penting dalam menyiarkan bahasa. Linguis Noam Chomsky misalnya, mengisyaratkan bahwa siapa yang menguasai media komunikasi, dia akan menang dalam berbagai pertarungan, termasuk tentunya pertarungan menyebarkan eksistensi bahasa.

Bahasa berwibawa

Sementara itu, dalam empat hari berkongres, sejumlah rekomendasi dan harapan-harapan telah dimunculkan dari KBI. Kelak, ke depan bahasa Indonesia akan menjadi bahasa yang berwibawa, yang mampu menampung seluruh konsep perikehidupan modern bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dan ini berjalan seimbang dengan perkembangan yang terjadi di tengah masyarakat.

Karena itu, maka berdasarkan hasil Kongres, maka akan dilakukan percepatan proses pengembangan kata-kata dan istilah. Selain itu, juga akan dilakukan upaya meningkatkan mutu penggunaan bahasa Indonesia masyarakat. Jalan yang paling strategis untuk mencapai kemampuan ini akan dirumuskan oleh segenap pakar bahasa.

"Kemampuan masyarakat untuk berbahasa Indonesia sebagai

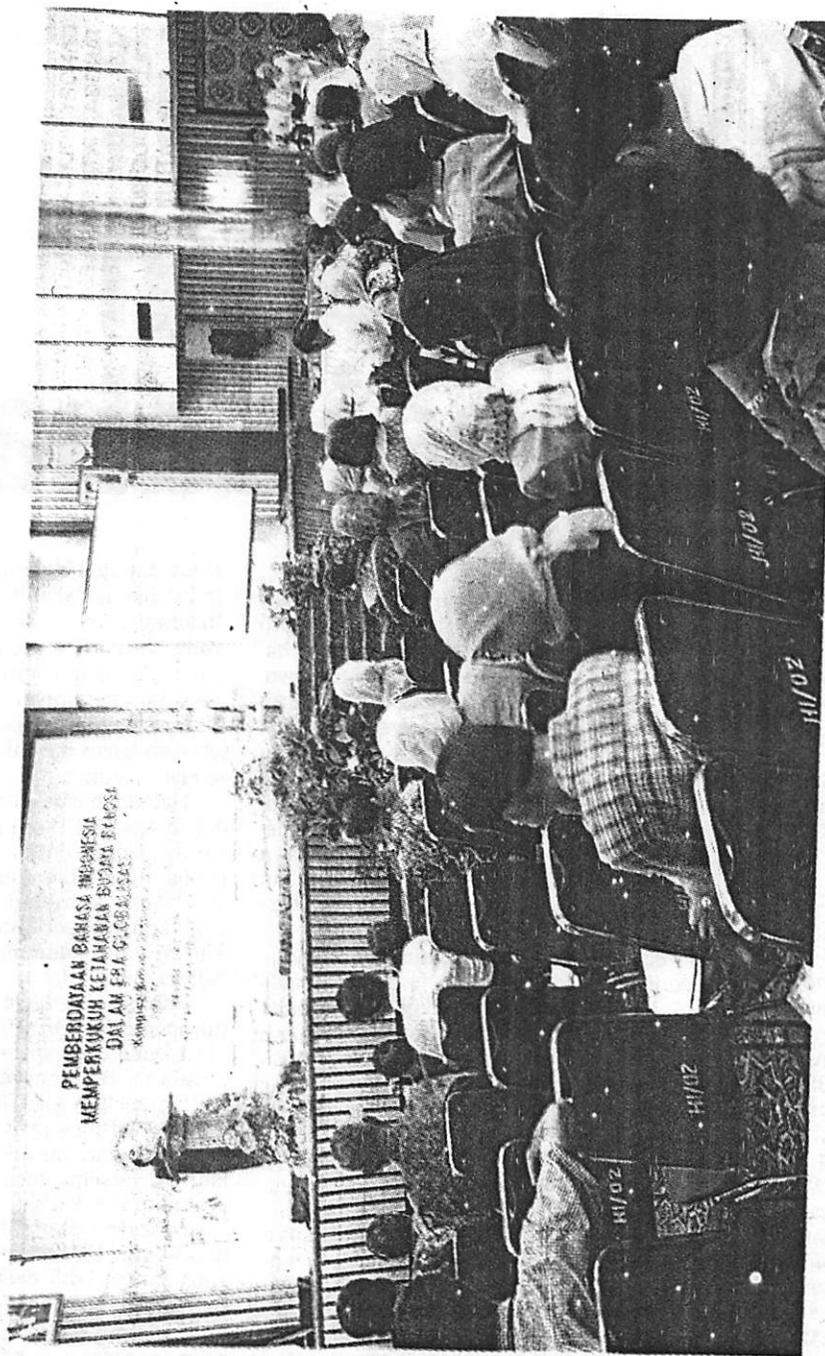
sarana komunikasi maka sudah cukup baik, namun untuk berbicara di forum resmi dengan menggunakan tata bahasa yang baik, maka sebagian besar masyarakat kita belum mampu melakukannya," kata Dendy kepada *Media*.

● Doddi AF/Tomi Haryadi/B-3

PENUTUPAN KONGRES BAHASA

Ketua penyelenggara
Kongres Bahasa Indonesia
VIII Dendy Sugono

menyampaikan sambutannya pada penutupan kongres di Hotel Indonesia, Jakarta, kemarin. Kongres ditutup secara resmi oleh Menteri Pendidikan Nasional Malik Fadjar.



Media Indonesia, 18 Oktober 2003

Mendiknas: Sudah Cukup Kuat Peraturan Mengenai Bahasa

Perlunya UU Bahasa Selalu Muncul dalam Setiap Pertemuan Pakar Bahasa

JAKARTA - Bahasa Indonesia sudah dicantumkan dalam UUD 1945 dan selalu ada dalam perjalanan sejarah bangsa sehingga tidak perlu lagi ditegaskan dalam bentuk UU Bahasa. Peraturan yang ada sudah lebih dari cukup untuk menjamin terpeliharanya bahasa tersebut.

Menteri Pendidikan Nasional A Malik Fadjar menyampaikan hal tersebut sesuai menutup Kongres Bahasa Indonesia (KBI) VIII yang berlangsung di Jakarta, Jumat (17/10). Menurut Malik, bahasa sebagai bagian penting dari kehidupan tidak perlu lagi diatur dalam sebuah peraturan.

"Saya tidak melihat UU Bahasa sebagai hal penting yang harus dibuat. Bahasa Indonesia sudah ditetapkan sejak tahun 1928, kemudian masuk dalam UUD 1945. Sudah hebat sekali peraturannya, ja-

di buat apa UU?" katanya.

Dia melihat hal yang seharusnya dicermati adalah bagaimana mengajarkan bahasa dan sastra di dunia pendidikan. Selama ini pelajaran tersebut tidak pernah mendapat tempat di hati para peserta didik. Beberapa langkah yang harus dicermati adalah bagaimana menanamkan dan menumbuhkan keberaksaraan fungsional, dan meningkatkan kemampuan berkomunikasi yang baik.

Juga bagaimana memainkan peranan terhadap pemeliharaan terhadap temuan-temuan kekayaan bangsa. "Inilah yang harus terus-menerus dicermati oleh para guru, pakar dan Pusat Bahasa," ujarnya.

Tuntutan

Sementara itu, Kepala Pusat Bahasa Dendy Sugono menyatakan, tuntutan adanya UU Bahasa muncul dari masyarakat. Ada kegelisahan melihat kondisi kita seperti sekarang ini. Banyak sekali terjadi kesalahan dalam menggunakan bahasa di wilayah publik, malahan mulai dilupakan. Banyak papan nama yang

tidak menggunakan bahasa Indonesia, padahal kita ada di Indonesia. "Juga bahasa mana yang harus digunakan ketika kita melakukan perjanjian dagang atau perjanjian di dunia internasional, tidak pernah dijelaskan harus memakai bahasa apa," katanya.

Hal itu harus ditetapkan dalam sebuah UU sehingga dapat menjadi landasan bagi terpeliharanya bahasa Indonesia. Terutama menjelang diberlakukannya pasar bebas, peraturan yang jelas mengenai bahasa mutlak diperlukan.

Proses yang ditempuh untuk memunculkan UU itu, diakui Dendy, masih panjang. Setelah KBI menghasilkan usulan perlunya UU Bahasa, Badan Pertimbangan Bahasa perlu mencari masukan apakah UU tersebut memang diperlukan masyarakat. Diperlukan waktu panjang untuk menyusun UU, terlebih UU yang sangat jauh dari perhatian publik. "Ini bukan UU politik ataupun ekonomi sehingga mungkin tidak begitu diperhatikan. Kami berharap paling tidak UU itu dapat mulai berlaku saat pasar bebas

dibuka, tahun 2010," katanya.

Menurut Ketua Tim Perumus KBI VIII, Abdul Wahab, usulan mengenai perlunya UU Bahasa selalu muncul dalam setiap pertemuan para pakar bahasa. Hal itu merupakan wujud dari keprihatinan mereka terhadap kondisi bahasa Indonesia. "Begitu banyak pelanggaran bahasa yang dilakukan tanpa ada sanksi yang jelas. Dan jangan dianggap bahwa UU Bahasa akan mengatur orang berbahasa dalam kehidupan sehari-hari, tetapi lebih ke wilayah formal dan pengembangan sastra," katanya.

UU itu lebih mengatur ketertiban bahasa di wilayah publik. Juga untuk menjaga kelestarian bahasa daerah yang

sekarang makin terlupakan. Padahal pengembangan bahasa daerah harus terus dilakukan.

Dalam kesempatan yang sama, Rektor Universitas Katolik (Unika) Atma Jaya Hari-murti Kridalaksana menyatakan, sudah waktunya Indonesia memiliki UU Bahasa. Negara-negara Eropa mempunyai perhatian serius terhadap perkembangan bahasa di negaranya, termasuk bahasa asli penduduk setempat.

"Seperti Swiss, mereka mempunyai aturan yang jelas mengenai pelestarian bahasa asli. Kemudian Amerika Serikat, malahan UU Bahasa ada hingga di tingkat negara bagian," katanya.(AS/A-7)

Suara Pembaruan, 18 Oktober 2003

Mendiknas: Tak Perlu UU Tertib Berbahasa Indonesia

JAKARTA, BK

Bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa baku dan ditetapkan dalam UUD 1945. Karenanya, tidak diperlukan lagi adanya UU Tertib Berbahasa Indonesia.

Penegasan itu disampaikan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) A Malik Fadjar ketika menutup Kongres VIII Bahasa Indonesia di Jakarta, Jumat (17/10).

Di depan peserta kongres yang bertajuk *Pemberdayaan Bahasa Indonesia Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dalam Era Globalisasi*, ia mengakui, tertib berbahasa Indonesia dalam pengaktualisasian kehidupan sehari-hari adalah cerminan peradaban bangsa yang maju. Justru saat ini yang menjadi persoalan adalah menekankan bagaimana melaksanakan fungsi dan kemampuan beraksara yang baik dan tepat:

"Jangan sampai terjadi kesenjangan berbahasa antara pendidik dan siswa tentang temuan-temuan baru dalam perkembangan beraksara," ujarnya.

Malik juga menekankan pentingnya penggunaan bahasa Indonesia untuk mendukung sumberdaya manusia (SDM) Indonesia bersaing dan menjalin kerja sama

dengan bahasa-bahasa dunia lainnya. Sehingga bahasa Indonesia bisa menjadi cerminan peradaban bagi bangsa Indonesia.

Sementara itu, Ketua Tim Perumus Bahasa Indonesia Abdul Wahab menyatakan, perlu disoroti secara ketat penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam media massa, baik secara lisan maupun tertulis. Karena media massa adalah tonggak pertama bagi masyarakat dalam memahami berbahasa yang baik dan benar.

Meski dalam aturan jurnalis ada aturan penulisan tersendiri bagi setiap media, kata dia, hendaknya media massa dapat menjadi contoh terdepan bagi masyarakat untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Pada penutupan kongres ini juga dibacakan nama-nama pemenang lomba mengulas karya sastra dan cerpen tingkat guru SMU. Untuk mengulas karya sastra keluar sebagai juara I Soim A dari SMU YPPI 1 Surabaya, juara II Elis H (SMU UN 1 Garut), dan juara III Puji I (SMU 26 Jakarta). Sedang untuk kategori cerpen pemenang I Sutejo (SMU Bakti Jatim), juara II Sujoko (SMU 1 Sragen), serta juara III Nopriyanto (SMU 1 Curug Bengkulu). © lin

BK, 18/10/2003

Mendiknas Tolak Ide Penyusunan UU Bahasa

Jakarta, Buana

Menteri Pendidikan Nasional, Malik Fajar menyatakan menolak wacana yang berkembang dalam Kongres Bahasa Indonesia ke-8 bagi penyusunan sebuah undang-undang bahasa.

"Saya kira tidak perlu membuat undang-undang bahasa, sebab deklarasi Sumpah Pemuda 1928 telah membuktikan Bahasa Indonesia sebagai pemersatu berbagai kelompok etnik yang ada di Indonesia," kata Malik di Jakarta, Jumat (17/10) petang, usai menutup Kongres Bahasa VIII yang berlangsung 14-17 Oktober.

Selain itu, Bahasa Indonesia sudah jelas menjadi bukti dari sejarah pembentukan bangsa ini. "Lalu, untuk apa lagi dibuat undang-undang bahasa," tanyanya. Malik juga mengingatkan bahwa UUD 1945 pasal 36 telah menyatakan Bahasa Indonesia mendapat kedudukan yang terhormat sebagai bahasa negara.

"Bagi saya bahasa Indonesia sudah menyatu dengan kehidupan sehari-hari masyarakat, mulai dari masyarakat awam sampai mereka yang berpendidikan. "Kita sudah capai, sedikit-sedikit maunya diundang-undangkan," sambung Mendiknas.

Namun demikian Malik menyatakan pelaksanaan kegiatan kongres Bahasa Indonesia tetap penting untuk dilaksanakan dalam bentuk apa pun, baik telaah, musyawarah atau forum, tetapi yang penting penggunaan Bahasa Indonesia tetap perlu dikritisi dari waktu ke waktu.

Jadi Rekomendasi

Sementara itu, Kepala Pusat

Bahasa, Dendy Sugono, mengakui bahwa rencana untuk menyusun rancangan undang-undang bahasa telah menimbulkan kontroversi. Namun demikian, wacana tersebut merupakan salah satu rekomendasi peserta Kongres Bahasa Indonesia, yang diikuti lebih dari 1.000 orang.

"Kami harus melakukan studi apakah memang UU Bahasa ini dibutuhkan masyarakat. Kita akan bandingkan nanti apakah itu sekadar kekhawatiran dari para guru, dosen, serta ahli-ahli bahasa akan keberadaan Bahasa Indonesia," katanya. Menurut dia, Pusat bahasa sendiri sudah membentuk badan pertimbangan bahasa yang menyusun naskah persiapan pembentukan undang-undang tersebut.

Dendy mengatakan, inti persoalan dibutuhkannya undang-undang bahasa tersebut lebih kepada sanksi yang sulit diterapkan kepada kelompok atau perusahaan yang melakukan pelanggaran dalam berbahasa. Sebagai contoh, dalam tulisan papan reklame, nama perusahaan, papan petunjuk, banyak pihak yang cenderung kembali menggunakan istilah asing, padahal sebelumnya sudah dilarang. □Ant

Berita Kota, 18 Oktober 2003

Tak perlu ada UU Bahasa

JAKARTA (Pos Kota) - Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) menilai tidak perlu ada Undang-Undang Bahasa. Alasannya, bahasa sudah menjadi bagian dalam proses berbangsa.

Mendiknas Malik Fajar usai penutupan Kongres Bahasa Indonesia ke VII, kemarin mengatakan Bahasa Indonesia, juga menjadi bagian dari berbagai lapisan masyarakat. Mulai dari kalangan awam, anak-anak sampai pendidikan tinggi. "Tidak perlu apa-apa harus ada undang-undangnya," ucapnya.

Menenai perubahan pen-

gajaran bahasa pada peserta didik, Mendiknas barngapan guru yang berperan mengajarkan bahasa menjadi segar dan menyenangkan. Di samping itu, fungsi bahasa juga harus jelas.

Kongres bahasa, menurutnya, juga berperan penting. Melalui kongres, musyawarah atau telaah bersama akan mengokohkan keseluruhan bahasa baik secara lisan maupun tulisan. Bahkan, lanjut dia, di tengah kondisi bangsa yang tengah goyang ini bahasa menjadi alat yang membentuk jiwa kebangsaan. (yp)

PK, 18/10/03.

Pos Kota, 18 Oktober 2003

UU Bahasa Ditujukan bukan untuk Perorangan

SALAH satu isu yang mencuar dalam Kongres Bahasa Indonesia (KBI) VIII adalah perlu tidaknya dirumuskan UU Bahasa untuk menegakkan supremasi hukum dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Berikut petikan wawancara Tomi Haryadi dari *Media* dengan Kepala Pusat Bahasa Dedy Sugono, usai pelaksanaan acara KBI, di Jakarta, kemarin.

Bagaimana perkembangan usulan pembentukan UU bahasa dari hasil Kongres Bahasa Indonesia VIII ini?

Salah satu isu yang mencuat di KBI adalah perlunya UU Bahasa untuk mengatur penerbitan penggunaan bahasa Indonesia oleh masyarakat demi meningkatkan mutu SDM dari aspek kemampuan berkomunikasi. Oleh karena itu, Pusat Bahasa dan instansi lain akan melakukan studi kelayakan kepada masyarakat apakah memang mereka membutuhkan UU Bahasa atau peraturan mengenai bahasa. Kemudian dilakukan penelaahan terhadap penelitian lapangan itu, lalu kita akan menyusun naskah akademik, kemudian mengusulkan RUU kepada pihak yang mempunyai kewenangan. Untuk itu perlu diusulkan ke Depdiknas.

Kapan target disahkannya UU Bahasa ini?

Biasanya sangat panjang perjalanan disahkannya suatu UU. Dan, biasanya juga hal itu akan tergantung pada kepentingan UU itu sendiri. Jadi, kalau UU Bahasa tidak terkait dengan politik dan ekonomi mungkin tidak banyak yang merasa berkepentingan. Kita menargetkan se-tidak-tidaknya 3-4 tahun dari sekarang kita bisa mewujudkan UU itu. Sehingga, paling lambat 2010 sudah berlaku ketika pasar bebas diberlakukan di bumi Indonesia. Itu paling lama, lebih cepat lebih baik.

Apa yang dikejar Pusat Bahasa melalui UU itu?

Sebetulnya kendala selama ini dalam meningkatkan mutu bahasa masyarakat adalah Pusat Bahasa tidak punya landasan hukum meng-

usulkan agar kita dapat dukungan dari segi yuridis. Dari sisi sosiologis, kita terwakili oleh peserta kongres yang hadir. Sebanyak 1.000 orang ini hadir dari berbagai kalangan, dari seluruh Indonesia. Ini dukungan sosiologis perlunya UU supaya apa yang kita lakukan dalam penerbitan bahasa mempunyai kekuatan hukum. Yang kedua, dengan UU kita berharap lembaga yang menangani masalah kebahasaan ditingkatkan statusnya sehingga mempunyai ruang gerak yang lebih luas.

Rencananya, apa saja yang akan dimuat dalam UU Bahasa itu?

Kita belum sampai ke sana karena masalah bahasa adalah masalah sosial, tidak sama dengan bidang yang lain. Maka yang diinginkan tidak sama dengan yang lain. Nama-nama perusahaan dan nama badan usaha atau merek dagang harus menggunakan bahasa kita sendiri, karena itu merupakan bagian dari tata kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.

Di samping itu, penggunaan bahasa dalam kepentingan komunikasi resmi, apakah dalam sidang DPR atau rapat resmi atau pertemuan antarnegara, bahasa apa yang kita gunakan, kita tidak punya aturan. Kalau kita kerja sama dengan pihak luar, seperti dengan China, bahasa apa yang kita gunakan, kita belum punya aturan, bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Jadi, tidak berarti ditujukan untuk orang perorangan, tidak dimaksudkan orang yang salah berbahasa lalu dihukum. Misalnya saja untuk keperluan pendidikan, bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Indonesia dari SD hingga perguruan tinggi. Lalu bagaimana dengan penggunaan bahasa asing, itu akan menjadi bagian dari UU ini.

Apakah rencana merumuskan UU Bahasa ini telah dibicarakan secara serius dengan Mendiknas?

Secara tidak resmi pernah kita sampaikan. Tetapi, karena waktu itu Mendiknas baru saja selesai dengan UU Sisdiknas, dan ada pengalaman menarik dalam proses UU itu, suasananya jadi kurang bagus, jadi belum tepat. (B-2)

MI, 18/10/03

DARI KONGRES BAHASA INDONESIA VIII

Perlukah Undang Undang Bahasa Dibuat?

PENGANTAR REDAKSI: Kongres Bahasa Indonesia VIII berlangsung di Jakarta, 14-17 Oktober 2003. Keikutsertaan media massa dalam kongres tahun ini menjadi sangat penting mengingat tersedianya kebebasan menggunakan bahasa untuk informasi. Di sisi lain, muncul wacana perlunya Undang Undang Bahasa. Inilah catatan wartawan KR yang juga salah satu pemakalah, **Arwan Tuti Artha**, mengenai hasil-hasil kongres itu. (Red)

ORANG Batak tentu bisa menerima informasi dalam bahasa Indonesia. Begitu pula orang Sunda, orang Dayak, orang Minang, dan apalagi orang Jawa. Tetapi, mereka tentu tak bisa menerima informasi yang disampaikan dalam bahasa daerah satu sama lain. Jangan heran bila orang Batak tak bisa menangkap maksud yang disampaikan dalam bahasa Sunda, misalnya. Kata *cunihin* atau *beureum* tak bisa dimaknai secara benar oleh orang Batak, karena mereka tak mengenal kosakata dari bahasa Sunda itu.

Kiranya, berbagai bahasa daerah yang masih dipergunakan masyarakatnya itu sebuah daya tarik tersendiri bagi Indonesia. Oleh sebab itu, bahasa daerah tersebut tidak boleh hilang dari muka bumi ini. Bahasa daerah layak dikembangkan dan dibina dengan berbagai cara, sebagai bagian dari kebudayaan Indonesia. Sementara itu, terjadinya perubahan sebagai sebuah konsekuensi, bahasa asing juga sudah mulai terasa merambah di era globalisasi ini. Kita tak bisa menolaknya.

Bagaimana posisi bahasa Indonesia? Semakin kuat, atau kian terdesak oleh kuatnya bahasa asing itu? Persoalan ini, barulah sebagian kecil saja dari berbagai masalah kebahasaan dan kesastraan, ditambah kian menariknya penggunaan bahasa pada media massa, yang dibahas dalam Kongres Bahasa Indonesia VIII tahun 2003 di Jakarta. Setelah berlalu lima tahun, tiba waktunya menyelenggarakan kongres kembali.

Tentu sudah banyak pandangan, sikap dan persepsi masyarakat atau para ahli yang dibicarakan dalam kongres. Sejak pertama kalinya

Kongres Bahasa Indonesia tahun 1938 diselenggarakan di Solo, disusul tahun 1954 di Medan, tahun 1978 di Jakarta dan seterusnya setiap lima tahun berlangsung kongres tentulah banyak makalah tentang kebahasaan dan kesastraan yang dibahas. Kongres yang diselenggarakan itu sangat boleh jadi cuma membuang-buang uang. Ada kesan begitu, toh tak membuat masyarakat lebih canggih berbahasa. Bahkan tampaknya semakin rusak saja bahasa Indonesia yang dipergunakan masyarakat Indonesia untuk berkomunikasi.

Ya, Kongres Bahasa Indonesia VIII yang berlangsung di Hotel Indonesia Jakarta, 14 sampai 17 Oktober 2003, memang sangat istimewa. Bukan saja karena Presiden Megawati tak jadi membuka di Istana Negara. Tapi, ada peranan media massa yang mulai dibicarakan dalam kongres secara intens, juga banyak sekali makalah yang ditulis peminat, ahli, peneliti atau pemerhati bahasa baik dari dalam maupun luar negeri. Pesertanya pun, tercatat paling banyak, 1.046 peserta yang datang dari seluruh Indonesia. "Masalah kebahasaan di Indonesia tak terlepas dari kehidupan masyarakat pendukungnya," ujar Kepala Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Dr Dendy Sugono, selaku Ketua Panitia Kongres Bahasa Indonesia VIII.

Selama kongres berlangsung, berbagai perdebatan tentang kebahasaan, kesastraan dan media massa, dibahas dalam sidang pleno, sidang kelompok dan diskusi panel. Dalam sidang pleno, misalnya muncul berbagai pemikiran tentang Undang Undang Bahasa sebagaimana disampaikan Harimurti Kridalaksana. Munculnya gagasan ini juga

sepadan dengan pemikiran Prof Dr Koesnadi Hardjosoemantri SH, mengenai perlunya sanksi terhadap pelanggaran berbahasa. Ada yang setuju dibentuk Undang Undang Bahasa, ada yang menolak.

Versi terakhir Undang Undang Dasar Republik Indonesia, terdapat beberapa ketentuan mengenai bahasa, yakni pasal 32 ayat 2, bahwa negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Pada pasal 36, dinyatakan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Itulah sebabnya, barangkali, sewaktu Soeharto masih menjadi presiden, di mana-mana selalu berpidato dalam bahasa Indonesia. Di luar negeri pun begitu. Kemudian, dalam pasal 36C, ditegaskan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan diatur dalam undang-undang. Artinya, diperlukan undang-undang khusus untuk itu.

"Agar sebuah undang-undang bermakna dan bermanfaat bagi masyarakat umum, tentu tidaklah cukup alasan yuridis yakni perintah dari Undang-Undang Dasar seperti itu saja yang dijadikan pertimbangan penyusunannya," kata Harimurti Kridalaksana. Ada dua pertimbangan yang harus dipahami dan dipastikan, yakni perimbangan sosiologis dan pertimbangan filosofis.

Menurut tim perumus kongres ini, kedua pertimbangan tadi harus disertai pemahaman yang cermat tentang situasi bahasa Indonesia dan bahasa daerah dewasa ini. Karena itu, dalam rumusan tersebut disebutkan perlunya memikirkan dan mengadakan pengkajian untuk mengajukan sebuah undang-undang bahasa.

Mereka yang setuju adanya sanksi terhadap pelanggaran berbahasa, sebagaimana diajukan Prof Dr Koesnadi Hardjosoemantri SH, karena melihat penggunaan bahasa Indonesia menampakkan gejala makin kurang memperhatikan kaidah bahasa. Pelanggaran berbahasa semakin banyak, yakni mereka yang tak menggunakan kaidah bahasa yang sudah ditetapkan. Pasal sanksi yang tersedia dalam bidang hukum itu meliputi sanksi administrasi, sanksi perdata dan sanksi pidana. "Sedang kaitannya dengan penggunaan bahasa, sanksi yang perlu diberikan adalah sanksi administrasi, yang arahnya lebih banyak ditujukan kepada pemberian insentif dan disinsentif," kata Koesnadi.

Pemberian insentif dan disinsentif itu, dapat dikaitkan dengan persyaratan kenaikan pangkat bagi pejabat yang bersangkutan. "Cara penilaian kemampuan berbahasa bagi pejabat yang bersangkutan, meliputi penuturan dan penulisan, perlu disusun Pusat Bahasa dan diajukan kepada Badan Kepegawaian Negara untuk dimasukkan ke dalam sistem penilaian jenjang kepangkatan," katanya lagi.

Selain itu, bisa pula dikaitkan dengan pemberian penghargaan kepada pejabat yang paling baik berbahasa Indonesianya, dari tingkat nasional sampai tingkat kabupaten. (*)-d



PARA pemakalah pada diskusi panel peran media massa di daerah dalam memelihara bahasa dan budaya daerah. KR-IST

Kedaulatan Rakyat, 20 Oktober 2003

 BAHASA

Indonesia Perlu Nama Baru?

ORANG Indonesia suka mengaku-aku sebagai pahlawan. Maklum, pahlawan itu hebat, terhormat, teragungkan. Orang Indonesia ingin dianggap orang hebat, terhormat, teragungkan. Kata *pahlawan* sendiri berarti 'orang yang mendapat *pahla* atau *pahala*'. Bentuknya yang lain ialah *Pahlevi*, nama dinasti di Persia yang pada 1979 digulingkan revolusi Iran di bawah Khomeini.

Dulu bicara tentang Indonesia adalah bicara tentang sesuatu yang besar, luas, padat, beraneka ragam, dan kaya. Maka, Indische Vereeniging mengklaim diri yang pertama kali menggunakan Indonesia dalam pengertian politik setelah berganti nama pada 1908 menjadi Indonesische Vereeniging. Waktu itu pemimpinnya Hermen Kartowisastro, tokoh yang kemudian boleh dikata dihilangkan dari ingatan. Partai Komunis Indonesia (PKI) pernah mengaku yang pertama menggunakan Indonesia sebagai nama partai sejak tahun 1924. Nama sebelumnya, terhitung 23 Mei 1920, adalah Perserikatan Kommunist Hindia. Rupanya menjadi yang pertama memakai nama saja sudah dianggap sebagai pahlawan.

Dalam peta yang dibuat pelaut Portugis, Manoel Godinho de Eredia, tertera nama *Luca-antara* atau *Nuca-antara* untuk Kepulauan Malaya. Nama Indonesia pertama kali diusulkan untuk Kepulauan Hindia oleh antropolog Inggris yang tinggal di Penang, James Richardson Logan. Usul ini termuat dalam karangannya, *The ethnology of the Indian Archipelago, embracing enquires into the continental relations of the Indo-Pacific Islanders*, di *Journal of Indian Archipelago* (1850). Adolf Bastian dari Jerman menyitat nama Indonesia dalam buku *Indonesien oder die Inseln des Malayischen Archipels* (1884) menunjuk tempat di samudra Hindia dan Pasifik yang memiliki persamaan hukum adat.

Nama Indonesia dimanfaatkan oleh Indonesisch Verbond van Studerenden pada November 1917 sebagai federasi organisasi pelajar atau mahasiswa Indonesia, peranakan Tionghoa, Indo-Belanda, dan Belanda yang sedang belajar di Negeri Belanda. Setahun kemudian Soewardi Soerjaningrat mendirikan Indonesisch Persbureau di Den Haag sewaktu jadi buangan di sana. Kegiatan kantor berita itu menerbitkan brosur, buka program, monografi, juga mengadakan ceramah. Kalau mau bicara adil, yang pertama menggunakan nama Indonesia dalam pengertian politik adalah Indonesisch Verbond van Studerenden. Yang berjasa sesudah itu dalam pemahaman politik juga Soewardi Soerjaningrat yang kemudian mengubah namanya menjadi Ki Hadjar Dewantara.

Da'am *Bung Karno Penjambung Lidah Rakyat Indonesia* (1966), Sukarno menjelaskan perkataan Indonesia berasal dari seorang ahli purbakala bangsa Jerman bernama Jordan yang belajar di negeri Belanda. Karena kepulauan ini berdekatan dengan India, ia namakanlah 'Kepulauan dari India'.

Nesos (Yunani) bermakna 'pulau-pulau'. *Indusnesos* akhirnya jadi Indonesia. "Ketika kami merasakan perlunya untuk menggabungkan pulau-pulau kami menjadi satu kesatuan yang besar, kami berpegang teguh pada nama ini dan mengisinya dengan pengertian-pengertian politik hingga ia pun menjadi pembimbing dari kepribadian nasional," katanya. Karena itu, Sukarno memaknai Indonesia sebagai langit biru dan terang, mega putih yang lamban, dan udara yang hangat. Katanya, "Saudara-saudaraku yang tercinta, laut yang menderu memukul-mukul ke pantai di cahaya senja bagiku adalah jiwanya Indonesia yang bergerak dalam gemuruhnya gelombang samudra. Bila kudengar anak-anak ketawa, aku mendengar Indonesia. Manakala aku menghirup bunga-bunga, aku menghirup Indonesia. Inilah arti tanah air bagiku."

Ada makna di dalam nama! Orang Indonesia memberi arti yang sangat tinggi kepada nama. Di situ ia menggantungkan gagasan, keinginan, cita-cita, kemuliaan, rasa seni, budaya, dan moralnya. Kita kenal nama Selamat, Iman, atau Berlian. Untuk yang berkuasa, nama menunjukkan keagungan: Amangkurat 'yang memangku dunia', Paku Buwana 'yang memaku dunia', Hamengku Buwana 'yang memangku dunia', dan Paku Alam yang paling kecil wilayahnya tapi ambisius. Yang dipaku tak tanggung-tanggung: alam semesta. Di wilayah berbahasa Melayu ada gelar Datuk Sampana Alamy, Usman Sutan Keadilan, bahkan Sutan Pangguncang Alam. Kini saatnya orang Indonesia memberi nama baru kepada negeri dan negaranya, yang memenuhi gambaran cita-cita, hasrat, dan ambisinya yang mungkin berbeda dengan yang Sukarno maksud.

✓
KOESALAH SOEBAGYO TOER
Penerjemah, tinggal di Depok

Kompas, 4 Oktober 2003

BAHASA

Pahlawan Revolusi

INDONESIA mungkin negara yang termasuk paling banyak memiliki pahlawan. Mereka berceceran di mana-mana, di tiap ujung jalan dari yang utama hingga lorong sempit dan becek. Mereka bertaburan di tiap kota, dari yang paling besar hingga yang tidak termuat dalam peta. Mereka ada di mana-mana tanpa mempertimbangkan apakah kehadiran para pahlawan itu bermakna bagi warga tempat mereka dipajang.

Melalui pajangan (nama) pahlawan itu, kita pun tahu sejak kapan negara kita memiliki pahlawan. Kepahlawanan mereka dikukuhkan surat keputusan pemerintah sehingga di masyarakat muncul apa yang disebut sebagai *pahlawan surat keputusan*. Mereka yang menjadi pahlawan berdasarkan surat keputusan itu adalah yang di masa penjajahan dulu berjuang melawan penjajah, baik itu Kumpehi (VOC) maupun pemerintah kolonial Hindia Belanda.

Di masa yang lebih kemudian, baru muncul mereka yang tidak bergerak di bidang perlawanan "bersenjata" itu. Ada juga sosok yang namanya dipajang, walaupun mereka berasal dari masa sebelum penjajahan. Mereka bukan pahlawan nasional, melainkan para penguasa dan tokoh negara merdeka sebelum lahir negara bernama Indonesia. Mereka adalah tokoh yang berasal dari Sriwijaya, Majapahit, dan negara merdeka lain di wilayah Indonesia sekarang. Mereka berasal dari "benih" Indonesia.

Pemahlawanan dengan surat keputusan itu di beberapa daerah mengakibatkan ketaknyamanan. Pemerintah dianggap pilih kasih. Mengapa Sultan Hasanuddin dianggap pahlawan nasional, sedangkan Aru Palaka dianggap pengkhianat.

Bukankah ketika itu sebenarnya yang bersengketa adalah kedua orang itu, masing-masing memerintah di negara mereka yang merdeka? Karena teresak, Aru Palaka minta bantuan kepada VOC. Berkat tolongan itu ia menang. Hasanuddin kalah. Karena kalah (melawan penjajah) itulah Hasanuddin diangkat sebagai pahlawan nasional.

Pahlawan lain yang berjuang melawan atau menentang pemerintah penjajahan antara lain Diponegoro, Imam Bonjol, Sultan Agung Tirtayasa, Si Singamangaraja, dan Nuku. Semuanya kalah. Kenyataan itu menimbulkan olok-olok bahwa salah satu syarat untuk menjadi pahlawan nasional dari masa penjajahan adalah kalah dalam perjuangan mereka. Di masa setelah kemerdekaan, ada pahlawan pembangunan, pahlawan kemanusiaan, bahkan pahlawan tanda jasa. Namun, dari semua pahlawan itu, yang paling tidak jelas alasannya adalah *pahlawan revolusi* untuk para jenderal dan bawahannya korban pengkhianatan di akhir September 1965. Dalam kaitannya dengan sejarah Indonesia, masa perang kemerdekaan (1945-1949) sering disebut sebagai *masa revolusi*. Artinya, jika pun ada yang patut disebut sebagai *pahlawan revolusi*, tentulah mereka yang gugur selama kurun itu.

Menurut catatan sejarah, di tahun 1965 tidak ada revolusi yang terjadi di negara kita. Kalaupun kata *revolusi* digunakan, para penggunanya justru para pengkhianat itu yang mendirikan *Dewan Revolusi*. Artinya, jika pahlawan dikembalikan kepada maknanya dalam kamus, 'orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran', atau 'pejuang yang gagah berani', maka *pahlawan revolusi* haruslah diartikan 'mereka yang membela revolusi' (dalam wujud Dewan Revolusi). Padahal ternyata, mereka yang justru paling menentang dewan revolusi itu.

Jadi, apa sebenarnya yang melatari penganugerahan gelar yang sangat tidak sesuai dengan nalar itu? Jelas yang melakukan revolusi adalah para pengkhianat, namun mengapa gelar pahlawan justru diberikan kepada mereka yang dikhianati? Atau, dapat dianggap sebagai petunjuk bahwa pemerintah pada waktu itu mengakui ada revolusi walaupun pelakunya justru "musuh negara"? Bahwa para korban itu adalah pejuang yang layak dianugerahi gelar pahlawan, mungkin tidak ada yang berkeberatan. Namun, jika gelar itu bernama *pahlawan revolusi*, dampaknya patut dipikirkan kembali. Seperti juga halnya dengan ungkapan *kesaktian Pancasila* yang secara jasadi diwujudkan dalam Monumen Pancasila Sakti. Di mana Tuhan berada ketika peristiwa itu terjadi sehingga kita terhindar dari petaka itu karena kesaktian Pancasila?

AYATROHAEDI
Munysi, Tinggal di Depok

Kompas, 11 Oktober 2003

BAHASA

Meslota, Surat-e, dan a-belalai

SETIAP bahasa pasti mengalami perubahan atau perkembangan yang disebabkan oleh pengaruh bahasa lain, juga oleh perkembangan zaman dan situasi baru yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Maka, kita tidak perlu heran bila diberi tahu bahwa sebagian besar kosakata suatu bahasa terdiri dari kata-kata yang berasal dari luar wilayah penggunaannya.

Mengenai bahasa Indonesia, keadaan seperti itu jelas sekali kelihatan. Kita dapat mengamati pengaruh yang kuat dari, misalnya, bahasa Sanskerta, Arab, Belanda, dan Inggris. Hal semacam ini tidak ganjil atau aneh, tapi boleh dibilang merupakan hakikat suatu bahasa yang hidup. Jika tidak dapat berubah dan tidak dapat bergerak, bahasa sudah kehilangan arti dan mati.

Dalam era kita sekarang yang menyaksikan perubahan amat pesat serta globalisasi yang tidak dapat dihindari, hal ini semakin nyata.

Meski demikian, penulis berpendapat bahwa suatu bahasa—termasuk bahasa Indonesia—seharusnya tidak dibiarkan berubah dan berkembang liar. Selain dikembangkan, bahasa juga harus dilestarikan.

Mengapa begitu? Kita dapat amati bahwa meskipun kita hidup di zaman globalisasi, hal-hal yang bersifat sangat lokal semakin penting dan bermakna untuk penduduk suatu wilayah. Jadi, tidak betul anggapan bahwa *globalisasi* merupakan proyek meratakan bahasa dan kebudayaan dunia menurut ukuran standar (baca: Amerika). Setidaknya proyek seperti itu tidak bakal berhasil sebab ada juga kekuatan bermakna yang dapat kita namai *lokalisasi*. Perkawinan antara dua kata tersebut membuahkan kata *glokalisasi*. Dan ini, saya kira, merupakan hasil dari kesadaran bahwa bahasa, selain alat komunikasi, juga kebanggaan suatu bangsa yang secara emosional amat bermakna. Bahasa merupakan jati diri suatu kaum.

Jika ini betul, kita bisa yakin bahwa bahasa harus sekalian dikembangkan (*globalisasi*) dan dilestarikan (*lokalisasi*) supaya penuturnya tidak kehilangan jati diri dan kebanggaan nasional. Di negeri penulis, Swedia, ada kebanggaan di sebagian masyarakat terhadap bahasanya. Kata-kata dari luar negeri tidak diterima begitu saja. Hal serupa dapat diamati di Perancis dan Islandia yang memiliki dewan bahasa yang sedikit konservatif dalam aspek ini.

Tentunya bahasa kami juga banyak dipengaruhi oleh kata-kata dan ucapan-ucapan dari luar (terutama dari bahasa Inggris), tapi terdapat kecurigaan sehat di antara orang Swedia untuk menerima kata dan ucapan baru itu. Beberapa contoh mungkin dapat menjelaskan pendirian saya. Kata *komputer* sudah mendunia dan jadi kosakata baru dengan berbagai hentuk dalam serangkaian bahasa (meskipun tidak semua), bahasa Swedia justru tidak pernah mengenalnya.

Sebagai pengganti, kami menggunakan kata *dator*, yang tentunya berasal dari kata *data*, yakni informasi yang dikelola sebuah komputer. Dengan analogi yang sama, *komputer* dalam bahasa Indonesia mungkin bisa menjadi *mesin pengelola data* (atau *meslota*, sebab singkatan sangat populer), meskipun wilayah asal dua dari tiga kata tersebut di luar Asia Tenggara.

Dalam bahasa Swedia, kami juga tidak mengenal kata *handphone* (HP, hape), tapi menggunakan kata *mobiltелефon*, yaitu 'telepon yang dapat bergerak'. *E-mail* kami sebut *e-brev* 'surat-e', atau kalau harus memakai bunyi Inggris setidaknya dengan ejaan sendiri: *e-mejl*. Tanda @ kami sebut *snabel-a*, yang berarti 'a-belalai'. Mirip toh? Lebih lanjut lagi, *laptop* kami sebut *bärbar dator*,

yaitu 'komputer yang dapat dibawa-bawa'. Sudah barang tentu tidak saja kata-kata yang berhubungan dengan dunia komputer yang mengalami pengswediaan ini, meskipun bagian ini amat penting.

Di Indonesia terminologi komputer yang lengkap merupakan kebutuhan bahasa yang mendadak dan sebaiknya dibentuk dengan segera suatu dewan yang menerjemahkan istilah-istilah komputer ke dalam bahasa Indonesia.

Jika itu ternyata merupakan tugas yang mustahil, ciptakanlah istilah-istilah baru yang sesuai dengan situasi kebahasaan di Nusantara! Pemakai komputer di Indonesia yang kemampuannya berbahasa Inggris terbatas akan merasa sangat berterima kasih.

ANDRÉ MÖLLER

Mahasiswa S3 di Lund, Swedia, Sedang Menulis Disertasi tentang Bulan Ramadhan di Indonesia dari Pelbagai Sudut

Kompas, 25 Oktober 2003

BAHASA INDONESIA-RAGAM

Harga Diri dan Budaya 'Samudana'

Dr R Kunjana Rahardi

Pengamat Bahasa Indonesia

DODIET, pemerhati bahasa di Yogyakarta, menyampaikan persoalan-persoalan berikut kepada pengasuh. (1) Dalam percakapan sehari-hari sering ditemukan bahwa orang memenggal atau memutus pembicaraan yang sedang berjalan untuk menyelamatkan muka salah satu di antara pelibat tuturnya. Benarkah strategi berbicara yang demikian itu dalam ilmu bahasa? (2) Orang tua bisa menyampaikan maksudnya kepada sang anak, baik dengan terus terang maupun sebaliknya. Tetapi rasa-rasanya, anak zaman dulu jauh lebih cepat dewasa daripada anak-anak sekarang, yang notabene hidup dalam keterusterangan. Kenapa demikian? Mohon penjelasan!

Harga diri seseorang dalam praktik berkomunikasi, berkaitan sangat erat dengan masalah pemberdayaan *sanepa* dan *sasmita*. Lazimnya orang yang dapat memanfaatkan *sasmita* dan *sanepa* dengan baik dalam bertutur sapa, entah sebagai pembicara ataupun sebagai mitra wicara, akan dapat menjaga harga dirinya dengan baik pula. Pasalnya, harga diri seseorang bertautan sangat erat dengan hal-hwal penyelamatan muka. Konsep penyelamatan muka (*face-saving*), pada awalnya disampaikan Erving Goffman (1967), antropolog ternama Amerika, yang menyatakan bahwa dalam bertutur muka seseorang harus senantiasa diselamatkan dengan diberikan penghargaan secukupnya. Konsep muka (*face*) itu sendiri semula disampaikan seorang antropolog China ternama, Hsien Chin Hu (1944), yang menyatakan bahwa bertutur sapa pada hakikatnya adalah aktivitas untuk saling menyelamatkan muka. Adapun muka yang diselamatkan itu adalah muka positif (*positive face*) dan muka negatif (*negative face*) dari si penutur maupun mitra tuturnya. Muka positif menunjuk pada keinginan untuk disetujui, keinginan untuk tidak dilawan, keinginan untuk tidak ditentang. dII. Adapun muka negatif menunjuk pada keinginan untuk diizinkan menentukan sendiri (*self-determining*), kehendak untuk diperbolehkan memutuskan sendiri tanpa campur tangan atau gangguan dari pihak lain, sehingga muka orang yang terlibat di dalamnya tidak terancam (*face-threatened*).

Dalam konteks Jawa, konsep muka itu muncul dalam terminologi Jawa *rai* atau muka. Maka lalu muncul perkataan *ra duwe rai*, yang artinya tidak memiliki muka sama sekali, tidak memiliki rasa malu atau rasa *rikuh* alias *rai gedheg*, di dalam pergaulan dengan sesamanya. Maka orang yang tidak memiliki rasa malu, tidak pernah berusaha untuk menyelamatkan muka dalam praktik hidup kesehariannya. Dengan sendirinya, dia akan gampang sekali kehilangan harga dirinya. Jadi, jelas sekali bahwa di dalam berbagai lingkungan kebudayaan, harga diri seseorang itu dekat sekali tautannya dengan seluk-beluk muka dan hal-hwal penyelamatan muka dalam hidup dengan sesamanya. Sebelum seseorang menyampaikan maksudnya untuk meminjam sejumlah uang tertentu kepada rekannya, dia akan bertanya dulu apakah pada tanggal tertentu gajian di kantornya sudah diterimakan. Perhatikan contoh berikut, "Tanggal 25 apakah sudah gajian Mas, tempatmu?" Lalu terhadap pertanyaan itu sang rekan tersebut menyampaikan jawaban berikut, "Sudah, tetapi langsung dipotong separuh untuk angsuran seragam.

Maklum, sudah *ngutang* duluan!" Kelihatan sekali bahwa dalam percakapan di atas tidak ada satu pun muka yang terancam, dan harga diri mereka masing-masing tetap tidak terusik dan terus terjaga dengan aman. Pihak yang sesungguhnya mau meminjam uang terselamatkan mukanya, lantaran dia belum jadi menyampaikan maksud berutangnya secara eksplisit. Demikian juga pihak yang hendak dipinjam uangnya juga tetap terselamatkan mukanya, lantaran dia tidak sampai menyatakan penolakan eksplisitnya kepada seorang rekan yang membutuhkan bantuannya. Dalam contoh tadi dia baru sebatas memberikan isyarat atau *sanepa* saja, yakni dengan mengatakan bahwa gajinya telah digunakan untuk membayar utang di kantornya. Maka kalau sungguh-sungguh dicermati, kedua belah pihak dalam contoh pertuturan di atas piawai dalam berulah *sasmita* dan *sanepa*, sehingga harga diri mereka sama-sama terselamatkan dan tetap terjaga aman.

Dalam bahasa Inggris contoh yang demikian ini sering juga muncul dalam penyampaian pertanyaan yang tidak langsung (*indirect-question*). Dengan menyampaikan pertanyaan tidak langsung, setidaknya muka si penanya terhindarkan dari kecoreng-morengan, seperti pada contoh *Nothing to do tonight, my baby? Oh, only watching TV?* Padahal, sesungguhnya apa yang ada di benak si penanya itu adalah bahwa dia hendak menyampaikan maksud mengajak berpacaran. Tetapi karena dia tahu bahwa kalau sampai menyampaikan pertanyaannya secara langsung dia akan malu dan tercoreng mukanya, terlebih kalau sang pacar tegas-tegas menolaknya. Maka sebaliknya dengan memberikan jawaban, *Oh, only watching TV*, terimplikasi bahwa kegiatan menonton TV sesungguhnya tidak terlalu penting baginya, dan dia siap-siap saja kalau, misalnya saja, diajak pergi berkencan atau berpacaran dengannya. Dalam contoh ini pun strategi penyelamatan muka dan penjagaan harga diri itu sangat kentara diterapkan oleh kedua belah pihak. Contoh-contoh di depan sekaligus menegaskan bahwa strategi berwicara yang demikian itu sesungguhnya sah-sah saja digunakan.

Lalu, benarkah jika dikatakan bahwa anak-anak zaman dahulu lebih cepat dewasa daripada anak-anak sekarang? Jawabnya tentu saja sangat relatif dan tidak selalu benar. Lazimnya justru orang yang biasa hidup dalam budaya keterusterangan dan keterbukaan, akan lebih cepat dewasa dalam hidupnya. Dengan keterusterangan dan keterbukaan, mereka dengan leluasa belajar dari lingkungannya, tanpa harus dikendalai aneka perasaan tidak enak yang kadang kala memang tidak terlalu diperlukan dalam praktik bertutur sapa. Orang-orang yang terbiasa dengan kultur yang demikian ini akan dengan mudah membalikkan humor-humor dan lelucon-lelucon yang kadang kala menghantam dirinya. Mereka cenderung dapat bertahan terhadap hal-hal yang sering datang dengan tiba-tiba semacam itu di dalam pergaulan hidupnya. Demikian pula terhadap persoalan-persoalan yang menghantam diri mereka, orang-orang yang sudah terbiasa hidup dalam kultur yang terus terang dan serbaterbuka, tidak terlampau terkungkung di dalam lingkungan budaya *sa-mudana*, cenderung lebih mampu dan gampang dalam menemukan solusi tepatnya.***

Media Indonesia, 18 Oktober 2003

Masalah Kita

INTERAKSI: DEWAN - RAKYAT - PAKAR - BIROKRAT

Berbahasa Indonesia yang Baik, Komunikatif Perlu Disadari, Bahasa Itu Cerminan Bangsa

TOPIK: SUDAHKAH KITA MENGGUNAKAN

BAHASA INDONESIA DENGAN BAIK?

ORANG sering mengatakan, gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ini maksudnya, orang harus berbicara sistematis, runtut, sesuai kaidahnya. Salah satunya syarat agar bisa dipahami semua orang, harus komunikatif.

Bagaimana syarat bisa komunikatif? Ketika berbicara harus sadar betul, kapan, di mana, serta situasi dan kondisinya. Ketika berbicara harus tahu betul siapa yang dihadapi atau lawan bicaranya. Ketika sudah sadar betul lawan bicaranya, situasi dan kondisi menjadi sangat penting diperhatikan. Begitu juga ketika menulis, juga harus tahu betul siapa sesungguhnya segmen pembacanya. Misalnya, kalau menulis opini di koran tentu menggunakan ragam jurnalistik. Singkat, padat, jelas, menarik dikemas dengan bahasa yang populer. Orientasinya semua itu agar tulisan bisa dipahami semua lapisan masyarakat, dari tukang becak sampai presiden.

Pengamatan saya dalam dunia pendidikan, orang sangat setia pada bahasa Indonesia baku, tetapi tidak komunikatif. Sebaliknya, ada yang memilih yang penting komunikatif, soal baku atau tidak, itu nomor dua. Harapannya, bahasa

BAHASA sebagai alat komunikasi itu yang penting bisa dipahami satu sama lain. Jika tidak bisa memahami, artinya bahasa yang dipakai itu ada kekeliruannya. Sebab, tak bisa dipahami. Bahasa yang baik

itu memang diperlukan untuk mengungkapkan pikiran. Bila bahasanya jelek, tentu pikiran yang baik itu tak bisa dipahami dengan benar.

Masyarakat kita ini majemuk, bermacam-macam. Sehingga bahasa yang dipergunakan oleh masyarakat yang intelek pasti berbeda dengan yang tidak intelek.

Indonesia yang baru, tentu komunikatif dan tetap berpijak aturan ragam standar berupa kaidah dan aturan yang baku.

Kegagalan berbahasa, salah satu sebab, tidak sadar di mana berbicara atau menulis, sehingga apa yang disampaikan menjadi tidak komunikatif. Apapun yang disampaikan tidak komunikatif berarti pesan yang ingin disampaikan tidak dimengerti. Menurut Prof Dr J Badudu, berkomunikasi apapun bahasanya memiliki dua sasaran. Pertama, yakni sasaran antara. Kedua, sasaran utama. Mengomunikasikan sesuatu baru disebut berhasil, bila yang dikomunikasikan dapat dipahami. Itu yang disebut sasaran antara. Bila sudah mengerti, apa yang dibaca atau didengar, baru tercapai sasaran utama.

Sudahkah kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik? Berhasil atau tidak, sebenarnya tergantung apakah pesan yang ingin disampaikan sudah komunikatif? Kesetiaan pada aturan bahasa Indonesia baku tidak menjamin aktivitas berbahasa Indonesia berjalan dengan komunikatif. Meski demikian, kesadaran untuk berbahasa Indonesia yang baik, sesuai kaidah, sangatlah didambakan. □ - c

*(Drs Purwantoko, Guru dan Mahasiswa S-2
Universitas Negeri Yogyakarta)*

Begitu pula yang berpendidikan dan yang tidak. Tetapi, pelan-pelan masyarakat harus menyadari bahwa bahasa itu mencerminkan bangsa. Meskipun orang Yogyakarta itu menggunakan bahasa Jawa, bahasa

asing dan bahasa Indonesia, hendaknya harus bisa menempatkan bahasa tersebut sesuai dengan situasinya. □ - c

*(H Surasmo Priyandono BA,
Ketua DPRD DIY)*

Kedaulatan Rakyat, 23 Oktober 2003

Senyuman dalam Wadah Kebahasaan

Dr R Kunjana Rahardi

Pengamat Bahasa Indonesia

SAYA tertarik dengan penjelasan Bapak mengenai gerak-gerak tubuh atau kinesik dalam aktivitas berbahasa beberapa waktu lalu. Tetapi ada pertanyaan lanjutan dari saya semoga dapat Bapak jelaskan.. (1) Apakah senyum dan warna muka dapat digolongkan ke dalam kinesik? (2) Bagaimana cara yang tepat untuk memandang mata mitra tutur dalam komunikasi? Demikian pertanyaan Haksa, guru bahasa di Kota Semarang.

Dalam komunikasi, bahasa secara universal digunakan bersama gerak tubuh dan ragam. Gerak tubuh dapat berupa ekspresi wajah, sikap tubuh, gerak jari-jemari, goyangan pinggul, gelengan kepala, bungkukan badan, gerakan tangan, dll. Adapun ragam melibatkan tinggi-rendah suara, keras-lembut suara, cepat-lambat suara, dan timbre atau warna suara. Selain dipengaruhi semuanya itu, keapikan komunikasi dalam lingkungan sosial-budaya tertentu juga ditentukan oleh distansi bertutur atau proksimik. Jadi, komunikasi yang baik melibatkan bahasa sebagai peranti utamanya, ragam-ragam, gerak kinesik, dan proksimik sebagai aspek topangannya. Bilamana keempatnya digunakan secara baik, diterapkan secara sinergis, dan konteksnya dipertimbangkan secara cermat, niscaya komunikasi yang terjadi berlangsung optimal.

Lalu di manakah letak senyuman dalam komunikasi? Bersama ekspresi wajah atau air muka senyuman tergolong dalam gerak kinesik. Sosok senyuman muncul secara universal dalam komunikasi dan berlaku idiosinkretik dalam wahana kebahasaan tertentu. Itulah sesungguhnya sosok kultur khas (*culture-specific*), yang dapat bermanifestasi secara bermacam-macam dalam lingkungan kebudayaan tertentu. Maksudnya, setiap kelompok sosial dapat membentuk sistem senyuman sendiri-sendiri

dalam praktik kebahasaan, dan memberi arti secara khusus pula sesuai dengan konvensi bersama warga masyarakat pemakainya. Dalam masyarakat Jawa, misalnya saja, orang yang tersenyum sedapat mungkin tidak memperlihatkan giginya kalau hendak dikatakan sopan. Maksud dan tujuan senyuman juga menentukan macam se-

nyuman yang dihasilkan. Demikian juga lebar-ciutnya senyuman memiliki makna sendiri dalam kelompok tertentu. Itulah kenapa lalu muncul banyak macam senyuman dalam masyarakat. Ada senyuman yang memancarkan keakraban atau keramahan, tetapi ada pula senyuman yang memancarkan ejekan atau cemoohan. Ada senyuman yang mengisyaratkan kesinisan, tetapi ada pula senyuman yang mensinyalkan ketidakpercayaan. Dan, semua yang berlaku dalam masyarakat Jawa itu tidak serta-merta berlaku di dalam masyarakat bahasa lainnya.

Di dalam masyarakat bahasa Indonesia lazimnya senyuman digunakan sebagai bumbu-bumbu yang menyenangkan ketika orang bertutur sapa. Semakin dekat hubungan seseorang dengan orang tertentu, biasanya akan semakin lebar senyuman yang disunggingkan. Bahkan, dalam masyarakat kita juga ada anggapan bahwa senyuman, walaupun kecil saja wujudnya, dapat menggantikan peran bahasa yang demikian luas implikasinya. Berkenaan dengan ini ambillah contoh se-

orang ibu yang dengan mata berkaca-kaca dan dengan senyuman tertentu menciumi sambil mengelus-elus rambut anak perempuannya yang baru pulang dari seberang. Senyuman yang demikian tentu saja memiliki makna luas, mungkin merupakan sinyal kebanggaan, keharuan, kegembiraan, atau mungkin juga luapan kebaha-

giaan. Seorang pejabat senior di sebuah kantor, tersenyum kecil ketika menyerahkan tongkat kepemimpinannya kepada pejabat baru, kepada pejabat yang selama ini menjadi bawahannya. Maka mungkin sekali senyuman itu merupakan sinyal ketidakpercayaan, simbol keraguan, atau mungkin pula manifestasi kesinisan. Ketika bersama-sama berdesakan di tempat antrean tiket pesawat, senyuman dapat diartikan sebagai sebuah permintaan maaf. Mungkin karena dengan tidak sengaja orang telah menginjak kaki orang lain di belakangnya. Di tengah perjalanan ketika sedang berkendara dengan mobil pribadi, kadang kala orang tersenyum sendiri di belakang setirnya. Mungkin senyuman demi-

kian ini merupakan ungkapan kedongkolan karena baru saja ada mobil lain yang menyulipnya tanpa memberi aba-aba. Konon di negara Jepang seorang anak tersenyum ketika sedang dimarahi orang tuanya. Senyuman demikian ini merupakan tanda kehormatan di sana. Tetapi dalam masyarakat Indonesia, seorang anak tidak akan pernah berani tersenyum kepada orang tuanya yang sedang marah, karena akan diartikan sebagai ejekan atau tantangan. Demikianlah senyuman dan air muka secara universal muncul bersama dengan gerak anggota tubuh lainnya, dengan distansi bertutur, dengan ragam yang termanifestasi dalam keras-lemahnya suara, cepat-lambatnya suara, dan dengan tinggi-rendahnya suara.

Cara menatap muka mitra tutur juga dapat menjadi penentu keapikan sebuah praktik pertutursapaan. Tetapi, kebudayaan yang satu berbeda dengan kebudayaan lainnya dalam memandang dan menempatkan tatapan mata. Umumnya orang-orang asing, khususnya yang berlatar belakang Barat, menatap tajam muka mitra tuturnya ketika sedang berbicara. Bagi

mereka tatapan muka yang tajam dapat digunakan sebagai simbol kesungguhan dan keseriusan. Dalam masyarakat bahasa Indonesia, pandangan mata harus digunakan sangat hati-hati karena salah-salah akan ditafsirkan sebagai kemarahan dan ketidaksopanan. Orang-orang Jawa misalnya saja, tidak pernah akan berbicara dengan menatap mata kepada mitra tuturnya. Pasalnya, tatapan mata akan dianggap sebagai ketidaksopanan. Tetapi, jika terpaksa orang harus menatap mata mitra tuturnya, pandangan mata itu sebaiknya ditujukan pada pucuk hidungnya, bukan kedua bola matanya. Cara yang demikian ini akan sedikit mengurangi ketajaman dan kesan kegarangan dan sekaligus meninggikan persepsi kesantunan. Semua yang disampaikan di atas bersama-sama membentuk sistem paralinguistik yang sangat besar manfaatnya. Sistem paralinguistik bergabung dengan sistem linguistik yang melibatkan aspek fonologis, morfologis, sintaksis, dan pragmatik, hingga akhirnya mencuatkan hasil komunikasi yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan keapikannya.***

Media Indonesia, 25 Oktober 2003

BAHASA INDONESIA-RAGAM LISAN

Enam Tokoh Berbahasa Indonesia Lisan Terbaik

— Termasuk di Antaranya Dubes Inggris

JAKARTA, KOMPAS — Untuk pertama kalinya Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional bersama tujuh organisasi media massa memilih enam tokoh berbahasa Indonesia lisan terbaik. Keenam tokoh tersebut adalah Susilo Bambang Yudhoyono (Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan), Yusril Ihza Mahendra (Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia), Eep Saefulloh Fatah (pengamat politik), Nurcholish Madjid (cendekiawan Muslim), Pradjoto (pengamat hukum perbankan), dan Richard Gozney (Duta Besar Inggris untuk Indonesia).

Nama-nama tokoh tersebut diumumkan dalam Pembukaan Kongres Bahasa Indonesia VII di Hotel Indonesia Jakarta, Selasa (14/10). Mereka memperoleh penghargaan berupa plakat yang diserahkan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Jusuf Kalla.

Kepala Pusat Bahasa Dendy Sugono mengatakan, pemilihan tokoh berbahasa Indonesia lisan terbaik dilakukan agar ada kepedulian untuk berbahasa Indonesia dengan baik dan benar dari tokoh-tokoh lainnya. Mereka yang terpilih itu bisa menjadi teladan bagi masyarakat.

Kriteria penilaian, lanjut Dendy, meliputi vokal—berupa kenyaringan dan keterdengaran serta enunsiasi (kejelasan pengucapan)—dan intonasi (tekanan suara). Selain itu juga dinilai pilihan kata/istilah dan struktur kalimat, penalaran dan organisasi tuturan, serta sikap ketika berbicara.

Pemilihan dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama berupa pencalonan oleh media massa cetak dan elektronik. Tahap kedua pemilihan dilakukan oleh dewan juri. Pada tahap pertama, setiap media massa sejak tanggal 1 April hingga 15 Juli 2003 mencalonkan lima tokoh. Selanjutnya, nama-nama tokoh dari usulan media massa diseleksi oleh dewan juri.

Selain dari Pusat Bahasa, dewan juri juga terdiri dari wakil-wakil organisasi media massa, yakni Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jakarta, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Dewan Pers, Lembaga Pers Dr Sutomo, dan Forum Bahasa Media Massa (FBMM).

Di samping tokoh berbahasa Indonesia lisan terbaik, Pusat Bahasa juga memberikan penghargaan kepada tiga sastrawan, yakni NH Dini, Dorothea Rosa Herliany, dan Oka Rusmini.

Mewakili para penerima penghargaan, Susilo Bambang Yudhoyono tampil di podium memberikan sambutan dengan terlebih dulu mempertanyakan patut-tidaknya para tokoh tersebut dianggap berbahasa Indonesia lisan terbaik. Dia juga mempertanyakan, apakah tiga sastrawan yang menerima penghargaan itu telah memberikan sumbang prestasi bagi sastra Indonesia.

"Bagi kami, tiada hari tanpa terus-menerus memperbaiki, belajar, dan menyempurnakan kemampuan dan cara berbahasa Indonesia kami. Karena kami yakin, universitas yang abadi itu adalah hidup dan kehidupan kita," ujarnya.

Menurut Yudhoyono, bahasa Indonesia tidak hanya perlu dilestarikan dan diberdayakan, tetapi juga harus diletakkan dalam proses kehidupan bangsa yang dinamis sekaligus menjadi daya saing bangsa dan negara.

Richard Gozney dan Yusril pun tidak percaya kalau dirinya layak mendapat penghargaan tersebut. Meski demikian, dengan penghargaan itu, Gozney dan Yusril merasa tertantang untuk lebih banyak belajar menyempurnakan kemampuan berbahasa Indonesia lisan.

Gozney secara khusus berharap, orang-orang asing termasuk diplomat yang berada di

Indonesia berniat mempelajari bahasa Indonesia. Ia menilai, sungguh merupakan sikap mulia dari orang asing jika berupaya mempelajari identitas bangsa yang ditempatinya hidup dan bergaul. "Apalagi, bahasa Indonesia sangat fleksibel menerima kata-kata serapan asing," ujar Gozney, yang mengaku mempelajari bahasa Indonesia sejak tahun 1970-an, ketika pertama kali berdinasi di Indonesia.

Dia mencontohkan, dulu pada tahun 1970-an belum ada istilah "wartel" dan "krismon" dalam bahasa Indonesia. Dua kata itu merupakan contoh penggabungan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris yang kemudian melahirkan kata tersendiri.

"Menjelang Presiden Soeharto turun, istilah krismon malah menjadi kristal. Artinya krisis total. Begitulah lenturnya bahasa Indonesia menerima serapan asing," urai Gozney.

Ancaman globalisasi

Wakil Presiden Hamzah Haz dalam sambutannya yang dibacakan Jusuf Kalla menilai, bahasa Indonesia sebagai pemersatu bangsa di tengah keberagaman latar belakang suku dan budaya. Era globalisasi—ditandai dengan pemberlakuan perdagangan bebas, arus barang, jasa, dan tenaga kerja—dikhawatirkan ikut mengancam kelestarian bahasa Indonesia. Kondisi itu akan membawa pengaruh pada perilaku masyarakat dalam bertindak dan berbahasa, antara lain timbulnya kecenderungan penggunaan bahasa asing dalam berbagai bidang kehidupan.

Dalam persiapan perdagangan bebas—yang ditandai masuknya pelaku perdagangan barang dan jasa luar negeri—wapres melihat perlunya disahkan regulasi domestik, di antaranya, soal standar kemampuan berbahasa Indonesia supaya komunikasi dalam perda-

gangan bebas Indonesia dapat berjalan dengan lancar.

Wapres juga mengingatkan, betapa pun hebatnya dinamika kehidupan global, bangsa Indonesia tidak boleh kehilangan identitasnya. Negara Kesatuan Republik Indonesia, bendera Merah Putih, bahasa negara, lagu kebangsaan, lambang negara, dan kebhinnekaan harus selalu diaktualisasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

(NAR)

Kompas, 15 Oktober 2003

Lima Tokoh Peroleh Penghargaan Berbahasa Terbaik

MH Thamrin, Warta Kota

Lima tokoh dari kalangan pemerintahan dan berbagai profesi di masyarakat Selasa (14/10) menerima penghargaan setelah terpilih sebagai "Tokoh Berbahasa Indonesia Lisan Terbaik Tahun 2003". Sementara Dubes Inggris untuk RI, Richard Gozney, mendapatkan penghargaan khusus untuk hal serupa.

Kelima tokoh itu ialah Susilo Bambang Yudhoyono kini Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Nurcholish Madjid (Cendekiawan Muslim dan Rektor Universitas Paramadina), Pradjoto (pengamat hukum perbankan), Yusril Ihza Mahendra (Menteri Kehakiman dan HAM), dan Eep Syafulloh Patah (dosen dan pengamat masalah politik dari Universitas Indonesia).

Pemilihan yang baru kali pertama dilakukan di Indonesia itu diumumkan pada acara pembukaan Kongres Bahasa Indonesia (KBI) VIII di Hotel Indonesia, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat Selasa. Saat itu panitia KBI juga memberikan penghargaan kepada tiga sastrawati, yakni NH Dini, Dorothea Rosa Herliany, dan Oka Rusmini.

Penyerahan piagam penghargaan itu dilakukan oleh Menko Kesra Yusuf Kalla mewakili Wapres Hamzah Haz, dalam pembukaan kongres yang akan berlangsung hingga Jumat (17/10) itu.

Dalam sambutannya mewakili para penerima penghargaan, Yudhoyono mengatakan, "Sebenarnya kami harus bertanya apakah sudah tepat dan benar bahwa kami semua telah berbahasa lisan dengan baik sekaligus apakah temari-teman yang menerima penghargaan dalam bidang sastra juga memiliki prestasi yang patut dihargai."

Menurut dia, bila ingin menyempurnakan kemampuan berbahasa Indonesia, kemampuan berkomunikasi dalam baha-

sa lisan sekaligus mengembangkan kepribadian, maka langkah yang paling benar adalah melakukan pendidikan seumur hidup. Untuk itu dia berharap agar proses pembelajaran berbahasa Indonesia berlangsung secara terus-menerus setiap hari di semua kalangan.

Sementara itu, Dubes Inggris Richard Gozney ketika mengomentari terpilihnya dirinya sebagai diplomat asing yang memperoleh penghargaan khusus dari panitia, mengatakan, dirinya merasa ragu bahwa kemampuan berbahasa Indonesianya dinilai baik. "Namun saya sangat senang menerima penghargaan ini," katanya.

Penghargaan yang diterimanya tersebut, diharapkan akan memacu orang-orang asing yang berada di Indonesia untuk bisa berbahasa Indonesia secara baik.

Menurut panitia, pemilihan nama-nama tokoh yang mendapatkan penghargaan itu berlangsung dalam proses sekitar enam bulan. Satu kepanitiaan yang terdiri dari Pusat Bahasa, Forum (Redaktur) Bahasa Media Massa (FBMM), organisasi kewartawanan (AJI Indonesia, IJTI, PWI, PRSSNI, Dewan Pers, dan Lembaga Pendidikan Pers Dr Soetomo) menyiapkan kriteria dan meminta media massa di seluruh Indonesia memilih lima nama tokoh yang berdasarkan kriteria dinilai memiliki kemampuan berbahasa Indonesia lisan terbaik.

Setelah nama-nama pilihan media massa terkumpul, tim penyeleksi menghitung jumlah suara yang diperoleh setiap tokoh. Dari puluhan tokoh yang masuk terpilih lima nama yang kemudian ditetapkan sebagai para tokoh berbahasa Indonesia lisan terbaik. Richard Ghzney yang juga dipilih oleh sejumlah media kemudian ditetapkan sebagai diplomat asing yang mendapatkan penghargaan khusus. (wip/dob)



SB Yudhoyono

Richard Gozney

Warta Kota, 15 Oktober 2003

Penghargaan Pembangkit Senyuman

SENYUM *sumringah* menghiasi wajah Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (Menkeh dan HAM) Yusril Ihza Mahendra usai menerima penghargaan sebagai salah satu tokoh berbahasa Indonesia lisan terbaik. Penghargaan itu diberikan oleh Panitia Kongres Bahasa Indonesia VIII di Jakarta, kemarin, kepada lima tokoh dari Indonesia dan satu tokoh dari luar negeri.

"Apa iya saya berbahasa Indonesia dengan baik?" begitu dia malah bertanya pada wartawan. Meski terus-menerus menebarkan senyum, dia mengaku perasaannya biasa-biasa saja menerima penghargaan itu. "Ya perasaan saya biasa-biasa saja. Terima kasih atas penghargaan ini.

Mudah-mudahan bisa terus berbahasa Indonesia dengan baik," katanya, lagi-lagi diiringi senyum.

Padahal, beberapa hari belakangan, banyak pertanyaan dari wartawan yang selalu membuat raut wajahnya tegang. Bahkan dalam kaitan dengan verifikasi parpol di Depkeh dan HAM, Yusril dilaporkan oleh sejumlah parpol ke Polda Metro Jaya bahwa dirinya terlibat suap. Ditambah lagi, kecaman dari pemerintah Belanda terhadap putra Indonesia kelahiran Belitung, 5 Februari 1956 ini sehubungan dengan Rancangan KUHP Indonesia yang akan segera menghapuskan banyak hukum kolonial Belanda.

Soal berbahasa, Yusril mengakui banyak orang mengatakan padanya bahwa tampak sekali pengaruh bahasa Melayu dalam bahasa yang digunakannya. "Sebetulnya sih bahasa saya standar saja. Dan latar belakang bahasa saya memang bahasa Melayu," ujarnya lagi masih dengan senyum. Namun, senyum itu segera sirna ketika pertanyaan beralih ke soal verifikasi. "Ah, soal verifikasi lagi," keluhnya.

(VI/M-4)



■ MEDIA/SAYUTI
■ Yusril Ihza Mahendra

Media Indonesia, 15 Oktober 2003

SBY dan Cak Nur Terima Penghargaan Berbahasa Lisan Terbaik

JAKARTA, BK

Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan cendekiawan muslim Nurcholil Madjid (Cak Nur) mendapat penghargaan berbahasa lisan terbaik. Penghargaan itu diberikan Wakil Presiden Hamzah Haz yang diwakili oleh Menko Kesra Yusuf Kalla.

Usai menerima penghargaan yang berlangsung pada Kongres Bahasa Indonesia VIII di Jakarta, Selasa (14/10), Yudhoyono menyampaikan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya atas penghargaan tersebut. Penghargaan ini memacu dirinya untuk lebih baik dalam berbahasa Indonesia.

"Bagi kami tiada hari untuk terus belajar dan terus menyempurnakan bahasa Indonesia kami," kata Yudhoyono.

Selain Yudhoyono dan Nurcholil, tokoh lainnya yang juga mendapat penghargaan serupa adalah pengamat perbankan Pradjoto,

serta pengamat politik Eef Syaefullah Fatah. Sedang warganegara asing yang menerima penghargaan tersebut adalah Duta Besar Inggris untuk Indonesia Richard Groozney.

Panitia Kongres Bahasa Indonesia VIII 8 juga memberikan penghargaan sastra kepada tiga orang tokoh. Mereka adalah Doro Thea Rosa Herliany, NH Dini, dan Oka Rusmini.

Para tokoh sastra ini dianggap ikut memperjuangkan dan memasyarakatkan bahasa Indonesia kepada masyarakat melalui karya mereka. Bahkan saat ini sudah ada gerakan sastrawan yang akan masuk ke sekolah-sekolah.

Langkah ini sebagai upaya untuk lebih memasyarakatkan sastra bagi para pelajar. Sebab, kemampuan para pelajar soal sastra dianggap masih minim. Padahal sastra merupakan salah satu wahana untuk mengekspresikan kreativitas siswa. © day

BK, 15/10-2003

Berita Kota, 15 Oktober 2003

Garin: Kita Kembali ke Budaya Lisan Tahap Kedua



Garin Nugroho

TANTANGAN besar yang dihadapi bahasa Indonesia kini adalah media populer yakni televisi. Media televisi inilah yang melahirkan tradisi lisan tahap kedua. Padahal tradisi tulis, tahapan dari tradisi lisan awal, belum berjalan sepenuhnya. Itulah pendapat sutradara Garin Nugroho yang tampil menjadi salah satu pembicara dalam diskusi pada Kongres Bahasa Indonesia VIII di Hotel Indonesia, Kamis (16/10).

Pembicara lain, Remy Sylado, lebih keras lagi bereaksi. Bahasa Indonesia, katanya, tak ubahnya bak sampah bahasa Inggris. Remy mencontohkan sederet koran yang menulis sejumlah kata-kata bahasa Inggris. "Banyak tokoh masyarakat yang bergenit-genit dengan bahasa asing dan diberitakan oleh pers. Dan, ini dianggap yang benar," kata Remy.

Garin melihat, bahasa Indonesia sekarang berkembang di antara tradisi lisan tahap kedua dengan tradisi tulis. Kondisi ini terjadi pada babakan waktu transisi setelah tahun 1998 yang cenderung antipemusatan, antirezim, anti-minisasi. "Ini psikologi komunal yang terjadi, seperti dalam contoh kata 'persatuan' yang menghadapi tantangan dengan munculnya isu desentralisasi," jelas Garin.

Lebih lanjut, kata Garin, bahasa Indonesia kini juga dikendalikan oleh kebudayaan populer yakni televisi, yang berpaling pada urusan *rating* dan teknologi kapital yang sifatnya banyak, mudah, ringan. "Dari data yang ada, rata-rata orang menonton televisi selama dua jam per hari. Padahal hanya satu persen saja program televisi yang bersifat mendidik. Sisanya adalah program yang dibikin hanya dengan tradisi lisan, bukan dengan tradisi tulis," katanya.

Dikatakannya, banyak program televisi yang sukses justru hasil proses kerja dari tradisi lisan, bukan dari skenario yang matang. "Lihat saja program populer dengan bahasa Jakarta-Betawi oleh Mandra, atau Ketoprak Humor yang mengangkat budaya Jawa. Tidak akan ada program mengangkat bahasa daerah lain karena tidak akan sukses," ujarnya. (mir)

WKE, 17/10/03

MENKO POLKAM SB YUDHOYONO

Tokoh Berbahasa Indonesia Lisan Terbaik

KONGRES Bahasa Indonesia VIII juga memilih tokoh-tokoh nasional yang baik dalam menggunakan bahasa lisannya. Masukan dijaring dari berbagai kalangan, ada keterlibatannya pula dari media massa, kemudian digodok di tingkat pusat. Akhirnya, Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono terpilih sebagai tokoh nasional berbahasa Indonesia lisan terbaik. Selain Susilo Bambang Yudhoyono, terpilih pula Nurcholish Madjid, Yusril Ihza Mahendra, Partoto, Eep Saifullah Fatah, dan Duta Besar Inggris untuk Indonesia Richard Gozney.

Banyak pihak setuju atas terpilihnya Susilo. Selama ini kita sudah terbiasa mendengarkan pejabat tinggi berbicara dalam bahasa Indonesia, tetapi tak menyadari atas kesalahan-kesalahan tata bahasanya. Ada kecenderungan sekarang ini menggunakan bahasa itu sangat bebas sesuai dengan keinginan si penuturnya. Hal ini kiranya perlu dihadapkan pada program peningkatan kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar, dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan.

Apalagi masyarakat kita ini sangat paternalistik, sehingga masih melihat perilaku pemimpin sebagai *panutan*. Padahal, penggunaan bahasa Indonesia oleh pejabat yang terjadi sekarang ini, menurut Koesnadi, tidak atau belum merupakan teladan yang baik. "Sebaliknya, apa yang dapat dilihat dalam praktik, penuturan bahasa Indonesia maupun penulisan bahasa Indonesia, kurang memperhatikan kaidah bahasa yang telah ditetapkan," katanya.

Jika kita memiliki pejabat yang bahasa Indonesiannya baik, rapi, teratur, kiranya akan lebih mudah dijadikan teladan. Masyarakat pun pelan-pelan akan memperbaiki bahasanya.



KR-DOK

Susilo Bambang Yudhoyono

Tradisi memilih pejabat nasional atau tokoh nasional berbahasa Indonesia yang baik, kiranya patut dipertahankan dan dilestarikan di negeri tercinta ini. Bisa saja momentum Hari Sumpah Pemuda dijadikan bingkai untuk kegiatan ini.

Kongres Bahasa Indonesia tahun 2003 ini juga menarik karena peran media massa mulai diangkat dalam kongres. Bahkan mengundang para redaktur bahasa untuk bicara. Ini terjadi setelah kebebasan pers dan otonomi daerah, sehingga kekuasaan negara atas

pers sudah tak ada lagi. Negara tak lagi mengkooptasi pers. Seperti apa peran pers ini setelah tak lagi terkungkung, memang menarik dilihat. Bagaimana kemunculan bahasa lokal dalam pers berbahasa Indonesia? Seperti apa peran media cetak dan media elektronika dalam meningkatkan mutu penggunaan bahasa Indonesia?

Media massa, tanpa kecuali, memang punya tanggung jawab menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tanggung jawab itu tidak menghalangi kreativitas penggunaan bahasa sesuai dengan keperluan media masing-masing. Media massa perlu pula menyadari peran dan fungsinya sebagai sarana pendidikan bagi masyarakat, termasuk dalam pembinaan bahasa Indonesia. Tidak salah kiranya jika dalam rumusan kongres ini mencantumkan butir agar pekerja pers menyadari pengaruh yang besar dari hasil kerjanya. "Karena itu dituntut kepekaan yang tinggi dalam menggunakan bahasa Indonesia, termasuk dalam mengolah berita dari narasumber yang berkemampuan bahasa rendah," ujar Ketua Tim Perumus Kongres Bahasa Indonesia VIII, Prof Dr Abdul Wahab. (*)-d

Kedaulatan Rakyat, 20 Oktober 2003

BAHASA INDONESIA-RAGAM RESMI

Pembekalan Bahasa untuk Pejabat

OLEH

Teguh Santoso

BANYAK orang sepakat dengan ungkapan bahasa menunjukkan bangsa. Dari bahasa yang digunakan seseorang kita bisa menebak budayanya, nilai yang dianutnya. Dari bahasa yang dia gunakan, kita bisa mengetahui apakah orang itu sopan atau tidak, terbuka atau tidak, demokratis atau tidak, egois atau tidak, dan sebagainya. Bahasa dan budaya dapat dibedakan, tetapi tidak bisa dipisahkan. Kejujuran seseorang akan terlihat dalam bahasa yang digunakannya, orang yang mau menang sendiri juga akan memperlihatkan sifatnya itu pada bahasa yang digunakannya. Nilai-nilai yang dianut pembicara akan turut mewarnai bahasa yang digunakannya.

Fenomena saat ini yang berkembang di masyarakat sejak reformasi digulirkan adalah terbukanya saluran pendapat. Jika sebelumnya dikatakan bahwa saluran komunikasi antara rakyat dengan wakilnya tersumbat, saat inilah yang dinamakan unjuk rasa, demonstrasi menjadi hal yang sangat biasa dilakukan. Model penyampaian pendapat atau *uneg-uneg* dengan pengerahan massa tidak ada salahnya sebatas masih dalam koridor hukum. Namun, tidak tertutup kemungkinan unjuk rasa yang marak saat ini diwarnai oleh aksi perusakan bahkan cenderung anarki.

Sebenarnya, tanpa melakukan unjuk kekuatan dengan pengerahan massa yang terkadang mengganggu ketertiban umum dapat dihindari apabila sebelumnya para anggota dewan baik yang duduk dalam DPR maupun DPRD tanggap terhadap permasalahan yang sebenarnya. Permasalahan yang dimaksudkan bukan hanya permasalahan yang muncul setelah terjadi peristiwa, akan tetapi permasalahan sesungguhnya di dalam masyarakat, bukan *surface* tetapi *deep structure* dari keinginan rakyat yang dapat menimbulkan permasalahan.

Mungkinkah dibuat sebuah peraturan yang mengharuskan kepada setiap calon wakil rakyat maupun pejabat untuk mengikuti *fit and proper test* tentang kebahasaan sebelum mereka menduduki sebuah jabatan? Pertanyaan ini muncul berdasarkan pengalaman masa lalu khususnya masa Orde Baru. Masa Orde Baru sangat jelas apa yang dinamakan manipulasi bahasa dengan gejala pemakaian *eufimisme*. Kita mengetahui jika harga BBM jelas-jelas naik dari sekian rupiah menjadi sekian rupiah. Namun, mengapa bukan sebuah pengertian yang lugas dan eksplisit untuk menggunakan kata *dinaikkan*? Mengapa mesti menggunakan kata *disesuaikan*? Mengapa kenaikan tersebut memaksa harga BBM disesuaikan, tetapi disesuaikan dengan apa dan dengan siapa? Masih banyak contoh penggunaan *eufimisme* seperti misalnya

kata *diamankan* untuk mengganti kata *ditangkap* atau *dipenjara*.

Masyarakat Indonesia saat ini telah mengalami banyak kemajuan dalam hal perolehan informasi. Jangan sampai informasi tersebut menjadi bumerang bagi kita sendiri. Kesadaran sosial para anggota dewan maupun para penyelenggara negara harus lebih peka dan tanggap terhadap gejala di masyarakat. Mengasah kepekaan tersebut salah satu cara dengan menginventarisir informasi dari masyarakat baik secara turun langsung maupun lewat media massa.

Selanjutnya, informasi tersebut dianalisis dengan mencari solusi atau mencari maksud dengan kondisi masyarakat yang dihadapinya. Dalam tahap inilah, peran ilmu bahasa yang disebut pragmatik sangat besar. Setiap informasi apapun bentuknya, harus dicari esensinya sehingga akar permasalahan tidak sampai menjadi bom waktu yang setiap saat dapat meledak. Bahkan, memahami esensi keinginan masyarakat dapat dijadikan langkah mengambil tindakan preventif yang perlu sebelum permasalahan tersebut menjadi rumit.

Jadi, apakah pragmatik itu? Pragmatik merupakan cabang linguistik (ilmu bahasa) yang mengkaji bahasa tidak hanya dari struktur bahasa itu sendiri akan tetapi yang terpenting adalah mengkaji bahasa dengan memperhatikan faktor eksternal bahasa. Jelas bahwa informasi berupa bahasa tersebut akan dapat dicerna apabila sang penerima informasi, dalam hal ini para wakil rakyat atau pejabat dapat memahami bahasa tersebut dengan kaitan eksternal bahasa seperti konteks, kemudian prinsip kerja sama yang di dalamnya memuat maksim-maksim antara lain maksim kuantitas, kualitas, maksim pelaksanaan, maksim relevansi, juga ada skala kesantunan. Pada garis besarnya, pragmatik berusaha mengetahui maksud yang tersembunyi dibalik sebuah tuturan bahasa. Maksud tersebut dapat diketahui apabila kita mempelajari kaitan antara tuturan atau informasi tersebut dengan aspek-aspek tersebut.

Seandainya seorang calon pejabat atau wakil rakyat sebelumnya mendapat penataran masalah ini, penulis yakin setiap permasalahan yang akan maupun yang sudah timbul di masyarakat dapat diantisipasi untuk dicari solusinya. Sekarang ini tinggal para pengambil keputusan mau atau tidak menambahkan materi khususnya bahasa Indonesia sehingga masyarakat tidak terus-menerus merasa dibohongi dengan janji para juru kampanye partai. Apalagi Pemilu 2004 tidak lama lagi akan dilaksanakan. □ - o

*) Teguh Santoso, Pengamat Masalah Kebahasaan

Lelucon dan Latar Indeksal

Dr R Kunjana Rahardi

Pengamat Bahasa Indonesia

TULISAN ini masih merupakan kelanjutan dari penjelasan di Ulasan Bahasa *Media Indonesia* minggu lalu, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan Sdri Vita, pemerhati bahasa di Denpasar, Bali. (1) Apakah lelucon dipengaruhi latar belakang budaya setempat? (2) Sejauh mana latar belakang pendidikan dan umur berpengaruh terhadap lelucon? (3) Apakah lelucon dapat diklasifikasi? Mohon penjelasan!

Di dalam linguistik pragmatik ditegaskan bahwa sesungguhnya tidak ada teks atau wacana yang tidak berkaitan dengan konteks situasinya. Demikian pula lelucon sebagai salah satu wujud wacana, pasti bertalian sangat erat dengan latar belakang sosial-budaya yang menjadi konteksnya. Barangkali kita pernah suatu ketika mengamati, bahwa lelucon yang disampaikan seseorang sama sekali tidak mendapat tanggapan dari pendengarnya. Atau bahkan mungkin oleh kelompok sosial tertentu dalam masyarakat.

Tetapi, anehnya lelucon yang sama mendapat apresiasi yang luar biasa hebat dalam kelompok tertentu. Ambillah contoh kesenian Lodruk yang berasal dari Jawa Timur, mungkin sekali kesenian lodruk itu sangat menarik bagi orang-orang dari Jawa Timur. Tetapi, pertunjukan kesenian yang penuh canda dan tawa itu serta-merta menjadi sama sekali tidak menarik jika dipertontonkan di Sumatra Barat dengan sebagian terbesar orang Minang di dalamnya.

Jadi, jelas sekali bahwa lelucon itu sesungguhnya bertali-temali erat dengan latar belakang sosial-budaya yang menjadi wadahnya, dengan informasi indeksal (*indexal information*) yang menjadi penentu utamanya. Bahkan, bukan hanya itu saja, baik atau tidaknya sebuah lelucon dan persepsi orang terhadap lucu atau

tidaknya humor tertentu, sangat ditentukan oleh latar pendidikan dari pelaku-pelaku dan para penontonnya. Lelucon intelektual, misalnya saja, cenderung hanya menarik dinikmati kalangan yang memiliki kemampuan intelektual cukup tinggi, orang-orang yang berlatar akademik meyakinkan, dan mereka yang terbiasa hidup

dalam budaya intelektual relatif tinggi.

Akan tetapi, lelucon konyol yang sering tidak memerlukan pemikiran untuk mema-

haminya, cenderung hanya menarik bagi kalangan masyarakat yang rendah peringkat sosialnya. Selain latar indeksal dan pendidikan seperti disebutkan di depan, usia seseorang juga dapat menjadi penentu baik-tidaknya lelucon yang disampaikan.

Lelucon anak-anak hanya menarik bagi mereka yang masih berusia kanak-kanak. Sebaliknya lelucon dewasa cenderung hanya menarik bagi orang-orang yang sudah dewasa. Lelucon-lelucon yang berbau seksual dalam masyarakat, sama sekali tidak dapat mengundang senyum, apalagi tawa dan canda bagi anak-anak usia prasekolah yang tentu saja belum mengerti persoalan seksual dengan segala tali-temalnya. Humor politik lazimnya juga hanya menarik bagi mereka yang sudah berusia dewasa dan memahami persoalan hukum dan sosial-politik dalam sebuah masyarakat.

Orang-orang yang berinteligensi relatif rendah, mereka yang biasanya relatif sulit menangkap maksud yang disampaikan seseorang, cenderung menanggapi lelucon yang disampaikan kepadanya secara dingin-dingin saja. Mahasiswa-mahasiswa yang sedang merasa sangat kalut memikirkan persoalan pribadi, mereka yang menghadapi persoalan rumit sehingga sulit tersenyum dan tertawa, cenderung akan menanggapi dingin lelucon-lelucon yang disampaikan dosennya.

Jadi, jelas sekali bahwa faktor penentu hadirnya lelucon, dapat diterima-tidaknya lelucon dalam masyarakat, sangat ditentukan oleh rupa-rupa faktor yang relatif kompleks. Tidak saja faktor yang berhubungan dengan aspek-aspek indeksal yang beresensikan informasi sosial-budaya seperti disebutkan di depan, tetapi juga oleh faktor-faktor lainnya, bahkan faktor yang melibatkan aspek-aspek psikologis individu di dalamnya.

Di dalam linguistik pragmatik juga didapatkan bahwa lelucon dapat diklasifikasikan menjadi bermacam-macam. Ada lelucon yang klasifikasinya didasarkan pada motivasi pembuatnya. Ada pula klasifikasi yang dasarnya adalah maksud atau tujuan penyusunannya. Maka dalam masyarakat dapat ditemukan lelucon politis, lelucon etnik, lelucon seksual, dan aneka macam lelucon lainnya.

Lelucon politis dapat dengan mudah ditemukan di dalam surat kabar dan majalah atau buletin politik. Tujuannya adalah untuk memberikan kritik atau masukan kepada pihak-pihak tertentu yang secara politis memiliki peran, fungsi, dan pengaruh politik dalam masyarakat. Lazimnya menjelang momentum kenegaraan yang penting, misalnya saja pemilihan umum seperti tahun mendatang ini, akan banyak persoalan sosial-politik yang dapat diangkat lewat lelucon-lelucon politik yang disajikan dengan nuansa bermacam-macam.

Lelucon seksual lazimnya berkaitan sangat erat dengan organ-organ seksual manusia atau makhluk-makhluk tertentu lainnya dan aneka macam kelucuan yang dapat diciptakan dari objek-objek itu. Lelucon seksual yang diterapkan secara tidak tepat, pemakaiannya tidak cermat dan tidak bijaksana, akan dapat mengundang persepsi negatif bagi para pendengarnya.

Maka biasanya orang lalu banyak menautnautkan lelucon seksual dengan tata krama dan etika. Karena itu, lelucon seksual ini harus tepat digunakan, dengan pertimbangan konteks yang harus sungguh-sungguh dan teliti.

Lelucon etnik biasanya berkaitan sangat erat dengan kekhasan kelompok etnik tertentu dalam sebuah masyarakat. Dia dapat berupa kelaziman-kelaziman yang berlaku dalam kelompok bersangkutan. Dia dapat juga berupa kekhususan-kekhususan yang bertautan dengan aspek-aspek fisik dan nonfisik dari etnik itu. Maka biasanya, lelucon jenis kesukuan ini sensitif sekali sifatnya. Karena itu, pemakaiannya harus ekstra hati-hati, agar orang yang merasa berada dalam kelompok etnik itu tidak terusik atau tersinggung martabatnya, yang akhirnya justru mengundang masalah sosial yang tidak gampang diselesaikan.***

Media Indonesia, 4 Oktober 2003

BAHASA INDONESIA-RAGAM TULIS

Sembilan Tokoh Menerima Penghargaan Bahasa dan Sastra

JAKARTA (SP)

Sembilan orang, termasuk Dubes Inggris untuk Indonesia Richard Gozney, Menko Polkam Soesilo Bambang Yudhoyono dan Menteri Kehakiman dan HAM Yusril Ihza Mahendra mendapat penghargaan "Tokoh Berbahasa Indonesia Lisan Terbaik" di Jakarta, Selasa (14/10).

Penyerahan piagam penghargaan tersebut dilakukan oleh Menko Kesra Jusuf Kalla mewakili Wapres Hamzah Haz, dalam acara Kongres Bahasa Indonesia VIII, yang berlangsung di Jakarta dari 14-17 Oktober 2003.

Selain ketiga di atas, para penerima penghargaan adalah cendekiawan muslim Nurcholish Madjid, pengamat hukum perbankan Pradjoto, pengamat politik dari UI Eep Saefullah Fatah, NH Dini, Dorothea Rosa Herliany, dan Oka Rusmini.

Menko Polkam Soesilo Bambang Yudhoyono yang berbicara mewakili para penerima penghargaan mengatakan, proses pembelajaran berlangsung terus menerus setiap hari untuk memperbaiki dan menyempurnakan kemampuan

berbahasa Indonesia.

"Sebenarnya kami harus bertanya apakah sudah tepat dan benar, bahwa kami semua telah berbahasa lisan dengan baik sekaligus apakah teman-teman yang menerima penghargaan dalam bidang sastra juga memiliki prestasi yang patut dihargai," katanya.

Menurutnya, bila ingin menyempurnakan kemampuan berbahasa Indonesia, kemampuan berkomunikasi dalam bahasa lisan dan sekaligus mengembangkan kepribadian, maka langkah yang paling benar adalah terus melakukan pendidikan seumur hidup.

Sementara itu, Dubes Inggris untuk Indonesia Richard Gozney ketika mengomentari tentang penghargaan tersebut mengatakan, dirinya merasa ragu kalau kemampuan berbahasa Indonesia-nya dinilai baik. "Namun saya sangat senang menerima penghargaan ini," ungkapnya.

Dubes Inggris menambahkan, penghargaan berbahasa yang diterimanya tersebut, diharapkan akan memacu orang-orang asing yang berada di Indonesia untuk mampu dan bisa berbahasa Indonesia secara baik. *yok

Sinar Pagi, 15 Oktober 2003

Opini

Bahasa

OLEH

Bakdi Soemanto

TATKALA masih aktif mengajar bahasa Indonesia untuk orang asing, terutama yang datang dari Amerika dan Australia; saya pernah diprotes keras. Katanya, bahasa Indonesia yang saya ajarkan di kelas selama beberapa bulan, ternyata, bahasa yang tidak bisa digunakan di Jakarta. Mereka bingung *tatkala* mendengar semacam kata penegas, *dong, deh, sih*, yang dalam bahasa Jawa barangkali semacam *kok, he, lho* dll. Di samping itu, ada juga kata ganti nama yang kedengarannya aneh buat mereka, misalnya *gue, lu*, yang lavalnya tidak *medhok* seperti diucapkan oleh orang Jawa Tengah dan Yogyakarta.

Protes itu menunjukkan betapa benarnya kekhawatiran sementara orang, apa yang disebut bahasa Indonesia baku versi Pusat Bahasa bukanlah satu-satunya bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa bisa disebut baik dan benar bukan demi aturan bahasa itu sendiri tetapi ketepatannya dengan konteks dan situasinya. Oleh karena itu, sah jika ada sebutan bahasa Indonesia Malioboro, bahasa Indonesia Kampus Biru, bahasa Indonesia Pasar Beringharjo, bahasa Indonesia *sekatenan*. Bahkan, ada bahasa Indonesia Soekarno, bahasa Indonesia Soeharto, bahasa Indonesia Habibie, bahasa Indonesia Gus Dur, bahasa Indonesia Megawati, bahasa Indonesia gaul, dan sebagainya. Apa yang disebut bahasa Indonesia baku sebenarnya tidak pernah ada, yang ada adalah salah satu versi dari sekian ribu versi. Salah satu versi itu hidup dalam jagat pikir resmi dan jagat pikir akademik.

Saya tak tahu persis *tatkala* sejumlah pemuda kumpul-kumpul di Jakarta, 28 Oktober 1928 untuk mengikrarkan *satoe bahasa, bahasa Indonesia*, bahasa Indonesia yang mana yang dimaksudkan. Yang terang, bahasa Indonesia yang bukan resmi dan akademik yang memungkinkan pemuda-pemuda dari Aceh bisa bercanda dengan pemudi Yogyakarta, pemudi Timor Timur bisa kirim-kiriman SMS dengan pemuda dari Wonosari.

Bahasa Indonesia, seperti bahasa-bahasa lain di dunia, termasuk bahasa Inggris dan British itu, senantiasa terkait erat dengan beberapa kepentingan. Orang yang pernah mengalami era Soekarno tentu masih ingat bahwa ada sejumlah kata-kata khas zaman itu yang sekarang sudah lenyap tidak digunakan lagi. Kata-kata dimaksud antara lain, *ganyang, nekolim, antek-antek imperialis, keblinger, cecunguk*, revolusi belum selesai, menjebol dan membongkar, *ngak-ngik-ngok, the new emerging forces, iki dhadhaku endi dhadhamu*, dan lain-lain.

Sesudah masa jaya Soekarno berakhir, mulailah bahasa Indonesia mendapat *boss* baru, yakni Soeharto. Kata-kata yang berhubungan dengan masalah-masalah revolusi tidak ada lagi tetapi diganti dengan kata-kata yang menyangkut pembangunan, akselerasi modernisasi, P-4, pertanian, industri, kopkamtib, bahaya laten komunis, orang tersangkut, *mbalela*, dan lain sebagainya. Presiden-presiden sesudah itu, mungkin karena masa berkua-

sanya tidak panjang, tidak sempat menggunakan bahasa sebagai alat kekuasaan. Akan tetapi, masing-masing presiden tetap menunjukkan jagat kebahasaannya sendiri-sendiri yang berbeda adalah derajat kegiatan penggunaannya. Akhir-akhir ini, bahasa digunakan lebih dahsyat lagi, untuk menyatakan sesuatu sah atau tidak, salah atau benar, suci atau harus dikutuk, dan sebangsa itu. Situasi seperti ini lebih menunjukkan pergeseran penggunaan bahasa ke arah lebih otoriter. Sesuai dengan merosotnya supremasi hukum dan aturan, tiap kelompok dan tiap orang, bahkan, yang merasa dirinya superior menggunakan bahasa sebagai alat kekuasaan. Sebagai contoh, karena saya guru, maka saya yang berhak mempunyai tafsir terhadap puisi secara begini dan begitu. Tafsir yang tidak demikian keliru dan salah. Apalagi, guru itu pernah sekolah di luar negeri. Apa yang dikatakan kepada mahasiswa-mahasiswanya menurunkan yang diomongkan gurunya di negeri salju itu.

Jika wilayah penyebutan yang benar dan salah hanya pada lingkup sekolah, tampaknya masih sempit. Akan tetapi, dampaknya sangat jauh. Guru itu telah membunuh kemungkinan-kemungkinan lain. Dari klas, situasi yang demikian akan menyebar ke luar hingga di masyarakat luas.

Bahasa telah digunakan untuk menetapkan kebenaran dengan ukuran siapa yang mengatakannya. Dengan kata lain, keberadaan pernyataan itu yang ditekankan dan bukan apa dan bagaimana suatu tindakan dilakukan. Korban yang banyak pun dianggap sudah sewajarnya karena tindakan itu dianggap benar dalam suatu paradigma tertentu.

Itulah barangkali, berita-berita di koran tentang korupsi semakin membosankan. Tiba-tiba seorang koruptor dinyatakan tak bersalah, sebab yang menyatakan memiliki otoritas untuk itu. Tetapi, bagaimana prosesnya sehingga tiba-tiba tak bersalah, itulah yang tidak jelas. Sulit untuk mencari proses terjadinya pengetahuan tentang itu.

Dengan kata lain, pertanyaan epistemologis tidak berlaku.

Saya tak tahu, apakah para *pemoeda* yang mencanangkan *saioe bahasa, bahasa Indonesia* akan kecewa kalau melihat semakin merosotnya kepercayaan orang kepada bahasa? Para penulis fiksi aliran *avant-garde* sudah memprediksi hal itu. Kelak, pidato, khotbah, uraian ekonomi, tinggallah menjadi *sastra nonsense*. Sebab, akal sehat sudah tak berdaya memahaminya.

Semoga bahasa kita tidak sampai seburuk itu. □ - k

*) *Dr Bakdi Soemanto, Pengamat Budaya.*

Kedsulatan Rakyat, 28 Oktober 2003

Konteks Tuturan, Konteks Referensi, dan Konteks Indeksal

Dr R Kunjana Rahardi

Pengamat Bahasa Indonesia

SAYA adalah mahasiswa pada program bahasa yang tinggal di Kota Malang. Ada beberapa pertanyaan yang hendak saya sampaikan dan saya mohon penjelasan secepatnya lewat *e-mail* atau boleh juga lewat Ulasan Bahasa *Media Indonesia*. (1) Apakah perbedaan teks dan wacana? (2) Apakah teks atau wacana tidak dapat lepas konteks? (3) Konteks itu meliputi apa saja?

Bahasa telah terbukti tidak dapat dilepaskan dari masyarakat dan kebudayaan yang menjadi wadahnya. Aktivitas berbahasa sesungguhnya adalah aktivitas sosial dari setiap warga masyarakatnya. Maka, dapat dikatakan pula bahwa praktik berbahasa hakikatnya adalah melaksanakan praktik-praktik sosial (*social practices*). Oleh karena itu, aktivitas berbahasa harus memperhitungkan kaidah-kaidah kebahasaan dan norma-norma kemasyarakatan yang berlaku. Bahkan tidak hanya itu, kaidah-kaidah kebahasaan dan norma-norma sosial yang ada di dalam suatu masyarakat harus terefleksi dalam setiap aktivitas berbahasa dari masing-masing individu yang menjadi anggotanya (Fowler, 1986). Karena itu, diyakini sepenuhnya bahwa aktivitas berbahasa hakikatnya memang tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan sosial-budaya dan informasi indeksal yang menjadi wadahnya. Adapun sosok informasi indeksal itu dapat meliputi aspek-aspek apa pun juga, yang terdapat di dalam masyarakat pemilik bahasa yang bersangkutan.

Di dalam linguistik, konteks wacana atau teks dapat dibedakan sedikitnya menjadi tiga. *Pertama*, konteks tuturan (*context of utterance*), yakni segala situasi dan kondisi lingkungan yang muncul bersama-sama dengan hadirnya tuturan. Dia dapat berupa media atau saluran yang digunakan, waktu dan lokasi terjadinya

tuturan, pemeran atau pelibat pertuturan, maksud atau tujuan pertuturan, dll. Jadi, sesungguhnya konteks tuturan itu menunjuk pada segala macam aspek yang memungkinkan sebuah pertuturan terjadi dan dapat dilaksanakan. Kata 'gila', misalnya, dapat memiliki makna yang tidak sama manakala muncul dalam konteks tuturan

yang berbeda. Orang dapat menjadi marah besar ketika dikatakan dirinya gila seperti pada 'gila kamu' dalam konteks tertentu. Tetapi, mungkin orang yang lain akan menanggapi secara biasa-biasa saja terhadap tuturan yang sama dalam konteks yang berbeda. Orang yang berhasil mencapai prestasi tertentu dalam suatu kelompok, sering dikatakan sebagai 'orang gila' oleh teman-temannya. Jadi, entitas bahasa yang satu akan dapat bermakna lain dalam konteks tuturan yang tidak sama.

Kedua, konteks referensi (*context of reference*) yakni konteks yang menunjuk pada lingkungan atau bidang, tempat sebuah pertuturan terjadi atau dilaksanakan. Ambillah contoh kata 'bunyi' dalam konteks linguistik, yang tentu saja berkonotasi makna berbeda dengan 'bunyi' pada konteks fisika, demikian juga dalam bidang musik. Demikian pun bentuk 'binatang jalang' dalam konteks puisi atau sastra, mungkin sekali akan berbeda dengan bentuk yang sama pada konteks

ilmu hayati atau biologi. Kata 'main' juga dapat bermakna sangat berlainan karena yang satu dapat bermakna yang identik dengan 'jalan-jalan', dan yang satunya lagi sama maknanya dengan 'berhubungan badan' atau 'berhubungan layaknya suami-istri'. Perbedaan pemaknaan dari kata atau bentuk yang sama semacam itu

dapat terjadi lantaran masing-masing memiliki konteks referensi yang tidak sama. Jadi, dalam memaknai sebuah teks (*text*), demikian pun di dalam sebuah wacana (*discourse*), orang harus benar-benar memerhatikan bidang-bidang yang menjadi referensi kemunculan leksikonnya. Orang harus mampu dengan cepat membuat pengalihan-pengalihan pikiran (*displacement of thought*), begitu dia berhadapan dengan pokok persoalan pada bidang tertentu dalam memaknai sosok teks atau wacana itu. Kekurangsiapan dalam membuat pengalihan-pengalihan pikiran, akan membuat pemaknaan yang secara referensial itu tidak berjalan sempurna.

Ketiga, konteks sosial dan konteks kultural (*socio-cultural context*), yakni segala aspek yang menunjuk pada keseluruhan jaringan konvensi dan institusi sosial-budaya yang ada dalam sebuah masyarakat dalam kurun tertentu. Istilah politik 'kuningisasi', misalnya, mencuat hebat dan berkembang pesat di

sepanjang era Orde Baru dan sama sekali tidak populer bahkan seolah-olah hilang di era Reformasi sampai dengan sekarang ini. Kata atau slogan seperti 'ganyang kolonialisme', 'merdeka atau mati', sepertinya hanya muncul dalam konteks waktu ketika masyarakat bangsa kita ini masih berada di bawah cengkeraman kaum penjajah, dan terbukti tidak banyak muncul lagi pada saat-saat sekarang ini. Jadi, jelas sekali bahwa pemaknaan sebuah teks atau wacana, tidak serta-merta dapat dilepaskan dari konteks sosio-kulturalnya. Penelanjangan terhadap konteks sosio-kultural atau pertimbangan-pertimbangan indeksal, tidak akan dapat membuahakan makna apa pun alias hanya sia-sia belaka.

Terakhir, sosok teks dan wacana memang dalam pengertian yang sempit sering dianggap sama. Tetapi, sesungguhnya keduanya berbeda dalam hal esensi dan hakikatnya. Teks semata-mata merujuk pada wujud pemakaian bahasa yang termanifestasi dalam kalimat-kalimat atau tuturan-tuturan dengan segala macam muatan makna beserta proposisi-proposisinya. Dia hanya bertautan dengan bentuk kebahasaan secara internal sebagai konteks tekstual atau koteksnya (*co-text*). Karenanya, teks itu lazimnya sama sekali tidak bertali-temali dengan konteks tuturan, konteks referensi, maupun konteks indeksalnya. Tetapi lebih dari semuanya itu, wacana (*discourse*) hakikatnya merupakan produk-produk transaksi dan interaksi antara aspek yang sifatnya kebahasaan dan perhitungan ekstralinguistik atau pertimbangan periperalnya. Jadi, sesungguhnya secara hakiki keduanya diperbedakan dari segi manifestasi dan keluasan jangkauannya, serta rupa-rupa aspek yang bertali-temali erat dengannya.***

Makna Bahasa Lebih Terasa di Era Otda



Wardiman Djojonegoro ■ DOK BB

Jakarta, Buana

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Wardiman Djojonegoro mengatakan, bahasa Indonesia merupakan perekat yang mempersatukan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Makna bahasa Indonesia untuk dilestarikan dan digunakan dalam berbahasa sehari-hari terasa lebih penting lagi dengan adanya otonomi daerah (Otda).

"Meskipun ada kekhawatiran di era globalisasi yang semakin gencar bisa saja bahasa Indonesia luntur, tetapi saya sendiri tak setuju dengan hal itu. Bahasa Indonesia tidak akan luntur. Hanya bagaimana agar semua rakyat Indonesia itu berbahasa Indonesia, sebab sampai se-

karang yang bisa berbahasa Indonesia hanya 83 % dan 17 % tidak bisa. Nah bagaimana agar itu bisa menyebar terus," katanya kepada pers di sela-sela acara Kongres Bahasa Indonesia (KBI) di Hotel Indonesia, Jakarta, Selasa (14/10).

Dikatakannya, penggalangan untuk berbahasa Indonesia sudah berjalan tapi tujuannya yang belum berjalan. Tujuannya adalah bagaimana mencapai jumlah pengguna bahasa Indonesia lebih banyak dan bisa belajar. "Tentu untuk mencapai itu kan melalui pendidikan dan juga melalui media massa," katanya.

Wajib Bahasa

Selain itu, Wardiman juga mengatakan, di era global dan dalam menghadapi pasar bebas (AFTA) ini, dimana banyak orang asing keluar masuk Indonesia, pemerintah harus mempunyai sikap yang tegas untuk mengeluarkan peraturan wajib berbahasa Indonesia bagi orang asing yang ingin masuk, tinggal dan bekerja di Indonesia. Hal ini, jelasnya, akan membuat pekerja asing berpikir seribu kali untuk masuk Indonesia.

"Dalam AFTA apalah artinya kita membuka pintu untuk pekerja-pekerja asing, tapi banyak dikalangan pemerintah meskipun ada tapi tidak mau mengakui bahwa kita dengan AFTA belum siap. Karena apa? Coba lihat saja orang India misalnya, datang kesini dengan tingkat pendidikannya lebih tinggi tapi tidak perlu gaji mahal-mahal. Lah kita ini (pribumi) tidak akan kebagian kerja nantinya, kalau tidak asda aturan semacam itu," kata Wardiman.

Dikatakannya, karena Indonesia merupakan negara yang berdaulat dan mempunyai bahasa Indonesia, maka setiap orang asing yang mau bekerja harus berbahasa Indonesia.

"Supaya apa, supaya kita-kita dapat bekerja dan kalau tidak maka kita akan ada dipinggir jalan. Oleh karenanya harus ada peraturan tentang bahasa itu sendiri. Kalau tidak nantinya banyak yang protes kepada pemerintah, kenapa kita tidak bekerja di rumah sendiri dan kenapa anda tandatangani AFTA," katanya. □ cw-2

Berita Buana, 15 Oktober 2003

BAHASA INDONESIA-TEMU ILMIAH

Menurun, Peduli Bahasa Indonesia

YOGYA (KR) - Era globalisasi ini, kedudukan bahasa Inggris makin kuat. Diperlukan sebagai alat komunikasi pergaulan antarbangsa, sebagai *language for wider communications* /LWC. Sedangkan bahasa Indonesia, karena faktor geolinguistik, belum bisa mengemban fungsi LWC itu. Maka tidak mengherankan, kepedulian terhadap bahasa Indonesia cenderung menurun.

Demikian ditegaskan Prof Asim Gunarwan PhD, dari Universitas Indonesia (UI) Jakarta dalam seminar nasional 'Pertemuan Ilmiah Bahasa dan Sastra Indonesia/PIBSI XXV' di kampus Universitas Sanata Dharma (USD), Senin (6/10). Seminar dan pertemuan yang dibuka Rektor USD Dr Paul Suparno SJ MST berlangsung hingga Selasa (7/10) tersebut, menghadirkan sejumlah pembicara yang mengupas bidang pengajaran bahasa dan sastra Indonesia.

Menurut Asim, bahasa Indonesia yang belum bisa mengemban alat komunikasi menyebabkan, lebih banyak orang Indonesia justru ingin menguasai bahasa Inggris. Implikasinya, keterkaitan sentimental orang Indonesia kepada bahasa Indonesia akan cenderung menurun. "Kepedulian terhadap bahasa Indonesia cenderung menurun," ujarnya. Implikasi selanjutnya, pengajaran bahasa Indonesia, terutama di Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Umum, hendaknya tidak hanya menekankan aspek kognitif saja, juga aspek afektif. Demikian juga soal pengajaran sastra Indonesia, pengajaran bahasa sastra Indonesia hendaknya tidak terbatas pada pengetahuan siapa yang mengarang novel, puisi, angkatan. "Justru yang lebih penting pengenalan pada apresiasi karya-karya sastra," katanya. Apresiasi sastra yang baik justru bisa memberi pemahaman secara baik pula. (Jay)-k

Kedaulatan Rakyat, 7 Oktober 2003

Masuk Bursa

OLEH LIEK WILARDJO

SENIN 6 Oktober lalu *Kompas* menyelenggarakan diskusi panel terbatas di Hotel Santika Jakarta. Diskusi itu diberi judul dramatis, "Bahasa Indonesia dalam Bahaya". Ada tujuh panelis yang diundang, tetapi seorang tak hadir. Diskusi itu dipandu Daniel Dhakidae.

Baik moderator dan keenam panelis, maupun peserta lain, tidak menaruh keberatan terhadap penyerapan kata dan istilah dari bahasa daerah dan bahasa asing, bila itu diperlukan, dan belum/tidak ada padanannya yang "pas" dalam Bahasa Indonesia. Pengalihan (transkripsi) dan penyesuaian lafal istilah asing itu lebih baik dari penerjemahan istilah asing secara sekenanya, tanpa memperhatikan ketepatan maknanya. "Nuansa" sebagai padanan *nuance*, misalnya, lebih baik daripada penerjemahan *nuance* itu secara ceroboh menjadi "suasana". Panelis Ayatrohaedi mengecam pepadanan *nuance* dengan "suasana", yang muncul beberapa kali di *Kompas*.

NAMUN, sebelum memcomot istilah asing, sebaiknya dilihat dulu apakah tidak/belum ada kata dalam bahasa kita yang secara tepat mengungkap makna konsep, proses, sifat, atau keadaan yang dikandung istilah tersebut. Hal itu ditekankan panelis Faisal Basri dan Sudjoko. Bila padanan yang tepat itu belum ada, sebaiknya dicoba dulu mereka, cipta padanan itu secara kreatif. "Masuk bursa"

yang diusulkan Anton Moeliono sebagai padanan *go public* menurut Faisal Basri amat tepat.

Sayang, penggunaan padanan itu tidak didukung otoritas bersangkutan, seperti Bapepam, BEJ, dan Kantor Menteri BUMN. "Masuk bursa" lebih luas dipakai dalam pengertian "ikut dicalonkan menduduki jabatan tertentu". Misalnya, "Cak Nur urung masuk bursa capres melalui konvensi Partai Golkar".

Contoh baik dari "masuk bursa" sebagai padanan *go public* itu dapat ditiru. Misalnya *go international* dapat dipadankan dengan "merambah mancanegara", dan *go nuclear* dengan "menggunakan tenaga inti". Bila terjemahan "tenaga inti" kurang keren, bolehlah dipakai transkripsi "energi nuklir".

Sudjoko mengusulkan agar "massa" sebagai padanan *mass* ditulis dengan satu "s" saja. Saya kurang setuju. Memang dalam bahasa kita selain ada homofon juga ada polisemi, tetapi kalau penggunaan dua "s" itu mampu menyuguhkan makna yang dimaksudkan dengan lebih langsung, apa salahnya? Apalagi kalau kata "massa" itu berdiri sendiri, terlepas dari konteksnya, dan tak merupakan bagian dari istilah majemuk!

Faisal Basri mengeluhkan kemalasan dan/atau ketakreatifan para ekonom kita untuk mencari atau mereka cipta istilah Indonesia guna dipadankan dengan istilah asing. Saya mendukung keluhan itu. Banyak yang memakai "ritel dan grosir". "Ritel" ialah alih-ejaan dari *retail*, lawannya dalam bahasa Inggris ialah *wholesale*, sedangkan "grosir" dipungut dari kata dalam bahasa Belanda, *grossier*. Mengapa tidak dipakai "eceran dan borongan"?

Istilah "pusat perkulakan" juga kurang tepat. "Kulak" artinya "membeli—biasanya dalam jumlah besar atau secara borongan—untuk dijual lagi", misalnya secara eceran. Padahal, mereka yang berbelanja di

"pusat perkulakan" tidak semuanya menjual lagi apa yang dibelinya itu untuk mendapatkan laba. Pasti ada yang memakai sendiri barang belanjanya itu. Karena itu, "pusat penjualan borongan" atau, lebih singkat, "pusat jual borongan", lebih tepat sebagai padanan *wholesale centre*.

◆◆◆

MENJELANG pemilihan umum, sering terdengar istilah *electoral threshold*. Apa susah-susah, sih memadankan istilah itu dengan "ambang pemilihan"? Istilah/akronim "pemilu" juga dikecam Ayatrohaedi sebab arti "pemilihan umum" membebani makna asli kata itu, yakni "yang membuat (hati menjadi) pilu". Selaras dengan catatan Ayatrohaedi, saya sarankan agar pengangkatan sebuah kata menjadi istilah, terlebih bila disertai penyempitan/perluasan/pengingsutan makna asli kata itu, hanya dilakukan pada kata-kata yang sudah tidak lazim dipakai.

Penggunaan "canggih" sebagai padanan *sophisticated* tidak menimbulkan masalah sebab makna asli kata itu, yakni "rewel", sudah tidak diingat mayoritas pengguna bahasa Indonesia. Pengingsutan maknanya juga dapat diterima sebab "rewel" (*fussy, finicky*) juga menandai orang yang *sophisticated* pemikirannya, yang menuntut mutu atau kesaksamaan yang tinggi. Demikian pula, saya kira, padanan "rampat" (dari "merampat papan" yang dalam bahasa Jawa berarti *nggebyah uyah*) untuk *general, ratah—simple, renjang—perpendular/normal, pudur—quench*, dan sebagainya.

Saking getolnya mengalih-ejekan istilah asing, banyak juga yang kebablasan. "Nominator" dianggap lebih gagah daripada "calon unggulan", padahal kata yang benar dalam bahasa Inggris ialah *nominee*. "Penanaman modal" juga kurang canggih, lalu dipakai "in-

vestasi", padahal dalam bahasa Inggris istilahnya *investment*, sedangkan dalam bahasa Belanda *kapitaalsinvesteering*. Begitu juga *effectiveness* dialih-ejakan secara salah menjadi "efektivitas". Karena kata "al-gojo" atau "pelaku pembunuhan" mungkin dianggap kurang modern, orang lalu menggunakan kata "eksekutor", padahal dalam bahasa Inggris kata itu adalah *executioner*!



DALAM diskusi itu saya mengeluhkan kebiasaan jelek kita

untuk membuang kata depan yang seharusnya ada dan tidak membedakan klausa penakrif (*defining clause*) dari klausa bukan-penakrif (*nondefining clause*). Saya juga minta ketegasan sikap para bahasawan terhadap berkembangnya penggunaan nomina perampat abstrak (*abstract generalizing noun*). Misalnya, "Penyebab kecelakaan itu sedang dalam penyelidikan", atau "Usulan perubahan itu masih dalam penggodokan".

Di antara para pakar bahasa yang hadir dalam diskusi itu

tidak ada yang memberi jawaban. Panelis Nirwan Ahmad Arsuka mengatakan, "pembendaan" kata kerja itu dipakai untuk menghindari tanggung jawab. Pernyataan itu didukung Daniel Dhakidae. Saya kira bukan (atau bukan hanya) itu alasannya. Penggunaan verba dalam bentuk pasif juga menyingkirkan pelaku, tetapi mengapa tidak dikatakan "Penyebab kecelakaan itu sedang diselidiki?"

LIEK WILARDJO
Fisikawan

Kompas, 18 Oktober 2003

BAHASA INDONESIA-UJIAN SOAL

Nilai UAN Mengarang akan Terpisah

BOGOR (Media): Komponen nilai mengarang dalam ujian akhir nasional (UAN) bidang pelajaran bahasa, akan dipisah dengan komponen nilai yang sistem penilaiannya dilakukan terpusat. Dengan demikian, diharapkan tidak ada lagi kerancuan kemurnian nilai UAN bidang bahasa.

Kepala Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Depdiknas Bahrul Hayat mengatakan hal itu pada rangkaian acara dialog Forum Wartawan Pendidikan, pekan lalu.

Menurut Bahrul, pada pelaksanaan UAN 2003 penilaian ujian pelajaran bahasa, termasuk di antaranya bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, tidak sepenuhnya dilakukan oleh pusat. Sebab, dalam ujian bahasa terdapat komponen mengarang yang penilaiannya dilakukan oleh sekolah masing-masing.

"Karena ada ujian mengarang ini, sekolah bisa memanfaatkannya untuk mengontrol nilai ujian bahasa Indonesia dan bahasa Inggris," jelasnya. Hal itulah yang menyebabkan nilai bidang ujian bahasa diragukan kemurniannya.

Untuk mengatasi masalah tersebut, dalam pelaksanaan UAN tahun depan (2004), komponen nilai mengarang akan dipisahkan. Artinya, pada pencantuman nilai di surat tanda kelulusan (STK), nilai bahasa akan terdiri dari dua komponen.

"Mengarang tetap ada, tetapi struktur penilaiannya dipisah. Ini juga untuk memudahkan dalam penerimaan mahasiswa baru."

Masih terkait bidang ujian bahasa, Bahrul mengungkapkan, dalam UAN 2004, ujian bahasa Inggris SMU akan disertai uji kemampuan mendengar percakapan

berbahasa Inggris. Jenis ujian seperti ini telah diberlakukan bagi SMK dalam UAN 2003.

Pada kesempatan yang sama, Bahrul kembali menegaskan perubahan angka minimal kelulusan UAN 2004, dari 3,00 menjadi 4,00. Selain itu, pada UAN 2004 tidak ada lagi ketentuan nilai rata-rata minimal.

"Dalam UAN yang baru lalu ditetapkan nilai rata-rata minimal untuk lulus 6,0. Namun, untuk tahun depan nilai rata-rata minimal tidak lagi menjadi persyaratan kelulusan," ungkapnya.

Penghapusan ketentuan tersebut bertujuan agar sekolah tidak lagi memaksakan untuk meningkatkan nilai siswa agar mencapai nilai rata-rata minimal.

Berkaitan dengan sertifikasi, Puspendik mengusulkan agar STK dan ijazah diberikan kepada siswa yang berhasil lulus UAN saja. Bagi siswa yang tidak lulus, tidak berhak memperoleh STK maupun ijazah.

"Bila tidak ingin mengulang, siswa yang tidak lulus masih bisa menggunakan transkrip nilai dalam rapor untuk keperluan melamar pekerjaan misalnya."

Syarat jadi siswa SMU
Sementara itu, Kepala Pusat Kurikulum Depdiknas Siskandar menyatakan perlunya penegasan dalam bentuk rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang syarat untuk bisa menjadi siswa SMU. Syarat ini antara lain men-

cakup kemampuan dan potensi calon siswa SMU.

Penegasan tersebut dibutuhkan agar tidak ada lagi siswa yang menyia-nyiakan waktu menjalani pendidikan di SMU. Sebab, dengan potensi yang dimiliki, kemungkinan siswa yang bersangkutan dapat lebih mengembangkan kemampuannya di SMK atau di tempat kursus keterampilan.

"Kalau itu (penegasan dengan RPP) tidak ada, maka upaya peningkatan mutu pendidikan nasional akan semakin lama," kata Siskandar.

Dia juga menyatakan perlunya mata pelajaran pilihan yang terkait pendidikan kejuruan di SMU. Tujuannya, agar siswa yang telanjur masuk SMU tetapi tidak berminat melanjutkan ke tingkat pendidikan tinggi umum, masih dapat menyesuaikan kemampuannya.

"Untuk itu, SMU dapat bekerja sama dengan SMK dan balai-balai latihan kerja," ucapnya.

Terkait dengan usulan mata pelajaran kejuruan pilihan di SMU, Kepala Puspendik Bahrul Hayat menyarankan sebaiknya sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) hanya satu bentuk, yakni SMU. Sedangkan, kejuruan dapat menjadi salah satu jurusan di SMU, seperti halnya jurusan IPA, IPS, dan Bahasa.

Seiring dengan adanya jurusan kejuruan di SMU, Bahrul mengatakan, masyarakat juga perlu mengubah pandangan tidak benar mengenai jurusan unggulan dan jurusan tidak unggulan. (WD/B-2)

Kompetensi Penerjemah akan Diuji

JAKARTA (Media): Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) bekerja sama dengan Himpunan Penerjemah Indonesia (HPI) berencana memberlakukan kewajiban bagi para penerjemah untuk mengikuti Ujian Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI).

Kepala Pusat Bahasa Depdiknas Dendy Sugono mengatakan hal itu kepada *Media* usai membuka acara diskusi para penerjemah yang bertajuk *Kualitas terjemahan, siapa yang bertanggung jawab*, di Jakarta, akhir pekan lalu.

Dendy menyebutkan, nantinya hanya mereka yang mendapatkan nilai minimal pada tingkat semenjana (tingkat unggul atau menengah ke atas) saja yang berhak mendapatkan sertifikat penerjemah.

Rencana yang kini tengah dimatangkan oleh Pusat Bahasa dan HPI itu ditujukan untuk menjaga kualitas hasil terjemahan, seperti pada buku, teks film, dan terjemahan lainnya, agar tidak terjadi kekeliruan arti yang malah menyesatkan masyarakat. Saat ini masih sering ditemui kualitas terjemahan, terutama pada buku, yang masih kurang baik kualitasnya, sehingga dapat berdampak pada proses penyerapan ilmu pengetahuan.

Dendy mengatakan selama ini jika terjadi kesalahan dalam karya terjemahan, yang dipersalahkan adalah kemampuan bahasa asing si penerjemah. Padahal, jika ditilik lebih lanjut, bisa saja kesalahan terjadi karena justru penerjemah tidak menguasai bahasa Indonesia dengan baik dan benar.

"Standar berbahasa Indonesia yang cukup tinggi seharusnya segera diberlakukan kepada para penerjemah. Tindak lanjutnya, kalau ia (penerjemah) belum sampai dalam tahap itu (minimal semenjana) maka ia harus menjalani kursus berbahasa Indonesia terlebih dahulu," kata Dendy seraya menaruhakan akan membawa pembicaraan tersebut ke Kongres Bahasa Indonesia yang berlangsung mulai hari ini.

Dalam hal ini, HPI yang akan menentukan standar kemampuan yang harus dimiliki oleh penerjemah. Meski tidak semua penerjemah yang menjadi anggota HPI, Dendy mengatakan HPI merupakan organisasi profesi yang memiliki wewenang untuk mengembangkan kemampuan dan meningkatkan kualitas penerjemah.

Selama ini, katanya, penerjemahan berjalan secara sporadis dan tidak terhimpun. Sehingga, untuk melakukan pengendalian terhadap mutu karya terjemahan sulit dilakukan.

Karena itu, Dendy berharap agar semua penerjemah berada di bawah payung HPI. Jadi, jika memang diniatkan untuk menjadi penerjemah profesional, maka setiap penerjemah harus siap untuk melengkapi diri dengan ke-

mampuan berbahasa yang memadai, baik untuk bahasa Indonesia atau bahasa asing.

"Secara tidak langsung, diberlakukannya UKBI bagi penerjemah ini manfaatnya akan kembali kepada mereka sendiri. Selain menjaga kualitas terjemahan yang baik, siapa yang memiliki nilai yang tinggi pasti hasil karyanya banyak dicari masyarakat yang menggunakan jasanya," tambah Dendy.

Kemampuan bervariasi

Secara umum, Dendy mengatakan kemampuan penerjemah sangat bervariasi. Ada penerjemah yang dikatakannya sudah memiliki kualitas yang sangat baik, namun di sisi lain masih ada pula yang kualitasnya kurang memadai.

Ia mengatakan kalau sekadar salah bahasa, tidak terlalu mengkhawatirkan. Namun, lanjut Dendy, kalau sudah sampai pada tahap salah menerjemahkan dan merubah isi dari buku itu, maka dapat mengakibatkan kekeliruan di tengah masyarakat pembaca.

Sementara itu, guru besar bahasa dari Universitas Indonesia, Anton Moeliono, ketika dihubungi *Media*, kemarin, menilai rencana Pusat Bahasa untuk memberlakukan UKBI bagi penerjemah sebagai sesuatu yang wajar dan sudah seharusnya.

Ia mengatakan, sebagai penerjemah yang berkualitas, sebaiknya selain menguasai bahasa asing dengan baik, ia juga harus menguasai bahasa Indonesia.

"Tidak otomatis seseorang yang berkebangsaan Indonesia

lalu mampu berbahasa Indonesia dengan baik, apalagi untuk seorang penerjemah. Ia harus menguasai baik bahasa asing tertentu dan bahasa Indonesia itu sendiri," kata Anton. (TM/B-2)

Media Indonesia, 14 Oktober 2003

BAHASA INDONESIA-UNIVERSAL

Bahasa Jadi Bahasa Internasional Bukan karena Banyak Penuturnya

PADANG, KOMPAS — Ahli Bahasa Indonesia Prof Dr Anton M Moeliono (74) mengatakan, ukuran suatu bahasa bisa menjadi bahasa internasional bukan karena banyak penuturnya, melainkan kecendekiawan dan kemahiran para penutur dalam berbahasa. Bahasa Inggris bisa menjadi bahasa internasional utama juga karena penuturnya cendekia dan mahir berbahasa sehingga menjadi pelopor ilmu pengetahuan.

Sebaliknya cendekiawan Indonesia tidak mampu menulis, berpidato, dan membaca dengan baik. Karena ketakmampuan berbahasa (Indonesia/Inggris), dalam banyak hal dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Filipina, Indonesia jauh tertinggal bahkan terpinggirkan.

"Sepanjang persoalan ini masih diabaikan, mustahil bahasa Indonesia jadi bahasa regional di kawasan ASEAN atau bahasa dunia," kata Anton M Moeliono, dalam seminar peringatan bulan bahasa dan

purnakarya Prof Dr Amir Hakim Usman (70), ahli bahasa Indonesia di Universitas Negari Padang (UNP), Sabtu (4/10) di Padang. Sebelumnya, UNP Press meluncurkan buku "70 Tahun Prof Dr Arrir Hakim Usman: Pelangi Bahasa".

Berbicara di hadapan ahli bahasa dan sastra Indonesia lainnya—seperti Prof Dr M Atar Semi, Prof Rizanur Gani, Prof Dr Hasanuddin WS, Prof Dr Amir Hakim Usman, dan sekitar 200 guru dan dosen bahasa Indonesia—Anton M Moeliono menegaskan, cendekiawan Indonesia jarang menulis buku, sehingga 80-90 persen buku acuan atau literatur dalam berbagai disiplin ilmu terbit dalam bahasa asing. Yang terbit dalam bahasa Indonesia, 10-20 persen, sebagian besar juga hasil terjemahan dari bahasa asing.

Ketakhmahiran dan ketakcendekiawan orang Indonesia berbahasa Indonesia, terbukti sampai sekarang masih belum mahir membuat paragraf, belum memahami apa itu paragraf dan

hakikatnya. Padahal, dalam buku "Komposisi" karya Gorys Keraf yang terbit 1970-an, hal itu sudah dibahas dan dipelajari bertahun-tahun.

Menurut dia, salah satu sebab mengapa manusia (cendekiawan) Indonesia tidak mahir mengungkapkan pikiran, karena kosa katanya terbatas. Salah satu rumpang dalam proses belajar-mengajar adalah tidak digunakannya kamus. Bahkan, buku ajar bahasa Indonesia masih ditulis dengan bahasa Indonesia yang kosa katanya amat terbatas.

Ke depan, lanjut Anton, proses pengajaran bahasa Indonesia harus mengarah kepada kemahiran berbahasa. Bila dalam pengajaran bahasa Inggris ada *English for Academic Purpose*—cabang penting *English for Specific Purpose* (ESP)—maka dengan analogi dasar penalaran ESP, dapat direncanakan pengajaran Bahasa Indonesia untuk Tujuan Akademis (BITA) bagi mahasiswa perguruan tinggi di negeri ini. (NAL)

Kompas, 6 Oktober 2003

BAHASA INGGRIS-PENGAJARAN



Manca Negara

Taiwan

Pelajaran Bahasa Terintegrasi Lunturkan Bahasa Lokal

Apa yang diinginkan para siswa di Taiwan setelah mereka *rada* paham bahasa Inggris?

"Banyak di antara mereka yang mengekspresikan perasaannya di kertas ujian soal keahlian bahasa barunya itu, antara lain adalah ingin bisa *chatting* di internet dengan tanda baca dan cara penulisan yang benar," ujar Cheng Hsiao-lan, seorang guru sejarah di Taipei County Fuho Junior High School.

Bahasa Inggris kini menjadi pelajaran idola di Taiwan. Hal ini terjadi sejak menteri pendidikan di negara ini menetapkan Program Pendidikan Sembilan Tahun tiga tahun lalu. Salah satu mata penjabaran program itu adalah menyatukan bahasa Mandarin, Inggris, dan dialek lokal dalam satu mata pelajaran baru yang disebut *language field*.

Dalam pelajaran ini, di tingkat lanjutan, siswa tidak lagi menulis dengan huruf kanji, melainkan huruf latin. Bahasa Mandarin, dilafalkan dan ditulis dengan huruf yang dianggap lebih gampang diterima dan dipelajari itu.

Namun, sebuah survei menyatakan sekitar 80 persen guru sekolah dasar dan menengah menyatakan kebanyakan siswanya kemampuan membaca dan menulis Mandarinnya memburuk sejak program itu diberlakukan.

"Dikhawatirkan, siswa menjadi asing dengan bahasa asal mereka sendiri," ujar Chiang Chü-cun, wakil pimpinan *Mandarin Daily News* yang memimpin survei itu dalam sebuah konferensi pers.

Di satu sisi, guru boleh berbangga dengan kemampuan bahasa Inggris siswanya. Tapi di sisi lain, bahasa lokal terancam eksistensinya. "Program itu mereduksi jumlah pelajaran bahasa

Mandarin, dan hal ini menyulitkan baik bagi guru maupun siswa," tambahnya.

Harian *Mandarin Daily News* menerima laporan dari 863 guru sekolah dasar dan menengah dari 48 sekolah yang tersebar di berbagai daerah di negara itu. Khusus mengkritisi kebijakan pemerintah itu, harian iri memang sengaja membuat kolom tersendiri.

Sekitar 75 persen guru menyatakan waktu yang diberikan untuk mengajarkan pelajaran bahasa 'gaya baru' itu sangat tidak mencukupi. Sedang sekitar 71,1 persen menyatakan bahasa Mandarin tetap harus diberikan pada siswa sebagai pelajaran yang mandiri.

Program pendidikan sembilan tahun memang memangkas beberapa mata pelajaran yang dianggap 'kurang perlu'. Namun, penyatuan pelajaran bahasa Inggris-Mandarin-dialek lokal tidak dibagi dengan pembagian waktu yang pas. Dalam satu minggu, murid sekolah dasar hanya menerima pelajaran bahasa sebanyak lima sampai enam jam.

Sebelum program itu dijalankan, rata-rata sekolah menyediakan waktu sekitar 10 jam untuk khusus belajar bahasa Mandarin. Sisanya, empat sampai lima jam dibagi antara Bahasa Inggris dan dialek lokal.

"Dengan jumlah jam itu, siswa mendapatkan waktu yang cukup untuk belajar Mandarin," ujar Hung Lan, profesor di Institute of Cognitive Neuroscience, National Central University. Dengan penyingkatan waktu, siswa tetap bisa belajar Mandarin, katanya, hanya saja selama pelajaran berlangsung minus pelajaran membaca.

Pada hal, tambah Hung Lan, membaca adalah kunci penting memahami bahasa Mandarin. Ia menekankan pentingnya ekstra kullikuler membaca bahasa Mandarin untuk meningkatkan kemampuan bahasa Mandarin siswa sekolah.

dasar. "Susahnya, siswa terlanjur mempunyai tradisi belajar hanya pada saat menjelang ujian," tambahnya.

Menurut Hung, banyak guru yang menyatakan padanya, kemampuan siswa meningkat dalam memahami apa yang tertulis dalam buku. Tapi mereka salah pakai dalam menerapkan idiom dan frase. "Dan suatu saat akan timbul masalah manakala mereka kesulitan melengkapi sebuah komposisi tanpa bisa menulis kata secara benar."

Tapi memang tak selamanya pelajaran bahasa terintegrasi ini berdampak buruk pada siswa. Kebanyakan siswa, tampil lebih percaya diri dan —kadang-kadang— timbul kesan 'sok *go global* dengan bercasiscus Inggris. Ini tercermin dari apa yang ditulis mereka dalam kertas ujian, "Ingin menulis di papan *chat room* dengan benar."

Merujuk pada hasil survei, sekitar 42,06 persen guru mengaku bingung pada perubahan dalam masyarakat yang terjadi dengan cepat yang ditunjukkan de-

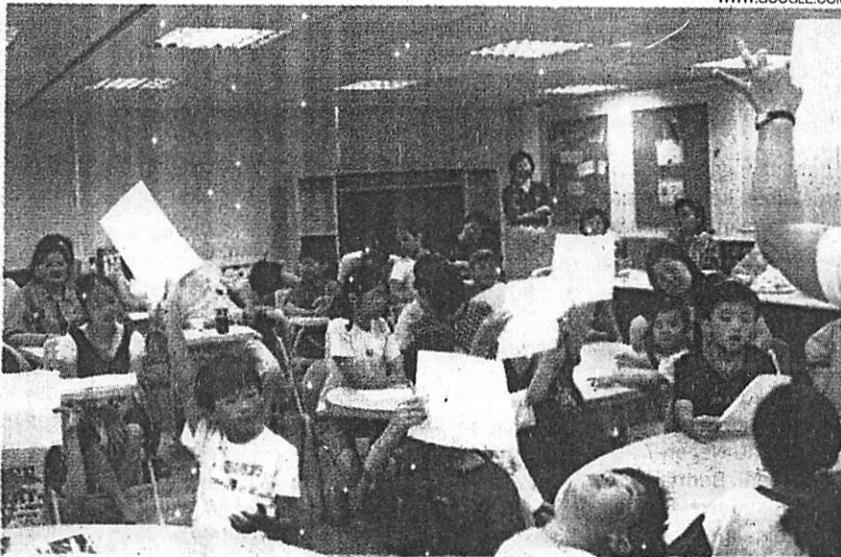
ngan kemunduran berbahasa Mandarin. Dan 40,79 persen menyatakan pendidikan yang berorientasi pada hasil ujian akhir, plesetan dari program pendidikan sembilan tahun, juga dapat diterima. Terutama hal-hal yang menyangkut pengenalan dan pemanfaatan komputer, internet, serta kepopuleran media massa.

"Minat siswa pada internet sangat tinggi," ujar Cheng lan, seorang guru.

Menurutnya, persoalan yang sedang melanda dunia pendidikan Taiwan ini nantinya lebih masuk pada agenda sosial ketimbang *policy* pendidikan.

Pernyataan Cheng senada dengan lontaran seorang guru yang dituliskan dalam lembar jawaban kuisioner survei, yang kurang lebih bunyinya begini: "Tak usah bingung-bingung membahas problem pendidikan yang menyertai program pendidikan sembilan tahun. Yang harus dipikirkan mulai hari ini adalah masyarakat kita dan perilaku orang tua yang akan berubah."

■ tri/taipeitimes



KURSUS BAHASA: Taiwan tengah bergiat mengajarkan bahasa Inggris kepada anak-anak usia sekolah. Di Taipei, kursus bahasa Inggris untuk anak-anak selalu dipadati peminat.

Kalam Republika, 17 Oktober 2003

TAJUK RENCANA

Kedaulatan Rakyat**Memberi Tanda pada Peringatan Bulan Bahasa**

BULAN Oktober, karena dalam sejarahnya pada tahun 1928 berlangsung sebuah peristiwa monumental, yakni Sumpah Pemuda 28 Oktober, maka dijadikan Bulan Bahasa. Sudah sejak beberapa tahun ini kita selalu memberi tanda pada setiap bulan Oktober sebagai Bulan Bahasa. Biasanya, berbagai kegiatan sehubungan dengan kebahasaan diselenggarakan. Seringkali ada pula lomba-lomba penggunaan bahasa, sekadar untuk mengingatkan soal kemampuan kita dalam berbahasa. Pada tingkat pusat, misalnya diselenggarakan kongres bahasa, pertemuan ilmiah, kajian kebahasaan (dan sastra).

Tentu, kita tidak akan melupakan momentum Sumpah Pemuda pada bulan Oktober ini. Sebagaimana kita tak melupakan perjuangan bangsa kita untuk merdeka, pada bulan Agustus. Kita pun mencatat hal-hal penting itu dalam sejarah. Pada bulan Oktober ini, ada yang harus diingat, yakni sumpah para pemuda yang pada tahun 1928 itu berikrar tentang bangsa satu, tanah air satu dan bahasa satu yakni Indonesia. Jadi, kita melihat bahwa Oktober 1928 merupakan tonggak penting terutama bagi bahasa Indonesia, karena ada pengakuan sebagai bahasa kesatuan dan persatuan. Pengakuan ini, barangkali menjadi sangat penting ketika dikaitkan dengan Bab XV, Pasal 36 UUD 1945, bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa negara.

Tetapi, kian hari sudah kian banyaknya kesadaran bangsa kita akan bahasanya sendiri? Pertanyaan ini sangat wajar, ketika dunia terus bergerak maju. Mungkin pertanyaan yang optimistis, karena ada kekhawatiran besar bahasa kita menjadi tergeser oleh bahasa asing. Lihatlah, sekarang ini, justru tantangan banyak dihadapi oleh bahasa Indonesia ketika anak-anak muda lebih suka belajar bahasa Inggris daripada memperdalam bahasanya sendiri. Di era globalisasi ini kedudukan bahasa Inggris semakin kuat, karena diperlukan sebagai alat ko-

munikasi antarbangsa. Bahasa Inggris diperlukan sebagai *language for wider communications*. Sedang bahasa Indonesia karena pengaruh geolinguistik belum bisa mengemban fungsi sebagai bahasa antarbangsa (*Kedaulatan Rakyat*, 7/10/2003).

Barangkali berbagai tanda untuk memperingati bahasa kita pada bulan Oktober, perlu terus-menerus dilakukan. Silakan belajar bahasa asing, asal sudah menguasai bahasa sendiri. Alangkah ironisnya, bila bahasa sendiri pun tidak menguasai, tetapi lebih penting mempelajari bahasa asing. Oleh sebab itu, kita sepakat bahwa masalah kebahasaan di Indonesia tak bisa dilepaskan dari kehidupan masyarakat pendukungnya. Pada masa sebelum kemerdekaan, kita merasakan betapa bahasa merupakan lambang identitas bangsa, alat pemeratu, dan kekuatan.

Apalagi kita menyadari, di Indonesia ini selain bahasa Indonesia juga berkembang bahasa daerah. Berbagai kelompok etnis itu memiliki bahasanya sendiri, yang pada umumnya hanya dipahami oleh kelompok etnis itu sendiri. Kelompok lain etnis akan sangat susah memahami makna bahasa tersebut, sehingga dengan kehadiran bahasa Indonesia, yang bisa berfungsi sebagai bahasa nasional, akan menciptakan kesatuan pemahaman.

Perubahan memang sudah terjadi, ini harus kita sadari, sehingga kondisi tersebut menempatkan posisi bahasa asing pada posisi strategis, yang sangat mungkin secara strategis pula memasuki berbagai sendi kehidupan bangsa Indonesia. Bicara dalam keluarga, menggunakan bahasa asing. Bukan bahasa Indonesia atau apalagi bahasa Jawa, misalnya. Papan nama, kain rentang, gedung atau nama wilayah, jangan-jangan sudah tidak lagi ditulis dengan bahasa kita sendiri. Tapi, bahasa asing?

Mungkin kita boleh berbangga hati,

ketika nama Indonesia menjadi menarik, dan bahasa Indonesia juga menjadi menarik dipelajari oleh orang asing. Kita mencatat banyak negara sudah mulai menaruh perhatian, seperti Australia, Korea, Jepang, Jerman, Inggris. Mereka banyak mengirimkan mahasiswanya untuk datang ke Indonesia, atau membuka kelas bahasa Indonesia di sana. Hanya, bahasa Indonesia memang harus berjuang keras dan panjang bila ingin menjadi bahasa internasional yang sejajar dengan bahasa Inggris. □ - c

Kedaulatan Rakyat, 9 Oktober 2003

Bahasa Belang Bonteng

Pengantar Redaksi

MENYAMBUT Bulan Bahasa, harian Kompas pada hari Senin 6 Oktober 2003 mengadakan diskusi panel bertopik "Bahasa Indonesia dalam Bahaya" yang menampilkan panelis ahli dialektologi Prof Dr Ayatrohaedi dari Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia; pengamat bahasa Prof Dr Sudjoko, pensiunan guru besar Fakultas Seni Rupa dan Desain, Institut Teknologi Bandung; guru besar sastra Prof Dr Riris K Toha br Sarumpaet dari Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI; munsi Dr Hasan Alwi dari Pusat Bahasa; dosen ekonomi Faisal Basri MA dari Fakultas Ekonomi UI; serta pengamat budaya dan ilmu pengetahuan Ir Nirwan Ahmad Arsuka. Diskusi dipandu oleh Dr Daniel Dhakidae dari Litbang Kompas dan hasilnya dituliskan oleh Salomo Simanungkalit di halaman ini dan halaman 45. Dua makalah disajikan di halaman 46 dan 47.

DISKUSI panel *Kompas* dengan topik "Bahasa Indonesia dalam Bahaya" ini sedikit berbeda dengan pertemuan ilmiah untuk bertukar pikiran mengenai bahasa yang biasa diadakan, sebab acara ini memeriksa bahasa Indonesia

dalam konteks bahasa secara keseluruhan.

Setelah memeriksa bahasa Indonesia, terlihat ada semacam nasib—jadi bukan pertarungan—bahwa bahasa Indonesia lahir dari suatu *lingua franca* yang mengalir masuk dan beredar dari macam-macam soal, dari atas sampai ke bawah. Namun, ketika menjadi suatu wacana dalam bidang bahasa, dia diangkat justru dari sesuatu yang sangat menarik pada Kongres Bahasa Indonesia yang pertama.

Di sana ada seorang pembela luar biasa yang pada waktu itu masih berumur 23 tahun. Dalam bahasa Belanda yang hebat, Mohammad Yamin membela bahasa Indonesia atau bahasa Melayu yang kira-kira terjemahannya, "Karena itu, saya yakin seyakini-yakinnya bahwa bahasa Melayu perlahan-lahan akan ditentukan sebagai bahasa pergaulan atau bahasa persatuan untuk orang-orang Indonesia. Dan kebudayaan masa depan Indonesia atau pengungkapan kebudayaan bahasa Indonesia masa depan

(Bersambung ke hal 11 kol 5-7)

K-13/10-003

Kompas, 13 Oktober 2003

Bahasa Belang Bonteng

(Sambungan dari halaman 1)

hanya bisa diperoleh dalam bahasa itu. Bahasa lain, seperti Sunda, Aceh, Bugis, Madura, Minangkabau, Roti, dan Batak, semuanya dengan cakupan terbatas. Hanya bahasa Melayu yang punya kemampuan memperluas diri cukup besar dan juga mampu mengembangkan dirinya secara lebih dari tempat lain."

Di pihak lain, ahli bahasa Prof Anton M Moeliono dalam suatu pertemuan di Padang baru-baru ini mengatakan, bahasa Indonesia miskin karena cendekiawannya miskin. Tidak ada cendekiawan Indonesia yang menulis buku seperti di Malaysia atau Singapura. Hanya 10 persen buku yang terbit dalam kategori buku orisinal. Yang 90 persen lain adalah terjemahan dengan tingkat penulisan rendah yang membikin bahasa Indonesia tidak berkembang.

Yamin dengan keyakinan yang kuat mengucapkan bahasa Melayu akan menjadi bahasa Indonesia baku, tetapi dalam perkembangannya, seperti yang dikutip Anton, pendukungnya tidak kuat. Dalam arti seperti itu, bahasa akhirnya bukan lagi sekadar bahasa atau bahasa Indonesia bukan lagi sekadar bahasa Indonesia, tetapi suatu masyarakat. Sebab, tanpa bahasa tidak ada juga masyarakat.

Apa yang terjadi kalau kita berbicara bahwa ada satu perkembangan yang luar biasa dan di dalam perkembangan itu bahasa bukan lagi bahasa, melainkan sesuatu yang masuk ke medan perjuangan tempat suatu bahasa saling bertarung dengan bahasa-bahasa lain. Yang terjadi sekarang dengan cara berbahasa orang Indonesia di koran, radio, dan televisi yang menyelundupkan kosakata Inggris ke dalam percakapan dan penulisan bahasa Indonesia,

persoalannya bukan mengembangkan bahasa, tetapi bagaimana bahasa bisa masuk di dalam medan perjuangan antar-bahasa.

Umpamanya saja, dengan satu gerak globalisasi akhirnya bahasa Indonesia bertarung dengan bahasa-bahasa lain. Bertarung bukan dalam medan bahasa, tetapi dalam modal, perdagangan, impor, ekspor, teknologi, komunikasi, komputer, surat elektronik, Internet, SMS, perbankan, novel, puisi, musik, dan lain-lain. Di sana bahasa dipertaruhkan. Apakah bahasa Indonesia mampu memenangkan pertarungan di dalam medan perjuangan itu: hegemoni bahasa asing yang masuk secara luar biasa, yaitu bahasa Inggris, sebab tentu saja tidak ada satu bahasa lain pun yang mampu memenangkan pertarungan selain bahasa Inggris.

Apakah betul bahasa Indonesia berada dalam bahaya? Dari segi kuantitatif, barangkali tidak karena suatu bahasa yang didukung sekurang-kurangnya oleh 250 juta pemakai di Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura sangat sulit diduga akan rusak atau binasa sama sekali.

Namun, mungkin serbuannya lebih secara kualitatif. Hegemoni bahasa Inggris akan masuk atau malah sudah masuk di sini dengan satu cengkeraman kuat yang membuat bahasa Indonesia yang dipakai di koran, radio, dan televisi menjadi bahasa Indo, bahasa belang bonteng, yang tidak lagi dapat dikenali. Dari sisi global bahasa Indonesia diserang oleh bahasa Inggris dan dari dalam dirasuki invasi bahasa-bahasa etnik, yang kadang-kadang mungkin memperkaya tetapi bisa merusak bahasa Indonesia.

Perusakan itu (lihat *Surat dari Iwan Jaya Azis*, halaman 45) kadang-kadang atau malah terutama disponsori surat-surat

kabar yang berlangsung hampir tanpa kendali. Perusakan atau pembodohan tidak semata-mata persoalan bahasa, tetapi jang-jangan persoalan dunia pemikiran, yaitu kita mulai berkurang dan berpikir serius tentang banyak persoalan (lihat *Sastra, Indra, dan Politik Bahasa*, halaman 45).

Penyelesaian oleh Orde Baru dengan mencari bahasa yang baik dan benar telah menciptakan bahasa teknokratik yang tidak ada hubungannya dengan kehidupan yang biasa, dan karena itu, ia menjadi bahasa murni yang irrelevant. Aktualisasinya menyentuh pengajaran bahasa di sekolah (lihat *Bahasa Indonesia di Sekolah: Teks Kosong Jiwa Kosong*, halaman 46) di mana bahasa yang dipakai untuk mendidik sama sekali tidak mendidik. Di sini anak didik bukan dijadikan subyek tetapi obyek, yang dilatih bukan keterampilan tetapi pengetahuan berbahasa yang mungkin belum waktunya diberikan kepada anak-anak seumur itu. Puluhan juta anak-anak Indonesia yang dididik dengan cara ini saban hari memikul tas berat di pundaknya, seperti tentara Amerika Serikat yang menyerbu Irak dengan tas yang tak kalah besarnya.

Semua yang dibicarakan tentang "Bahasa Indonesia dalam Bahaya" ini adalah campur baur antara kerja dan bahasa, buruh dan bahasa, institusi buruh dan institusi bahasa, dan seterusnya, yang pada dasarnya memang membangun bahasa itu dari akar-akarinya. Tanpa bahasa tidak ada masyarakat. Tanpa bahasa tidak ada teknologi. Tanpa bahasa tidak ada modal. Tanpa bahasa tidak ada sastra yang tentu saja membawa satu dimensi yang sama sekali lain: bahasa bukan lagi bahasa, tetapi suatu komunitas yang melihat dirinya sendiri.

(SALOMO SIMANUNGKALIT)

BAHASA JAWA

"Pembelajaran Bahasa Jawa Tak Membumi"

YOGYA (KR) - Pelestarian dan pengembangan bahasa Jawa tetap pada kondisinya yang memprihatinkan. Di sektor pendidikan formal, pelestarian dan pengembangan bahasa tampak pada pembelajaran bahasa Jawa di SD, SLTP dalam kurikulum muatan lokal. Namun, kualitas pembelajarannya sampai sekarang masih perlu dipertanyakan. Terbukti, tidak adanya guru bidang studi bahasa Jawa, penghargaan berbahasa Jawa masih sangat rendah, yang lebih memprihatinkan pembelajaran bahasa tidak membumi. Terjadinya kesenjangan teori dan realitas sehari-hari.

Demikian diungkapkan Dr Suharti, Ketua Penyelenggara berkait dengan Lokakarya Terbatas Bahasa Sastra dan Budaya Jawa di Ruang Sinema FBS Barat UNY, Karangmalang, Senin (3/11) mendatang. Dikatakan lokakarya memilih tema 'Strategi Pemberdayaan Bahasa, Sastra dan Budaya Jawa' dengan sejumlah pembicara Wagub DIY Paku Alam IX, Bupati Bantul Drs HM Idham Samawi, Sutrisna Wibawa MPd, Kepala Dikmenum DIY, Ketua MKKS Propinsi, guru SMA, anggota DPRD Komisi B, Kepala Dikmenum Sleman.

Menurut Suharti, pembelajaran bahasa yang tidak membumi, para penutur bahasa Jawa khususnya menjadi semakin ambigu, serta ragu berbahasa Jawa secara benar. "Bahkan ada kecenderungan, anak-anak sekarang merasa bangga dengan berbahasa

Indonesia, serta perlahan-lahan meninggalkan bahasa ibu, bahasa Jawa," ucapnya.

Diingatkan, kalau kondisi ini diteruskan, merasa malu berbahasa Jawa, padahal aslinya juga orang Jawa, generasi penutur bahasa Jawa bisa lama-lama habis. Ia memberi contoh konkret, sekarang ini semakin sulit menemukan penutur bahasa Jawa Kuna.

"Bahkan ada yang mengatakan, bahasa Jawa Kuna bahasa yang mati, kehabisan penuturnya," ujarnya. Beberapa penelitian menunjukkan, kemerosotan kedudukan, apresiasi terhadap bahasa, sastra dan budaya Jawa sudah semakin menipis.

Untuk itulah, kata Suharti, usaha-usaha untuk memperpanjang usia bahasa, sastra dan budaya Jawa terus dilakukan. Bentuk usaha itu dari mulai forum lokakarya, seminar, sampai Kongres Bahasa, dialog nasional. "Hanya saja, jangan sampai hanya berhenti sampai batas pewacanaan," katanya. Justru usaha yang paling konkret, yakni menangkap kesempatan untuk memasukkan bahasa Jawa dalam program pelestarian dan pengembangan di pendidikan formal.

Program pembelajaran bahasa Jawa, khususnya dari SD, SLTP, SMU seharusnya dirancang secara berkesinambungan, tidak terputus-putus, serta pembelajaran bahasa secara membumi, disesuaikan dengan dinamika zamannya. (Jay)-o

Kedaulatan Rakyat, 29 Oktober 2003

BUTA HURUF

714.000 Penduduk Kalbar Masih Buta Huruf

PONTIANAK, KOMPAS — Sekitar 714.000 orang atau 19,3 persen dari 3,7 juta jiwa penduduk Kalimantan Barat, sampai akhir tahun 2001 lalu masih buta huruf. Sebagian besar mereka itu tinggal di daerah pedalaman. Tingginya angka buta huruf ini menyebabkan Kalbar sulit mengejar ketertinggalan dari daerah lain karena kualitas sumber daya manusia yang masih terbatas.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar Hendri Usman mengatakan hal itu pada Semiloka Potensi Sumber Daya Manusia untuk Pembangunan Masyarakat, yang berlangsung di Pontianak, Rabu (8/10).

Hendri menjelaskan, selain tingginya tingkat buta huruf, anak-anak yang berumur 10 tahun ke atas dan tidak mampu menyelesaikan pendidikan setingkat sekolah dasar juga tinggi, yakni mencapai 35,40 persen. Sementara itu, tingkat kematian bayi di Kalbar mencapai 51 orang per 1.000 anak yang lahir. Adapun umur harapan hidup mencapai 64,33 tahun.

"Jika dibandingkan dengan daerah lain, Kalbar masih jauh ketinggalan. Karena itu, masyarakat Kalbar harus bekerja keras mengejar ketertinggalan tersebut," katanya.

Di Jakarta, misalnya, tingkat kematian bayi hanya 22 orang per 1.000 anak yang lahir hidup. Sementara umur harapan hidup penduduk Jakarta mencapai 71,9 tahun.

Kondisi ketertinggalan tersebut, lanjut Hendri, antara lain disebabkan masih banyaknya daerah-daerah terisolasi di Kalbar sehingga penduduk belum terjangkau fasilitas kesehatan dan pendidikan yang memadai. Kondisi ini diperparah lagi dengan menurunnya potensi sumber daya alam akibat eksploitasi yang berlebihan selama puluhan tahun, sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat cenderung menurun.

"Dengan kondisi masyarakat sekarang, pembangunan berkelanjutan menjadi tanda tanya. Apakah masyarakat pedesaan bisa menjadi pelaku utama pembangunan jika tidak didu-

kung peningkatan sumber daya manusia yang memadai," ucapnya.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Yayasan Swadaya Dian Khatulistiwa Pontianak bekerja sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalbar, serta Japan International Cooperation Agency (JICA), sampai tahun 2001 masih terdapat sekitar 42 persen penduduk Kalbar yang tidak memiliki ijazah, dan 20 persen di antaranya tidak pernah sekolah. Sebagian besar penduduk itu tinggal di daerah pedalaman dengan sarana transportasi yang sangat terbatas.

Penduduk pedalaman bukan hanya terbatas dalam menikmati fasilitas pendidikan, tetapi juga dalam pelayanan fasilitas kesehatan. Selain sarana kesehatannya tidak ada, penyebaran tenaga medis di Kalbar sangat tidak merata. Dari sekitar 359 dokter umum dan dokter gigi di Kalbar, misalnya, sekitar 140 orang di antaranya berada di Kota Pontianak. (FUL)

CERITA PENDEK INDONESIA-SAYEMBARA

Cerpen Pemenang Lomba Cerpen Pemuda Diterbitkan

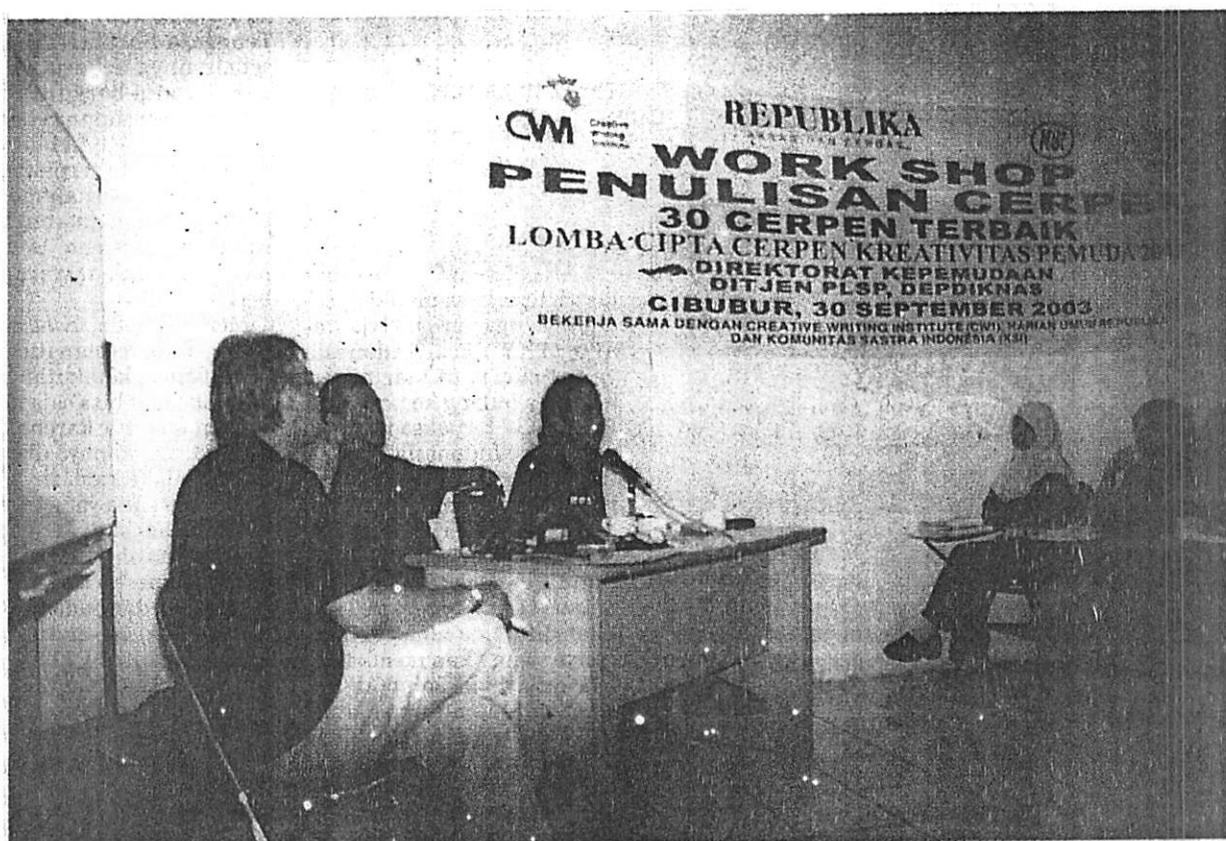
JAKARTA — Naskah para pemenang dan nomine Lomba Cipta Cerpen Festival Kreativitas Pemuda 2003, Rabu (1/10) diterbitkan. Penerbitan buku antologi tersebut merupakan kerja sama Direktorat Kepemudaan Ditjen PLSP, Depdiknas, Creative Writing Institute (CWI), dan Komunitas Sastra Indonesia (KSI). "Buku ini memuat 30 karya terbaik dalam lomba cerpen tersebut," ungkap Direktur Eksekutif CWI, Hudan Hidayat.

Cerpen *Yang Dibalut Lumut* karya Azhari terpilih sebagai juara pertama sekaligus menjadi kaver buku ini. Cerpen-cerpen lainnya, misalnya *Perempuan dan Sebatang Pohon* (Dyah Indra Mertawirana), *Jejak-jejak terhapus Hujan*

(Surono B Tjasmad), *Fragmen Sebelum Pulang* (Badui U Subhan), *Namaku Suci* (Aishah Basar), serta *Kenangan Bulan Merah* (Yeti A Ka). "Penerbitan buku ini bertujuan untuk lebih mendorong semangat berkarya para pemenang dan nomine. Juga, menggugah minat para pemuda Indonesia untuk giat menulis karya sastra," tambah Hudan.

Lomba cerpen itu dikhususkan bagi mereka yang berusia di bawah 35 tahun. Lomba berhasil mengumpulkan 526 karya 262 cerpenis dari seluruh Indonesia. Para pemenang dan nomine itu diundang untuk mengikuti *workshop* penulisan cerpen di Cibubur, Jakarta, 30 September hingga 4 Oktober 2003. ■ lka

Kalam Republika, 3 Oktober 2003



Hamsad Menenteng Pakaian Dalam

Asyiklah jadinya ketika para cerpenis dan penyair top berkumpul. Mereka mengadu kebolehan dalam membacakan cerpen dengan gaya masing-masing. Ada Hamsad Rangkuti, Sutardji Calzoum Bachri, Jenar Maesa Ayu, Hudan Hidayat, Doddy Ahmad Fawzy, Gus tf Sakai, Richard Oh dan para juara Lomba Cipta Cerpen Festival Kreativitas Pemuda 2003.

Peristiwa menarik itu terjadi di Pusat Latihan Sumber Daya Pemuda (PLSDP), Cibubur, pekan lalu. Cerpenis kawakan Hamsad Rangkuti menunjukkan kebolehannya dengan membaca cerpen *Lagu di Atas Bus*, sambil membawa seperangkat 'pakaian dalam' perempuan. Penonton sempat dibuat tertawa ketika di tengah pembacaan Hamsad mengeluarkan *bra*, celana dalam, dan pembalut yang belepotan darah, lalu mengolor-olor pita kaset. "Ke mana-mana sekarang saya membawa *property* ini," ujarnya.

Jika pada dua acara CWI sebelumnya, Sutardji membacakan cerpen Hudan, kali ini ia membaca karyanya sendiri bertajuk *Magi dari Timur*. Begitu juga Jenar, yang membaca cerpen *Lintah* karyanya, dan Richard Oh membaca cerpen berbahasa Inggrisnya,

Mantau and the Invisible Kid. Bos QB Word Book ini memang menulis cerpen dalam bahasa tersebut.

Cerpenis yang 'punya hajad' (ketua acara ini), Hudan Hidayat, tampil dengan gayanya yang khas dengan cerpen *Lantaiku Penuh Darah* karya Poniran Kalasnikov. Sedangkan Gus tf membacakan cerpen pemenang pertama lomba ini, *Yang Dibalut Lumut*, karya cerpenis Aceh, Azhari. Dan, Doddy memilih cerpen karya Hudan, *Bertengkar dengan Maut*.

Acara baca cerpen ini menjadi sajian yang menyegarkan peserta setelah sehari penuh mengikuti *work shop* dengan jadwal diskusi yang sangat padat. Apalagi, bagi cerpenis muda dari daerah, bertemu dengan para cerpenis ternama itu dan melihat mereka membaca cerpen, merupakan kesempatan langka.

Belum puas dengan acara itu, pada malam terakhir, para cerpenis muda menggelar acara spontanitas pembacaan cerpen di teras penginapan. Ada Azhari (juara I), Dyah Indra Mertawirana (juara II), Surono B Tjasmad (Zakh Syairum Majid, juara III), Ucu Agustin, Raudal Tanjung Bauna, Sihar Ramses, dan sebagian besar nomine, *nimbrung* ke acara dadakan ini. Dan, inilah kenangan lain dari *work shop*, yang tak mudah mereka lupakan. ■ ayh

Padamkan Mataku, Rilke

*Meski kau padamkan bara di mataku:
aku masih melihatmu./sumbatlah rapat teli-
ngaku: aku masih mendengarmu./tanpa ka-
ki aku masih sanggup mendatangimu./mulut
tiada aku masih dapat memanggilmu./Po-
tonglah lenganku, aku masih sanggup memeg-
angmu/dengan jantung yang tangan./henti-
kan jantungku, maka otakku akan berde-
tak./dan jika kau sulut otak itu./kau bakal
kupanggul dalam darahku.*

JAKARTA — Sajak *Padamkan Mataku* itu dibacakan penyair Agus R. Sardjono sebagai terjemahan dari sajak Rainer Maria Rilke dalam bahasa Jerman, *Lösche mir die Augen aus*, yang dibacakan pengajar sastra di Universitas Bonn, Jerman, Berthold Damshäuser. Bait-bait puisi tentang kehidupan, cinta, kematian, manusia, dan alam itu mereka baca bergantian.

Pembacaan 12 sajak Rilke itu jadi bagian utama peluncuran buku *Rilke, Padamkan Mataku* terbitan Penerbit Horison di Goethe Haus, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (30/9). Selain dihadiri Duta Besar Republik Federal Jerman, di antara 50 orang yang hadir tampak pula sastrawan Sitor Situmorang, Ramadhan K.H., dan penyair Taufiq Ismail.

Sebelum ini puisi Jerman dalam terjemahan Indonesia hanya dipublikasikan dalam bentuk antologi bersama. Yang pertama pada 1952, *Puisi Dunia* garapan M. Taslim Ali. Buku ini memuat terjemahan puisi Jerman, di antaranya beberapa puisi Rilke. Setelah itu, baru pada 1990 muncul *Malam Biru di Berlin-Antologi Dwibahasa Puisi Jerman Selama Delapan Ratus Tahun* yang disunting Berthold Damshäuser dan Ramadhan K.H.. Tetapi, buku terbitan Kedutaan Jerman ini tidak beredar di toko buku. Sebagian dari isi *Malam Biru di Berlin* tampil dalam *Kau Datang Padaku-Antologi Puisi Jerman pada Abad ke-20* terbitan Balai Pustaka, 1994.

Menurut Berthold Damshäuser, editor buku *Rilke, Padamkan Mataku*, sastra Jerman begitu kaya akan puisi yang dihasilkan para penyair kaliber dunia, misalnya Goethe, Schiller, Holderlin, Heine, Nietzsche, Brecht, dan Celan. Namun, ada kelangkaan buku puisi Jerman dalam bahasa Indonesia yang disebabkan belum banyaknya penerjemah yang berani menerbitkannya. Hal ini wajar



karena penerjemahan puisi memang sulit. Maka, Berthold gembira ketika Krista Saloh-Forster, rekannya di Universitas Bonn, bersedia menerjemahkan puisi-puisi Rilke.

Lebih jauh, Berthold menuturkan idenya tentang Seri Puisi Jerman sebagai proyek yang berkelanjutan. "Tiap-tiap jilidnya akan dihadirkan karya seseorang dari khazanah besar penyair Jerman," katanya. Buku pertama dari seri ini, ya, antologi puisi Rilke ini.

Penyair Taufiq Ismail mengenal puisi Rilke ketika usia SMA lewat terjemahan Taslim Ali dan sastrawan Chairil Anwar pada 1950-an. Kemudian dalam terjemahan bahasa Inggris pada 1970-an. Taufiq sebagai penulis puisi yang naratif atau bercerita mengaku agak sukar mengikuti puisi Rilke. "Sepintas saya lihat pemikiran Rilke sangat dalam. Beberapa puisi Rilke sangat berpengaruh," kata Taufiq. Ia mencontohkan sebuah puisi seperti pernah diterjemahkan Chairil Anwar, *Herbs* atau *Musim Gugur* yang puisinya juga ada di antologi ini.

Lebih dari itu, Taufiq menilai cetusan Rilke sangat Eropa. "Para penyair atau penulis Eropa kontemplasinya menukik. Kata-katanya sukar. Meskipun, ini tidak adil, karena saya tidak mengenal teks bahasa aslinya, se-

muanya melalui terjemahan," tuturnya.

Lalu Taufiq mencuplik fragmen elegi, *Die achte Elegie* (halaman 76-79) yang dalam terjemahan Indonesia *Elegi Kedelapan. Rasa penuh sesak. Kita menatanya. Tapi runtuh lagi./Kita menatanya kembali dan kita sendiri hancur.*

Di mata Berthold, nama Rilke sudah dikenal di Indonesia. "Rilke yang sejatinya warga negara Austria itu seorang raksasa puisi yang memberi sumbangan besar kepada perkembangan puisi Jerman serta perpuisian internasional," katanya.

Rainer Maria Rilke lahir pada 4 Desember 1875 di Praha. Ayahnya, Josef Rilke, adalah pegawai jawatan kereta api. Masa kecil dan remajanya tidaklah menggembirakan. Orangtuanya menginginkan Rene Maria, nama lahir Rilke, menempuh pendidikan militer agar mencapai kedudukan terhormat.

Tahun 1890 Rilke meninggalkan Sekolah Militer di Austria karena tak betah. Ia sempat mengenyam pendidikan di Sekolah Dagang di Linz, Austria. Di situ sajak pertamanya terbit. Kumpulan sajak pertamanya *Leben und Lieder (Kehidupan dan Nyanyian)* terbit pada 1894. Rilke sempat kuliah di Universitas Karl-Ferdinand di Praha dan mengambil jurusan filsafat dan seni. Setahun kemudian ia masuk Fakultas Filsafat di Munchen, Jerman, pada 1896.

Persahabatan erat Rilke dengan penulis Lou Andreas-Salome, putri Jenderal Rusia dengan seorang wanita Jerman yang dikenalnya di Munchen pada 1897, sangat mempengaruhi dirinya. Lou Salome, penulis biografi pertama filsuf Friedrich Nietzsche, selama 3 tahun menjadi kekasihnya.

Sajak Rilke, *Lösche mir die Augen aus*, adalah curahan hatinya yang sering diinterpretasikan sebagai ungkapan erotis meluap yang

dipersembahkan buat Lou Salome. Sajak terkenalnya, *Ich fürchte mich so (Alangkah Takutnya Aku)*, yang terdapat dalam kumpulan sajak *Mir zur Feier*, juga ditulis saat hubungan istimewa mereka.

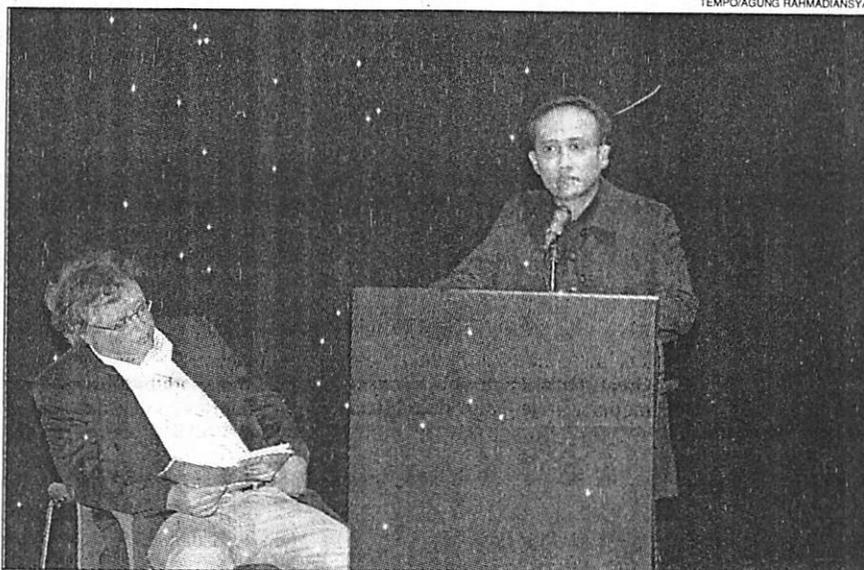
Lou Salome mengajak Rilke ke Rusia pada 1899-1900 dan mengenalkannya ke kaum intelektual seperti sastrawan kondang Leo Tolstoy. Perjalanannya itu ia tulis dalam buku *Das Buch der Bilder*. Di situ ada *Der Herbsttag (Suatu Hari di Musim Gugur)* yang termasuk sajak terindah Rilke.

Ia serapat hidup tenang di Bremen dan mengawini Clara Westhoff yang memberinya seorang putri. Lalu Rilke menuju ke Paris, Prancis. Di sana ia bergaul dengan tokoh seni seperti pematung legendaris Auguste Rodin. Dipengaruhi Rodin dan tokoh simbolisme Prancis Baudelaire, Rimbaud, dan Mallarme, Rilke mengembangkan puisi bergaya seni visual, *Ding-Gedicht* atau sajak obyek, yaitu sajak yang menggambarkan suatu obyek seperti binatang, tanaman, manusia, pemandangan melalui pengamatan teliti yang diungkapkan dalam komposisi lirik pendek, padat, dan kiasan yang memukau.

Kesukaan Rilke di bumi Prancis dituangkan dalam buku *Neue Gedichte (1907)* dan *Der Neuen Gedichte anderer Teil (1908)*. Tahun 1912 ia memulai karyanya, *Duineser Elegien*, di Italia. Karya yang terdiri 10 elegi itu diselesaikan 10 tahun kemudian. Ia tutup usia pada Desember 1926 dan dimakamkan di Swiss.

Di buku *Rilke, Padamkan Mataku* ini kita temui 32 puisi terbaik Rilke. Penyair yang pikirannya dalam, hidupnya penuh gelora dan pengembaraannya jauh tersebut memang salah satu tonggak kesusasteraan Jerman.

● dwi arjanto



Berthold Damshäuser (kiri) dan Agus R Sarjono membacakan puisi karya penyair Jerman Rainer Maria Rilke saat peluncuran buku *Padamkan Mataku*, kumpulan sajak penyair Jerman Rainer Maria Rilke dalam bahasa Indonesia di Goethe Institute, Jakarta, Selasa (30/9).

HADIAH NOBEL

Novelis JM Coetzee Meraih Nobel

JOHN Michael Coetzee (63) meraih penghargaan Nobel Kesusastran 2003. Kemenangan novelis asal Afrika Selatan itu diumumkan Kamis (2/10) di Stockholm, Swedia. Coetzee berhak atas hadiah uang senilai US\$ 1,3 juta. Pilihan tersebut sempat menuai hujan kritik. Pasalnya Coetzee dianggap penulis yang sukar dipahami, tetapi sangat terbuka dalam hal kesusastran dan politik.

Coetzee dilahirkan di Cape Town pada tahun 1940 dengan nama asli John Michael Coetzee. Tetapi kemudian dia mengubah nama tengahnya menjadi Maxwell. Meskipun demikian, Coetzee lebih suka menyingkat dua nama depan itu menjadi inisial. Coetzee juga menulis ulang karya-karya klasik seperti *Robinson Crusoe* (karya Daniel Defoe) dan *The Master of Petersburg* (karya Fyodor Dostoyevsky).

Reputasi Coetzee sebagai penulis diakui oleh kalangan sastrawan dunia. Perhatiannya pada situasi pascakolonial dan pasca-apartheid di Afrika Selatan sangat besar. Dalam banyak buku-bukunya, dia memperlihatkan pergulatan moral seperti kejahatan yang pernah dilakukan petani kulit putih.

"Saya selalu lebih tertarik pada masa lalu dibanding masa depan. Masa lalu dan jalan menuju masa lalu seperti bayangan yang menyelimuti masa kini," kata Coetzee

Coetzee mendapat pendidikan dalam bahasa Inggris

yang kental. Tetapi dia mampu menulis dengan latar belakang pengetahuan Afrika. Dalam karya-karyanya, Coetzee menggambarkan rasialisme yang pernah berkembang di Afrika. Tak jarang, dia mengkritik keras. Gaya penulisannya yang penuh kiasan disebut-sebut sebanding dengan Franz Kafka dan Samuel Beckett.

Lembaga The Swedish Academy menyebut Coetzee sebagai penulis tak kenal basa-basi. Kritik-kritiknya sangat pedas. Meskipun demikian, Coetzee membalutnya dengan rasionalitas dan moralitas dalam cara pandang Barat.

"Kabar ini benar-benar mengejutkan. Saya bahkan tidak pernah tahu pengumuman Nobel yang sempat ditunda," kata Coetzee. Dalam sebuah wawancara, dia juga menyatakan idealismenya dalam menulis. "Saya berharap bisa membuat satu atau dua orang berpikir dua kali bilamana ingin membuang seluruh masa lalu."

Sebelum menerima Nobel Kesusastran 2003, ki-

prah Coetzee sebagai novelis telah cukup diakui. Dia menjadi penulis pertama yang memenangi penghargaan Booker Prize sebanyak dua kali. Penghargaan tersebut diperolehnya pada tahun 1983 ketika menghasilkan karya *The Life and Times of Michael K*. Lalu pada tahun 1999, dia kembali mendapat penghargaan lewat karyanya yang berjudul *Disgrace*.

Sampai kini, Coetzee tinggal di Australia, tetapi menghabiskan sebagian hidupnya di Chicago, AS. Di sana, dia bekerja sebagai dosen. Selain menulis novel, Coetzee juga dikenal sebagai penulis puisi. Thomas Jones, seorang editor dari *London Review of Books*, memuji puisi-puisi Coetzee yang dianggap lebih bagus dibanding kebanyakan penulis lain yang juga menggunakan bahasa Inggris.

"Dia penulis sastra yang hebat. Tetapi karya-karyanya sangat dipengaruhi politik. Bukan hanya itu, buku-buku karya Coetzee juga sering kali lucu," puji Jones.

(Reuters.com/U-5)

Suara Pembaruan, 3 Oktober 2003

Penulis Afsel Menangkan Hadiah Nobel Sastra

STOCKHOLM (AFP): JM Coetzee, penulis asal Afrika Selatan, memenangkan hadiah Nobel sastra 2003, kemarin. Kemenangan Coetzee itu mengikuti jejak penulis senegaranya, Nadine Gordimer, yang memenangkan hadiah bergengsi tersebut 12 tahun lalu.

Dengan kemenangannya itu, Coetzee berhak membawa pulang hadiah uang 10 juta krono (US\$1.3 juta), kata juri di Akademi Swedia yang menentukan pemenang hadiah tersebut.

"Tema mendasar dalam novel-novel Coetzee melibatkan nilai-nilai dan perilaku yang dihasilkan oleh sistem apartheid Afrika Selatan, yang menurut pandangannya, bisa terjadi di mana saja," kata komisi Nobel.

Nama penulis itu mulai dikenal pada 1980 lewat novelnya, *Waiting for the Barbarians*. Tiga tahun kemudian namanya mulai diakui di dunia internasional ketika dia dianugerahi Booker Prize di Inggris untuk novelnya, *Life and Times of Michael K*.

Coetzee menjadi penulis pertama yang mendapat hadiah tersebut ketika novelnya, *Disgrace*, mendapat penghargaan serupa pada 1999.

Meskipun telah mendapat beragam penghargaan internasional, Coetzee diketahui lebih memilih hidup mengasingkan diri.

Karakteristik novel-novel Coetzee, kata para juri, adalah komposisinya yang disusun dengan sangat baik dan analisis yang sangat brilian.

Tetapi, mereka juga menyebutkan 'kejam' dalam memberikan kritik tentang rasionalisme kekejaman dan moralitas kosmetik peradaban Barat.

Selain membuat perbedaan yang tegas antara benar dan salah dalam novel-novelnya, Coetzee juga menggambarkan perbedaan itu sebagai sesuatu yang sungguh tidak berujung.

"Dengan cara mengeksplorasi kelemahan dan kekalahan itulah Coetzee menemukan cahaya ketuhanan dalam diri seseorang," kata juri.

Akademi Swedia memuji keragaman dalam tulisan Coetzee. "Tidak ada dua buku yang mengikuti resep yang sama," kata mereka.

Karya terbaru Coetzee, *Elizabeth Costello: Eight Lessons* yang diluncurkan tahun ini adalah paduan antara esai dan fiksi. Novel ini merupakan kumpulan kisah tentang seorang penulis fiksi Australia.

Penulis yang bernama lengkap John Maxwell Coetzee itu dilahirkan pada 1940 di Cape Town. Dia menghabiskan sebagian besar masa kanak-kanaknya di Cape Town dan Worcester. Coetzee menguasai bahasa Jerman dan Inggris. Pada 2002 Coetzee pindah ke Australia dan menetap secara permanen di sana. Dia kini mengajar di University of Adelaide.

Coetzee akan menerima hadiah Nobel tersebut yang akan diserahkan oleh raja Swedia, Carl XVI Gustaf, dalam sebuah perayaan resmi di Stockholm pada 10 Desember nanti. Penyerahan hadiah itu bertepatan dengan peringatan kematian Alfred Nobel, pendiri hadiah Nobel yang meninggal pada 1896. (HD/I-1)

Coetzee Raih Nobel Sastra 2003

PENULIS dari Afrika Selatan, John Maxwell Coetzee, terpilih sebagai peraih penghargaan Nobel Bidang Sastra 2003. Ia meraih penghargaan itu berkat karya tulisnya yang banyak menceritakan pengalaman hidup masyarakatnya kala di bawah sistem politik apartheid (politik diskriminasi warna kulit).

"Saya mendapat berita meraih penghargaan ini dari panitia di Stockholm pada pukul 06.00 pagi tadi," katanya, Jumat (3/9), ia mengaku sangat terkejut. "Benar-benar mengejutkan. Saya tidak pernah peduli ini akan terjadi," ujar pria berusia 63 tahun itu.

Sementara, pihak juri Nobel Sastra 2003 menilai, Coetzee dalam karya sastranya mampu memberikan tema mendasar. Novel yang ditulisnya juga memberikan nilai dan penuh makna tentang sistem apartheid di AfSel. Bahkan, tim juri menyebut, "Coetzee mampu menyajikan kritiknya secara rasional tentang riasan moral dari peradaban Barat".

Coetzee dijadwalkan menerima Nobel Sastra 2003 bersama-

an dengan pemenang Nobel untuk bidang lainnya pada 10 Desember, langsung dari Raja Swedia, Karl XVI Gustav. Ia akan menerima sertifikat dan medali emas bergambar sosok Alfred Nobel, tokoh pendiri Yayasan Nobel dan pengusaha yang hidup pada 1833-1896. Selain itu, Coetzee akan menerima hadiah uang tunai senilai 10 juta Kron Swedia atau setara 1,1 juta Euro (sekitar Rp 10,805 miliar).

Coetzee adalah sastrawan ketiga dari benua Afrika yang meraih Nobel setelah Nadine Gordimer (Afrika Selatan) tahun 1991 dan Wole Soyinka dari Negeria tahun 1986. Warga AfSel lain yang pernah menerima hadiah itu di antaranya pendeta Desmond Tutu untuk kategori Nobel Perdamaian.

JM Coetzee lahir di Afrika Selatan, 9 Februari 1940 dari keluarga guru. Ia lulus dari University of Cape Town di bidang Matematika dan Kesusasteraan Inggris pada tahun 1961, lalu pindah ke London, Inggris, untuk bekerja sebagai programmer kom-

puter. Tahun 1965, dari London Coetzee terbang ke AS dan meraih PhD bidang linguistik di University of Texas di Austin.

Tidak lama kemudian, ia pulang ke Afrika Selatan tahun 1971, lalu pergi lagi selama tiga tahun untuk mengajar di The State University of New York di Buffalo. Lalu, 1983 ia pulang lagi ke negara asalnya. Pada tahun 2002, Coetzee sempat menjadi peneliti di University of Adelaide.

Selama tinggal di AS, peristiwa kekerasan pada tahun 1960 menjadi inspirasinya untuk novel *The Vietnam Project* yang dimasukkan ke dalam buku pertamanya, *Dusklands* (1974). Tema tulisannya tentang situasi politik di AfSel membuat dia dijuluki sebagai penulis politik.

Coetzee juga dua kali meraih penghargaan penulis buku terbaik untuk karyanya berjudul *Life and Times of Michael K* (1983) dan novel *Disgrace* (1999). Profesor di bidang sastra di University of Cape Town ini juga meraih penghargaan Lannan Literary Award tahun 1998. (Yh/Ant/mir)

Warta Kota, 4 Oktober 2003

Menangkan Nobel Sastra

TETAP kalem dan cenderung menghindari publikasi. Begitulah JM Coetzee (63). Novelis Afrika Selatan tersebut terpilih sebagai pemenang Hadiah Nobel Sastra 2003. Penyelenggara Nobel, yakni The Swedish Academy mengumumkan kemenangan



JM Coetzee

KR-AP

Coetzee, Jumat WIB (3/10). Saat namanya disebut sebagai pemenang, Coetzee sedang menjadi dosen tamu di Chicago. Sehari-hari ia berdomisili di Australia. Kalau pemenang lain merasa tersanjung untuk datang ke Stockholm untuk menerima hadiah secara langsung, Coetzee tidaklah demikian. Ia lebih senang bila hadiah sebesar 10 juta kron itu dikirimkan lewat pos.

Novelis sederhana ini sangat tertutup dan sulit ditangkap jejaknya, lantaran enggan diwa-

wancarai. Ia merupakan novelis pertama yang memenangkan The Booker Prize dua kali. Penghargaan itu diraih lewat karyanya "The Life and Times of Michael K" (1983) serta "Disgrace" (1999).

Di dalam novel-novelnya, Coetzee menggunakan gaya alegoris. Ia me-

ngeritik ras kulit putih yang menindas kulit hitam Afrika Selatan. Ia muak dengan moralitas Barat yang menurut pandangannya hanya bersifat tempelan. Di dunia sastra karya-karya Coetzee sering dibandingkan dengan karya novelis Franz Kafka serta Samuel Beckett.

Berterus terang, Coetzee mengaku lebih senang berkisah tentang masa lalu daripada masa kini. Oleh para kritikus sastra, ia digolongkan sebagai novelis modern atau pasca kolonial Afrika Selatan. (AP/Pra)-z

Kedaulatan Rakyat, 4 Oktober 2003

HADIAH SASTRA

Novel "Lubang Buaya" Lebih Faktual Ketimbang Fiksi

PONDOK INDAH — Novel *Lubang Buaya, Dalam Fiksi dan Fakta* (2003) karya Saskia Wieringa diluncurkan. Inilah novel yang jauh lebih faktual ketimbang fiksi. Novel ini mengupas tentang fakta yang disembunyikan dalam fiksi yang diciptakan rezim Orde Baru. Seperti tentang tarian *Harum Bunga* yang dilakukan para Gerwani yang menyayat tubuh para jenderal pada peristiwa yang dikenal sebagai G30S tahun 1965. Selama ini hal itu coba diyakinkan sebagai kebenaran, padahal sebenarnya hanya fiksi belaka. Menurut Saskia, tarian *Harum Bunga* lebih sebagai fiksi ciptaan Soeharto. "Karena sebetulnya tidak ada," kata Saskia dalam peluncuran novelnya yang diterbitkan Metafor Publisng di toko buku QB World Book, Selasa (30/9). Saskia adalah seorang antropolog budaya yang mendapat gelar PhD dari University of Amsterdam, 1995. Saat ini, ia menjadi dosen senior di bidang women studies di Institute of Social Studies di The Hague. Tesisnya, *The Politicization of Gender Relations in Indonesia: Women's Organizations and the New Order* diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi *Penghancuran Gerakan Wanita di Indonesia* (Jakarta: Garba Budaya). Bersama Evelyn Blackwood ia menyunting *Female Destres: Same-Sex Relations and Transgender Practices Across Cultures* (New York: Columbia University Press), yang memenangkan Benedict Award tahun 1999. Dalam kata pengantarnya, Saskia mengatakan, novel ini diilhami ketika ia melakukan riset tentang sejarah pergerakan wanita Indonesia pada awal 1980-an. Saat itulah ia merasa seperti *Alice in Wonderland*. Terlalu banyak distorsi dan lapisan pemahaman. (mir)

Warta Kota, 1 Oktober 2003

KRONIK

Terpilih, Lima Unggulan KSI Award 2003

KOTA — Komunitas Sastra Indonesia (KSI) menggelar KSI Award 2003. Penghargaan tahun ini akan diberikan kepada pemenang lomba manuskrip/kumpulan puisi terbaik. Menurut Ketua Yayasan KSI Wowok Hesti Prabowo, KSI Award 2003 diikuti 206 penyair dengan 215 manuskrip/buku puisi. Sesuai persyaratan panitia, lomba ini diperuntukkan bagi kumpulan puisi terbaik sepanjang karier kepenyairan masing-masing peserta. Setelah diseleksi secara ketat, terpilih lima kumpulan puisi terbaik yang menjadi unggulan. Kelimanya adalah *Perjalanan Ziarah* (karya Heru Mugjarso, Semarang), *Di Bawah Nujun Kabut* (Indra Tjahyadi, Surabaya), *Segantang Bintang Sepasang Bulan* (Marhalim Zaini, Yogyakarta), *Syair Orang Tenggelam* (Nur Zain Hae, Jakarta), dan *Banyak Orang Bilang Aku Gila* (Rukmi Wisnu Wardhani, Jakarta). Dewan juri lomba ini adalah Ahmadun Yosi Herfanda, Bambang Widiatmoko, Diah Hadaning, Iwan Gunadi, dan Wowok Hesti Prabowo. Dari lima unggulan itu akan dipilih satu yang terbaik. Malam penganugerahan KSI Award 2003 bakal digelar di Taman Ismail Marzuki, pertengahan Oktober 2003. (yup)

Warta Kota, 1 Oktober 2003

• Kronik

Nomine KSI Award

JAKARTA — Lima penyair terpilih sebagai nomine Komunitas Sastra Indonesia (KSI) Award 2003. "Mereka terpilih di antara 206 penyair dengan 215 manuskrip/buku puisi yang ikut serta dalam KSI Award 2003," ungkap Ketua Yayasan Komunitas Sastra Indonesia (YKSI), Wowok Hesti Prabowo.

Dia menyebutkan, sesuai persyaratan panitia, lomba ini diperuntukkan bagi kumpulan puisi (manuskrip/buku) terbaik sepanjang karier kepenyairan. Lima nomine itu adalah *Perjalanan Ziarah* karya Heru Mugjarsó (Semarang), *Di Bawah Nujun Kabut* (Indra Tjahyadi, Surabaya), *Segantang Bintang Sepasang Bulan* (Marhalim Zaini, Yogya), *Syair Orang Tenggelam* karya Nur Zain Hae (Jakarta), dan *Banyak Orang Bilang Aku Gila* (Rukmi Wisnu Wardhani, Jakarta).

Dewan juri tahap pertama terdiri dari

Ahmadun Yosi Herfanda, Bambang Widiatmoko, Diah Hadaning, Iwan Gunadi, dan Hesti Prabowo. "Dewan juri tahap final akan memilih satu yang paling baik untuk menerima KSI Award 2003," tutur Wowok.

Pengahugerahan KSI Award 2003 akan diadakan di Taman Ismail Marzuki (TIM) Jakarta, pertengahan Oktober 2003, bertepatan dengan ulang tahun ke-6 KSI. "Seluruh nomine akan diundang untuk membacakan puisi-puisinya di TIM," kata Wowok.

Dia menambahkan, KSI Award 2003 merupakan penghargaan KSI yang ketiga di bidang sastra. Tahun 2001 KSI Award diberikan kepada pemenang Lomba Gipta Puisi Anti-Kekerasan. Tahun 2002 KSI Award diberikan kepada pemenang Lomba Cerita Mini.

■ Ika

Kalam Republika, 3 Oktober 2003

Menghargai Sastra dan Bahasa Indonesia Lisan

NONANG MR/REPUBLIKA

Ketiganya dinilai kreatif dan produktif.

Kreativitas yang terpuji berbuah penghargaan. Itulah yang dirasakan tiga sastrawan Indonesia : NH Dini, Dorothea Rosa Herliany, dan Oka Rusmini. Ketiga sastrawan ini mendapat penghargaan dari Pusat Bahasa atas karya mereka yang dinilai sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia.

Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Jusuf Kalla yang memberikan penghargaan kepada mereka, bersamaan dengan pelaksanaan Kongres Bahasa VIII di Jakarta, kemarin (14/10).

Ketua Bidang Informasi Kongres Bahasa VIII, Zainal Arifin, menyatakan tim juri yang terdiri atas Taufiq Ismail, Sapardi Djoko Damono, Riris Sarumpaet, Abdul Rozak Zeidan sepakat memilih ketiga sastrawan itu sebagai penerima penghargaan sastra dari Pusat Bahasa.

Abdul Rozak Zeidan, menegaskan yang menjadi kriteria penilaian adalah kreativitas, di samping pamburuan karya dan sumbangan mereka terhadap perkembangan sastra.

Terhadap NH Dini, Rozak



● NH Dini

mengatakan, sumbangan novelis ini dalam perkembangan sastra cukup besar. Bahkan, sampai sekarang mereka masih terus aktif menulis. Tentang tulisan-tulisan NH Dini, Rozak melihat bahwa NH Dini masih memiliki pengungkapan estetika yang bagus.

Tak hanya itu nilai lebih dari novelis ini. Selain daya estetika, menurut Rozak, NH Dini juga dianggap produktif. Dia mengakui, puncak sukses NH Dini, sebenarnya adalah novel *Pada Sebuah Kapal*. Meski demikian, NH Dini ternyata tak berhenti menulis dan terus mempro-

duksi karya-karya sastra baru.

Penghargaan untuk Dorothea diberikan atas puisinya yang dinilai bagus. Selain itu, tim juri melihat bahwa Dorothea mempunyai upaya membangun diri sebagai seorang penyair. "Dia tidak terkungkung sebagaimana seorang perempuan. Dorothea mempunyai keberanian mengungkapkan dengan cara beda dalam karya-karyanya," tuturnya.

Akan halnya dengan Oka Rusmini, penulis novel ini dianggap berkembang sebagai seorang penyair yang mencoba menulis dengan gaya puitik. Dalam novelnya *Tarian Bumi*, kata Rozak, ada suasana pemberontakan terhadap adat, lebih pada pergolakan seorang perempuan dalam konteks tradisi Bali. Novel itu dinilainya memiliki daya pukau cerita yang kuat. Tidak lepas dari keresahan seorang wanita yang harus keluar dari kasta.

Selain ketiga sastrawan, penghargaan juga diberikan kepada enam tokoh yang berbahasa Indonesia lisan terbaik. Keenam tokoh tersebut adalah Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono, Menkeh dan HAM Yusril Ihza Mahendra, Eep Saefulloh Fatah, Nurcholish Madjid, Pradjoto, dan Richard Gozney, Duta Besar Inggris untuk Indonesia. Nama yang disebut terakhir diberikan penghargaan sebagai tokoh asing berbahasa Indonesia terbaik.

Tampil mewakili penerima penghargaan, Susilo Bambang Yudhoyono bertanya, "Apakah tepat dan benar kami berbahasa lisan dengan baik?" Bagi kami, kata dia, tiada hari untuk terus memperbaiki dan menyem-

purnakan kemampuan bahasa Indonesia. "Karena kami yakin, universitas yang abadi adalah hidup dan kehidupan kita," ujarnya.

Karena itu, menurut dia, jalan yang paling benar adalah adalah terus belajar. Pendidikan berlangsung seumur hidup. Dia juga menganggap penghargaan ini menjadi tantangan berat. "Mudah-mudahan bahasa Indonesia kita makin baik dari hari ke hari," tuturnya.

Sementara Dubes Inggris Richard Gozney berharap ada rumusan bahasa Indonesia lagi yang menyesuaikan perkembangan zaman. Ini terjadi karena banyak bahasa lokal maupun bahasa prokem yang sudah menjadi kosa kata baru dalam bahasa Indonesia. Dicontohkan oleh Richard, kata 'Wartel' (warung telekomunikasi-Red) tidak banyak diketahui oleh orang asing di Indonesia.

Mantan mendiknas Wardiman Djayadiningrat, saat membuka kongres kemarin menilai kendala pengembangan bahasa Indonesia datang dari cara mengajarkan bahasa itu ke masyarakat daerah. Sekitar 70 persen masyarakat Indonesia masih belum mampu menggunakan



● Dorothea Rosa Herliany



● Oka Rusmini

bahasa nasional mereka dengan baik. Ini lantaran proses pendidikan bahasa di daerah-daerah masih kurang berjalan lancar. "Sebagian masyarakat kita sendiri ternyata masih menggunakan bahasa daerah," ujarnya.

Padahal bahasa Indonesia ini, katanya, sudah banyak menyebar di 40 negara. Negara-negara tersebut memajukan bahasa Indonesia menjadi salah satu mata ajaran di beberapa lembaga pendidikan. "Ini menunjukkan perhatian masyarakat internasional terhadap bahasa Indonesia cukup besar," kata Wardiman. ■ bur/cho

Akhirnya Dini Menerima SEA Write Awards

DUA kali sebelumnya, Nh Dini (67) menolak menerima penghargaan SEA Write Awards. Penghargaan itu diberikan Pemerintah Thailand kepada pengarang-pengarang di Asia Tenggara dan diserahkan oleh Ratu Sirikit di Bangkok.

Kali ini Dini tidak menolak. Ia berangkat ke Bangkok, Jumat (10/10) pekan lalu, untuk menerima penghargaan itu. Ia juga akan menghadiri pertemuan pengarang di Negeri Gajah Putih itu, membacakan cerita pendek dan tentu saja berpidato.

Tahun ini pula Nh Dini menerima penghargaan sastra terbaik dari Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Ia menerima piagam dan hadiah uang sejumlah lima juta rupiah. "Dipotong pajak Rp 750 ribu, yang sebetulnya jumlah itu cukup untuk hidup saya dua minggu," kata Dini, tertawa, dalam percakapan beberapa saat sebelum keberangkatannya ke Bangkok.

"Kalau saya menolak (menerima SEA Write Awards, Red) sebelumnya, itu karena kesannya seperti 'arisan' saja. Bukan betul-betul kompetisi. Pusat Bahasa, sebagai organisasinya di sini, akan bertanya-tanya siapa yang belum berangkat (ke sana)," kata Dini lagi.

Ia punya alasan untuk mengemukakan keberatannya itu. Ia mulai menerbitkan karyanya pada 1956. Novel pertamanya diterbitkan pada 1972, *Pada Sebuah Kapal*. Tiga tahun kemudian ia menerbitkan *La Barka*. Novelnya yang lain, *Namaku Hiroko*, diterbitkan pada 1977. Novel-novelnya terus bermunculan, dalam selang se-

tahun atau dua tahun. Novel terakhirnya, terbit tahun ini, *Dari Parangakik ke Kampuchea*.

Dini, yang lama tinggal di luar negeri, melihat ketidadaan penilaian itu sejak menetap kembali di Indonesia pada 1985. Hal itu yang menyebabkan ia menolak ketika dihubungi pertama kali oleh Pusat Bahasa untuk berangkat ke Bangkok pada 1987. Apalagi ia melihat, beberapa penerima penghargaan itu sebelumnya adalah pengarang dari generasi di bawahnya, yang baru mengeluarkan karya dalam hitungan jari. "Bahkan di antara yang berangkat untuk menerima penghargaan itu ada pengarang sastra pop," ujarnya.

Dini menegaskan, bukannya ia merendahkan sastra pop. Ia lebih mempermasalahkan proses dan kriteria penilaiannya. "Ini masalah prinsip dan harga diri," ia menambahkan.

Ia mencontohkan lembaga pemberi Hadiah Nobel untuk Sastra di Swedia, juga lembaga sastra di Prancis yang setiap tahun memberikan penghargaan sastra. "Harus ada wadah, yang setiap tahun menampung karya-karya pengarang, membaca dan meneliti karya-karya pengarang," ujarnya.

Kalaupun ia tidak menolak pada tawaran ketiga kali ini, penyebab utamanya adalah dorongan dari budayawan Ramadhan KH, yang dianggapnya kakak sendiri. "Ramadhan 'memerintahkan' saya untuk berangkat. Bukan lagi tawaran, tetapi perintah. Saya berangkat karena Ramadhan," kata Dini.

Faktor lain, ia merasa

sudah mapan dan tenang dengan menetap di Graha Wredha Mulya, Mlati, Sleman, Yogyakarta. Dini pindah dari Semarang 16 Desember lalu, kota yang ditinggalkannya sejak kembali ke Indonesia. Kanjeng Ratu Hemas, istri Sultan Hamengku Buwono X, yang mengetahui kepindahannya, memintanya membawa serta perpustakaan. Selama di Semarang, Dini mengelola Pondok Baca Nh Dini, taman bacaan terutama untuk anak-anak.

Dari Bangkok, Dini akan memenuhi undangan beberapa lembaga sastra di Jepang. Ia akan bertemu pemerhati sastra dan budaya Indonesia di Tokyo, Osaka, dan Kyoto, serta berceramah di Nagoya.

Parasit

Dari pernikahannya dengan Yves Coffin, diplomat Prancis, Dini yang bernama lengkap Nurhayati Srihadini, dikaruniai dua anak, Marie-Claire Lintang (42) dan Pierre Louis Padang (36). "Hanya setengah saja saya memiliki mereka, karena mereka hidup di luar," Dini tertawa.

Anak sulungnya yang kini menetap di Kanada memberrinya dua cucu. Dini kembali ke Indonesia setelah bercerai dengan suaminya pada 1984.

Dini, kelahiran Semarang, 11 Maret 1936, setelah menyelesaikan SMA bagian sastra di kota kelahirannya itu, menjalani kursus *ground-stewardess-reserved flight* pada Garuda Indonesian Airways pada 1956. Ia masih tampak energik. Semangatnya masih menggebu-gebu jika berbicara tentang dunia sastra, membungkus keringkihan jasmaninya.

Berkarya hampir 60 ta-

hun sebagai pengarang, baru sekitar dua tahun ini ia menerima royalti dari honorarium yang bisa menutupi biaya hidupnya sehari-hari. "Tidak termasuk biaya kesehatan," ia menegaskan.

Sebelum menerima royalti, ia mengibaratkan hidup bagai parasit. "Untuk makan saja masih jadi parasit. Sekarang, sesudah menerima royalti, saya masih harus jadi parasit jika sakit," ia menambahkan.

Dini menceritakan keterpaksaannya bergantung pada orang lain. Ia menerima uluran tangan Gubernur Jawa Tengah Mardiyanto, yang menutupi semua biaya rumah sakit ketika tergolesk diserang hepatitis-B. Dengan penuh rasa syukur ia menceritakan betapa ia terpaksa menerima uluran tangan banyak orang, termasuk guru-guru sekolah dasar, yang menyumbang ketika ia harus menjalani operasi untuk mengambil batu di empedunya. "Dewan Kesenian Jawa Tengah mengorganisir dompet kesehatan

Nh Dini. Rupanya itu mengemukakan hati banyak orang. Di situ saya sadar, banyak orang yang *ngopeni* saya," Dini mengenang.

Kini, satu-satunya keluhan kesehatannya adalah penyempitan pembuluh darah di leher bagian kanan, yang membuatnya menderita vertigo. Ia menjalani pengobatan pijat dan tusuk jarum. Berkali-kali didera sakit pun membuatnya berhati-hati menjaga kesehatan.

Tak mengherankan, Dini benar-benar merindukan suatu lembaga kesenian yang memikirkan kehidupan seniman, terutama yang memasuki usia senja. Suatu lembaga kesenian, yang menurutnya, bisa memberi pensiun kepada seniman, yang tidak lagi mampu berkarya.

Di sela-sela kesibukannya berkarya, Dini masih menyimpan kepedulian yang sangat mendalam untuk meningkatkan minat baca anak-anak dan remaja. Anak-anak muda sekarang, katanya, jangan hanya keluyuran, tetapi

perlu rajin mengunjungi perpustakaan. "Satu minggu, cobalah satu kali ke perpustakaan," ia berpesan.

Membaca, yang terlihat pasif, sebetulnya aktif. Membaca berarti memasukkan data ke komputer otak. Otak adalah komputer anugerah Tuhan, yang lebih canggih daripada komputer buatan manusia. Apa yang dimasukkan ke dalam komputer anugerah Tuhan, akan lain hasilnya jika dikeluarkan, karena ada tambahan hasil perenungan, yang sangat bergantung pada pendidikan dan gizi.

"Saya senang kalau ada anak muda yang ingin menjadi pengarang. Jangan hanya menjadi dokter atau pedagang," Dini menambahkan. Satu hal penting yang ia pesankan, menjadi pengarang, ataupun menjadi wartawan, harus giat membaca. Dengan membaca, merenung, dan melakukan observasi, akan memperkaya kosa kata.

PEMBARUAN/SOTYATI

HADIAH SASTRA

KHATULISTIWA LITERARY AWARDS 2003

Setelah 43 Tahun Hamsad Berkarya

Hadiah Rp 70 juta
yang diraihinya akan
dipakainya untuk
membeli angkutan
kota.

JAKARTA — Entah punya firasat menang atau tidak, Hamsad Rangkuti sudah menyiapkan pidato kemenangan saat menghadiri pengumuman Khatulistiwa Literary Awards 2003 di Plaza Senayan Jakarta, Jumat (17/10) malam. Kumpulan cerpennya, *Bibir dalam Pispot*, yang diterbitkan *Kompas* memang dinyatakan masuk lima besar. Artinya peluang menggondol hadiah Khatulistiwa itu sama besar dengan empat calon lainnya.

Rupanya naskah pidato berjudul "Pengarang dan Akarnya" itu tak sia-sia ia selipkan di kantong bajunya. Begitu namanya diumumkan sebagai pemenang, Hamsad bangkit menuju panggung. Segulung kertas ia buka untuk kemudian dibaca. "Ini namanya sedia payung sebelum hujan," katanya. Cerpenis kelahiran Tikuning, Medan, 7 Mei 1943, ini mengaku tak mendapat bocoran siapa yang bakal menggondol anugerah sastra bergengsi itu.

Hamsad layak bangga. Bukan karena hadiah uang tunai sebesar Rp 70 juta menjadi miliknya. Ia beroleh bonus plesir ke Inggris untuk bertemu dengan para penulis sastra guna bertukar pikiran. Jika tak ada aral, pemenang anugerah ini diberi kesempatan belajar singkat di salah sa-

tu perguruan tinggi. Dan, The British Council akan menerjemahkan karya pemenang ke dalam bahasa Inggris untuk diterbitkan oleh salah satu penerbit Inggris.

Anugerah fiksi Indonesia terbaik versi Khatulistiwa yang diperoleh Hamsad tahun ini juga obat penawar lara setelah ia gagal menggondolnya pada 2001. Saat itu kumpulan cerpennya, *Sampah Bulan Desember*, cuma lolos hingga lima besar dan pemenangnya diraih Goenawan Mohamad lewat buku *Sajak-sajak Lengkap 1961-2001* yang diterbitkan Metafor.

Dalam ajang tahunan ini karya Hamsad menyisihkan *Telepon Genggam* karya Joko Pinurbo, *Ada Berita Apa Hari Ini, Den Sastro?* karya Sapardi Djoko Damono, *Cala Ibi karya Nuhila Amal*, dan *Lalu Batu* karya Radhar Panca Dahana. Untuk sampai pada fase puncak ini memang tak mudah. Seluruh karya fiksi yang terbit sejak pertengahan 2002 diseleksi oleh 35 juri. Mereka terdiri dari sastrawan, penyair, penulis, kritikus sastra, dan sebagainya.

Hasil penjurian tahap pertama tadi untuk menentukan 10 judul karya fiksi terbaik. Karya itu terdiri dari kumpulan cerpen, puisi, atau novel. Sepuluh karya terpilih diberi penilaian dengan bobot 1-10. Hanya saja 13 orang juri tidak mengembalikan berkas penjurian. Walhasil, penjurian tahap pertama ini hanya dilakukan oleh 22 juri. "Kita tidak tahu kenapa berkas penjurian belum dikembalikan sampai batas akhir," kata Ayu Utami, koordinator de-

wan juri.

Sepuluh karya terpilih diseleksi kembali oleh lima juri yang terdiri dari Asvi Marwan Adam, Donny Gahril Ardian, Ibnu Wahyudi, Manneke Budiman, dan Yusi Aviarto Pareanom. Seleksi tahap kedua ini untuk memilih lima karya terbaik. Hasilnya akan disertakan dalam tahap ketiga untuk mendapatkan pemenang. Pada tahap ketiga ini dewan juri terdiri dari Eka Budianta, Endo Senggono, Frans M. Parera, Even S.P. Wardhana, dan Yanusa Nugroho. Bobot penjurian memakai skala nilai 1-10.

Dewan juri berbeda dengan latar belakang berbeda ini untuk memberikan penilaian berdasarkan kepakaran masing-masing. Proses itu diharapkan memberikan hasil terbaik, bukan hanya dari satu sisi, tapi dari berbagai disiplin ilmu, terutama yang terkait dengan dunia sastra. Penjurian tahap ketiga yang berlangsung pada 1-31 September 2003 itu akhirnya memilih *Bibir dalam Pispot* sebagai yang terbaik. "Penilaian tadi memang murni bersandar pada karya saja," kata Richard Oh, penggagas Khatulistiwa Literary Award.

Bagi sebagian orang kemenangan Hamsad mungkin tak mengejutkan. Pasalnya, suami Hj. Nurwindasari ini tergolong penulis senior yang masih aktif. Karyanya selalu menyuarakan aspirasi masyarakat tanpa terjelek kecengengan. Ia juga tak gemar menggunakan idiom umum sehingga mampu memberikan sesuatu yang berbeda pada pembaca karyanya, termasuk saat bicara cinta yang sering membuat

orang menjadi cengeng.

Sebagian besar karya Hamsad berangkat dari realitas kehidupan yang melintas di depannya. Tema biasa itu bisa berubah menjadi hal luar biasa setelah melewati polesan tangannya. "Hamsad cukup kreatif menggunakan istilah," kata Ayu. Jangan heran jika karya Hamsad sering membuat pembaca terkejut, tergugah perasaannya, atau tersenyum meski yang dinikmati sebuah drama antara hidup dan mati.

Salah satu karyanya yang cukup menarik adalah cerpen *Maukah Kau Menghapus Bekas Bibirnya di Bibirku dengan Bibirmu?* Cerpen ini diilhami pertemuan Hamsad dengan seorang gadis yang ingin bunuh diri dengan cara menceburkan diri ke laut dari sebuah kapal. Mau tak mau Hamsad berusaha mengubah pendirian si gadis. "Karya saya selalu berangkat dari kenyataan hidup di sekitar saya,"

katanya. Judul cerpen ini bukan cuma menjadi sesuatu yang baru, tapi sempat diangkat ke panggung teater.

Tema yang diangkat dalam cerpen tadi sebenarnya biasa saja. Artinya tak mengejutkan karena mudah ditemukan dalam keseharian manusia normal. Hanya, cara Hamsad meramunya yang berbeda sehingga karya kreatif selalu lahir dari tangannya, termasuk puluhan cerpen yang dibukukan dalam buku *Bibir dalam Pispot* itu. Cerita dalam buku ini seperti menyuarakan drama manusia. Begitu hidup, realis, akrab, mudah dicerna, dan metafora yang sering mengejutkan.

Sosok bekas pemimpin redaksi majalah sastra *Horison* ini merupakan salah satu penutur terbaik yang dimiliki negeri ini. Perubahan zaman tak banyak mengubah sosoknya. Perubahan gaya hidup manusia justru menjadi amunisinya untuk berkarya. Berbagai penghargaan pernah mam-

pir ke pundak ayah empat orang anak yang beranjak dewasa ini. Tahun 1992 ia menjadi juara pertama sayembara mengarang bacaan anak-anak dan remaja lewat novel *Kereta Pagi Jam 5*. Novel *Ketika Lampu Berwarna Merah* dinobatkan sebagai pemenang sayembara penulisan roman yang diadakan Dewan Kesenian Jakarta pada 1981.

Dari sekian anugerah yang pernah diterimanya, mungkin Khatulistiwa Literary Award yang berbeda. Pahalanya, hadiah uang tunai sebesar Rp 70 juta baru pertama kali ia terima sepanjang 43 tahun karier menulisnya. Uang sebesar itu tak membuat Hamsad hendak mengubah gaya hidup. Tak ada yang mengira jika hadiah tadi, "Akan saya belikan mobil angkutan kota agar anak saya bisa bekerja," katanya. Istrinya yang terus mendampingi malam itu hanya menganggukkan kepala.

● arif firmansyah



Hamsad Ranguti (kedua dari kanan) saat menerima Khatulistiwa Literary Award.

ISTILAH DAN UNGKAPAN

GLOSARIUM EKBIS 'KR'

- **Lessee's Incremental Borrowing Rate** = Tingkat pada permulaan lease yang dikenakan kepada lesse untuk meminjam dana yang di-lease-kan.

- **Leveraged Lease** = Suatu direct financing lease, yakni kreditor jangka panjang memberikan uang muka dana kepada lessor untuk tujuan membeli aktiva untuk lease. Leverage lease dapat menyediakan lessor dengan keuntungan pajak yang signifikan.

Kedaulatan Rakyat, 29 Oktober 2003

KOSA KATA

getol: bersemangat

wacana: yang jadi pembicaraan

Contoh: Dan, barangkali yang paling *getol* mengangkat *wacana* paket capres-cawapres nasional ... (dalam artikel Chusnan Maghribi, halaman 11) (KR)

Kedaulatan Rakyat, 29 Oktober 2003

GLOSARIUM EKBIS 'KR'

- **Loss Absorbtion** = Pengurangan dalam akun/ prakiraan modal sehubungan dengan reduksi dalam akun aktiva

- **Loss Contingency** = Kondisi yang ada atau sekumpulan keadaan yang mencakup ketidakpastian mengenai kemungkinan terjadinya kerugian.

Kedaulatan Rakyat, 30 Oktober 2003

GLOSARIUM EKBIS 'KR'

- **Interest Rate Swap** = Swap atas suku bunga, yaitu usaha mengurangi tekanan pengaruh fluktuasi bunga akibat dimilikinya struktur pendanaan yang menggunakan cara yang berbeda. Pertukaran terhadap suku bunga suatu pinjaman guna mengurangi tekanan pengaruh fluktuasi bunga yang berbeda antara dua atau lebih mata uang, akibat dimilikinya struktur pendanaan yang menggunakan cara pengenaan bunga yang berbeda. Istilah lainnya, adalah swap suku bunga.

Kedaulatan Rakyat, 2 Oktober 2003

GLOSARIUM EKBIS 'KR'

- **Interpolate** = Mendapatkan nilai khusus yang tidak diketahui yang terletak pada dua nilai tabel tertentu.
 - **Intrinsic Value** = Keuntungan yang akan direalisasi dengan pelaksanaan suatu opsi daripada membeli atau menjual sekuritas atau komoditas di pasar luas.

Kedaulatan Rakyat, 4 Oktober 2003

KOSA KATA

momentum: saat yang tepat
paseduluran: kekeluargaan (dari bahasa Jawa)
 Contoh: *Momentum* inilah yang mungkin dapat kita wujudkan dan kita bingkai dalam rasa *paseduluran* wong Yogya (dalam artikel Herry Zudianto, halaman 11) (KR)-k

Kedaulatan Rakyat, 7 Oktober 2003

• K O S A K A T A

debat: pembahasan dan pertukaran pendapat tentang sesuatu hal
visi: wawasan atau pandangan ke depan

Contoh: Dalam suatu *debat* publik tentang *visi* partai politik (parpol) di bidang lingkungan, beberapa waktu lalu ... (dalam artikel Nur Achmad Affandi, halaman 11)

(KR)-d

Kedaulatan Rakyat, 3 Oktober 2003

GLOSARIUM EKBIS 'KR'

- **Lease** = Suatu kontrak yang mensyaratkan lesse membayar kepada lessor untuk penggunaan suatu aktiva tertentu dengan imbalan untuk pembayaran kas yang ditetapkan.

- **Lease Term** = Durasi dari lesse yang mungkin dalam suatu periode yang singkat sampai umur ekonomis penuh dari kekayaan yang di-lease-kan.

Kedaulatan Rakyat, 18 Oktober 2003

GLOSARIUM EKBIS 'KR'

- **Internal Auditor** = Auditor yang bekerja dalam organisasi klien untuk melakukan jasa pemantauan tertentu untuk manajemen.

- **Indirect Holdings** = Pemilikan saham yakni kepentingan pengendali dari perusahaan induk dalam anak perusahaan memungkinkannya mengendalikan anak perusahaan yang kedua walau pun perusahaan induk memiliki sedikit atau tidak memiliki saham anak perusahaan.

Kedaulatan Rakyat, 8 Oktober 2003

KOSA KATA

paranormal: orang yang mempunyai kemampuan dalam memahami hal-hal yang tak bisa dijelaskan secara ilmiah
supranatural: di atas natural, di atas hal yang bersifat alamiah
 Contoh: Seorang tokoh *paranormal* yang dianggap memahami fenomena dunia *supranatural*, dengan antusias memberikan penjelasan (dalam artikel Budi Sayoga, halaman 11) (KR)

Kedaulatan Rakyat, 9 Oktober 2003

GLOSARIUM EKBIS 'KR'

Investing Activities = Arus kas yang mencakup meminjamkan dan menagih pinjaman, dan memperoleh atau melepaskan investasi dan aktiva jangka panjang yang produktif.

- **Irrevocable L/C** = L/C yang tidak dapat diubah atau dibatalkan secara sepihak tanpa persetujuan terlebih dahulu dari semua pihak yang bersangkutan.

Kedaulatan Rakyat, 9 Oktober 2003

GLOSARIUM EKBIS 'KR'

- **Investment by Owners** = Peningkatan dalam ekuitas dari usaha tertentu yang berasal dari pemindahan dan ekuitas lain sesuatu yang bernilai untuk meningkatkan kepentingan kepemilikan dalam usaha tersebut. Aktiva paling umum diterima sebagai investasi oleh pemilik, akan tetapi jasa atau keputusan atau konvensi dari utang usaha juga merefleksikan investasi oleh pemilik.

- **Associated Company** = Gabungan atau persekuran antara beberapa perusahaan.

Kedaulatan Rakyat, 11 Oktober 2003

GLOSARIUM EKBIS 'KR'

- **Carrying Over Day** = Suatu istilah dalam bursa saham yang menunjukkan hari pertama penyelesaian dua bulanan.
- **Carrying Value** = Nilai yang melekat. Disebut juga Book Value atau nilai buku. □-o

Kedaulatan Rakyat, 13 Oktober 2003

KOSA KATA

- perspektif**: sudut pandang atau pandangan
makro: besar atau panjang
 Contoh: Puasa Ramadan dalam *Perspektif Makro* Ekonomi
 (judul artikel Nur Widiastuti, halaman 11) (KR)-x

Kedaulatan Rakyat, 23 Oktober 2003

GLOSARIUM EKBIS 'KR'

- **Pension Benefit Formula** = Dasar untuk menentukan pembayaran yang karyawan berhak menerimanya selama pensiun.
- **Performance Bonds** = Surat jaminan pelaksanaan suatu pekerjaan.

Kedaulatan Rakyat, 25 Oktober 2003

Istilah-istilah Khusus

Jika bertandang ke *sushi bar*, ada beberapa istilah yang seringkali muncul dari juru masak maupun karyawan. Alangkah baiknya kalau Anda memahami ungkapan tersebut, misalnya kecap asin sering disebut *murasaki* (ungu) di samping sebutan normalnya, *shoyu*. Sebutan ini muncul karena restoran *sushi* umumnya memiliki saus khusus.

Kemudian jika meminta teh setelah makan, mintalah *agari* (selesai) di samping minuman standar *ocha*. Wasabi pun biasanya dipendekkan saja menjadi *sabi*. Ada juga yang lebih pedas, namanya *namida* (air mata). Nah, selain istilah itu, coba ingat-ingat beberapa pembendaharaan kata berikut ini.

Teh hijau

Jenis teh ini merupakan minuman nasional di Jepang dan dalam bahasa Jepang biasa disebut *ocha*. Yang membuat teh menjadi hijau adalah pemrosesannya. Ketika dipetik, daun teh langsung dikukus hingga tak berubah warna menjadi hitam dan hasilnya adalah teh hijau.

Sake

Sake merupakan nama umum untuk minuman beralkohol di Jepang. Merupakan campuran air dan beras berkualitas tinggi. Tentunya dengan pengolahan khusus berupa fermentasi beras dengan diberi *aspergillus oryzae*. Dibutuhkan waktu 45-60 hari untuk membuatnya. Tahan hingga tiga minggu jika telah dikemas dalam botol.

Sushi tekan

Salah satu jenis sushi adalah *oshi-zushi* yang diterjemahkan menjadi *sushi* yang ditekan. Kalimat itu menggambarkan cara pembuatannya. Mula-mula nasi ditekan lalu diselubungi dengan ikan yang telah direbus atau diasinkan. Kemudian dipotong-potong kecil. Jenis ini ada di Osaka.

Sushi berbentuk tangan

Ada jenis yang disebut *nigiri-zushi*, yang kalau diterjemahkan menjadi *sushi* berbentuk tangan. Ini karena seperti ada jari-jari dari nasi yang dipenuhi ikan segar di bagian atas *sushi*.

Membersihkan lidah

Ada potongan jahe yang diberi cuka atau *gari* yang selalu disuguhkan. Fungsinya untuk membersihkan lidah ketika Anda akan mencoba jenis *sushi* yang lain.

Kacang-kacangan

Begitu duduk di *sushi bar*, Anda akan disuguhi sejenis kacang yang menjadi makanan pembuka. Kacang itu bisa dikategorikan sejenis kacang kedelai yang disajikan dengan kulitnya. Pengolahannya hanya direbus sebentar dan diberi garam.

Tangan atau sumpit?

Orang kerap bingung saat makan *sushi* lebih tepat dengan tangan atau sumpit. Tak ada salahnya menggunakan tangan jika sulit memakai sumpit. Tapi, jika hendak me-

nawarkan kepada yang lain, gunakanlah sumpit.

Si hijau yang pedas

Hati-hati dengan sajian hijau yang ada di meja Anda yang biasanya berdampingan dengan *sushi*. Itulah *wasabi* yang rasanya pedas. Banyak yang terkecoh dengannya. *Wasabi* salah satu rempah-rempah yang paling keras dalam pola memasak Jepang. Ini sejenis tanaman gunung. Tumbuh secara alami di udara dingin. Yang diambil adalah bagian akarnya. Kala melahap *sushi*, *wasabi* yang telah dihaluskan itu dicampur dengan kecap sebagai penambah rasa.

Satu gigitan

Lazimnya, satu potong *sushi* masuk mulut sekaligus alias hanya dengan satu gigitan. ● rita

KEBUDAYAAN

Orang Malagasy dan Kebudayaanannya

BANGSA Malagasy yang mendiami Pulau Madagaskar sekarang ini adalah percampuran bangsa Asia-Afrika. Diduga mereka telah ada di Madagaskar sekitar 1.500 atau 2.000 tahun meskipun dari artefak batu yang ditemukan menunjukkan adanya kemungkinan budaya lain yang pernah hidup.

HAMPIR sebagian besar imigran merupakan bangsa Melayu-Polinesia yang telah mengarungi Lautan Hindia dari Indonesia dan Asia Tenggara. Sebagian imigran yang lain adalah dari Afrika, serta para pedagang Arab, India, dan Portugis. Meskipun demikian, tampak sekali bahwa imigran yang pertama berasal dari Asia Tenggara atau Indonesia.

Suku bangsa

Berdasarkan data-data etnografis, di Madagaskar ada 18 suku, yaitu Antaifasy (orang pasir) yang tinggal di bagian tenggara di sekitar Farafangana; Antaimoro (orang pantai) yang tinggal di bagian tenggara sekitar Vohipeno dan Manakara. Mereka umumnya mendapat pengaruh budaya Arab. Antaisaka, Antankarana (yang tinggal di daerah berbatu karang), Antambahoaka (suku yang paling kecil jumlahnya yang tinggal di pantai sebelah tenggara; Antrandroy tinggal di daerah selatan sekitar Ambovombe. Warna kulit hitam dan kehidupannya semi nomadik.

Suku lainnya adalah Antanosy atau orang pulau yang tinggal di pulau kecil di sungai Fanjahira; suku Bara di daerah bagian barat daya dekat Toliara. Mereka adalah penggembala sapi. Nama "Bara" diperkirakan

berasal dari pengaruh bahasa Bantu (Afrika). Suku Betsileo yang berdiam di sebelah selatan "the Hauts Plateaux" sekitar Fianarantsoa. Suku-suku lainnya adalah Betsimisaraka, Bezanozano, Mahafaly, Sakalava, Sihanaka (orang rawa); Tanala (orang yang tinggal di hutan); Mako, Merina (orang dataran tinggi); Tsimihety (orang yang tidak memotong rambutnya). Selain itu masih ada kelompok suku lainnya yang datang dari India, Cina, dan Timur Tengah.

Adat istiadat

Bangsa Malagasy memiliki berbagai adat dan upacara ritual yang terkadang berbeda di masing-masing suku. Mereka memiliki kepercayaan menghormati pohon besar karena dianggap sebagai tempat tinggal arwah. Sesajian akan ditempatkan di bawah pohon. Suku Antaisaka yang tinggal di pantai tenggara memiliki kepercayaan bahwa rumah mereka mempunyai pintu kedua khusus untuk arwah nenek moyang. Apabila ada sanak saudara meninggal dunia, si mati akan dibiarkan beberapa hari sebelum dikubur.

"Famadihana"

Famadihana (yang berarti mengembalikan si mati) adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan mereka. Upacara tersebut dalam

rangka menghormati si mati sebagai penghubung antara manusia hidup dengan Zanahary atau Tuhan. Seluruh anggota keluarga yang berasal dari berbagai tempat di Madagaskar akan berkumpul untuk melaksanakan upacara yang biasanya dilakukan pada musim dingin (Juli sampai September). Upacara diawali dengan pembukaan makam oleh keluarga. Tulang-tulang yang telah terkubur kurang lebih dua atau tiga tahun diambil diiringi dengan tari, nyanyian, dan musik yang merdu yang ditujukan kepada arwah. Sisa-sisa tulang yang telah diambil tersebut kemudian dibawa melalui jalan-jalan desa sehingga ia (arwah) tahu akan perubahan lingkungan yang telah terjadi sejak kematiannya.

Sisa tulang tersebut, setelah dibersihkan, dilumuri dengan minyak suci dan diberi pakaian kemudian dikembalikan ke makam. Upacara *Famadihana* dapat berlangsung sehari-hari sampai makanan dan minuman habis. Untuk biaya yang besar ini sering mereka harus menabung terlebih dahulu.

Seseorang yang telah meninggal dinamakan *Lazan-ko Razana* atau "ia yang sudah menjadi nenek moyang". Bagi orang Malagasy, si mati adalah pelindung terhadap keturunannya. Mereka memiliki hal-hal yang dianggap tabu dan disebut dengan istilah *fady*. *Tuha* adalah upacara korban darah yang bertujuan untuk menyelamatkan hidup manusia atau mencegah seseorang. Sebagai media, seperti kayu, tanah, rumput, batu, dan binatang digunakan untuk kelengkapan upacara. Kadang kala, si dukun harus tinggal beberapa hari di tengah pekuburan untuk berkomunikasi dengan arwah guna menyerap ilmunya. Benda-benda

da seperti tersebut di atas dipakai untuk menyerap aspek-aspek negatif dalam kehidupan dan kemudian dibuang di sebelah selatan rumah. Bagi orang Malagasy hidup harus dilindungi dengan cara apa pun agar dapat hidup panjang.

Upacara *fatidra* dipimpin oleh seorang *mpitsika* dengan menggunakan berbagai objek seperti: tujuh macam tumbuh-tumbuhan, tujuh ekor ayam jantan, dua fragmen tulang manusia, air suci yang diambil dari sumber air terdekat, seekor ayam jantan yang organ hati telah dikeluarkan, sebuah tombak.

"Tromba"

Tromba adalah upacara religius agar terjadi kontak atau komunikasi dengan arwah melalui medium seseorang yang dalam keadaan *trance* disebut *saha*. Upacara tersebut dilakukan dalam rangka usaha penyembuhan suatu penyakit atau untuk mendapatkan petunjuk dalam segala kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat. Dalam kondisi *trance*, si medium seolah-olah mengadakan perjalanan di alam arwah. Upacara ritual ini didasari atas kepercayaan tentang reinkarnasi seorang raja atau arwah yang merasuk dalam tubuh seseorang.

Peran mediator dalam menghubungkan manusia dengan dunia supranatural menggunakan apa yang disebut *sikidy*, yaitu sejenis biji tanaman: *fano* (*Piptadenia chrysostach*), *tsia-fakomby* (*Coesalpinia*), kily

(asam), buncis.

"Sambatra" (Savatsy)

Sambatra adalah upacara khitanan yang biasa dilaksanakan dengan pesta besar pada musim dingin (Juli sampai September). Upacara ini meskipun telah terpengaruh oleh perkembangan zaman, namun masih dilaksanakan sebagian masyarakat desa setiap tujuh tahun. Dalam periode upacara tersebut semua anak yang lahir 7 tahun terakhir diwajibkan menjalani khitanan. Hari yang dipilih adalah hari Jumat (bahasa Malagasy: Zuma) pada bulan purnama ketika bunga-bunga sedang mekar dan tanah berbau harum. Dalam khitanan ini keluarga membangun *lapa* (tempat untuk khitanan). Selama beberapa hari diadakan pesta dengan tarian dan musik, macam-macam lomba olahraga. Si anak yang akan dikhitan juga ikut dalam aktivitas tersebut. Pada saat malam ketika ayam jantan berkokok yang pertama kali, beberapa orang pergi ke sebuah sumber air yang dianggap suci untuk mengambil air *rano mahery*. Selama perjalanan pulang orang-orang yang membawa air suci tersebut meneriakan kata-kata *zanoboro mahery* dan *manatody ambato* sampai tiba di *lapa*. Kemudian juru khitan melaksanakan tugasnya.

Bahasa

Menurut penelitian yang pernah dilakukan oleh Otto Chr Dahl, berdasarkan data-data bahasa, bahasa Malagasy banyak pengaruh dari kata-kata dalam bahasa Melayu dan ba-

hasa Sanskerta. Beberapa contoh kata-kata dalam bahasa Malagasy yang mirip dengan kata-kata dalam bahasa Indonesia atau bahasa Jawa, seperti dalam kata bilangan: *roa* (Mlg) = dua (2); *telo* (Mlg, dibaca *telu*) = telu (3); *fito* (Mlg, dibaca *fitu*) = pitu (7); *valu* (Mlg) = wolu (8). Kata-kata lain yang memiliki keiniripan antara lain: *mora* (baca *mura*) = murah (bhs Jawa); *vulan* = wulan (bhs Jawa); *vato* (baca *vatu*) = watu (bhs Jawa); *aho* (baca *ahu*) = aku (bhs Jawa); *sofina* (baca *sufin*) = kuping (bhs Jawa). Ada juga beberapa kata yang mungkin serapan dari bahasa Sanskerta: Dahl sampai pada kesimpulan bahwa nenek moyang orang Malagasy datang dari Indonesia. Peristiwa migrasi tersebut telah terjadi sekitar abad ke-7 Masehi.

Penelitian yang dilakukan oleh Adelaar juga menunjukkan adanya kata-kata bahasa Malagasy yang menyerap kata-kata bahasa Melayu, seperti: *horita* = gurita; *fano* (baca *fanu*) = penyus; *hoala* = kuala; *tanjona* = tanjung; *varatra* = barat; *firaka* = pirak; *hihy* = gigi; *fify* = pipi; *molotra* = mulut; *haranka* = kerangka.

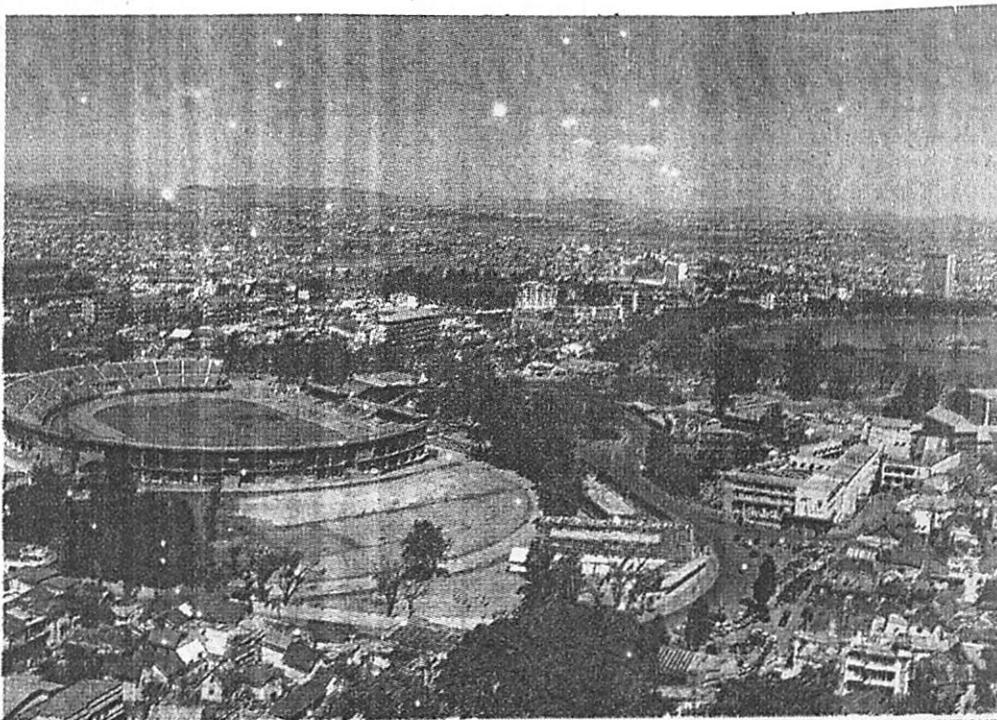
Kemiripan dalam kata dan kemiripan dalam fisik tubuh membawa orang Malagasy pada pengakuan bahwa nenek moyang mereka adalah orang Indonesia. Keadaan seperti tersebut merupakan modal penting untuk menjalin persahabatan kedua bangsa dalam berbagai kehidupan sosial, ekonomi, dan kebudayaan.

PROF DR TIMBUL
HARYONO MSC
Arkeolog, Dekan Fakultas
Ilmu Kebudayaan UGM



KOMPAS/MAMAK SUTAMAT

Upacara Kenegaraan — Upacara penyambutan awak perahu Borobudur dilakukan di pinggir pantai tanpa tenda, Rabu (15/10). Bahkan, upacara kenegaraan di Madagaskar umumnya juga dilakukan di tanah lapang tanpa tenda. Padahal, panas pada bulan Oktober mencapai 36 derajat.



KOMPAS/MAMAK SUTAMAT

Antananarivo — Pemandangan Kota Antananarivo dari atas bukit. Begitu indah, tetapi jika mendekat terlihat banyak perumahan kumuh di antara gedung-gedung.



KOMPAS/MAMAK SUTAMAT

Batu Bata — Sawah-sawah di pinggir jalan yang bertanah liat dimanfaatkan untuk membuat batu bata. Setelah cukup dalam, tanah diuruk dengan tanah keras sehingga bisa didirikan bangunan. Cara pembuatan batu bata tak beda dengan di Indonesia, dan batu bata dijual dengan harga Rp 2000 sebuah.

Kompas, 30 Oktober 2003

750 Tokoh Ikuti Kongres Kebudayaan

JAKARTA (KR) - Sekitar 750 tokoh terdiri budayawan, seniman, pemerhati budaya, tokoh LSM, akademisi dan tokoh masyarakat dari seluruh Indonesia akan menghadiri Kongres Kebudayaan V di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, yang akan digelar 19 hingga 23 Oktober 2003. Bertepatan dengan kongres tersebut, Presiden Megawati akan mencanangkan 'Bangkit Budaya 2003-2013'.

Ketua Harian Panitia Pelaksana Kongres Kebudayaan V, D Satrio Atmojo dalam siaran persnya yang diterima KR, Jumat (3/10) menjelaskan, sebelum digelar kongres, panitia menyelenggarakan berbagai kegiatan seni dan budaya seperti festival nasional seni pertunjukan, festival makanan tradisional, festival seudati, pameran tekstil nusantara, pameran dan lomba lukis anak-anak, lomba pantun, lomba kritik media massa, peragaan bu-

sana Edward Hutabarat, parade tari Randai, kemah budaya serta pertunjukan seni pembauran.

Menurut Satrio, Kongres Kebudayaan V merupakan peristiwa penting dan strategis. Kongres Kebudayaan V digelar setelah 12 tahun berlalunya Kongres Kebudayaan IV tahun 1991 di Jakarta. Dalam kurun waktu tersebut, sejumlah peristiwa penting terjadi dalam kehidupan bangsa Indonesia.

Munculnya fenomena baru

sejalan dengan cepatnya perubahan yang terjadi di masyarakat, telah menghadapkan bangsa Indonesia pada bentuk ancaman dan tantangan yang harus dipecahkan bersama.

"Tidaklah berlebihan kalau pada kesempatan penting ini dijadikan momentum Bulan Budaya dengan diselenggarakannya serangkaian kegiatan budaya agar pelaksanaan kongres menjadi lebih bermakna, semarak, dan dapat dinikmati, bukan hanya untuk peserta kongres tetapi juga untuk masyarakat luas," kata Satrio.

Dikatakan, pada Kongres Kebudayaan V nanti, panitia akan menyampaikan hasil-hasil kongres kebudayaan pertama sampai keempat dan pra kongres V di Bali. Para peserta nantinya akan membahas berbagai aspek di sidang-sidang komisi. (Cdr)-o

Kedaulatan Rakyat, 6 Oktober 2003

<http://kongres.budpar.go.id>

Dokumen Kongres Kebudayaan



Kongres Kebudayaan V akan digelar sebentar lagi, tepatnya selama 19-23 Oktober di Bukittinggi, Sumatra Barat. Persiapannya sendiri telah dilakukan jauh-jauh hari, misalkan lewat temu budaya regional di beberapa provinsi dan prakong-

gres di Denpasar, Bali, 28-30 April 2003 lalu.

Di situs resmi mereka ini, Anda dapat membaca beberapa catatan mengenai kegiatan yang berkaitan dengan kongres kebudayaan ini. Misalkan, ada dokumen mengenai notulensi ringkas beberapa rapat panitia persiapan, sejumlah catatan hasil rumusan temu budaya dan prakongres, dan beberapa artikel yang disampaikan dalam persiapan kongres.

Hal lain, situs ini dilengkapi pula dengan agenda yang berisi jadwal kegiatan panitia kongres. Ada pula berita dalam menu "news" yang berisi siaran pers dari panitia kongres dan klipng berita media massa. ● iwank

Koran Tempo, 7 Oktober 2003

MENJELANG KONGRES KEBUDAYAAN NASIONAL V

Kongres Budayawan Pelat Merah

PADANG — Partisipasi daerah dan masyarakat yang dijadikan landasan pembangunan di era otonomi daerah ini rupanya belum sampai ke urusan kebudayaan. Hal inilah yang tergambar dalam acara Kongres Kebudayaan Nasional V yang akan digelar di Bukittinggi, Sumatra Barat, 19-23 Oktober nanti.

Meski acara kongres diadakan di Bukittinggi, kendali penyelenggaraan kongres di tangan "pusat". Bahkan para budayawan dan seniman di Ranah Minang pun tersinggung karena tidak dilibatkan, baik sebagai panitia, terlebih lagi sebagai peserta. "Sedikit sekali budayawan yang diikutkan, padahal namanya kongres kebudayaan," ungkap sastrawan Darman Moenir, Sabtu (4/10).

Pada 23 September lalu penulis novel Bako itu bersama seniman Ery Mefri dan Ivan Adilla diundang ke Ruang Sidang Sekretaris Daerah Provinsi Sumatra Barat untuk ikut rapat "pertemuan panitia pusat". Tapi, Darman menilai undangan itu terkait dengan kritiknya melalui surat elektronik kepada sastrawan Wisran Hadi yang ditembuskan ke pers dan dimuat di surat pembaca sebuah harian di Padang. Karena, sebelumnya sudah ada setidaknya tiga kali rapat yang tidak melibatkan kalangan budayawan dan seniman Sumatra Barat. "Nah, yang diajak rapat September itu pun kami bertiga. Itu kan belum representatif, padahal masih banyak budayawan dan seniman lainnya," ungkap Darman.

Sementara itu, peserta atau yang menyajikan makalah pun dinilai Darman Moenir didominasi "budayawan pelat merah" dan rata-rata berusia di atas 50 tahun. Dari Sumatra Barat yang akan menyajikan makalah adalah sosiolog dari Universitas Andalas, Aziz Saleh. Makalah itu digodok sebuah tim yang anggota

adalah pejabat Pemerintah Sumatra Barat Hawari Sidik, Bupati 50 Kota Alis Marajo, sejarawan dari Universitas Negeri Padang Mestika Zed, sastrawan yang juga dosen Universitas Andalas Raudha Thaib, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Kamardi Rais Datuak P. Simulie, Ketua Bundo Kanduang Nur Ainas Abizar, Mantan Ketua PWI Sumbang Yanuar Abdulah, Ketua Yayasan Pusat Dokumentasi Minangkabau Anas Navis, dan sastrawan Rusli Marzuki Saria.

Darman yang juga peserta Kongres Kebudayaan Nasional IV tahun 1991 di Jakarta itu membandingkan kedua kongres ini. Pada Kongres 1991, menurutnya, sastrawan dari Sumatra Barat A.A. Navis membawa 27 sastrawan muda-muda dari Sumbang dengan 16 makalah. Tapi, kini dari Sumatra Barat hanya menyajikan satu makalah yang temanya pun soal ungkapan-ungkapan Minangkabau yang masih relevan dengan kehidupan sekarang. "Kenapa *nggak* yang muda-muda, mereka kan pantas tampil, kenapa yang muda-muda itu tidak diikutkan, apa masalahnya, padahal banyak budayawan dan sastrawan muda-muda di sini," kata Darman. Ia menyebut nama Gus tf Sakai, Edy Utama, Saldi Isra, dan sejumlah nama lain. "Jika sedikit yang dilibatkan dalam kongres kebudayaan, saya kira akan terjadi degradasi pemikiran," tambahnya.

Saat ini, kata Darman, negeri ini sedang dalam masalah. Seharusnya penting sekali kongres kebudayaan yang diadakan tahun ini untuk mencari jalan keluar dengan pemikiran-pemikiran yang cerdas yang hasilnya akan dipakai oleh legislatif dan eksekutif di negeri kita. "Tapi melihat kongres ini saya pesimis itu akan terwujud. Saya kira pemikiran cerdas tentang kebudaya-

an itu tidak akan datang dari Menteri Pariwisata I Gede Ardika, tapi dari Sardono atau Gonenawan Mohamad barangkali," ungkapnya.

Kekecewaan serupa juga disampaikan Sekretaris Dewan Kesenian Sumatra Barat Nasrul Azwar. Menurut dia, sejak awal tanda-tanda kongres ini tidak membawa para seniman dan budayawan sudah tampak. "Dulu di Bukittinggi saat persiapan kongres diikuti 90 persen oleh aparat pemerintah dari Dinas Pariwisata dan di Hotel Muaro Padang untuk prakongres tingkat Sumatra juga 75 persen pesertanya orang pemerintah, apalagi sekarang pemakalahnya ditunjuk oleh pemerintah dan kepantiaan dibentuk pemerintah pusat," katanya.

Menurut dia, seharusnya kalau acara kebudayaan boleh saja fasilitatornya pemerintah, tapi sebaiknya acaranya diserahkan kepada seniman dan budayawan untuk mengelolanya. "Sekarang kita hanya jadi penonton, ada alek (?) kebudayaan, budayawan dan seniman malah menjadi penonton dari luar, karena tidak diundang," kesalnya.

Kongres proyek

Darman Moenir maupun Nasrul Azwar juga melihat adanya asumsi orientasi proyek dalam pelaksanaan kongres ini. "Ini kan nilainya Rp 4 miliar," kata Darman. Selain itu, hal ini juga terlihat, menurut Darman, meskipun di tingkat panitia pengarah ada seniman dan budayawan seperti Toety Heraty, Garin Nugroho, sampai di panitia pelaksana ternyata gawenya seolah-olah kerja pemerintah saja yang dikelola oleh Dinas Pariwisata, Seni, dan Budaya. Tidak hanya di Padang, tapi juga di Jakarta.

"Implementasinya dilaksanakan oleh pemerintah, di daerah Gubernur mendelegasikan ke-

pada wakil gubernur dan seterusnya kepada Dinas Pariwisata dan Budaya, juga Taman Budaya, bahkan kata panitia pusat yang memilih pemakalah dari daerah adalah pemerintah daerah, mungkin itu atas rekomendasi kepala Dinas Pariwisata dan Budaya," kata Darman.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatra Barat Fachri Ahmad yang menjadi penanggung jawab panitia lokal, menjelaskan bahwa kongres ini sebenarnya adalah acara pusat yang diadakan di daerah. "Kita ikut membantu menyukseskan acara ini, mana yang tidak bisa dilakukan pusat kita bantu, seperti informasi. Sedangkan masalah akomodasi dengan perhotelan, biro perjalanan, dan persiapan acara sudah diatur mereka, kita tidak banyak berperan, termasuk pemilihan peserta, itu semua sudah dari panitia pelaksana di pusat," ujarnya. Fachri menjelaskan, biaya kongres sebesar Rp 4 miliar diambil dari dana APBN. "Memang benar katanya baru tersedia Rp 2,2 miliar, tapi ini tidak akan diambil dari APBD Sumbar, mungkin dari APBN," ungkapnya.

Ketidakpuasan sejumlah seniman dan budayawan Sumatra Barat terhadap penyelenggara-

an Kongres Kebudayaan Nasional V sebelumnya mencuat di *mailing list* dan sejumlah tulisan di harian terbitan Padang. Sas-trawan Wisran Hadi memparodikan kebudayaan sekarang sudah tidak dianaktirikan lagi oleh pemerintah dengan membuat kongres kebudayaan seperti pertandingan olahraga.

"Mula-mula budayawan tingkat provinsi dipertandingkan dan keluarlah seorang wakil provinsi, wasit atau pengamat dari Jakarta (wasit nasional), wakil provinsi itu diadu lagi dalam prakongres, kemudian dilanjutkan dengan peraduan tingkat nasional dalam forum nasional, tentunya akan keluar juara kebudayaan tingkat nasional pula, cuma bedanya dengan olah raga, jagoannya ditunjuk pemerintah," kata Wisran.

Parodi itu pulalah yang rencananya akan digelar seniman Sumatra Barat. "Parodi ini seperti *performing art* yang akan kita tampilkan di bawah Jam Gadang selama acara kongres berlangsung, kita juga akan menggelar diskusi di luar," ungkap Nasrul Azwar. Menurut dia, sudah banyak yang mau mengikuti acara ini, termasuk seniman dan budayawan dari luar Sumatra seperti Yogyakarta. Yang jadi masalah, menurut dia, hanya dana. Karena tak mungkin kecipratan dana kebudayaan Rp 4 miliar itu.

● febrianti

Kongres Kebudayaan Bukan Acara Ritual dan Formal

PENYELENGGARAAN Kongres Kebudayaan (KK) V merupakan peristiwa penting dan strategis. Dalam satu dekade terakhir, bangsa Indonesia telah mengalami perubahan besar. KK V lahir dari kebutuhan dan bukan merupakan acara ritual dan formal.

Demikian dikatakan anggota Tim Perumus Prakongres Kebudayaan V, Prof Dr Toeti Heraty, di Jakarta Kamis (16/10). KK dimulai dengan satu harapan, keefektifan. Oleh karena itu, dinamika kongres yang digelar 19-23 Oktober 2003 di Bukittinggi, Sumatera Barat itu, diharapkan menjadi momentum awal dalam arti kelanjutan.

"Efektivitas kongres tidak hanya diukur di dalam saja. Banyak kongres di Jakarta selama sekian tahun sekali diadakan. Kongres-kongres itu akhirnya menjadi ritual dan formal. Tetapi kongres kebudayaan benar-benar muncul dari suatu iktikad kebutuhan. Kongres kebudayaan tidak sempat menjadi formal, berkala dan reguler," kata Toeti.

Dikatakan, kongres sebagai kelanjutan ibarat bola yang baru dilempar. Bola itu harus diterima dan diteruskan oleh banyak pihak. Dalam hal ini, ada banyak pihak yang dilibatkan. Seperti masyarakat budayawan, cendekiawan, pemangku adat, tokoh masyarakat dan sebagainya.

Menurut Toeti, dari tahun ke tahun, KK tidak diadakan secara berkala. Jarak dari satu kongres ke kongres lain tidak tetap. KK I dimulai pada tahun 1948, lalu KK II tahun 1952, KK III tahun 1954 dan KK IV tahun 1991. Jarak tahun ke tahun itu membuktikan KK V lahir karena keinginan iktikad baik. KK V adalah kongres independen, dalam arti mewakili generasi yang signifikan.

KK V akan membawa rumusan hasil prakongres di Denpasar Bali yang diselenggarakan 28-30 April lalu. Pada waktu itu, prakongres diikuti 148 peserta dari seluruh Indonesia. Hasil diskusi sidang pleno dan sidang kelompok menghasilkan tiga rumusan subtema, yakni konsep lokalitas, nasionalitas, dan globalitas; identitas dan krisis budaya; perubahan dan perberdayaan.

Kini KK V mengangkat tema Konsep, Kebijakan dan Strategi Kebudayaan Indonesia. Tema tersebut berangkat dari subtema yang pernah dibahas dalam prakongres di Bali. Dalam rangka KK V, penyelenggara telah melaksanakan Temu Budaya Daerah di 25 kota yang berlangsung Juni-September 2002. Kini peserta KK V yang terdaftar telah mencapai 750 orang.

Sangat Berbeda

Sementara itu, sastrawan Putu Wijaya yang juga menjadi anggota tim perumus

mengatakan, KK V tidak akan mencakup pelaksanaan hasil kongres. Dikatakan, melaksanakan adalah pekerjaan lain yang sangat berbeda. Meskipun demikian, seluruh para peserta kongres juga akan memikirkannya.

"Kami juga tidak ingin agar penyelenggaraan kongres menjadi ritual saja. Kami ingin hasil-hasil kongres benar-benar dipraktikkan. Pelaksanaan akan menjadi pekerjaan bagi orang-orang yang diberikan rekomendasi. Soal kesinambungan sangat bergantung pada kesanggupan dan kemauan pihak yang direkomendasi," ujar Putu.

Ditambahkan, budaya populer memang tidak akan dibahas secara khusus dalam kongres kali ini. Tetapi topik tersebut sudah tertampung dan akan banyak disinggung. Panitia menyediakan banyak waktu untuk sesi-sesi dialog. Materi pembicaraan akan meluas ke berbagai hal. (U-5)

Suara Pembaruan,
17 Oktober 2003

Kongres V Kebudayaan Dibuka 20 Oktober

JAKARTA - Presiden Megawati Soekarnoputri akan membuka Kongres Kebudayaan yang akan berlangsung di Bukittinggi, Sumatera Barat pada 20 Oktober 2003.

Kongres yang berlangsung 20-22 Oktober ini bakal dihadiri sekitar 750 peserta yang terdiri dari para budayawan, seniman, pemerhati budaya, akademis, aktivis, dan tokoh masyarakat dari seluruh Indonesia.

Kongres V Kebudayaan digelar kembali bersama penyelenggaraan Bulan Budaya setelah sekian tahun berlalu. Kongres IV diselenggarakan pada tahun 1991 di Jakarta. Beberapa topik kongres sudah pernah dibicarakan dalam prakongres be-

berapa bulan lalu di Bali. Pelaksanaan kongres akan berlangsung di Istana Bung Hatta dan Balai Sidang Bung Hatta.

Sebelum kongres dibuka, Presiden Megawati akan mencanangkan "Tahun Bangkit Budaya 2003-2013". Pencanaan tersebut sekaligus menandai kebangkitan sadar budaya Indonesia. Acara resmi itu dilakukan secara simbolis lewat penandatanganan prasasti di Lapangan Kodam Bukittinggi.

Penyelenggaraan Kongres V Kebudayaan juga dijadikan momentum Bulan Budaya. Pencanaan Bulan Budaya tersebut sudah dilakukan oleh Gubernur Sumatera Barat dan Walikota Bukittinggi. (U-5)

Suara Pembaruan, 7 Oktober 2003

12 Tahun Menunggu Kongres Kebudayaan

Setelah vakum selama 12 tahun, Kongres Kebudayaan kembali digelar. Kongres kelima kalinya itu rencananya digelar di Bukittinggi, Sumatera Barat, 19-23 Oktober 2003.

Anggota *Steering Committee* (SC), Prof. Dr. Toeti Heraty, mengatakan, gawe besar di kota wisata Bukittinggi nanti akan diikuti oleh 750 orang, terdiri dari peserta dan peninjau dari seluruh Indonesia. Mereka adalah budayawan, pakar, seniman, ilmuwan, wakil provinsi, kabupaten/kota, perguruan tinggi, lembaga keilmuan, LSM, dan tokoh masyarakat.

Menurut Toeti, kongres akan menampung aspirasi anggota masyarakat luas terhadap penentuan kebijakan publik. "Kita akan berupaya menghimpun bahan masukan untuk dipakai bahan penyempurnaan konsep, kebijakan dan strategi dalam rangka memajukan kebudayaan nasional Indonesia," katanya di Jakarta, kemarin.

Dia menambahkan, penyelenggaraan Kongres Kebudayaan V berangkat dari itikad adanya kebutuhan saat ini. "Apa yang terjadi dalam 10 tahun terakhir ini merupakan kejutan bagi bangsa Indonesia yang tak pernah terbayangkan sebelumnya."

Putu Wijaya anggota SC lainnya mengatakan, kongres akan mengkristalkan hal-hal yang telah dibahas dalam prakongres kebudayaan yang digelar di Bali, April lalu. Prakongres lalu menghasilkan tiga rumusan yakni lokalitas nasionalitas dan globalitas, identitas dan krisis budaya, serta perubahan dan pemberdayaan. Kongres di Bukittinggi nanti juga akan memberikan penekanan pada soal-soal ekonomi kerakyatan, industri

budaya, spritualitas, kesetaraan gender, bahasa, dan simbol, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan lingkungan hidup.

Menanggapi adanya suara-suara bahwa kongres nanti merupakan 'kongres plat merah', Putu Wijaya mengatakan, pihaknya akan berupaya tetap independen, walaupun kegiatan itu difasilitasi pemerintah. Dalam soal penentuan pembicara misalnya. Pihak panitia, katanya, menitikberatkan pada individu-individu yang independen.

"Memang tidak semua yang yang kita harapkan datang bisa hadir karena keterbatasan waktu dan lain sebagainya," katanya.

Kongres di Bukittinggi menurut Toeti juga dijadikan momentum Bulan Budaya. Kegiatan Bulan Budaya yang merupakan rangkaian kongres antara lain festival pedati, lomba pantun, lomba membordir, parade permainan anak nagari, kemah budaya, dan temu Taman Budaya se-Indonesia. Selain itu juga digelar parade randai, pawai budaya nusantara, festival nasional seni, pertunjukan, pameran budaya nusantara, pagelaran seni pembaruan, dan masih banyak lainnya.

Kongres yang bertemakan Konsep, Kebijakan, dan Strategi Kebudayaan Indonesia ini menurut rencana akan dibuka oleh Presiden Megawati Soekarnoputri. Dalam acara itu nantinya Departemen Kebudayaan dan Pariwisata akan memberikan penghargaan kepada individu yang dianggap berjasa di bidang seni. Mereka yang mendapat penghargaan adalah Wisran Hadi (sastrawan), Hj Suharni Sabdowati (dalang wanita), Hj Siti Maryam (penari), H Mawardi Alva'ie (alm, sastrawan), Retno Maruti (penari), dan Budiyati Abiyoga (produser). ■ sbt

Kalam Republika,
18 Oktober 2003

Kongres Kebudayaan, Seremonial Pelat Merah

KONGRES Kebudayaan hidup dan mati. Hidup karena Kongres Kebudayaan selalu saja menawarkan peristiwa baru, meski tanpa tema baru. Mati, karena Kongres Kebudayaan selalu saja membangun stigma tidak mampu melibatkan komunitas seniman secara aktif. Ia hanya jadi peristiwa reguler, peristiwa kaum pelat merah, yang notabene menghabiskan anggaran belanja negara. Ia sekadar serenominial birokrat.

Maka tidak heran jika Kongres Kebudayaan di Bukittinggi, 19-23 Oktober, yang mengusung tema *Konsep, Kebijakan, dan Strategi Kebudayaan Indonesia* mengundang kontroversi dalam lajur partisipasi seniman dan isu. Ia hanya membangun kebesaran peristiwa tanpa membongkar akar persoalan yang tumbuh dan berkembang di jantung publik. Inilah soalnya, kenapa Kongres Kebudayaan digunjingkan. Kongres Kebudayaan dalam batas-batas tertentu seharusnya memberi kebebasan dan independensi terhadap wilayah kerja kebudayaan secara global, bukan bagian dari penggelembungan isu kekuasaan. Nyatanya, isu-isu yang diusung dalam Kongres Kebudayaan, yang dianggap mengakomodasi problem lokal dengan menggelar prakongres, tidak tampak.

Temu daerah yang digelar di 25 kota antara Juni-September 2002 untuk menampung suara daerah, tak sampai kepada tema yang ditawarkan sekarang. Misalnya, hasil rekomendasi temu daerah di Bukittinggi, berbeda dengan rekomendasi temu regional di Padang, kemudian menjadi berbeda lagi dengan hasil prakongres di Bali, April 2003 lalu," ujar sastrawan Darman Moenir kepada *Media*, pekan silam.

Darman Moenir melihat tema yang ditawarkan bukan rekonstruksi dari pengembangan isu ke daerah, tapi isu yang digulirkan dari pusat; Jakarta. Darman melihat ada pemaksaan untuk menyatukan kultur Indonesia yang lahir dari berbagai etnik. "Mengapa harus dipaksakan?" ungkap Darman.

Darman betul, kultur Indonesia memang harus dilepas dari atribut keseragaman. Ia tak perlu diseragamkan. Karena kultur Indonesia lahir dan tumbuh bersama perilaku lokal yang secara tegas memiliki identifikasi tersendiri. Indonesia memang selalu dirimbuni banyak definisi, seperti yang ditulis Faruk, kritikus sastra dan dosen Universitas Gadjah Mada pada *e-mail* berantai yang dikirm ke berbagai kawan. Menurut Faruk, keindonesiaan, kita

semua tahu, hanyalah konstruksi. Imajinasi. Jadi, pertanyaannya bukan adakah Indonesia, tapi adakah *imagined community* yang bernama Indonesia. Tesis Ben Anderson, *imagined community* itu harus ditopang oleh *print capitalism*, media massa cetak.

"Aku lebih suka menyebutnya aksara. Tanpa aksara tidak terbangun *imagined community* itu. Kita memang sudah punya aksara sejak dulu kala. Tapi kita tidak pernah punya budaya aksara, padahal yang menopang terbangunnya imajinasi itu bukanlah aksaranya, melainkan budaya aksaranya. Keindonesiaan sampai sekarang ini sebenarnya masih penjajahan yang ditopang oleh kekuatan militer. Tanpa militer tidak ada Indonesia. Di sini tesis Ben harus diragukan," ungkap Faruk.

Faruk pun mencurigai bahwa Kongres Kebudayaan dimasuki muatan kultural dan politik. "Katanya, ada muatan kultural dan politik di dalamnya. Ada hegemoni yang tidak terasa, tapi sangat efektif. Jadi, memang harus dipertanyakan. Tapi melakukan *counter discourse* atau aksi tandingan juga tidak membebaskan kita dari kekuasaan demikian," ungkap Faruk.

Counter discourse atau aksi tandingan memang tidak diperlukan. Dan para seniman Sumbar pun urung melakukan aksi tandingan setelah dipanggil Fachry Ahmad, Wakil Gubernur Sumatra Barat (Sumbar). Suara seniman Sumbar redup. Menurut Darman Moenir, salah satu sastrawan yang diundang dalam pertemuan itu, ada 25 seniman yang dipanggil Fachry untuk diajak melihat persoalan Kongres Kebudayaan lebih dekat. Hasilnya, para pengkritik yang keras dan vokal itu diakomodasi untuk hadir sebagai pemantau, plus akomodasi hotel dan transport!

"Ada upaya teman-teman menjadi pengamat. Dan akhirnya tidak lagi berpikir membuat kongres tandingan. Tentu kesukaran dana, dan tidak ada sama sekali. Jadi, pembaca persoalan di kawan-kawan dan memanggil, memberi kesempatan, menjadi pemantau. Ada 25 orang yang diundang sebagai peserta tambahan, dibiayai pemerintah Sumbar. Tapi saya tidak akan datang," ungkap Darman ketika dihubungi *Media*, kemarin.

Susah memang jika sikap kritis hanya berdiri pada wilayah yang tidak substansial. Yang perlu diuji dari kritik kawan-kawan seniman Sumbar, apakah mereka cukup memahami persoalan yang beredar dalam lingkaran

Kongres Kebudayaan, dan tahu seluk-beuk sumber kebobrokan dan pembusukan itu. Pada titik ini kritik harus dipahami sebagai upaya pemberdayaan publik, bukan cacik maki dan perbincangan psikologisme orang per orang.

Yang paling fundamental dari tradisi kritik adalah pertemuan dan pergumulan antara kritikus dan apa yang diselidikinya. Dan tentu hasil dari pergumulan itu adalah kritik yang bersifat subjektif. Sang kritikus tidak berdiri di luar pagar perkara yang ia kupas, dan sentuhan-sentuhannya harus terasa 'bentuk tangannya, ketukan jantungnya, dan panas darahnya'. Tradisi kritik, di samping dilengkapi dengan penggunaan metode tafsir terhadap objek yang dikritik, juga harus dilengkapi dengan peranti-peranti konseptual yang serbaargumentatif dan koheren.

Lantas, ketika kritikus bersifat subjektif dan membangun prosedur-prosedur untuk memproduksi pernyataan-pernyataan, apakah kemudian posisi Kongres Kebudayaan telah mati, dan bahkan kematiannya dijegal oleh tangan dingin sang kritikus? Tidak! Kongres Kebudayaan tetap berjalan meski tanpa bangunan citra pemikiran yang signifikan. Sebuah bangunan yang diambil dari reruntuhan Indonesia.

Inilah luka Indonesia, luka yang dicerderai kalangan birokrat dan komunitas seniman. Mereka

tidak kuat menanggung godaan 'keimanan' berkesenian, sehingga 'iming-iming' (rayuan) Fachry untuk hadir di acara Kongres Kebudayaan meluluhlantakkan sikap independensi seniman. Padahal, Fachry dan para pejabat selalu mendenyahkan lagu lama, cara-cara lama; meninabobokan sikap kritis dengan iming-iming. Indonesia yang masih dibalut luka lama atau dijajah militer dalam terminologi Faruk, memang agak susah dijabarkan. Kekuatan militer atau yang berbau fasisme, toh juga menjalar dalam Kongres Kebudayaan.

Dan benar apa yang digigaukan Tan Lioe Ie, penyair Bali. Ie melihat memang semakin sulit dirumuskan konstruksi kebudayaan Indonesia. Juga kerap kalah cepat rumusannya. Kalau saja slogan mencerdaskan kehidupan bangsa bukan sekadar slogan, mungkin menarik. "Sebab apa pun pilihan kultural yang terjadi (mengampung, mendaerah, menasional, menginternasional) akan merupakan pilihan sadar yang cerdas. Nyatanya, masih slogan semata. Jadi Bung Faruk benar, mulai saja dari diri sendiri. Untuk kebudayaan mah, jangan menunggu panitia-panitian segala," tukas Ie.

● Edy A Effendi/M-8

KONGRES KEBUDAYAAN V:

Enam Pekerja Seni Terima Penghargaan

BUKITTINGGI - Enam pekerja seni Indonesia menerima penghargaan Hadiah Seni dari Kementerian Budaya dan Pariwisata. Mereka adalah Sastrawan Wisran Hadi (Sumatera Barat), Penari Siti Maryam (Nusa Tenggara Barat), Dalang Suharni Sabdowati (Jawa Tengah), Sastrawan/Budayawan (alm) Mawardi Rivai (Kalimantan Barat), Penari Retno Maruti (DKI Jakarta), dan Produser Budiyati Adiyoga (DKI Jakarta).

Keenam pekerja seni tersebut mendapatkan penghargaan berupa piagam, lencana dan uang Rp 5 juta. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Menteri Kebudayaan dan Pariwisata I Gede Ardika di Bukittinggi, Sumatera Barat pada Senin (20/10) pagi. Sebelumnya, Kongres Kebudayaan V secara resmi dibuka dan akan berlangsung sampai dengan Rabu (22/10). Penghargaan Hadiah Seni diberikan kepada seniman dan seniwati dari berbagai daerah atas prestasi dan jasanya mengembangkan seni budaya bangsa Indonesia.

Dalam sambutan pembukaan, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata I Gede Ardika mengatakan pemerintah memfasilitasi para budayawan untuk berkumpul dan menuangkan pikirannya di dalam Kongres Kebudayaan V (KK V). Hal itu dilakukan agar kebudayaan Indonesia yang majemuk itu bisa ditempatkan secara proporsional.

Diharapkan, nilai-nilai luhur yang terkandung dalam kebudayaan nasional tidak

hanya menjadi buah bibir tetapi tercermin dalam perilaku bangsa, sehingga bangsa ini mempunyai jati diri dan martabat yang sepatutnya.

"Itu semua bergantung pada cara kita memperlakukan budaya di dalam hidup berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini, *intangibile culture* menjadi sangat penting. Pada hakikatnya, budaya tersebut merupakan roh dari semua produk kegiatan budaya yang berupa nilai-nilai kehidupan manusia," kata Ardika.

Menurut dia, sistem pengelolaan kebudayaan harus dibangun secara tepat sesuai dengan permasalahan khusus yang dihadapi bangsa. Oleh sebab itu, para budayawan berkumpul dalam Kongres Kebudayaan V untuk menyusun konsep kebudayaan bangsa Indonesia.

Diharapkan dengan tersusunnya konsep, kebijakan dan strategi kebudayaan Indonesia, pemerintah mempunyai pedoman jelas untuk mengembangkannya.

Permasalahan kehidupan sebagai bangsa yang berkaitan dengan kebudayaan harus benar-benar dihayati. Sistem pengelolaan kebudayaan yang ada harus cocok dengan karakter suku-suku bangsa yang beraneka ragam, lingkungan hidup dan pengaruh eksternal.

Ardika merasa optimis, masih banyak pemikiran-pemikiran strategis dari para peserta kongres. Pemikiran-pemikiran tersebut dapat dijadikan pijakan untuk membawa bangsa Indonesia ke luar dari krisis budaya. Jika

memang krisis sudah sedemikian parah, kongres ini mungkin bisa menemukan solusi pemikiran. Hal lain yang juga perlu dipikirkan ialah cara pemanfaatan karya-karya budaya untuk kesejahteraan kehidupan masyarakat.

"Saya, pemerintah dan semua komponen bangsa di seluruh pelosok tanah air menaruh harapan besar dari kongres ini. Hasilnya diharapkan bisa menjadi pijakan membangun masyarakat yang berbudaya tinggi. Semoga kongres ini melahirkan pemikiran-pemikiran yang strategis untuk membangun bangsa dan negara Indonesia lewat pendekatan budaya," kata Ardika.

Masih Abstrak

KK V memilih tema "Konsep, Kebijakan dan Strategi Kebudayaan Nasional". Sesuai tema itu, berbagai topik dalam kongres akan dibicarakan. Ada isu-isu sentral dan krusial yang pernah diangkat dalam prakongres di Bali beberapa waktu lalu. Meskipun demikian, kongres juga akan membuka ruang untuk isu-isu aktual. Untuk selanjutnya, hasil kongres yang berupa konsep disimpulkan dan diolah menjadi rekomendasi bagi para pengambil keputusan.

Dalam jumpa pers Minggu (19/10) di Bukit Tinggi, Anggota Panitia Pengarah KK V, Putu Wijaya mengatakan, kongres ini tidak akan memberikan rencana-rencana. Rekomendasi kongres juga tidak mengatur masalah-masalah konkret yang riil. Tujuan penting dari kongres ini adalah para peserta dari ber-

bagai daerah bisa bertemu dan duduk bersama.

Hal yang sama juga dikatakan oleh Anggota Panitia Pengarah KK V, Toeti Herati. Menurut dia, KK V dikhawatirkan hanya akan menghasilkan rekomendasi abstrak yang kurang jelas. Sesuai tema, KK V memang hanya melahirkan konsep dan pemikiran.

"Yang sudah jelas, antara konsep dan kenyataan adalah hal yang berbeda. Pelaksanaan adalah pekerjaan yang lain lagi. KK V ini lebih merupakan bazar gagasan. Meskipun demikian, kami juga ikut memikirkan bagaimana hasil-hasil kongres ini diterapkan sehingga mempunyai dampak bagi bangsa ini," kata Toeti.

Sementara Putu Wijaya mengakui, harapan banyak orang bahwa KK V akan menghasilkan hal-hal konkret. Di sisi lain, rekomendasi hasil KK V tidak mempunyai daya intrusif yang kuat. Persoalannya sangat bergantung pada sensitivitas institusi yang menerima rekomendasi tersebut.

"Bisa dimengerti jika ada harapan besar KK V menghasilkan sesuatu yang besar

seperti kongres-kongres yang lalu. Tetapi kalau kami lalu tidak menghasilkan apa-apa, itu bukan berarti rekomendasi yang kami berikan tidak positif. Walaupun abstrak, jika pihak yang menerima sensitif, rekomendasi itu bisa dijalankan," tambah Putu.

Dalam kesempatan yang sama, panitia pengarah juga kembali menanggapi isu "kongres plat merah". Kongres ini berkonotasi terlalu kental dengan Pemerintah. Isu ini mencuat setelah salah satu media cetak nasional memuat hal tersebut. Panitia pengarah membantah tuduhan, KK V tidak independen dan dipengaruhi birokrat Pemerintah.

Menurut Toeti, anggapan negatif itu merupakan hal yang wajar. Tetapi dia menyalsakan pihak-pihak yang tidak objektif dalam melihat persoalan. Padahal peserta kongres yang hadir adalah para budayawan dan pekerja seni yang cukup independen. Di sisi lain, Pemerintah memang sudah sewajarnya memfasilitasi kongres karena budayawan dan seniman tidak mungkin mempunyai dana yang cukup besar. (U-5)

Suara Pemberuan, 20 Oktober 2003

HARI INI KONGRES KEBUDAYAAN V DI BUKITTINGGI

Hanya Perhelatan 'Plat Merah'?

KONGRES Kebudayaan V di Bukittinggi banyak mengundang sinisme dan sebagian besar di kalangan seniman menilai perhelatan itu kongres 'plat merah'. Putu Wijaya, anggota Tim Pengarah Kongres Kebudayaan V, mengakui adanya suara sumbang yang menyebutkan kongres itu diarahkan atas kemauan pemerintah.

"Tadi saya mendapat telepon dari Jakarta, masih ada anggapan kongres kebudayaan ini sebagai kongres plat merah. Sebenarnya kami sudah mengantisipasi sejak lama akan ada anggapan seperti itu," kata Putu Wijaya di Bukittinggi, Minggu (19/10) menjelang kongres yang akan dibuka Senin (20/10) hari ini.

Menurut Putu, boleh-boleh saja orang menilai seperti itu, meski pada kenyataannya baik panitia pengarah maupun peserta semua berasal bukan dari kalangan birokrat. "Panitia dan peserta dari orang luar, pemerintah hanya memberikan fasilitas kepada kami dari kalangan seniman, budayawan dan cendekiawan untuk menggelar kongres," kata Teguh.

Sementara itu Menteri Kebudayaan dan Pariwisata I Gede Ardika di tempat terpisah kepada wartawan membantah pemerintah memberi pengarah kepada kongres. "Pemerintah hanya membantu memberikan fasilitas saja," kata Ardika.

Diharapkan supaya hasil kongres nanti tidak asal 'ma-



Putu Wijaya

KRDOK

suk laci' yang tidak ada tindak lanjutnya. Sebaliknya hasil kongres diharapkan bisa lebih implementatif dan bisa diikuti oleh masyarakat dan bisa dipahami oleh rakyat. Jadi tidak hanya oleh budayawan atau cendekiawan saja, tetapi bumi dan bisa menyentuh masyarakat secara luas.

"Sebab budaya itu di masyarakat. Sebaiknya dalam kongres ini segala ketetapan dan pengaturannya dilakukan oleh kalangan budayawan, seniman dan cendekiawan. Pemerintah hanya memberi dukungan fasilitas saja," tambahnya.

Selain diisi kegiatan ceramah dan diskusi dari berbagai kalangan dengan peserta sebanyak 750 orang, juga diisi kegiatan festival nasional seni pertunjukan nusantara.

Menurut rencana tim kesenian dari DIY akan memeriahkan kongres dengan menam-

pilkan tari 'Sumantri-Sukasrana'.

Sebelum kongres, Minggu (19/10) kemarin telah diadakan kegiatan pawai keliling kota Bukittinggi dan pertunjukan seni tradisional Sumatera Barat. Kongres kebudayaan akan berlangsung di Auditorium Bung Hatta Hotel Novotel.

Pada Kongres Kebudayaan V ini, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata memberikan penghargaan di bidang seni kepada 6 orang yaitu, Wisran Hadi (Padang), Hj Suharni Sabdowati (Sragen), Hj Siti Maryam (NTB), Alm H Mawardi Riva'ie (Pontianak), Retno Maruti (Solo) dan Budiyati Abiyoga (Jakarta). (Cdr)-z



● **INGIN** ke Nagoya dengan biaya murah? Caranya sangat mudah. Datanglah ke Condongcatur, Yogyakarta, lebih kurang 150 meter sebelah utara FE-U11, Anda akan menemui *Taman Nagoya*. Dijamin bebas paspor, bebas visa dan bebas fiskal. Silakan buktikan!—(Kiriman: Ridwan Arif Nugroho, Minesawa International Student Dorm, 305-1 Minesawacho, Hodogaya-ku, Yokohama, Japan).

Hasil Kongres Kebudayaan V di Bukittinggi Hendaknya Jangan Hanya Bisa Dipahami Budayawan

BUKITTINGGI, KOMPAS — Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata I Gede Ardika mengharapkan agar Kongres Kebudayaan V menghasilkan sesuatu yang konkret. Dengan demikian, hasil-hasilnya lebih implementatif dan dipahami masyarakat, bukan hanya dipahami oleh kalangan budayawan dan cendekiawan.

Harapan tersebut dikemukakan Ardika se usai melepas Pawai Budaya Nusantara di Lapangan Wirabraja, Bukittinggi, Sumatera Barat, Minggu (19/10). Harapan serupa dikemukakan budayawan D Zawawi Imron dan Rahman Arge.

Hari Senin ini, Ardika membuka Kongres Kebudayaan V di Balai Sidang Bung Hatta, Bukittinggi.

"Saya berharap kongres kali ini menghasilkan kesepakatan-kesepakatan yang bisa dipedomani oleh masyarakat untuk bisa diimplementasikan pada kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, bukan konsepsi yang abstrak, tetapi sebagai kebijakan dan strategi yang dapat diinternalisasikan sebagai nilai-nilai dalam upaya mempertegas jati diri bangsa, termasuk yang berkaitan dengan akhlak, moral, dan etika," tutur Ardika.

Menurut Ardika, hal itu bergantung pada bagaimana kita memperlakukan budaya kita sendiri dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai individu, sebagai anggota masyarakat internasional, dan juga sebagai warga negara Indonesia. "Dalam hal ini, budaya tak benda (*intangible culture*) menjadi sangat penting. Budaya tak benda yang pada hakikatnya merupakan roh dari semua produk kegiatan budaya itu berupa nilai-nilai kehidupan manusia," ujarnya menambahkan.

Secara terpisah, Zawawi berharap dalam kongres kali ini muncul wacana dan paradigma baru untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan masa lalu. Dalam kongres ini Zawawi akan memaparkan makalah tentang kepulauan.

Ia melihat bagaimana kini anak-anak yang hidup di pulau tidak memiliki keterampilan se-

bagaimana orangtua mereka untuk menjadi nelayan atau petani. Sebab, mereka dididik seperti anak-anak yang tinggal di Jakarta. Akibat pendidikan yang keliru itu mempercepat arus urbanisasi karena mereka tidak bisa berladang atau melaut di kampungnya sendiri.

"Mereka akhirnya urban ke Jakarta karena pendidikan yang mereka miliki hanya untuk menjadi orang kantoran," ujarnya.

Sementara Arge berharap apa yang dihasilkan Kongres Kebudayaan V tidak bernasib sama dengan empat kongres kebudayaan sebelumnya. "Saya berharap betul akan ada suatu produk dari energi reformasi ini. Karena dia produk reformasi, maka dia harus menjadi suatu gerakan," papar Arge, yang juga tercatat sebagai panitia pengarah pada kongres ini.

Kongres kali ini, menurut Arge, harus memberi keberdayaan kepada model-model kebudayaan, terutama yang bersumber dari daerah-daerah, yang selama ini terzalimi dan terpenjara dalam ketakberdayaan akibat sentralisasi. Ia yakin bahwa pemberdayaan budaya-budaya lokal yang mengandung nilai-nilai luhur itu akan menghasilkan energi kreativitas yang luar biasa untuk keluar dari keterpenjaraan. (LAM)

Menbudpar Resmikan Kongres Kebudayaan

BUKITTINGGI (Media): Kongres Kebudayaan V yang berlangsung di Bukittinggi, Sumatra Barat, dibuka secara resmi oleh Menteri Kebudayaan dan Pariwisata (Menbudpar) I Gede Ardika, kemarin. Kongres itu akan berlangsung hingga Rabu (22/10).



Dalam sambutannya, Ardika menyatakan bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa adalah bangsa yang majemuk, yang memiliki kebudayaan heterogen. Meski heterogen, budaya yang satu dengan yang lainnya memiliki benang merah yang kuat. Sehingga, heterogenitas ini menjelma menjadi mozaik atau semacam taman bunga; beraneka ragam tetapi serasi sebagai sebuah taman yang indah, dan itulah bentuk dari bhineka tunggal ika.

Ardika menambahkan, pemerintah memfasilitasi para budayawan untuk berkumpul dan mengungkapkan pikirannya di dalam Kongres Kebudayaan V, demi dapat menempatkan kebudayaan kita yang majemuk itu secara proporsional di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga, nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya tidak lagi hanya menjadi buah bibir, tetapi tercermin di dalam perilaku bangsa ini.

"Untuk itu, kita harus benar-benar menghayati permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan kebudayaan sebagai penuntun terbentuknya sistem yang akan kita bangun bersama, yaitu sistem pengelolaan kebudayaan yang paling cocok dengan karakter suku-suku bangsa yang

beraneka ragam, lingkungan hidupnya, serta pengaruh-pengaruh dari luar yang harus kita serap atau kita tolak karena tidak mungkin dapat kita hindari seluruhnya," tutur Ardika.

Sistem pengelolaan kebudayaan secara tepat sesuai dengan permasalahan khusus yang dihadapi bangsa ini dan permasalahan umum sebagai warga dunia, tambah Ardika, menjadi suatu keharusan bagi bangsa ini untuk membangunnya. Mereka yang mendapat kepercayaan dari seluruh komponen bangsa untuk membangun system itu adalah tentu para budayawan. Dan, setelah 12 tahun Kongres Kebudayaan tidak dilaksanakan, maka Kongres Kebudayaan kembali digelar, salah satunya untuk membangun atau setidaknya mereposisi kembali sistem pengelolaan kebudayaan.

"Saya, pemerintah, dan semua komponen bangsa di seluruh pelosok Tanah Air menaruh harapan besar agar kongres ini bisa melahirkan keputusan yang bisa dijadikan pijakan untuk membangun masyarakat yang berbudaya tinggi, yang merupakan predikat yang pernah kita raih pada waktu lalu," tegas Ardika.

Bukan pelat merah

Mengenai tuduhan dari sege-lintir pihak bahwa Kongres Kebudayaan V ini masih merupakan kongres pelat merah, yang artinya diikuti para birokrat, salah satu panitia pengarah kong-

res, Putu Wijaya, menyatakan bahwa kecurigaan dari masyarakat terhadap pemerintah memang masih kuat.

"Tidak apa-apa curiga, toh ini bagian dari dinamika. Tetapi, jangan lantas hanya bisa curiga karena ini tidak memberikan kontribusi apa-apa," tegas Putu.

Sementara itu, panitia pengarah yang lain, Mudji Sutrisno menyatakan Kongres Kebudayaan I hingga V selalu terjadi tarik-menarik antara masyarakat dan pelat merah. Tetapi, kalau kita benar-benar mau maju dan demi kepentingan bangsa, kita harus meninggalkan semua itu.

"Saya meninggalkan tarik-menarik itu, dan duduk dalam panitia pengarah demi kepentingan bangsa."

Putu dan Mudji menyatakan, bahwa posisi birokrat dalam kongres ini hanya sebagai fasilitator atau *organizing committee* (OC). Sementara apa-apa yang terjadi di dalamnya, sepenuhnya diserahkan kepada panitia pengarah yang terdiri dari para budayawan dan cendekiawan.

"Keikutsertaan pemakalah seperti Goenawan Mohammad, Mochtar Pabottingi, Dawam Rahardjo, tokoh-tokoh agama, dan elemen bangsa yang lainnya, menunjukkan orang-orang yang berpikir untuk kepentingan bangsa bukan hanya bisa mengkritik dan curiga, tetapi ikut serta memikirkan bangsa."

Sementara itu, hari ini (Senin, 20/10) pemerintah akan memberikan anugerah kesenian kepada enam seniman, yaitu Wisran Hadi (sastrawan asal Sumatra Barat), Hj Siti Maryam (penari asal NTB), Ny Suharni Sabdowati (dalang asal Jawa Tengah), (alm)

H Mawardi Rivai (sastrawan/
budayawan asal Kalimantan Ba-
rat); Retno Maruti (penari asal Ja-
karta), dan Budiyati Adiyogya
(produser/penulis skenario asal
Jakarta). (Daf/Alw/B-2)

Media Indonesia, 20 Oktober 2003

'Bangsa yang Diazab'

Indonesia saat ini (mungkin) berada dalam posisi sebagai negeri yang sedang diazab Tuhan. Ada ancaman terorisme, utang yang menggunung, dan kondisi bangsa yang kusut masai.

Sastrawan Taufiq Ismail, lewat puisi *Rindu pada Stelan Jas Putih*, bertutur tentang rasa kehilangan pada Bung Hatta, tokoh bangsa yang lahir di Bukittinggi. Rasa kehilangan yang muncul saat ia malu sebagai orang Indonesia. Malu, karena bangsa ini mengalami cobaan Tuhan, lalu diazab.

Mengulas puisi itu, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, I Gede Ardika, mengatakan bangsa ini harus kuat dan punya jati diri, membuat konsep kebudayaan yang jelas. Ini penting, agar bangsa ini bermartabat dan bisa keluar dari situasi buruk yang sedang dihadapi.

"Di satu sisi kita harus memelihara nilai-nilai bangsa yang sudah menjadi jati diri, di sisi lain kita dihadang oleh globalisasi," ujarnya se usai membuka Kongres Kebudayaan V di Bukittinggi kemarin.

Menurut Ardika, jati diri bangsa tidak bisa dipisahkan dari budaya bangsa itu sendiri. "Kebudayaan sebuah bangsa merupakan roh dari bangsa itu," katanya. Tinggi rendahnya budaya suatu bangsa sangat ditentukan oleh tinggi rendahnya martabat bangsa tersebut di mata bangsa lain.

Ardika melemparkan "bola panas" bahwa Indonesia saat ini sedang mengalami krisis

budaya. "Tapi benarkah demikian?" katanya. Pertanyaan itu, menurut dia, bisa terjawab kalau peserta kongres berusaha menjawabnya. "Semua komponen bangsa punya harapan besar pada hasil kongres ini," katanya.

Pada kongres ini, pemerintah berharap bisa mengubah posisi nilai-nilai luhur bangsa, yang semula hanya menjadi buah bibir, menjadi perilaku bangsa. "Dengan demikian barulah kita mempunyai jati diri dan martabat yang semestinya," katanya.

Kongres yang dihadiri sekitar 700 peserta tersebut digelar 19 hingga 23 Oktober 2003. Kongres ini diperkaya dengan kegiatan lokal berupa Pesta Budaya Bukittinggi (Pedati). Juga, Festival Nasional Seni Pertunjukan 2003 di Auditorium STSI Padang Panjang, 20 kilometer dari Bukittinggi ke arah selatan.

Sehari sebelum pembukaan, sebanyak 300 penari tampil memperkaya kongres yang sudah 12 tahun tak dilaksanakan itu. Para penari diambilkan dari pelajar SLTP dan SMU se-Bukittinggi.

Pada acara pembukaan di Balai Sidang Hatta, kemarin, juga diserahkan Penghargaan Hadiah Seni pada sejumlah budayawan dan sastrawan. Mereka yang menerima adalah Wisran Hadi, Hj Suharni Sabdowati, Hj Siti Maryam, H Mawardi Riva'ie (alm), Retno Maruti dan Budiyati Abiyoga. Mereka dinilai telah berjasa menaikkan citra bangsa lewat kiprah dan karyanya. ■ rui

Enam Seniman Dapat Anugerah Seni

PEMERINTAH Republik Indonesia melalui Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata memberikan beberapa penghargaan kepada enam seniman/budayawan di sela-sela Kongres Kebudayaan V, kemarin. Penghargaan yang diberi nama Anugerah Seni itu diberikan kepada mereka yang dinilai telah berjasa dalam membina, mengembangkan, dan melestarikan kesenian dan kebudayaan Indonesia. Berikut keenam profil penerima anugerah itu.

WISRAN HADI (sastrawan, Sumatra Barat). Lahir di Padang, 27 Juli 1945. Menyelesaikan pendidikan terakhir di Akademi Seni Rupa Indonesia (ASRI) pada 1969, jurusan seni lukis. Namun, ketika kembali ke Padang, tidak ada yang jual alat-alat lukis. "Harus membeli ke Medan, dan mahal sekali. Akhirnya saya menulis saja," tuturnya, kemarin.

Wisran telah menulis banyak cerita dan lakon, di antaranya lakon *Sakuntala* yang dipentaskan di Kuala Lumpur pada 2001. Mengenai penghargaan seni yang diterimanya, dosen penulisan kreatif Akademi Seni Kebangsaan Malaysia ini berkomentar, "Saya tidak mengerti mengapa saya menerima, sebab banyak senior atau orang lain yang lebih pantas."

HJ SITI MARYAM (penari, Nusa Tenggara Barat). Lahir di Bima, NTB, 13 Juni 1927. Lulus dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (lulus 1960). Ia belajar menari sedari kecil di Keraton Bima, NTB. Hinga beranjak remaja, ia terus memperdalam tari. Setelah dewasa, selain belajar menari, ia pun menjadi guru dan pembimbing tari, ikut melestarikan kesenian klasik, ter-

utama musik dan tari tradisi yang hampir punah. Ia memberi pelajaran menari, di sanggar Tari Pajumonca, Mataram. Selain sebagai seniman, Siti Maryam juga mengabdikan diri kepada negara melalui jalur pemerintahan.

HJ SUHARNI SABDOWATI (dalang wayang purwa/kulit, dari Jawa Tengah). Lahir di Sragen, Surakarta, Desember 1936. Ia murid wanita satu-satunya dalang (alm) Ki Narto Sabdo. "Setiap murid Ki Narto Sabdo yang dinyatakan lulus akan diberi nama tambahan Sabdo," katanya, kemarin. Ia menyukai pewayangan dari kecil, tetapi baru mendapat kebebasan dari keluarga untuk menjadi dalang pada usia 30 tahun. "Keunikan saya, kalau pentas suaranya seperti laki-laki, saya murni perempuan, anak saya 4 dan cucu saya 16 orang," tutur dalang yang paling menyukai lakon *Kresna Duta* dan *Kunti Duta* itu.

RETNO MARUTI (penari, Jakarta). Lahir di Solo, 8 Maret

1947. Ia belajar menari dari kecil di sekolah-sekolah dan sanggar-sanggar. Ia mendirikan kelompok tari Pandecwara di Jakarta. Retno adalah penari koreografer yang andal menggabungkan berbagai bentuk tari menjadi bentuk dan ciri tariannya. Ia selalu melakukan inovasi atas tradisi yang bersumber dari penalaran dan logika, misalnya dalam lakon *Nyi Roro Mendut* yang sering kali digambarkan oleh seniman

lain sudah tua renta dan berpostur kurang bagus, dalam Retno digambarkan tidak seburuk yang digambarkan seniman lain. Inovasi dalam gerak itu dikombinasikan dari berbagai tari yang dipelajarinya. "Saya bersyukur mendapat penghargaan ini."

BUDIYATI ABIYOGA (produser/penulis naskah cerita dan skenario, Jakarta). Lahir di Sumenep, 1 Desember 1944. Sebelum akhirnya merambah ke berbagai bidang dalam film, ia mengawalinya di jalur produksi pada 1983 dalam asuhan Buston Nawawi. Garapannya antara lain film *Naga Bonar*, *Hati yang Perawan*. Budyati kemudian dikenal sebagai produser yang memproduksi film-film idealis. Dialah yang memproduseri film Putu Wijaya (*Cas Cis Cus*, dan *Plong*), juga mengorbitkan Garin Nugroho melalui *Cinta dalam Sepotong Roti* dan *Surat untuk Bidadari*. Pada 2000, Budyati mendirikan Pusat Pendidikan Film dan Televisi.

(Alm) **H MAWARDI RIVAIE** (budayawan/sastrawan, Kalimantan Barat). Lahir di Sambas, Kalimantan Barat, 10 Juni 1942 dan wafat di kota yang sama, 23 Desember 2002. Ia hanya menyelesaikan sekolah setingkat SMA.

Namun, ia kaya dengan pengalaman dan pengetahuan. Di Kalimantan, Mawardi dikenal sebagai sejarawan, sastrawan, penyair, sekaligus budayawan. Menurut Zulkarnaen, salah seorang putranya, Mawardi telah menulis lebih dari 30 buku, termasuk kamus *Bahasa Sambas*. Ia menulis sejarah *Peristiwa Mandor*, tentang pembantaian cendekiawan Kalbar dan kerabat Kerajaan Pontianak oleh Jepang, juga menulis buku *Pangeran Indra Mahkota* (cerita raja Brunei, satu-satunya raja Brunei yang makamnya ditemukan di Sambas oleh Mawardi). (Daf/Alw/B-2)

Indonesia Butuhkan Pusat Kebudayaan

Inggris punya British Council. Jerman punya Goethe Institute. Kita tidak punya lembaga seperti itu.

BUKITTINGGI — Di tengah kekhawatiran Kongres Kebudayaan akan menghasilkan hal-hal yang abstrak, kemarin berkembang ide tentang pembentukan Pusat Kebudayaan Indonesia. Gagasan tersebut bergulir pada awal kongres yang dibuka Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, I Gede Ardika, Senin (20/10), di Bukittinggi, Sumatra Barat.

Budayawan yang juga sutradara, Garin Nugroho, mengatakan gagasan tersebut lahir karena hingga saat ini belum ada lembaga yang menjadi wadah untuk membicarakan masalah-masalah kebudayaan. Berbeda dengan sektor lain, seperti penyiaran yang sudah punya Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), atau di bidang politik terdapat Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Kita membutuhkan lembaga semacam Pusat Kebudayaan Indonesia itu sebagai bagian dari strategi diplomasi kebudayaan kita," kata Garin kepada *Republika*.

I Gede Ardika mengakui secara teknis pemerintah memerlukan Pusat Kebudayaan Indonesia di dalam dan di luar negeri. Di luar negeri, katanya, lembaga ini akan

berkonsentrasi pada pengenalan bahasa Indonesia, perpustakaan, seni, dan objek wisata.

Menurut sejarawan Anhar Gonggong, Pusat Kebudayaan Indonesia diperlukan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. "Inggris punya British Council, Jerman punya Goethe Institute, kita tidak punya lembaga seperti itu. Menurut saya kita memerlukan," kata Anhar.

Di dalam negeri, katanya, Pusat Kebudayaan bisa menjadi wadah berdialog untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kebudayaan. Khususnya, untuk merekatkan budaya dari etnis yang berbeda-beda. Sedangkan di luar negeri Pusat Kebudayaan menjadi sarana promosi Indonesia.

Ketua Utusan Provinsi Jawa Barat dalam kongres tersebut, Yayat Hendayana, menyatakan lembaga tersebut dibutuhkan sebagai sarana berdialog dan menyalurkan pendapat tentang persoalan yang menyangkut budaya. "Seperti sekarang, apakah masalah yang menimpa Indonesia akarnya adalah budaya? Kita kan perlu wadah untuk membicarakan itu," ungkapnya.

Soal bentuk Pusat Kebudayaan nantinya, Garin Nugroho mengidealkan seperti KPU atau KPI. Lembaga ini nantinya akan berada di bawah presiden. "Kalau memang terbentuk, mungkin akan memakan waktu yang lama. Bentuknya ada semacam *board*. Yang penting pertanggungjawabannya

transparan," tuturnya.

Yayat berharap lembaga tersebut nantinya independen. "Soal independensi itu merupakan hal yang mutlak."

Sastrawan Taufik Ismail, kendati memandang Pusat Kebudayaan penting, mengatakan lembaga semacam ini sulit dalam operasionalnya jika mencakup persoalan yang sangat luas. "Saya pikir kalau Pusat Kesenian Indonesia lebih pas. Asal jangan disingkat jadi PKI," kata Taufik yang memukau peserta saat tampil membacakan puisi pada saat acara pembukaan.

Ide pembentukan Pusat Kebudayaan kemarin mencuat dalam sidang pleno pertama. Bahkan, ada seorang peserta yang mengusulkan agar dibuat undang-undang untuk memperkuat posisi lembaga itu nantinya.

Sebelum kongres berlangsung, bergulir kekhawatiran hebat besar di Bukittinggi hanya akan menghasilkan hal-hal yang sifatnya abstrak. Anggota Panitia Pengarah, Toety Heraty, mengakui adanya kekhawatiran itu mengingat tema kongres, yakni "Konsep, Kebijakan, dan Strategi Kebudayaan Indonesia" sangat luas. Namun, menurut dia, tema besar itu diharapkan dapat terfokus dalam diskusi-diskusi di kongres nantinya.

Harapan agar kongres menghasilkan hal yang konkret sebagian juga dikarenakan keinginan agar acara kali ini tidak mengulangi Kongres Kebudayaan IV di Jakarta.

Kongres tersebut sempat diwarnai kongres tandingan dan dinilai tidak membuahkan hasil konkret. Berbeda dengan kongres sebelumnya, kongres I di Magelang (1948) menghasilkan Lembaga Kebudayaan Indonesia. Kongres II di Bandung (1951) menghasilkan Badan Musyawarah Kebudayaan Nasional. Sedangkan kongres IV di Solo (1954) menghasilkan pendirian Balai Budaya/Gedung Kesenian. ■ sbt

Republika, 21 Oktober 2003

Martabat Bangsa Ditentukan Kebudayaan

BUKITTINGGI (MEDIA): Tinggi rendahnya martabat bangsa Indonesia di mata dunia internasional sangat ditentukan kebudayaan daerah dan nasional sebagai roh serta jati diri masyarakat negeri ini.



"Roh dan jati diri itu tergantung dari bagaimana masyarakat memperlakukan budaya itu sendiri dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai individu, warga negara, dan bagian dari masyarakat internasional," ujar Menteri Kebudayaan dan Pariwisata I Gede Ardika saat membuka Kongres Kebudayaan Nasional V di Bukittinggi, kemarin, (bukan Minggu (19/10), seperti yang diberitakan *Media* sebelumnya). Kongres Kebudayaan V di Bukittinggi ini diikuti 750 peserta dari seluruh Indonesia.

Menurut Ardika, perlakuan masyarakat terhadap budaya itu diwujudkan dengan pelaksanaan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam budaya bangsa, yang tidak sekadar menjadi buah bibir. Tetapi tercermin dalam perilaku kehidupan dan menghayati kebenaran masalah masyarakat.

Dalam hal ini, tambahnya, budaya tak benda (*intangible culture*) menjadi sangat penting. Budaya tak benda pada hakikatnya merupakan roh dari semua produk kegiatan budaya yang berupa nilai-nilai kehidupan manusia. Karena itu, internalisasi nilai-nilai itulah yang harus diusahakan sekuat tenaga.

Ardika mengatakan, untuk menginternalisasikan nilai-nilai tersebut maka bangsa ini harus benar-benar menghayati kehidupan sebagai bangsa yang berkaitan dengan kebudayaan seba-

gai penuntun terbentuknya sistem yang dibangun bersama oleh komponen-komponen masyarakat.

Ia juga menyebutkan kongres ini akan membahas usulan pembentukan pusat kebudayaan Indonesia sebagai ujung tombak diplomasi kebudayaan.

"Pusat kebudayaan Indonesia itu akan memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat luar negeri, juga dalam negeri, seperti India punya Jawaharlal Nehru Center, Jerman Goethe Institute, Prancis CCF, seperti itulah kira-kira," katanya.

Pusat kebudayaan itu, lanjutnya, bersifat independen karena mengarah kepada kekuatan masyarakat. "Intinya lebih kepada nuansa budaya yang lebih bebas. Bentuk organisasinya nanti kita bicarakan," ujarnya. Namun, dia tidak menargetkan kapan pusat kebudayaan Indonesia akan terbentuk. "Di kongres ini gagasan pembentukannya dimatangkan," katanya.

Budaya amuk

Sosiolog Ignas Kleden, yang tampil kemarin dalam Sidang Pleno II, menepis anggapan bahwa bangsa Indonesia memiliki budaya amuk. "Kebudayaan tak memiliki watak yang esensial, itu tergantung proses. Tak ada watak amuk dalam komunitas-komunitas kita," katanya.

Soal munculnya ketidakpuasan daerah di mana-mana, menu-

rutnya, salah satunya disebabkan selama ini daerah lebih banyak melayani kepentingan-kepentingan pusat dan selalu berada dalam represi politik. "Kita perlu waktu untuk menggunakan kebebasan agar lebih berguna," ujarnya.

Senada dengan Ignas Kleden, I Gede Ardika juga menepis pandangan kekerasan antaranak bangsa karena watak amuk. "Itu berkaitan antara satu dan yang lain," ujarnya.

Menurutnya, pertikaian itu hanya letupan-letupan sesaat dalam proses kehidupan. "Kalau dilihat secara menyeluruh, masyarakat kita tetap santun. Jangan digeneralisasi citra bangsa Indonesia seperti itu, itu hanya segelintir saja yang berbuat seperti itu," katanya.

Pada sisi lain, Ardika mengatakan kalau politik tidak memiliki budaya maka akan berbahaya. "Politik harus mendasarkan pada nilai-nilai budaya bangsa, seperti kebersamaan, kekeluargaan, itu yang harus dikedepankan. Nilai-nilai itu ada pada suku bangsa Indonesia," katanya.

Kerapuhan nilai-nilai budaya bangsa, lanjutnya, karena ada interaksi antara lokalitas, nasionalitas, dan globalitas.

"Jika kita tidak kuat dengan jati diri, akan goyah. Hal ini salah satunya yang menjadi pembahasan dalam kongres. Bagaimana mekanismenya, teknik operasional di bidang politik, ekonomi, misalnya, bagaimana perilaku yang harus ditunjukkan," katanya.

(Alw/Daf/GT/B-2)

Kongres Kebudayaan V di Bukittinggi Dibahas, Pembentukan Pusat Kebudayaan Indonesia

BUKITTINGGI, KOMPAS — Hari kedua Kongres Kebudayaan V di Bukittinggi (Sumatera Barat), Selasa (21/10), antara lain membahas gagasan pembentukan Pusat Kebudayaan (Pusaka) Indonesia. Pusaka Indonesia diharapkan menjadi salah satu hasil konkret dari kongres yang berlangsung tiga hari dan akan ditutup hari Rabu ini.

Pemaparan tentang pendirian Pusaka Indonesia disampaikan Taufik Rahzen, sebagai pengagas mengenai pentingnya sebuah lembaga yang akan menjadi sarana diplomasi budaya yang aktif, di samping untuk menata strategi presentasi dan representasi kebudayaan Indonesia pada tataran global.

Taufik menyatakan, pembentukan Pusaka Indonesia tidak bergerak dari titik nol. Sejak masa awal Republik, Presiden Soekarno memimpikan kawasan Monumen Nasional (Monas) sebagai ruang publik yang dapat mencerminkan identitas bangsa. Museum Nasional, Galeri Nasional, dan Wisma Seni (yang sekarang menjadi Kantor Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata) ingin dijadikan kompleks kebudayaan.

Adapun Mohammad Hatta menganggakan Perpustakaan Nasional yang berada di dekat Istana Wakil Presiden sekarang, yang diharapkan menjadi *resource center* perpustakaan, rujukan, dan peresmian tradisi intelektual Indonesia. "Rencana pemerintah untuk menyinergikan pengelolaan ketiga institusi kebudayaan tersebut, mungkin ditambah dengan Gedung Sapta Pesona, dapat menjadi modal

awal untuk tempat maupun jaringan kerja," ujarnya.

Ia menawarkan agar Pusaka Indonesia berada langsung di bawah presiden, tetapi anggotanya dipilih dan dipertimbangkan melalui mekanisme publik. Bukan seperti Galeri Nasional, Museum Nasional, Perpustakaan Nasional, dan Pusat Bahasa, yang hanya sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas). Dengan demikian, akan berbentuk *quasi government* (semipemerintah), nondepartemen, bersifat independen, dan memiliki akuntabilitas publik yang kuat.

Mengenai kekhawatiran sementara kalangan bahwa Pusaka Indonesia akan birokratis dan menjadi sarang korupsi jika melibatkan pemerintah, menurut Taufik hal itu hanyalah kegamangan independensi. "Stigma ini jangan diwariskan ke mana-mana karena akan mengekang ruang gerak kita sendiri. Banyak yang menganggap tidak independen kalau bekerja sama dengan pemerintah, tetapi dana dari luar negeri dianggap independen," tutur Taufik.

Buat terencana

Mohamad Sobary yang ikut

membahas rencana pembentukan Pusaka Indonesia itu pada prinsipnya sepakat dengan Taufik. Ia berharap lembaga kebudayaan itu tidak hanya didukung sepenuhnya oleh pemerintah, melainkan juga dari pihak-pihak yang peduli kebudayaan. Kegiatan-kegiatan tidak boleh impulsif, melainkan harus terencana dengan baik.

Kepala Museum Nasional Endang S juga menyatakan dukungannya. Menurut dia, Atase Kebudayaan dan Pendidikan yang ada di luar negeri tidak mampu mengemban fungsinya dalam memberikan informasi tentang kebudayaan Indonesia kepada negara lain. "Saya sering mendengar banyak orang yang datang ke kedutaan besar Indonesia di luar negeri tidak mendapatkan informasi yang cukup tentang kebudayaan Indonesia," kata Endang.

Taufik menganggakan jika rencana itu terealisasi, Pusaka Indonesia paling tidak akan didirikan di lima negara pada masing-masing benua, yakni di Beijing (Asia), Canberra (Australia), Paris (Eropa), Washington DC (Amerika Serikat), dan Mesir (Afrika). Negara-negara ini dipilih berdasarkan pertimbangan strategis kawasan.

Pusaka Indonesia akan memiliki dua program utama, yaitu Sasana Seni Soekarno untuk ekshibisi dan seni pertunjukan serta Pusaka Hatta untuk menyimpan koleksi perpustakaan. "Soekarno sangat peduli terhadap kesenian. Hatta senantiasa menekankan pen-

tingnya tradisi intelektual," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa untuk ke luar negeri, di samping sebagai sarana diplomasi budaya, Pusaka Indonesia akan merangsang dan memfasilitasi kajian Indonesia, mendorong kerja sama budaya antarnegara, pencitraan kembali bangsa dan tumbuhnya saling percaya melalui bahasa budaya. Di dalam negeri, lembaga itu berfungsi sebagai pusat data dan informasi budaya serta sebagai struktur mediasi jaringan lembaga-lembaga kebudayaan yang ada, khususnya dalam diseminasi informasi dan kerja sama budaya. Secara struktural, lembaga berfungsi untuk mempertimbangkan dan mengawal kebijakan budaya yang berorientasi publik dan negara. (LAM)

Kompas, 22 Oktober 2003

Kongres Kebudayaan V Dikhawatirkan tidak Hasilkan Rekomendasi Konkret

BUKITINGGI (Media): Sejumlah peserta Kongres Kebudayaan (KK) V di Bukittinggi, Sumatra Barat (Sumbar) pesimistis, kongres yang menelan dana Rp4,2 miliar bisa menghasilkan rumusan yang matang tentang konsep, kebijakan, dan strategi kebudayaan.

Padahal, setiap penyelenggaraan Kongres Kebudayaan, selalu melahirkan rekomendasi kepada pemerintah dan legislatif yang kemudian diimplementasikan secara konkret. Sebagai contoh, KK I (1948) melahirkan Lembaga Kebudayaan Indoensia, KK II (1952) melahirkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, KK III (1956) melahirkan Lembaga Bahasa, dan KK IV meskipun berjalan sebagai kongres pelat merah, berhasil menggaungkan desentralisasi atau otonomi daerah.

Seniman I Nyoman Nuarta mengatakan, masalah kebudayaan itu luas, dalam waktu yang singkat selama tiga hari (20-23 Oktober) tidak mungkin terumuskan secara tuntas dan matang mengenai arah dan tujuan pembangunan kebudayaan nasional. "Tidak akan matang, lagi pula masih banyak soal yang belum tergarap," katanya, kemarin.

Meskipun banyak masalah yang belum dibahas, pematung ini berharap rumusan kongres tidak lagi berada pada tataran abstrak, tetapi konkret.

Senada dengan Nuarta, budayawan Sumbar Edy Utama dan penyair Rusli Marzuki Saria mengatakan, pesimistis karena didasarkan belum tuntasnya perdebatan-perdebatan yang mun-

cui dalam diskusi, karena keterbatasan waktu.

Namun, Edy menolak jika kongres ini dikatakan mubazir. "Tidak mubazir, Kongres Kebudayaan ini penting, pada forum apalagi para budayawan dari berbagai daerah bisa berdiskusi," kata Edy.

Meskipun tidak menghasilkan suatu rumusan yang matang dan konkret, setidaknya kongres ini, lanjutnya, bisa membongkar wacana realitas objektif yang berkembang di masyarakat sekarang ini.

Menanggapi pesimisme tersebut, salah seorang panitia pengarah, Taufik Rahzen, mengatakan kongres ini memang tidak akan dipaksakan menghasilkan suatu rumusan yang matang. "Yang penting, ada ruang negosiasi antara budayawan dan pemerintah," katanya.

Sementara itu, dalam sidang ke-25 tentang *Trauma, Rekonsiliasi, dan Kesadaran Sejarah*, budayawan Roch Basuki Mangoenpoerojo mengulirkan revolusi kebudayaan Indonesia. Caranya, mengubah dengan cepat budaya terjajah menjadi budaya merdeka. "Semuanya harus dimulai dengan pola pikir,"

katanya.

Basuki mengusulkan tiga hal yang tak boleh dilakukan; tidak melawan siapa-siapa, tidak menjatuhkan siapa pun, dan tidak me-

rusak apa pun. Di samping itu, ada tiga keharusan yang harus dilalui dalam revolusi. Tiga strata yang berkesinambungan secara sistemik itu, yakni strata peranti pikir, peranti keras, dan peranti lunak.

Oleh karena itu, sambungnya, bangsa ini mengharapkan cendekiawan untuk merevolusi peranti pikir.

Kurang matang

Penyelenggaraan KK V tampak kurang rapi. Indikasinya, banyak acara yang tidak tepat waktu atau tidak terlaksana. Konferensi pers pada hari Sabtu (18/10) yang rencananya akan diselenggarakan pukul 10.00 dan 13.00 WIB, akhirnya hanya terseenggara sekali, yaitu pukul 17.00 WIB. Bahkan, ada pembicara yang seharusnya hadir membacakan makalah, tidak bisa hadir karena mereka menerima pemberitahuan yang terlalu mendesak.

Pemakalah yang tidak hadir adalah Frans Magnis Suseno dan Mochtar Pabbotingi. Keduanya telat dimintai konfirmasi oleh panitia penyelenggara.

Kekurangrapian ini terjadi karena reposisi *organizing committee* (panitia pelaksana) dari yang semula ditangani Deputi Bidang Pelestarian dan Pengembangan Budaya — Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata (BP Budpar) IGN Anom, dialihkan ke Deputi Bidang Seni dan Film, Kementerian Budpar, Sri Hastanto. Perpindahan ini terjadi setelah instansi BP Budpar dilikuidasi ke tubuh Kementerian Budpar. Padahal, panitia KK V saat itu sudah melakukan proses kerja. Seharusnya, peleburan ini tidak membuat

kepanitiaan menjadi kacau.
 "Memang sedikit terjadi kebingungan saat terjadi peleburan BP Budpar ke Kementerian Budpar. (Alw/Daf/B-2)



AMAZON

SENYUM KEMENANGAN

FINAL kontes model kelas dunia, Elite Model Look kembali digelar di Hotel JW Marriott, Senin (20/10) malam. Model asal Semarang, Paula Verhoeven (tengah) berhasil meraih juara pertama. Sedangkan posisi *runner-up* pertama dan kedua berhasil diraih dua model asal Medan, Sisvi (kanan) dan Vidoreen Joe.

Media Indonesia, 22 Oktober 2003

Perkara Identitas dan Integrasi Indonesia

Politik identitas tidak tepat untuk Indonesia kini karena cenderung menciptakan politik tertutup di dalam setiap kelompok.

BUKITINGGI — Kebetulan sejarah ternyata ikut membentuk identitas Indonesia seperti sekarang ini. Di sisi lain, persoalan identitas ini secara lebih lanjut cenderung berkembang untuk melahirkan politik identitas yang tidak tepat untuk Indonesia saat ini, karena cenderung menciptakan politik yang tertutup.

Topik tentang identitas inilah yang terangkum dari dua pembicara utama dalam Sidang Pleno kedua di hari pertama Kongres Kebudayaan V di Bukittinggi, Sumatera Barat, Senin (20/10). Dalam sidang pleno tersebut, tampil dua pembicara, Goenawan Mohamad dan Ignas Kleden, yang keduanya sama-sama membicarakan identitas Indonesia.

Seharusnya masih ada satu pembicara lagi, yaitu Nirwan Ahmad Arsuka, namun redaktur di jurnal budaya *Bentara* itu belum tiba di Bukittinggi pada hari itu. Akhirnya oleh moderator, Prof. Dr. Toeti Heraty yang juga Ketua *Steering Committee* (SC) Kongres ini, mengundang ahli ekonomi Prof. Mubyarto untuk membicarakan soal ekonomi dan pendidikan—tema yang terpencil dari pembicaraan Goenawan dan Ignas.

Pada kesempatan pertama, Goenawan membicarakan salah satu hal yang turut membentuk Indonesia, yaitu kebetulan seja-

rah. Hanya karena Brunei Darussalam dan Singapura bukan jajahan Belanda, maka kedua wilayah itu tak menjadi bagian Indonesia. Lantas, apakah identitas Indonesia itu?

Menurut Goenawan, ada lima perkara yang menyebabkan Indonesia sulit dibayangkan sebagai sebuah entitas yang lahir dan tumbuh secara alamiah, atau takdir. Perkara pertama adalah pengambilalihan Timor Timur secara militer yang memperlihatkan sisi lain dari Indonesia.

Syahdan, Bung Hatta dan teman-temannya melahirkan terbentuknya Indonesia secara momen etis nasionalisme, yaitu ketika satu atau sekelompok manusia menerima, menjelang, dan menyalami manusia yang—berbeda, ketika mereka mengulurkan tangan dan menjabat dunia yang—lain. Hal ini menjadikan nasionalisme yang dirintis Hatta dan Soekarno serta generasi saat itu menghasilkan universalitas—berbeda dengan nasionalisme tertutup ala kaum Nazi Jerman dan Fasis Jepang.

Nasionalisme tertutup ini sebenarnya juga dialami Indonesia dengan alegori "sapu lidi" dan "taman mini". Alegori pertama mencerminkan imajinasi totaliter yang memaksakan asas tunggal sebagai kekuatan represif untuk mengikat keseragaman. Alegori kedua telah membuat keberagaman menjadi kebinekaan yang membeku dan menjadi identitas budaya yang beku dan dijadikan ukuran semata, namun melupakan masalah kelas dan ekspresi sosiologis yang lain.

Kedua alegori inilah yang menyebabkan laku represif seperti pengambilalihan Timor Timur oleh Orde Baru yang telah mengubah Indonesia tak lagi seperti ketika pertama kali dibentuk pa-

da 1945. Indonesia telah menjadi komunitas yang dipaksakan.

Pemerintahan represif Orde Baru inilah yang mendorong perkara kedua, yaitu dorongan pemisahan diri dari republik, dan perkara ketiga, yaitu Indonesia tak mudah lagi dibayangkan sebagai sebuah entitas alamiah karena metode pembangunan ekonomi nasional telah membuat pemerintah merencanakan sesuatu tanpa konsultasi dengan masyarakat yang hidup di dekat akar padi.

Indonesia yang sentralistis inilah yang mendorong perkara keempat, yaitu kendurnya ikatan kesetiaan kepada kesatubangsaan. Perkara kelima adalah kehadiran negara dari salah satu anasir dwi tunggal negara-bangsa. Ketika gagasan negara menjadi penting dalam demokrasi terpimpin, ketika itulah semua usaha swasta asing diatur negara, menyebabkan korupsi dalam skala luas. Negara yang represif, rentan, cerewet, dan bodoh telah mengekalkan praktek kotor ini.

Lima perkara yang ditunjukkan Goenawan ini memperlihatkan bagaimana identitas Indonesia telah berubah sedemikian jauh dari niat semula ketika negara ini terbentuk. Lantas, masihkah ada identitas asli dari Indonesia itu sendiri?

Menurut Ignas, identitas bukanlah suatu keadaan yang final tapi sifat yang diperbarui kembali, kondisi yang selalu disesuaikan dan dinegosiasikan terus-menerus. "Dalam bahasa antropologis, kita mengatakan bahwa identitas bukanlah suatu esensi, wujud yang tetap dan abadi, tapi sangat tergantung pada proses-proses yang menciptakan dan menghentukannya," kata Ignas.

Selain kondisi yang selalu ber-

ubah, identitas juga bukanlah bentukan yang ditentukan keadaan obyektif atau pandangan orang lain, tetapi ditentukan oleh pandangan atau yang dilakukan diri sendiri. Masalahnya, persepsi baku di dalam kesadaran manusia Indonesia sebagai bangsa sangat lemah dan kurang berusaha mencari tahu identitas sendiri dan lebih memilih hidup dalam berbagai klise yang sudah ada.

Padahal, kesadaran akan identitas ini diperlukan karena berpengaruh terhadap integrasi dan disintegrasi. Ada dua sisi dalam hubungan identitas dengan integrasi. Sisi pertama, integrasi dapat terbentuk dan dapat dibayangkan jika identitasnya mendukung, seperti kesamaan bahasa, sistem nilai budaya, cita-cita politik, orientasi, agama, dan pandangan hidup.

Di sisi lain, integrasi yang lebih luas hanya mungkin terben-

tuk apabila sekelompok orang menerobos identitasnya semula dan mengambil jarak dari segala apa yang selama ini dianggap membentuk watak dirinya dan watak kelompok. "Jadi, perkembangan sosial yang membuat seseorang sedikit menjauh dari identitasnya seringkali menjadi kesempatan yang mendorong terbentuknya integrasi yang lebih luas," ujar Ignas.

Mengedepankan identitas juga tidak seharusnya menjadi titik tolak pengelompokan politik, tapi justru harus menjadi hasil akhir dari pengelompokan politik. "Politik identitas tidak terlalu tepat untuk Indonesia saat ini karena cenderung menciptakan politik yang tertutup di dalam setiap kelompok," kata Ignas lebih lanjut.

Politik tertutup ini terjadi ketika birokrasi nasional menjadi birokrasi identitas. Padahal kita tahu bahwa birokrasi adalah institusi yang mestinya bersifat formal dan harus menjadi mesin yang melayani berbagai kepentingan siapa saja sejauh ia memenuhi prosedur yang disyaratkan.

Jika identitas menjadi satu-satunya takaran, birokrat hanya memperhatikan siapa yang melaksanakan, apakah dari kelompok sendiri, penganut agama yang sama, atau penduduk asli atau pendatang. Di sinilah identitas tak seharusnya menjadi satu-satunya absolut dalam pengambilan keputusan penting di negara majemuk Indonesia.

● I dewi ria utari

Koran Tempo, 22 Oktober 2003

KONGRES KEBUDAYAAN V

Pusat Kebudayaan Tidak Masuk Rekomendasi

BUKIT TINGGI - Kongres Kebudayaan V yang berlangsung di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, secara resmi ditutup Rabu (22/10) malam. Dari 16 pokok bahasan, 22 anggota tim perumus menyampaikan 18 butir rekomendasi. Sebagian besar rekomendasi adalah ide-ide usang dan mengundang kontroversi. Rekomendasi ini pun cenderung diragukan daya intrusinya.

Hasil rekomendasi yang dirumuskan oleh tim sebanyak 22 orang itu dianggap belum memuaskan banyak pihak. Gagasan pendirian Pusat Kebudayaan Indonesia (Puskin) yang pernah diangkat dalam prakongres Bali ternyata tidak masuk hitungan. Tanpa diduga, ide usang pembentukan Departemen Kebudayaan malah kembali mengemuka.

Kepada wartawan di Bukit Tinggi, Rabu (22/10), Ketua Tim Perumus, Toeti Herati bahkan mengaku tidak dapat menjawab mengapa Puskin gagal masuk dalam rekomendasi. Namun diakui, gagasan Puskin memang sempat dibahas sebagai materi dan beberapa pertemuan di Jakarta.

"Sewaktu kongres ini berlangsung, ada juga gagasan yang memfokuskan pembicaraan pada kebutuhan Puskin. Tetapi, kebutuhan lembaga seperti itu sudah tercantum dalam salah satu rekomendasi secara implisit," kata Toeti.

Hal serupa juga dikatakan oleh Ketua Panitia Sri Hastanto. Puskin masih menjadi proses bahasan yang terus bergulir. Hal itu disebabkan keberatan sejumlah pihak atas istilah nama yang digunakan. Puskin tidak masuk dalam rekomendasi karena diharapkan kelak banyak pihak

mencapai konsep yang lebih bulat.

Akan Dibahas

Seperti diberitakan sebelumnya, saat pembukaan kongres, Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata I Gede Ardika pernah mengatakan keinginannya untuk membangun Puskin. Ardika berharap gagasan Puskin akan dibahas dan mungkin menjadi rekomendasi karena masih berupa gagasan dan konsep.

Tetapi sebagai gambaran Puskin itu kurang lebih berfungsi seperti Goethe Institut (Jerman), CCF (Prancis), atau British Council (Inggris).

Ketika hasil rekomendasi kongres diumumkan Rabu (22/10), banyak pihak menganggap 18 butir rekomendasi hanya mencantumkan ide-ide usang dan kontroversial. Tim perumus yang beranggotakan 22 orang dinilai hanya melakukan identifikasi dan inventarisasi masalah. Butir-butir rekomendasi cenderung terlalu abstrak, dan mengada-ada. Tim perumus juga tak mampu menyebutkan strategi taktis yang akan ditempuh agar rekomendasi itu dapat terlaksana.

Beberapa butir rekomendasi itu adalah: pembentukan departemen kebudayaan (butir 15); penyelenggaraan kongres lima tahun sekali (butir 18); nikotin dan pornografi sebagai penyakit sosial (butir 8); kesadaran budaya (butir 6); dan deskralisasi tempat keagamaan (butir 12). Butir 18 tentang periode penyelenggaraan kongres dianggap kontradiksi dengan pernyataan Toeti Herati beberapa waktu lalu.

Toeti mengatakan, kongres kebudayaan muncul dari itikad kebutuhan dan tidak

akan menjadi formal berkala dan reguler. Sementara rekomendasi tersebut dinilai hanya menjabarkan tema-tema pokok bahasan kongres tanpa keberanian menyebut pengertian yang lebih tegas.

Pusat

Di pihak lain, Taufik Rahman mengaku rekomendasi tentang pembentukan departemen merupakan hasil suara mayoritas. Meskipun pada prinsipnya tidak setuju, Taufik memilih bersikap sportif. Dia sempat pula mengusulkan agar kebudayaan disatukan dengan lingkungan, bukan dengan pendidikan atau pariwisata.

"Saya tidak melihat urgensinya. Yang perlu dikawatirkan, di Indonesia, rezim manapun yang berkuasa belum tentu punya perhatian terhadap kebudayaan. Yang mengherankan pula, dari kongres pertama sampai kongres sekarang, usulan departemen kebudayaan selalu muncul. Uniknya lagi, gagasan itu tidak pernah terealisasikan," kata Taufik.

Mengenai gagasan Puskin yang gagal masuk rekomendasi, Taufik bisa memahami. Menurutnya, gagasan Puskin ditolak justru karena terlalu konkret. Padahal konsep Puskin masih mengundang polemik, apalagi jika masuk dalam rumusan. Di sisi lain, ada trauma yang masih melekat di kalangan budayawan. Alhasil istilah pusat sempat dianggap bagian dari isu sentralistik kekuasaan pemerintah dan dikooptasi negara. (U-5)

18 Rekomendasi Harus Ditindaklanjuti

KONGRES Kebudayaan V telah usai digelar. Penyelenggaraan dan eksistensi kongres ini sangat relevan dengan kondisi Indonesia saat ini, saat kita sedang melakukan reposisi nilai dan reformasi di berbagai sektor. Kongres menjadi sangat penting karena diselenggarakan sebelum Pemilihan Umum 2004, yang dan diharapkan rekomendasi kongres ini akan menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi pengambil keputusan politik yang menentukan maju mundurnya bangsa ini.

Terlepas dari segala kekurangannya, setelah 12 tahun mengalami masa stagnan, Kongres Kebudayaan (KK) akhirnya digelar kembali dengan menghasilkan 18 rekomendasi. Namun, ke-18 rekomendasi yang sangat penting itu hanya akan mubazir bila tidak ada tindaklanjutnya. Sebab, kita belum memiliki lembaga yang bisa melaksanakan hasil-hasil kongres. Berikut petikan wawancara wartawan *Media Doddi AF* dengan budayawan Taufik Rahzen yang aktif dalam kongres, baik sebagai panita pengarah, pemakalah, maupun panita perumus.

Bagaimana menurut Anda hasil-hasil KK V, apakah sudah menggambarkan kondisi kebudayaan Indonesia saat ini?

Rumusan yang ada, betapa pun, memantulkan apa yang terjadi di kongres. Setidak-tidaknya apa yang sementara ini mereka pikirkan. Rumusan itu seperti kertas litmus, yang menjadi ukuran, apakah asam apakah basa, situasi kita saat ini. Senang tak senang, kita diperlihatkan peta harapan dan keadaan kita saat ini.

Rumusan kongres ini terlalu 'njelimet', dan terlalu ingin mengakomodasi berbagai pemikiran. Tetapi, kenyataannya tidak bisa semua pikiran terakomodasi...

Memang, sebelumnya kita berharap sebanyak mungkin aspirasi dan pikiran bisa terjaring. Tetapi, kita membatasi pada enam belas tema yang mendesak. Tim perumus mencoba menggunakan standar isu, yang berkembang sejak temu budaya, dialog budaya, dan prakongres. Apa yang ada telah diantisipasi, meskipun

substansi dan materinya masih dalam perdebatan. Bahwa kelihatan *njelimet*, mungkin kita ingin merangkum banyak hal dalam bahasa yang singkat. Kita ingin memadatkan persoalannya dalam beberapa tanda. Tim perumus berusaha menangkap semua yang ada.

Bagaimana proses rumusan rekomendasi dibuat?

Setiap komisi didampingi dan dikawal oleh seorang moderator, yang merangkap perumus. Merekalah yang kemudian memilah dan memilih tema yang ada. Jadi, masing-masing rekomendasi muncul dari perdebatan dalam ruang diskusi. Bahwa kelihatannya sangat akomodatif, mungkin lahir dari keinginan meleraikan perbedaan yang ada. Hal-hal kontroversial dan masih dalam perdebatan, menjadi catatan, tetapi jangan sampai terjadi *fait a compli* terhadap rumusan yang ada. Misalnya tentang isu Pusat Kebudayaan (Pu: aka).

Hal apa yang sebetulnya mendesak perlu dibicarakan dan tindakan?

Banyak hal mendesak. Yang utama, kita harus mengetahui apa yang kita hadapi, di mana kita berada, dan kapan melakukan tindakan. Perubahan tidak dapat dilakukan dengan menggebrak meja atau memperpanjang-panjang argumentasi. Kita perlu memperimbangkan kembali cara berpikir, isu-isu yang bersifat antisipatoris dan lembaga yang lentur terhadap perubahan. Bagi saya, pembicaraan tentang Pusat Kebudayaan tidak saja mendesak dan strategis, tetapi sebenarnya memiliki momentum yang baru.

Seperti apa 'follow up' dari rekomendasi ini?

Rekomendasi ini sebaiknya dikawal oleh sebuah lembaga independen, yang dapat memantau perkembangannya. Tak perlu diselenggarakan oleh pemerintah, tetapi prakarsa-prakarsa masyarakat. Saya tertarik untuk menghidupkan kembali Lembaga Kebudayaan Indonesia, yakni institusi yang menyelenggarakan kongres awal, institusi para budayawan yang didukung dan dihargai pemerintah. (X-9)

Rekomendasi Kongres Kebudayaan Jangan Jadi Gaung di Ruang Kosong

"**T**IAP-tiap revolusi mempunyai krisis kebudayaan. Pada permulaan ialah rusaknya keseimbangan kebudayaan yang lahir dan kebudayaan yang batin, akan tetapi saya kemukakan di sini bahwa krisis itu pun disebabkan oleh karena angkatan muda yang berhadapan dengan angkatan tua, yang di dalam riwayat kebudayaan selalu berhadapan dan menimbulkan pertentangan yang hebat sekali."

Demikian bait penting sambutan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Mr Ali Sastroamidjojo dalam pembukaan Kongres Kebudayaan I yang diselenggarakan di Magelang, 20-24 Agustus 1948 (Nunus Supardi: *Kongres Kebudayaan sebelum dan sesudah Indonesia Merdeka*, 2003).

Konflik antargenerasi itu persis terjadi dalam Kongres Kebudayaan V (KK V) yang berlangsung di Balai Sidang Bung Hatta, Bukittinggi, Sumatera Barat, 20-22 Oktober ini. Tetapi pengertian konflik generasi yang tampak pada KK V bukan *an sich* secara usia, melainkan juga menyangkut konflik pola pikir dan cara-cara menghadapi kenyataan. Di lain sisi, perbedaan pengalaman antarpeserta kongres melahirkan perbedaan cara pandang dan sikapnya.

Bahkan, konflik yang terjadi pada KK V bukan sekadar antar-

generasi, tapi menyangkut konflik kepentingan sektoral dan parsial. Misalnya, kepentingan pelat merah (pegawai negeri) berhadapan dengan masyarakat luas, atau antara pihak yang berpikir pragmatis melawan yang konseptual, antara Jakarta berhadapan dengan luar Jakarta.

Konflik itu, meskipun tidak meruncing, tidak ada gebrak meja, auranya terasa deras. Misalnya perbedaan sikap antara yang menyetujui pembentukan departemen kebudayaan berhadapan dengan mereka yang ingin menghidupkan lembaga atau pusat kebudayaan (Pustaka) Indonesia. Kedua pihak yang berbeda pendapat ini, semoga saja berangkat dari tujuan yang sama, yaitu keinginan memajukan kebudayaan Indonesia, dan bukan karena kepentingan pragmatis semata.

Soal lembaga departemen kebudayaan dan pusat kebudayaan Indonesia barangkali merupakan contoh dari konflik konkret, mengemuka, dan cukup hangat. Apalagi, semua media massa yang meliput kongres memberitakan perscalan ini. Namun, ada konflik antargenerasi yang tidak mengemuka, tapi sebetulnya ada.

Misalnya konflik antara pihak yang secara klise terus-menerus menggagas agar masyarakat bersama pemerintah mau menengok tradisi yang diwariskan leluhur sebagai sumber inspirasi

dan falsafah hidup bangsa, melawan pihak yang mengutarakan kenyataan-kenyataan kebalikannya.

Tiga butir pertama rekomendasi kongres yang menginginkan digalinya kembali nilai tradisi untuk dilestarikan dan dikembangkan sebagai falsafah hidup bangsa, tentulah berasal dari rumusan pihak pertama.

Di mata mereka, tradisi adalah sumber inspirasi yang adaptif dan akomodatif terhadap perkembangan zaman, sehingga tradisi bisa dimodifikasi dan menjadi *mainstream* kebudayaan Indonesia.

Tetapi pemakalah seperti Gustaf Rizal (lulusan seni rupa ITB) justru menyuarakan pikiran sebaliknya. Dengan makalahnya yang berjudul *Fuck You! We Are From Bandung* cukup mencengangkan. Gustaf mengemukakan tentang subkultur yang tumbuh dan semakin berkembang di masyarakat walaupun secara kuantitas masih kecil.

Ia memaparkan soal kehidupan *underground* yang memiliki etika dan perilaku sendiri, dan mencoba tidak terpengaruh oleh kebudayaan *mainstream* atau adiluhung. Mereka misalnya, tidak peduli dengan keputusan-keputusan politik atau ide-ide besar tentang kebudayaan nasional. Toh, sebagai subkultur, mereka akan tetap hidup dari momentum ke momentum yang lain.

Bahkan dalam beberapa kesempatan, secara radikal mereka melakukan perlawanan terhadap tradisi atau tata nilai yang sudah mapan. Dengan demikian, beberapa gaya hidup mereka menjadi antitesis terhadap norma yang mapan, yang selama ini dianut masyarakat kebanyakan.

Gagasan atau perlawanan *underground* di Bandung seperti yang diutarakan Gustaf sebenarnya bukanlah fenomena baru yang terjadi di kalangan generasi muda Indonesia.

Sejujurnya, KK V ini masih menyimpan banyak agenda yang perlu segera dikerjakan. Rekomendasi kongres, misalnya, pada bagian pendahuluan tampak sebagai catatan filosofis. Sementara isi kongresnya sendiri lebih tampak sebagai pernyataan partai politik atau LSM. Di samping tentu hal-hal yang belum terakomodasi perlu dipertimbangkan kembali apakah masih memungkinkan diakomodasi, dan de-

ngan demikian rekomendasi mendapat revisi sekaligus editing bahasa.

Lembaga penyelamat

Kongres Kebudayaan sungguh berbeda dengan perhelatan akbar di bidang politik seperti Sidang Tahunan MPR, bahkan dengan kongres PSSI yang baru-baru ini digelar.

Hasil Sidang Tahunan MPR bisa diaplikasikan dalam bentuk aksi karena ada lembaga pelaksanaannya, yaitu eksekutif. Begitu pun hasil kongres PSSI bisa dilaksanakan oleh lembaga PSSI. Lalu rekomendasi kongres, siapakah yang akan melaksanakannya? Adakah langsung dipimpin Presiden? Atau Kementerian Budpar?

DPR/MPR? Atau yang lebih mengerikan lagi, rekomendasi kongres itu benar-benar hanya gaung yang tidak menghuni ruangan apa pun. Sementara gaung itulah yang memang diharapkan oleh beberapa panitia.

Di sinilah letak betapa urgensinya membicarakan lembaga kebudayaan sebagai yang menyelamatkan, mengolah, dan melaksanakan rekomendasi kongres. Tanpa lembaga yang pasti, rekomendasi kongres tidak memiliki kepastian. Yang paling logis, jika kita mau bercermin pada sejarah, adalah mendirikan lembaga atau pusat kebudayaan Indonesia yang independen. Sebab, jika merekomendasikan berdirinya departemen kebudayaan Indonesia, bisa saja Presiden menolak karena secara konstitusi hal itu merupakan hak prerogatif Presiden.

Sejarah Kongres I melahirkan Lembaga Kebudayaan Indonesia yang ditunjuk untuk menindaklanjuti hasil kongres, sekaligus melaksanakan kongres kebudayaan berikutnya. Tapi, belumlah terlambat jika kita mau merevisi hasil-hasil KK V. (Doddi AF/Ade Alawi/B-3)



■ **SIDANG PLENO:** (Dari kiri ke kanan): Gunawan Mohammad, Toeti Herati, Mubyarto, dan Ignas Kleden, memimpin sidang pleno pertama pada Kongres Kebudayaan V yang diselenggarakan di Bukittinggi, 19 hingga 23 Oktober lalu. Kongres ini melahirkan beberapa rekomendasi, seperti pembentukan Departemen Kebudayaan, dan lain-lain.

Media Indonesia, 25 Oktober 2003

KONGRES BAHASA INDONESIA VIII

'Bola Panas' Ardika

Kongres Kebudayaan (KK) di Bukittinggi mengusung tema sentral 'Konsep Kebijakan dan Strategi Budaya Indonesia'. Barangkali, karena konsep tema inilah kemudian pemerintah, melalui Menteri kebudayaan dan Pariwisata I Gede Ardika, menyatakan bahwa Indonesia belum punya konsep yang jelas. Kebudayaan tanpa konsep, maka pendukung kebudayaan itu akan dilecehkan orang. Tidak bermartabat dan karena itu tidak punya harga diri.

Ardika melemparkan 'bola panas' bahwa Indonesia saat ini sedang mengalami krisis budaya. "Tapi benarkah demikian?" tanyanya.

Ia yakin para budayawanlah yang bisa mendiagnosanya. "Tapi, bila memang sedemikian parah, apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal itu?"

Pertanyaan itu, menurut Ardika, bisa terjawab kalau peserta kongres berusaha menjawabnya. "Semua komponen bangsa punya harapan besar pada hasil kongres ini," katanya.

Karena itu, menurut dia, pembangunan kebudayaan menjadi sangat penting. Karena pentingnya itulah, kenapa kemudian pemerintah memfasilitasi kongres kebudayaan.

Pemerintah memang berharap banyak akan kongres Kebudayaan di Bukittinggi ini. "Kita berharap kongres ini bisa menjadikan konsep kebudayaan itu menjadi pointer kebijakan yang kemudian bisa kita operasionalkan," kata menteri.

Pada kongres, pemerintah berharap bisa mengubah posisi nilai-nilai luhur bangsa yang semula hanya menjadi buah bibir, bisa beralih menjadi perilaku bangsa. Dengan demikian barulah kita mempunyai nilai dan martabat yang semestinya. Ujar Ardika.

Mungkin sulit direalisasikan, sebab

budaya, kata menteri bukanlah benda. "Budaya yang tak benda pada hekekatnya merupakan roh dari semua produk kegiatan budaya yang berupa nilai-nilai kehidupan manusia," sebut Ardika.

Karena Indonesia merupakan negara yang mejamuk dan pengaruh luar harus diterima dan harus ada yang ditolak, maka untuk itu diperlukan suatu sistem pengelolaan kebudayaan yang kokoh. Sistem pengelolaan itu harus cocok dengan persoalan yang dihadapi bangsa dan relevan dalam pergaulan internasional. "Untuk itulah para budayawan kini berkumpul di sini guna menyusun secara jelas konsep kebudayaan Indonesia," ujar menteri.

Konsep tadi bisa memberikan kejelasan kepada bangsa ini, ke mana dan apa yang harus mereka lakukan. Tapi, apa gunanya semua itu, ketika sebagian kita dengan 'tenang' bisa menyaksikan tindak korupsi makin merisaukan hati. Di saat hutang menggantung dan ketika angka pengangguran menakutkan kita?

Kongres memang telah membahas persoalan-persoalan sulit itu. Tapi, kongres tidak punya daya tangkal, karena kekuasaan tidak ada di situ.

Rutinitas keseharian anak negeri tidak akan berubah. Petani akan tetap ke sawah, orang-orang snob akan terus memenuhi kafe, berbelanja sesukanya padahal barang yang dibeli tak dibutuhkan. Pemerintah akan memelihara pertengkaran politik, pemuka agama sibuk mengajukan konsep perdamaian, hidup yang tenang, tapi horor terus berlanjut.

Dan, KK V telah usai, orang datang dengan pikirannya masing-masing dan pulang dengan buah tangan masing-masing pula. Helat usai. Hujan reda, kabut pun hilang. Anggaran Rp4 miliar habis sudah. Kita tunggu KK VI, dan itu, entah kapan. ■ ru

Catatan Kritis Kongres Kebudayaan V

Oleh Nasrul Azwar, Agus Hernawan, dan Sudarmoko*)

KONGRES Kebudayaan V (KK-V) yang dilangsungkan di Bukittinggi, Sumatra Barat, dari 20-22 Oktober 2003, sudah berakhir dengan menghasilkan 18 butir rekomendasi untuk diteruskan kepada pihak yang berkepentingan. Delapan belas butir rekomendasi itu dirumuskan oleh 22 orang tim perumus.

Pada pendahuluan rumusan hasil KK-V disebutkan bahwa KK-V diikuti 570 peserta dari seluruh Indonesia dan 96 pemakalah. Kongres yang difasilitasi Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata membagi temanya menjadi tiga subtema 'Lokalitas, Nasionalitas, dan Globalitas; Identitas dan Krisis Budaya; Perubahan dan Pemberdayaan' dibahas dalam tiga persidangan pleno dan tiga puluh persidangan komisi. Dan selanjutnya, melalui 16 pokok bahasan konkret memperoleh minat dan partisipasi lewat penyajian makalah dan diskusi.

Dari semula, jika disimak dan diikuti proses dan mekanisme dari rangkaian pertemuan yang melatarbelakangi KK-V ini banyak persoalan yang sesungguhnya perlu dicermati dan dikritisi, semenjak 'Temu Budaya Daerah', 'Temu Regional', 'Pra-Kongres', hingga 'KK-V'.

Pada 'Temu Budaya Daerah' yang digelar di Bukittinggi, pagipagi sudah muncul ke permukaan kritikan dan kecaman dari pelbagai kalangan budayawan, seniman, dan juga para aktivis budaya di Sumatra Barat. Kritikan dan kecaman yang muncul disebabkan peserta dan juga sebagian pemakalah yang diundang dinilai tidak representatif untuk sebuah 'perbincangan' yang disebut dengan 'Temu Budaya Daerah'. Peserta yang diundang misalnya,

sebagian besar (75%) adalah pegawai negeri sipil (PNS), yang notabene sesampai mereka di lokasi acara yang diurus pertama, mencari stempel 'SPJ' perjalanan dinas untuk instansi masing-masing, dan pertanyaan mereka yang menyusul adalah berapa jumlah uang transportasi yang akan diganti panitia untuk peserta. Lalu, apa yang berlangsung di saat seorang pemakalah menyampaikan makalahnya? Selama 2 hari 'Temu Budaya Daerah' berlangsung, mereka 'membisu' dan menghilang entah ke mana.

Kondisi ini juga tak jauh berbeda dengan 'Temu Regional' di Kota Padang sebulan setelah di Bukittinggi. Yang membedakan hanya luas cakupan asal pemakalah dan pesertanya. Dan, juga dinilai peserta dan pemakalahnya tidak representatif.

Ketidajelasan kriteria dan ukuran ini menyebabkan dua 'Temu' itu menjadi kerja yang sia-sia dan, tentu saja menuai kritikan dan kecaman dari pelbagai unsur yang serius menaruh perhatian pada dinamika kebudayaan. Kasus di dua 'Temu' ini, kami kira tak akan jauh beranjak, mirip dan terjadi juga di kota-kota lainnya di Indonesia, yang juga menyelenggarakan 'gawe' yang sama. Maka, apa yang dikatakan selama ini, bahwa 'pekerjaan' ini merupakan seremonial pelat merah menemukan pembenaran yang sesungguhnya.

Memang sangat ironis. Padahal, hasil 'Temu Budaya Daerah' dan 'Temu Regional' akan dibahas dalam 'Pra-Kongres' di Bali. Selanjutnya 'Pra-Kongres' akan merumuskan isu-isu strategis dalam upaya memajukan kebudayaan Indonesia yang akan ditawarkan sebagai agenda yang

akan dibahas dalam KK-V.

Apa yang menjadi pertanyaan mendasar adalah, apakah KK-V ini dapat menjadi sebuah media yang mampu menyinergikan, dan memiliki arti penting di tengah-tengah kebudayaan Indonesia hari ini dan masa yang akan datang, jika dikaitkan dengan rangkaian peristiwa budaya yang melatarbelakanginya, yang jelas sangat kental sekali 'warna' pelat merahnya?

Kini, tampaknya pertanyaan di atas menemukan jawabannya. Artinya, KK-V telah gagal memberi arti bagi perjalanan dan proses kebudayaan itu sendiri, dan sebaliknya, yang muncul sebagai pemenang adalah kaum birokrat. Dengan kata lain, KK-V telah menjadi 'kendaraan' yang menjustifikasi dan melegitimasi pembenaran bahwa kebudayaan dan segenap aspeknya, kini berada di tangan kaum birokrat. Bukan hal yang baru, bila sejumlah cerdik-cendekia (baca: budayawan) banyak yang dipakai oleh tangan-tangan kuasa. Dan, ini telah berlangsung pada KK-V.

Kondisi demikian, memang telah terbaca jauh sebelum KK-V digelar. Dari alasan ini pula kami—seniman muda dan aktivis kebudayaan—mencermatinya bersama-sama dengan membentuk Forum Monitoring Kongres Kebudayaan V (FMKK-V).

Sekilas tentang FMKK-V
FMKK-V adalah sebuah forum independen yang sepenuhnya dibentuk dan beranggotakan kalangan seniman muda dan aktivis kebudayaan di Sumatra Barat* dan sama sekali bukan wadah pemantau yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Sumatra Barat—sebagaimana yang diberitakan *Media*: 'Kongres Kebudayaan

an, Seremonial Pelat Merah', Minggu, 19 Oktober 2003). Forum ini didukung Dewan Kesenian Sumatra Barat untuk melakukan kerja pemantauan, pengumpulan data dan bahan seputar KK-V, dan proses yang melatarbelakanginya, serta hasilnya secara transparan dilaporkan ke publik melalui instrumen media. Bentuk pemantauan dan pengumpulan bahan adalah jajak pendapat yang disebar ke partisipan kongres, wawancara dengan *steering committee* dan panitia lokal, analisis atas materi kongres yang disediakan oleh panitia dan pencatatan suasana dan atmosfer saat berlangsungnya kongres.

Kelahiran FMKK-V ini melalui telaah atas buku panduan KK-V yang dikeluarkan panitia, yang menawarkan partisipasi kepada seluruh peminat dan pelaku budaya. Keberadaan FMKK-V menjadi salah satu bentuk partisipasi tersebut, sekaligus dapat memberikan bahan evaluatif dan juga korektif atas KK-V yang 'besar' dan 'sakral' serta 'mahal'.

Memang, selama berlangsungnya KK-V, FMKK-V terkesan kurang tersosialisasi, hal ini disebabkan, salah satunya, keengganan—atau ketakutan—panitia pelaksana untuk bekerja sama dan bersifat terbuka serta transparan.

Kongres kebudayaan atau kebudayaan kongres

Deskripsi dan analisis dari fakta dan data-data yang didapat FMKK-V, merupakan hasil dari beberapa catatan yang menjadi sorotan utama dari pelaksanaan kongres tersebut. Catatan di bawah ini bersifat tentatif, sedangkan analisis dan penilaian yang permanen akan dikeluarkan secara resmi paling lama 21 hari setelah acara KK-V. Catatan yang dihasilkan FMKK-V adalah pertama, proses yang melatari pelaksanaan kongres ini sangat berbau politis, menjadi wadah perbenturan ideologis dan kepentingan serta menjadi 'proyek' yang dirancang untuk menghabiskan dana yang dialokasikan dalam APBN (D) tahun 2003. Dari itu pula, FMKK-V mendesak semua anggaran yang dipakai untuk penyelenggaraan—semenjak 'Temu Budaya Daerah' dan seterusnya—diaudit oleh lembaga yang

berwenang dan hasilnya dijelaskan secara transparan ke publik.

Kedua, mekanisme yang digunakan dalam proses pelaksanaan KK-V tidak berjalan seperti diantisipasi sejak semula. 'Temu Budaya' di 25 (dua puluh lima) kota, 'Temu Regional' di 4 (empat) kota, dan 'Pra-Kongres' di Bali tidak secara gradual menjadi bagian integral dari pelaksanaan KK-V. Rumusan-rumusan yang muncul pada proses tersebut seakan hilang begitu saja. Sebagai contoh, pembicara-pembicara pada sidang-sidang, pleno, dan diskusi yang terjadi merupakan sebuah materi yang disiapkan kemudian dan sangat sporadis, serta mengesankan 'asal jadi'. Suasana dan atmosfer kongres menjadi miniatur dari Indonesia yang penuh 'lelucon'. Sejumlah kejadian 'lucu' seperti ruang sidang yang kosong yang membuat panitia harus menjerit-jerit memanggil peserta, kekecewaan peserta karena jadwal yang sering molor dan kacaunya penjataan penggandaan makalah, kebingungan sejumlah peserta karena tiba-tiba saja ia bisa didaulat menjadi pembicara, honor pembicara yang bisa tawar-menawar, saling tuding dan saling lempar kesalahan antarpanitia dan lain-lain menjadi evaluasi dan koreksi tersendiri sekaligus memberikan gambaran, bahwa KK-V belum lagi sampai pada 'Kongres Kebudayaan' tetapi baru sampai pada 'Kebudayaan Kongres'.

Ketiga, tema yang sangat relevan dengan kondisi kekinian adalah integrasi. Namun, mekanisme dan teknis pelaksanaan KK-V justru memunculkan 'disintegrasi' antara panitia pusat dan panitia lokal. Ini terbukti melalui wawancara dengan panitia lokal yang sama sekali tidak mengetahui apa yang akan dilaksanakan, karena seluruh acara telah didesain dan di-setting dari Jakarta. Panitia lokal merasa tersinggung atas arogansi panitia pusat. Mekanisme seperti ini jelas bertolak belakang dengan tema 'integrasi' sebagai tema besar sekaligus pusat (Jakarta) telah 'menginvestasikan benih konflik' di tingkat lokal (Sumatra Barat). Jauh sebelum KK-V ini digelar arah yang demikian itu telah ada dan terlihat. Munculnya pro-kontra, pole-

mik, kecaman, dan juga komentar dari budayawan, seniman, dan juga aktivis budaya di tingkat Sumatra Barat karena mekanisme pengakomodasian pemakalah dan peserta tidak jelas dan bias, menjadi indikator yang kuat untuk mengatakan bahwa KK-V ini telah 'menanamkan bom waktu' perpecahan dan perseteruan di tingkat lokal, dan juga Indonesia umumnya.

Keempat, dari jajak pendapat yang disebar, ternyata sebagian besar partisipan acara ini tidak mengetahui latar belakang dan proses yang melatari kongres serta hasil-hasilnya. Mereka yang ahistoris ini membuat kongres menjadi sebuah acara yang terpisah dan berdiri sendiri. KK-V seperti sebuah pesawat yang tidak jelas ke mana mau didaratkan. Jika diamsalkan, KK-V seperti *rapek mancik* (rapat tikus) yang tak pernah jelas arahnya. Ini menyebabkan lemahnya kekuatan politis kongres untuk mengaruhi kebijakan pemerintah, dan membuat KK-V sendiri sebagai alat legalitas dari rumusan yang digulirkan tidak demikian berpengaruh.

Kelima, kualifikasi dan institusi asal partisipan demikian serampangan, amburadul, dan terkesan asal comot. Hal ini perlu dibenahi bila nantinya akan ada lagi kongres atau acara serupa. Pertimbangannya tidak lain agar rumusan-rumusan atau rekomendasi yang dihasilkan memiliki daya *pressure*, disebabkan karena komposisi partisipan berakar secara kuat pada realitas sosio-kultural yang ada sehingga ia betul-betul memiliki kekuatan dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral, politis, dan ilmiah.

Hasil temuan sementara FMKK-V memang diupayakan berada dalam koridor objektivitas dan tidak bertendensi kepada siapa pun dan lembaga apa pun, dan semua berpijak pada fakta, data, dan juga suasana-kondisi yang real. Itulah kenyataannya.

*Anggota Forum Monitoring Kongres Kebudayaan V. Anggota Forum Monitoring yang lain, Asraferi Sabri, Eddy Pranata PNP, Firdaus, Kurniasih Zaitun, Emilda, dan Mila K Sari.



■ MEDIA/DODY

■ **Gunawan Mohamad, Garin Nugroho, dan Putu Wijaya**
Menyisokan banyak pekerjaan rumah.

Media Indonesia, 26 Oktober 2003

Kongres Kebudayaan Sebuah Langkah Patah-patah

Bangsa ini besar, memiliki budaya yang beragam. Para budayawan memiliki kesadaran bahwa budaya mereka harus dijaga dan pendidikan anak bangsa perlu mendapat perhatian.

Inilah ironi yang terjadi dalam perjalanan Kongres Kebudayaan (KK) yang beberapa hari lalu (19-22 Oktober) menggelar kongres di Bukittinggi, Sumatera Barat. Sebelum kemerdekaan, dalam waktu 19 tahun, Indonesia (baca: Jawa) melaksanakan tujuh kali KK. Setelah merdeka, dalam rentang 55 tahun, hanya lima kali. Selama 85 tahun telah terlaksana 12 kali KK, lebih dari separuh bicara soal kebudayaan Jawa. Begitulah, lantas cemetih apa yang bisa dipetik?

KK yang sebelum kemerdekaan menjadi sebuah kebutuhan, setelah kemerdekaan berubah menjadi perdebatan, paling tidak perdebatan tentang apakah pemerintah harus ikut campur? Maka, pantas kini KK dita-

msilkan bak anak kecil yang berusaha melangkah. Langkahnya patah-patah. Entah kapan sampai ke tujuan.

Yang jelas, dengan berlangsungnya KK di Bukittinggi beberapa hari lalu, menunjukkan ia masih hidup, meskipun langkahnya tak hanya tertatih-tatih tapi juga ambigu. Ragu hendak ke mana kaki akan diayunkan, sebab begitu banyaknya serabut informasi, begitu beragamnya buah pemikiran, dan begitu lambannya bangsa ini mengantisipasi perkembangan.

Tapi, bagaimana pun, inilah sebuah langkah, sebuah langkah setengah hati yang terlaksana berkat niat baik pemerintah. Niat baik itu kemudian oleh sebagian orang — dengan alasannya sendiri — dilabeli sebagai KK 'pelat merah', sebuah tamsilan sinis untuk menyatakan dominasi pemerintah untuk urusan orang-orang yang seharusnya tidak diurus pemerintah. Tapi, apa pula di negeri ini yang tak diurus pemerintah?

Lagi pula, ini adalah investasi sosial pemerintah untuk ikut membangun masyarakat sipil yang mengerti akan hak dan kewajibannya. Dengan begitu, lantas apa salahnya, jika KK diprakarsai pemerintah, yang tidak menuntut apa-apa.

Dominasi Jawa?

Telah menjadi kenyataan bahwa KK di Indonesia didominasi Jawa. KK sebelum kemerdekaan adalah KK Jawa dan setelah kemerdekaan setali tiga uang. Jika ingin melabelinya dengan KK Indonesia, maka hal itu hanya bisa dilekatkan pada KK ke IV tahun 1991, meski di sana, dominasi masih dipegang oleh utusan dari Pulau Jawa.

Untuk KK V di Bukittinggi, dominasi itu masih mewarnai. Tapi, kalau dilihat dari registrasi peserta, paling tidak tiap provinsi mengutus 10 orang. Jika demikian, pesertanya 320 orang. Padahal menurut panitia jumlahnya hampir 750 orang. Lalu sisanya dari mana?

Menurut informasi, mereka datang dari Jakarta. Tapi sudahlah. Apapun, untuk urusan KK gerbong itu memang bergerak dari Jawa. Tahun 1918, gerbong mulai bergerak. Sebuah kongres yang diprakarsai penduduk pribumi. Budayawan Nunus Supardi mencatat bahwa KK I diprakarsai oleh tokoh-tokoh Boedi Oetomo dan PAAP Prangwodo. Maka, terlaksanalah KK Jawa yang pertama mulai 5 sampai 7 Juli 1918. Hasil KK ini didirikanlah *Java Institute*.

Tahun 1948, lembaga ini harus dibubarkan karena menurut aktenya, memang dimaksudkan untuk masa 25 tahun. Setahun kemudian, masih di Surakarta, dilaksanakan lagi KK II. Pada tahun 1921 dilaksanakan lagi KK III di Bandung. Kali ini kajian menyangkut sejarah dan pendidikan musik.

Dari tiga kali KK itu, dapat diselami betapa bersemangatnya tokoh-tokoh ketika itu untuk berkongres, sesuatu yang tidak bisa diraba secara sempurna. Tapi yang jelas, langkah mereka merupakan sebuah langkah strategi yang bisa dibilang cukup terukur.

Pada tahun 1924 dilaksanakan lagi KK IV di Yogyakarta, disusul kemudian KK V tahun 1926 di Malang, KK ke VI kembali dilaksanakan di Surakarta pada tahun 1929. Terakhir menjelang Indonesia merdeka, yaitu tahun 1937 dilaksanakan KK VII di Bali.

KK VIII dilaksanakan beberapa tahun setelah kemerdekaan. KK yang digelar untuk pertama kali setelah kemerdekaan ini berlangsung pada 20-24 Agustus 1948 di Magelang, Jateng. KK ini kemudian juga disebut KK I.

Setelah Magelang, KK II digelar di Bandung tahun 1951, disusul kemudian KK III di Surakarta tahun 1954, KK IV dilaksanakan tahun 1991. Lalu di

Bukittinggi KK V, yang baru saja usai.

Dari sekian banyak KK, ternyata ada topik yang selalu dibicarakan hampir di semua kongres, yaitu soal kebudayaan dan pendidikan. Ternyata kesadaran bahwa kebudayaan merupakan elemen penting dalam kehidupan manusia merupakan kesadaran mendasar yang selalu membuat gelisah para budayawan.

Di sisi lain, persoalan pendidikan juga telah menjadi pemikiran bersama. Bahwa pendidikan merupakan faktor penting dalam meraih kemajuan, telah pula menjadi isu sentral sejak lama, bahkan tanpa KK sekali pun.

Selain persoalan itu, sebenarnya adalah sebuah kejadian penting yang mewarnai perjalanan budaya bangsa ini, yaitu masuknya urusan politik secara tidak elegan ke dalam wilayah kebudayaan dan kesenian.

Kita mengenal adanya Lekra di satu sisi dan Menikebu di sisi lain. Ini adalah lambang dari pecah perahu bangsa ini. Tapi beruntung tidak karam. Kapal bangsa ini berhasil diselamatkan oleh 'tangan gaib'. Lalu, kegelapan menyelimuti langit budaya bangsa bertahun-tahun lamanya. Angin telah menyelusup lewat jendela lain, yang ternyata angin itu dihembuskan oleh sebuah partai bernama PKI. Waktu itu, betapa memilikannya nasib bangsa ini. Nasib sebuah budaya bangsa besar karena tidak terurus.

Sebuah lompatan kemudian terjadi. Muncullah Orde Baru. Di zaman Orde Baru, yaitu tahun 1991 dilaksanakan KK IV. KK ini, karena dominasi pemerintah dalam segala aspek kehidupan, tak terlepas dari pandangan umum bahwa KK IV merupakan KK orang-orang berjau safari, 'pelat merah'. Ternyata untuk KK V anggapan 'pelat merah' masih terdengar. Paling tidak ini dilontarkan oleh sejumlah budayawan dan seniman. Sumbar yang tidak dilirik oleh panitia pusat dan juga diabaikan oleh panitia lokal.

Apa pun, dari tahun 1918 sampai 2003, atau selama 85 tahun telah dilaksanakan 12 kali KB. Sebanyak 12 kali terlaksana, lantas apa yang bisa dipetik?

Yang bisa dipetik adalah bahwa bangsa ini besar, memiliki budaya yang beragam. Para budayawan memiliki kesadaran bahwa budaya mereka harus dijaga dan pendidikan anak bangsa perlu mendapat perhatian. Untuk KK terakhir, pembicaraan lebih menjurus pada koreksian bersama atas kesalahan bersama di tahun-tahun sebelumnya.

Kesalahan bersama itu, kemudian

disadari telah merugikan bangsa. Yang kemudian menjadi wacana luas adalah, apakah bangsa ini, yang bernama Indonesia, masih kokoh? Bukankah amuk massa, horor, ketidakpastian hukum, kecengengan berpikir dan bertindak telah menjadi milik bersama? Bukan pulalah moral dari mental bangsa ini telah kusut masai karena perangai pemimpinnya yang tidak beres?

Wacana lain yang mencuat adalah, di manakah wilayah kebebasan pribadi? Di mana pula moral dan etika, kalau kebebasan pribadi menjadi panglima?

KK menemukan pula kebebasan anak muda yang sepertinya tak ter-

kendali. Tapi, yang menarik adalah betapa beratnya beban bangsa ini. Bukan hanya beban utang, beban dekadensi moral, tapi juga beban masalah. Bangsa ini melangkah patah-patah karena masalahnya begitu banyak. Persoalan disintegrasi bangsa mencuat dengan mudah di sejumlah daerah. Orang yang lagi syahidu menyebut persatuan dan kesatuan, tapi hambar. Dan, KK V di Bukittinggi, tetap saja gagal membangunkan tidur panjang nasionalisme anak negeri, sebuah adigium yang diciptakan karena didasari bahwa bangsa ini hadir dengan keberagamannya. ■ Khalrul Jasmi

Kompas, 26 Oktober 2003

KEMAMPUAN BAHASA

Kemampuan Menulis Sarjana Indonesia Rendah

BANDUNG - Kemampuan kaum intelektual, khususnya sarjana di Indonesia, untuk menulis masih tergolong rendah. Salah satu bukti lemahnya kemampuan menulis itu dapat dilihat ketika mahasiswa di perguruan tinggi mendapatkan tugas menulis tesis atau disertasi.

Pernyataan itu dikemukakan Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Prof Dr HA Chaedar Alwasilah MA, di Bandung, Jumat (17/10), dalam orasi pengukuhannya sebagai Guru Besar Bahasa dan Sastra Indonesia UPI. "Selalu kelabakan mengerjakannya," demikian pendapatnya.

Chaedar Alwasilah menjelaskan, banyak mahasiswa yang terpaksa harus *drop out* (DO) dari bangku kuliahnya karena kesulitan mengerjakan tugas membuat tesis atau disertasi.

Bahkan, berdasarkan data The Indonesian International Education Foundation (IIEF) serta British Council di Jakarta, banyak pelamar beasiswa dari Indonesia yang tidak mampu menulis proposal penelitian atau rencana studi mereka.

"Selain itu, banyak juga di antara mereka yang tidak diterima di PT di Amerika Serikat (AS) karena ketidakmampuan menuliskan tujuan studi atau *objectives of study* secara cermat," ujarnya.

Kelemahan perihal tulisan menulis itu, dapat tergambar pula pada rendahnya daya serap beasiswa yang ditawarkan oleh badan swasta dan pemerintah AS, khususnya melalui The Ford Foundation.

Sejak 1998 sampai sekarang, IIEF telah mengirimkan 115 lamaran ke Asian Scholarship Foundation untuk melakukan penelitian dalam bidang seni, humaniora, dan ilmu-ilmu sosial, dari kawasan Asia Tenggara atau Cina.

"Ternyata baru ada enam orang mahasiswa Indonesia yang mendapatkan beasiswa dari Asian Scholarship Foundation," ujarnya.

Ia menambahkan, dari 16 responden etnografis (mahasiswa S1, S2, dan S3) di kampus Bloomington, Indiana, AS, ditemukan bahwa pendidikan nasional di Indonesia tidak membekali mahasiswanya dengan kemampuan menulis *paper* atau makalah (75 persen), tidak mengajari mereka kemampuan dan berpikir kritis (68 persen).

"Bahkan disebutkan, menulis *paper* merupakan tugas akademik yang paling sulit," ujarnya.

Kalah

Lebih lanjut, Chaedar menuturkan, hal tersebut juga terlihat dari penerbitan buku

di Indonesia. Menurutnya kemampuan menulis kaum intelektual di Indonesia masih kalah dengan negara tetangga Malaysia. Mereka mampu menerbitkan buku dengan rata-rata setiap tahun sekitar enam ribu buku sampai tujuh ribu buku.

Indonesia, hingga saat ini, baru mampu menulis sekitar empat ribu buku sampai lima ribu buku per tahun, padahal jumlah penduduk di Indonesia 10 kali lipat jumlah penduduk di Malaysia.

"Idealnya Indonesia harus membuat buku 60 ribu judul buku, atau dengan kata lain setiap dosen di Indonesia harus mampu menulis satu buku saja setiap tahunnya untuk mengejar ketertinggalan dari Malaysia," katanya.

Berdasarkan data Indonesian Educational Statistics tahun 2000, jumlah dosen yang berkualifikasi magister di Indonesia 61.889 orang dan doktor 12.081 orang, baik yang mengajar di PTN maupun PTS.

Untuk itu, ia memberikan salah satu kebijakan yang dapat ditempuh pemerintah, dengan cara membentuk unit atau pusat kajian penelitian dan pelatihan menulis di perguruan tinggi.

"Seperti yang lazim ada di kampus-kampus negara bagian atau distrik di Amerika." (ADI/A-18)

Musim Pasang Penulis Perempuan

YOGYA (KR) - Diakui atau tidak, pasca reformasi penulis perempuan bermunculan dalam khasanah sastra Indonesia. "Ada yang menyebut, sekarang ini, musim pasang penulis perempuan. Bahkan ada yang melabeli, *sastrawangi*, penulisnya cantik-cantik dengan aroma wangi," kata Mirna Yulistiawati, *Copy Editor* bidang bahasa dan sastra Indonesia di kampus USD, Mrican, Selasa (7/10).

Dikatakan Mirna, pengarang perempuan mendapatkan perhatian publik menjelang reformasi munculnya novel 'Saman' karya Ayu Utami. Dengan *blow up* dari pemerhati sastra dan media massa, 'Saman' langsung menyentak perhatian publik. "Sejak diterbitkan sampai sekarang mengalami cetak ulang sebanyak 22 kali," ucapnya.

Setelah Ayu Utami, disusul 'Supernova' karya Dewi Lestari, 'Mereka Bilang, Saya Monyet' karya anak suhradara film *Sjumanjaya*, Djenar Mahesa Ayu. Seterusnya 'Jendela-jendela' karya Fira Basuki, 'Renungan Kloset' karya Rieke Dyah Pitaloka, 'Mahadewa Mahadewi' karya Nova Riyanti Yusuf, 'Ode untuk Leopard von Sacher Masoch' karya Dinar Rahayu, serta disusul penulis muda lainnya.

Mirna mencatat, dari segi

karya, kebanyakan penulis muda lepas dari tradisi sastra sebelumnya, yakni konvensional cara bertutur dan sangat santun. Contoh, 'Supernova' penulisannya terkesan melompat-lompat, canggih dan segar. Djenar Mahesa Ayu, mengeksploitasi media SMS sebagai bentuk pengucapannya. Temanya sangat bebas, akrab dengan generasi sekarang. Dari soal kritik sosial dan seks vulgar. Bahkan buku 'Ode untuk Leopard von Sacher Masoch' banyak diprotes keras karena tulisannya dinilai membidik seks secara vulgar.

Ditegaskan Mirna, munculnya penulis perempuan sebenarnya sangat berperan mengubah *image* tentang dunia penulis yang dipandang profesi eksklusif. Beberapa nama perempuan yang menyemarakkan sastra Indonesia, awalnya profesinya sebagai artis, seperti Dewi Lestari, Rieke Dyah Pitaloka, guru (Dinar Rahayu), ibu rumah tangga (Djenar Mahesa Ayu, Fira Basuki). "Justru yang sering membuat bahagia, rata-rata karya tersebut mengalami cetak ulang," katanya. Sebagai orang yang berada di pihak penerbit (dan pembaca), Mirna jauh lebih menyukai dunia perbukuan pasca reformasi. Karya sastra Indonesia, begitu marak, bebas, dan sangat warnawarni. (Jay)-o

Kedaulatan Rakyat, 9 Oktober 2003

MEMBACA



Oleh Hawe Setiawan, Editor Sebuah Penerbitan



Tulisanmu di Hatiku

"**B**acalah dalam hati". Instruksi itu tercetak tebal di atas sebuah karangan pendek. Di dalamnya ada gambar ilustrasi hitam putih. Di bawahnya berurutan beberapa butir pertanyaan. Jawabannya akan memperlihatkan sejauh mana isi karangan terserap ke dalam pikiran dan perasaan. Dan kelas pun jadi sunyi, sebab setiap murid mesti menghadapi bacaan sendiri-sendiri... Ya, saya masih ingat saat-saat itu. Bersama teman-teman sekampung, saya duduk di bangku sekolah rendah dan belajar membaca. Belajar menyerap kata-kata, melarutkan batin dalam prosa.

Kalau dipikirkan kembali kini, itu jalan elok nian: "membaca dalam hati". Tentu, ini ungkapan metaforis, kayak amsal atau tamsil. "Hati"-nya guru bahasa Indonesia jelas berbeda dengan "hati"-nya guru biologi. Dalam sastra kita tidak pernah tahu "hati" ada di mana. Dalam anatomi, kita bisa menunjukkan "lever" di bawah tulang iga. Ada kalanya, memang, Si Budi yang jatuh cinta secara kelewatan meminta kepada Si Wati, "Belahlah dadaku, Sayang." Seakan-akan hatinya ada di balik dada. Yang jelas, hati kiasan adalah bagian dari alam perasaan.

Dalam bahasa Inggris ada ungkapan sejenis: *silent reading*. Lebih kurang, sepadanlah maksudnya dengan "membaca dalam hati". Praktikanya jelas tidak seperti deklamasi, sungguh berbeda dengan tilawah. Dalam deklamasi atau quoro, membaca berarti berlagu atau melisankan bacaan. Sang deklamator atau qoriah memberi bunyi pada kata-kata tercetak yang diinginkan dan sunyi. Sebaliknya, membaca dalam hati berarti masuk ke ruang sunyi itu sendiri. Kata-kata tidak dilisankan, melainkan diserap ke dalam perasaan. Arahnya tidak keluar, melainkan ke dalam.

Cecep, teman saya, memang masih suka menggerak-gerakkan bibirnya setiap kali ia membaca buku dalam hati. Meski kelihatannya tidak disadari, kebiasaannya itu terbi-lang kurang lazim, kayak dukun santet yang

sedang membisikkan mantra. Galibnya, membaca dalam hati terjadi dalam diam yang tenang dan anteng. Betapa soliter, oh pencinta buku.

Maka membaca jadi bersifat pribadi. Di hadapan buku yang terbuka, sang pembaca seakan-akan sendiri di dunia, seperti Robinson Crusoe dengan Injilnya nun di pulau sunyi. Sulit menerka apa yang bergemuruh di hati seorang pembaca buku yang duduk diam di ruang senyap bibliotik. Sukar menebak apa yang berkecamuk dalam dada seorang pedoyan roman yang berselonjoran kaki di atas dipan.

Ada anggapan lain, memang. Mengatakan bahwa membaca bisa bersifat pribadi, bisa saja dianggap keliru persepsi. Buku yang Anda baca lazimnya dicetak dalam jumlah banyak dan dipasarkan ke setiap penjuru angin. Buku yang Anda baca adakalanya buku yang dirensensi dalam surat kabar dan diperdebatkan dalam seminar. Anda adalah bagian kecil dari orang ramai yang membaca buku yang sama. Lebih tepatnya, Anda adalah bagian dari keramaian.

Namun, bagaimanapun, sifat massal dalam produksi kiranya tidak memupus watak personal dalam konsumsi. Setidaknya, sewaktu Si Rusdi membaca buku, mungkin saja dia tidak peduli apakah Si Misnem di luar sana juga membaca buku yang sama. Perdebatan mengenai sebuah buku justru menunjukkan adanya perbedaan dalam cara menghadapi buku pada masing-masing pribadi.

Dari manakah datangnya hati yang membaca? Adakah ia jatuh dari langit ketujuh, ataukah menyembul dari perut bumi? Saya menduga, ia bukanlah sesuatu yang alamiah sifatnya, melainkan buah rekayasa manusia di sebuah ruang dan suatu masa. Ia muncul dari perubahan dan pergulatan sejarah.

Kita pun bisa menyimak hasil penelitian Mikihiro Moriyama. Ia mengajar di Nanzan University, Jepang. Baru-baru ini ia lulus sebagai doktor pertama di bidang bahasa dan sastra Sunda. Disertasinya dipertahankan di Universitas Leiden, Negeri Belanda. Pernah Miki-san mempresentasikan

makalah yang berjudul *The Rise of Silent Reading in the Sundanese Community of West Java* (Munculnya Kebiasaan Membaca dalam Hati di Tengah Kehidupan Masyarakat Sunda di Jawa Barat). Telaah ini, saya kira, bisa memberikan gambaran tentang dari mana dan bagaimana datangnya kebiasaan membaca dalam hati di tengah kehidupan masyarakat kita.

Menurut Miki-san, orang Sunda mulai dibiasakan membaca dalam hati pada akhir abad ke-19. Ia mencatat, pada 1850 Jurnalistik Belanda menerbitkan *Kitab Pangajaran Basa Soenda* (Buku Pelajaran Bahasa Sunda). Dengan mencetak buku, katanya, dimulailah era baru proyek modernisasi. Kebiasaan membaca pun bergeser. Tadinya kegiatan membaca bersifat komunal, semisal ada seorang jurukisah yang membacakan *wawacan* atau *dangding* di depan sejumlah pendengar. Lalu kegiatan membaca berubah jadi bersifat individual dan personal, semisal masing-masing student membaca roman di sunyi kamar. *Dangding* surut, novel naik.

"Di sinilah kita menemukan bahwa pembaca modern telah dilahirkan: membaca dalam hati, membacaa untuk menepiskan kejemuhan. Modernitas telah diresapkan ke dalam benak orang banyak," tulis Miki-san di akhir makalahnya, yang disampaikan dalam Konferensi Internasional Budaya Sunda I, di Bandung, pada 2001. Kalau begitu, kebiasaan kita membaca dalam hati tak dapat dilepaskan dari sejarah kolonialisme. Dan lambat-laun saya pun menyadari apa yang terjadi tatkala dulu Ibu Guru menyuruh kami membaca dalam hati, di atas bangku kayu di ruang kelas yang berdebu. Rupa-rupanya kami sedang melanjutkan proses panjang perubahan kesadaran yang dimulai jauh-jauh hari. Diam-diam kami, anak-anak di tanah yang dulu terjajah, dibiasakan mendiami ruang pribadi. Itulah ruang yang tersendiri tempat berbagai macam tulisan diresapkan dalam kesunyian. Di ruang itulah, saya mengartikan ungkapan "membaca dalam hati" sebagai "mempersilakan tulisanmu masuk ke dalam hatiku". ■ hawesiawan@hotmail.com

Republika, 19 Oktober 2003

PENERJEMAHAN

LINTAS KOTA

Dilantik, Penerjemah Femprov DKI

JAKARTA—Sejalan dengan era globalisasi, komunikasi dan interaksi antar bangsa senantiasa terus meningkat dari waktu ke waktu. Perkembangan tersebut telah mendorong munculnya konsep negara tanpa batas (*borderless country*), dimana kegiatan internasional saling kait mengait menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. "Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan ucapan selamat kepada saudara-saudara atas keberhasilannya mengikuti serangkaian tes sebagai prasyarat untuk menjadi penerjemah resmi Pemprov DKI," demikian kata sambutan gubernur DKI Sutiyoso yang dibacakan Astapratur Sekdaprov DKI Moerdiman RM saat melantik delapan penerjemah resmi Pemprov DKI di Balai Agung, Rabu (15/10). Hubungan yang demikian ini, kata Moerdiman, tentunya hanya dapat terwujud apabila pesan yang akan disampaikan oleh masing-masing pihak dapat dipahami oleh pihak lain. Sehingga terjalin suatu komunikasi yang baik diantara pihak-pihak yang melakukan interaksi. "Namun demikian, perbedaan bahasa kadangkala, bahkan tidak jarang menjadi kendala bagi munculnya komunikasi yang efektif diantara mereka. Oleh karena itu, kehadiran penerjemah yang mampu menjembatani secara baik hubungan komunikasi dan korespondensi antara pihak-pihak yang berbeda bahasa, menjadi sangat penting artinya," ujar mantan Sekwan DPRD DKI ini.

Dalam skala global/internasional, dimana kerjasama antar bangsa dalam berbagai bidang kegiatan dilakukan secara intensif. "Kehadiran penerjemah yang memiliki kemampuan berbahasa asing yang baik, sangat diperlukan. Dengan bantuan penerjemah, berbagai kerjasama antar bangsa di bidang politik, ekonomi, sosial dan kerjasama lainnya yang saling menguntungkan (*mutual benefit*) dapat berjalan baik. Bahkan banyak diantaranya yang berkembang pesat," tandasnya. Pada sisi lain, kedudukan Jakarta sebagai ibukota negara, menempatkan Jakarta sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, ekonomi, perdagangan dan pusat berbagai kegiatan lain yang berskala nasional bahkan internasional. Kedudukannya yang demikian, menjadikan Jakarta sering ditunjuk sebagai tuan rumah penyelenggaraan berbagai *event* internasional seperti seminar, konferensi dan forum-forum internasional lainnya. "Oleh karena itu kehadiran penerjemah dalam mendukung kedudukan Jakarta sebagai kota internasional yang berbasis *service city* merupakan kebutuhan. Dengan bantuan penerjemah yang handal, berbagai kesalahpahaman yang mungkin muncul dalam komunikasi atau kerjasama antar bangsa yang diakibatkan oleh perbedaan bahasa, dapat dihindari atau dieleminir," paparnya. Kedelapan penerjemah ini merupakan jebolan dari Universitas Indonesia (UI). Juli

Berita Buana, 16 Oktober 2003

SASTRA ACEH

Wajah Aceh dalam Puisi

JAKARTA — Satu lagi buku karya sastra tentang Aceh lahir. Buku yang diberi judul *Aceh dalam Puisi* itu memuat puisi karya 25 penyair yang sebagian besar penyair Aceh. Buku terbitan penerbit Asy Syaamil (PT Syaamil Cipta Media) Bandung itu akan diluncurkan di Taman Ismail Marzuki (TIM) Jakarta, Minggu, 19 Oktober 2003.

Penerbitan buku ini menambah khazanah karya sastra yang khusus berbicara tentang Aceh. Beberapa tahun lalu, Fikar W. Eda dan kawan-kawan juga menyusun buku kumpulan karya sastra berisi puisi, cerpen, dan esai tentang Aceh bertajuk *Aceh Mendesah dalam Napasku* yang menghimpun karya-karya sastrawan Indonesia.

Peluncuran buku itu mengambil momentum acara kesenian tentang Aceh yang berlangsung di hari itu sejak pagi pukul 10.00 WIB hingga malam hari. Acara dibagi dalam tiga bagian. Di pagi hari digelar seminar tentang budaya dan pendidikan di Aceh dengan pembicara Prof. Dr. M. Junus Melalatoa dari Universitas Indonesia dan Dr. Ismail Ariyanto. Sesi kedua yang dimulai siang hari akan menampilkan dua pembicara, sastrawan Malaysia Prof. Dr. Siti Zainon Ismail dan L.K. Ara. Siti Zainon akan membicarakan buku antologi puisi *Rencong* karya Fikar W. Eda. Sedangkan, "Saya akan berbicara mengenai tragedi Aceh dalam karya sastra," kata L.K. Ara.

Bagian ketiga dari rangkaian acara itu berlangsung pada Minggu malam, yakni peluncuran dan pembacaan puisi dari buku *Aceh dalam Puisi*. Penyair yang akan tampil, menurut L.K. Ara, antara lain Suparwan Parikesit, Wiratmadinata, Helmi Hass, Mustafa Ismail, Nurdin F. Joes, D. Kemalawati, Dianing Widya Yudhistira, dan Fikar W. Eda.

Dalam kesempatan itu akan tampil juga budayawan Aceh T.A. Sakti, pelestari naskah sastra Aceh yang baru mendapat Bintang Budaya Parama Dharma dari Presiden RI. "T.A. Sakti akan membacakan *Hikayat Aceh*," kata Ara. ● mis

Koran Tempo, 17 Oktober 2003

Rencong dan Keresahan Seorang Penyair Aceh

JAKARTA — Suara Fikar W. Eda tak ubahnya lolongan serigala menelan perih karena luka. Teriakan dalam nada-nada tinggi yang terjaga itu terus membombardir telinga. Wajahnya yang disorot kamera dari jarak dekat memekikkan amarah tak terkira. Berbait puisi mengalir dari bibirnya yang tak henti meneriakkan kegelisahan seorang anak bangsa dari Aceh. Sosok Fikar hadir dalam tayangan layar proyektor di Auditorium Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia pada Jumat (17/10) siang pekan lalu.

Penyair kelahiran 1966 itu sedang meluncurkan kumpulan puisinya dalam buku berjudul *Rencong*. Ia hadir di tengah ratusan undangan dan duduk di bangku terdepan. Menggunakan celana gombrong warna hitam dengan baju bermotif tenunan Aceh. Busana ini pula yang ia gunakan saat membacakan puisinya di The Pakubuwono Residence, Jakarta Selatan, Agustus lalu. Rekaman pembacaan tadi kembali ditayangkan dalam peluncuran bukunya.

Gaya Fikar membaca puisi mewakili kegelisahan dan keperihan masyarakat Aceh yang tak pernah tenang selama puluhan tahun. Mereka menjadi bagian dari negeri bernama Indonesia yang justru menebarkan sengsara tak terkira. "Padahal, jasa masyarakat Aceh begitu besar bagi bangsa ini," katanya. Ia tak habis pikir ketika Aceh menjadi ladang aparat militer berbaku tembak dengan alasan stabilitas keamanan negara.

Aceh yang kaya sumber daya alam harus berkubang dalam kemiskinan. Aceh yang di masa Raja Sultan Iskandar Muda begitu tenang, kini menerima kenyataan pahit. Ketenangan menjadi

barang langka. Ketakutan tak pernah pergi menjauh dari wilayah berjudul Serambi Mekkah ini. Entah berapa ratus warganya bersimbah darah, lalu meregang nyawa meninggalkan duka. "Ratusan anak menjadi yatim dalam hitungan menit," katanya.

Kegelisan Fikar sebagai warga Aceh ditunjukkan dalam 22 puisi yang menjadi bagian pertama bukunya. Bagian ini diberi judul *Rencong*. Bagian kedua juga terdiri dari 22 puisi dengan judul *Rajah*. Dua bagian tadi sedikit berbeda karena tema yang diangkat juga berbeda. Beberapa puisi pada bagian pertama secara telak menuding pemerintah pusat di Jakarta sebagai "tak tahu berbalas budi".

Simak puisi berjudul *Rencong* berikut ini: *...siapa saja yang datang/kami hadiah gelar/sebagai saudara/dan penghormatan... betapa pedih hati kami/dari Jakarta/kalian hujamkan mata rencong itu/tepat di jantung kami!* Fikar tak menggunakan bahasa yang rumit untuk merekam sebuah peristiwa. "Fikar menawarkan kesinisan ketika keramahan dibalas kebrutalan," kata Tomy Christomi, dosen sastra yang membacakan *Rencong* bersama W.S. Rendra dan sastrawan Malaysia Siti Zainon Ismail.

Fikar tak ingin basa basi menyampaikan kenyataan yang dihadapi masyarakat Aceh, termasuk kasus pemerkosaan dan pembunuhan yang selama ini kerap tak diakui pemerintah di Jakarta. *...melebihi Belanda/mereka perkosa istri-istri kami/mereka tebas leher putra putri kami/mereka bunuh harapan dan cita-cita kami... melebihi Belanda/itulah Jakarta!*

Puisi yang dibuat pada 1999 ini merupakan rekaman batin Fikar tentang Daerah Operasi Militer di Aceh yang diyakini ba-

nyak menelan korban. Bukan hanya nyawan dan harga diri, tapi juga materi yang tak terkira nilainya. Fikar pantas bergolok melihat kekayaan alam tanah kelahirannya dieksploitasi tanpa memberikan manfaat kepada rakyat setempat. "Semakin tahu kenyataan di Aceh hati saya semakin perih," katanya.

Keperihan yang disampaikan dalam bahasa yang lugas, tegas, dan padat itu akhirnya mudah dicerna. Ketangkasan Fikar meracik kata tak lepas dari tradisi lisan Takengon yang mengalir deras dalam tubuhnya. Seruan tentang kemanusiaan begitu menyentuh hati karena, "Kefasihannya memadatkan pengucapan dan selektif menggambarkan detail," kata Rendra. Apalagi, Fikar mampu menjelaskan bahwa kekerasan merupakan bentuk kebodohan manusia.

Meski disesaki puisi yang berangkat dari keperihan, Fikar tak sampai terjebak pada kecengengan meratap tanah airnya yang terkoyak. Padahal, ia tak bisa melepaskan diri dari trauma masa kecilnya yang melihat mayat bergelimpangan di depan matanya. Fakta sosial ini sangat berpengaruh pada proses kreatifnya. "Mau tak mau ia mengalami guncangan batin juga," kata Siti Zainon Ismail, Guru Besar Sastra Fakultas Sains Sosial dan Kemanusiaan Universitas Kebangsaan Malaysia.

Dalam pandangan Zainon, puisi Fikar bukan sekadar alat meneriakkan keperihan masyarakat. Pada saat bersama puisinya justru menjadi alat penyembuh bagi batin yang terkoyak. Puisi Fikar bukan memprovokasi Aceh untuk lepas dari Jakarta. Ia justru mengingatkan Jakarta dalam semangat kebersamaan sebagai satu bangsa besar. Meski beberapa puisi-

nya, "Memercikkan citra panas seperti api," kata Zainon. Artinya, puisi Fikar tak mustahil memerahkan telinga penguasa di Jakarta.

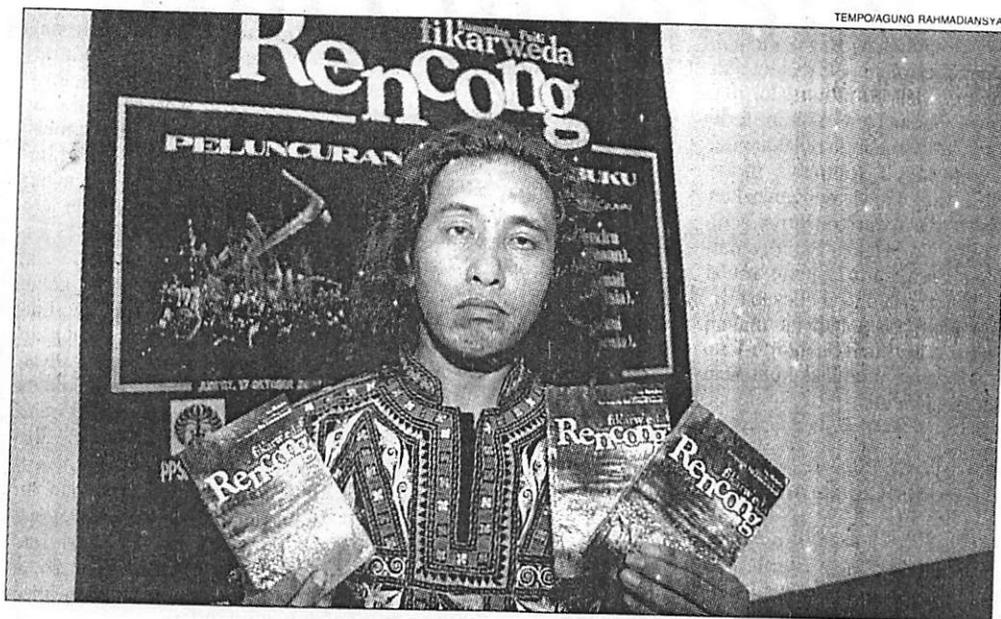
Di tengah gemuruh yang terus bergolak, toh Fikar tak bisa melepaskan diri dari latar belakang Aceh yang relejius. Mistisme Gayo tetap mewarnai beberapa penggal kata dalam *Lady's Night* dan *Cahaya Suci Mataha-*

ri. Penggalan dalam dua puisi ini terasa begitu lembut. Sangat berbeda dengan puisi *Rencong* dan *Seperti Belanda* yang cenderung keras, tegas, dan tak kenal kompromi.

Karakter tadi tentu bukan hal baru bagi masyarakat Aceh yang tak kenal menyerah. Keberanian untuk menyuarakan aspirasi masyarakat kadang di-

baca berbeda oleh penguasa. Ketika Fikar meneriakkan *...biarkan kami...* sebenarnya ia sedang bernegosiasi dengan wacana besar nasionalisme Indonesia. Fikar ingin masyarakat Aceh bebas merdeka dari keterpasungan dan kemiskinan yang selama ini menjerat mereka.

● arif firmansyah



Koran Tempo, 21 Oktober 2003

SASTRA ALIRAN

Realisme Setengah Hati

Oleh BINHAD NURROHMAT

Berikut ini dua cuplikan cerita Satmoko Budi Santoso dalam kumpulan *Dilarang Membunuh di Hari Sabtu* (Penerbit Jendela, 2003):

Aku maupun Smith tak mampu mengimbangi omongan Nero. Bukan apa-apa. Semuanya hanya bisa dijawab dengan tindakan. Aku ingat dengan pesan seorang kawan, kebetulan wawancara pengagum John Denver dan pemangsa wanita, agar semua cita-cita mesti diwujudkan dalam bentuk kerja. Apalagi, sebagai arkeolog, kami berdua hanya biasa dengan pola berpikir seputar runtutan sejarah benda-benda, situs purbakala, bentuk-bentuk fisik benda yang dikaitkan dengan zaman tertentu. Maka, melihat "benda" semacam Nero, seperti melihat kehebatan omongan Kaisar Nero yang terkenal di sebuah kerajaan zaman Yunani Kuno di Athena, yang mampu menyelesaikan semua konflik di negerinya, sekaligus dengan kekerasan (hal 106).

Kepada Magdalia ia pernah berjanji akan mengerjakan apa pun yang dirasakannya perlu untuk dibereskan, ia mau tak sekadar sebagai buruh perawat kebun lada, tetapi juga sekaligus pembantu rumah tangga.

Pernah, pada sore hari, tak sengaja Socruz lewat beranda, hanya bermaksud melintas. Maklum, jika jalan ke arah kebun lada akan lebih cepat jika melintasi beranda. Jika lewat samping rumah akan lebih lama, apalagi lewat belakang. Sementara, kebun lada itu ada di depan rumah, jadi tak salah Socruz berjalan melintasi beranda ruang tamu. Nah, ketika melintas itulah Socruz melihat Abilio sedang memaksa Magdalia bercumbu, Socruz mendengar kalimat yang terlontar dari Abilio sangat kasar. "Tak ada telinga yang

sanggup mendengar kalimat itu," kata Socruz, berucap perlahan, dalam batinnya, "seorang jenderal memaksa bercumbu dengan ancaman membunuh. Konyol. Abilio sengaja diciptakan Tuhan agar hadir ke muka bumi sebagai laki-laki bangsat?" (hal 4).

Bandingkan dengan dua cuplikan cerita Budi Darma dalam kumpulan *Orang-orang Bloomington* (Penerbit Sinar Harapan, 1980) berikut.

Hari-hari berjalan seperti biasa, sampai akhirnya pada suatu hari saya membaca sebuah selebaran mengenai lomba penulisan kumpulan puisi yang diselenggarakan oleh MLA (Modern Language Association), sebuah organisasi ahli-ahli sastra dan bahasa yang berpusat di New York.

Siapa pun boleh mengirimkan kumpulan puisi. Semua kumpulan yang memenuhi syarat tahap pertama akan dinilai sebuah juri yang diketuai oleh presiden MLA, dengan anggota-anggota penulis-penulis internasional, yaitu Allen Ginsberg, Antonio Buero Vallejo, dan Christina Brooke-Rose, serta seorang anggota MLA, yang namanya akan diumumkan kemudian (hal 30).

Setelah musim panas siap untuk digantikan musim gugur, keadaan saya berubah. Berbeda dengan musim panas, menjelang musim gugur kota Bloomington dibanjiri oleh kedatangan lebih kurang tiga puluh ribu mahasiswa, baik yang baru maupun yang selama musim panas meninggalkan kota. Tapi, sepanjang pengetahuan saya, tidak ada satu pun yang tinggal di Fess dan sekitarnya. Bloomington menjadi ramai, tapi Fess tetap sepi. Kecuali itu makin lama hari makin pendek-matahari makin terlambat terbit dan makin cepat terbenam. Dan kemudian, daun-daun menguning, lalu berdikit-dikit rontok (hal. 2-3).

Cuplikan-cuplikan cerita dari dua pengarang realis (berbahasa) Indonesia

itu dibandingkan atas dasar kesamaan latar tempat kejadian cerita yang berlangsung di negeri asing dan nama tokoh ceritanya berbau asing pula. Nama latar tempat kejadian cerita itu tampil implisit lewat pilihan nama tokoh cerita yang melekat dengan lingkungan budaya masyarakat negara tertentu (misal, Socruz dan Abilio, nama khas masyarakat Spanyol atau Amerika Latin) sebagaimana cerita Satmoko Budi Santoso. Sedangkan dalam cerita Budi Darma latar tempat kejadian cerita disebut secara eksplisit (misal, Bloomington) yang juga diperkukuh oleh nama tokoh cerita yang melekat dengan lingkungan budaya masyarakat tempat kejadian cerita (misal, Ny MacMillan).

Jika "hanya" membaca dua cuplikan cerita Satmoko Budi Santoso dan menganggapnya "sekadar" cerita rekaan, mungkin tak ada persoalan. Tapi, jika membaca cuplikan itu sembari berpikir dan merujukkan perincian latar sejarah maupun lingkungan budayanya kepada buku sejarah, kamus ataupun ensiklopedi, dalam cuplikan itu terdapat alibi atau cacat representasi yang fatal. Pertama, Kaisar Nero adalah kaisar Roma dan tak pernah menjadi kaisar Athena. Kedua, kebun lada tak ada di Spanyol atau negara-negara Amerika Latin.

Sedangkan dua cuplikan cerita Budi Darma terhindar dari alibi atau cacat representasi semacam itu dan bahkan latar tempat kejadian cerita bisa tampil akurat (misal, "Setelah musim panas siap untuk digantikan musim gugur, keadaan saya berubah. Berbeda dengan musim panas, menjelang musim gugur kota Bloomington").

Faktanya, musim gugur memang lazim terjadi di Bloomington. Selain itu, dalam cerita Budi Darma rincian tampil secara jitu dan mempertegas latar (misal, menggambarkan musim gugur di Bloomington "makin lama hari makin pendek—matahari makin terlambat terbit dan makin cepat terbenam. Dan kemudian, daun-daun menguning, lalu berdikit-dikit rontok.")

Budi Darma menguasai dan intim dengan latar tempat kejadian cerita yang ditulisnya, sehingga dia dapat menghadirkan latar tempat kejadian cerita secara menyakinkan. Dia juga paham stereotipe tokoh ceritanya yang sinkron dengan kelaziman perilaku berdasarkan latar budaya masyarakatnya. Dia bukan pengarang yang sekadar merangkai peristiwa, menggambarkan latar, dan memilih nama tokoh ceritanya yang hanya seolah-olah berbau Bloomington (Amerika), melainkan

cerita rekaan yang "sungguh-sungguh hidup" di Bloomington, mencerminkan perilaku dan sikap hidup masyarakat Amerika pada umumnya yang rasional dan individual. Perhatikan sebuah cuplikan cerita berikut.

Hanya itulah yang saya ketahui, karena hanya itulah yang diceritakan Ny. MacMillan. Janganlah mengurus kepentingan orang lain, dan janganlah mempunyai keinginan tahu tentang orang lain, inilah pesan Ny. MacMillan setelah menutup ceritanya mengenai kedua tetangganya. Hanya dengan demikian, katanya, kita dapat tenang.

Bahkan dia selanjutnya memesan, supanya hubungan baik antara dia dengan saya tetap baik, saya hanya boleh bercakap dengan dia bilamana perlu, itu pun harus melalui telepon (hal 1-2).

Bandingkan dengan sebuah cuplikan cerita Satmoko Budi Santoso berikut.

"Kenapa kamu datang? Aku tak memanggilmu."

"Aku harus datang, tanpa kemarahan."

"He, rupa-rupanya kamu mulai pandai bicara. Kapan kita pernah ngobrol dengan enak, ya?"

"Tak ada yang mengajarku ngobrol enak. Tak juga kamu."

"Eh, kamu berani memanggil aku dengan 'kamu'?"

"Ya."

"Eh"

"Aku mesti berhitung nyali denganmu. Nyalilah yang mengajarku bicara."

"Kamu pasti banyak nonton teve, ya?" Omgonganmu kok seperti kaum demonstran."

"Aku tak kenal demonstran. Siapa itu? Aku ingin berhitung nyali. Mendadak sekali, Abilio."

"Kalimatmu tersusun bagus."

Socruz dan Abilio pada akhirnya berkelahi. Muka mereka berdarah. Ternyata, perkelahian tak cukup. Socruz telanjur menyalapkan dua buah parang. Mungkin karena Abilio tak biasa mengayunkan parang, maka ia rela parang yang diacungkan Socruzlah yang mencabik dada, leher, kepala, dan lambung. Socruz meminta maaf, tindakannya kelewat jantan. Socruz tak bermaksud menikam dari belakang. Socruz tak mau main kayu.

Abilio mati tak dikafani, tanpa sematan lelcana, tanpa sematan tanda bintang yang biasa dipakai seorang jenderal (hal. 6-7).

"Lazimkah" seorang buruh kebun semacam Socruz dapat tampil begitu cerdas dialognya dan berkesempatan berkelahi dengan Jenderal Abilio dan

bahkan sekaligus membunuhnya, apalagi sang jenderal adalah pelanggan hasil kebun majikannya sendiri, Magdalia? Dan senonohkah perilaku seorang jenderal bisa membuat seorang buruh melawannya, mengajaknya berkelahi, dan membuat dirinya terbunuh? Bukankah gambaran sikap dan perilaku buruh dan jenderal semacam itu melanggar representasi stereotip mereka sendiri? Alibi semacam itu tentu membuat representasi jadi meleset dan "tak masuk akal" akibatnya mengganggu "kebenaran" cerita rekaan itu sendiri dan menggoyahkan keyakinan imajinasi pembaca yang berwawasan.

Kejadian itu bisa masuk akal jika dalam cerita rekaan ada latar belakang Socruz yang memungkinkan kejadian itu tak mustahil. Misal, Socruz seorang mantan tentara yang dipecat dari kesatuannya karena arogansi pimpinannya dan dia punya dendam kesumat terhadap Abilio, pimpinan di kesatuannya, lalu dia menyamar sebagai buruh agar bisa menjalankan dendamnya. Artinya, Socruz bukanlah buruh kebun yang sebenarnya, tapi seorang "tentara".

Alibi dan melesetnya representasi semacam itu bisa dialami cerita rekaan akibat pengarang tak mengecek karyanya dengan buku sejarah, kamus

atau ensiklopedi. Pengecekan harus dilakukan, apalagi bagi pengarang realis yang mengangkat latar asing yang tak diakrabinya secara langsung, misal lewat literatur, film atau media perantara lainnya. Pengecekan dilakukan untuk menghindarkan cerita rekaan dari kerancuan-kerancuan. Pengarang yang memiliki disiplin naratif akan melakukan pengecekan, bahkan berulang-ulang, agar cerita rekaannya akurat dan tampil "sebenarnya".

Maka disiplin naratif menjadi penting bahkan mutlak. Dalam ungkapan lain pengarang yang baik akan menciptakan nama tokoh ceritanya dan menggambarkan latarnya dengan timbangan nalar yang benar atau sinkron. Sebab pengarang yang baik adalah seorang pencipta yang niscaya peduli kepada hukum representasi, menghindari alibi dan mengejar akurasi, sehingga karyanya dapat menciptakan dunia imajinasi yang "masuk akal" lewat gambaran tokoh, peristiwa, maupun latarnya. Ini tak bisa ditolak jika pengarang ingin mencapai suatu karya yang dapat meyakinkan dirinya sendiri sekalipun. ♦

PENULIS SEORANG PENYAIR, KOORDINATOR
SERIKAT PEMBACA DUNIA

Suara Pembaruan, 12 Oktober 2003

SASTRA BALI-BIOGRAFI

"The Father of Balinese Studies" Telah Pergi

◆ In Memoriam Prof Dr I Gusti Ngurah Bagus (1933-2003)

OLEH: I NYOMAN DARMA PUTRA

PROF I Gusti Ngurah Bagus, salah satu intelektual Bali yang penuh semangat, tak pernah puas, dan selalu menggugat, telah dipanggil Yang Mahakuasa, Kamis, 16 Oktober 2003 sore. Sudah sejak lama dia menderita komplikasi liver-diabetes, namun semangat intelektualnya yang tak pernah redup sampai akhir hayatnya seperti menutupi derita yang dialami tahun-tahun terakhir sehingga kepergiannya terasa sebagai sebuah ketiba-tibaan. Bali berduka!

Selain keluarga yang ditinggalkan, duka cita juga bergema di almaternya, Universitas Udayana, di kalangan mahasiswa program master dan doktor yang tengah dibimbingnya menulis tesis atau disertasi, serta di kalangan sarjana asing yang bergerak di bidang *Balinese Studies* (Kajian Bali). Selain pemikiran-pemikirannya yang radikal tentang kebudayaan, Ngurah Bagus akan dikenang atas jasanya karena berhasil untuk pertama kalinya di Indonesia membangun program studi Kajian Budaya (*Cultural Studies*) untuk jenjang master (1996) dan doktor (2001).

Kajian Budaya yang menerima mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia inilah yang menjadi monumen akademik paling penting yang pernah didirikan Ngurah Bagus.

Perjalanan panjang

Program Kajian Budaya yang multidisipliner yang dilahirkannya merupakan hasil perjalanan panjang karier keilmuan Ngurah Bagus. Setelah tamat SMA II Yogyakarta, Ngurah Bagus yang lahir 12 Juli 1933 dari keluarga puri (ningrat) di sisi utara Kota Denpasar melanjutkan ke Jurusan Sastra Timur Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada (1953). Dari sana dia melanjutkan ke Jurusan Sastra Indonesia Fakultas Sastra Universitas Indonesia (1959). Setelah belajar sastra di tingkat sarjana, Ngurah Bagus mempelajari ilmu bahasa di program pascasarjana Jurusan Linguistik Umum dan Nusantara di Universitas Leiden (Belanda). Dari jurusan bahasa, dia putar haluan untuk mendalami kebudayaan dengan menempuh program doktor di Jurusan Antropologi Universitas Indonesia (1979).

Kalau pada akhirnya Ngurah Bagus dikenal sebagai guru besar antropologi, kompetensinya di bidang sastra dan linguistik ikut memperkokoh sosoknya sebagai intelektual multidisiplin.

Beragam ilmu yang dikuasainya membuat Ngurah Bagus menjadi intelektual yang sensitif

terhadap fenomena yang berkembang, khususnya dalam kebudayaan dan masyarakat Bali. Salah satu penelitian pentingnya yang sangat maju (dalam arti orang lain belum memikirkannya ketika itu) adalah mengenai dampak pariwisata terhadap kebudayaan Bali. Studi *Bali dalam Sentuhan Pariwisata* ini dikerjakan awal tahun 1970-an bersama sarjana Amerika, Philip McKean, yang membahas gejala *hippies* yang berkembang di arena global dan merasuk ke Bali lewat pariwisata waktu itu.

Kalau kemudian pemerintah Orde Baru dan masyarakat umum berbicara tentang dampak negatif pariwisata terhadap jati diri masyarakat, Ngurah Bagus sudah jauh era mengkhawatirkannya. Salah satu kesimpulannya waktu itu adalah daripada menolak pengaruh luar, Bali sebaiknya dengan sadar memperkokoh kebudayaannya. Makanya, siapa pun kini meneliti dampak pariwisata Bali, tidak bisa mengabaikan penelitian Ngurah Bagus dan kawan-kawan tiga dekade lalu itu.

Dengan kepustakaan dan materi riset yang relatif lengkap, Ngurah Bagus bisa menemukan banyak informasi yang penting bagi dunia keilmuan. Di bidang sosial politik, Ngurah Bagus telah mengangkat peranan pemuda pejuang dalam revolusi Indonesia tahun 1940-an dan 1950-an, seperti ditulis dalam buku suntingan Hildred Geertz, *State and Society in Bali, Historical, Textual and Anthropological Approaches* (1991).

Di bidang sastra Indonesia modern yang berkembang di Bali, Ngurah Bagus-lah yang pertama kali menemukan drama berbahasa Melayu berjudul *Kesetiaan Perempuan* yang ditulis sastrawan Bali (anonim) tahun 1927, seperti bisa dibaca lewat kajiannya dalam buku suntingan Adrian Vickers, *Being Modern in Bali, Image and Change* (1996). Tulisan ini merangsang penelitian lebih lanjut tentang peran Bali dalam pertumbuhan sastra Indonesia dalam konteks kebangkitan nasionalisme, khususnya menjelang diangkatnya bahasa Melayu sebagai bahasa bangsa dalam Sumpah Pemuda 1928.

Dalam sepuluh tahun terakhir, Ngurah Bagus juga melirik dunia seni pertunjukan dan seni lukis. Tulisan-tulisan dan komentarnya di kedua bidang ini membuat kuping seniman-seniman di Bali merah sekaligus bergairah. Ngurah Bagus mengkritik keras Pesta Kesenian Bali (acara

pesta seni kolosal Bali tahunan sejak 1979) sebagai "jalan di tempat, tanpa lompatan estetis berarti".

Ngurah Bagus bukan saja peneliti dan pemikir, melainkan juga pembina. Dalam kapasitasnya sebagai dosen Fakultas Sastra Universitas Udayana (Unud) dan Kepala Balai Penelitian Bahasa (dan Sastra) sejak akhir tahun 1960-an hingga pertengahan tahun 1980-an, Ngurah Bagus dengan sadar betul membina perkembangan sastra Bali modern. Kekagumannya melihat perkembangan sastra Jawa (modern) dan sastra Sunda mendorong Ngurah Bagus untuk meneliti perkembangan sastra Bali modern yang sudah berbenih sejak tahun 1910-an, namun hidup "bagai kerakap tumbuh di batu".

Ngurah Bagus memacu kehidupan sastra Bali modern dengan mengadakan berbagai perlombaan dan pembentukan kelompok pengarang (Sabha Sastra Bali). Hasilnya, tak hanya bahasa Bali hidup terus dalam bentuk tulisan, tetapi juga khazanah sastra Bali modern kian subur dan menjadi dokumen estetis masyarakat Bali yang berisi respons mereka terhadap perubahan sosial. Di era otonomi daerah di mana muatan lokal menjadi kebutuhan, khazanah sastra Bali modern telah menyiapkan diri untuk kepentingan dunia pendidikan.

Jasa Ngurah Bagus dalam membina sastra Bali modern dengan komitmen tinggi membuat Ketua Yayasan Rancage, Ajip Rosidi, untuk menganugerahi Ngurah Bagus Hariah Sasira Rancage tahun 1999. Tanpa sentuhan Ngurah Bagus, kehidupan sastra Bali modern pastilah jauh tenggelam dibandingkan dengan sastra Bali klasik/tradisional yang terus berkibar di era modern ini.

Minat-minatnya dalam berbagai bidang ilmu dan pembinaan menjadi landasan bagi Ngurah Bagus untuk mengembangkan Kajian Budaya, program studi yang pertama tumbuh di Inggris tahun 1960-an dan populer di seluruh dunia dalam dekade terakhir ini dengan berbagai mazhabnya.

Yang juga mempercepat proses Ngurah Bagus untuk mewujudkan Program Kajian Budaya di Unud adalah intensifnya dialog keilmuan Ngurah Bagus dengan sarjana luar negeri yang menunjukkan minat di bidang antropologi dan kajian budaya, seperti Mark Hobart dari School of Oriental and African Studies (SOAS) London, Carol Warren dan Adrian Vickers (Australia), serta Hildred Geertz (Amerika).

Dialog dengan sekian banyak sarjana asing yang datang ke Bali lewat program penelitian menambah keyakinan Ngurah Bagus untuk membuka Kajian Budaya di Universitas Udayana. Sosok dirinya yang multidisipliner dan semangat keilmuannya yang cenderung dekonstruktif menjadi ikon khas Kajian Budaya yang dibangunnya.

"The father of Balinese Studies"

Sejak lama Ngurah Bagus menjadi pintu masuk bagi calon doktor luar negeri yang hendak menjadikan Bali dengan segala aspek kehidupannya sebagai fokus riset dan studi. Dia tidak saja menjadi sponsor visa riset, tetapi juga menjadi kamus untuk kebudayaan Bali bagi peneliti

asing. Perannya sebagai kamus kebudayaan Bali itu telah membuat seorang sarjana Belanda, Henk Schulte-Nordholt, menjulukinya sebagai "the father of Balinese Studies". Menurut Henk, yang menjadi "the mother" adalah antropolog Amerika, Prof Hildred Geertz.

Sebagai tanda terima kasih atas peran Ngurah Bagus dalam studi kebudayaan Bali, pada tahun 2000 para sarjana asing menerbitkan buku kumpulan karangan *To Change Bali, Essays in Honour of I Gusti Ngurah Bagus*, disunting Prof Dr Adrian Vickers dkk, dari University of Wollongong, Australia. Dalam buku inilah predikat Ngurah Bagus sebagai "the father of Balinese Studies" terpatriti yang kelak akan dikenang terus.

Kompetensi keilmuannya di bidang sastra, bahasa, budaya, agama, dan sosial telah membuat Ngurah Bagus kerap ditunjuk sebagai penguji disertasi mahasiswa program doktor di dalam dan luar negeri. Awal tahun 2003 ini, misalnya, Ngurah Bagus diundang ke Belanda untuk menjadi anggota penguji Maya HT Liem yang menulis disertasi berjudul *The Turning Wheel of Time, Modernity and Writing Identity in Bali 1900-1970*. Undangan ini membanggakan hati Ngurah Bagus karena memberikannya kesempatan untuk melakukan ziarah ke Leiden, kota tempatnya pernah menuntut ilmu.

Di sela-sela acara menjadi anggota penguji, Ngurah Bagus pun didaulat untuk memberikan ceramah tentang kondisi Bali pascatragedi bom di hadapan sarjana penekun studi Bali dan Indonesia pada umumnya. Bagi Ngurah Bagus, proses reformasi dan peledakan bom 12 Oktober 2002 merupakan alasan dan landasan bagi orang Bali untuk mengoreksi diri sebagai orang-orang yang kurang tertarik pada politik menjadi lebih *politically active and strategic*. Dalam konteks kebudayaan, seperti sering dikatakan dalam tulisan dan seminar-seminar, Ngurah Bagus mendesak agar Bali jangan "hanya menjadi tontonan".

Pandangan-pandangan Ngurah Bagus tentang kebudayaan dan masyarakat Bali memang tampak sesuai dengan spirit *cultural studies* yang dikembangkan. Dalam kajian budaya, Ngurah Bagus sepemikiran dengan koleganya, Mark Hobart, bahwa tugas sarjana tidak saja menjelaskan bagaimana kebudayaan dan media bekerja, tetapi lewat "analisis intervensi" (*intervention analysis*), dia juga harus mengubah pemikiran orang. Dengan kata lain, menjadi orang menjadi *more active subject*.

Ngurah Bagus memiliki *negative capability* dan lewat kegelisahan itu dia menggugat berbagai pemahaman yang semu dan mapan tentang agama, tradisi, sastra, dan seni dalam konteks masyarakat Bali.

Kegarangan Ngurah Bagus dalam menolak pemikiran orang lain dan menyampaikan gagasannya sendiri membuat orang lain enggan mendekatinya atau mengikuti konsep-konsepnya. Satu kendala yang sering dikeluhkan orang tentang Ngurah Bagus adalah karena ketidakberhasilan Ngurah Bagus mengartikulasikan pemikirannya dengan lugas. Ide-ide Ngurah Bagus yang kompleks selalu disampaikan secara kompleks juga. Ngurah Bagus banyak menulis ka-

rangan, tetapi karena tersebar dan merupakan kajian-kajian awal, jalan pemikirannya tidak mudah dirunut.

Seperti pernah dikatakan Teeuw, Ngurah Bagus memang seorang petualang, dalam arti mengepakkan sayap pemikirannya untuk menjelajahi berbagai ilmu dan aneka disiplin, mulai dari sastra, agama, budaya, sosial, seni, dan terakhir juga politik. Salah satu cita-citanya sebelum dipanggil Yang Mahakuasa, seperti disampaikan kepada *Bali Post* (8 Juni 2003), adalah membukukan karya-karyanya mengenai antropologi, linguistik, sastra, agama, dan kajian budaya. Konsep *grand theory* tentang kajian budaya sedang diperam terus, tetapi sayang belum sempat dituangkan dalam bentuk tulisan sampai akhir hayatnya.

Sisi lain kehidupan Ngurah Bagus yang unik terlihat pada saat dia maju menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) utusan daerah di era reformasi. Jabatan ini seperti men-

jadi hadiah baginya yang ikut berdemonstrasi di tengah-tengah massa dan mahasiswa di Bali saat menjatuhkan Orde Baru. Dia tidak pernah merasa cukup untuk berjuang di kancah akademik.

Setelah pensiun dalam usia 70 tahun, per 31 Juli 2003, sebagai Guru Besar Universitas Udayana, Ngurah Bagus masih ingin mengabdikan dirinya kepada masyarakat dan bangsa. Dia pun mencalonkan diri menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan siap bertarung dalam Pemilihan Umum 2004. Pencalonannya menjadi DPD sudah lolos verifikasi KPU, namun perjuangan itu kini terhenti setelah keberangkatannya ke alam sana. Selamat jalan Prof Ngurah Bagus! Bali akan mengenangmu sebagai pemikir yang penuh vitalitas. ♦

INYOMANDARMA PUTRA
Dosen Jurusan Sastra Indonesia
Universitas Udayana

Kompas, 19 Oktober 2003

SASTRA CINA

Opera Cina dan Pentas Tradisi Lisan

Mereka merayakan yang klasik. Tradisi lama ini tak hanya berkaitan dengan daerah, tapi juga agama.

JAKARTA — Kepulan asap mengiringi kedatangan Setan Tiga Roh. Di dalam kuil tua yang dipenuhi debu dan sarang laba-laba, setan itu memaksa Nian Xiao Qian untuk mencari pemuda yang bisa dimangsanya. Dengan kecantikan Qian, tujuan itu pasti bisa dipenuhi.

Nian Xiao Qian adalah nama gadis yang menjadi tokoh utama dalam pementasan *Kuil Berhantu* yang dipentaskan kelompok Chinese Opera Institute dari Singapura. Lakon tua dari masa pemerintahan Dinasti Qing itu dipentaskan di Gedung Kesenian Jakarta, Kamis (2/10) malam. Pementasan ini merupakan bagian dari acara Seminar Internasional Tradisi Lisan Nusantara IV dan Festival Pesisir 2003 yang diselenggarakan Asosiasi Tradisi Lisan (ATL) di Hotei Indonesia, dari Kamis (2/10) sampai Sabtu (4/10).

Berdurasi satu jam, penonton yang terdiri dari peserta seminar diperlihatkan sebuah tradisi klasik pementasan opera Cina berskala kecil. Tak ada pembagian babak, namun penonton yang sebagian besar tidak memahami bahasa Cina—bisa menangkap bagaimana awal pementasan diisi dengan pengenalan tokoh-tokoh yang terlibat di dalam cerita.

Adegan dengan dialog Setan

Tiga Roh (diperankan Li Quan Lin) dan Nian Xiao Qian (Zhang Li) yang memperlihatkan kesan ancaman terhadap diri nona Qian yang duduk bersimpuh di hadapan setan berbaju hijau, bertanduk dan berwajah menyramkan itu. Lantas muncul tokoh Sarjana Muda (Li Yun), disusul Pendekar Pedang (Tan Kok Lye), dan pemuda *playboy* (Ye Man Tian).

Masing-masing karakter ini memiliki ciri khas masing-masing. Sarjana Muda yang diperankan Li Yun yang perempuan sekaligus sutradara pentas ini, tampil dengan topi bujur sangkar yang dikenakan secara mendarat dan membawa payung dengan gaya gagah setengah gugup. Pendekar Pedang tampil dalam sosok lelaki bertubuh besar dengan keahlian memutar dan mengibaskan pedang tipis panjangnya.

Untuk si *playboy*, Ye Man Tian memperkenalkan karakternya dengan berbahasa Indonesia patah-patah. "Ayah saya kaya, tapi saya malas dan hanya suka mencari wanita cantik," katanya sambil tersenyum. Ia mengenakan kostum merah jambu, memegang kipas dan memakai riasan yang seolah-olah menjadikan matanya terlihat juling dari kejauhan.

Konflik pementasan ini mulai terjadi ketika Qian menggoda Sarjana Muda yang terpaksa menginap di kuil tua tempat Qian mencari mangsa. Usahanya tak berhasil, Qian akhirnya menubar pesona pada *Playboy Merah Jambu* yang tengah mabuk dan langsung mengikutinya masuk ke kuil. Di sanalah, Setan Tiga Arwah siap menyantapnya.

Jeritan si *Playboy* memba-

ngunkan Sarjana Muda. Ketika keluar kamar ia mendapati Qian yang berusaha memberitahunya bahwa ada roh jahat yang merasuki dirinya. Saat itulah datang Pendekar Pedang yang siap menebas Qian. Usaha pendekar coba dihalangi Sarjana Muda, namun pendekar itu tak menghiraukannya. Saat itulah muncul Setan Tiga Arwah yang mengajak duel pendekar itu. Singkat kata, roh jahat itu binasa di ujung pedang pendekar, dan Qian terbebas.

Festival Pesisir

Selain Opera Cina, pertunjukan lainnya yang digelar ATL adalah pertunjukan Zippin dan Wayang Dongeng dari Demak yang dipentaskan seusa seminar hari kedua bertempat di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. Dilanjutkan Opera Batak dan Wayang Kulit Kelantan dari Malaysia seusa seminar hari terakhir di Hotel Indonesia.

Sebagai sebuah tradisi, semua pertunjukan itu tak hanya memiliki kaitan dengan daerah, tapi juga agama. Seperti yang terlihat dari Zippin (Jippin) yang berkembang di wilayah pantai utara Jawa Tengah yang mayoritas beragama Islam, seperti Demak, Kendal, Semarang, Kaliwungu, Jepara, Rembang.

Umumnya, pemain Zippin lelaki dengan kostum celana panjang, berkain sarung, berbaju sembahyang dan mengenakan peci. Instrumennya rebana dan jidor yang dipukul dengan irama rancak untuk mengiringi salawat berbahasa Arab. Biasanya akan diselingi tarian dan pencak silat.

Jumlah pemain Zippin umumnya 10-15 orang dengan dua

sampai empat di antaranya akan menari. Mereka berpentas dengan duduk di panggung atau di arena dengan durasi satu sampai dua jam. Biasanya Zippin dipentaskan di acara pernikahan atau khitanan dengan lirik berbahasa daerah dan Indonesia yang biasa disisipi lagu daerah atau pop yang tengah populer.

Kesederhanaan Opera Batak

Ketika meminjam istilah opera, tentunya penonton akan mengkaitkannya dengan bentuk opera yang hidup di dunia Barat. Lazimnya, opera akan terdiri dari sejumlah babak yang terdiri dari adegan terkait yang

para pemainnya akan menuturkan cerita dengan bernyanyi. Hal ini berbeda dengan Opera Batak.

Dalam Opera Batak, penonton biasa disuguhi dua sampai lima adegan. Hal ini disebabkan peneakan jenis kesenian ini yang lebih memperhatikan aspek permainan musikal dan vokal yang diiringi dengan disisipi variasi berbentuk tarian dan drama.

Opera Batak memulai sejarahnya sejak 1920-an dimulai dari Tapanuli, khususnya Toba, menyebar ke daerah lainnya. Pada 1970-an, Presiden Soekarno pernah

ler dan makin tidak populer. Orang mungkin akan mengatakan "ini sudah zaman emansia-

Di masa jayanya, Opera Batak bisa dinikmati dari rekaman kaset-kaset audio dengan cerita-cerita andalannya-umumnya berkarakter sedih—seperti kisah *Si Tomina* yang terhalang rasa cintanya dan *Guru Saman* yang membunuh istri pengurus gereja yang tengah hamil. Hilangnya pamor Opera Batak dimulai ketika televisi dan bioskop mulai hadir secara populer pada 1980-an.

● f dewi ria utari

Koran Tempo, 6 Oktober 2003

SASTRA INDONESIA-FIKSI

Cerita

Di langit malam menggeriap titik-titik bercahaya, tak terkira jumlahnya, tak tepermanai jauhnya, entah ukurannya, usianya. Namun, pada suatu masa, manusia menarik sejumlah garis khayal di antara bintang-bintang itu dan membayangkan mereka sebagai makhluk-makhluk: kalajengking, kepiting, kambing, ikan, si kembar, perawan, ... Dan menyematkan nama-nama: Aldebaran, Cassiopeia, Danu, Hamal, Orion, Southern Cross, Waluku, ... Kerlap-kerlip yang sunyi itu mungkin sudah menggetarkan, tetapi tak cukup. Mata membutuhkan rupa, telinga mendambakan nama, otak merangkai pola. Sejak mula, agaknya, kita tak bisa mengelakkan "penasaran" yang mengasyikkan ini: bahwa di balik sctiap gejala adalah sebuah (atau sejumlah) cerita.

MAKA, di antara serakan gemintang itu tersebutlah sesosok raksasa pemburu yang meregang busur panahnya, lelaki pembawa segentong air, perempuan penabur biji gandum, pembajak sawah, dan seterusnya. Ruang angkasa yang membentang jauh dan asing itu lalu seakan-akan jadi meriah, hidup, akrab. Mungkin pembayaran dan penamaan itu adalah se bentuk (dan bagian dari) penaklukan atau penjinakan atas hal-ihwal yang tak dikenal. Tetapi, sebenarnya itu sekaligus menunjukkan betapa perjalanan pengetahuan bukan hanya riwayat penguasaan, melainkan juga sejarah kegamangan dan ketakutan manusia.

Nyatanya, semerjak zaman dahulu sekali cerita merupakan perangkat penerang kepala manusia yang ajaib di semesta yang gulita penuh misteri. Berceritalah, agar kami mengerti mengapa dan bagaimana dunia ini tercipta, siapa dan dari mana nenek moyang kami gerangan, agar kami maklum di mana kami berada dan ke mana kiranya kami akan menuju. Dan, kitab-kitab pun bercerita tentang surga permai yang jauh, manusia lempung yang jatuh, bumi durhaka yang dilanda banjir besar, tentang mahadentuman, debu yang berpusar-pusar hingga bolongan hitam, makhluk bersel satu hingga kecerdasan buatan; tentang lautan kabut, para dewata dan pahlawan, jimat dan air keabadian.

Dan bukankah puisi-puisi tertua di dunia adalah kisah-kisah? Sebutlah epik Gilgamesh, Ramayana, Iliad. Pada mulanya penyair adalah sang juru kisah. Ia menjawab hasrat yang dalam di lubuk hati khalayaknya: keinginan membayangkan jalannya cerita dengan laku tokoh-tokoh yang dapat menggugah dan mengilhami hidup mereka sehari-hari. Tetapi, zaman puisi yang demikian tentu sudah lewat lama. Tradisi bercerita — yang sejatinya berdasar alam mitos dan berlatar belakang dunia epos — kini diteruskan oleh seni teater, novel, dan film.

Sedangkan si penyair adalah pelantun kata-kata yang ganjil dan indah. Puisi adalah pena yang bermimpi, kata filosof Gaston Bachelard. Dari hari ke hari puisi terus menemui khalayak yang

kian lama kian terbatas, khusus, khusyuk. Tentu itu bukan niscaya kekeliruan. Tak ada yang patut disesali. Tradisi lirik, yang setia menyanyikan bisik hati, adalah sebuah riwayat tersendiri yang panjang juga.

Betapapun, puisi di zaman modern ternyata bertemu dengan sejumlah semangat militan yang tak terduga. Salah satunya adalah semangat yang hendak mencari intisari puisi yang tak akan ditemui dalam jenis ekspresi yang lain. Saya teringat sebuah cerita tentang mendiang Jose Garcia Villa. Penyair terkemuka asal Filipina yang menghabiskan sebagian besar hidupnya di tengah kaum avant-gardis New York abad ke-20 itu berniat "memurnikan" puisi dengan membersihkannya dari unsur-unsur naratif sekecil apa pun. Puisi harus hanya menyusokkan keajaiban ha- dirnya kata demi kata, imaji deri imaji, bunyi demi bunyi.

Tetapi, barangkali memang ada sesuatu dalam diri kita yang mudah terpesona oleh rangkaian sebab-akibat, dengan situasi-situasi yang bergerak dan tokoh-tokoh yang terasa bernapas. Karena itu, sajak-sajak yang bercerita dengan kuat, yang menyuling drama pertemuan manusia, tak mati-mati dalam ingatan, atau akan selalu bangkit kembali dari sana. Kasan dan Patima atau Maria Zaitun dari balada-balada Rendra, manusia pertama di angkasa luar dari Subagio Sastrowardoyo, pacar kecil Joko Pinurbo: mereka adalah beberapa tokoh tak terlupakan yang lahir dalam puisi, di antara sekian banyak yang lain, yang bernama atau tak.

Barangkali selalu ada sejumlah garis yang harus ditarik, alur yang disusun, untuk menyederhanakan kerumitan dan ketidakpastian yang kian meresap ke lapis-lapis terdalam dunia (dan manusia. Ada selarik kata-kata Hannah Arendt yang lirih, "Derita menjadi bertanggung ketika ia menjelma cerita." Barangkali saja ada yang menunggu, untuk menerima, untuk mengingat-seperti orang menerima dan mengingat si kembar, kalajengking, bajak, perawan, meski mereka jauh di langit yang asing.

HASIF AMINI

Kompas, 1 Oktober 2003

Ketika Nyanyian Sastra Terasa Sumbang

Hantaran Mansour Fakih terasa membuai sekaligus membebani para penulis. Bermula dari hittah sastra sebagai media yang tidak bebas nilai dan pasti berpihak-diakui atau tidak oleh para sastrawan, terse-rah. Mansour cukup cerdas dan bernas membangkitkan dan menghidupkan kembali spirit melawan para penulis, juga pembaca yang mungkin saja nyaris dan telah frustrasi dengan situasi sosial yang tidak juga memijarkan cahaya keadilan bagi semua manusia.

Mimpi bebas dari ketertindasan, tidak hanya milik Freire di belahan Amerika Tengah, sebagaimana ia hidupkan dalam nyanyian yang selalu dan dengan pasti ia tembangkan tiap saat ketika ia ada di tengah orang-orang yang belum tersadarkan. Dan untuk itu harus disadarkan.

Sastra pun demikian hendaknya. Bergulir, bergelinding, dan memburat bersama nilai-nilai kemanusiaan yang kian hari kian kering-sekalipun di musim hujan. Memberi harap, mencercah impian semestinya menjadi tugas siapa pun terutama yang kerap berteriak nyaring tentang keadilan dan HAM.

Pembebasan kemanusiaan,

an, rasanya terlampau berat dan terdengar tidak adil, jika hanya dibebankan kepada kaum muda-apalagi tanpa se-pengetahuan mereka. Namun, cerpen karya kaum muda ini tentulah lahir dari semangat pencerahan setidaknnya bagi setitik ruang "hampa" yang bersemayam dalam diri kaum muda.

Mereka berkarya, berbuat bukan mengalir tanpa arah,

Judul:

DEEP SPACE-BLUE TESTIMONY
DAN 17 CERITA LAIN

Pengantar:

MANSOUR FAKIH

Penerbit:

AKY PRESS, MEI 2002

Hal:

XXVIII + 186

semestinya. Karena orang-orang itu adalah potongan generasi yang dilahirkan dan dipaksa untuk bertahan dalam tekanan-tekanan gila kaum tua yang selalu merasa absah untuk menindas.

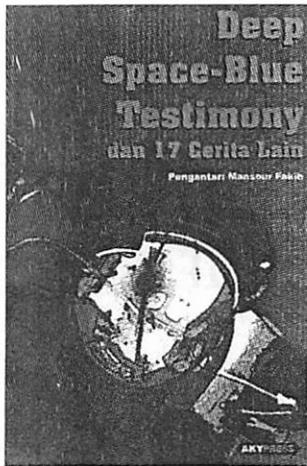
Lalu kapan dan di mana sastra mampu bercerita dan bersejarah hingga yakinkan kaum kalah bahwa mereka dicerahkan melalui sastra. Nyatanya, sastra berwajah dua, membius dan jika tidak awas, maka akan menipu.

Oleh karena itu, sastra pun menjadi milik semua pihak; pemegang kuasa dan kaum kalah. Secara tegas Fakih mengatakan bahwa tidak ada sastra yang netral. Itu adalah tampan manis bagi sastrawan juga bagi siapa pun yang tak bernyali untuk memilih kanan atau kiri.

Kumpulan cerpen ini mengajak (sekaligus memaksa) pembaca untuk masuk ke banyak jendela kehidupan. Atau lebih tepatnya, mencoba memasukkan banyak persoalan kehidupan. Tetapi itu wajar, apalagi kumpulan 18 cerpen ini termasuk karya dari 18 orang. Kisah cinta, kisah sosok ayah yang keras dan dingin, suami yang menjadikannya istri, pengklaiman hutan hingga libido seks para lelaki juga perempuan yang tidak terpuaskan.

Bercinta dengan Berbie adalah tawaran demokratis dan bergairah dari Eka Kurniawan bagi siapa pun yang hasrat seksualnya tidak lagi terpuaskan oleh pasangannya masing-masing. Diproduk dalam bentuk massal, murah dan praktis. Terbukti banyak orang menyambut gembira dan semua merasa senang.

Dalam cerita itu, mungkin Eka hendak masuk pada lorong waktu milik kaum modal. Bahwa semua hal apalagi seks adalah bisnis yang menguntungkan selama ini (halaman 26-31).



Beberapa cerita lain secara kritis dan sederhana mampu membawa emosi pembaca pada apa yang diinginkan oleh penulis. Termasuk ketika Faiz Ahsoul, dalam cerita *Sperma Priyayi* sejenak akan membiarkan pembaca untuk berpikir dan memilih sikap terhadap Mas Guru, atau Pak Guru yang dengan santun menghukum muridnya, Gunawan yang ketahuan mengejar Rina karena berahi. Dalam hitungan jam, Mas Guru juga secara santun menyetubuhi Rina siswa sekolah dasar di rumah gubuk milik Rina.

Perdebatan moral yang bagaimana, yang mampu mempertemukan peristiwa di atas. Dalam dunia keseharian, di koran-koran bukan lagi peristiwa menghebohkan ketika seorang guru dikabarkan memerkosa muridnya, seorang ayah mencabuli anaknya atau seorang kakek memerkosa cucunya sendiri,

juga seorang pemuda memerkosa nenek-nenek.

Nada pilu yang menyayat, tetapi tidak bagi sebagian orang-semakin hari semakin memiriskan jiwa. Nah, di mana sastra berpijak?

Adalah seorang prajurit di medan perang (baca: pembantaian). Dimulai dari kisah renungan seorang prajurit di depan unggun yang tidak sadar bahwa kematian telah bergegas menjeputnya, hitungan detik.

Kisah itu dikemas secara kilas balik. Coba dibangkitkan sisi sentimental dari sang prajurit yang pada hari kematiannya telah ia genapkan pembunuhan pada angka 100. Suatu prestasi. Entah karena apa, ia hilang ingatan bahwa 10 orang terakhir yang ia bantai adalah teman-temannya sendiri, sesama prajurit.

Yang cukup bernyali dari cerita itu adalah pengungkapan rahasia dapur para prajurit ketika menjalankan tugas.

Sang prajurit sadar bahwa mereka sedang tidak berperang melainkan sedang membantai penduduk yang tidak bersenjata. Kilas balik tentang perampokan dan pesta-pesta di malam hari dan pemerkosaan perempuan-perempuan desa sebelum dibunuh, dilakukan dengan keyakinan bahwa sang komandan pasti melindungi prajuritnya. Mati dipalang salib adalah akhir dari kisah sang prajurit karena dianggap berkhianat.

Secara umum, buku ini

mengisahkan parodi kehidupan yang senyatanya ada di sekitar kita, kita sebagai korban atau sebagai pelaku. Secara sederhana, sastra mampu berbicara dalam hal ini. Tinggal seberapa jujurnya kita menilai dan mengevaluasi diri dan lingkungan sosial-budaya juga politik kita.

Persoalan ekonomi, sosial, gender, hukum, pendidikan dan moral tercakup dalam rangkaian buku ini. Sehingga -semoga saja-kita bisa mencari garis lurus atau titik singgung antara fungsi sastra sebagai media perlawanan dan pebebasan dengan tutur bahasa, ide dan spirit yang tersampaikan dalam kumpulan cerita ini.

Sesungguhnya cerpen-cerpen tersebut terinspirasi dan memburat dalam rangkaian kata yang tidak kering untuk dipahami dan diselami. Namun, tidak semua cerpen dalam buku ini berhasil merangkul pembaca untuk masuk dalam lorong kata-kata milik kaum muda ini.

Lebih jauh, seberapa adilkah kita bisa menilai bahwa karya sastrawan-sastrawan muda ini mampu menyodorkan energi baru, minimal bagi proses kelahiran karya yang lebih matang dan beridentitas. Kalau pada akhirnya, karya-karya itu masih terdengar sebagai nyanyian sumbang dari sastra perlawanan adalah hal yang dapat dimaklumi. Toh, sastrawan besar tidak lahir begitu saja, ia butuh pengasahan yang terus-menerus dan semua butuh waktu.

Linearitas Cerita, Sublimasi Bahasa

WILAYAH cerita bukanlah area yang memaksudkan dirinya menjadi tak bebas nilai. Wilayah cerita tetaplah berada dalam koridor keterikatan ruang dan waktu, pengejawantahan aktualitas, dan sederet konvensi lain yang tak begitu saja melepaskannya sebagai fiksi. Wilayah cerita tetaplah mengemban visi dan ideologi tertentu, pandangan dan pesan moral, sehingga aspek fiksionalitas harus ditawarkan, jika memang aspek ini selalu *pingin* diunggulkan karena keyakinannya yang (hanya?) bersandar pada kekuatan metafor, imaji, dan ambiguitas makna.

Konsekuensi semacam itulah yang menyungkup kaleidoskop proses kreatif Raudal Tanjung Banua dalam kumpulan cerpen perdannya bertajuk *Pulau Cinta di Peta Buta* ini. Betapa ia, sebagai pencerita, konsisten untuk berambisi mendesakkan refleksi khazanah konflik dengan latar peristiwa sosial-politik (jenguklah cerpen *Pertemuan di Jakarta* dan *Nyonya Helena da Costa*) yang menyeret pembaca pada ingatan gejolak revolusi yang ada di Timor Leste.

Atau, barangkali saja malah sebuah kesengajaan (dan pembaca tak perlu memicingkan kecurigaan secara lebih cermat) dalam antologi ini Raudal memang *pingin* membaurkan wilayah cerita yang tak tunggal, yang tak seragam. Dalam konteks ini pula lazim diberlakukan penyidikan bahwa Raudal memahami pola relasi pengarang dan pembaca: memaknai cerita sebagai adonan transformasi produksi peristiwa sosial-politik masyarakat ke dalam bentuk fiksi. Konsekuensi positifnya, jelas, pembaca merasa memiliki, pun terlibat dalam cerita yang tersuguhkan. Tanpa wajib mengenal seseorang yang menjadi pemandu wacana pola relasi teks, sebagai varian estetisasi yang mengambil bagian dalam ranah produksi sosial yang bernama Janet Wolff, Raudal telah berkompromi dalam menggarap keberjamaan wilayah cerita agar pembaca mendapatkan cermin refleksi yang beragam.

Risikonya, tentu saja, adanya sejumlah pertanyaan: seberapa jauh penggarapan linearitas cerita yang terbangun mampu menunjukkan pencapaian sublimasi bahasa: adanya kemampuan mengolah cerita sebagai bentuk pencapaian cara ungkap yang lihai, aduhai, maestros? Apakah sublimasi bahasa dalam sebuah cerita hanya mungkin dicapai ketika cerita itu sendiri terbebaskan dari pesan moral dalam konteks sosial-politik misalnya, dan hanya berkepentingan *playing in the game* (bermain dalam permainan) dalam koridor fiksionalitas, seperti yang diidealkan salah seorang kritikus sastra Indonesia bernama Nirwan Dew-

Judul
Pulau Cinta di Peta Buta
Penulis
Raudal Tanjung Banua
Penerbit
Jendela Yogyakarta
Cetakan
Fertama, September
2003
Tebal buku
xii + 177 Halaman

anto, yang juga tak mempercayai eksistensi cerpen Indonesia, kecuali cerpen yang berbahasa Indonesia?

Keberagaman cerita yang digelontorkan Raudal, dalam halaman per halaman buku ini tak luput menyeret penafsiran pada usaha menyuguhkan aspek antropologi dan sosiologi pengetahuan, seperti terbukti dalam cerpen-cerpen *Jalan ke Bukit sudah Berubah*, *Lembah yang Riang*, dan *Kemilau Mata Air, Dongeng Pulau Dewata*, maupun *Pulau Cinta di Peta Buta*. Sebuah orientasi dan kompromi estetik yang seolah-olah jadi mutlak diemban para pencerita terkini, sebagai imbas rasionalisasi wacana *cultural studies*, yang dalam banyak hal sungguh menyelamatkan sekian jumlah pencerita, karena masih ada wilayah garapan cerita yang berada dalam asumsi 'tak tersentuh'.

● Satmoko Eudi Santoso, *pembaca sastra*, tinggal di Yogyakarta.

Media Indonesia, 5 Oktober 2003

Nh Dini, Warna Lokal 'Setting' Menarik

MESKI usia sudah 67, penulis cerpen dan novel Nh Dini masih memiliki stamina prima membacakan cerpen karyanya berjudul 'Jenazah' dalam 'Pesta Buku 2003' di Auditorium Lembaga Indonesia Perancis (LIP) Jl Sagan Yogya, Senin (6/10). Nh Dini secara intens membaca cerita dan berdiskusi dengan *audience* sekitar 2 jam.

Cerpen 'Jenazah' yang ditulis 1980 dengan *setting* lokal Purwodadi (Semarang, Jawa Tengah) tersebut bertema kemanusiaan. Isu utama, menceritakan kesulitan hidup rakyat jelata yang miskin. Tokoh sentral Kasmuri diceritakan kesulitan membayar beaya opname dan pengambilan jenazah ayahnya di rumah sakit pemerintah. Dia harus 'menebus' jenazah Rp 46.000,- (Nh Dini menjelaskan: "Mungkin saat ini setara dengan Rp 460.000-an").

Cerita bergulir pada 'tindak pidana' karena Kasmuri terpaksa mencuri jenazah ayahnya karena merasa berkewajiban harus segera dimakamkan. Untunglah di pengadilan, hakim masih memiliki nurani dan bisa mengerti kesulitan dan kesedihan Kasmuri.

"... Saya hanya mengambil pulang bapak saya. Dia tidak bisa berjalan sendiri..." begitu logika 'naif' Kasmuri. Hal itu disambung dengan nalar yang mencitrakan moralitas tinggi dari hakim dalam kalimat, "mengapa mengambil mayat bapaknya sendiri meski dihukum?" *Ending* 'Jenazah', kritik terhadap kondisi korupsi di mana begitu banyak orang (baca: pejabat) lain mencuri uang negara yang mengambil milik bangsa, tetap bebas berkeliaran tanpa sanksi hukum.

"Itulah sebabnya saya memilih cerpen ini, karena masih sangat relevan dengan situasi dan kondisi saat ini," kata Nh Dini. Kritik sosial lainnya, mengalir nelalui frase-frase kalimat yang terstruktur dalam Bahasa Indonesia standar. Namun dia juga menggunakan Bahasa Jawa seperti: *simbok, galengan, sampeyan, dll* — untuk menghadirkan warna lokal Jawa (Tengah).

Menurut Nh Dini, warna lokal menjadi *setting* yang sangat menarik. "Sastra Indonesia, kekhasannya ada pada persoalan lokalitas tersebut," katanya. Hanya saja, warna lokalitas itu memang harus dilakukan eksplorasi secara mendalam. Eksplorasi menyangkut *setting* tempat, bahasa, dialek, karakter manusia. "Kalau di Indonesia yang memiliki warna lokalitas sangat kental dimiliki almarhum Linus Surgadi AG dengan *Pengakuan Pariyem*, juga Umar Kayam," tandasnya.

Bagi penulis, cerpenis atau novelis pada dasarnya seorang observator yang baik pula. Kejelian mengolah persoalan, kepekaan rasa, kemudian disajikan ke pembaca membutuhkan refleksi dan kepiawaian tersendiri, termasuk 'jam terbang' sebagai penulis.

Diakui, Nurhayati Sri Hardini lebih dikenal sebagai Nh Dini, salah satu pengarang yang sangat produktif. Ia menulis sejak tahun 1951, saat masih duduk di kelas II SMP. Pernah menjadi pramugari Garuda Indonesia Airways, kemudian menikah dengan seorang diplomat dan dikaruniai dua anak. Setelah melanglang buwana, antara lain ke Jepang, Filipina, Kamboja, Amerika Serikat, Belanda, Perancis, Nh Dini kembali ke Indonesia. Menetap di Semarang, beberapa tahun terakhir ini pindah dan menetap di Sendowo Yogyakarta.

Kini ia telah memiliki karya terbaru, 'Percakapan Langit', 'Janda Muda', dan novel 'Dari Parangakik ke Kampuchea'. "Novel *Dari Parangakik ke Kampuchea*, mengisahkan peran dan pengalaman pribadi sebagai istri diplomat sejak berada di Perancis," katanya. (Ela/Jay)-d

Kecil-kecil Jadi Novelis

Anak lain main boneka, mereka menulis novel

Izzati bukan gadis kecil kebanyakan. Saat sebagian besar anak sebayanya bermain dengan boneka Barbie, bocah berusia delapan tahun itu justru sibuk menulis di komputer. Apa yang ada dalam pikirannya dalam waktu sekejap menjelma menjadi tulisan. "Aku senang menulis sejak berusia lima tahun," katanya. Izzati memang sungguh gila menulis. Ketika menemukan ide, saat sedang bermain sekalipun, ia akan lari sekencang-kencangnya ke rumah, masuk ke kamar, dan menuliskannya di komputer.

Di rumahnya, bermain-main dengan komputer bukan sesuatu yang asing. Sejak kecil, Izzati dan saudara-saudaranya biasa menulis di komputer. Komputer menjadi buku harian bagi bocah Bandung yang suka membaca serial misteri karya Enid Blyton dan Alfred Hitchcock ini. "Aku bisa menulis apa saja, tentang temanku, pengalaman menarik yang kutemui, atau saat menonton TV," katanya. Izzati mengaku ia menulis kapan pun ia mau. "Kalau misalnya aku disuruh mandi tapi aku belum mau mandi, ya aku menulis aja," katanya dengan enteng. Izzati biasa

menulis setiap hari antara jam pulang sekolah atau di sore hari. "Kadang cuma sepuluh atau lima belas menit, kadang sampai setengah jam. Tidak teratur."

Di sekolah, kesukaannya menulis membantunya setiap kali pelajaran mengarang tiba. Kesempatan itu menjadi pelampiasan untuk menulis ide yang mengendap di kepalanya. Bila teman-teman sekelasnya berkeingintahuan saat harus mengarang, Izzati justru melakukan yang dengan santai dan menulis berlembar-lembar.

Siapa menyangka, kesukaannya menulis itu mengantarnya menjadi novelis cilik. Agustus silam, penerbit Media Akselerasi Bandung menerbitkan novel Izzati *The Powerful Girls 1*. Ide penerbitan novel itu datang dari Izzati sendiri. Menurut Hesti, ibunya, Izzati kerap memberi cerita yang ia tulis pada temannya. "Saya kaget ketika orangtua teman-teman Izzati meminta agar jika cerita itu dibukukan, mereka ikut dibagi," katanya diiringi tawa.

Izzati kecil merengek pada ayahnya, Setyo Utomo Sukarsono, yang bekerja di PT Dirgantara Indonesia, untuk membuatkan semua ceritanya menjadi buku. Awalnya, sang ayah tak menanggapi, tapi karena Izzati terus merengek, sang ayah luluh juga dan menghubungi seorang temannya. "Kami mengeluarkan dana sendiri sekitar Rp 1,7 juta untuk mencetaknya," kata Hesti mengenang. Novel yang dijual seharga Rp 17.500 itu awalnya hanya diedarkan untuk kalangan terbatas saja. Siapa

menyangka novel yang bercerita tentang kisah petualangan tiga gadis kecil itu banyak peminatnya. "Penerbit merencanakan mencetak seribu buku," kata Hesti.

Powerful Girls 1 boleh dibilang luar biasa untuk seorang novelis sekecil itu. Kalimat yang meluncur dari endapan pikiran Izzati mengesankan: lelian, cerdas, dalam, dan langka susunannya. Izzati menggunakan pilihan kata yang tak biasa. Ia misalnya menggunakan kata ganti *miss* untuk menyebut seorang gadis. Kemampuan geografisnya juga mencengangkan. Ia bisa menulis dengan baik mengenai Paris, fantasi balet, dan banyak hal yang tak umum diketahui untuk anak seusianya. "Izzati juga menulis soal perceraian, saya bingung ia belajar dari mana?" kata ibunya.

Agaknya, kebiasaan Izzati membaca dan mengamati banyak hal membantu perbendaharaan tulisannya. Sejak kecil, Izzati sudah melahap novel sekelas *Little House On The Prairie*, cerita detektif karya Alfred Hitchcock, serial petualangan karya Enid Blyton, Astrid Lindgren, dan sebagainya. Belakangan, sejumlah kawan dekat ayahnya menyarankan agar Izzati juga mulai dibiasakan membaca buku-buku Balai Pustaka dan Pustaka Jaya agar gaya penulisannya lebih ekspresif.

Setelah *Powerful Girls 1*, Izzati kini tengah menyiapkan buku kedua dan buku cerita islami. Ia juga menulis skenario film *Jejak Anak-anak Indonesia*.

Toh, sehebat-hebatnya novelis cilik ini, Izzati kecil tetap bo-

cah biasa. "Ia doyan mencoba apa saja dan kemudian bosan sendiri," kata ibunya. Ia pernah mencoba seluruh kegiatan mulai dari les piano, bahasa Inggris, aritmetika, mengaji, taekwondo, les vokal, dan bahasa Prancis. "Akhirnya satu-satu dilepaskan karena jenuh dan kelelahan," kata ibunya.

Di Malang, novelis cilik lainnya juga mengundang kekaguman. Maria Miracellia Bo, nama gadis cilik itu, menelurkan novel di usia 11 tahun—bahkan hanya dalam waktu dua minggu. Bila Izzati memilih tema petualangan dan detektif, Maria memilih tema horor. Novel berjudul *Toloong!!!* setebal 145 halaman itu bersampul gambar tengkorak.

Kebiasaannya membaca cerita misteri remaja seperti *Goosebumps* mengilhaminya menulis cerita horor. Di kamar murid kelas V SDK St. Maria II Malang itu ada rak yang ditata seperti perpustakaan kecil. Di rak itu terdapat serial *Goosebumps* hadi-

ah dari orang-orang dekatnya. Ada pula *Intisari*, *Crayon Shinchan*, bahkan ada cerita berbahasa Inggris.

Semangat Maria Bo untuk menulis cerita-cerita horor memang sangat tinggi. Begitu ide melintas, dia menuju komputer yang tidak jauh dari tempat tidurnya. Sampai sekarang dia sudah menulis 40 cerita, namun baru *Toloong!!!* yang dibukukan. Dalam waktu dekat, satu buku lagi bakal muncul dengan tebal 200 halaman. Judulnya? "Masih rahasia," ujar sulung pasangan Eduardus Marius Bo SH MS dan Dra. Diah Darmaningtyas R. itu.

Bakat terpendam yang dimilikinya diturunkan dari keluarganya yang suka menulis, mulai dari kakek hingga adik ayahnya terbiasa dengan pekerjaan menulis. Maria sudah bisa membaca sejak usia tiga tahun. Di kelas 1 SD dia sudah aktif menulis apa saja yang ada di benaknya, ter-

utama kisah khayal dan horor. Sejak Maret 2002, dia sudah menyelesaikan 17 judul karangan, meski belum dibukukan.

Di luar kepiawaiannya menulis, Maria adalah murid berprestasi. Sejak kelas satu hingga tiga SD ia selalu menjadi juara pertama. Di kelas empat dan lima masuk tiga besar. Pada 2000, dia meraih juara pertama cepat tepat aritmetika tingkat nasional di Jakarta.

Kesukaan menulis cerita horor, ternyata, memunculkan kisah nyata yang menggelikan. Suatu malam Maria sedang tegang mengetik di komputernya. Mendadak ia lari ke kamar ibunya, karena ketakutan oleh cerita yang dibuatnya sendiri. Begitu melihat ibunya belum tidur, dia kembali lagi ke kamarnya dengan perasaan tenang. Kalau sudah begitu, Maria tak ubahnya anak-anak lain.

● hadriani p/angela

Koran Tempo, 12 Oktober 2003

TEMPO/TOMMY SATRIA



Rachmania Arunita tak pernah menduga kesukaannya menulis mengantarnya pada dunia baru yang luas dan menyenangkan. Menerbitkan novel pertama *Eiffel I'm In Love* setebal 295 halaman di usia 15 tahun, Nia akhirnya terpilih menulis skenario untuk novelnya itu. Bulan depan, film yang diharapkan bisa mengekor sukses *Ada Apa dengan Cinta* itu akan diputar di bioskop. Padahal, awalnya ia menulis karena merasa tak punya kesukaan lain kecuali menulis dan menonton. "Saya biasa menulis di buku harian dan itu memudahkan untuk menulis sesuatu dengan lancar," katanya.

Suka menulis sejak kecil, gadis yang melewati masa kecilnya di Paris karena mengikuti ayahnya yang mengambil gelar doktor di sana, itu mengaku tak berani mengirim ke media massa. "Cuma dibaca sendiri dan disimpan," katanya. Dalam sehari, ia biasa menghabiskan waktu antara dua hingga tiga jam di depan komputer. "Biasanya tengah malam sambil ditemani musik klasik," kata penyuka komposer Rahmaninov ini. Uniknya,

Novel Pertama Berbuah Skenario

meski ia suka menulis, Nia tak suka membaca. "Nggak tahu kenapa, aku khawatir saja tulisanku terpengaruh gaya penulis yang karyanya kubaca itu," katanya santai. Karena itu, Nia hanya melahap novel ringan asing seperti serial *The Diary of Shopaholic* karya Sophie Kinsella. Selebihnya, Nia melakukan riset karakter dari film yang ditontonnya.

Novel yang ditulisnya itu, kata Nia, juga bersumber dari pengamatan sehari-hari sebagai remaja. "Aku pinjam karakter teman-teman dan memperkayanya dengan ide sendiri," katanya.

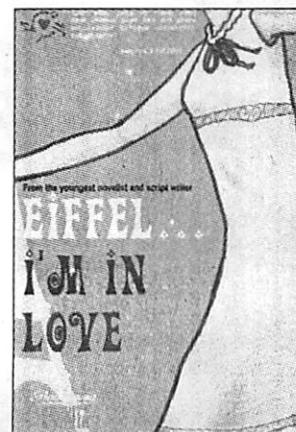
Novel berlatar Jakarta dan Paris itu bercerita tentang Tita yang menemukan dirinya jatuh cinta pada Adit yang dibencinya karena telah dijodohkan oleh orangtua, setelah cowok itu berpacaran dengan sahabatnya sendiri.

Manajer Promosi Terrant Book, Oktavia, yang menerbitkan novel Nia, mengatakan, jalinan cerita yang dibikin Nia itu sangat sederhana, khas remaja masa kini. Saat itu, Terrant mengeluarkan biaya Rp 30 juta untuk mencetak novel yang kemudian dilepas dengan harga Rp 35 ribu itu.

Lantas, apa daya tariknya? "Novel Nia itu sangat Indonesia dan menjadi alternatif bagi novel-novel remaja bikinan luar negeri yang belum tentu

pas kondisinya dengan suasana kita," katanya. Di novel itu, Nia memang menggambarkan keluarga inti yang akrab, ada ayah dan ibu, dan ada kakak. "Kami pernah melakukan survei dan ternyata banyak remaja yang tak terlalu menyukai novel *chick-lit* yang kini banyak beredar." Bahkan, mantan menteri pendidikan dan kebudayaan Fuad Hasan ikut membacanya.

Promosi novel Nia ini tergolong unik. Awalnya, Nia mendistribusikan novelnya sebagian demi sebagian, "Kalau ada bagian yang selesai, langsung diminta teman-teman sekolah," kata gadis yang lahir di Jakarta pada 30 Juli 1985 ini. Karena tanggapan yang bagus, ia mengumpulkannya menjadi novel utuh yang dijual antarteman dengan cetak fotokopi. Ia baru berpikir serius menjual ke toko setelah seorang saudara menawarkan untuk menjadikan buku dan memasukkannya ke toko buku besar pada April 2000. Siapa sangka novel yang tadinya dititipkan hanya sejumlah 150 kopi itu laris terjual hanya dalam waktu dua pekan. Setahun setelah itu, tak kurang 500 buku terjual di sejumlah toko buku besar di Jakarta. Terrant juga berjualan ke sejumlah koperasi sekolah. "Tanggapan siswa-siswa itu baik sekali, bahkan banyak



orangtua murid yang ikut membeli," kata Oktavia.

Nasib baik mulai menyambangi Nia ketika tahun silam seorang produser menaksir novelnya. Nia diminta untuk menarik bukunya dari toko dan hanya berkonsentrasi membuat skenario film yang disutradarai Nasri Cheppy itu. Cheppy sukses menyutradarai sekuel film remaja *Catatan Si Boy* yang fenomenal itu. Selama pembuatan skenario itu, Nia ikut terlibat mengarahkan dialog pemain. "Saya harus ikut ke lokasi syuting karena sutradara menginginkan saya mengarahkan dengan pas suasana dialog seperti yang saya gambarkan di novel," katanya sumringah. Ini dunia baru bagi gadis yang kini kuliah di semester satu Sastra Prancis Universitas Indonesia itu.

Sejak diterbitkan, selama tiga tahun ini tak kurang 3.000 novel sudah terjual. Nia pun sudah memutuskan akan menjadi penulis. "Rasanya menjadi penulis akan menjadi profesi yang sangat menyenangkan," katanya. ● angela

Pengelana yang Tak Pernah Membuang Jangkar

Salah satu kelebihan Sitor Situmorang adalah kemampuannya menggambarkan watak dan perangai setiap orang dalam jalinan dialogis.

JAKARTA — Ketika cerita pendek (cerpen) *Kisah Surat dari Legian* ditulis. Sitor Situmorang tak pernah mengira Legian menjadi pusat perhatian dunia seperti saat ini. Dua dasawarsa silam penyair Angkatan 45 ini menjejaskan kakinya untuk pertama kali di Bali. Legian dalam catatan Sitor hanya kawasan sepi dengan sedikit manusia di dalamnya. Tak ada jalan raya kecuali jalan setapak yang hanya bisa dilewati pejalan kaki. Berjalan di malam hari seorang diri, kata Sitor, membangunkan rasa takut.

Catatan yang ditulis dalam cerpen tadi bukan sekadar khayalan. Sitor menangkan pengalaman batinnya di Legian dalam sebuah cerita. Kisah tersebut kini dibukukan bersama empat cerpen lainnya dalam buku bertajuk *Kisah Surat dari Legian*. Tiga cerpen lain—*Gerbera*, *Cheri*, dan *Akbar*—ditulis Sitor pada pertengahan 1950-an. Sedangkan dua cerpen *Kisah Surat dari Legian* dan *Suatu Fiksi dalam Fiksi* ditulis pada awal 1980-an.

Buku yang diterbitkan Komunitas Bambu itu diluncurkan Rabu (8/10) pekan lalu bertepatan dengan ulang tahun Sitor ke-79. "Kado terindah yang tidak akan pernah saya lupakan," kata Sitor, penyair kelahiran Hariabo, Sumatra Utara, 2 Oktober 1924 ini. Meski usia

mendekati kepala delapan, Sitor tetap menampakkan semangat muda. Kegagahan masa lalu masih tersisa meski ia tak bisa menyembunyikan suratn takdir: kerut di wajah kian tampak dan pandangannya yang agak rabun.

Jika usia senja sebagai penghalang bagi sebagian orang, tidak demikian bagi Sitor. Ia yakin adrenalin dalam dirinya masih bisa diompa untuk membahayakan karya lain. "Tunggu saja nanti," kata suami Barbara Brouwer ini. Semangat pantang menyerah bukan hanya ditampilkannya secara verbal. Puluhan karya yang pernah ditulis sejak 1940-an juga menunjukkan semangat serupa, termasuk *Kisah Surat dari Legian*.

Cerpen ini mengangkat kisah Yulia, seorang perempuan petualangan asal Hamburg, Jerman. Perempuan muda itu tipikal intelektual muda generasi kaum *hippie* yang marak pada 1970-an di Eropa. Unikinya, Yulia tak menjadi seorang *hippie* sampai menemukan Bali sebagai tempat tetirah. Ia perempuan bebas yang menikmati hasil jerih payahnya di tempat terjauh dari rumahnya.

Sitor cukup rapi menyusun cerita berdasarkan kronologi peristiwa. Meski begitu ia tak terjebak pada gaya bertutur yang monoton. Apalagi kisah mengharu biru yang menghanyutkan perasaan. Sas-trawan yang pernah mendekam di penjara semasa Orde Baru ini seperti mendudukkan diri sebagai seorang pengamat sosial, bukan penulis cerita. "Jadi, pengalaman bersama Yulia dilihat dari kaca-mata seorang pengamat," kata Rizal, editor buku *Kisah Surat dari Legian*.

Meski begitu, Sitor tak terjebak pada bahasa pengamat yang kadang rumit. Bahasa puitik tetap mewarnai lima cerpen ini. Disiplin memproses kata dalam

cerpen ia lakukan sama baiknya dengan pengolahan kata dalam puisi. Dalam beberapa bagian kedalaman Sitor menjelajahi pengalaman batin begitu tampak. "Kadang agak sulit memilah mana bahasa cerpen dan bahasa puisi," kata Fuad Hasan, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dalam sambutan ulang tahun Sitor.

Salah satu kelebihan Sitor adalah kemampuannya menggambarkan watak dan perangai setiap orang dalam jalinan dialogis. Setiap peran mampu memberikan kontribusi sama besar untuk mewujudkan semangat cerita. Ciri ini bukan cuma ditemukan dalam lima cerpen dalam buku *Kisah Surat dari Legian* belaka. Kumpulan puisi dalam *Surat Kertas Hijau* (1953), *Dalam Sajak* (1955), dan *Jalan Mutiara* (1954) juga menyiratkan kesan serupa.

Ciri tadi masih ditemukan dalam karya Sitor pascapenahanan dirinya selama delapan tahun. Meski Sitor membawa warna baru, ciri tadi tidak hilang begitu saja. Dialog yang dia kembangkan bukan cuma dialog antarmanusia, tapi juga manusia dengan alam lingkungan dan diri sendiri. Begitu banyak yang ingin ia sampaikan sehingga sering membuat tulisannya tak cepat menghanyutkan, bahkan cenderung tak nyaman di awal cerita.

Sitor sejatinya ingin menyampaikan banyak soal. Fuad menamsilkannya sebagai pelukis yang gelisah melihat ruang tersisa yang belum terisi. Padahal, yang sudah ditulis lebih dari cukup. Hasilnya, karya yang padat dan tak bisa dinikmati dalam sekali baca. Bisa jadi bekas wartawan *Harian Waspada* ini tak ingin pembacanya hanyut dalam kemahirannya bercerita, tapi tenggelam da-

lam renungan kemanusiaan yang disampaikan.

Sebagai penulis cerpen Sitor, "Cukup cermat memilih kata untuk mewakili pesan yang diinginkan," kata Fuad. Jika ia seorang sutradara, sastrawan yang menghabiskan separuh hidupnya di Eropa ini sosok yang cakap memilih pemain. Tujuannya agar pilihan tadi mampu menerjemahkan isi cerita.

Sebagai penulis yang telah meretas jalan panjang di dunia sastra, Sitor tak ubahnya pengelana yang tak hendak berhenti di satu titik. Pengalaman dalam dunia nyata itu menjadi sumber inspirasi karyanya. Semakin jauh lelaki berpostur kecil ini berkelana, semakin banyak pula gagasan yang ingin ditu-

angkannya, baik dalam puisi maupun cerpen. Jika ia diibaratkan kapal, hampir pasti kapal yang tak pernah membuang jangkar.

Kisah Surat dari Legian hanya bagian kecil dari karya yang pernah dimuat media massa dan berserakan entah ke mana. Cerpen tentang Yulia itu pernah dimuat majalah *Aktuil* edisi 22 Desember 1980. Cerpen *Suatu Fiksi dalam Fiksi* dimuat di media yang sama edisi 22 Januari 1981. Sedangkan *Gerbera* pernah dimuat *Mimbar Indonesia* edisi 11 Maret 1950. Cerpen *Cheri* dalam *Siasat* edisi 4 April 1954. Sedangkan cerpen *Akbar* juga dimuat *Siasat* edisi 3 Oktober 1954. Kini lima karya yang belum dibukukan itu dikemas dalam satu wadah berjudul *Kisah Surat dari Legian*. ● arif firmansyah

Koran Tempo, 15 Oktober 2003

K Usman Pamerkan Cerpen

WK/18-10-03

Cikini, Warta Kota

Cerpenis dan novelis, K Usman, ingin masyarakat makin mengenal karya-karyanya, bukan melulu lewat media koran dan buku. Maka, ia menggelar 'Pameran Cerpen cerpen Koran dalam Bingkai : Ikan di dalam Batu'. Pameran digelar di Galeri Cipta III TIM, 17-18 Oktober 2003.

"Cerpen yang dipamerkan dengan cara seperti ini belum pernah dilakukan. Ini yang pertama kali," tutur K Usman seusul pembukaan pamerannya, Cikini, Jumat (17/10). Menurutnya, ide pameran yang diadakan Yayasan Dokumentasi Sastra HB Jassin itu sudah muncul tiga tahun yang lalu. "Baru sekarang ada dananya," kata pengarang cerpen *Ikan di dalam Batu* ini.

Karya-karya K Usman yang dipamerkan itu adalah cerpen yang pernah dimuat di beberapa koran Ibu Kota dalam kurun waktu 2000-2003. Cerpen itu ditampilkan dalam bingkai-bingkai berkaca, baik tulisan asli dari media cetak atau

fotokopinya.

Cerpen yang dipamerkan antara lain berjudul *Musim Apa Sekarang di Kota* (Berita Kota, tahun 2000), *Duku* (Kompas, 2000), *Pengantin* (Media Indonesia, 2001), *Berawal pada suatu Malam* (Tabloid Nova, 2001), *Kereta Malam* (Republika, 2001), *Malam Minggu* (Sinar Harapan, 2002), *Ketika Istri Tidak di Rumah* (Sinar Pagi, 2000), *Kamar Tahanan Nomor Tiga* (Suara Pembaruan, 2002), *Si Ong* (Warta Kota, 2002).

Pengarang yang lahir di Tanjung Serian, Palembang, 11 Agustus 1940, ini mulai menulis cerpen tahun 1956. Menurut pengakuannya, karya-karyanya sudah dipublikasikan di sekitar 100 media massa. Ia juga sudah menerbitkan novel, antara lain berjudul *Sebuah Kisah Hitam Morita* (1969), *Ketika Anggrek Berbunga* (1987), *Rahasia Hati Seorang Ibu* (2000), *Olga Penari Danau Angsa* (1986), *Mawar Hutan Penghabisan* (2002), dan novel terbaru diluncurkannya *Jamilah* (2003). (tan)

Warta Kota, 18 Oktober 2003

Novel Berilustrasi Busana Tokoh

Judul: *Negeri Senja*
 Penulis: Seno Gumira Ajidarma
 Penerbit: Kepustakaan Populer Gramedia, Ce-
 takan I, Agustus 2003
 Tebal: xx + 243 halaman
 Harga: Rp 35.000

Roman ini beralur cerita tentang seorang pengembara penunggang unta yang gemar melakukan perjalanan dari satu negeri ke negeri lain untuk berburu pesona senja terindah. Alkisah sampailah sang pengembara ke Negeri Senja, sebuah negeri dengan pemandangan dan nuansa keremangan senja yang begitu memukau. Namun, di balik pesona bias cahaya jingga, ternyata didapati berbagai bentuk penindasan yang dilakukan oleh seorang perempuan penguasa yang buta dan tak pernah menampakkan wajah. Tirana, demikian nama perempuan tersebut.

Keunikan roman ini ada pada ilustrasi busana para tokoh dalam cerita. Goresan rancangan busana Negeri Senja tersebut dibuat oleh desainer kondang Poppy Dharsono. Visualisasi rancangan itu kemudian



digambar ulang oleh Margarita Maridina Chandra, penggambar lepas yang kerap menggarap ilustrasi sampul novel. Puan Tirana Sang Penguasa yang Buta, misalnya, ditampilkan sebagai sosok yang tertutup kain hitam panjang dengan kerudung menutupi wajah hingga bila dipandang dari depan hanya tampak kosong dan gelap. Misterius, itulah kesan untuk sang penguasa.

Kompas, 18 Oktober 2003

SASTRA INDONESIA-FIKSI

SEHARI BERSAMA

Fira Basuki, Perempuan Pengarang Novel

YOGYAKARTA, bagi Fira Basuki bukan kota asing. Suatu saat, Fira berjanji

akan membuat setting Yogyakarta dalam novel-novelnya. Baru-baru ini Fira Basuki diundang Universitas Sanata Dharma untuk bicara tentang pengalamannya menulis novel. Fira memang sudah menulis cukup banyak novel.

Misalnya, yang sudah diterbitkan *Grasindo*, *Jendela-jendela*, *Pintu*, dan *Atap*. Novel itu merupakan triloginya.

Akan disusul lagi novelnya yang lain. Fira sudah punya judulnya. "Mungkin Januari 2004 sudah terbit," janjinya. Apa ada rencana mengangkat Yogyakarta dalam novelnya? Kita tunggu saja. Apalagi, setelah merasakan malam-malam di Yogyakarta, Fira melihat ada keunikan tersendiri. *Lesehan*, misalnya, tak bisa ditemui di kota lain dengan suasana Jawa yang kental. Tercatat sudah lebih dua kali Fira datang ke Yogyakarta. Tapi, ia belum pernah memegang Tugu Yogyakarta yang terletak di perempatan Jalan Sudirman, Jalan Mangkubumi, Jalan Diponegoro, dan Jalan Simanjuntak.

Ketika diledek oleh teman-teman dari komunitas *Fourcolours Film* yang baru saja menulis *Mayar dari Jogja*, Fira sedikit grogi. "Kalau belum memegang Tugu Yogyakarta, artinya belum lengkap," kata mereka di Hotel Santika, se usai acara

Nama Fira Basuki sudah cukup dikenal. Novelnya sudah banyak terbit. Mereka yang menggemari novel-novel Fira, terutama anak muda, pasti tahu siapa dia. Kehadiran Fira Basuki di khazanah sastra, akan menambah jumlah perempuan pengarang di Indonesia. Selama ini, penulis karya sastra didominasi oleh pengarang berjenis kelamin pria. Tapi, semenjak dekade 1970-an terjadi hal yang luar biasa. Yakni munculnya perempuan pengarang. Pada waktu itu, teknologi sudah merambah ke rumah-rumah sehingga memberi banyak waktu luang pada perempuan. Di samping itu, pendidikan juga sudah mulai merata, sehingga mereka yang berbakat menulis bisa menunjukkan kebolehannya mengarang. Termasuk Fira Basuki, pengarang kelahiran Surabaya ini.



Ketika jadi pembicara di Sanata Dharma

-- (MP-Jay)

makan malam. Fira pun penasaran. Maka, sebelum *bubaran* dan kami meninggalkan hotel itu bersama antara lain A Ariobimo Nusantara, Fira berjanji akan memegang Tugu Yogyakarta.

LAHIR di Surabaya, 7 Juni 1972. Belum 30 tahun usianya. Selepas

dari SMU Regina Pacis, Bogor (1991), Fira melanjutkan studi di Jurusan Antropologi UI. Setahun kemudian, ditransfer ke Jurusan *Communication Journalism* di Pittsburg State University, Kansas, USA. Lulus dengan gelar *Bachelor Arts* tahun 1995.

Lalu, selama musim panas hingga

menulis. Pagi, bangun, ngurus anak kerja. Sesuai kerja, ada aktivitas yang mesti dibadiri. Misalnya ada undangan ngobrol soal novel, sastra, perempuan. Kalau pas pergi ke Yogyakarta, *lung-lung* sebagai *refreshing*.

"Saya biasa tidur sore, lalu bangun dan menulis," katanya. Fira menggunakan bukunya *hingga larut*. Setelah tidur dan bangun tengah malam, rasanya tenang untuk bekerja. Menyelesaikan novelnya juga mengambil waktu-waktu antara tengah malam sampai pagi.

Ketika awal penulisan novel *Alap* — yang kemudian terbit tahun 2002 — Fira menerima berita duka yang menyentak. *Kyang* *hakungnya* meninggal. Bapak dari ibunya itu semasa hidupnya dipanggil dengan sebutan bapak. "Ini saking dekatnya saya dengan beliau dan saudara-saudara saya," katanya. Menurut cerita Fira, yang membuat kadang ia menulis, sang kakak itu meminta Fira pulang. Tapi, karena alasan ini dan itu, Fira menunda kepulangannya.

Padahal, *ayang* ini banyak berinteraksi tentang perang, tentang masa kecilnya, hingga sejarah dan silsilah keluarga. Tak jarang justru cerita-cerita itu menimbulkan inspirasi baginya. "Saya tak sempat menulis selama tinggal karena beliau sudah dikuburkan saat saya mengunjunginya di Jakarta," kenangnya.

(Arwan Tuti Artha)

musim gugur 1999 ia meneruskan studi master di jurusan *Communication Public Relation*, Pittsburg State University. Selama musim semi hingga musim panas 1996 ia mengambil studi di bidang yang sama di Wichita State University.

"Saya pernah tinggal di Singapura," kata Fira, ibu seorang anak itu, yang menikah dengan Palden T' Galang. Di sana Fira bekerja sebagai *part time presenter* sebuah radio Singapura, sekaligus sebagai koresponden majalah *Harpers Bazaar-Indonesia*. Selama tinggal di Singapura, banyak ide muncul. Banyak menemukan kata yang hampir sama dengan bahasa Indonesia, kata *nyak*, misalnya, yang akan dijadikan judul salah satu novelnya, muncul dari Singapura. "Kalau di Indonesia ya sama artinya dengan nyak, makanan yang berisi campuran campur buah," terangnya.

Bakat Fira menulis, seunggul-unggulnya, ketika ia SMPU ketika ia sudah sempat di SMA menulis. Menjalari berbagai lomba menulis, misalnya ketika *Tempo* dan *Gadis* bikin lomba penulisan, atau Lomba Ilmu Pengetahuan Indonesia, atau Depdikbud, hingga akhirnya menulis menjadi dunianya. "Saya pernah bekerja di majalah *Devil*, katanya. Juga *nyambit* bekerja sebagai kontributor majalah asing di Amerika.

HIDUPNYA tidak sunting di

Membayangkan Indonesia Masa Depan

NOVEL genre fiksi-sains (*science-fiction*) karya novelis kita tergolong sangat langka. Kalau tidak salah, baru novel berjudul *Area X* (baca: area sepuluh):

Hymne Angkasa Raya ini serta *Supernova* episode: *Ksatria, Putri, dan Bintang Jatuh* (karya Dewi Lestari) yang berjenis fiksi-ilmiah. Inilah salah satu hal yang membuat karangan Eliza ini terasa unik!

NOVEL ini juga memiliki *greget* tersendiri lantaran sifatnya yang futuristik. Dengan mengkaji sejarah, mempertimbangkan kondisi politik dan sosial budaya Indonesia saat ini, masalah krisis energi yang menghantui dunia hingga energi nuklir tampaknya adalah pilihan favorit penulis. Begitu juga implikasi sains dan teknologi garda depan bagi peradaban manusia, dipadu dengan isu *Unidentified Flying Object* (UFO) dan *alien* yang kontroversial, novelis muda ini lewat kekuatan imajinasinya berani bereksperimen membayangkan wajah Indonesia abad ke-21, tepatnya tahun 2015, dalam kemasan kisah ala film *The X-Files*.

Seraya kuliah di Universitas Wesleyan, Amerika Serikat, Handayani menyempurnakan novel yang pada tahun 1999 memenangkan Lomba Penulisan Nasional Film/Video ini. Dia memperkokoh dengan menambah otot, tulang, dan susunan saraf, merujuk 33 buku literatur, jurnal, serta buletin (edisi 1975-2002) di perpustakaan universitasnya (hlm viii). Jadi, masuk akal jika novel ini bukan sekadar memperlihatkan kecerdasan, diksi, dan teknik bercerita yang apik, tetapi sekaligus kekayaan cakrawala ilmiah penulisnya. Maka, tidak heran, se-

bagaimana *Supernova* memesona banyak orang karena pengarangnya berhasil mengintroduksikan batas-batas eksplorasi sains abad ke-20 dan spritualitas kepada para pembaca dalam satu jalinan cerita fiksi, *Area X* ini pun memukau.

◆◆◆

DENGAN struktur pengisahan yang tidak linier, seakan memperlihatkan keselarasan dengan paradigma fisika kuantum-relativistik yang memandang waktu bersifat nonlinier, Eliza memperkenalkan tokoh-tokoh novelnya sebagai wakil generasi muda Indonesia abad ke-21 yang cerdas, terpelajar, memiliki rasa ingin tahu yang besar terhadap iptek, tidak kenal menyerah, bersifat petualang dalam menggeluti berbagai misteri yang menyelimuti angkasa raya, serta responsif terhadap problem global dan lingkungan sekitarnya.

Kisah diawali ketika Yudho dan sahabatnya, Rocki, yang sama-sama mahasiswa pascasarjana ilmu komputer, pada September 2015 melakukan penyusupan pada Area X yang dijaga ketat dan tertutup bagi masyarakat umum, di Hadeslan, sebuah kota satelit yang mengelilingi Jakarta. Kendati Yudho selamat, ironisnya Rocki tertangkap dan keesokan harinya ditemukan tewas. Sementara itu pihak Area X dapat berkelit dan bebas dari tuntutan.

Sehari sebelumnya, Elly Valeria, mahasiswa S2 astrofisika yang menerjunkan diri ke bidang UFO-logi dan selama tiga tahun telah mengamati Area X, tiba di Hadeslan. Dia mendengar adanya penampakan misterius di Area X yang dibangun Pemerintah Indonesia tahun 2005 dan bergerak di bidang riset teknologi militer berstatus *Ultra Top Secret*. Tanpa sengaja, dua hari setelah kedatangannya, dia melihat mayat dibuang orang-orang yang memakai truk berlogo Area X. Lewat komputer mini, ia merekam kejadian itu. Belakangan dia tahu mayat itu bernama Rocki.

Berdasarkan info dari polisi, gadis ini berhasil menemui Yudho dan memperlihatkan hasil rekamannya kepada Yudho. Situasi bertambah runyam dan

gawat setelah Tammi, teman Elly, diculik paksa untuk diperiksa pihak Area X. Hal ini memaksa Elly dan Yudho melakukan infiltrasi kedua ke Area X.

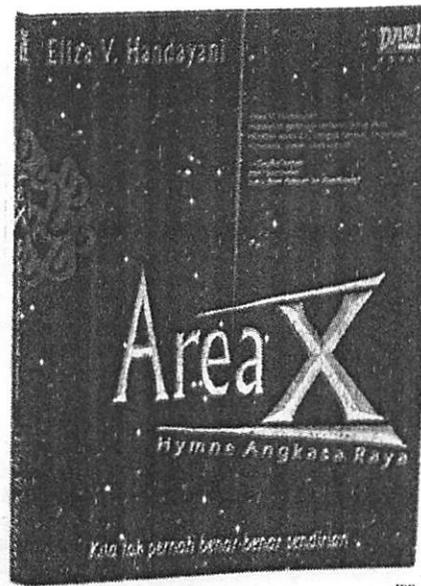
Tanpa diduga, melalui Circe, makhluk hasil rekombinasi *alien* dan DNA manusia yang mengalami kegagalan tetapi jenius dan memberontak, pasangan ini mendapat informasi tentang proyek eksperimen pembuatan manusia super di Area X yang sungguh berbahaya dan telah mencelakakan banyak orang. Atas bantuan makhluk cacat ini, mereka dapat meloloskan diri dari kepungan petugas keamanan Area X dan menghancurkan simbol supremasi sains dan teknologi itu.



KENDATI novel ini mengundang pujian dari banyak pihak, termasuk mereka yang seyogianya bisa bersikap lebih kritis, ada beberapa catatan penting yang dapat kita ajukan pada pengarangnya. Seperti diingatkan mahafisikawan Inggris, Stephen Hawking, kelemahan yang sering melekat pada novel atau film fiksi-sains adalah sifatnya yang terlalu mengada-ada (Hawking, 1993). Artinya, tidak tunduk pada logika ketat dan sains yang riil. Sayangnya, novel ini pun terperosok ke dalam cacat yang nyaris sama.

Memang tidak ada salahnya membiarkan imajinasi berkelana dengan bebas. Tidak seorang pun berhak mengampusti hak orang lain untuk menjinakkan imajinasinya. Meski demikian, logiskah memimpikan Indonesia (sekitar 10-15 tahun lagi) dapat menguasai sains dan teknologi canggih semacam *zero point energy*, aplikasi gravitasi artifisial, dan sebagainya—seperti dilukiskan dalam kisah *Area X*—sementara negara yang sangat maju seperti Amerika Serikat pun belum tentu mampu merealisasikan 50 tahun ke depan. Sampai tahun 2000 misalnya, data UNDP tentang Indeks Pembangunan Manusia (HDI) menunjukkan, dari 174 negara, negara kita baru mencapai peringkat 109 (*Kompas*, 29/9/2000). Hasil survei pengukuran dan penilaian pendidikan oleh The Third International Mathematics and Science Study-Repeat tahun 1999 pun menyebutkan Indonesia berada di urutan ke-32 (IPA) dan ke-34 (matematika) dari 38 negara yang dinilai (*Kompas*, 8/12/2000). Apakah (manusia-manusia) Indonesia begitu super sehingga tidak perlu melalui tahap normal dalam pencapaian iptek sebagaimana dilalui bangsa lain?

Ada lagi kekeliruan fatal yang tidak



Judul: *Area X: Hymne Angkasa Raya*
 Penulis: Eliza V. Handayani
 Penerbit: DARI Mizan, Bandung Juli 2003
 Tebal: xxiv + 368

bisa dianggap bersitat teknis semata. Menjawab pertanyaan Yudho, salah satu pencapaian penting pihak Area X yang dipaparkan salah seorang petugas mereka kepada Yudho dan Elly saat keduanya diinterogasi ialah masalah pembuktian *teorema terakhir Fermat* yang tersohor itu. Bukankah aneh memerikan kasus ini sebagai prestasi spektakuler pada tahun 2015, sedangkan dalam kehidupan nyata problem ini telah diselesaikan matematikawan bjenius dari Universitas Princeton, Andrew Wiles, bulan Mei, 1995?

Mengingat banyaknya istilah ilmiah yang dimuat dalam novel ini, akan lebih baik jika pada cetakan berikutnya Eliza menambahkan glosarium, bukan hanya catatan kaki seperti yang sudah ada, agar pembaca yang awam dalam masalah sains dan teknologi lebih mudah memahami alur cerita. Selain itu, kita berharap Eliza dapat menyelam lebih jauh ke dalam sains, sejarah sains, dan filsafat, agar kelak kita dapat menikmati novel genre fiksi-sains yang jauh lebih memukau. Bukan sekadar novel berbaju hias sains, dengan diksi yang baik dan puitis, tetapi karya yang benar-benar menelurkan pemikiran baru, memstimulasi pembaca untuk terlibat berpikir, serta makin dekat dengan sains yang nyata. Bagaimana pun, pekerjaan akbar seperti ini pantas digarap penulis muda bertalenta besar ini.

Terlepas dari retakan tersebut, novel

ini menggemakan sebuah kebenaran, klasik-abadi bagi kita: energi terbesar kehidupan bukanlah produk sains dan teknologi, melainkan dalam Area X yang lain, bernama "jiwa atau hati" yang mencinta. Cintalah, kekuatan kosmis paling universal dan dahsyat, himne terindah jagat raya, yang dapat menyatukan kita sebagai bangsa untuk bergandeng tangan merajut wajah Indonesia agar tampil dan mekar berseri pada masa depan.

MARULAM TUMANGGOR
Peminat Sains dan Pencinta Buku
Tinggal di Yogyakarta

Kompas, 19 Oktober 2003

• Kronik

Agnes Jessica Luncurkan Dua Novel

JAKARTA — Dua novel terbaru karya Agnes Jessica, *Satu Abad Sekejap Mata* dan *Dua Bayang-bayang*, akan diluncurkan Rabu (23/10) di Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin, TIM, Jl. Cikini Raya, Jakarta Pusat. Dalam acara itu juga akan diadakan bedah buku bersama K Usman, pengarang yang dikenal dengan karyanya *Surat Kepada Jenderal*.

Dalam *Satu Abad Sekejap Mata*, Agnes mengangkat tema fiksi sains tentang *time machine* (mesin waktu) buatan Indonesia di tahun 2203. Jika mesin waktu selama ini melompat ke masa depan, namun dalam cerita ini justru peran mesin waktu itu membawa Dominique — sang tokoh — surut ke belakang.

Menurut Agnes, Dominique menjadi tokoh cerita remaja yang terpilih dalam percobaan mesin waktu. Semula, ia hidup pada tahun 2203. Namun, ketika pemuda bodoh ini harus masuk dalam permainan mesin waktu dengan teman-temannya, ia dibawa mundur pada kehidupan 100

tahun. Sehingga Dominique hidup pada tahun 2002 di kawasan Kelapa Gading.

"Cerita mesin waktu yang bisa membawa kembali pada kehidupan masa lampu merupakan ciri khas novel ini. Karena biasanya mesin waktu selalu digambarkan membawa tokoh cerita ke dunia masa depan. Tetapi, saya membawa pada kehidupan mundur dan pada kejadian masa kini," kata Agnes.

Untuk menulis fiksi sains itu, Agnes mengaku butuh waktu satu bulan. Namun, ide ceritanya telah mengendap setahun lebih. Ide itu pun berangkat dari cerita-cerita remaja tentang dunia sains.

Agnes yang pernah mengajar ilmu fisika dan matematika di SMA BPK Penabur tahun 1996 - 2001 ini mengungkapkan dalam novelnya itu banyak istilah ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai latar belakang cerita.

Sebelumnya, Agnes telah melahirkan dua novel yaitu *Rumah Beratap Bougenvil* (Maret 2003) dan *Jejak Kupu-kupu* (Mei 2003). ■ thk

Kalam Republika, 21 Oktober 2003

Gus Mus Hijrah ke Cerpen

JAKARTA, KOMPAS — Lembaga Kajian Kebudayaan Akar Indonesia (LK2AI) bersama Penerbit Buku Kompas, Tratat Budaya Estetik, dan Taman Budaya Yogyakarta bakal menggelar pergelaran baca cerita pendek bertajuk "Gus Mus Hijrah ke Cerpen". Acara akan berlangsung 24 Oktober 2003 di Concert Hall Gedung Sositet Militer (Kompleks Pasar Beringharjo) Jalan Sriwedani, Yogyakarta, pukul 19.00.

Menurut Joni Ariadinata, selaku Ketua LK2AI, acara ini dilatarbelakangi oleh spirit bahwa KH A Mustofa Bisri—biasa disapa Gus Mus—merupakan fenomena luar biasa. Di samping dikenal luas sebagai seorang ulama yang karismatik, kiai besar, salah satu tokoh puncak yang amat berpengaruh di kalangan organisasi terbesar Islam—Nahdlatul Ulama—Gus Mus ternyata adalah juga seorang sastrawan.

Karya-karyanya selalu menimbulkan kontroversi di kalangan akademis maupun pengamat kesusastraan. Ia menciptakan karya-karya yang unik, segar, kadang mbeling, tetapi menorehkan makna yang dalam sebagai perenungan berbagai persoalan. Dari mulai persoalan agama, politik, sosial, hingga nilai-nilai kemanusiaan.

"Tulisan-tulisan Gus Mus, khususnya dalam

antologi cerpen *Lukisan Kaligrafi* yang merupakan kumpulan cerpen pertama beliau yang diterbitkan Penerbit Buku Kompas ini memang unik, tetapi sangat mudah diterima oleh segmen pembaca yang beragam. Pandangan-pandangan Gus Mus dalam beragam tulisannya juga menyiratkan sebuah tawaran pluralisme yang kuat. Maka, tak heran—sebagai tokoh NU—Gus Mus amat mudah diterima berbagai kalangan," tutur Joni Ariadinata.

Karena itu pula, kata Joni, LK2AI mengundang Gus Mus untuk menyapa pembacanya, menyapa penggemarnya, dan menyapa umatnya, dalam format pertunjukan. Ia akan membacakan cerpennya secara langsung di panggung pada momen menjelang bulan Ramadhan ini.

Di samping Gus Mus yang bakalan membaca cerpen, menu acara yang akan ditampilkan adalah hadirnya para pendukung pembaca cerpen dan musikalisasi eksperimen yang akan dibawakan oleh aktor Bambang Darto, Joni Ariadinata, musik kolosal "Sampak Patrol" pimpinan Kenyut Y Kubro, dan acara akan diakhiri dengan orasi sastra serta pengajian cerpen oleh Gus Mus pula. Acara ini akan dipandu oleh penyair Amien Wangsitalaja. (*/KEN)

Kompas, 22 Oktober 2003

Pergelaran 'Gus Mus Hijrah ke Cerpen'

YOGYA (KR) - Menyongsong datangnya bulan Ramadan 1424 Hijriah, Lembaga Kajian Kebudayaan Akar Indonesia (LK2AI), Tratatag Budaya Estetik mengadakan Pergelaran Baca Cerpen bertajuk 'Gus Mus Hijrah ke Cerpen' di Gedung Societet, Jl Sriwedani, Jumat (24/10) pukul 19.30. Ketua LK2AI yang juga cerpenis Joni Ariadiata mengatakan, acara ini dimaksudkan sebagai alternatif siraman rohani agar melalui jalan sastra pun setiap orang merasakan manfaat.

Dikatakan Joni, dipilihnya penyair dan Kiai KH Mustofa Bisri alias Gus Mus, memang disengaja. "Orang tidak sangsi lagi dengan kepenyairan Gus Mus, juga kemampuannya menulis dan membacakan cerita pendek karyanya sendiri," ucapnya, Rabu (22/10).

Selain itu, Gus Mus dikenal sebagai ulama yang kharismatik, salah satu tokoh puncak yang amat berpengaruh di kalangan organisasi Islam Nahdlatul Ulama (NU), sekaligus sastrawan mumpuni. "Karyanya selalu menimbulkan kontroversi di kalangan akademis maupun pengamat sastra," katanya.

Dalam penilaian sejumlah pengamat, karya Gus Mus

muncul dengan segala keunikan, segar, kadang-kadang sangat 'mbeling'. Namun yang tidak bisa dilupakan, karyanya selalu menorehkan makna dalam sebagai sebuah perenungan dari berbagai persoalan kehidupan. Dari mulai persoalan politik, sosial, hingga nilai-nilai kemanusiaan secara umum.

"Tulisan Gus Mus khususnya dalam antologi *Lukisan Kaligrafi*, antologi terbaru yang akan dibacakan juga muncul keunikan, hadirnya pluralisme yang kuat, disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami semua golongan," katanya.

Disebutkan Joni, dalam 'Lukisan Kaligrafi' ada kisah tentang kiai, kehidupan di balik pesantren, persoalan mistik, nilai kesufian, dan banyak hal. "Kami menghadirkan untuk menyapa pembaca dalam format pertunjukan," ujarnya.

Selain Gus Mus, ditampilkan pula musikalisasi eksperimen dibawakan aktor Bambang Darto, musik kolosal 'Sampak Patrol' pimpinan Kenyut Y Kubro. Joni juga tampil membacakan cerpen. Puncak acara, Gus Mus melakukan orasi sastra dan pembacaan cerpen. Keseluruhan acara dipandu penyair Amien Wangsitalaja.

(Jay)-o

Kedaulatan Rakyat, 23 Oktober 2003

Cinta dalam 'Sastra Daur Ulang'

Judul buku	: Tafakkur di Ujung Cinta
Penulis	: Kuswaidi Syafi'ie
Pengantar	: Otto Sukatno CR
Penerbit	: Pustaka Pelajar Yogyakarta
Cetakan	: Juni 2003
Tebal buku	: xviii+198 halaman

"Cinta adalah pertautan yang sublim dan mutlak antara manusia dengan Tuhan. Separuh dari unsur cinta itu adalah manusia dan separuhnya lagi adalah Tuhan."

DEMIKIAN penyair Madura, Kuswaidi Syafi'ie, dalam buku terbarunya ini. Kuswaidi menyatakan, ketika guyuran cinta itu berbau dengan berkah, maka yang akan menyembul adalah pengorbanan, kesetiaan, dan ketulusan: bagian terbersih dari hidup manusia. Itulah kekuatan yang sanggup menjebol segala pagar yang pegal dan angkuh.

Cinta adalah energi dan kristal cahaya yang tidak bisa diringkus apapun. Dapat dipastikan bahwa ia bisa menyelusup ke dalam berbagai bentuk dan penampilan. Cinta bisa tampil secara lembut sebagaimana cahaya senja, tetapi bisa juga tampil secara ganas sebagaimana banjir yang tak terkendali. Cinta bisa mengangkat derajat seorang budak menjadi raja, cinta juga bisa menyungsepkan seorang raja ke derajat yang paling hina (hlm viii).

Untuk mempersiapkan diri memasuki cinta yang demikian, ada baiknya secara kontinyu melatih potensi di dalam diri agar senantiasa fokus kepada seseorang, laki-laki atau perempuan, yang secara sufistik-simbolik mesti dipahami sebagai Tuhan. Sebab hanya dalam fokuslah ketajaman cinta itu akan maksimal bersemi dan mengantarkan diri menjadi bukan sekadar imajinasi.

Dalam berkorban demi cinta, misalnya ia memberi contoh, seseorang tak perlu harus mengobjekkan diri pada perempuan bagi laki-laki, atau sebaliknya pada laki-laki bagi perempuan. Namun lebih dari itu cinta dapat dipertajam dengan upaya pertemuan dan mengagungkan Tuhan. Menurut jebolan IAIN Sunan Kalijaga yang kini aktif sebagai pejalan sastra Yogyakarta ini, setidaknya ada dua cara untuk memasuki wilayah pertemuan agung yang berimplikasi pada lahirnya berbagai karya seni yang merupakan percikan-percikan 'api keabadian' itu.

Pertama tanpa kendaraan yang berupa karya seni, seseorang bisa langsung melakukan langkah untuk menemukan posisi dekat (yang pada akhirnya

bermuara pada samudra wahyu) dengan Tuhan melalui bimbingan-bimbingan wahyu (yang *qawliyah* dan *kawniyah*) dan getar-getar nurani yang begitu lembut dan sekaligus nyata. Para spiritualis dan para sufi di dalam lumbung sejarah kebanyakan mengikuti cara ini.

Kedua, untuk mencapai pertemuan agung nan sakral itu seseorang bisa meniti jalan panjang yang berupa deretan berbagai karya sastra atau karya seni lainnya. Dalam menapaki perjalanan, mungkin ia mulai berproses untuk menghasilkan karya-karya seni: karya-karya seni yang merupakan produknya bisa saja ditandai oleh adanya aura spiritual yang menyembul dari dalamnya. Ketika ia telah berhasil memasuki pintu-Nya, maka sebagai karya yang diciptakannya tidaklah beda secara substansial dengan karya-karya seni yang dilahirkan oleh kaum sufi dan wali (hlm. 125-127).

Betapapun filosofis dan mendayu-dayunya teori cinta yang dikemukakan Kuswaidi, jika diselami secara jeli, ungkapan-ungkapan yang ditulisnya dalam buku ini tidak ada yang baru. Sebagaimana kata Otto Sukatno CR dalam kata pengantar, sebab Kuswaidi tak ubahnya 'intelektual daur ulang'. Mampunya mengungkapkan kembali apa yang pernah dicecuskan para sastrawan terdahulu.

Sehingga tak pelak muncul kesan bahwa ia sedang mencari eksistensi sebagai sastrawan di belantara sastra-sastra Indonesia. Hal ini merupakan sesuatu yang wajar, pada usia yang relatif muda (32 tahun), Kuswaidi belum dapat disebut sebagai sosok kreator. Ia masih pada tahapan nambahi belum sampai pada tingkat *nganyari* - mengikuti tingkatan pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu *niteni* (memperhatikan), *nirokke* (mencontoh-bedakan dengan plagiat), *nambahi* (menambah), dan *nganyari* (mencetuskan hal baru).

Namun demikian, bukan berarti buku ini luntur maknanya begitu saja. Sebab oleh siapapun buku ini dapat dinikmati sebagai karya agung yang menjelaskan hakikat cinta bagi manusia. Selamat menikmati cinta. □ - m

(Kontah A. Khafidz, Guru MIA
"Yajri-Sirajul Mukhlisin Uniq"
Payaman Magelang)

Kedaulatan Rakyat, 26 Oktober 2003

MESKI BARU SEKALI BACA CERPEN

Gus Mus Tampil Sangat Memikat

BACA puisi, bagi KH Mustofa Bisri — akrab dipanggil Gus Mus — itu sudah biasa. Maka tak heran ketika Gus Mus baca cerpen dalam pergelaran bertajuk 'Gus Hijrah ke Cerpen' di Art Center Taman Budaya Yogya, Jl Sriwedani, Jumat (24/10) malam, penonton dari berbagai kota pun berjubel. "Dalam sejarah hidup saya, baru kali ini baca cerpen. Itu terjadi karena dipaksa-paksa panitia. Anehnya, saya kok mau juga?" ujarnya jujur.

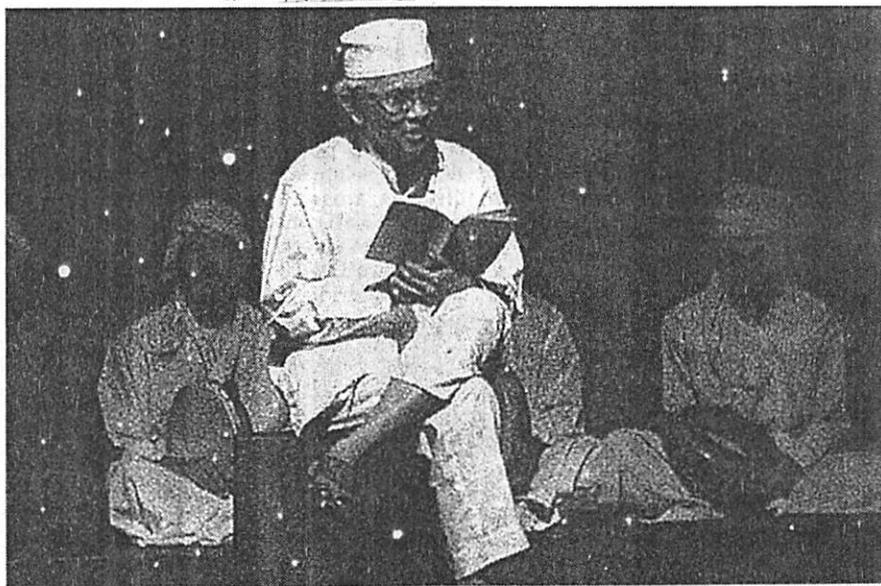
Karena baru pertama, Gus Mus membujuk-bujuk panitia agar dirinya diberi kesempatan tampil belakangan. Tujuannya apa? "Tujuannya agar saya bisa belajar dari para pembaca terdahulu. Taktik ini pernah saya pakai ketika pertama kali membaca puisi," ucapnya. Tapi, taktik ini ternyata sudah 'tercium' panitia, Gus Mus ingin tampil dipuncak acara dengan membaca cerpen justru gagal. "Jadi, kalau saya nanti tampil jelek, tolong dimaafkan saja," katanya.

Gus Mus ternyata hanya basa-basi. Ia tampil membaca dengan sangat memikat, mengalir, penuh penghayatan. Rasa humor tinggi juga mencuat begitu saja. Cerpen 'Gus Jakfar' ditulis di Rembang Jawa Tengah, Mei 2002 sebagai karya pertama. Padahal dengan karya tersebut, Gus Mus pernah sangsi apakah bisa dimuat karena begitu panjangnya, 15 halaman lebih.

"Cerpen saya ternyata dimuat dan mendo-brak konvensi cerpen harus pendek, cerpen bisa saja panjang sekali," ucapnya. Hanya saja sebelum dikirim ke koran Jakarta, sempat dikonsultasikan pada pelukis-cerpenis sufistik H Danarto. "Danarto juga sangsi, meski baik, belum tentu bisa dimuat di koran. Kenyataannya, bisa dimuat juga. Barangkali pertimbangannya yang menulis seorang Kiai," ucapnya terus terang.

Gus Mus selain kiai, juga pelukis, penulis kolom yang baik. Satu gaya dalam setiap karyanya selalu melakukan perlawanan, serta keluar dari konvensi yang ada. Karyanya pasti 'mbeling', penuh kritikan dibungkus sentuhan humor. Selain Gus Mus, malam itu tampil pula musikalisasi eksperimen dibawakan aktor Bambang Darto, musik kolosal 'Sampak Patrol' pimpinan Kenyut Y Kubro. Materi lagu-lagu Islami diaransemen Kenyut Y Kubro (Tratag Budaya Estetik) dan Indra Gunawan (Kua Etnika).

Malam itu, aktor gaek Bambang Darto juga membaca cerpen berjudul 'Bidadari itu Dibawa Jibril', sebelumnya cerpenis Joni Ariadinata membacakan karya Gus Mus berjudul 'Amplop-amplop Abu-abu'. Tiga cerpen yang dibacakan dipetik dari antologi Gus Mus terbaru bertajuk 'Lukisan Kaligrafi' berisi 18 cerpen. (Jay)-c



KRJAY

Gaya KH Mustofa Bisri membaca cerpen 'Gus Jakfar'

Seks dan Politik dalam Sastra Indonesia

Oleh Faruk

DI Indonesia kontroversi mengenai gambaran tentang hal-hal yang erotis dalam karya-karya seni, baik dalam karya sastra maupun dalam karya-karya seni pada umumnya, sudah sering kali terjadi. Pada masa kolonial, saat sastra dan seni modern Indonesia pertama kali muncul, terjadi polemik terselubung antara tokoh-tokoh Balai Pustaka dan non-Balai Pustaka. Dalam Nota Rinkes, misalnya, disebut-sebut mengenai karya-karya sastra yang merusak moral, yang harus dijauhi dan dipantangkan. Pada akhir masa kolonial, kemunculan *Belenggu* juga menimbulkan kontroversi justru di dalam kalangan sipil sendiri. Pada masa Orde Lama terjadi diskusi panjang mengenai karya-karya Motinggo Busye yang dianggap 'pornografis' yang antara lain menghasilkan *Keroncong Motinggo* Subagio Sastrowardoyo. Selanjutnya, terjadi pula diskusi antara Harry Aveling dan Goenawan Mohamad sebagaimana yang tampak dalam *Seks, Sastra, Kita*. Beberapa tahun yang lalu terjadi heboh foto pornografis dan estetis yang terkait dengan Sophia Lacuba dan Nano Riantiarno. Pada waktu karya Ayu Utami, *Saman*, muncul untuk pertama kalinya terjadi pula kontroversi serupa. Akhir-akhir ini, di panggung hiburan, terjadi heboh yang lebih besar, yang melibatkan Majelis Ulama Indonesia (MUI), suami Presiden, para menteri, aktivis LSM, seniman, yaitu heboh 'Goyang Inul', sehingga membangkitkan kembali Fatwa MUI mengenai pornografi dan pornoaksi yang bahkan beberapa waktu yang lalu diusulkan untuk dilegalisasikan oleh DPR/MPR.

Dalam sejarah sastra Indonesia, sejak Ayu Utami memang terjadi hal yang menakjubkan dalam persoalan gambaran ade-

gan erotis itu. Ia menakjubkan bukan hanya keberaniannya untuk jauh lebih terbuka dalam penggambaran adegan seks dibandingkan dengan karya-karya sastra Indonesia sebelumnya yang digolongkan sebetis, melainkan juga karena penulis yang mengikuti kecenderungan demikian justru penulis wanita seperti Dewi Lestari dan Nova Riyanti Yusuf. Menghadapi kecenderungan demikian, pertanyaan yang segera muncul adalah: (a) sejauh mana karya-karya itu memperlihatkan kekhasan dalam penggambaran dan pemaknaan terhadap peristiwa dan penggambaran peristiwa erotis, (b) kemungkinan faktor-faktor apa yang memengaruhi atau setidaknya memungkinkannya.

Tulisan ini berusaha memberikan jawaban terhadap kedua pertanyaan itu. Akan tetapi, jawaban yang diberikannya hanya didasarkan pada kesan selintas dan tidak lengkap. Yang akan dijadikan dasar dari tulisan ini hanya karya-karya tiga orang penulis wanita yang disebutkan di atas, yaitu Ayu Utami, Dewi Lestari, dan Nova Riyanti Yusuf. Novel-novel mutakhir yang lain tidak akan disentuh sama sekali.

Dalam *Seks, Sastra, Kita*, Goenawan Mohamad melihat ada tiga pola sikap dari sastra Indonesia terhadap persoalan seks dan cara penggambaran seks. Pertama, karya-karya yang berusaha mempersoalkan seks tetapi tidak berani menggambarkannya, karya-karya yang dalam istilah Harry Aveling diperlakukan persoalan seks itu sebagai 'mawar berduri'. Kedua, karya-karya yang mempersoalkan seks dan menggambarkannya dengan cara 'meneriakkannya dengan keras-keras'. Karya-karya yang demikianlah yang mungkin digolongkan sebagai karya-karya 'pornografis', yang menggam-

Penulis adalah dosen pada FS (FIB) UGM, Yogyakarta. Tulisan ini bagian dari tulisan panjang, disampaikan pada diskusi Dewan Kesenian Jakarta, TIM, Jakarta, bertajuk 'Seks dalam Sastra Kita Kini', 21 Oktober 2003

barkan peristiwa erotis secara 'berlebihan'. Ketiga, karya-karya yang mempersoalkan seks sebagai bagian dari kehidupan manusia yang wajar dan menggambar-kannya secara wajar pula. Yang dijadikan Goenawan sebagai contoh dari karya-karya demikian antara lain cerpen-cerpen Umar Kayam dan puisi-puisi Sitor Situmorang.

Pengelompokan Goenawan itu tampak sangat meyakinkan dan tidak dapat diabaikan jika kita ingin memahami perkembangan persoalan dan penggambaran seks dalam sastra Indonesia, termasuk sastra Indonesia mutakhir yang ditulis oleh para penulis wanita di atas. Secara mudah dan sederhana segera saja kita dapat memasukkan ke dalam kategori yang kedua, karya-karya sastra yang dulu disebut sebagai 'novel-novel stensilan', yang polanya masih dapat ditemukan hingga sekarang sebagaimana yang sering diujakan di terminal-terminal atau stasiun-stasiun atau bahkan dalam cerita-cerita bersambung di dalam beberapa tabloid, atau juga karya-karya yang ditulis di dalam internet seperti 'Petualangan Aries' yang beredar di sebuah *millngist* seks remaja. Karya-karya yang termasuk dalam golongan pertama pun akan dapat dengan mudah diidentifikasi, sebagaimana halnya juga karya-karya yang termasuk dalam kategori yang ketiga.

Namun, jika pengelompokan itu ditelaah dan coba dioperasionalisasikan secara ketat, persoalan yang segera muncul darinya adalah persoalan tolok ukur yang digunakan untuk menentukan gambaran yang disembunyikan, yang berlebihan, dan yang wajar mengenai hal-hal atau peristiwa-peristiwa erotis yang bersangkutan. Apabila, misalnya, yang dianggap sebagai gambaran yang wajar itu adalah yang alamiah, pertanyaannya adalah:

adakah yang alamiah di dunia ini, bagaimana mengetahuinya, dan bagaimana pula cara mengatakannya? Teori semiotik dan teori post-strukturalis tentu akan menyangkal kemungkinan adanya hal yang alamiah tersebut. Termasuk, tentunya, dalam persoalan seks. Apabila yang dimaksudkan adalah proporsionalitas, yang harus mendapatkan perhatian adalah konteks tematik dan komposisional teks yang mengandungnya.

Seks dan aktivitas seksual memang sesuatu yang bersifat bawaan pada manusia, sesuatu yang melekat pada fakta biologisnya. Sebagai bagian dari fakta biologis ini, seks bersifat sangat individual. Namun, aktivitas seksual mengandung pula fungsi sosial yang sangat mendasar, yang dapat dikatakan bersifat niscaya. Pertama, hanya dengan melalui aktivitas seksual keberlangsungan kehidupan manusia sebagai kolektivitas dapat bertahan hidup: seks merupakan sebuah prakondisi bagi reproduksi umat manusia. Sehubungan dengan tuntutan reproduktif itu, aktivitas seksual itu sendiri tidak dapat berlangsung secara individual: manusia membutuhkan orang lain dengan jenis kelamin yang berbeda. Dalam hal yang kemudian ini seks menjadi aktivitas sosial, bukan aktivitas individual.

Karena fungsi sosialnya di atas, setiap komunitas mempunyai kepentingan terhadap seks dan hubungan seksual. Masyarakat berusaha mengatur dan dengan demikian mengarahkan aktivitas seksual agar tidak bergerak ke arah fungsi individualnya semata sehingga kesinambungan keberadaan komunitas dapat dipelihara dan dipertahankan. Individu didorong untuk mengenal, percaya, dan suka pada keberbedaan jenis kelamin, untuk mengenal, percaya, dan suka pada keniscayaan hubungan seks

antarjenis kelamin yang berbeda, dan juga untuk mengenal, percaya, dan suka pada keharusan melaksanakan hubungan antarjenis kelamin yang berbeda secara teratur, mengenal, percaya, dan suka pada pentingnya memelihara kesehatan dan fungsi reproduksi organ seksualnya.

Pernyataan yang terakhir di atas tidak dengan sendirinya berarti bahwa fungsi alamiah atau biologis dari seks dan aktivitas seksual lenyap sama sekali. Fungsi tersebut tetap ada tetapi tersimpan dalam wilayah yang sangat pribadi dari diri manusia. Fungsi itu baru akan muncul atau menyembul ke permukaan dunia sosial ketika terjadi krisis sosial dan kultural dalam komunitas yang terkait. Adapun krisis itu dapat terjadi ketika kontrol komunitas terhadap seks dan aktivitas seksual tidak lagi mengarah kepada pencapaian tujuan bersama atau kepentingan survival semakin banyak orang. Atau, krisis itu terjadi ketika manusia menemukan cara-cara baru untuk menjalankan fungsi individual seks dan aktivitas seksual secara maksimal tanpa harus kehilangan fungsi sosialnya.

Dengan demikian, hubungan antara fungsi alamiah dengan fungsi sosial seks dan aktivitas seksual tidak hanya saling bertentangan, tetapi juga saling mengisi. Tidak hanya fungsi sosial-kultural yang melakukan kontrol terhadap fungsi alamiah, tetapi juga sebaliknya. Dalam konteks yang demikianlah konsep kewajaran, menurut saya, harus ditempatkan. Kontrol sosial terhadap seks dan aktivitas seksual yang mengancam akan sangat melemahkan dan mematikan sama sekali potensi fungsi individualnya, merupakan sesuatu yang tidak wajar. Sebaliknya, pelaksanaan fungsi individual yang mengancam kemungkinan kesinambungan kehidupan komu-

nitias, terutama umat manusia, juga tidak wajar.

Pengertian serupa itu membawa kita pada kemungkinan penilaian kembali kategorisasi Goenawan di atas. Yang menjadi soal bukan lagi apakah sastra menierakkan dengan keras atau menyembunyikan persoalan seks dan aktivitas seksual, melainkan seberapa jauh sastra mengancam keberadaan potensi fungsi individual seks dan aktivitas seksual maupun fungsi sosialnya. Ancaman itu dapat berupa penyembunyian ataupun bahkan peneriakan seks dan aktivitas seksual dengan keras.

Dalam hal kesetiaan waktu, dalam hal momen, *Saman* justru memperlihatkan kemiripan dalam batas tertentu dengan *Mahadewa Mahadewi*. Dalam karya Nova tersebut Kako seakan-akan tampil sebagai tokoh yang terus-menerus berusaha melawan waktu, berusaha mempertahankan momen-momen terindah dalam pengalaman kehidupannya dari renggutan waktu yang bergerak dengan cepat. Momen terpenting yang berusaha ia pertahankan itu adalah momen-momen keindahan dan kenikmatan hubungan seksual, baik yang terjalin dalam hubungan perselingkuhan maupun yang tidak.

Mahadewa Mahadewi karya Nova Riyanti Yusuf menempatkan perselingkuhan seks sebagai aktivitas seksual yang penuh kenikmatan, tetapi yang juga dibayangi oleh perasaan bersalah atau dosa. Apalagi, seperti yang terjadi dalam hubungan antara Kako dengan Leo, perselingkuhan itu justru merupakan hubungan cinta dan seksualnya yang pertama. Namun, Kako kemudian menemukan hubungan seks alamiah yang membebaskannya dari dosa yang serupa itu, yaitu ketika ia berhubungan dengan

Reno yang memang belum berisikri. Karena itu, di dalam novel ini sikap terhadap hubungan seks alamiah adalah sikap pembebasan yang terbatas, yaitu dibatasi oleh norma sosial. Novel ini mengakui fungsi alamiah seksualitas dan fungsi sosialnya sekaligus. Kedua fungsi tersebut cenderung saling membayangi tetapi sekaligus saling menghambat.

Kecenderungan demikian tampak pula dari susunan alur cerita. Dalam batas tertentu alur cerita novel ini memperlihatkan gerak melingkar, siklik, sebagaimana yang terdapat dalam *Supernova* yang di dalamnya perubahan cenderung dipahami sebagai variasi belaka. Namun, meskipun cerita seakan bergerak kembali ke posisi awal cerita, dalam novel Nova ini posisi akhir dari cerita ternyata tidak sepenuhnya sama dengan posisi awalnya. Tiba-tiba sang tokoh, Kako, yang kembali ke kantornya semula, menghadapi sebuah tempat yang ia rasa asing. Orang-orang lama yang dikenalnya di kantor itu sebelumnya sama sekali tidak dikenal oleh orang-orang di kantor itu kemudian. Karena itu, bisa saja yang terjadi adalah bahwa tokoh cerita sama sekali tidak kembali. Ia tetap hidup dalam dunia transisi, dunia yang bergerak, sebuah krisis, yang memungkinkannya untuk masuk kembali ke dalam fungsi kealiamahan seksualitas.

Dalam pengertian yang sederhana, di antara ketiga novel itu karya Ayu Utami yang menierakkan seks dengan keras-keras. Namun, apakah hal itu berarti ia menjadi tidak wajar?

Dalam konteks Indonesia sekarang ini, menurut saya, tidak banyak alasan untuk memperkuat fungsi sosial seksualitas, mempertahankan dan mengembangkan sikap normatif terhadap hal tersebut. Pertama, tekanan jumlah penduduk yang kuat, pen-

gangguran yang meningkat, ditambah dengan melonggarnya gerakan program Keluarga Berencana, menuntut seks untuk lebih diperlakukan dalam fungsi kealiamahan-individualnya daripada sosialnya. Kedua, kegagalan dan kemacetan gerakan reformasi, kecenderungan kembalinya militerisme dengan pendisiplinan dan kontrol yang keras terhadap tubuh dan individu, juga menuntut energi yang kuat untuk melawannya. Ketiga, globalisasi informasi dan ekonomi membuat individualisasi masyarakat menjadi tidak terelakkan. Dalam konteks yang kemudian ini, sikap normatif terhadap seksualitas dapat berubah menjadi kemunafikan dan manipulatif sebagaimana yang terjadi dalam kasus Inul. Isu moral dilontarkan bukan demi kepentingan terpeliharanya komunitas, melainkan demi kepentingan politik dan ekonomi pribadi ataupun kelompok yang sektarian.

Dalam keseluruhan konteks yang demikian, tindakan sastra yang paling wajar adalah justru dengan menierakkan kealiamahan seksualitas sekeras-kerasnya. Sikap normatif Dewi Lestari dengan novelnya di atas dapat menjadikan dirinya sebagai bagian dari gerakan ke arah militerisme dan otoritarianisme. Sikap Nova Riyanti tampak terbelah, penuh keraguan, dan tidak akan efektif untuk melawan kemungkinan di atas. Karena itu, menurut saya, novel serupa *Saman* seharusnya perlu diperbanyak. Dengan perbanyakannya itu terbuka kemungkinan yang luas bagi penghargaan masyarakat pada hak seksual dan bahkan kemudian hak asasi individu secara keseluruhan. Dan, hak itu pulalah, dalam hal ini individu lain, yang akan menjadi pembatas dari teriakan di atas. Semua novel di atas, sebagaimana sudah disinggung, sangat menentang perkosaan.***

SASTRA INDONESIA-KONGRES (ATL)

Tradisi Lisan Takkan Hilang

JAKARTA, KOMPAS — Tradisi lisan menunjukkan perkembangan menggembirakan dan takkan lekang oleh kemajuan zaman. Tradisi lisan akan terus tumbuh sesuai konteksnya dan berkaitan dengan perkembangan terkini masyarakat.

Demikian inti pembicaraan yang disampaikan Prof Dr Rahayu Supanggah dari Sekolah Tinggi Seni Indonesia, Solo; ahli sastra dari Universitas Leiden, Belanda, Dr Clara Brakel; peneliti dari Medan Juara Riamantha Ginting MA; dan peneliti wayang golek Prof Dr Okke KS Zaiamar.

Mereka, Kamis (2/10), berbicara pada hari pertama Seminar Internasional Tradisi Lisan IV dan Festival Pesisir 2003 di Jakarta. Seminar berikut pertunjukan itu berlangsung hingga 5 Oktober, diikuti pakar tradisi dari Indonesia, Belanda, Amerika Serikat, Jepang, Perancis, Korea Selatan, Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam.

Rahayu—yang sudah lebih dari 50 tahun menjadi penonton berbagai jenis wayang kulit—menjelaskan, wayang kulit sebagai bagian dari tradisi lisan

sudah berubah karena tak hanya dimodernisasi dengan sinar laser dan musik dangdut dalam pertunjukannya, tetapi juga meluas bukan hanya milik orang Jawa atau Indonesia. Lakon wayang kulit pun bisa disesuaikan dengan pesanan.

Clara Berkel yang meneliti tradisi lisan masyarakat Karo, Pak-pak, dan Dairi di Sumatera Utara mengatakan, tradisi di sana dilakukan dengan model penyampaian cerita selama semalam suntuk. Ada yang seperti pantun, tetapi ada juga yang dengan model dialog antarmereka yang terlibat.

Dalam masyarakat Karo, tradisi lisan yang juga diungkapkan dalam bentuk tari dan musik ternyata berkorelasi dengan kondisi lingkungan sekitarnya, termasuk perambahan hutan.

Bulan lalu, masyarakat Karo dari Sumatera bekerja sama dengan Belanda mementaskan Pertangisan Berudayang, tangisan warga Karo atas perambahan hutan di situ.

"Dari situ terjadi kerja sama masyarakat Belanda dengan Sumatera Utara untuk mencari solusi masalah," tutur Clara Brakel sesuai ceramah.

Menurut Brakel, hal itu menunjukkan bahwa tradisi lisan merupakan alat efektif penyampai pesan kepada pihak lain dan bisa membantu mencari pemecahan masalah. (TR)

Kompas, 3 Oktober 2003

SASTRA INDONESIA-KRITIK

Agar Diskusi Sastra Lebih Menarik dan Hidup

PESAKITAN yang duduk di kursi terdakwa itu bernama Hudan Hidayat. Ia diadili atas penulisan cerpen-cerpen yang terkumpul dalam antologi *Keluarga Gila*. Dakwaan dibacakan jaksa Bambang Wibarata dan T Christomy, keduanya merupakan staf pengajar di Fakultas Ilmu Budaya (dulu Fakultas Sastra) Universitas Indonesia.

Sidang ini digelar untuk dua hal. Pertama, mengenang kembali pengadilan puisi pada 1974 di Bandung, yang menghasilkan keputusan bahwa telah terjadi penurunan kualitas puisi Indonesia. Kedua, untuk menggairahkan perdiskusian sastra yang selalu terkesan menjenuhkan.

Pengacara yang menjadi pembela adalah Maman S Mahayana, Richard Oh, dan Binhard Nurohmat. Sementara hakim yang memimpin jalannya persidangan adalah Ahamadun Yossi Herfanda (wartawan *Republika*).

Sidang atas kumpulan cerpen *Keluarga Gila* berlangsung di Universitas Indonesia, Depok, awal pekan ini, berlangsung mulai pukul 13.00-16.30 WIB.

Jaksa Christomy membacakan dakwaan setebal lima halaman. Ia menyatakan, dari tujuh cerpen yang ada pada *Keluarga Gila*, cerpen berjudul *Bertengkar dengan Maut* merupakan cerpen terbaik. Dan cerpen yang mencoba ingin menuturkan kegilaan itu menjadi tidak gila karena menyebut-nyebut kegilaannya sendiri secara eksplisit. Bukankah orang gila tidak pernah mengaku gila?

Ia menambahkan, terdapatnya kata pengantar dari Maman S Mahayana yang mencapai 30% dari jumlah halaman buku, merupakan persekutuan antara penulis dan kritikus dalam menghidupkan sebuah teks.

"Pak Hakim, masyarakat sastra sepertinya dianggap belum cukup cita rasanya sebelum 'diantarkan' (kata pengantar dari kritikus). Kalau ini dibiarkan terus, saya khawatir masyarakat kita menjadi masyarakat yang harus diantar ke mana pun dia pergi. Bukankah kita membutuhkan masyarakat yang berani?" ujar Christomy yang akrab dipanggil Tomy.

Ia menambahkan, terjadi verbalisasi dalam mengungkapkan ide oleh Hudan. Sehingga cerpen-cerpennya yang berisi kekerasan dan hal-hal yang *pamali*, menyamai berita kekerasan di televisi atau koran.

Jaksa yang lain, Bambang Wibawarta, menyatakan membaca cerpen *Keluarga Gila* seperti melihat sebuah panggung di mana para aktornya bebas keluar masuk, dan terjadi konflik antara satu tokoh dengan lainnya. Karena rapatnya kejadian dan konflik yang dibalut kekerasan yang datang bertubi-tubi, pembaca seolah tak sempat mengambil napas untuk merehungkannya hingga karya tersebut selesai dibaca.

Sementara itu, para pembela menyatakan pada dasarnya karya Hudan harus dinilai jangan dari permukaannya saja, tetapi juga harus dipahami unsur ekstrinsik yang melatarinya. Juga, harus memiliki sikap toleran terhadap hal yang antik-antik, yang menggunakan diksi tak lajim seperti alat-alat kelamin, adegan seksual, dan lain-lain.

Menurut Richard Oh, diksi-diksi itu semua bagi Hudan hanya bermain-main. Pembaca yang hanya membaca di permukaan, menurut Richard, akan mengada-ada terhadap cerpen Hudan.

Gaya bahasa Hudan itu memang sengaja dibuat stakato, gablang, dan lugas, seakan terjadi sehari-hari. Ia tidak

berpretensi membuat karya sastra yang ingin disebut 'hebat' sehingga menggunakan kata-kata yang susah diakses masyarakat kebanyakan.

Hudan, yang diberi kesempatan berbicara, menyatakan cernannya ingin mengutarakan suasana sekerat di mana hal ini belum dilakukan yang lain.

Sementara itu, majelis hakim Ahmadun Yossi Herfanda memutuskan tiga hal yang menjadi hasil persidangan. Pertama, *Keluarga Gila* sah sebagai karya sastra. Kedua, Hudan harus membayar seluruh biaya persidangan. Dan, Hudan harus belajar lebih banyak membuat karya sastra yang bagus.

● Doddi AF/B-2/

Media Indonesia, 1 Oktober 2003

Kegiatan Sastra Kampus, dari Titik Nol

YOGYA (KR) - Iklim kehidupan seni dan budaya, terutama sastra di kampus akhir-akhir ini memang sangat memprihatinkan. Setiap kegiatan sastra selalu saja harus berangkat dari titik nol. Mereka yang awalnya aktif, setelah semesternya lebih tinggi, sering mundur teratur. Aktivitas kegiatan mahasiswa harus dari nol lagi. Kondisi umum berlangsung di kampus PTN maupun PTS. Hal ini tidak lepas dari sikap apatis mahasiswa terhadap kehidupan sastra itu sendiri. Di sisi lain, aktivitas kuliah dianggap lebih penting, serta kegiatan-kegiatan kemahasiswaan dianggap sekadar pelengkap penderita.

Demikian ditegaskan Nono L Basuki, pimpinan Bengkel Sastra Program Studi Sastra Indonesia Universitas Sanata Dharma (USD) kepada *KR* di kampus USD Mrican, Kamis (2/10) sore. Didampingi Agung Kusumo (Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan), Joni Ariadinata (cerpenis), Satmoko Budi Santosa (cerpenis), Nono mengatakan, kenyataan yang demikian justru mendorong para aktivis untuk berbuat dengan mengadakan kegiatan yang bisa mengasah kepekaan dan ketajaman mahasiswa. "Cara yang bisa ditempuh dengan mengundang para penulis ternama untuk berbagai pengalaman kreativitas," ucapnya.

Ia memberi contoh, Sabtu (4/10) pukul 19.00, Bengkel Sastra, Lembaga Kebudayaan Akar Indonesia, Majalah Sastra Horison, Kedutaan Besar Jerman, mengundang penyair Iman Budhi Santosa, Joko Pinurbo, Agus R Sarjono, Jamal D Rahman, Joni Ariadinata, serta Hendrik Barke-ling, Berthold Damshauser dari Jerman, membaca karya diteruskan berdiskusi.

Sebelumnya, kata Nono, pernah pula mengundang pengarang NH Dini, Sapardi Joko Damono, Raudal Tanjung Banua, serta banyak penyair dan cerpenis lain. "Kami berdiskusi, sekaligus membedah karya," katanya. Kegiatan seperti ini, lanjutnya, untuk mendinamisir kegiatan berkesenian di kampus. Tanpa ada dukungan dari aktivis mahasiswa, serta para dosen, nanti mahasiswa cenderung teks books saja. Di sisi lain, juga menghindari terjadinya kesenjangan para teoritikus akademisi dengan para praktisi di bidang seni dan budaya. "Ternyata dari pihak kampus menyambut dengan baik," tandasnya. Bukti, dosen-dosen yang berkompenten mau datang dan mengapresiasi, begitu juga para mahasiswa. Tapi sekali lagi, kata Nono, kegiatan tersebut memang harus ada yang memotori alias menggerakkan. (Jay)-d

Kedaulatan Rakyat, 4 Oktober 2003

Menimbang Pembaca

Alia Swastika

SUATU ketika, saat mencari bahan untuk sebuah studi tentang pembaca novel pop, saya dapati hasil-hasil penelitian sastra di pelbagai perpustakaan di Yogyakarta. Saya simpulkan, penelitian sastra kita dipenuhi dengan pendekatan analisis teks, baik dengan metode semiotik, analisis wacana, maupun analisis isi. Esai-esai sastra yang muncul di media massa pun ramai dengan pendekatan ini.

Sementara, pada waktu yang lain, saya saksikan seorang teman yang baru saja meluncurkan novel pertamanya, sibuk membagikan novel itu ke sejumlah orang, dan meminta mereka memberi komentar. Mungkin tidak semata-mata ia berharap mendapatkan pujian dan cibiran, namun, saya kira, ia ingin mengetahui sejauh mana karyanya diterima oleh orang yang membacanya.

Apakah nilai penting dari studi sastra yang menimbang suara pembaca? Dalam menjawab pertanyaan ini, ada baiknya kita melihat kompleksitas posisi sebuah teks. Stuart Hall (1979) menyebutkan dua proses yang harus dipahami untuk dapat melihat suatu produk kebudayaan. Yang pertama adalah penyusunan pesan oleh produsen teks, yang kedua adalah penerjemahan pesan oleh khalayak. Sementara, dalam kritik sastra selama ini, seperti yang sudah tersebut di atas, tampaknya kondisi antara kedua proses ini menjadi tidak seimbang karena proses pertama mendapatkan perhatian yang jauh lebih besar.

Studi sastra dengan pendekatan pertama tersebut bermaksud menunjukkan adanya makna, nilai, simbol dan ideologi dalam artefak kebudayaan melalui pengamatan terhadap instrumen formal dalam teks sastra seperti gaya bahasa, struktur naratif, sudut pandang, dan lain-lain. Kajian budaya kemudian mengembangkan analisis teks ini dengan menggabungkan analisis yang cenderung formalis tadi dengan sikap kritis pada bagaimana makna kultural mencetuskan ideologi atas gender, kelas, ras, seksualitas, nilai kebangsaan, dan sebagainya.

Singkatnya, yang menjadi penekanan dalam studi dengan pendekatan analisis teks adalah pembacaan kritis terhadap proses pembangunan tanda dan pesan dari sang pembuat teks. Dengan menggunakan pendekatan ini, kritikus melihat bagaimana sistem dan struktur sosial yang lebih luas di mana pengarang hidup dan terlibat dalam membangun ideologi

dalam teksnya. Yang terasa lemah dari pendekatan ini adalah alangkah terbatasnya kemungkinan pembacaan, sebab kajian ini secara mutlak dipengaruhi oleh posisi subyek, yakni si peneliti atau kritikus itu sendiri.

Padahal, kenyataannya, untuk membaca bagaimana keterkaitan teks dengan lingkungan sosialnya, satu pendekatan saja belumlah cukup. Masih ada sebuah proses lagi yang belum banyak ditelusuri, yakni bagaimana teks-teks itu dicerap oleh pembaca dan membawa pengaruh tertentu terhadap cara pandang pembaca terhadap dunia. Ada nilai dan gagasan yang dipakai secara aktif oleh pembaca. Sebuah teks adalah sesuatu yang sangat memungkinkan untuk ditafsirkan secara terbuka dan berbeda oleh pembacanya.

Tidak ada yang dapat menjamin bahwa pembaca akan menerima dan menangkap makna dalam suatu karya sesuai dengan maksud sang pengarang. Setiap pembaca adalah subjek yang mempunyai latar belakang dan perspektif yang khas, dipengaruhi oleh perbedaan gender, kelas, wilayah, dan bahkan ideologi politik. Pembaca bukanlah medan yang kosong. Dalam diri pembaca telah terdapat peta pengetahuan tertentu yang akan menuntunnya untuk menafsirkan teks.

Karya sastra yang dinilai membawa gagasan-gagasan baru, misalnya saja novel *Saman* karya Ayu Utami, memang mendapat banyak perhatian dari para kritikus/peneliti sastra, terutama dalam kaitannya dengan dekonstruksi terhadap seksualitas perempuan. Akan tetapi, tak ada, saya kira, penelitian sastra yang secara khusus mencoba melihat bagaimana pembaca novel itu sendiri mencerap persoalan yang berkaitan dengan seksualitas perempuan, atau, agak lebih jauh, bagaimana gagasan dekonstruksi atas seksualitas itu berpengaruh terhadap cara pandang pembaca terhadap persoalan seksualitas perempuan. Bagaimana para pembaca yang punya latar belakang berbeda-beda itu menafsirkan teks *Saman* sesuai dengan peta mereka masing-masing, tentunya dapat membantu memberi jawaban pada pertanyaan mengapa muncul kontroversi mengenai "vulgarisme" *Saman*.

DE untuk menimbang keberadaan pembaca bukan sesuatu yang sama sekali baru. Pada pertengahan 1970-an, Roland Barthes, yang merupakan salah seorang pemikir semiotik terkemuka, sudah mulai memba-

yangkan kemungkinan adanya sebuah estetika yang didasarkan pada kesenangan pembaca. Pembaca mempunyai perasaan dan nafasiran tertentu yang bisa jadi tak sama dengan yang dimaksud sang pengarang.

Namun, gagasan Barthes yang penting ini masih bersifat abstrak dan harus dikembangkan lagi sampai pada praktiknya ketika kita mencoba melihat posisi suatu karya sastra dengan perspektif yang lebih lengkap. Sebelum Barthes, yang sudah mencoba melakukan penelitian ini misalnya Jakobson dan Rifaterre (1966) atas puisi Baudelaire. Juga Wi-enold (1972) yang menyatakan bahwa "penelitian sastra sekarang ini harus menyelidiki klasifikasi kehidupan sastra ke dalam proses penggunaan sastra."

Di sinilah kemudian studi resepsi menemukan arti pentingnya. Resepsi khalayak membantu kita untuk melengkapi apa yang sudah dihadirkan dalam analisis teks dan secara langsung memfokuskan diri dalam bagaimana efek "politis" sebuah teks kepada pembaca, dan bagaimana pembaca memanfaatkan teks tersebut. Dengan demikian, seperti yang diungkapkan David Morley (1992), studi resepsi khalayak ini menjadi sebuah koreksi yang berguna bagi studi semiotik yang mengasumsikan bahwa makna adalah sesuatu yang inheren di dalam teks dan bahwa teks mempunyai kekuatan hegemonik.

Di sisi yang lain, studi ini juga menjadi pelengkap dari studi ekonomi politik yang cenderung menganggap bahwa pembuat teks mempunyai pengaruh yang kuat berkaitan dengan keputusan pembaca dalam menerjemahkan teks. Pembaca yang dimaksudkan di sini, seperti yang dinyatakan Bauer (1972), bukanlah pembaca yang ideal, yakni orang-orang yang punya pengetahuan mendalam tentang sastra, melainkan pembaca biasa yang membaca sastra seperti halnya jenis-jenis buku lainnya.

Kebanyakan studi resepsi sastra yang sudah dilakukan di Indonesia menggunakan metode kuantitatif, misalnya penyebaran kuisioner, yang kemudian berimplikasi pada orientasi penelitian yang berusaha menjangkau jumlah responden yang besar. Studi kuantitatif menyajikan resepsi pembaca dengan angka-angka, seolah resepsi adalah sesuatu yang terukur dengan pasti. Pembacaan oleh peneliti terhadap resepsi pembaca, selain didasarkan pada angka, juga pada apa yang dituangkan pembaca di atas lembar kuisioner.

Hasil maksimalnya, peneliti dapat menghubungkan resepsi pembaca ini dengan data singkat tentang usia, pekerjaan, jenis kelamin yang tertera di lembaran tersebut. Sementara pendekatan kuantitatif, baik dengan etnografi maupun wawancara mendalam, memungkinkan kita untuk melihat bagaimana resepsi pembaca tersebut dipengaruhi oleh kebiasaannya dalam membaca karya sastra, dibentuk oleh habitusnya, dan terkait erat dengan hal-hal lain di luar sastra.

Salah satu penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif ini misalnya studi Faruk (1994) tentang resepsi pembaca terhadap novel-novel klasik terbitan Balai Pustaka. Faruk menunjukkan bagaimana pembaca yang punya jangkauan wawasan tentang sastra bisa membandingkan novel-novel Balai Pustaka dengan novel lain secara kritis, sementara hal yang sama tidak ditemui pada pembaca yang menerima dan membaca novel itu sebagai bagian dari "politik sastra" di mana novel-novel Balai Pustaka ini menjadi referensi yang wajib di buku pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia.

DALAM kajian budaya, studi pembaca mulai menjadi salah satu metode yang penting terutama dalam melihat bagaimana budaya pop, yang selama ini terpinggirkan di ranah-ranah akademis, disikapi secara aktif dan selektif oleh pelakunya. Yang banyak menggunakan pendekatan ini adalah studi-studi yang berkaitan dengan media massa seperti televisi, majalah perempuan, dan musik. Belakangan di ranah studi sastra, mulai banyak yang melihat keterkaitan antara teks dalam novel pop dengan pembaca, terutama para pembaca perempuan.

Selama ini novel pop memang dilekati stigma hiburan, ringan dan memanipulasi emosi pembaca (perempuan). Novel pop—sama halnya dengan film-film drama—dianggap menjadi salah satu hal yang membentuk impian perempuan terhadap kisah cinta yang romantis dan dramatis. Maka mencari tahu bagaimana sikap pembaca terhadap "tuduhan" tersebut menjadi sesuatu yang penting.

Studi yang dilakukan oleh Janice Radway (1986) terhadap para pembaca novel *Harlequin* misalnya, lebih berpusat pada bagaimana pembaca perempuan melakukan siasat dan negosiasi terhadap makna yang dalam budaya populer. Radway menemukan bahwa novel yang baik di mata penggemarnya adalah yang menggambarkan perempuan yang pandai, mandiri, punya citarasa humor tinggi, yang kemudian ditaklukan oleh seorang pria lembut yang sama pandai dan tinggi selera humornya. Perempuan membaca roman untuk mengalami kehangatan emosional, melalui kisah cinta laki-laki dan perempuan ideal.

Bisa jadi, karena perbedaan karakteristik antara sastra (elite/kanon) dan novel-novel pop—yang selanjutnya menciptakan perbedaan pula dalam hal biografi diri-sosial pembacanya—persoalan resistensi dan negosiasi terhadap manipulasi emosi, saya kira, menjadi tidak terlalu penting dalam penelitian pembaca sastra elite. Menurut hemat saya, penelitian resepsi ini lebih baik dan produktif jika diarahkan kepada persoalan apresiasi pembaca terhadap sebuah karya dan, lebih jauh lagi, bagaimana apresiasi dan pemaknaan oleh pembaca tersebut bisa memberikan ruang bagi berlangsungnya dialog, meski tak secara langsung, antara pembaca dan pengarang. ●

Aila Swastika,
editor pada KUNCI Cultural Studies Center,
Sehari-hari bekerja sebagai Peneliti pada Pusat
Studi Kebudayaan UGM.

Sastra Indonesia Mencari Eksistensi

YOGYA (KR) - Sebagaimana negara berkembang, kehidupan sastra Indonesia masih mencari jalan eksistensi. Eksistensi tersebut diuji oleh waktu. Cepat atau lambat, karya yang baik pasti ditemukan. Juga dikagumi. Seperti halnya karya Rainer Rilke juga melintasi dari benua satu ke benua lain untuk diapresiasi.

Demikian pengamatan Dr Berthold Damshauer, kritikus sastra dari Jerman dalam diskusi puisi-puisi Rainer Rilke di Ruang Kuridjono USD, Sabtu (4/10) malam. Sebelumnya dilakukan orasi kebudayaan Atase Kebudayaan dan Pers Kedutaan Besar Jerman oleh Hendrik Barkeling, pembacaan puisi oleh Agus R Sarjono, Jamal D Rahman, Joko Pinurbo, Iman Budhi Santosa, dipandu cerpenis Joni Ariadinata. Kegiatan tersebut diselenggarakan Lembaga Kajian Kebudayaan Akar Indonesia, Bengkel Sastra Indonesia USD, Majalah Horison dan Kedutaan Besar Jerman.

Menurut Berthold, mencoba memahami eksistensi penyair selalu merujuk pada karya-karya yang dihasilkan. Rilke berkarya lewat kumpulan puisi pertamanya 'Leben und Lieder' (1894). Ia mulai dikenal saat mengembangkan tipe karya puisi dengan pengaruh kuat dari seni visual yang

disebut 'Ding Gedicht' (Sajak-Objek). Puisi bahasa lirik pendek, padat dengan metafore yang memukau.

Ia juga menerbitkan kumpulan puisi 'Neue Gedichte' (1907) sebagai salah satu karya besar puisi Jerman, serta kumpulan puisi 'Der Neuen Gedicht anderer Teil' (1008). "Kekuatan karya Rilke, bahasanya terpilih, indah dan membuai," kata dosen Pascasarjana UI. Berthold membandingkan, kalau di Indonesia, Rilke tak ubahnya seperti penyair Chairil Anwar.

Pernyataan terakhir Bertold tersebut disanggah penyair Saut Situmorang. "Jangan bandingkan Rilke dengan Chairil Anwar, apalagi judul forum ini *Bisakah Sastra Indonesia Mencari Jalan Lain Menuju Jerman?* Itu bisa melukai rasa nasionalisme, sastra Indonesia dianggap lebih rendah dibandingkan Jerman," katanya.

Sedangkan Agus R Sarjono berpandangan, karya sastra yang datang dari latar belakang berbeda, tidak bisa dibanding-bandingkan. "Karya sastra hadir dalam suasana dan tuntutan zaman berbeda," katanya. Penyair dan pengamat Jamal D Rahman justru melihat, karya Rilke banyak terpantul dalam sastra Indonesia mutakhir, pada penyair generasi 1980-an dan 1990-an. (Jay)-c

Kedaulatan Rakyat, 7 Oktober 2003



Wacana

Sastra, Seks dan Jebakan Kapitalisme

Endriani DS

Pemerhati Sastra dan Masalah Perempuan

Sastra, sebagai dunia ide, hampir sepanjang sejarahnya telah menginggirkan perempuan. Maka, terjadi serangkaian usaha pembongkaran dan perlawanan konvensi sastra yang bias lelaki oleh para penulis perempuan. Usaha pendobrakan ini pertama kali diusung oleh para kritikus sastra feminis.

Kemunculan para penulis perempuan Indonesia akhir-akhir ini pun dianggap sebagai perayaan keberhasilan gerakan feminis. Mereka jelas mengusung genre semangat pemberontakan dan kebebasan berekspresi. Kekuatan bahasa ungkap mereka dicirikan dengan keberanian menabrak tabu, khususnya dalam mengeksplorasi hal-hal yang menyangkut seksualitas. Para penulis perempuan ini berhasil menjungkirbalikkan tatanan konservatif budaya patriarkhal, dan menghadirkan nuansa 'bahasa perempuan' dalam kasanah kesusastraan kita.

Bahasa berkekuatan feminin sebagai alternatif di luar *mainstream* kesusastraan selama ini. Penulis perempuan membahasakan tema eksplorasi seksualitas dalam karyanya dan menciptakan karakter tokoh perempuan yang berbeda dari konstruksi yang dulu ada tentang sosok perempuan dalam masyarakat (patriarkhi). Mereka menyifati tokoh perempuan sebagai 'manusia perempuan' dan bukan sekadar 'konsep' bagaimana menjadi perempuan.

Sederet penulis perempuan seakan lahir secara bersamaan, di antaranya Ayu Utami, Vira Basuki, Djener Maesa Ayu, Nukila Amal, ataupun Herlinatians. Mereka muncul di tengah minimnya pengakuan terhadap kehadiran penulis perempuan. Kehadiran mereka berusaha menyuarkan pengalaman, perasaan dan pikiran perempuan, yang selama ini menjadi 'sastra bisu', di bawah dominasi sastra laki-laki. Menjadi

subyek, menyeruak hadir sebagai pelaku sastra, menembus diskriminasi, meruntuhkan teks misogini yang dibangun oleh sistem patriarkhi.

Namun, kemunculan penulis perempuan tidak serta merta bisa mengubah standar norma kesusastraan yang dirajai lelaki. Keberhasilan sastrawan perempuan ini insih menyisakan paradoks dan dilema.

Masturbasi Seni

Penulis perempuan ekspresi seninya dipandang tidak jauh dari hal cinta, keluar-ga dan seksualitas perempuan. Mereka dianggap hanya mampu bermasturbasi dan melahirkan sastra kamar. Hanya sebatas mengotak-atik keperempuannya sendiri. Seksualitas tetap menjadi titik tekan, seakan hanya itu kemampuan dan pengetahuan mereka untuk bicara.

Ekspresi menabrak tabu adalah warna tebal yang akan selalu menjanjikan kepupuleran. Seksualitas adalah komoditas utama milik perempuan yang cepat laku untuk dijual.

Ayu Utami, dalam dua bukunya, *Saman dan Larung*, mendekonstruksi bahasa 'tradisional' habis-habisan. Daya ungkapnya lugas dan cenderung vulgar. Ia bercerita tentang kehidupan sekelompok perempuan yang mengusung tatanan sendiri. Sekelompok perempuan yang menolak nilai keperawanan, asyik masyuk mencintai diri sendiri, mengemukakan orientasi seks pada sesama jenis, dan lain sebagainya. Djener Maesa Ayu pun tak jauh-jauh dari urusan seksualitas dan kelamin perempuan. Herlinatians, dalam bukunya *Garis Tepi Seorang Lesbian*, menggugat hipokritisme masyarakat yang menolak keberadaan realitas homoseksual.

Sikap perlawanan mereka yang cenderung berseberangan dengan nilai masyarakat umum menjadikan karya mereka mudah terkenal. Tapi, benarkah sikap oposisi itu satu-satunya penunjang keberhasilan mereka menciptakan karya penting? Kenapa tulisan itu tidak dilihat berhenti pada kapasitasnya sebagai tulisan jelek atau tulisan bagus? Kenapa apresiasi

sastra itu meski dikaitkan karya itu sebagai karya laki-laki, atau karya perempuan?

Seakan-akan, penulis lelaki lebih gampang diakui sebagai sastrawan mumpuni. Dinilai tanpa dilirik fisikalnya, karena kapasitas intelektualnya tidak pernah diragukan. Dan, tema penulisan laki-laki selalu dipandang sebagai persoalan besar, dan bahasa ungkapnya selalu benar dan sesuai standar. Tidak seperti perempuan yang hanya bisa membangun sastra 'kamar', yang kualitas intelektualnya masih dikalahkan seksualitasnya. Sekali lagi separatisme dan diskriminasi penulis laki-laki dan penulis perempuan dimunculkan untuk menilai kualitas sebuah karya sastra.

Jika mereka menjadi terkenal itupun tak bisa dipungkiri karena mereka berusaha menuliskan kehidupan dan persoalan perempuan. Terlampau naif kalau menilai beroposisi dengan nilai umum sebagai jalur instan meraih popularitas bagi para penulis perempuan. Selain persoalan perempuan sebagai satu realitas, tembok patriarkhal masih begitu tebal untuk mampu ditembus.

Sastra Pasar

Tapi bukan berarti karya perempuan selama ini boleh kebal kritik. Kritik yang proporsional tetap diperlukan. Itu sebagai wujud penerimaan, sekaligus untuk usaha membangun sastra perempuan secara mantap, setelah sekian lama terpuruk dan terjajah oleh konvensi patriarkhi.

Mesti diakui, sastra perempuan dalam upaya untuk merombak tatanan tidak lepas sama sekali dari berbagai kepentingan yang mengancam. Saat ini, kepentingan kapitalis begitu kentara ada di belakang para penulis perempuan. Logika pasar dan paradigma keuntungan mencoba menjadikan daya tarik fisik (sensualitas) penulis perempuan untuk memasarkan karya mereka.

Seksualitas penulis, suatu yang tak berkaitan langsung dengan kreativitas penciptaan, dihadirkan melebihi nilai karya penulis perempuan, *sex to sell*. Daya pikat seksual ini dipandang lebih menguntungkan secara komersil. Para penerbit berlomba-lomba menerbitkan karya penulis perempuan untuk meramaikan pasar, dan memenuhi kehausan masyarakat akan karya alternatif di luar *mainstream* (karya lelaki).

Di sini, kesadaran kritis penulis perempuan diperlukan, agar sekali lagi tidak terjebak pada penindasan bentuk baru. Agar perempuan penulis tidak terjebak menjadi *marionnette* (boneka yang dijalankan dengan tali) di tangan kapitalis. Sifat kapitalisme yang eksploitatif merupakan bentuk lain 'patriarkhi' dengan ciri akumulasi materialismenya.

Komersialisme penulis perempuan bisa

menghambat proses kreatif penulis perempuan. Atau lebih celaka lagi, jika penulis perempuan juga menikmati budaya dan logika kapitalis. Mereka membuktikan ini dalam ekspresi seni yang tak jauh dari nuansa seksualitas keperempuanan atau eksploitasi *dangerous area* dalam karya-karyanya.

Jika demikian, penulis perempuan akan terjebak melakukan masturbasi seni. Karyanya takkan mampu bicara banyak baik tentang persoalan perempuan sesungguhnya, atau masalah masyarakat pada umumnya. Mereka hanya mampu membaca dirinya sendiri. Itupun terbatas pada persoalan seksualitasnya saja.

Itu juga menandakan perempuan belum bisa lepas dari sistem patriarkhal yang menyelimutinya. Bila demikian, sejarah berkata benar bahwa tak ada penulis perempuan yang pantas dikenang sebagai sastrawan besar. Kekayaan ekspresi seni perempuan masih kalah dibanding penulis laki-laki. Penulis perempuan tak mampu mengakomodasi permasalahan yang membuat perempuan tertindas dalam sastra, kecuali hanya sebatas seksualitas yang menjelma menjadi teks sensual. Teks yang justru menyingkirkan kapasitas intelektual perempuan, dan menjebak penulisnya menjadi penggagas karya picisan.

Penulis perempuan harus memperluas cakrawala pandangnya. Membuka matanya untuk melahirkan karya besar (*magnum opus*) yang mengusung nilai universal. Menjadikan sastra perempuan sebagai dokumen kemanusiaan, yang menghadirkan persoalan manusia secara universal. Termasuk membawa persoalan penindasan perempuan bukan sekadar sebagai masalah perempuan *an sich* tapi merupakan masalah kemanusiaan seluruhnya.

Kritik Medy Loekito

Di tengah miskinnya tradisi kritik sastra, apalagi kritik sastra perempuan, tulisan Medy Loekito berjudul *Seksualitas Fiksi Penulis Perempuan* di harian ini (14/9/2003) sangat menarik. Medy berusaha menjabarkan bahwa dalam karya sastra, antara pandangan dunia pengarang (*world view*) dan konvensi sosial (masyarakat) harusnya bersifat dialektik.

Ekspresi pengarang, menurut Medy, seharusnya didasarkan pada konvensi yang juga valid bagi penerimanya. Hal itu berdasarkan keinginan mulla untuk mendudukkan posisi sastra dan sejati penulis perempuan kembali pada wilayahnya. Meminta penulis perempuan agar menulis dengan sewajarnya. Membuat karya mereka lebih membumi.

Ekspresi seni keperempuanan yang vulgar memang perlu ditinjau lagi. Agar upaya pembebasan perempuan dari

ketertindasan melalui media sastra tidak sekedar berhenti sebagai eforia. Apalagi sampai melahirkan penindasan baru bagi perempuan sendiri.

Tetapi epilog tulisan itu yang mengembalikan ekspresi pengarang ke konvensi juga perlu diwaspadai. Kembali ke konvensi tanpa sistem yang diperbaharui ibarat kembali membiarkan sastra perempuan mati untuk kesekian kali. Karena kesepakatan nilai masyarakat yang patriarkhal tak akan memberi ruang perempuan untuk mengekspresikan diri.

Upaya membumikan sastra perempuan jangan sampai mereduksi apalagi mengebiri nilai strategisnya sebagai media melawan dominasi dan diskriminasi. Karena, sastra perempuan pun hadir tidak dengan sendirinya. Ia mengejawantah (*wordlines*) dari proses dialektik antara realitas keterpinggiran perempuan dengan konvensi yang meminggirkannya selama ini. ■

Republika, 12 Oktober 2003



Wacana

Mengkritisi Sastra Seks dan Kekerasan

Isbedy Stiawan ZS

Penyair dan Cerpenis Lampung

Tiga buku kumpulan cerpen sekaligus dirilis oleh Creative Writing Institute (CWI) Jakarta: *Keluarga Gila* karya Hudan Hidayat (direktur CWI), *Membaca Perempuan* karya Maya Wulan, dan *Lantaiku Penuh Darah* yang menghimpun karya Poniran Kalasnikov, Pangeran Gunadi, Sarno Sensiby, dan Muslim Adi Pamungkas. Setelah diluncurkan di UIN Syarif Hidayatullah Ciputat, kemudian 'diadili' di UI Depok, dan didiskusikan di beberapa kota.

Dalam cerpen-cerpennya, Hudan melakukan 'sensasi'. Seiring dengan keberanian para cerpenis mutakhir yang melucuti tubuh perempuan, Hudan bersensasi memasukkan kata-kata yang dulu dianggap tabu ke dalam cerpen-cerpennya. Namun, bukannya tak ada masalah ketika 'sensasi' itu disosialisasikan. Ketika diluncurkan di UIN, misalnya, *Keluarga Gila* sempat mendapat 'hujatan', setidaknya mendengar dengan raut keanehan.

Kritikus sastra Maman S Mahayana menengahnya. Dia tak sepakat kata-kata tabu dalam karya sastra dianggap membahayakan. Masyarakat, kata Maman, umumnya fanatik terhadap ajaran-ajaran ketimuran, sehingga belum bisa menerima kata-kata seperti itu. Hudan, dalam cerpen-cerpennya telah melakukan desakralisasi kata. Sehingga kata-kata yang dipandang jorok, justru dieksploitasi dan disampaikan dengan cara santai.

Persoalannya, benarkah dalam cerpen-cerpennya Hudan telah melakukan lompatan dalam menangkap persoalan kekerasan dan seks sebagai sesuatu yang meniscaya di dalam karyanya? Ataukah ia sekadar mengeksploitasinya agar 'yang

penting tampil lain dan beda' demi merebut popularitas? Dalam cerpen-cerpennya, Hudan seperti sengaja menulis 'kelentit' atau 'ngentot' (maaf!), padahal ada padanan kata untuk makna yang sama. Apakah karena Hudan ingin mengejar sensasi untuk mendapatkan efek 'imajinasi liar'?

Menurut saya, imajinasi liar bukan pada pemuatan kata-kata jorok atau tabu seperti itu. Melainkan perambahan imajinasi yang mencapai suatu wilayah yang boleh jadi sebelumnya tak pernah dimasuki. Kalau hanya menyebut kata-kata jorok dan kekerasan lantas diartikan sebagai 'imajinasi liar', tentu Motinggo Busye dan Ali Sahab sudah lama melakukannya. Juga Ayu Utami dalam *Saman*, atau Djenaar Maesa Ayu dalam buku *Mereka Bilang Saya Monyet*.

Ada tujuh cerpen Hudan dalam *Keluarga Gila*. Semuanya mengusung tema kekerasan dan seksualitas. Cerpen *Keluarga Gila* (pernah dimuat *Media Indonesia*), misalnya bercerita tentang keluarga yang sakit (gila). Ayah, ibu, dan anak saling curiga dan punya niat membunuh satu sama lain. Ayah berkeinginan membunuh ibu, ibu juga sebaliknya. Anak pun hendak membunuh kedua orang tuanya, dan orang tuanya punya keinginan menghabisi anaknya.

Antara realita dan mimpi seperti tanpa batas. Bahkan sampai akhir cerita: apakah benar ayah mati oleh kejatuhan lampu dan apakah anak tewas oleh pistol ayah. Sementara ibu mati oleh sepotong beling di kemaluannya. Bukan dibunuh? Cerpen *Keluarga Gila* ini mengingatkan saya pada cerpen *Sukri Membawa Pisau Belati* Hamsad Rangkuti, sama-sama mencampuradukkan angan dan realita.

Artinya, sama-sama mengulur-ulur suasana pembunuhan, sehingga pembaca terus masuk ke dalam bagian itu, mengikuti karakter tokoh-tokoh yang penuh

dendam. Tetapi, pengarang selalu segera mengganti suasana menjadi lain. Tepatnya, pembunuhan tak segera terjadi. Dan, baru pada *ending*, pembunuhan berlangsung. Suasana mendebarakan itulah yang ingin ditawarkan Hudan dan bukan suasana kekerasan sesungguhnya.

Berbeda ketika Aria Kusumadewa menghadirkan suasana kekerasan dan seks dalam film terbarunya, *Novel Tanpa Huruf R*. Sejak awal film yang dimainkan Lola Amaria dan Agastya itu penuh kekerasan dan seksualitas. Bahkan menjijikkan. Adegan lesbi di sebuah kamar hingga keduanya telanjang. Juga Talang ketika mengencani pelacurnya. Atau Drum yang benar-benar telanjang di sisi seorang pelacur (Yati Surachman). Tapi, Aria sangat hati-hati. Sut selalu dilakukan dari jauh. Ia bisa menghindari kesan amoral.

Dibandingkan film itu, seks dan kekerasan dalam cerpen-cerpen Hudan belumlah mendebarakan, bahkan menjijikkan. Saya hanya mengambil cerpen *Keluarga Gila* untuk mewakili cerpennya dalam kumpulan ini. Karena, cukup membaca satu cerpen Hudan, karena kemiripan — kalau tak boleh dikatakan sama — tema. Tema-tema yang digarapnya pun bukan tema besar. Hanya Hudan punya 'kepandaian' meneror dengan bahasa-bahasa yang keras, darah, dan kata-kata tabu.



Sebenarnya, cerpen-cerpen Hudan dalam kumpulan *Orang Sakit* lebih menarik. Kualitas sastranya masih bisa kita dapat. Pesan dan kesan dalam karyanya, terutama pada cerpen *Ayamnya* benar-benar mendalam.

Karena itu, 'merayakan sastra darah dan seks' dalam karya-karya Hudan tidak akan pernah menjadikannya 'sastra besar' kalau tema-tema yang digarap tidak besar. Sejatinya, Hudan hanya menulis tema-tema kecil: soal seks dan pembunuhan. Padahal tema-tema ini jauh-jauh hari sudah dieksplorasi Sade atau dibahas oleh Freud.

Begitu pula Maya Wulan (nama lain dari SN Mayasari H.), juga menggarap tema yang sama: seks dan kekerasan. Menariknya dalam *Membaca Perempuan* ini justru pada kata pengantar cerpenis-nya. Karena, pengantar itu 'menjebak' Maman S Mahayana untuk menganggap ada 'perselingkuhan kreatif' antara Maya dan Hudan, sehingga cerpen-cerpen Maya sangat terpengaruh Hudan, sehingga melahirkan gaya yang relatif paralel.

Pada pengantarnya, Maya Wulan menulis, "kami mencintai langit yang

sama dan tersambar petir kembar — Tubuh kami adalah sebuah pena. Lalu kami bergerak, berputar, menari, membentuk barisan kata. Kami terus bergerak seperti gasing yang dilepaskan pemainnya. Kami mabuk berdua. Dalam kejarian imajinasi, kegilaan, dan kesakitan,"

Cinta pada langit yang sama itu, membuat cerpen-cerpen Maya selalu dibayangkan bayangi Hudan. Ini menjadikan Maya seperti tak bisa menghindari dari 'kutukan' pembaca itu.

Tetapi, sebenarnya cerpen-cerpen Maya tidak terlalu terpengaruh oleh cerpen Hudan. Meski temanya seks dan kekerasan, ia mengeksploitasinya dengan bahasa yang halus dan mengalir. Karena halus dan mengalir itu, kadang cerpen Maya mencitrakan perenungan-perenungan. Jika Hudan 'mencomot' bahasa verbal, yang keras dan kadang jorok, maka Maya menggunakan bahasa citraan.

Ambil contoh cerpen *Permainan Tidur* (hal. 76). Untuk menggambarkan persetubuhan, Maya mengambil istilah 'permainan burung'. Istilah ini tidak dipakai oleh Hudan. Kosakata Hudan lebih telanjang. Misalnya kalau Hudan menulis 'kelentit' maka Maya menggunakan 'ruang sunyiku'. Persetubuhan ditulis Hudan dengan telanjang, sedang Maya dengan istilah 'bercinta' dan 'permainan burung'.

Dari aspek diksi, sangatlah terburu-buru jika Maya terpengaruh oleh Hudan. Belum lagi kalau kita mencermati bahwa model bercerita Maya yang mengalir dan lembut, sementara Hudan keras, cepat, dan telanjang. Sebuah perbedaan yang mendasar, sesungguhnya. Saya setuju ketika Maya mengistilahkan 'berwajah serupa tapi tak sama. Serupa karena sama-sama mengangkat tema seks dan kekerasan, tapi tak sama dalam gaya pengisahan tema-tema itu.

Pada cerpen *Membaca Perempuan*, Maya menggunakan gaya monolog. Dialog antara diri dan hati, menjadi asyik dinikmati. Bagaimana tokoh aku 'menguliti' diri sendiri, perempuanku. Terkadang, terkesan seorang perempuan sedang berdialog dengan teman perempuan lainnya, yang acap pula seperti tengah bercinta.

"Aku menelanjangi perempuanku dalam potretnya. Kupandang seluruh lekuk misteri yang tersembunyi di dirinya. Sebuah misteri serupa buku tebal yang tak menyuguhkan penyelesaian di akhir ceritanya. Yang membuat setiap pembaca bertanya-tanya tanpa pernah menemukan jawaban pasti. Seperti rahasia yang sengaja tak ingin diungkap. Dan aku adalah salah satu dari pembaca itu. Sekaligus yang juga sempat memilikinya." (hlm 1)

Pencerita dengan sesukanya masuk dan keluar sebagai objek dan subjek. Sebagai diri sendiri, kadang pada suasana yang cepat berubah dan perubahan tokoh sebagai perempuan dalam potret yang dipandangnya, atau sebagai pencerita kedua. Pembaca baru tersadar pada penutup, bahwa perempuan yang menjadi tokoh aku sesungguhnya sudah mengembuskan napas.

Dalam dunia cerpen, Maya yang masih studi di Fakultas Hukum UGM, memang masih baru. Tetapi, meminjam pendapat Maman, dia (telah) memperlihatkan potensi seorang cerpenis pemula yang sungguh dahsyat. Maka, bukan tak punya peluang dikemudian hari menjadi kenyataan. Apalagi, jika cerpenis ini berani membuat jarak tegas dari bayang-bayang Hudan. ■

Republika, 19 Oktober 2003

Sekolah Kurang Dukung Regenerasi Sastra

JAKARTA (Media): Hingga saat ini minat baca masyarakat terhadap karya sastra masih relatif rendah. Penyebabnya, pendidikan bahasa di sekolah kurang mendorong siswa untuk terbiasa dengan kegiatan mengarang.

Pernyataan tersebut disampaikan sastrawan senior Taufik Ismail dalam jumpa pers pelaksanaan Kongres Bahasa Indonesia VIII di Jakarta, kemarin. Turut hadir pada jumpa pers acara antara lain Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional Baedhowi, Kepala Pusat Bahasa Dendy Sugono, dan wartawan senior Parni Hadi. Kongres Bahasa sendiri akan diselenggarakan pada 14-17 Oktober 2003.

"Minat baca untuk sastra di Indonesia masih kurang mengembirakan. Kalau dilihat lebih jauh, sejak awal kemerdekaan hingga kini tidak ada perubahan berarti dalam jumlah oplah buku sastra yang diterbitkan dan hubungannya dengan minat masyarakat untuk membacanya," kata Taufik.

Ia mengungkapkan, pendidikan bahasa yang diberikan di sekolah tidak memberikan penekanan pada upaya mendorong tumbuhnya minat baca siswa. Lanjut Taufik, sudah seharusnya kemampuan menulis dan membaca di sekolah menjadi suatu perhatian yang serius. "Untuk upaya perbaikan, perlu adanya perbaikan kemampuan guru dalam memberikan rangsangan kepada siswa guna tumbuhnya minat menulis dan membaca."

Untuk itu, saat ini sejumlah sastrawan diberikan kepercayaan oleh Depdiknas guna memberikan semacam pelatihan kepada guru di sekolah-sekolah melalui metode tertentu. Dalam pelatihan tersebut ditekankan antara lain budaya membaca buku,

menulis, dan apresiasi sastra.

Diharapkan dengan cara ini, jelas Taufik, guru sebagai ujung tombak perubahan mampu mengungkap potensi diri tiap siswa dalam menulis dan mengapresiasi karya sastra. Dengan sendirinya murid akan menyukai kegiatan mengarang jika pengajaran dilakukan dengan cara yang tepat.

"Hingga saat ini, kegiatan yang telah berlangsung sebanyak 28 kali selama empat tahun itu telah menunjukkan hasil. "Sepanjang pengetahuan kami (sastrawan), banyak dari siswa yang menjadi senang sekali dengan kegiatan mengarang. Hal itu merupakan pertanda positif keberhasilan pelatihan tersebut."

Sementara itu, Kepala Pusat Bahasa Dendy Sugono mengatakan Pusat Bahasa terus melakukan upaya meningkatkan motivasi agar tercipta iklim berkarya sastra yang baik. Salah satu upaya itu adalah dengan membangun generasi pelapis di bawah generasi sastrawan senior Indonesia.

"Kalau tidak ada generasi pelapis itu maka dikhawatirkan terjadi kesenjangan antara angkatan sastrawan seangkatan Taufik Ismail dan generasi berikutnya. Upaya itu diwujudkan dengan serangkaian lomba penulisan guna menemukan bibit baru di dunia penulisan," kata Dendy kepada *Media*.

Dalam upaya meningkatkan minat siswa terhadap sastra, Pusat bahasa melakukan pendekatan melalui musik. "Dalam hal ini, dikenalah istilah musikalisasi puisi. Karena musik begitu digandrungi remaja, maka ketika puisi dikemas dalam bentuk puisi, secara tidak langsung mampu meningkatkan minat siswa terhadap puisi." (TM/B-3)

Minim, Bobot Pengajaran Sastra

YOGYA (KR) - Posisi pembelajaran sastra pada tataran konseptual sudah cukup baik, yakni pembelajaran sastra mengacu pada apresiasi sastra memiliki bobot seimbang dengan bahasa Indonesia. Tapi, posisi itu bergeser ketika pada tataran pelaksanaan pembelajaran di kelas. Pada akhirnya, sastra Indonesia hanya merupakan bagian minoritas, bobotnya berkisar 10-20 persen dari keseluruhan materi dalam Pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia.

Demikian diungkapkan Main Sufanti, dosen Universitas Muhammadiyah Surakarta dalam Pertemuan Ilmiah Bahasa dan Sastra Indonesia/PIBSI XXV PTN/PTS se-Indonesia di kampus Universitas Sanata Dharma, Selasa (7/10). Kegiatan hari kedua tersebut juga menghadirkan pembicara Suharsono (UGM), Ridha Mashudi Wibowo (UGM), Beni Sudiyono (Universitas Veteran Bangun Nusantara-Sukoharjo), Ambarini Asrining Sari (IKIP PGRI Semarang), Kun Zachrun Istanti (UGM), Sukristanto (Universitas Muhammadiyah Purwokerto), JM Kamdhi (SMA Santa Maria Cirebon), Farida Nugrahaini (Universitas Widya Dharma-Klaten), moderator Cahya Yusuf dan B Rahmanto.

Menurut Sufanti, minimnya bobot pengajaran sastra Indonesia menyebabkan alokasi waktu yang sedikit berakibat pada pembelajaran sastra bersifat teoritis. "Berpegang pada buku teks, berpusat pada guru dan materi sastra terpisah dengan materi bahasa. Materi sastra jarang dikaitkan dengan tema pembelajaran," ucapnya. Oleh karena itu, pada tataran pelaksanaan inilah diusulkan dilakukan reposisi pembelajaran sastra.

Dalam pemahaman Sufanti, reposisi dipandang sangat perlu dilakukan pada tataran pelaksanaan pembelajaran sastra. Sebab dalam tataran konseptual posisi pembelajaran sastra sudah cukup bagus.

Kegiatan ini dapat dilakukan untuk mereposisi pembelajaran sastra dalam proses belajar mengajar. Antara lain, sosialisasi konsep dasar pembelajaran sastra yang tertera di dalam kurikulum baik kurikulum 1994 maupun Kurikulum Berbasis Kompetensi, sosialisasi model pembelajaran apresiasi sastra, penataan kurikulum dan pekajasaan di Lembaga Pendidikan Tinggi Keguruan (LPTK) sebagai lembaga yang memproduksi calon guru. (Jay)-d

Kedaulatan Rakyat, 9 Oktober 2003

Pembelaan atas Puisi

Bambang Agung

PADA tahun 1840, delapan belas tahun setelah penyair Inggris Percy Bysshe Shelley tewas tenggelam di Teluk Spezia, Italia, esainya, *The Defence of Poetry*, diterbitkan. Sebuah esai berisi pernyataan klasik tentang fungsi puisi untuk menjawab Thomas Love Peacock yang menuduh puisi tak berguna lagi di tengah kemajuan sains. Shelley menarik garis batas nalar dan imajinasi. Ia berkata bahwa puisi bersumber dari imajinasi, fakultas kreatif manusia yang berada di atas nalar—fakultas analitis benda-benda semata. Puisi terutama memberi kesenangan, juga keteraturan pada dunia. Penyair berlaku sebagai legislator, penemu seni kehidupan sekaligus bersifat kenabian karena puisi yang baik mampu mengatasi ruang dan waktu.

KETIKA pengetahuan empiris dari pendekatan matematis-mekanis ilmu alam diutamakan, buat Shelley kehadiran puisi lebih mendesak. Tanpa nilai-nilai yang terwujud dalam puisi, pengetahuan semacam itu akan melancarkan eksploitasi terhadap sesama manusia maupun terhadap alam. Sensibilitas berlebih para penyair mengubah segala hal menjadi keindahan, meluruhkan cara berpikir fungsional.

Shelley adalah salah satu figur kunci kaum Romantik Inggris yang berada di garis depan pengkritik semangat Pencerahan (*Aufklärung*). Meski manifestasi dan pendukung gerakan Romantik sangat beragam, sekurangnya ada dua ciri mencolok: kesadaran dishamorni alam dan manusia akibat pengunggulan penggunaan nalar dan pilihan alternatifnya, yakni seni.

Pembuka jalan nalar modern, tentu saja, Descartes. Ia memutus kaitan antara pikiran dan alam/tubuh, dan menaruh pikiran sebagai satu-satunya instansi yang terandalkan. Alam menjadi obyek yang siap untuk dieksplorasi dan dieksploitasi. "Pengetahuan adalah kekuasaan," kata Francis Bacon. Setelah mengambil model ilmu alam dan matematika secara berdisiplin dan sistematis, nalar manusia menyibak rahasia alam. Sayangnya, jalan sains adalah jalan "membunuh untuk membedah" (William Wordsworth) sehingga menyebabkan, dalam istilah environmentalis feminis Carolyn Merchant, kematian

alam.

Alam dalam diri manusia mengalami nasib yang tak kalah buruk. Tubuh, emosi, kehendak, imajinasi atau nafsu kalau tidak sama sekali diabaikan, hadir di bawah pengawasan dan kendali nalar. Akibatnya manusia kehilangan keserasian dan kesatuan organisasinya dengan alam, dengan sesama manusia, dan dengan dirinya sendiri. Inilah awal alienasi dan kontradiksi manusia modern: makin besar peran yang dia berikan pada nalar, makin canggih peradaban yang dia bangun, makin jauh dia terbuang dari firaud psikologisnya.

Di Jerman pada akhir abad ke-18, kaum Romantik mulai merumuskan krisis modernitas ini dan mengajukan seni sebagai jalan keluar, bukan filsafat, sains, atau agama. Seni adalah pintu keluar perpecahan kreatif dan intelektual manusia modern: Model seni tertinggi dalam pandangan mereka adalah puisi yang lantas diterima sebagai sumber utama kebenaran mulia. Schiller, Schlegel, termasuk tiga sekawan Schelling, penyair Hölderlin dan Hegel, adalah beberapa orang yang mengambil laku estetis ini. Kelak Hegel mengambil jalannya sendiri, berpisah dengan teman-teman kuliahnya di Tübingen dan mendudukkan filsafat, sebagai kegiatan analitis dan konseptual, di atas seni, agama, cinta, dan segala hasil dari intuisi dan pengalaman langsung.

Schelling menggeser filsafat dan memomorsatukan seni. Menurut dia, alam dan karya seni sama-sama bersumber

pada kegiatan kreatif yang pada hakikatnya estetis. Bedanya, pada alam kegiatan kreatif bersifat tidak sadar, sementara pada seni sadar. Schelling malah tegas berkata: pada saat puncak kesempurnaannya, "filsafat dan ilmu pengetahuan, seperti begitu banyak sungai, akan mengalir pulang ke dalam lautan puisi."

Martin Heidegger juga demikian. Meski filsafatnya lebih muram dan ambisinya lebih besar untuk membongkar seluruh tradisi filsafat. Hal ini teraba jelas pada pandangannya tentang teknologi. Bila sains memperlakukan alam sebagai obyek, teknologi lebih lanjut memperlakukan alam sebagai sumber daya semata, pemuas kebutuhan manusia. Lebih parah lagi, dunia serba mesin mengubah manusia menjadi persediaan bagi manusia lain. Hubungan manusia dengan alam dan hubungan sesama manusia menjadi perkara teknis, digerakkan semangat manipulatif. Teknologi menandai puncak krisis spiritual manusia modern: keterasingan.

Heidegger menuding cara berpikir kalkulatif yang mewarnai sekejap pemikiran filsafat sejak Plato sebagai sumber permasalahan. Cirinya adalah pemisahan subyek dan obyek, intelek dan realitas, pikiran dan tubuh. Dengan begitu, kebenaran yang dihidupkan filsafat adalah kesatuan antara subyek dan obyek, korespondensi antara nalar dan kenyataan. Heidegger menolak kebenaran demikian dan menawarkan kebenaran (*aletheia*) dalam artian ketersingkapan sang Ada yang bisa didengar manusia (*Dasein*) sebagai gembala Ada. Dan kebenaran semacam itu hanya terlantun dalam puisi, bahasa primordial para penyair sebelum nalar Platonis jadi dogma.

Gagasan ini ditawarkan Donny Gahral Adian (*Tanah Tak Berjejak Para Penyair*, lembar "Bentara", *Kompas*, Jumat, 2 Mei 2003). Pada ruang sama edisi berikutnya, Husain Heriyanto menanggapi dengan *Imajinasi Tak Berjejak Ancam Padam(a)kan Nalar* kemudian dilanjutkan Bagus Takwin berjudul *Nalar Lincak dan Supel: Menolak Nalar Murni, Mencegah Hidup Tanpa Nalar*, edisi 4 Juli 2003 dan Adi Armin, *Membangun Nalar yang Tak Retak* pada 5 September 2003.

Tulisan ini merupakan tanggapan selanjutnya, tetapi dari perspektif berbeda, yakni *perspektif sejarah*. Kata sejarah di sini digarisbawahi karena asumsinya, semua hasil pikiran manusia terjadi dan terpengaruhi oleh segala aspek yang bersifat historis. Tilikan sadar-sejarah membantu menepis sikap pemutlakan dari "jalan puisi" Donny dan "jalan nalar" Husain, Adi, dan Bagus.

Kesadaran yang tidak bahagia

Meski berbeda militansinya, posisi

Husain dan Adi maupun Bagus adalah narasi dari sudut pandang nalar. Ketiganya adalah argumentasi berbasis nalar, pembelaan atas pemikiran Barat dalam bentuk filsafat, teologi, dan sains.

Sepanjang sejarahnya, sejak zaman pencerahan sampai kini, nalar diagungkan sebagai satu-satunya instrumen sah untuk menilai segala aspek kehidupan manusia. Berbagai gelombang kritik muncul terhadap nalar.

Gelombang pertama menghantam sifat eksklusif nalar yang abstrak, selektif, dan memilah-milah, meniscayakan penyingkiran yang lain seperti tubuh, alam, rasa, dan naluri. Tragisnya, perempuan, karena tugas reproduksinya, dianggap belum lepas dari siklus alam sehingga disingkirkan dari wilayah diskursif. Sejarah nalar adalah sejarah penegasian segi non-nalar, termasuk perempuan. Perempuan tidak boleh belajar filsafat, diingkari hak politiknya, dan diremehkan kemampuannya di bidang sains. Perempuan baru diterima sebagai anggota perkumpulan ilmiah Royal Society di London (didirikan tahun 1660-an) pada tahun 1945 dan Academie des Sciences di Paris (didirikan tahun 1666) pada tahun 1979.

Gelombang kritik lain mengarah pada sifat dominatif nalar, baik terhadap benda-benda maupun terhadap manusia lain. Nalar digunakan untuk pengetahuan teoretis, lalu berubah untuk pengetahuan praktis dan, akhirnya, penguasaan. Kaum Romantik dan Heidegger termasuk dalam gelombang ini. Seperti juga mazhab Frankfurt dengan kritik mereka atas rasio instrumental.

Gelombang kritik lain muncul mengugat klaim universalitas nalar yang menundukkan segala macam pengetahuan dan keyakinan pada ukuran tunggal: nalar. Para pengkritik, sebaliknya, berusaha merayakan perbedaan di atas kesamaan, yang lokal di atas yang "universal", yang subyektif di atas yang "obyektif". Bersenjata pertanyaan semacam "Kebenaran siapa?, Rasionalitas siapa?, Pengetahuan siapa?, Moralitas siapa?," mereka melucuti klaim ideologis nalar dalam terapan di filsafat, sains, ataupun politik.

Terpaan paling keras muncul di paruh pertama abad ke-20 berupa refleksi terhadap bahasa. Mungkin ada kencana buta kosmis yang lolos dari amatan para ahli sejarah intelektual hingga Ferdinand de Saussure di Perancis, Friedrich Nietzsche di Jerman, dan Ludwig Wittgenstein di Inggris melansir pandangan yang meruntuhkan dasar anggapan tentang bahasa yang dianut sejauh ini. Mereka bersepakat bahwa bahasa adalah problem, bukannya solusi epistemologi. Bahasa bukanlah sarana netral untuk menampilkan kembali rea-

”” Dalam tradisi marxis, seni jadi bahan per-
gumulan yang lebih menukik dan mendalam, se-
perti perdebatan realisme dan modernisme dalam
dunia kapitalisme, komodifikasi budaya dan de-
mokratisasi seni via teknologi, mekanisme pro-
duksi seni. Sementara Donny, mengikuti
Heidegger, hanya berhenti pada sikap nostalgis-
nya yang naif dan tidak realistis.””

litas, tetapi batas akhir kesanggupan
manusia untuk mengerti realitas.

Dampaknya luar biasa. Segala penge-
tahuan yang mematok pengertian kebe-
naran sebagai kesesuaian antara pikiran
dan kenyataan dengan mengandalkan
bahasa sebagai mediasi kehilangan dasar
pijakan. Bahasa bukan jalan tol bagi na-
lar untuk sampai ke makna realitas,
tetapi jalan berbelit-berliku yang di ma-
na, kapan berakhir, dan apa yang ada di
ujungnya, tak seorang tahu.

Narasi filosofis penuh berisi upaya
berbagai pemikir untuk menjawab ge-
lombang-gelombang kritik ini. Ada yang
berhasil di satu segi, tapi gagal di segi
lain, ada yang rapi merumuskan jawab-
an di satu lini dan kedodoran di lini
lainnya. *The Ideology of the Aesthe-
tic*-nya Terry Eagleton (1990) menutur-
kan rangkaian kisah pergulatan ini. Me-
nurut dia, estetika muncul di pertengah-
an abad ke-18 sebagai upaya refleksi
konseptual-filosofis terhadap hal-hal
yang berbau persepsi, indrawi, badaniah.
Para pemikir, sejak Kant, memanfaatkan
nalar untuk menjelajahi *terra incognita*
ini untuk memberi ruang dan pijakan
bumi bagi absolutisme politik libera-
lisme yang mulai marak. Pendeknya, bu-
kan tanpa pamrih nalar menggauli ran-
nah rasa dan imajinasi karena estetika
dari *sono*-nya memang bermuatan ideo-
logi.

Lalu, apa yang masih tersisa di filsafat
dan apa yang layak dikerjakan para fil-
suf zaman sekarang?

Saran Richard Rorty adalah kubur sa-
ja impian lama filsafat sejak Plato, Des-
cartes, sampai Kant, karena filsafat ber-
basis epistemologi terbukti gagal dan su-
dah tamat riwayatnya. Para filsuf se-
baiknya beralih profesi menjadi kritikus
sastra. Dengan dekonstruksi, Derrida
mengajak bermain-main dengan setiap
teks tanpa ambisi untuk mencari kebe-
naran asali atau pendasaran universal.
Sementara Habermas mungkin pemikir
kontemporer yang paling tekun dan setia
untuk meneruskan "proyek modernitas"

dengan merintis teori aksi komunikatif-
nya. Suatu jalan keluar yang bukan tan-
pa masalah.

Alhasil, iman teguh pada keunggulan
nalar ala era pencerahan sudah terem-
pas. Secara bertahap pemakaian mau-
pun wilayah jangkauan filsafat semakin
sempit sebab diambil-alih bidang-bi-
dang lain maupun karena terbitnya ke-
rendahan hati di lingkungan filsafat sen-
diri agar, seturut saran Wittgenstein,
membiarkan hal-hal yang tidak bisa di-
jelaskan menyelinap dalam keheningan.

Dengan tinjauan sejarah demikian,
baik posisi Husain dan Adi menjadi
mengherankan karena mereka alpa
mempertimbangkan kritik-kritik di atas.
Malah dengan gagah berani, keduanya
mengajukan konsep nalar yang tak ber-
tubuh, tak bersejarah (Bagus Takwin
menyebutnya "nalar murni", Adi "nalar
asli" dengan model *cogito* Cartesian).
Dengan demikian, mereka "mundur" ke
zaman saat nalar masih dipercaya se-
bagai instansi yang unggul untuk me-
nyelesaikan segala soal. Dan bolong ter-
besar dari posisi ini adalah memperla-
kukan nalar sebagai sesuatu yang bebas
nilai. Berkecimpung di bidang ilmu yang
terkenal paling bangga dengan semangat
kritisnya, baik Husain maupun Adi me-
lalaikan inti dari semangat disiplin il-
munya, yakni semangat kritik-diri.

Pernyataan Husain bahwa kelebihan
nalar terletak pada kemampuan mem-
bedakan subyek dan obyek jelas ke-
salahpahaman fatal. Perbedaan sub-
yek-obyek adalah salah satu problem be-
sar, bukan kelebihan, filsafat, khususnya
epistemologi. Sejarah filsafat dipenuhi
upaya para pemikir besar untuk men-
jembatani nalar dan kenyataan, menya-
tukan subyek dan obyek. Klaim "revo-
lusi kopernikan" Kant yang mengga-
bungkan rasionalisme dan empirisme,
pendapat Hegel bahwa "yang benar ada-
lah yang menyeluruh", untuk memberi
sedikit contoh, adalah kerja keras para
pemikir besar yang berambisi membe-
reskan "cacat bawaan" pemikiran dis-

kursif.

Pendapat Bochenski bahwa di luar nalar hanya ada kegilaan, fantasi, dan omong kosong malah menambah citra ironis sekaligus kesan bahwa Husain memang tidak menangkap duduk perkara sebenarnya. Justru dalam sejarah hubungan nalar dan kegilaan, kesewenangan nalar berbau keras.

Konsep kegilaan, demikian Foucault, berubah sepanjang zaman. Pada abad pertengahan, orang gila dianggap kerusakan roh jahat. Di zaman Renaissance, kegilaan dilihat berbeda dari, namun seimbang dengan, nalar. Baru sejak zaman nalar, lebih dikenal sebagai zaman Pencerahan, orang gila disingkirkan dari tatapan masyarakat dan dikurung dalam "rumah sakit". Kegilaan kehilangan suara. Kegilaan terus dibicarakan tanpa mampu bicara sendiri. Setelah Revolusi Perancis, kegilaan mendapat predikat baru: penyakit jiwa. Orang gila dipaksa menjalani "koreksi" sesuai standar perilaku masyarakat. Kegilaan menjadi bagian proyek moral masyarakat borjuis yang mulai pasang.

Jadi, kegilaan adalah cermin atau fungsi dari rasionalitas masyarakat yang terus berubah. Pengertian kegilaan dan perlakuan terhadapnya pun diselaraskan dengan pesan "rasionalitas" masyarakat yang sedang berlaku: kadang religius, politis, atau ekonomis-instrumental. Kegilaan adalah cermin tragis nasib manusia yang mati-matian diingkari, disingkirkan dari kesadaran manusia modern.

Perintis psikologi eksistensial Rollo May (*Psychology and the Human Dilemma*, 1967) mencatat hal yang sama: keterasingan, keterpecahan kejiwaan manusia modern. Pandangan umum di abad ke-19 bahwa manusia terdiri dari "fakultas-fakultas" yang berbeda dan terpisah, yakni nalar, emosi, dan kehendak, merupakan contoh gamblangnya. Dualisme Cartesian abad ke-17 kini berganti bentuk pemisahan ketat nalar dan emosi, sedangkan kehendak berlaku sebagai pengambil keputusan. Mudah ditebak, ujungnya adalah pengingkaran emosi. Kendali rasio atas emosi berubah menjadi kebiasaan merepresi emosi.

Oleh karena inilah Sigmund Freud menjadi figur penting bagi Foucault dan May. Freud, tulis Foucault, mengembalikan bahasa ketidáknalaran hingga mereka bisa bicara untuk dirinya sendiri. Berkat Freud, demikian May, dalam upaya memahami perilaku manusia dimensi irasional, tidak sadar, dan dinamis yang direpresi kembali serius dipertimbangkan dan diperlakukan dengan hormat dan disejajarkan dengan dimensi rasional. Mengutamakan sisi rasional sambil

menafikan sisi lain hanya menimbulkan kesadaran yang tidak bahagia.

Bagus Takwin mengajukan alternatif, yakni nalar yang lincah dan supel. Nalar ini berwatak fleksibel, lentur dan menerima kemajemukan sehingga lebih siap berdialog.

Kendati rumusannya lebih lunak, posisi Bagus belum beranjak dari perspektif Husain maupun Adi. Perbedaannya hanya pada tingkat atau kadar, tetapi bukan pada esensi. Jadi, bila Husain mengunggulkan nalar sambil mencemooh segi lainnya, Bagus mempertahankan nalar dengan memperlonggar definisi sehingga lebih banyak hal tertampung di dalamnya. Jadi, pertanyaan yang diajukan Bagus kepada Husain sah juga disodorkan balik kepada Bagus. Konsep pluralitas nalarnya mengandaikan keserasian, tidak adanya konflik di antara macam-macam nalar. Namun, bagaimana bila muncul konflik? Nalar yang mana atau nalar siapa yang ditunjuk sebagai pemegang kuasa memutuskan kata akhir?

Selain itu, pengutamaan nalar untuk dialog merupakan sisa ambisi lama filsafat untuk mencari pendasaran universal. Dari pengalaman sehari-hari kita tahu bahwa nalar bukan sarana satu-satunya, mungkin bukan yang utama pula. Bahasa tubuh, musik atau malah masakan, untuk mengambil beberapa contoh, sering menjadi sarana dialog yang lebih efektif ketimbang wacana "rasional".

Estetik minus etik

Marx dan Heidegger sama-sama berpendapat bahwa manusia modern mengalami krisis luar biasa, alienasi. Sumbernya berasal dari kapitalisme (Marx) atau cara berpikir kalkulatif manusia yang mengambil wujud sempurnanya dalam teknologi (Heidegger).

Namun, mereka juga berbeda: Marx tidak merumuskan secara sistematis pandangannya tentang estetik, yang menempati kedudukan penting dalam pemikiran Heidegger, sedangkan etika tidak muncul dalam karya Heidegger meski menyita hampir seluruh perhatian Marx. Implikasi perbedaan ini terpantul jelas dalam jalan keluar yang mereka pilih.

Ti adanya pembahasan etika memang fenomena yang mencolok mata dan melahirkan bermacam tafsir, termasuk keterlibatan Heidegger dengan penguasa Nazi Jerman. Pokok ini pula yang diajukan Husain mengkritik pemikiran Heidegger. Fakta historis kaitan Heidegger dengan Nazi pasti mudah ditunjukkan, termasuk sikap bungkam yang dia pertahankan di seluruh sisa hidupnya

tentang soal ini. Meski demikian, menafikan pemikiran yang sangat kaya dengan mengacu kehidupan pribadi, bukan tanpa risiko. Jika integritas pribadi dijadikan alasan penolakan suatu pemikiran filosofis, susah diperkirakan berapa banyak pemikiran filosofis yang harus dicampakkan ke kotak sampah.

Ketimbang mencari titik-lemah pemikiran seseorang pada kehidupan pribadinya, selain *counter-productive* sekaligus berbau *argumentum ad hominem*, lebih baik kita langsung ke isi pemikiran Heidegger yang dijadikan tiang utama posisi Donny.

Kebenaran sebagai ketersingkapan (*aletheia*) sang Ada, kata Heidegger, adalah kebenaran primordial sebelum digantikan kebenaran versi para filsuf setelah Plato. Kebenaran macam ini menggema dari tanah tak berjejak dan hanya bisa didengar para penyair.

Akan tetapi, sebenarnya bagaimana cerita tentang "kebenaran para penyair" atau "tanah tak berjejak ini" dalam kaitan "hilangnya" etika dalam pemikiran Heidegger?

Pertama-tama soal kebenaran para penyair. Sebelum dipakai para filsuf, istilah *aletheia* dipakai penyair besar Homerus dalam syair-syair epiknya, *Iliad* dan *Odyssey*. *Aletheia* berarti pernyataan yang utuh dan bulat yang diutarakan seseorang kepada orang lain. Dengan demikian, *aletheia* menyangkut perkara kepercayaan hubungan antar-pribadi, jadi berada dalam wilayah etika. Dengan mengerti *aletheia* sebagai ketersingkapan sang Ada (*Being of beings*), Heidegger memin-dahkan kata ini ke wilayah metafisika dan mengikuti jejak para filsuf seperti Parminides, Plato, dan seterusnya yang justru mau dikritiknya.

Lalu, berdasarkan penafsiran "tanah tak berjejak"?

Sayangnya, tidak. Karena seperti dicatat Walter Benjamin, "rumah" Hölderlin terletak di zaman Yunani klasik pra-Sokrates, lengkap dengan mitos dewa-dewinya. Seperti penyair pujaannya itu dan umumnya pemikir Romantik, Heidegger memendam nostalgia pada zaman yang sama, zaman dengan harmoni kosmos yang belum retak. Tanah impian ini masih dipenuhi jejak para dewa-dewi. Cuma soalnya, asyik dengan ideal masa lalu, cara berpikir nostalgis selalu memiliki ciri khas: cenderung kurang peka pada kenyataan di sini dan kini.

Jalan estetis, menurut Richard Rorty, adalah model individual yang bagus, tetapi model sosial yang buruk. Inilah tumit Achilles kaum Romantik maupun para pemikir modern yang mengambil jalan estetis semisal Friedrich Nietzsche, Michel Foucault.

Posisi Heidegger lebih problematis. Heidegger berpretensi langsung mengarah kepada sang Ada dengan meneliti bahasa, sarana Ada me-wahyukan diri dan meninggalkan perhatiannya kepada manusia (*Da-sein*). Tangis bayi kelaparan, genosida atau persoalan-persoalan ke-duniawian manusia lainnya tidak relevan dalam bangunan pemikirannya. Mudah dimengerti, menghadapi problem krisis kemanusiaan modern, bila Marx mengambil jalan praksis, Heidegger menempuh jalan mistik: meminjam kepekaan sang penyair dengan khususuk menunggu juru selamat, sang Ada sendiri, menampakkan diri dan mengulurkan tangan menyelamatkan manusia.

Selain itu, puisi dalam masyarakat Yunani awal adalah puisi lisan yang diciptakan dengan ditembangkan. Penyair mengemban tugas menjaga kelangsungan tradisi, meneruskan kebenaran, ajaran, maupun aturan masyarakat. Dalam fungsi primordial ini, puisi (mitologi termasuk di dalamnya) menjadi sumber kebenaran terpenting. Giambattista Vico, misalnya, mengatakan bahwa syair-syair Homerus adalah "sejarah resmi adat Yunani kuno". Para filsuf pra-Sokrates seperti Parminides tidak membedakan arti *mythos* dan *logos*. Selain itu, puisi belum lepas dari musik, sumber utama kesenangan bermain-main dengan keindahan bunyi.

Tanpa menyertakan konteks ini, Heidegger versi Donny mengandaikan fungsi puisi kalis dari perubahan sosial dan tetap sama sepanjang masa. Seperti kaum Romantik yang bermimpi menghardirkan kembali masyarakat Yunani klasik untuk masyarakat Eropa abad ke-18 meski kosmologi mereka berbeda, Heidegger pun memimpikan peran primordial puisi untuk realitas konkret abad ke-20 yang jauh berubah.

TS Eliot maupun pemikir marxis melangkah lebih maju. Mereka berpendapat peran puisi (seni) dipengaruhi dan berdialektika dalam perubahan sosial. Dalam tradisi marxis, seni jadi bahan pergumulan yang lebih menukik dan mendalam, seperti perdebatan realisme dan modernisme dalam dunia kapitalisme, komodifikasi budaya dan demokratisasi seni via teknologi, mekanisme produksi seni. Sementara Donny, mengikuti Heidegger, hanya berhenti pada si-

kap nostalgisnya yang naif dan tidak realistis.

Pembelaan atas puisi

Baik "jalar puisi" Donny maupun "jalan nalar" Husain, selain berbeda juga sama. Keduanya mengambil sikap pemutlakan: nalar atau puisi. Sikap yang mensyaratkan biaya dan soal intern masing-masing.

Selain itu, keduanya masih memandang fakultas-fakultas manusia sebagai hal yang berbeda dan terpisah. Karena itu, keduanya tidak berusaha menampilkan manusia sebagai kesatuan padu dengan beragam kemampuan.

Pembelaan atas puisi, dengan demikian, adalah penolakan kedua sikap pemutlakan di atas. Puisi diberi kesempatan dan ruang bermain sesuai hakikat dan konteksnya di sini dan kini.

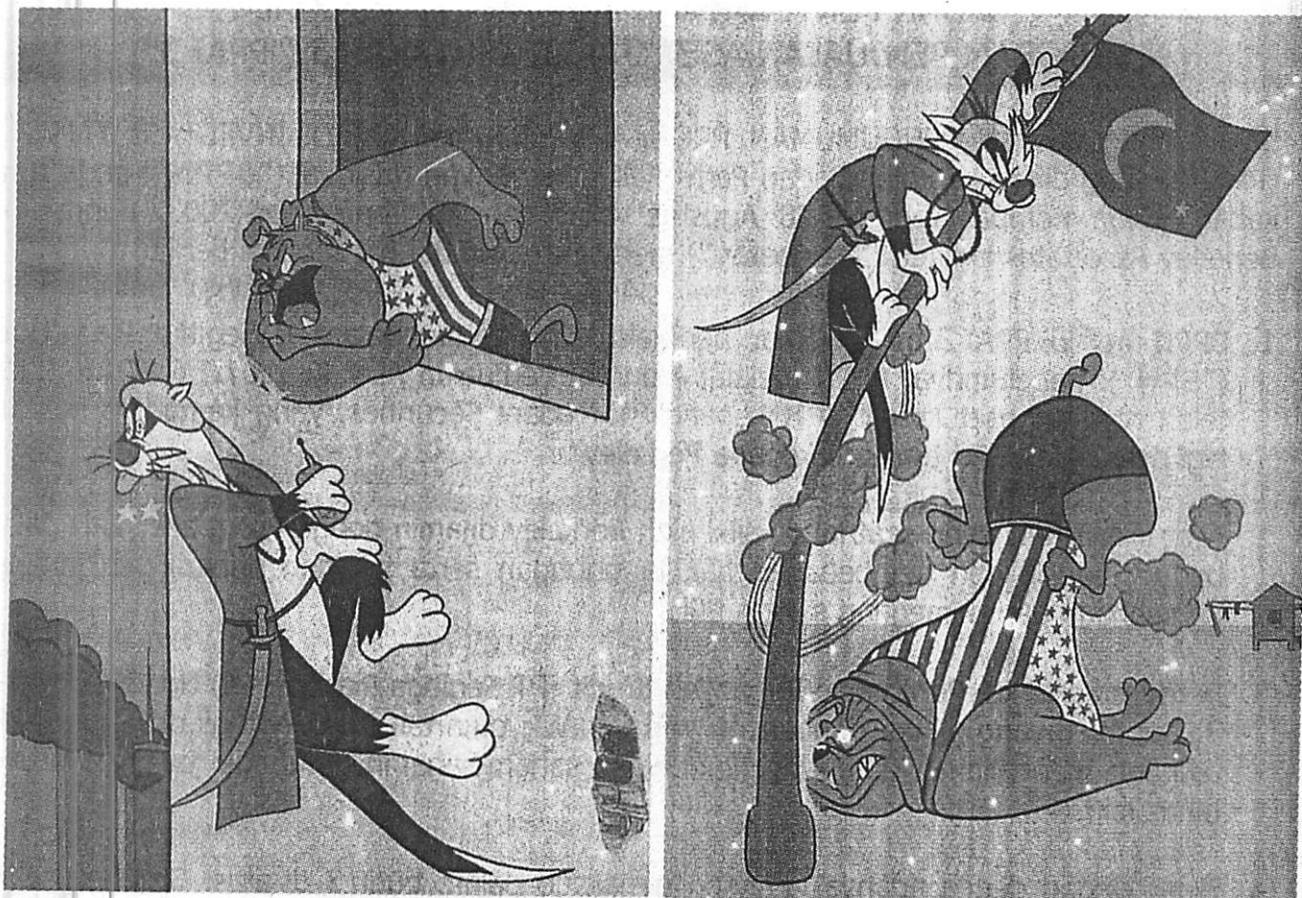
Dan penyair tidak perlu berpretensi menjadi sumber utama kebenaran, menjadi mesias yang bertitah sakral seperti saran Donny. Puisi maupun karya seni lain adalah kesatuan sintesis keteraturan intelektual dan perseptual. Antara keseriusan ide dan kesenangan berma-

in-main dengan keindahan. Memaksa puisi menggotong pesan "kebenaran" semata akan menyeret puisi ke bahaya intelektualisme dan menafikan aspek penting yang lain, kesenangan.

Di dalam lingkungan seni, pretensi ini juga berpotensi membuka kotak Pandora. Tentu kita belum lupa ujaran Leonardo da Vinci bahwa lukisan lebih filosofis, lebih dekat dengan kebenaran ketimbang puisi, atau ujaran Beethoven bahwa musik adalah wahyu ilahi yang lebih tinggi daripada filsafat maupun pengetahuan lain.

Terakhir, di zaman antikebenaran tunggal ini, klaim puisi sebagai salah satu kebenaran di antara kebenaran lain masih bolehlah ditenggang, tetapi sebagai satu-satunya kebenaran yang melampaui kebenaran lain, hanya menunjukkan bahwa kita tidak bisa belajar dari masa lalu. Dan siapa yang tidak bisa belajar dari sejarah, harus mengulanginya.

BAMBANG AGUNG
Anggota Tim Peneliti Sastra Eksil Indonesia



ISTIMEWA

Judul: Bintang Utara dan Bintang Selatan (seri kartun-edisi terbatas)

Karya: Arahmaiani, 2003

Media: Akrilik di atas kanvas, 75 x 100 cm (dua panel)

Kompas, 1 Oktober 2003

Sitor Situmorang: Spiritualisme

"TIDAK ada yang pasti dalam hidup saya," kata Sitor Situmorang. Bagi seorang pengembara seperti Sitor Situmorang; tinggal tiga tahun di Indonesia memang tidak berarti ia pasti akan kembali menetap di sini. Pengelanaannya di Benua Eropa saja berlangsung hampir 30 tahun.

Sambil bercanda ia mengatakan bahwa profesi penyair tidak pernah ada di daftar perburuhan Departemen Tenaga Kerja, mungkin karena tidak ada uangnya. "Tapi toh dari dulu saya memang ikut istri," katanya sambil menunggu sang istri, Barbara Brouwer, yang tengah mengurus kue tar di atas meja.

Rabu (8/10) malam itu, Sitor baru saja merayakan hari ulang tahunnya yang ke-79. Sempat meniup lilin ulang tahun dan memotong tumpeng, pesta ulang tahun itu juga merupakan acara peluncuran kumpulan cerita pendeknya yang diberi tajuk *Kisah Surat dari Legian*. Bagi Sitor, usia 79 rupanya tidak berarti turunya stamina. Katanya, "Sama saja seperti dulu, belum ada halangan, banyak ide yang ingin saya raup untuk ditulis."

Mengantar buku Sitor, Fuad Hasan malah mendefinisikan stamina sastra-wan angkatan 45 ini sebagai *hypergraphia*, seseorang yang terus-menerus menulis.

"Tapi ah, apa pun itu, Sitor mewakili eksistensi yang tidak pernah mapan, bukan pengembaraan yang jelas sasarannya, namun pengembaraan yang mempertemukan dengan beraneka situasi manusiawi," kata Fuad Hasan.

Sitor sendiri tidak ingin berpusing mendefinisikan dirinya. Ia selalu menulis tentang semuanya. Ia menulis tentang cinta, tentang alam, tentang manusia. Dulu, kini, dan nanti. "Spiritualisme," katanya singkat.

Spiritualisme Sitor itulah yang membuatnya masih begitu berenergi mulai dari menulis sejak puluhan tahun lalu hingga kini ketika para seniman dan sahabat berkumpul Rabu malam itu. Se-

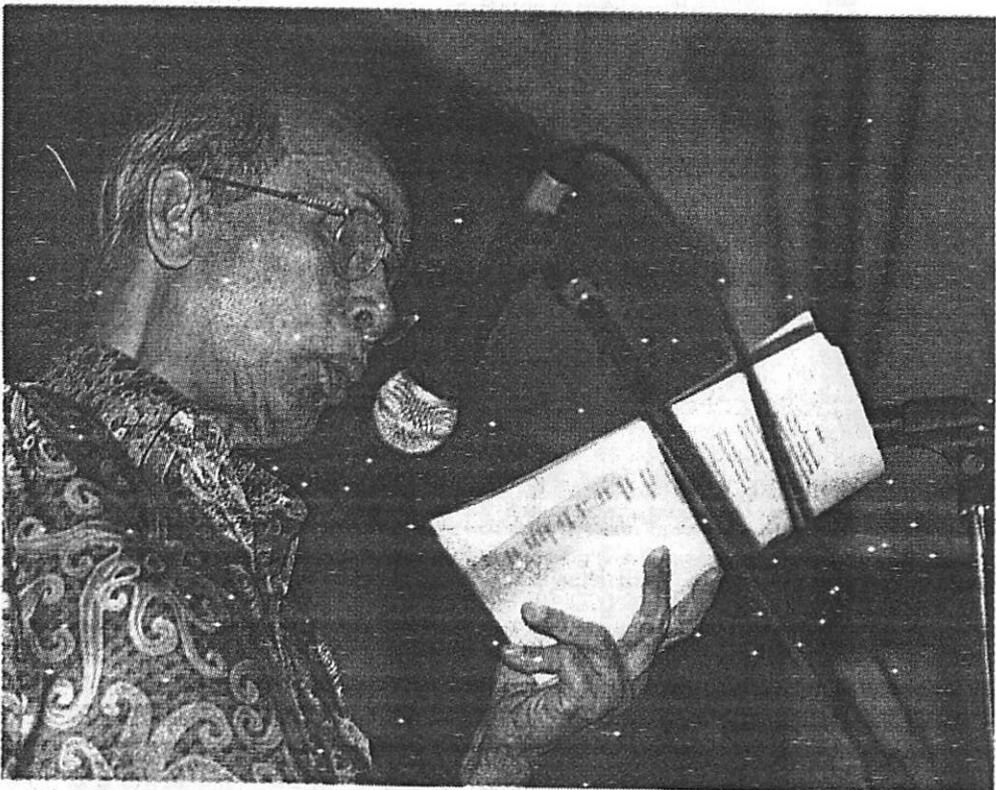
but saja di antara mereka itu, Onghokham, Fuad Hasan, Ramadhan KH, Ajip Rosidi, Djenar Maesa Ayu, Richard Oh, Julia Suryakusuma, Srihadi Soedarsono, HS Dillon, Teguh Ostenrijk, Antonia Soriente, Rieke Dyah Pitaloka, dan Sitor Srengenge.

Lahir tanggal 2 Oktober 1924 di Harianboho, kaki Gunung Pusuk Buhit, Sumatera Utara, karya-karya esai, kritik, dan sajaknya mulai dikenal saat ia menjadi wartawan *Harian Waspada*. Ia telah menerbitkan sejumlah buku sajak seperti *Surat Kertas Hijau* (1953), *Dalam Sajak* (1955), *Wajah Tak Bernama* (1955), buku drama *Jalan Mutiara* (1954), dan cerpen *Pertempuran dan Salju di Paris* (1956).

Setelah masuk penjara delapan tahun tanpa diadili pada era 1960-an, Sitor kembali dengan *Dinding Waktu* (1976), *Peta Perjalanan* (1977), cerpen *Danau Toba* (1981), *Angin Danau* (1982), dan *Toba Na Sae* (1993). Beberapa karyanya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Perancis, Belanda, Cina, Italia, Jerman, Jepang, bahkan Rusia.

Acara ulang tahun itu juga dirayakan dengan pembacaan sajak karyanya dalam beberapa bahasa, Jerman, Belanda, Inggris, Italia, dan Perancis. Dengan latar belakang beberapa foto, termasuk saat Sitor muda menjemur tulang-belulang nenek moyangnya dan dipayungi daun-daun sirih yang digantung dengan tali merah, Sitor membuka acara pembacaan sajak dengan membaca sepenggal sajaknya, *Dialog Senja*.

Hanya tersenyum saat dicandai Ajip Rosidi yang bertanya di mana gerangan Silvana Makari inspirasi dari sajak *Lagu Gadis Itali* Sitor, Sitor Situmorang sempat mengucap sebuah janji. "Sepanjang tahun ini saya akan latihan supaya di ulang tahun depan bisa menyanyi buat kalian," kata sastrawan yang masih menumpahkan ide-idenya ini. (EDN)



KOMPAS/LASTI KURNIA

Kompas, 12 Oktober 2003

Kado Ulang Tahun

— Dalam suara yang tetap lantang, penyair Sitor Situmorang membacakan puisi-puisinya di ulang tahunnya ke-79 di Jakarta, Rabu (8/10). Dari rekan dan para sahabatnya malam itu, Sitor juga mendapat kado berupa pembacaan puisinya dalam berbagai bahasa.

GUBUG 13 LINTANG

Komunitas Sastra Anak Muda

MAKIN banyak komunitas anak muda bermunculan. Salah satunya, Gubug 13 Lintang (G13L). Komunitas yang bermarkas di Nitiprayan Yogya ini merupakan wadah bagi anak muda yang berminat di bidang sastra. Didirikan Juli 2003 oleh 13 remaja peminat sastra.

Latar belakang didirikannya komunitas ini, menurut wakil ketua G13L, sebagai ajang pembelajaran dan apresiasi sastra. Awalnya, para pendiri G13L sering ikut lomba baca puisi. "Dari situlah, kita kenalan dan kemudian sepakat bikin komunitas. Tujuannya, agar kita bisa intens mengembangkan kemampuan di bidang sastra," tutur Angga.

Tiap Jumat sore, anggota berkumpul bersama. Belajar membaca puisi atau latihan drama. Kadang mereka juga melatih teater anak-anak di kampung sekitar. Di mata Angga, adanya wadah tersebut sangat bermanfaat bagi dirinya dan teman lain. "Kita tak berpikiran muluk-muluk. Yang penting bisa berkumpul dan belajar bersama, itu sudah bagus. Soal hasil, itu belakangan, tandasnya.

Selain berlatih, G13L punya kegiatan rutin tiap 2 Minggu sekali. Yaitu ngamen puisi di Boulevard UGM. Menurut Angga, hal itu dijalani dalam rangka melatih mental sekaligus mencari dana. Sebagai komunitas independen, diakui Angga

G13L membutuhkan banyak biaya. Fotocopy naskah dan biaya administrasi lain. "Hingga saat ini, sudah terkumpul sekitar Rp 600 ribu. Rencana panjang, untuk menerbitkan antologi puisi," terang Angga.

Dalam pandangan Rika Almuna, anggota G13L, dirinya banyak mendapat pengalaman berharga setelah gabung di komunitas tersebut. "Sangat positif sekali. Kita bisa mendiskusikan masalah sastra bersama-sama. Melihat manfaatnya, saya kira perlu dikembangkan lebih lanjut. Kita membuka kesempatan bagi remaja lain yang ingin gabung," ujar Rika yang beberapa kali menjuarai lomba baca puisi. (Latief)

Minggu Pagi, 26 Oktober 2003

PENYAIR senior Taufiq Ismail memang sangat piawai dalam menuliskan syair-syair, dan orang pun pasti terkagum-kagum bila mendengar syair itu dibacakannya. Setiap karya yang dihasilkan sastrawan yang dokter hewan ini selalu menjadi monumental dan kalimat-kalimatnya yang indah sangat menyentuh perasaan.

Bagi Taufiq tidak ada istilah membatasi diri untuk membaca karya sastranya atau puisi-puisinya kepada siapapun dan dimanapun. Ia bukanlah seorang sastrawan kacamangan atau sastrawan kelas elite, tapi Taufiq merupakan seorang sastrawan sejati. Ia bisa membaca puisi di hadapan orang-orang dhuafa sampai orang kaya. Apalagi di hadapan para seniman, sastrawan atau budayawan itu sudah biasa.

Ketika Kongres Kebudayaan V di Bukittinggi, Sumatera Barat, belum lama ini Taufiq Ismail sempat memukau sekitar 600 hadirin yang terdiri dari seniman, budayawan, cendekiawan, agamawan dan kalangan birokrat dari berbagai daerah. Puisinya yang panjang bercerita tentang kisah proklamator Bung Hatta sebagai seorang negarawan yang pandai namun sederhana.

Usai acara pembacaan puisi itu, Taufiq langsung diwawancarai oleh wartawan stasiun radio di Jakarta. Wawancara pun dilakukan melalui pesawat telepon. Namun, tak puas dengan wawancara tersebut Taufiq "dipaksa" untuk membacakan puisi yang tadi dibacakan di atas panggung. Taufiq tak mengelak permintaan sang wartawan itu. Ekspresi pembacaan puisi itu pun tak jauh



KR-CDR

Taufiq Ismail

berbeda dengan apa yang dibaca di atas panggung. (Cdr)-z

Kedaulatan Rakyat, 30 Oktober 2003

Pemenang Cerita Pendek Remaja 2003

JAKARTA, KOMPAS — Cerita pendek berjudul "Slamet" karya Patrick Gedeon E. (siswa SMU Trinitas Bandung) akhirnya keluar sebagai pemenang pertama Sayembara Penulisan Cerpen Remaja Tahun 2003. Adapun cerpen "Sekar Boleh Menari" karya Lanjar Wijarti (Jakarta) dan "Ayin" karya Febriani (SMU 1 Sungailiat, Bangka) masing-masing tampil sebagai pemenang II dan III.

"Selain mendapat hadiah uang, mereka juga akan diundang menghadiri Kongres Bahasa Indonesia VIII di Jakarta, 14-17 Oktober 2003, atas biaya panitia," kata Ani Mariani, ketua panitia sayembara dari Pu-

sat Bahasa, Kamis (9/10).

Tim juri di tingkat nasional yang diketuai cerpenis Hamsad Rangkuti juga memutuskan cerpen "Made Patih" karya I Made Sudarma (Singaraja, Bali), "Namanya May" karya Ikhtiar Hidayati (SMU Negeri 8 Palembang), dan "Maafkan Aku Ibu" karya Herawati (SMU Negeri 6 Makassar) berturut-turut sebagai pemenang harapan I, II, dan III.

Atas keberhasilan tersebut, Patrick Gedeon yang berhasil tampil sebagai pemenang pertama menyabet hadiah uang Rp 3 juta, sementara Lanjar Wijarti (pemenang II) berhak atas hadiah uang Rp 2,5 juta, sedangkan Febriani (III) mendapat hadiah Rp 2 juta. Adapun pemenang harapan I-III merebut hadiah uang masing-masing Rp 1,5 juta.

Pemenang puisi

Sementara itu, dari pelaksanaan Sayembara Penulisan Puisi Siswa SLTP Tahun 2003, puisi berjudul "Kemarin, Hari Ini dan Esok" karya Khodijah Al-kakaff (SLTP Negeri 7 Palembang) tampil sebagai pemenang pertama. Adapun pemenang kedua dan ketiga masing-masing diraih puisi "Ketika Listrik Padam" karya Rokhim (SLTP Negeri 1 Gemarang, Madiun) dan "Aku Ingin denganmu Selamanya" karya Thalitha Mahfud (SLTP Al-Hikmah Full Day School, Surabaya).

Adapun urutan pemenang harapan I-III adalah puisi berjudul "Kegelisahan" karya Fatmawati K (SLTP YPKP Sentani, Jayapura), "Kebenaran yang Hilang" karya Pramudita Lestari (SLTP Negeri 85 Jakarta), dan "Merah Putih dalam Kenangan" karya Pradizza Septiana Putri (SLTP Negeri 06 Makassar).

(*KEN)

Kompas, 10 Oktober 2003

Ide Liar Itu pun Datang: Menyewa Gerbong untuk Pernikahan

Oleh Hamsad Rangkuti, CERPENIS

Naik kereta api sudah menjadi kebiasaan saya sejak saya kecil. Sejak saya SMP di kota kecil Kisaran, lebih kurang 150 kilometer dari Medan, hingga kini. Saya tetap menggunakan jasa kereta api untuk mengantar saya dari Depok ke tempat saya bekerja di Jakarta. Kereta api bagi saya adalah pilihan tepat sebagai sarana angkutan di kota yang padat lalu lintasnya. Saya terhindar dari kemacetan, lagi pula saya suka duduk berlama-lama di stasiun sambil saya membaca saat menunggu gerbong yang longgar.

Pada dasarnya, kereta api adalah jenis kendaraan yang paling aman. Dia termasuk kendaraan bebas hambatan. Maka, saya suka kereta api. Tidak melelahkan dan dia tidak mengenal kemacetan lalu lintas. Oleh karena itu, pulalah penumpangnya senantiasa berjubel. Dan bau keringat rakyat jelata tak bisa dihindarkan menyerang penciuman kita.

Di kereta tak ada tegur sapa. Semua saling curiga. Para penjudi kartu remi menguasai ruangan lantai gerbong. Pemandangan itu tampak pada kereta malam hari. Mereka galak dan menganggap lantai di sudut gerbong itu milik mereka. Bau minuman menyertai napas mereka.

Orang mendekap tasnya. Menjaga dompet di sakunya, namun masih saja ada penumpang yang kehilangan di atas kereta. Di posisi rapat penumpang seperti itu para pedagang masih saja hilir-mudik menjajakan dagangannya. Yang paling banyak adalah pedagang minuman botol yang didorong di atas papan beroda empat selebar *crate* minuman botol itu. Kehadiran mereka memang terasa sangat mengganggu sekaligus sungguh sangat menolong

orang yang sedang haus. Lama-kelamaan, jumlah mereka semakin banyak. Petugas PJKA tidak berhasil mengusir mereka. Lalu akal jahat mereka bertindak. Pintu antargerbong mereka sekat pakai pagar besi yang hanya bisa dilewati penggantung karcis yang rata-rata berbadan kurus. *Crate* dorong itu tidak bisa melewati sekat itu. Para pedagang bila hendak pindah gerbong mereka terpaksa menunggu kereta berhenti di stasiun terdekat lalu memboyong *crate* dorong yang bersusun tiga pindah gerbong. Begitulah yang tampak menyentuh perasaan setiap hari. Pemilik perusahaan minuman botol itu tidak tinggal diam. Ukuran *crate* mereka disesuaikan dengan ukuran sekat penghalang di pintu antargerbong, yang biasanya satu *crate* berukuran 4x6 menjadi 3x8 botol.

Bagi pengarang semacam saya, pengalaman melihat, mendengar, atau merasakan sentuhan di gerbong berdesakan penumpang itu memperkaya imajinasi liar saya. Kadang-kadang terpikir oleh saya untuk membikin lomba karaoke pengemis buta yang mengamen dengan lantunan lagu-lagu pasaran pembangkit birahi; yang akhirnya ini jenis lagu itu dihebohkan oleh pantat penyanyinya. Sekarang sudah tidak terdengar lagi lantunan ayat suci Al-Quran sebagai alat bantu mereka mengamen.

Yang terasa aneh adalah harga barang-barang yang dijual pedagang dalam kereta jauh lebih murah bila dibandingkan dengan harga barang yang sama yang dijual di luar kereta. Mengapa bisa begitu? Sebab, bila ditilik dari mutunya, tidak kalah dengan barang-barang yang dijual di luar kereta.

Suatu kali saya naik kereta malam menuju Jakarta. Tidak banyak penumpang yang menuju Jakarta di saat orang pulang kerja. Seorang pemuda

setengah oyong muncul dari gerbong di belakang gerbong yang saya tumpangi. Dia mungkin mabuk atau mengalami gangguan jiwa. Dia duduk sebentar di bangku kosong di sebelah saya. Penumpang-penumpang ada yang tertarik melihat kemunculannya. Sebab, biasanya yang suka pindah-pindah gerbong hanyalah pedagang atau pengamen, dan satu kali dalam perjalanan adalah penggantung karcis. Pakaiannya pemuda di sebelah saya itu tampak kumal. Rambutnya kusut. Menghadapi situasi penumpang yang memperhatikan, dia tiba-tiba berdiri. Berjalan di tengah-tengah gerbong menuju arah yang sama dengan jalan kereta. Kulihat dia seperti berjalan di atas sebatang pohon kelapa yang melintang di tengah sungai. Aneh. Dan itu menjadi perhatian kami. Tidak jelas mengapa dia berkelakuan seperti itu. Begitu dekat pintu yang senantiasa menganga, angin yang terus-menerus masuk langsung menyergap tubuhnya. Dan dia terus keluar seolah-olah kereta api itu telah sampai di stasiun. Setelah itu banyak orang yang memekik melihat kejadian itu. Kereta terus berjalan seakan-akan tidak terjadi apa-apa.

"Coba kalau pintu itu ditutup, mungkin itu tidak terjadi," kata penumpang di sebelah saya.

"Tapi yang merusak pintu itu kan penumpang. Sehingga tidak bisa ditutup lagi secara mekanis," jawab penumpang lain.

Terjadi komunikasi di antara penumpang. Mereka mulai bercerita mengenai kejadian-kejadian di atas kereta.

Peristiwa itu mengilhami lahirnya cerita pendek saya yang berjudul *Di Atas Kereta Rel Listrik*. Situasi keberingasan masyarakat menunjang lahirnya cerpen itu. Yang paling marak pa-

da saat itu adalah tawuran sekelompok orang dengan kelompok yang lain. Antara kampung yang satu dan kampung yang lain. Antara kelompok pelajar sekolah yang satu dan kelompok pelajar sekolah yang lain. Banyak korban yang tak berdosa yang menjadi korban.

Peristiwa lain dalam hidup saya muncul lagi dalam kereta rel listrik itu. Waktu itu saya sedang mempersiapkan pesta pernikahan putri saya. Undangan resepsi pernikahan telah beredar. Resepsi diadakan di Wisma Antara, Jalan Merdeka Selatan. Jumat sore, saya bertandang ke warung minum di TIM. Di sana telah ada teman-teman. Salah seorang dari mereka bertanya bagaimana acara resepsi pernikahan berlangsung. Saya secara spontan menjawab, "Kami akan sewa satu gerbong kereta api dari Depok. Dari stasiun Gambir akan saya kembangkan karpet merah hingga ke anak tangga Wisma Nusantara." Rupanya mereka menanggapi ide liar saya itu secara serius. Mereka lupa kalau mereka sedang berhadapan dengan seorang pengarang yang imajinasinya liar.

Sampai di rumah, saya menerima telepon dari teman yang lain. Dia bertanya tentang kebenaran berita itu. Saya bilang itu kan ide liar seorang pengarang, dan itu tidak perlu diwujudkan. Namun, dia mendesak agar saya melaksanakan ide liar saya itu, dan menambahkan, kalau saya akan membikin sejarah. Bila itu terlaksana, dia akan kirim kru *Kroscek* dari *Trans TV*. Saya mulai bingung dan merinding.

Saya bertelepon pada salah seorang staf redaksi *Kompas* dan menceritakan ide liar itu, juga desakan teman-teman agar melaksanakan ide itu. Tidak lama kemudian dia menelepon dan mengatakan bahwa teman-teman redaksi menyambut ide itu. Mereka mendesak agar saya mewujudkannya menjadi kenyataan.

Saya ceritakan ide itu kepada keluarga, terutama kepada Bungaria si calon pengantin. Mereka mendukung rencana itu, termasuk para tetangga. Sabtu, 16 Februari saya pergi mengurus izin ke Stasiun Depok. Kepala Stasiun Depok menolak dan menganjurkan agar saya mengajukan permohonan ke Stasiun Bogor. Di Stasiun Bogor, saya ceritakan niat saya hendak menyewa satu gerbong kosong pada 17 Februari untuk rombongan pengantin kepada Bapak Zainal Arifin, Kepala Stasiun Bogor. Dia langsung menolak rencana saya itu. Menurut dia tidak mungkin mengosongkan satu gerbong sampai ke Stasiun Depok. Ada 4 stasiun yang disinggahi sebelum Stasiun Depok I. Menurut kepala stasiun itu, tidak mungkin mencegah penumpang agar tidak naik ke gerbong yang kosong itu.

Mendengar jawaban itu saya mulai putus asa. Tetapi saya ingat sebuah pengalaman. Jangan cepat pergi kalau permohonan kita ditolak. Lakukan pendekatan yang familiar. Saya pun bertahan di ruang tamu kepala stasiun itu. Dia saya lihat sibuk melaksanakan pekerjaannya siang itu. Sejam kemudian dia muncul lagi di ruang tamunya itu. Saya mengulang lagi permohonan saya, dan menceritakan rencana yang

telah disiapkan teman-teman media bila "Pengantin Kereta" itu jadi dilaksanakan.

Ada ucapan saya yang mungkin membuka wawasannya. "Saya pelanggan KRL setia, Pak." Kata saya sambil menunjukkan kartu langganan bulanan saya. "Sekali-sekali apa salahnya KRL muncul dalam berita yang menggembarakan. Masak, citra KRL selalu masalah buram saja. Pencopetan, penumpang yang jatuh dari atap gerbong, tabrakan maut, pedagang asongan yang meresahkan penumpang."

Dia tampak terkesima dengan ucapan saya itu. Dia lalu menyuruh saya menunggu, sementara dia mencoba menghubungi humas PJKA di Stasiun Juanda. Tidak lama kemudian, dia muncul lagi di ruang tamunya itu dan mengatakan bahwa permohonan saya disetujui humas pusat. Sekarang sudah menjadi terbalik. Malah dia pula yang menganjurkan macam-macam perangkat pendukung, misalnya membikin spanduk di kiri-kanan dinding gerbong dengan kata-kata "Mohon Maaf, Gerbong Ini Khusus untuk Rombongan Pengantin". Dia juga akan menyediakan rombongan pengamen dari Bogor untuk mencegah penumpang naik ke gerbong yang kosong itu. Disediakanlah satu gerbong kosong di depan rangkaian gerbong bernomor kereta 525. Berangkat dari Bogor pukul 14.31. Dan saya cukup membayar karcis sebanyak jumlah penumpang: 75 x Rp 1.500. Kemudian saya pun pergi ke telepon umum dan mulai menelepon teman-teman di media mereka masing-masing. ●



Fiksi dan Masalah Keyakinan Estetik

Ahmadun Yosi Herfanda

Wartawan Republika Pecinta Sastra

Belakangan ini beberapa pengamat sastra merasa perlu untuk memperdebatkan kembali persoalan 'keyakinan estetik' dalam penulisan fiksi. Ini terutama karena saat ini muncul dua 'arus estetik' yang tampak saling berseberangan. *Pertama*, arus estetik yang tetap menghormati nilai-nilai moral dan agama yang ditunjukkan oleh para penulis fiksi Islami. Dan, *kedua*, arus estetik yang memberontak dari ikatan-ikatan moral yang ditunjukkan oleh sejumlah penulis fiksi sekuler (menempatkan kebebasan ekspresi sebagai segalanya).

Arus estetik yang pertama terutama ditunjukkan oleh karya-karya para aktifis FLP, yang ternyata memiliki tarikan pasar yang sangat kuat, misalnya saja karya-karya Asma Nadia dan Gola Gong. Menarik untuk menyebut novel *Kupu-Kupu Pelangi* (DAR Mizan, 2003) karya Gola Gong, karena novel yang semangat Islaminya sangat kental ini justru diolah dari tragedi kemanusiaan sebuah keluarga urban yang sangat sekuler dengan lingkungan peradaban urban yang sekuler pula.

Novel ini dimulai dari kisah pacaran yang kelawat batas antara Cindy dan Leo membuahakan janin di luar nikah. Tragedi kemanusiaan pun ditegaskan ketika ayah sang gadis, pengusaha kaya bernama Bram, tidak menerima Leo dan memaksa Cindy untuk menggugurkan kandungannya, ketika sang janin berusia 8 bulan.

Di tangan 'penulis sekuler' yang sekarang juga menjamur di tanah air, kisah di atas barangkali menjadi novel yang penuh adegan seks dan kekerasan. Sebab, kisah di atas menyediakan peluang untuk itu. Sebut saja, misalnya, percintaan antara Cindy dan Leo, operasi

caesar Cindy, atau petualangan Anton dan Bram.

Tetapi, di tangan Gola Gong, cerita di atas didekati dengan semangat yang cukup Islami. Agaknya Gola Gong tidak tertarik untuk mengeksploitasi hal-hal di seputar seksualitas dan erotika itu. Gola justru menempatkannya sebagai tragedi moral dan kemanusiaan.

Dari sinilah kesadaran dan semangat Islami Gola membimbingnya untuk membawa dan menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan yang dihadapi tokoh-tokohnya dengan pendekatan agama: pendosa adalah pendosa dan mereka harus diberi hukuman setimpal, kecuali mereka mau bertobat dan tidak mengulang perbuatannya.

Maka, tokoh Bram yang mengingatkan kita pada watak Ramses II (Fir'aun) — congkak dan tak kenal Tuhan — dihukum jadi bangkrut dan masuk rumah sakit jiwa. Begitu juga Anton, aktivis mata duitan yang tidak punya prinsip hidup serta mau dibayar untuk membuang bayi Cindy, suka main judi dan perempuan ketika sudah kaya, dibikin bangkrut dan gila.

Yang terasa kejam, barangkali, hukuman yang diberikan kepada Cindy: Gadis cantik ini sebenarnya hanyalah korban keadaan, tapi dimatikan oleh pengarangnya melalui kasus over dosis narkoba, karena putus asa tak diterima kembali oleh Leo. Sementara, Leo, pacar yang membenihinya, justru 'diselamatkan' dengan menjadi pemusik sukses.

●●●
Filosofi — atau tepatnya mitologi — tentang kebenaran, bahwa hidup ini adalah pertarungan antara yang baik dan yang buruk, antara kebenaran dan kejahatan, kembali berbicara dalam novel Gola Gong ini. Dan, sebagaimana kisah-kisah pewayangan; dongeng, legenda, dan bahkan film-film Barat, kebenaran akan selalu muncul sebagai pemenang, dan yang jahat selalu

menerima hukuman.

Sebenarnya, semua penulis cerita modern, baik novel maupun naskah film, yang mengakhiri kisahnya dengan akhir (*ending*) yang jelas — bukan *ending* yang mengambang — meletakkan plot dan nasib tokoh-tokoh cerita dalam bingkai filosofi tentang kebenaran itu. Pada tahap inilah seorang penulis, disengaja atau tidak, akan menanamkan nilai-nilai yang diyakininya kepada apresiasi (pembaca).

Sebuah karya sastra lazimnya akan dianggap berdampak positif jika nilai-nilai yang dimasyarakatkannya sesuai dengan nilai-nilai (kebenaran) moral dan agama yang diyakini oleh masyarakat pembacanya. Pergesekan ataupun perbenturan nilai akan terjadi ketika kebenaran yang diyakini oleh pengarang telah bergeser sehingga bertentangan dengan keyakinan masyarakat.

Pada kondisi tertentu, ketika 'kebenaran baru' yang semu telah benar-benar diyakini oleh pengarang, dan dia begitu lihai mengemasnya ke dalam karya sastra, 'kebenaran semu' tersebut dapat berakibat 'penyesatan nilai' jika tidak dibaca secara berhati-hati. Cara terbijak untuk menghadapinya adalah menganggapnya sebagai fiksi, sebagai dunia rekaan, yang hanya ada di dalam imaji pengarang (novel). Memang dibutuhkan kematangan (kedewasaan) tersendiri menghadapi novel-novel seperti itu.

Sebagai contoh adalah imaji blak-blakan tentang seks yang diperlihatkan oleh novel-novel dan cerpen-cerpen beberapa penulis perempuan belakangan ini, seperti Ayu Utami, Jenar Maesa Ayu dan Dinar Rahayu, atau metafor-metafor 'sarkasme-genital' (kekerasan terhadap alat-alat kelamin) cerpen-cerpen Hudan Hidayat.

Ada tiga kemungkinan yang melatari kecenderungan di atas. *Pertama*, penulis-penulis itu menganggap fiksi sekadar karya sastra yang tidak perlu dihubungkan dengan persoalan moral. *Kedua*, mereka muak pada norma-norma lama yang mengungkung masyarakat dalam sikap 'serba tabu' dan mengungkung kebebasan kreatif mereka. Karena itu, mereka berontak dan 'membuang' nilai-nilai itu — dalam karya sastra. Dan, *ketiga*, mereka sengaja mengangkat 'borok' dan 'nanah' masyarakat urban itu untuk menohok kesadaran pembaca bahwa masyarakat kita memang benar-benar sudah 'sakit parah' dan karena itu perlu kesadaran bersama untuk menyelamatkannya.

Ada kepercayaan yang kuat di kalangan penulis Muslim bahwa nilai-nilai yang

diyakini oleh kreator sebuah karya sastra sangat menentukan apakah kehadiran karya sastra itu bermakna positif atau sebaliknya destruktif bagi masyarakat. Dan, karena itu pula, kehadiran penulis-penulis Muslim seperti Gola Gong, Helvy Tiana Rosa, Asma Nadia, dan kawan-kawan FLP lainnya, dengan gerakan fiksi Islaminya, dianggap sangat penting untuk memberi warna yang lebih mencerahkan bagi dunia fiksi Indonesia.

Dalam 'keyakinan estetik' ini sebuah karya sastra (seni bahasa) yang ideal dianggap tidak cukup hanya memiliki pencapaian estetika yang tinggi, tapi secara tematik juga harus mampu mencerahkan nurani (jiwa) pembacanya. Penganut keyakinan ini sangat percaya bahwa karya sastra secara subversif mampu mempengaruhi perasaan dan pikiran pembaca dan secara pelan-pelan menumbuhkan kesadaran/nilai baru (yang lebih tercahkan) dalam dirinya. Dalam keyakinan ini, selain fiksi Islami, juga muncul yang disebut 'sastra profetik' oleh Kuntowijoyo atau 'sastra sufistik' oleh Abdul Hadi WM.

Tetapi, tidak kurang yang percaya bahwa proses pencerahan melalui karya sastra yang 'suci' dan penuh keteladanan seperti itu barulah sebuah metode. Realitas masyarakat yang begitu kompleks sering membutuhkan lebih dari satu 'metode pencerahan'. Untuk kalangan masyarakat yang sudah baik-baik, yang sudah imtak, fiksi Islami itu mungkin pas untuk mempertahankan dan meningkatkan keimtak-an mereka. Tetapi, bagi kelompok masyarakat yang sudah sakit, fiksi-fiksi Islami itu mungkin justru ditolak dan karena itu misinya tidak akan sampai. Mereka perlu karya sastra yang seolah akrab dengan dunia mereka namun mampu menohok lebih keras lagi, agar tersadar (bangun dari tidur) dan menyadari realitas diri serta realitas masyarakatnya yang sudah sakit tadi. Dan, ini barangkali menjadi tugas jenis cerpen-cerpen sarkasme, yang dengan kegilaannya berani mengeksplorasi kebobrokan itu.

Dalam menghadapi kondisi yang sakit kadang-kadang juga perlu 'teori pembusukan'. Ini seperti membusukkan batang umbi agar dapat tumbuh tunas baru yang lebih sehat dan segar dari umbi yang sama. Namun, tidak gampang untuk melewati 'tahap pembusukan' seperti itu. Jika tidak berhati-hati, 'pembusukan' justru bisa meluas dan merusak umbinya, sehingga tunas baru yang tumbuh pun tunas yang rusak. Ketika perfileman hasional bangkrut dan muncul film-film sampah, misalnya, banyak yang menganggap perlu ada proses 'pembusukan'

untuk menyehatkannya kembali. Tapi, sampai kini tunas baru yang lebih sehat dan segar belum juga membesar, sementara bau busuknya masih terasa.

Sudah lama banyak pengamat sastra mengeluh, bahwa iklim kesastraan kita kurang sehat, kesastraan kita sedang sakit, dari tidak mampu melahirkan karya besar. Barangkali, banyak ikatan dogmatis — yang membuat sastra kita mandeg — harus dibongkar dari umbi sastra kita untuk menumbuhkan potensi-potensi kreatif baru. Dan, tentu sambil tetap menjaga pertumbuhan fiksi Islami yang sudah menemukan komunitas pembacanya sendiri, barangkali di luar *mainstream* ini 'batang kesastraan' kita perlu 'dibusukkan' agar meleleh menjadi humus yang menyuburkan tumbuhnya tunas-tunas baru yang lebih sehat dan segar dari umbi yang sama. ■

Republika, 5 Oktober 2003

Terry Eagleton dan Kematiian Sastra*

Oleh
Hawe Setiawan

KARL Marx menoleh ke Jawa dar Sulawesi. Dalam *Capital* yang terkenal itu, dengan merujuk pada *The History of Java* dari Raffles, Marx menggambarkan sejarah kolonialisme yang keji:

Sejarah pemerintahan kolonial Belanda—dan Belanda adalah negara kapitalistik paling terkemuka pada abad ke-17—adalah salah satu yang paling tak tepermanai di antara jaringan penipuan, suap, pembantaian, dan pemiskinan." Tak ada yang melebihi sistem yang mereka rancang untuk mencuri manusia, dan menjadikannya budak dari Jawa. Para pencuri manusia itu dilatih supaya berguna buat mereka. Pencuri, penerjemah, dan cukong adalah agen utama dalam perdagangan ini, sedang raja-raja pribumi menjadi dedengkot cukongnya. Anak-anak muda yang dicuri, lalu dijebloskan ke dalam kerangkeng rahasia di bawah tanah di Sulawesi, hingga mereka siap dikirim dengan kapal-kapal pengangkut budak... Banyuwangi, salah satu provinsi di Jawa, pada tahun 1750 berpenduduk lebih dari 80.000 jiwa, dan pada tahun 1811 penduduknya tinggal 18.000 jiwa. Inilah perdagangan yang menggiurkan!

Indonesia, dengan demikian, punya bahan untuk memahami bagian-bagian yang keji dari sejarah perubahan sosialnya sendiri. Kolonialisme yang dulu memperkenalkan kesusastraan modern kepada publik Indonesia, semisal lewat buku-buku sastra dunia yang diterjemahkan ke dalam bahasa Sunda oleh Laksmi-ningrat, adalah juga kekuatan

yang menjerumuskan para pemuda dari Jawa ke dalam kubangan perbudakan. Cerita anak *Babalik Pikir (Sadar)* karya mendiang Samsodi yang pertama kali terbit pada 1932, hingga batas tertentu, turut pula memantulkan bayangan sejarah perbudakan itu.

Kalau begitu, Indonesia juga tentu punya banyak alasan untuk mengundang Terry Eagleton, dan menjejakkan ide-idenya mengenai sastra dan budaya di sini. Bukan tidak mungkin ide-idenya dapat membantu orang sini untuk menilik segi-segi kebudayaan sendiri. Pada Eagleton, pandangan Marxis mengenai perubahan sosial mendapatkan ungkapan yang relatif baru. "Tak ada dokumen budaya yang tidak turut merekam barbarisme (*There is no document of culture which is not also a record of barbarism*)," tulis Eagleton di halaman-halaman akhir bukunya, *Literary Theory*.

Sayang, memang, Eagleton diundang ke Indonesia dengan cara yang kurang sopan. Di Yogyakarta belum lama ini terbit sebuah buku hasil terjemahan dari *The Function of Criticism* karya Eagleton. Buku berjudul *Fungsi Kritik* itu mencampurbaurkan sastra Inggris dengan pemimpin gereja Vatikan. Nama 'Pope' yang disinggung-singgung oleh Eagleton, yang tentu saja mengacu kepada Alexander Pope, diterjemahkan menjadi 'Paus'. Adapun istilah 'gentleman' dari Eagleton, yang mengacu pada pengalaman di Inggris pada abad kedelapan belas, diindonesiakan menjadi 'budayawan'. Padahal istilah 'budayawan' sungguh tidak jelas maknanya, dan sukar dicarikan temannya dalam bahasa asing mana pun. Ada kesan, buku itu diindonesia-

kan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, tetapi tidak secara saksama.

Meski begitu, ada kecenderungan Eagleton diindonesiakan dengan semangat yang lumayan kuat. Sebelum publik Indonesia diusik oleh *Fungsi Kritik*, telah terbit buku berjudul *Marxisme dan Kritik Sastra*. Itulah hasil alih bahasa dari *Marxism and Literary Theory* karya Eagleton. Hasil terjemahan dari karya yang satu ini terdiri atas dua versi: yang satu diterjemahkan oleh Roza Muliati dkk, yang satu lagi dialihbahasakan oleh Ahmad Zaim Rofiqi. Pilih mana, terserah Anda. Mungkin salah satu di antaranya lebih bisa dibaca.

Sebegitu jauh, baru kedua bukunya itulah yang telah diindonesiakan dan terbit sekitar dua atau tiga tahun setelah 1998 (tatkala Indonesia kembali mengalami pergantian orde politik. Padahal, tentu saja, Eagleton juga menulis beberapa buku lainnya. Dan, salah satu buku Eagleton yang kiranya cukup penting adalah *Literary Theory*. Ditulis pada 1982 dan terbit setahun kemudian, buku itu menyajikan pandangan Eagleton mengenai sastra dan budaya, secara lebih menyeluruh. Ia dapat dikatakan lebih mendalam ketimbang *Marxism and Literary Criticism* yang dikatakannya memang 'singkat... (dan) sejak awal dirancang untuk serangkaian studi pengantar yang selayang pandang (*short... originally designed for a series of brief introductory studies*)'. Ia juga dapat dibilang lebih luas jangkauannya ketimbang *The Function of Criticism* yang membatasi diri pada pelem-bagaan kritik dalam kebudayaan, yang berpijak pada latar belakang sejarah kemunculan aspira-

si kaum borjuis di Eropa pada abad ke-18.

Dalam *Literary Theory* Eagleton menyelidiki dasar-dasar anggapan di balik pengertian tentang 'sastra', sekaligus menguji beberapa teori atau pendekatan yang dikenal dalam studi sastra semisal fenomenologi, hermeneutika, teori resepsi, strukturalisme, semiotika, pasca-strukturalisme dan psikoanalisis. Pada gilirannya ia pun mengajukan pandangan-pandangannya sendiri mengenai 'sastra' seraya merancang 'strategi' untuk studi sastra dalam keseluruhan cakupan medan diskursus.

Salah satu soal runyam yang diselidiki dalam *Literary Theory* menyembul di sekitar pengertian tentang sastra itu sendiri beserta segala kaitannya. Dalam buku ini Eagleton tidak merumuskan apa itu sastra, melainkan justru lebih cenderung memaparkan kemustahilan untuk mengartikan sastra. Bahkan dia melontarkan gagasan tentang 'kematian sastra' (*the death of literature*). Selintas memang agak paradoksal: bagaimana orang yang cenderung tidak percaya akan adanya sastra, justru menulis buku tentang teori sastra dan kritik sastra?

Bagi para penelaah sastra tentu saja buku ini sangat menantang sehubungan dengan dua perkara: pusat perhatian dari studi sastra dan metodologi yang diterapkan dalam studi sastra. Sehubungan dengan kedua hal tersebut, buku ini berpijak pada anggapan bahwa pada dasarnya tidak ada pengertian tentang sastra yang utuh penuh dan menyeluruh, yang tak lapuk karena hujan dan tak lekang karena panas. Ia menunjukkan bahwa bentuk-bentuk tulisan yang dimasukkan ke dalam katalog 'sastra' ternyata berubah-ubah sejalan dengan gerak sejarah. Objek studi sastra dengan begitu tidaklah ajek dan tidak pula baku, melainkan tidak menentu. Kasarnya, sastra itu tidak ada. Kalupun ada yang ngotot bahwa sastra adalah ini dan itu, bagi Eagleton itu hanyalah cermin dari kepentingan atau ideologi yang lagi dominan. Demikian pula dengan metodologinya. Studi sastra dilangsungkan dengan

menerapkan begitu banyak pendekatan, semisal mulai dari strukturalisme yang cenderung menitikberatkan perangkat-perangkat linguistik dalam sebuah teks hingga humanisme yang cenderung memusatkan perhatian pada semacam 'sosok pribadi dalam sajak'.

Apa yang sejauh ini telah kita bongkar, dengan demikian, bukanlah semata-mata bahwa sastra itu tidak ada dalam pengertian tidak seperti serangga, dan bahwa penentuan nilai yang melandasi pembentukannya secara historis berubah-ubah, melainkan pula bahwa penentuan nilai itu sendiri terpaut erat pada ideologi-ideologi sosial. Pada akhirnya arti sastra tidak semata-mata mengacu pada selera pribadi, melainkan juga merujuk pada anggapan-anggapan yang melandasi kelompok-kelompok sosial tertentu untuk melancarkan dan memelihara kekuasaan atas orang-orang lainnya.

Dalam penyelidikannya, Eagleton memaparkan betapa pengertian tentang sastra lahir dan ditentukan oleh kondisi historis yang melingkunginya. Pengertian sastra tidak jatuh dari langit ketujuh, tidak pula menyembul dari perut bumi. Ia hasil rekaan manusia yang berubah, bergeser, mengembang, dan mengerut dari waktu ke waktu. Dalam hal itu, Eagleton menyelidiki munculnya pengertian sastra, khususnya dalam lingkungan Eropa. Ia menemukan apa yang kini kita sebut sastra barulah muncul pada sekitar masa yang kini disebut 'periode Romantik', sedangkan nuansanya yang terbilang modern baru mendapatkan jalan pada sekitar abad ke-18. Bahwa kaum Romantik cenderung menghubungkan sastra dengan soal-soal perasaan, merujukkan pengertiannya pada kreasi-kreasi yang dikatakan 'imajinatif', bagi Eagleton hal itu tidaklah dapat dilepaskan dari kondisi historisnya. Dengan berpijak pada sejarah perubahan sosial ekonomi di Inggris pada sekitar awal abad ke-19, ia menemukan bahwa ketika itu Inggris mengalami kemajuan pesat di bidang ekonomi sebagai negara industri. Hubungan sosial mengalami komodifikasi, sesuai dengan tuntutan pasar, kaum buruh dikerahkan ke pabrik-pabrik, dan filsafat hidup cenderung kian utilitarian. Dalam keadaan seperti itu, pikiran-pikiran mengenai kesusastraan yang cenderung menjunjung tinggi 'imajinasi' dan suara hati, lantas memungkinkan sastra menjadi semacam 'ideologi alternatif' dan 'imajinasi' itu sendiri bisa berkembang menjadi semacam kekuatan politik.

Akan tetapi, sebagaimana yang secara khusus ditinjau oleh Eagleton dalam *The Function of Criticism*, kekuatan politik semacam itu, terutama dalam bentuk kritisisme kaum borjuis terhadap tatanan ekonomi-politik yang tengah berlaku, pada gilirannya menjadi dominan pula. Dan, pikiran-pikiran mengenai kesusastraan cenderung menjadi pendukung kemapanan. Bahkan, kritik sastra itu sendiri cenderung menjadi humas bagi industri buku. Dengan kata lain, kekuatan emansipatoris dari kesu-

sastraan berikut kritisisme yang melekat padanya cenderung mengalami kemandekan. Sastra sebagai pembebas manusia seperti telah meninggal dunia.

Namun, tentu saja, dalam upayanya menimbang-nimbang nilai sastra Eagleton bukannya tanpa masalah. Kita, misalnya, dapat mengajukan pertanyaan, mengapa pikiran-pikiran kesusastraan warisan 'periode Romantik' yang

Barangkali kepedulian Eagleton yang paling utama terarah pada upaya-upaya strategis untuk memulihkan kekuatan emansipatoris sastra, juga kritik sastra, di ruang dan waktu tertentu.

menjunjung tinggi aspek imajinatif dari berbagai kreasi itu sepertinya terus mapan, melewati berbagai perubahan sejarah? Kalau kita mengikuti rangkaian kuliah Isaiah Berlin yang dibukukan di bawah judul *The Roots of Romanticism*, jelas ada kesan bahwa gugusan gagasan Romantisisme itu terasa begitu kuat dan mengalir sampai jauh melewati batas-batas negeri dan era. Mengapa sampai begitu? Apabila pikiran tertentu mengenai kesusastraan merupakan ideologi tersendiri, dan telah menjadi dominan, mengapa sampai bisa ada ideologi yang bisa bertahan begitu lama? Selain itu, sebagaimana yang dikemukakan oleh Tony Bennet dalam *Forma-*

lism and Marxism, upaya Eagleton untuk membongkar dasar-dasar nilai sastra juga menghadapi masalah yang kira-kira penting:

Sebagai sebuah upaya untuk menangani masalah nilai sastra, teori Eagleton harus dinilai gagal. Hal itu semata-mata tidak bisa diterima mengingat sebuah teks dapat dikatakan bernilai karena keadaan menyangkut produksinya. Pada dasarnya, Eagleton menyadari hal itu, dan pandangannya atas masalah nilai sastra lantas kian berubah-ubah manakala dia berupaya mendamaikan kesadaran akan hal itu dengan keyakinan bahwa ada sesuatu yang khusus menyangkut karya-karya yang membentuk 'tradisi besar' yang tak dibiarkannya tunduk pada bentuk-bentuk populisme yang mengklaim kesamaan dan kesetaraan di antara seluruh bentuk tulisan.

Barangkali kepedulian Eagleton yang paling utama terarah pada upaya-upaya strategis untuk memulihkan kekuatan emansipatoris sastra, juga kritik sastra, di ruang dan waktu tertentu. Kesan seperti ini muncul terutama bila kita mengkaji bab terakhir dalam *Literary Theory* yang menarik titik simpul dari keseluruhan uraiannya. Dengan menekankan tiadanya arti sastra antara lain lewat ungkapan 'the death of literature' kiranya ia ingin merengkuh bentuk-bentuk tulisan atau kreasi sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin jenis dan bentuk tulisan pada dasarnya merupakan undangan bagi penelaahan sastra. Tak perlu lagi ada yang dikanonkan. Dan, dengan menegaskan tiadanya metodologi yang benar-benar tersendiri bagi studi sastra, ia kiranya menghendaki—seraya mengutip Foucault—agar studi sastra melebarkan sayapnya dan menebarkan pandangannya ke keseluruhan bidang diskursus.

Dan, akhirnya ia menamsilkan sastra dengan seekor singa. "Tidaklah mustahil bahwa kematian sastra bisa turut membangunkan sang singa," tulisnya. ****

*Penulis adalah esais, editor Pustaka Jaya dan pemred majalah Sunda *Cupumanik*. Tulisan ini adalah makalah diskusi bertajuk 'Sastra dan Ideologi di mata Eagleton', 18 Oktober 2003, kerja sama Kelompok Belajar Nalar Jatinangor, Bandung dan *Media Indonesia*.

ATL Gelar Seminar dan Festival Pesisir

ASOSIASI Tradisi Lisan (ATL) yang berusia satu dasa warsa menggelar Seminar Internasional Tradisi Lisan Nusantara IV dan Festival Pesisir 2003 di Hotel Indonesia, Jakarta, pada 2-5 Oktober 2003 dengan tema "Tradisi Lisan dalam Konteks Sosial Budaya Masa Kini."

Acara ini diikuti para pakar tradisi lisan dari berbagai perguruan tinggi dari sembilan negara (Belanda, Jepang, Prancis, Korea Selatan, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Amerika Serikat dan tuan rumah Indonesia). Juga hadir grup kesenian dari luar negeri, yaitu Opera China (Singapura), Wayang Kulit Kelantan dan Tarik Selampit (Penang Malaysia), dan grup dari dalam negeri, yaitu Opera Putri Bungsu (Kalimantan Selatan), Opera Batak (Medan, Sumatera Utara), Zippin, Wayang Dongeng/Kancil (Jawa Tengah), Mocopatan dan Topeng Beta-

wi (Jakarta).

Acara ini diresmikan oleh Menteri Kebudayaan dan Pariwisata I Gede Ardika pada 2 Oktober 2003 pagi di Reog Room, Lt 8, Hotel Indonesia. Tidak kurang dari 40 makalah dibahas dalam seminar yang keseluruhannya berlangsung di ruangan ini. Adapun pertunjukan kesenian Festival Pesisir 2003 selain digelar di HI, juga di Gedung Kesenian Jakarta (2 Oktober, *Opera Cina* dan *Opera Puteri Bungsu*), di Fakultas Ilmu Budaya UI (3 Oktober, *Opera China* dan *Wayang Kulit Kelantan*).

Ketua ATL Dr Pudentia MP SS menjelaskan, permasalahan yang menjadi agenda utama kegiatan ini seputar pengkajian tradisi yang selama ini memperlihatkan ke-lenturan tradisi, dengan berbagai kompromi dalam menangani perubahan budaya dan masyarakatnya. Di pihak lain, kebekuan tradisi dalam memasuki modernisasi ada

yang akhirnya ditinggalkan masyarakatnya.

Hal ini terjadi karena konsep tradisi hanya diartikan sebagai warisan masa lalu. Jarang yang melihatnya sebagai proses yang masih aktual dalam arti "menitis" pada masa kini. Tidak heran bila hanya sebagian kecil masyarakat yang mempertahankan tradisinya. Padahal apabila tradisi-tradisi daerah itu hidup, kita akan lebih mudah memahami karakter masyarakat daerah seluruh Indonesia. Dengan demikian, konflik antarsuku bisa diperkecil.

Di lain pihak, masalah yang timbul di seputar tradisi menjadi faktor pendorong terbentuknya paradigma yang memandang tradisi lisan sebagai sebuah peristiwa budaya yang perlu diperhatikan dengan preservasi dan revitalisasi dalam pemahaman bahwa tradisi lisan perlu dilihat dalam suatu konteks sosial.

(W-9)

Diplomasi Sastra Jerman

YOGYA (KR) - Diplomasi kebudayaan tidak harus meninggalkan unsur keindahan sebagai ungkapan seni dan ekspresi manusiawi. Itulah sebabnya, berbagai upaya yang mengarah pada pertukaran budaya dan muhibah antarbangsa perlu didukung karena setidaknya memberi kesadaran ke dalam, bagi kita sebagai bangsa multikultural.

Demikian ditegaskan cerpenis Joni Ariadinata sekaligus Ketua Lembaga Kebudayaan Akar Indonesia berkaitan dengan Rilke: *Diplomasi Sastra Jerman Kontemporer* di Ruang Kundjono USD, Jl Gejayan, Sabtu (4/10) pukul 19.00. Acara tersebut terbuka untuk umum dan gratis.

Kegiatan tersebut diselenggarakan Lembaga Kebudayaan Akar Indonesia, Bengkel Sastra Indonesia USD, Majalah Sastra Horison, Kedutaan Besar Jerman. Kegiatan menampilkan Berthold Damshausser (Kritikus, Ahli Sastra Indonesia Universitas Born Jerman), Hendrik Barkeling (Atase Kebudayaan dan Pers Kedutaan Besar Jerman). Pentas puisi dan diskusi oleh penyair Inian Budhi Santosa, Joko Pinurbo, Agus R Sarjono, Jamal D Rahman, dan ia sendiri.

Menurut Joni, diplomasi kebudayaan dapat ditempuh dengan berbagai cara. Salah satunya, berdialog dan berekspresi secara bersama-sama, termasuk dalam bidang sastra.

"Kehadiran sastra termasuk unik dan dimensional," ucapnya, Kamis (2/10). Alasannya, pertama, secara teks sastra memuat realitas masyarakat suatu bangsa. Sehingga dari sana kita bisa mengapresiasi, mempelajari serta memberi interpretasi demi pengayaan kreativitas dan intelektual kita. Kedua, sastra/sastrawan memiliki kemungkinan untuk secara langsung menjumpai publiknya, misalnya suatu pertunjukan dan diskusi.

"Sehingga diharapkan dialog yang tercipta lebih komunikatif, segar, cerdas dan menghibur," kata penulis antologi cerpen *Kastil Angin Menderu* dan *Lampor*.

Ditambahkan, kalau dirinya memiliki komitmen menghadirkan pemerhati dari Jerman, semata-mata ingin membangun dialog atau diplomasi kebudayaan secara setara, tanpa ada rasa rendah diri. "Pertanyaan yang selalu menggajal dalam diri saya, bisakah sastra Indonesia mencari jalan lain menuju Jerman," tanyanya. (Jay)-o

Kedaulatan Rakyat, 3 Oktober 2003

Fiksi Islami Masih Menjual

Buku fiksi Islami merupakan santapan yang sangat bergizi bagi anak-anak dan remaja, di tengah gencarnya serbuan globalisasi.

Suatu hari seorang cerpenis bertanya kepada penerbit buku fiksi Islami. "Apakah buku antologi cerpen yang belum lama ini diterbitkan cukup laris?" Bagaimanapun, sebagai seorang cerpenis yang karyanya ikut memperkuat buku antologi itu, secara moral ia ikut merasa bertanggung jawab terhadap penjualan buku tersebut.

Jawaban sang penerbit cukup mengejutkan. "Buku cetakan pertama sudah habis dalam waktu sebulan, Mas. Kini kami sedang mengurus cetakan kedua."

Dialog singkat itu menunjukkan fenomena bisnis buku fiksi Islami memang masih menjanjikan. Pasarnya masih terbuka luas. "Buku fiksi Islami prospektif sekali," kata Gola Gong kepada *Republika*, Kamis (9/7) di Jakarta.

Cerpenis dan novelis yang kini banyak menulis cerita Islami itu melihat bahwa pasar buku fiksi Islami masih menjanjikan. "Dewasa ini bermunculan banyak penerbit buku fiksi Islami, tapi 'kue bisnis' fiksi Islami juga makin besar. Sehingga, buku fiksi Islami masih menjual," tuturnya.

Hal itu, kata dia, tak lepas dari kesadaran baru yang muncul di tengah-tengah masyarakat Muslim Indonesia maupun dunia pada umumnya. Kesadaran itu termasuk sastra lewat tulisan fiksi. Menurutnya, fiksi Islami sangat cocok, karena bersifat menyejukkan.

Dia menambahkan, kini banyak orang tua yang dibikin repot oleh arus globalisasi. Mereka cenderung mencari bacaan yang sehat bagi

anak-anaknya. "Nah, buku fiksi Islami sangat bergizi dan cocok untuk menjawab kebutuhan," tandas Gola Gong.

Hal senada diungkap cerpenis Asma Nadia. Asma mengatakan buku fiksi Islami, baik antologi cerpen maupun novel sangat aman bagi ayah, kakak, maupun tante yang ingin membelikan buku fiksi untuk anak, adik maupun ponakannya. "Buku fiksi Islami aman dibaca oleh anak-anak kelas IV SD sekalipun. Meskipun ceritanya tentang sebuah kehidupan perkawinan, tidak ada bagian cerita yang berbahaya dibaca oleh anak-anak dan remaja," paparnya kepada *Republika*.

Menurut Majelis Penulis Forum Lingkar Pena (FLP) itu, pasar buku fiksi Islami masih tetap bagus. "Minat masyarakat masih tetap tinggi. Hanya saja, dengan makin banyaknya penerbit yang menerbitkan buku fiksi Islami, maka persaingan pun makin ketat. Para penerbit yang baru mulai memasuki bisnis fiksi Islami perlu melakukan langkah-langkah terobosan agar buku yang mereka terbitkan segera memperoleh tempat di masyarakat," tandasnya.

Di sisi lain, penulis yang meraih penghargaan Adikarya Ikapi itu mengingatkan para penulis (baru) agar jangan sekadar mengikuti tren menulis fiksi Islami.

"Idealisme dan *ghirah* (semangat keagamaan, red) memang penting. Tapi mereka juga harus kreatif melakukan *positioning*, agar karyanya segera mendapatkan posisi di kalangan peminat buku-buku fiksi Islami," tegas Asma yang kini

dipercaya menjadi chief executive officer (CEO) Lingkar Pena Publishing House.

Hal itu penting, kata Asma, karena tidak bisa dipungkiri bahwa pembaca masih melihat nama (besar) penulis. "Survei kecil-kecilan yang saya lakukan terhadap sejumlah penerbit menunjukkan buku-buku yang laris manis ternyata karya para penulis tertentu.

Sementara ada buku-buku lain yang kualitasnya sangat bagus, namun kurang laris karena nama penulisnya belum begitu dikenal oleh masyarakat pembaca. Di sinilah sekali lagi, pentingnya seorang cerpenis dan novelis Islam mencari dan menciptakan posisi yang paling tepat bagi dirinya," ujarnya.

■ irwan kelana

Republika, 10 Oktober 2003

SASTRA JAWA

Sastra Jawa Perlu Dihidupkan

YOGYA (KR) - Jika dicermati, keberadaan sastra Jawa bukan hanya sekedar bagian dari kesusastraan Indonesia. Lebih dari itu, sastra Jawa mengandung ajaran, nilai, dan falsafah kehidupan yang patut untuk dipertahankan dan dikembangkan. Karena itu, mereka yang memiliki kepedulian atas budaya Jawa, perlu 'turun tangan' menghidupkan sastra Jawa.

Demikian kata sastrawan Jawa, Handoyo Wibowo (52) — akrab dipanggil Koh Hwat — kepada KR, Selasa (30/9). Menurutnya, saat ini yang dibutuhkan adalah bagaimana *nguri-uri* bahasa Jawa dan sastra Jawa. Kandungan makna yang ada dalam sastra Jawa bisa dikatakan sebagai *pitutur* dan petunjuk kehidupan sehari-hari. "Masyarakat bisa belajar soal moralitas melalui sastra Jawa," katanya. Dengan demikian, sebenarnya masalah

degradasi moral yang kini sedang dihadapi oleh masyarakat bisa ditangkal dengan mempelajari sastra Jawa.

Dikatakan, bukan merupakan halangan bagi dirinya yang terlahir dari etnis Tionghoa untuk menulir sastra Jawa. Sastra Jawa tidaklah semata-mata menyangkut etnis dan bahasa Jawa, melainkan harus menyetujui pula soal esensi isinya. Bagi Handoyo, sastra Jawa harus mampu mengemban misi sebagai media sosialisasi budaya dan tata nilai sosial Jawa. "Tidak menjadi halangan bagi saya yang terlahir dari etnis Tionghoa, untuk turut memberikan kontribusi bagi perkembangan sastra Jawa," jelasnya.

Menurutnya, pemerintah harus memperhatikan masalah keberlangsungan sastra Jawa agar tidak hilang terlindas arus modernisasi. Harus diupayakan penanaman nilai-nilai kebudayaan dan nilai sosial Jawa se-

jak dini. Jika perlu, sejak anak usia sekolah dasar diberikan pemahaman budi pekerti tidak hanya melalui pelajaran budi pekerti semata-mata, melainkan juga memanfaatkan media sastra Jawa.

Selain itu, penerbit buku juga harus berani berspekulasi untuk menerbitkan karya sastra Jawa dalam bentuk buku. "Mungkin dalam persoalan bisnis penerbitan buku sastra Jawa bisa dikatakan rugi, tetapi menyangkut sumbangan bagi mental dan moral bangsa, tentu tak ternilai harganya," jelas Handoyo Wibowo yang pernah menerbitkan kumpulan geguritan (puisi berbahasa Jawa) dengan judul 'Nurani Peduli 1' tahun 2000 oleh Komunitas Sastra Indonesia (KSI), dan tahun 2002 menerbitkan kumpulan geguritan 'Nurani Peduli 2' dan kini sedang mempersiapkan kumpulan geguritan 'Nurani Peduli 3'. (Hrd)-o

Kedaulatan Rakyat, 2 Oktober 2003

SASTRA KEAGAMAAN

Kejar 10 Buku Cerpen

Asy Syamil dan Mizan boleh dibilang sebagai pelopor penerbitan buku-buku fiksi Islami. Kini jejak mereka diikuti oleh penerbit-penerbit (Islam) lainnya, seperti Gema Inisani Press (GIP) dan Senayan Abadi. GIP, mulai pertengahan tahun lalu menerbitkan buku novel dan kumpulan cerpen Islami.

Hingga saat ini GIP telah menerbitkan 12 judul fiksi Islami, baik kumpulan cerpen maupun novel. Misalnya, *Mencari Jalan ke Hati Bunda* karya Fithri, *Dunia Lain di Mataku* (Nostalgawan), *Berjuta Embun Surga* (Muttaqwiati), dan *Tembang Lara* (Pipiet Senja).

Menurut Manajer Pemasaran GIP Kusmato, hampir semua buku itu mengalami cetak ulang hanya dalam waktu satu atau dua bulan setelah cetakan pertamanya beredar. "Peluang bisnis buku-buku fiksi Islami masih sangat terbuka luas," kata Kusmanto kepada *Republika*.

Menurut dia, saat ini kebutuhan masyarakat terhadap buku fiksi Islami makin besar. Hal itu tak bisa dipisahkan dari makin tingginya kesadaran masyarakat terhadap ajaran agamanya, yakni Islam.

Di sisi lain, kini bermunculan para penulis fiksi Islami, baik cerpenis maupun novelis, yang namanya makin berkibar dan dikenal luas oleh publik. Seperti Gola Gong, Asma Nadia, Pipiet Senja, Sakti Wibowo, Afif Amatullah, Nurul F Huda dan lain-lain. "Jadi antara kebutuhan masyarakat dan kehadiran para cerpenis dan novelis Islam bertemu," tuturnya.

Berkait dengan itu, tambah Kusmanto, GIP akan terus menerbitkan buku-buku fiksi Islami. "Target kami minimal tiga buku fiksi Islami, baik novel maupun kumpulan cerpen, setiap bulan," tandasnya.

Tekad serupa diungkap oleh Manajer Senayan Abadi Ghalib Al Katiry. Penerbit yang baru tiga bulan melirik penerbitan buku fiksi Islami ini menegaskan akan menerbitkan sebanyak mungkin buku fiksi Islami.

"Target kami sampai Idul Fitri tahun ini dapat menerbitkan minimal 10 judul," ujar Ghalib.

Saat ini Senayan Abadi telah menerbitkan tiga buku antologi cerpen, yakni *20 Tahun Cinta, Wajah di Balik Jendela*, dan *Mengetuk Cintamu*. "Buku-buku antologi itu melibatkan para cerpenis Islam terkemuka saat ini, seperti Asma Nadia, Gola Gong, Ahmadun Yosi Herfanda, Isbedy Setiawan ZS, Fahri Asiza, Tary, M. Arman AZ dan lain-lain," paparnya.

Ghalib menjelaskan, saat ini pihaknya tengah menyiapkan beberapa judul antologi lagi. Menurutnya, sebanyak empat judul sedang proses setting, yakni *Tunggu Aku di Jogja, Bunga-bunga Cinta, Jalan Tuhan dan Pergi Bersama Angin*. Di dalamnya termasuk cerpen karya Pipiet Senja, Teguh Winarsho, Fakhrunnas MA Jabbar, Yus R Ismail, Dianing Widya, Azimah Rahayu, Chairil Gibran Ramadhan, dan Hanni Sofia.

Selain itu, tambah Ghalib, Senayan Abadi juga sedang menyiapkan empat antologi cerpen dari satu novel. "Kami berharap semuanya dapat diluncurkan kepada masyarakat sebelum lebaran tiba," katanya.

Direktur Senayan Abadi Husni Hasan mengatakan pihaknya serius menerbitkan buku-buku fiksi Islami. "Kami ingin menjadikan buku-buku fiksi Islami sebagai salah satu andalan utama Senayan Abadi, di samping buku-buku Islam lainnya (nonfiksi, {red})," ujarnya.

Berkait dengan itu, Senayan Abadi menyiapkan dua lini penerbitan fiksi, yakni lini pop dan sastra. Hal ini untuk memberikan lebih banyak pilihan kepada pembaca maupun para cerpenis dan novelis.

"Kami ingin menyajikan kepada khalayak, karya-karya terpilih dan dikemas menjadi buku yang indah dan berkualitas. Kami ingin, baik penulisnya maupun pembaca puas dan bangga dengan buku-buku yang kami terbitkan," katanya. ■ Ika

Sastra Religius Ahmad Tohari Dalam Ideologi Islami

Restoe Prawironegoro
Ibrahim

Cerpenis, Penyair, dan Budayawan

Nilai-nilai sastra religius yang tampak dalam novel-novel Ahmad Tohari sangat terasa dipengaruhi oleh kehidupan kesehariannya yang bernapaskan ideologi Islam, sehingga unsur-unsur religiusitasnya adalah agamis Islami. Hal ini dapat kita lihat pada novel-novelnya, seperti yang tertulis dalam sebuah nasihat dari kapten Somad pada Kamran, dalam *Kubah* yang berbunyi demikian: *Hari jiwa yang teduh tenang, kembalikan engkau kepada-Ku. Maka masuklah barisan hamba-hamba-Ku dan temuilah kedamaian abadi surga-Ku.*

Sebagai sebuah novel yang mengandung unsur dimensi religius agamis Islami, nasihat di atas yang sama menggunakan Al-Quran sebagai referensi utama, sesuai dengan surat Al-Fajr ayat 27-30, yang artinya: *Hai jiwa yang tenang kembalilah pada Tuhanmu dengan keadaan ridlo dan diridloi, yaitu masuklah di dalam (golongan) hamba-hamba-Ku. Dan masuklah ke surga-Ku.*

Cuplikan tersebut didasari oleh ajaran Islam yang mencerminkan adanya konsep ideologi Islam yang dianut (dipegang) si penulis/pengarang, dalam hal ini Ahmad Tohari sendiri. Bahwa kehidupan Ahmad Tohari sebagai orang Jawa dilatarbelakangi unsur-unsur budaya Jawa dan kehidupan yang sejak kecil telah akrab dengan surau dan masjid.

Lingkungan yang seperti itu ternyata juga banyak mempengaruhi karya-karyanya. Dengan munculnya filsafat Jawa yang terkandung dalam salah satu unsur religiusitas di atas dalam tembang *kastagetek*, sebagai berikut: *Aku mbiyen ora ana/Saiki dadi ana/Mbesuk maning ora ana/Pada balli marung Rahmatullah.*

Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa latar belakang kehidupan Ahmad Tohari sebagai orang yang dibesarkan dalam lingkungan Jawa berpengaruh dengan munculnya filsafat Jawa yang terkandung dalam tembang tersebut. Bila saja Ahmad Tohari bukan suku Jawa, ia mungkin tidak akan menangkap makna yang terkandung

dari tembang tersebut sehingga ia tidak akan mencantumkan dalam karya-karyanya.

Apalagi setelah ditilik dan dikaji ternyata tembang yang tampaknya hanyalah lagu kanak-kanak sederhana itu juga menggunakan Al-Quran sebagai referensi utamanya, yang tercantum dalam surat Al-Baqoroh ayat 28, yang artinya: *Mengapa kamu kafir pada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kemudian kamu dimatikan kemudian dihidupkannya kembali lalu padaNya kamu dikembalikan.*

Dari kenyataan-kenyataan tersebut di atas terlihat jelas adanya hubungan antara latar belakang Ahmad Tohari dengan unsur-unsur religiusitas yang terkandung di dalam karya-karyanya.

Hal itu terjadi karena disadari atau tidak tradisi budaya atau ideologi yang melingkari diri Ahmad Tohari seringkali tertuang dalam karya yang dihasilkannya. Wawasan imajinasi dan pengalamannya tidak terlepas dari aspek sosial budaya yang melingkupinya ataupun ideologi yang dianutnya.

Namun dari itu semua, ada hal yang perlu dijadikan patokan agar kita tidak salah dalam memahami maksud adanya hubungan latar belakang Ahmad Tohari dengan karya sastra yaitu bahwa karya sastra bukan merupakan "salinan" biografi Ahmad Tohari. Karya sastra hanyalah imajinasi penulis/pengarang tetapi secara tidak sadar mungkin latar belakang kehidupan pengarang ikut mempengaruhi. Dan kehidupan yang sejak kecil melingkari kehidupan pengarang karyanya.

Ajaran sesat

Lebih lanjut, unsur religiusitas dalam novel-novel Ahmad Tohari yang tecermin pada nasihat kapten Somad pada Kamran yang saat itu berada dalam pengasingan, tergambarkan adanya suatu jawaban permasalahan yang dihadapi Kamran—dalam penyampaian nasihat kapten Somad—mengenai kebenaran dan kesafahannya mengikuti ajaran atheis.

Kamran yang menjadi tahanan politik di Pulau B merasa dirinya sebagai orang buangan. Mentalnya semakin melemah, demikian juga dengan kondisi tubuhnya. Keadaan ini semakin parah ketika Marni, istrinya yang sangat dicintainya dan diang-

gapnya sebagai satu-satunya harta yang dimilikinya, menikah dengan lelaki lain. Karman benar-benar hancur luar dalam. Dalam keadaan seperti inilah kapten Somad datang dengan nasihatnya yang berusaha mengarahkan Karman supaya sadar mengenai keberadaan dirinya di dunia dan bersiap menghadapi kenyataan yang ada di dalam masyarakat. Hal ini menambah keyakinan pada diri Karman akan keragu-raguannya selama ini bahwa ajaran yang dipegangnya adalah ajaran yang sesat.

Akal dan nurani Karman telah kembali. Dengan digapainya kembali sesuatu yang perah ia pegang. Ia yakin dan ia miliki yaitu Tuhan Yang Maha Esa yang mutlak ajarannya.

Dari uraian di atas, unsur religiusitas tampak pada nasihat-nasihat kapten Somad yang menawarkan dan mengajak Karman untuk merenungkan apa dan siapa dirinya. Di sini nasihat kapten Somad menawarkan kepada Karman suatu perenungan ke arah kebaikan.

Pada akhirnya unsur religiusitas sastra juga tampak pada akhir cerita. Di saat sadar bahwa dulu ia berada di jalan yang salah, ia merasa kehilangan sesuatu yang kini dibutuhkan untuk mengisi kehidupannya. Yaitu kepercayaan masyarakat pada dirinya.

Sekembalinya dari pengasingan, Karman menawarkan diri dan menyanggupi membuat kubah masjid Haji Bakir yang telah disepakati jamaah untuk dipugar. Ia ingin dapat membuktikan pada masyarakat, bahwa ia bukan lagi seorang atheis.

Akhimya sebuah kubah (mahkota masjid) telah ia selesaikan dengan sempurna. Sebuah kubah yang indah dengan leher yang dihiasi kaligrafi, empat ayat terakhir surat Al-Fajr terbaca di sana.

Hai jiwa yang tentram, yang telah sampai kepada kebenaran hakiki. Kembalilah engkau kepada Tuhanmu. Maka masuklah engkau dalam barisan hamba-hamba-Ku. Dan masuklah engkau ke dalam kedamaian abadi, surga-Ku.

Peristiwa di atas juga menampakkan unsur religiusitas, hal ini tampak pada adanya keinginan Karman untuk mendapatkan kembali kepercayaan dari masyarakat, juga kesadaran Karman untuk mengangkat kembali martabatnya sebagai manusia dengan langkah pertamanya membuat kubah untuk masjid di desanya. Dari hal tersebut dapat dilihat adanya iktikad baik atau keinginan ke arah sesuatu yang lebih baik, yang tercermin dalam keputusan-keputusan yang diambil oleh Karman untuk menyelesaikan masalah kehidupannya.

Adegan sesaat itu ternyata mampu menggetarkan sikap atheis Karman. Hal itu juga disebabkan karean sebenarnya dalam

kehidupan Karman akhir-akhir ini banyak peristiwa yang telah menjadi perenungan, renungan yang merupakan usaha dalam mengubah hidupnya ke arah kebaikan, di saat nuraninya telah berbicara dan pengaruh ajaran atheis mulai luntur dari dirinya. Adegan tersebut membuat sikap atheis yang telah menipis dalam dirinya bergetar, ditambah lagi pada saat *Kastagetek* berseandung: *Aku mbiyen ora ana/Saiki dadi ana/Mbesuk maning ora ana/Pada bali marung Rahmatullah.*

Sebuah eksistensi kemanusiaan Tembang atau senandung di atas adalah sebuah tembang yang sederhana, bagi orang yang akrab dengan surau atau masjid tentu tidak asing lagi. Namun ternyata di dalamnya menyentuh tentang eksistensi manusia dalam istilah filsafat Jawa dikenal dengan ungkapan: *Sangkan paraning Dumadi* (dari mana asal manusia dan ke mana manusia pergi).

Kastagetek rakyat biasa, tukang rakit, namun seorang sosok manusia yang mengerti peranannya sebagai makhluk Tuhan. *Kastagetek* yang lugu dan tidak mengerti politik, ternyata dapat menangkap makna eksistensi manusia, dengan mendedangkan lagu tersebut. *Kastagetek* adalah manusia bebas yang menyadari ketergantungannya dengan masyarakat, alam dan Tuhan. Sikap hidup seperti itulah yang justru memungkinkan hadirnya keselarasan dan keharmonisan, lebih jauh lagi kebahagiaan.

Kastagetek yang miskin ternyata tidak merasakan kemiskinannya, malahan ia merasakan kebebasan dan kebahagiaan modalnya ia hidup dengan ikhlas. Ia kenal persis adanya makna eksistensi manusia yang terkandung dalam lagu tersebut.

Sikap hidup *kastagetek* yang lugu, bersahaja, dan tahu akan keberadaan dirinya sebagai makhluk Tuhan secara tidak langsung mempengaruhi Karman dan seolah-olah membawa nurani dan akalinya untuk berpikir tentang eksistensi dirinya. Sehingga secara otomatis timbul getar-getar suara hati dalam diri Karman untuk mencari jawabannya ke arah yang lebih baik.

Religiusitas sastra adalah seperangkat dimensi religius yang muncul dari sikap ide dan pandangan hidup atau penulis sastra yang akhirnya terefleksi dalam karyanya.

Sejalan dengan pengertian religiusitas, maka karya sastra yang di dalamnya termasuk novel yang berdimensi religius dapat dibedakan menjadi dua yaitu karya sastra yang religius agamis dan karya yang religius non-agamis.

Karya sastra religius agamis dapat dibedakan sesuai dengan agama yang dipeluk penciptanya, misalnya karya sastra religius agamis Islami, yakni karya sastra yang mendasarkan diri pada ajaran-ajaran agama Islam, karya religius agamis Kristiani

yakni karya sastra yang mendasarkan diri pada ajaran agama Kristen, karya sastra religius agamis Budhawi yakni karya sastra yang mendasarkan diri pada ajaran agama Budha, dan lain-lain.

Di samping itu, terdapat karya sastra religius agamis yang universal, yang tidak hanya terbatas mengacu pada satu jenis agama tertentu. ■

Republika, 26 Oktober 2003

buku

Musim Semi Fiksi Islami

Penerbit seumur jagung dan kelas kakap ramai-ramai membanjiri pasar dengan kumpulan cerpen islami. Temanya beragam dan tidak kaku. Publik menyambut dengan antusias.

Aku terdiam. Tak mampu lagi berbicara apa. Dalam keheningan malam yang beranjak jauh, tiba-tiba Nguyen berbicara lembut di telingaku. "Inilah saatnya Bang Rajab bisa menyentuhkan. Meski bukan di malam pengantin yang kita dambakan. Mudah-mudahan aku bisa menghapus rasa berdosa dan bersalahku yang abadi padamu. Dulu Bang Rajab telah menolaknya. Kuharap kali ini jangan lagi." Nguyen menutup pintu dan melepas gaunnya. Tapi aku tak kuasa menatapnya. Pantang-larang orang Melayu yang kuterima turun-temurun tak memungkinkan aku berbuat sesuatu yang tak lazim seukuran orang yang bukan suami-istri. Aku bergeming dan tetap berdiri mematung di tempatku. Nguyen jadi murka dan cepat-cepat berbenah. Di luar du-

gaanku, ia menghempaskan pintu dan cepat berlalu. Kucoba mengejarnya, tapi malam telah melennanya lebih dulu."

Penggalan cerita ini berasal dari cerita pendek karya Fakhrunnas M.A. Jabbar, penulis muda dari Kepulauan Riau. Cerita pendeknya yang berkisah tentang laki-laki Melayu yang menanti kekasihnya, seorang pengungsi Vietnam, itu dimuat dalam kumpulan cerpen islami, *Wajah di Balik Jendela*. Fakhrunnas yang tinggal jauh dari Jakarta hanya satu dari sekian penulis yang karyanya diterbitkan dalam kumpulan cerpen itu. Sejumlah nama lainnya boleh dibilang sudah lama dikenal di dunia sastra lokal. Kurnia Effendi dan Gola Gong di antaranya.

Dengan sampul bernuansa pastel warna merah muda dan ungu, buku mungil dan ringkas yang mengumpulkan cerpen bertema islami ini sepiantas tampak tak ubahnya seperti *chick-lit*, novel-novel ringan impor untuk pembaca perempuan yang kini membanjiri pasar buku. "Kami memang sengaja mengemas buku kumpulan cerpen ini dengan penampilan semenarik mungkin," kata Ghalib Alkatiri, direktur PT Senayan Abadi, yang membawahkan Lazuardi Printing, penerbit buku ini. Harganya pun dibuat bersaing, Rp 15 ribu hingga Rp 25 ribu. Meski bertema agama, buku kumpulan cerpen ini tak mesti mengu-

rangi penampilannya di mata pembaca. "Kami ingin pembaca bangga saat membaca buku ini di ruang-ruang publik," katanya.

Senayan Abadi memilih menerbitkan kumpulan cerpen bertema islami karena melihat tanggapan pasar yang cukup bagus terhadap karya fiksi bertema religius. Itu ditandai dengan maraknya penerbitan novel untuk remaja dan kalangan muda yang berangkat dari tema islami. Baiknya sambutan publik terhadap fiksi islami karya Helvy Tiana Rosa dan Gola Gong adalah salah satu indikatornya. Selain itu, Ghalib mengaku pihaknya ingin membangkitkan kembali masa kejayaan kumpulan cerpen yang pernah melanda Tanah Air pada dekade 1980-an. "Bedanya, dulu yang banyak muncul di pasar adalah kumpulan cerpen bertema umum," kata pria berusia 25 tahun yang pernah bergabung dengan sebuah penerbitan besar lokal ini.

Dengan bekal semangat itu, penerbit yang baru berusia satu tahun ini pada Agustus silam meluncurkan kumpulan cerpen islami yang merangkum sejumlah pe-

nulis fiksi yang sudah dikenal di Tanah Air. Beberapa penulis muda berpotensi ikut digaget pula untuk mengisi buku ini. Tak tanggung-tanggung, mereka menerbitkan tiga buku sekaligus: *20 Tahun Cinta, Wajah Di Balik Jendela, dan Menggapai Cintamu*. Ketiga buku ini dilempar ke pasar dengan jumlah tiga ribu hingga lima ribu eksemplar. Sambutan pasar ternyata luar biasa. "Tbu-ibu muda yang bekerja dan para mahasiswi adalah pembaca utama buku ini," katanya.

Menurut Ghalib, perempuan adalah target pasar dengan keinginan dan kemampuan belanja yang kuat. Tema yang terangkum dalam kumpulan cerpen ini memang mengena ke pasar yang dibidik. Ceritanya pun tak melulu berat. Ada yang menceritakan kisah kasih seorang dosen eksakta di Bandung dengan artis cantik yang kemudian memutuskan berkerudung, ada yang menulis tentang penggali makam, atau kisah kasih tak biasa antara Nguyen pengungsi Vietnam dan Rajab, seperti dicuplik di atas.

Dua bulan di pasar, *20 Tahun Cinta* sudah mengalami cetak ulang. "Ada yang bilang ini termasuk luar biasa untuk ukuran penerbit kecil seperti kami," kata Ghalib merendah. Tak berhenti di sana, bulan ini Senayan Abadi kembali meluncurkan empat judul baru. Gerak Senayan Abadi sungguh cepat. Rencananya, hingga Lebaran mendatang, setidaknya 10 buku sudah diluncurkan ke pasar. Gerak cepat ini juga tampak dari kerja tim penerbit. Irwan Kelana, penyunting cerpen, mengaku bekerja keras dalam hitungan pekan untuk menyeleksi belasan karya. "Begitu satu karya selesai disunting, langsung disetor ke tim desain untuk dikerjakan," katanya. Sementara ia bekerja, tim desain terus pula menggarap perwajahan. Tak heran jika dalam waktu dua bulan tiga empat judul baru bisa terbit.

Selain itu, Senayan Abadi juga bergerak cepat dalam

membayar honor para penulis

yang karyanya dimuat. Dianing Widia Yudistira, penulis muda yang karya fiksi dan puisinya kerap menang dalam beragam lomba tingkat nasional, mengaku terkejut-kejut saat menerima honor untuk cerpennya yang baru akan muncul Lebaran nanti. "Cepat sekali mereka membayar penulis," katanya seraya terkekeh. Sukses buku kumpulan cerpen islami ini mengantar Senayan Abadi ke posisi yang lebih baik. "Setiap bulan Gunung Agung memberi tempat untuk bedah buku," katanya ceria.

Penerbit kecil lainnya yang juga awet berkiprah di ladang fiksi islami adalah PT Syaamil Cipta Media yang berbasis di Bandung. Penerbit yang melejitkan karya-karya penulis Forum Lingkar Pena ini dikenal sebagai penggagas munculnya ikon cerita remaja islami lewat penerbitan karya Helvy Tiana Rosa. Menurut Agus Trianto, dari lini Tamadun Jagat Sastra PT Syaamil Cipta Media, pihaknya menerbitkan buku-buku yang mengaggas nilai universal Islam ke dalam bentuk karya intelektual berupa buku. "Agar tidak terjadi salah pengertian, buku-buku islami yang diterbitkan adalah buku yang menyuarakan keindahan dan keluhuran Islam dalam karya fiksi dan nonfiksi," katanya. Karena itu pula, mereka tak menerbitkan buku agama baku. "Pada prinsipnya, tema apa pun, sepanjang mengajak manusia mencintai dan mengajak berbuat kebajikan, maka itulah tema yang diterima Syaamil," katanya. Mereka menjaring penulis muda dari beragam daerah di Tanah Air, dari Jakarta hingga Kalimantan Timur, terutama mereka yang tergabung dalam Forum Lingkar Pena.

Menurut Agus, Syaamil menerbitkan buku-buku islami yang segar, dinamis, penuh pembahasan, dan *up to date*. Ia lantas mencontohkan beberapa buku, seperti *Ketika Mas Gagah Per-*

gi karya Helvy Tiana Rosa, *Pingkan Sehangat Mentari Musim Semi* karya Mutmainnah, *Aisyah Putri* karya Asma Nadia, sebagai buku kumpulan cerpen yang menjadi *best-seller*. Buku-buku *best-seller* itu telah dicetak lebih dari

25 ribu eksemplar. "Sejak menerbitkan buku-buku itu, nama Syaamil mulai dikenal publik secara luas, karena kami memanfaatkan pangsa pasar yang khusus, yakni konsumen muslim," kata Agus.

Gurahnya bisnis buku fiksi islami ini juga memikat penerbit besar seperti Gema Insani Press (GIP) dan Mizan untuk menerbitkan tema serupa. GIP misalnya sudah menerbitkan lima judul kumpulan cerpen remaja islami dengan tebal rata-rata 240 halaman. Pipiet Senja, penulis fiksi yang sudah menulis sejak era 1980-an, termasuk yang karyanya pernah dibukukan. Menurut Siti Aminah, Kepala Seksi Penerbitan Remaja GIP, satu buku bisa saja berisi karya satu hingga dua penulis atau lebih. Temanya beragam, mulai dari kisah keseharian remaja kampus hingga mimpi seorang tukang fotokopi. Mereka juga tak menafikan cerpen dengan tema percintaan remaja. "Tentunya yang bernapas Islam," katanya. Siti Aminah menolak jika tema-tema islami hanya berkutat pada doktrin yang kaku. "Tema keabadian yang universal sendiri adalah hal yang dianjurkan dalam Islam," katanya.

Senada dengan penerbit lainnya, Gangsar Sukrisno, Manajer Humas dan Promosi Mizan Publika, mengatakan, tema Islam tak selalu berarti cuma ungkapan istigfar saja. "Kami (Mizan) juga menerbitkan buku kumpulan cerpen seperti itu. Kami beri label Nori (Novel Remaja Islam)," kata Gangsar. Fiksi remaja terbitan Mizan ini dibuat segar dan tak menggurui. Ada buku Nori yang berkisah

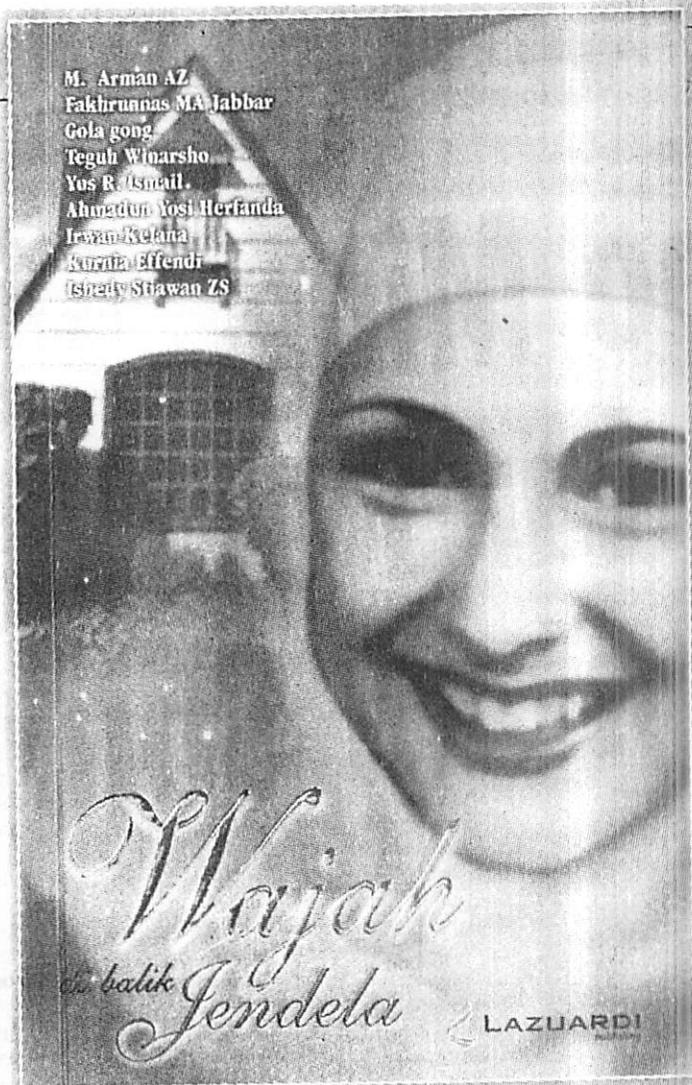
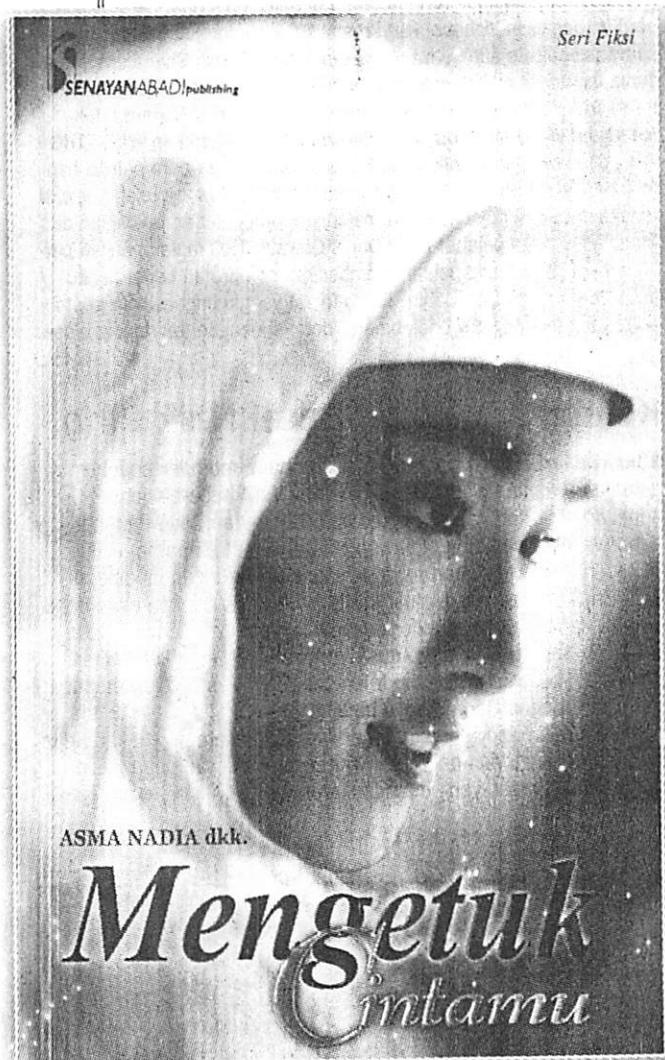
tentang pacar yang sabar dan tak posesif. Bahasa yang digunakan pun khas remaja seperti bahasa gaul.

Sama seperti penerbit lainnya, Gangsar mengaku pihaknya melihat pasar fiksi islami

ini lumayan cerah. "Sekarang ini sudah jarang sekali buku atau majalah yang berisi cerpen seperti ini. Dulu ada *Anita Cemerlang*, tapi kan sekarang sudah tak ada lagi," katanya. Padahal, anak-anak muda senang

membaca cerpen. Karena itulah Mizan sampai mencetak ulang buku seperti ini. "Jumlahnya bisa mencapai lima ribu eksemplar," katanya.

● rian suryalibrata/angela



SASTRA MELAYU

Bukti Kekayaan Kesusastraan Melayu Rendah



YANG TERLUPAKAN

BUKU-buku resmi menyatakan, kesusastraan modern Indonesia bermula dari kemunculan penerbit Balai Pustaka yang didirikan oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda, 22 September 1917. *Azab dan Sengsara*, sebuah roman karya Merari Siregar, terbit pada tahun 1920, dianggap sebagai karya sastra modern pertama Indonesia.

KARYA-karya sastra terbitan Balai Pustaka pada tahun 1920-an tersebut kemudian dikenal sebagai Angkatan Balai Pustaka, yang selama beberapa lama dianggap sebagai angkatan pertama kesusastraan modern Indonesia. Belakangan, pernyataan Balai Pustaka sebagai perintis kesusastraan modern Indonesia digugat banyak kalangan seiring dengan penemuan karya-karya sastra yang terbit di akhir abad ke-19, sebelum Balai Pustaka didirikan. Hasil beberapa penelitian di bidang sastra dan sejarah menunjukkan begitu banyak karya sastra dihasilkan pada saat itu, namun karya-karya tersebut bisa dikatakan sekian lama tenggelam justru setelah Balai Pustaka didirikan. Penerbit ini melakukan seleksi ketat terhadap naskah-naskah yang akan diterbitkan. Seleksi yang dilakukan Balai Pustaka—terutama dalam tema dan bahasa (Melayu tinggi)—dinilai ditunggangi kepentingan pemilikinya, yaitu Pemerintah Hindia Belanda.

Pada beberapa edisi sebelumnya pernah ditampilkan tiga roman sastra berbahasa Melayu rendah, yaitu *Tjerita Njai Dasima Soewatoe Korban Para Pemboedjoek* (G Francis), *Student Hidjo* (Marco Kartodikromo), *Sair Tjerita Siti Akbari* (Lie Kim Hok), dan *Dari Boedak Sampe Djadi Radja* (Melati van Java). Ketiga buku ber-

bahasa Melayu rendah tersebut beberapa lama tidak pernah disinggung-singgung dalam kesusastraan Indonesia. Dan, terdapat ribuan naskah terbitan abad ke-19 yang bernasib sama, yaitu tidak diperhitungkan sebagai karya sastra Indonesia. Padahal, karya-karya yang beredar saat itu mencakup semua genre sastra, puisi, maupun prosa. Bahkan, karya sastra untuk seni pertunjukan drama atau naskah drama tertua yang ditemukan, berbahasa Melayu rendah. Salah satu dari naskah tersebut, *Lelakon Raden Beij Soerio Retno*, terbit pada tahun 1901, dikarang oleh F Wiggers. Sang Pengarang, yaitu F Wiggers, pada abad ke-19, dikenal sebagai jurnalis dan terlibat langsung dalam produksi karya sastra. Banyak karya yang telah ia hasilkan, termasuk roman terjemahan *Dari Boedak Sampe Djadi Radja* karya Melati van Java (*Kompas*, 16 Agustus 2003).



NASKAH *Lelakon Raden Beij Soerio Retno* dimulai dengan cerita singkat pengantar drama yang dibagi dalam dua bagian. Kisah yang diangkat adalah mengenai tragedi kematian seorang *collecteur*, pejabat pajak, yang bernama Raden Beij Soerio Retno atau disingkat Raden Beij. Drama *Lelakon Raden Beij Soerio Retno* dimulai dengan menampilkan aktivitas di ruang kerja Raden Beij, seorang

collecteur teladan. Karena pengabdian-nya, Raden Beij dianugerahi bintang emas. Bagi Raden Beij, keteladanan dalam pengabdian dan penghargaan yang ia terima dari Pemerintah Hindia Belanda adalah sangat berharga.

Raden Beij dan sang istri mempunyai dua anak, yaitu Raden Ongko dan Kartani. Raden Ongko yang studi kedokteran di Betawi sangat disayang ibunya. Apa pun permintaannya akan dikabulkan sang ibu. Akibatnya, Raden Ongko menjadi manja. Di Betawi, ia suka menghambur-hamburkan uang. Raden Beij sangat prihatin dengan ulah istri dan Raden Ongko anaknya. Sang istri bahkan tega menggadaikan perhiasan milik Kartani demi memenuhi permintaan Raden Ongko.

Suatu hari, Raden Ongko menemui ayah dan ibunya untuk meminta uang sebesar lima ratus rupiah. Di masa itu, uang satu rupiah senilai dengan 25 kilogram beras. Berarti untuk uang lima ratus rupiah, bernilai 12,5 ton beras. Dibandingkan dengan masa kini, harga beras sekitar Rp 5.000 per kilogram, berarti uang sejumlah lima ratus rupiah di masa Raden Beij setara dengan Rp 62,5 juta.

Raden Beij yang sudah tidak tahan dengan kelakuan sang anak, tidak mengabdikan permintaan itu. Meski Raden Ongko menyinggung-nyinggung soal aib yang akan dipikul kedua orangtuanya, keputusan Raden Beij tidak berubah.

Raden Ongko akhirnya nekat meminta sang ibu untuk mengambil uang dari brankas tempat penyimpanan setoran pajak milik Raden Beij. Lagi-lagi, sang ibu terbuju. Namun, malang tak dapat ditolak, Raden Beij menangkap basah ulah ibu dan anak tersebut. Dengan putus asa, Raden Beij akhirnya mengambil sendiri uang dari brankas, dan menyuruh anak beserta istrinya keluar dari kamar kerja. Cerita berakhir dengan bunyi letusan pistol. Raden Beij memilih mengakhiri hidup daripada harus menanggung malu atas "ke-

curangannya".

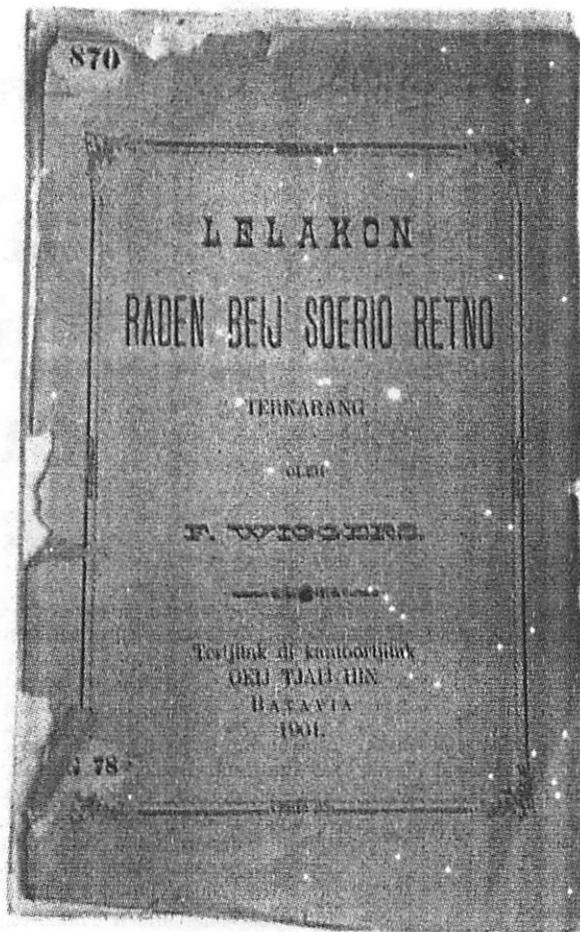


DEMIKIAN naskah drama *Lelakon Raden Beij Soerio Retno*. Tidak diperoleh keterangan lebih lanjut tentang kapan pertama kali drama Raden Beij dipertunjukkan. Baru pada tanggal 25-26 Februari 1994 drama ini tercatat dipentaskan oleh Teater Pagupon IKSI-UI di Erasmus Huis, Jakarta.

Sebelum ditemukan *Lelakon Raden Beij Soerio Retno*, naskah drama berjudul *Bebasari*, karya Rustam Effendi yang terbit pada tahun 1926, dinyatakan sebagai naskah drama tertua. Rustam Effendi sendiri selanjutnya dikenal sebagai sastrawan Angkatan Pujangga Baru, setelah Angkatan Balai Pustaka. Berbeda dengan sastra drama berbahasa Melayu rendah, *Bebasari* ditulis dalam bentuk sajak. Seluruh isi drama bersifat simbolik bermuatan semangat pergerakan nasionalisme. Dengan demikian, setelah naskah drama Melayu rendah, baru pada Angkatan Pujangga Baru ditemukan karya-karya sejenis.

Menilik dari tahun kelahiran Balai Pustaka dan karya-karya cetakan yang terbit sebelumnya, wajar jika dikatakan kesusastraan modern Indonesia telah dimulai sejak ada karya-karya berbahasa Melayu rendah, pasar, Tionghoa ataupun Melayu Betawi. Dan, *Lelakon Raden Beij Soerio Retno* menjadi salah satu karya sastra Melayu rendah dengan mutu tinggi.

(NOVA CHRISTINA/LITBANG KOMPAS)



Judul: *Lelakon Raden Beji
Soerio Retno*
Penulis: **F Wiggers**
Penerbit: Oeij Tjai Hin
(Batavia, 1901)
Tebal: 56 halaman

NOVA CHRISTINA

Kompas, 18 Oktober 2003

SASTRA MELAYU-TEMU ILMIAH

CATATAN DARI PERTEMUAN SASTRAWAN NUSANTARA XII
SINGAPURA DAN MALAYSIA

Menegaskan Kembali Jati Diri Sastra Melayu

Oleh Handy Salad

MELALUI jendela kamar lantai 31 hotel berbintang lima -Meritus Mandarin- di Orchard Road pusat kota Singapura, tempat kami menginap, separuh negeri berlambang kepala singa itu terlihat rapi. Lingkar jalan, gedung-gedung pencakar langit dan pohon hijau saling memadu dalam kemegahan. Segitiga Emas memancarkan cahaya sepanjang garis perbatasan laut yang tertimpa matahari senja. Tapi Indonesia, negeri kesatuan tercinta, seakan kabut dalam deretan kapal para nelayan. Tak ada tangan waktu yang bisa mendorong pikiran untuk mengingat kemacetan dan kesumpekan kota Jakarta. Bahkan juga, kampung halaman tempat lahir kami menjadi kabur untuk dibayangkan, kecuali pada legenda, hikayat dan kisah-kisah kesempurnaan manusia yang masih bertengger dalam "imajinasi" kepala kesusastastraan kita. Kesusastastraan Melayu Nusantara. Dan karena ruh kesusastastraan itu pula, kami berada di Singapura. Mengikuti PSN XII (Pertemuan Sastrawan Nusantara ke-12), sekaligus juga menyaksikan orang-orang berdiri tertib di bawah lampu penyeberangan, atau melajur dalam lingkaran halte untuk sekadar menunggu bus kota.

Di sepanjang keramaian metropolis Orchard Road yang nyaris steril, kami sempat bersantai, menyusuri taman trotoar dan jalan pintas bawah tanah (*underpass*), dengan mulut yang selalu mengomel, tak habis-habisnya mengejek dan mencaci arsitektur kota di negeri zamrut khatulistiwa. Dan di ujung *underpass* itu, tiba-tiba saja, tubuh kami terbawa eskalator ke tengah plaza, tempat para kuruptor dan pejabat kita menghabiskan rupiah tanpa merasa berdosa. Hingga mulut kami terasa pahit untuk mengunyah kutukan pada kesuburan dan kemakmuran Indonesia yang masih saja hanya menjadi bahan pidato para penguasa.

Namun kami masih bisa bangga dengan sejarah dan perkembangan kesusastastraan Indonesia, sekaligus berikhtiar untuk memperkenalkannya dalam percakapan antar peserta. Sebagaimana juga yang dilakukan para sastrawan Melayu Singapura untuk memperkenalkan sejarah dan peristiwa kesusastastraannya melalui poster-poster mewah yang digantung pada setiap dinding tempat para sastrawan Nusantara itu bertemu.

Meski kurang populer dalam percaturan sastra Asia Tenggara, tokoh-tokoh sastrawan Nusantara yang berjaya di Singapura, yang kemudian dikenal dengan -Asas'50 atau Angkatan Sasterawan '50- telah berhasil menegakkan panji-panji kesusastastraan Melayu dengan jalan menyelenggarakan Pertemuan Sastrawan Nusantara untuk pertama kalinya pada tahun 1977. Sejak itu pula, Asas'50 telah dinyatakan sebagai gerakan sastra yang tidak saja berusaha un-

tuk menggalang kesatuan para pengarang, tetapi juga melakukan gerakan-gerakan strategis yang terkait dengan usaha pemerintah dalam pembentukan dan pengembangan budaya Melayu di Singapura.

Maka tidaklah mengherankan jika PSN XII (12-14 September 2003) di Singapura untuk yang ketiga kalinya ini (yang kedua pada tahun 1991), dilaksanakan secara megah dalam kompleks Hotel Meritus Mandarin. Dengan tema "Sastera Melayu Warisan Jati Diri dan Jagad", pertemuan para sastrawan regional itu dibuka oleh Kementerian Wilayah dan Urusan Islam Singapura. Melalui pidato dan pesan kontekstualnya, sambutan itu terasa padu dalam menyentuh aspek-aspek pragmatis kesusastastraan di tengah perubahan sosial dan budaya masyarakat Melayu.

Tokoh-tokoh sastrawan Nusantara dari negeri serumpun yang hadir dalam pertemuan tersebut, seperti Dr. Zainal Kling (Singapura), Dr. Morsidi Bin Muhammad (Brunei), Dr. Paitoon M. Chaiyanara (Thailand), Dr. Abdul Rahman Napiah (Malaysia) dan Dr. Taufik Ismail (Indonesia), secara resmi telah ditunjuk sebagai pembicara utama. Walau dengan waktu yang sangat terbatas, para tokoh itu memiliki refleksitas yang memadai untuk mengungkapkan perkembangan dan pergulatan sastra di negerinya masing-masing. Yang kemudian berusaha untuk mempertemukan esensinya pada apa yang di sebut dengan jati diri sastra Melayu. Lalu disusul dan dilengkapi oleh pemakalah-pemakalah lain yang mewakili generasi muda sastrawan Nusantara.

Sebagian dari mereka, memiliki kecenderungan untuk mengingatkan para sastrawan dan seniman serumpun agar lebih kritis dan progresif dalam proses kreatifnya. Sehingga karya-karya yang dihasilkan tidak terjebak dalam lingkaran modernitas yang mengabaikan etika, estetika dan premis-premis agama yang menjadi jati diri sastra Melayu.

Sebagian lain, berupaya untuk meyakinkan keunggulan sastra Melayu dalam menghadapi dan menyerap berbagai perkembangan budaya asing. Dan karena itu, sastrawan Melayu tidak perlu merasa gamang untuk berproses secara literer di luar tradisi dan rumpun budayanya. Namun begitu, upaya-upaya peningkatan apresiasi dan penghargaan sastra di kalangan muda, tidak semestinya untuk diabaikan dalam konteks kebangsaan. Hingga sastra Melayu senantiasa masih dapat bernafas dengan lega di tengah serbuan berbagai informasi maya.

Barangkali saja, itu juga sebabnya, pertemuan ini banyak diikuti oleh guru-guru bahasa dan sastra Melayu dari Singapura, serta sastrawan-sastrawan muda dari Asia Tenggara. Sedangkan tokoh-tokoh Asas'50 yang masih berjaya dan menjadi panitia penyelenggara seperti Suratman Markasan, Jamal Tukimin, Johan Buang dan Masuri Sa-

likun masih tampak kesegarannya dalam menyambut dan mengolah gagasan para pembicara maupun peserta.

Sastra Dimensi Segar

Satu hari sesudah mengikuti PSN XII di Singapura, kami bersama Hamid Jabbar, Jamal D. Rahman, Suminto A. Sayuti dan Ati Ismail (direktoris Majalah Sastra Horizon) melanjutkan perjalanan menuju Kuala Lumpur. Dan di negeri jiran itu, kami berkunjung ke Dewan Bahasa dan Pustaka (memiliki kantor berlantai 35), yang lokasinya cukup ditempuh dengan jalan kaki dari Hotel Mirama, tempat kami bermalam. Namun acara kami yang utama ialah mengadakan silaturahmi sastra dengan lingkaran komunitas GAPENA (Gabungan Persatuan Penulis Nasional Malaysia).

Kedatangan kami di markas GAPENA disambut secara formal oleh Datuk Tansri Ismail Husein dan Siti Zainon Ismail. Kemudian melakukan diskusi dan baca puisi dengan tajuk "Sastra Dimensi Segar". Dalam acara tersebut, Suminto A. Sayuti dan Jamal D. Rahman menjadi pembicara, sementara saya dan Hamid Jabbar membaca puisi. Hadir diantaranya para sesepuh pengurus GAPENA seperti Datuk Wahab, Ahmad Kamal Abdullah, T Alias Thaib, serta penyarah tamu Victor A. Pogadev (Dosen bahasa-bahasa Asia Universiti Malaya), dan Wisran Hadi (dosen teater Akademi Seni Kebangsaan). Tampak juga diantara mereka penulis-penulis muda yang baru menanjak namanya seperti Faisal Tehrani (yang pernah ke Yogya dan wawancara dengan saya tentang sastra Islam Indonesia) dan SM. Zakir. Di

samping itu, hadir juga para seniman dan teaterawan Kuala Lumpur.

Meski pembicaraan dalam acara silaturahmi tersebut didominasi oleh masalah perkembangan mutakhir sastra Indonesia dan Malaysia, forum itu juga berkembang dalam percakapan aspek-aspek budaya, politik dan sosial, bahkan merasuki wilayah khas yang terkait dengan perkembangan semantik, rasa bahasa dan estetika. Setelah acara itu usai, kami keliling kota bersama Siti Zainon Ismail yang sekaligus menjadi pengemudi yang lincah, lalu berhenti untuk menikmati malam dan sate padang dalam keramaian Kampung Melayu, sampai akhirnya kami kembali ke penginapan. Sebelum tidur malam itu, kami buka jendela kamar dan melihat lampu-lampu kemegahan Tower Kuala Lumpur, Gedung Petronas (yang terkenal itu), juga stasiun-stasiun kereta monorel yang masih menyala di atas jalan raya utama. Terlintas juga dalam kemegahan itu, seandainya pemerintah kita juga menghargai seni-budaya sebanding pemerintah Malaysia dalam menganugerahi sastra dan pembangunan fasilitas sosialnya.

Dan ketika matahari menyala kembali, kami berangkat menuju kota di puncak bukit Genting Highland (kurang lebih 100 km dari Kuala Lumpur), tempat rekreasi orang biasa, sekaligus juga menjadi pusat perjudian di Asia. Untuk sampai ke Highland, dari kota kecil perbatasan, kami turun dan memilih untuk menuju puncak dengan naik kereta gondola (*skyway* terpanjang di dunia) sembari mengetes kesehatan jantung kami. Dan *skyway*-pun berjalan, melintasi jurang dan hutan-hutan, juga perkebunan karet, seolah kami sedang mencari saudara sendiri yang sedang bekerja (dan tersiksa) di tengah belantara tak bernama itu. □ - m

*) Hamdy Salad, dosen luar biasa FBS-UNY.

Kedaulatan Rakyat, 12 Oktober 2003

SASTRA NOBEL

Lelaki Putih di Dunia Hitam

J.M. Coetzee sudah lama dijagokan memenangkan Nobel Sastra. Piawai sebagai novelis ide.

SEPERTI Pramoedya Ananta Toer, Harry Mullisch, dan sebelumnya, V.S. Naipaul, nama John Maxwell Coetzee lama mengapung di udara Stockholm, sebelum akhirnya disebut sebagai pemenang Nobel Sastra 2003, dengan hadiah US\$ 1,3 juta. Dibandingkan dengan pemenang tahun lalu, Imre Kertész, atau Gao Xingjian (2000), Coetzee telah lama lebih dikenal secara internasional. Khususnya ketika ia mengukir sejarah, jadi orang pertama yang dua kali memenangkan Booker Prize dengan novelnya, *Disgrace*, pada 1999.

Hadiah Nobel Sastra tahun ini makin mengentalkan kesan bahwa ada kriteria nonsastrawi, biasanya ukuran (paham) humanisme sang pengarang, yang jadi timbangan akademi. Dalam hal Coetzee adalah perlawanannya terhadap politik apartheid Afrika Selatan, negeri tempat ia dibesarkan. Coetzee kini tinggal dan mengajar di Universitas Adelaide, Australia.

Novel pertamanya, *Dusklands* (1974), menajarkan dua narasi — dari seorang lelaki pegawai administrasi Amerika di tengah Perang Vietnam dan dari seorang pionir Boer abad ke-18 yang membuka penjajahan Afrika Selatan. Secara tersirat, di sini Coetzee menajarkan sistem politik Afrika Selatan yang ia alami dengan kedegilan Amerika di Vietnam.

Puncak "perlawanan"-nya terhadap apartheid adalah *The Life and Times of Michael K*, yang memenangkan Booker Prize 1984. Novel "autistik" ini menyelami hidup seorang tukang kebun kulit hitam yang terbelakang, dalam mengalami dunia yang berai oleh perang rasial. Dalam novel ini tampak kemampuan luar biasa Coetzee untuk menyusup masuk ke alam pikir liyan, mereka yang lain, *the other*. Orang kulit hitam, perempuan gila, perempuan tua, Dostoyevsky: semua tokoh sulit dalam novel-novelnya tampil otentik, meyakinkan dan dalam.

Dalam *The Life...*, dunia K adalah dunia yang runtuh, sesuatu yang digali lagi oleh Coetzee dalam *Waiting for the Barbarians* (diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh Sori Siregar dan Rayani Sriwidodo menjadi *Jeritan Hati Sang Hakim*). Dunia runtuh K dan dunia dalam *Waiting...* adalah dunia kelim, dunia hitam otoritarianisme apartheid. Ketika Coetzee tak secara langsung menulis tentang dunia hitam itu, kita tetap bisa menangkap dunia kelim yang sama.

Seperti tampak dalam dua meta-novel (novel tentang novel), *Foe* dan *Master of St. Petersburg*. Dalam novel *Master...*, Coetzee memparafrasekan kehidupan Dostoyevsky dalam dunia yang juga sedang runtuh — sebuah simulasi yang menyerupai keruntuhan dunia apartheid Afrika Selatan. Tapi, ketika apartheid sendiri runtuh, apakah runtuh pula relevansi Coetzee?

Tidak, jawab Coetzee lewat *Disgrace*. Novel ini adalah titik balik, sebuah santir (bayangan dalam cermin) dari dunia Michael K. David Lurie, protagonis novel ini, adalah santir K: kulit putih, profesor sastra, cemerlang. Dunianya juga santir dari dunia K: sebuah dunia pasca-apartheid. Tapi, seperti santir juga menyimpan ciri umum benda yang sedang di depan cermin, kekelaman yang sama tetap ada pada dunia baru itu.

David jatuh dalam kehinaan karena kehilangan posisi di dunia baru itu. Ia mengungsi ke pedesaan, ke rumah putrinya, Lucy. Sampai suatu saat mereka diserbu segerombol orang kulit hitam. Lucy diperkosa secara brutal. Aparat tak melakukan apa-apa. Perlahan, Coetzee mengupas bahwa sebenarnya Lucy diperkosa dunia baru itu: otoritarianisme telah berganti dengan anarkisme. (Tidakkah kisah ini juga relevan bagi situasi Indonesia kini?).

Tapi, dengan *Disgrace* pula, Coetzee diam-diam menyatakan relevansinya yang lain: sebagai salah satu kuncen alam pikir Barat terpenting saat ini. Dalam novel ini jelas

bahwa Coetzee juga bersiluncur dalam arus ide peradaban Barat: diskusi-diskusi, wacana-wacana, teori-teori, bukan cuma berseliweran, tapi malah menjadi mesin penggerak kisah. Posisi ini makin nyaring dinyatakan dalam novel terbarunya, Elizabeth Costello (2003).

Terhadap novel ini, sebuah artikel *The Observer* (14 September) sampai bertanya: "Ini amatlah novel, tapi apakah ini benar-benar sebuah novel?" Sebab, novel ini dengan sadar menjadi risalah tentang delapan hal, dari soal realisme hingga soal eros dan kehidupan akhirat. Dua babnya —tentang hubungan hewan dan peradaban manusia— malah terbit lebih dulu sebagai ceramah tentang hak-hak asasi hewan.

Cobalah Anda baca ketika Coetzee mendeskripsikan sang tokoh utama:

"Kostum biru, rambut berminyak, adalah detail-detail, tanda dari sebuah realisme moderat. Sediakan yang partikular, biarkan pemaknaan muncul dengan sendirinya. Sebuah prosedur yang dipelopori Daniel Defoe."

Jangan-jangan memang inilah sebab Akademi Swedia memilih Coetzee: karyanya penuh nilai keserjanaan, menjadi semacam penangkaran sejarah pemikiran (paling tidak sejarah sastra) Barat yang inspiratif. Ini posisi yang menarik bagi pembaca Indonesia. Sebab, sejak kegagalan Sutan Takdir Alisjahbana dengan novel-novel idenya, novel ide ("sastra bertendens") sering dilecehkan dalam sejarah sastra kita. Dan dengan itu, timpanglah sastra kita, lebih banyak terisi oleh sastra yang kurang pikir, mengagung-agungkan modus "merasa-rasa". □

HIKMAT DARMAWAN
EDITOR DAN PENERJEMAH

Gatra, 18 Oktober 2003

No.48/IX

SASTRA PELAJARAN

Belajar Menulis Bersama Sastrawan Dunia

Judul:
BERGURU KEPADA
SASTRAWAN DUNIA:
BUKU WAJIB MENULIS FIKSI

Karya:
JOSIP NOVAKOVICH

Penerbit:
PENERBIT KAIFA, BANDUNG,
CETAKAN I 2003

Tebal:
335 HALAMAN

” Menulis itu gampang,” kata Arswendo. Tetapi, coba ambil sehelai kertas dan alat tulis. Lalu tulis apa yang ingin dituliskan, gagasan yang sudah ada dikeluarkan. Baris pertama dan baris kedua mungkin mudah dilakukan. Bagaimana dengan baris-baris selanjutnya, sehingga menjadi tulisan yang baik dan enak dibaca. Ya, menulis itu memang gampang bagi seseorang yang memiliki bakat sebagai penulis. Apakah itu benar?

Jika bakat adalah jawabannya. Apakah dengan begitu kita langsung dapat menulis dengan mahir. Kata-kata yang indah keluar begitu saja, kalimat-kalimat panjang yang tercipta dengan mudah. Apakah seperti itu? Tidak. Tidak ada seseorang yang langsung menjadi besar. Langsung menjadi mahir dalam segala hal. Semua butuh proses. Semua butuh usaha dan kerja keras.

Dalam *Kata Pengantar* Hilman Hariwijaya bercerita mengenai perjuangannya hingga ia dapat menjadi seperti sekarang. Seorang

bocah yang kurus duduk dalam satu meja dengan penulis-penulis terkenal seperti Arswendo Atmowiloto, Leila S Chudori, Agus Arya Dipayana, dan Jay Bimo.

Bocah itu merasa minder duduk dalam satu ruangan dengan mereka. Tetapi, ia tak kenal lelah, justru ia datang ke tempat itu untuk memulai belajar menulis. Hingga akhirnya seorang bocah yang kini menjadi seorang Hilman Hariwijaya yang dikagumi banyak orang mendapat kesempatan untuk membuat wawancara kecil.

Tidak sampai di situ saja, Hilman selalu menuliskan teman-temannya yang memiliki karakter unik dan menonjol, kemudian nantinya ia jadikan tokoh dalam ceritanya. Sehingga tidak jarang ia dimusuhi oleh teman-temannya karena merasa ditelanjangi. Hilman percaya, usaha yang keras untuk menjadi penulis terkenal adalah jalan yang wajib ditempuh.

Josip Novakovich, seorang pengarang yang kini mengajar penulisan cerita fiksi di Universitas Cincinnati. Cerita fiksinya telah menghasilkan dua penghargaan Pushcart, serta masing-masing penghargaan National Endowment for the Art Fellowship Ingram Meril, dan hadiah Cohen/Ploughshares.

Dia tinggal di Cincinnati

bersama istrinya, Jeannette, dan putranya, Joseph. Menjadi seorang pengarang menurutnya hanya duduk dan mulailah menulis. Ia mengesampingkan teori-teori kepenulisan fiksi. Pembicaraan tentang bakat, inspirasi, dan kegeniusan adalah gangguan.

Untuk menjadi pengarang yang baik, ia mengatakan Anda harus memiliki sifat yang saling bertolak belakang, yakni sifat suka menyendiri, tetapi juga suka berkelompok.

Sebagai pengarang, Anda memerlukan perasaan ke-mandirian yang kuat, membutuhkan waktu untuk menyendiri dan berpikir seorang diri-jadi, silakan, bekerjalah sendiri.

Dalam bukunya ini, ia memang tidak memberi teori yang wajib digunakan sebagai syarat menjadi seorang pengarang yang baik. Ia melatih membuat kita terus berlatih untuk menulis dan menulis. Sesuatu butuh pemanasan. Begitu juga dengan menulis.

Pada *Bab Pertama*, sumber cerita fiksi didapat dari pengalaman kita sendiri. Mulailah dengan hal-hal yang terdekat. Nikolai Gogol, mengubah suatu kejadian nyata menjadi fiksi, sehingga jadilah *Overcoat*.

Pengarang novel Prancis, Claude Simone menyatakan untuk mengumpulkan bahan untuk suatu novel sebenarnya cukup mengitari sebuah blok di kotanya. Setelah pulang, tuliskan apa yang kita lihat, pikirkan, rasakan, ingat dan seterusnya. Maka

pesannya, tuliskan hal-hal yang kita ketahui. Itu sudah cukup.

Latihan menulis membuat kita terbiasa. Memberikan nuansa yang lain, sebelum kita mengenal dunia kepenulisan kreatif ini. Kita

tidak harus menunggu ilham, bergantung pada suasana hati yang senang atau pun tenang.

Dengan suasana hati yang tertentu, misalnya sedih, bahagia, marah dan lain-lain, hal itu akan membuat miskin tulisan kita sebab suasana hati tidak berkembang. Tulisan menjadi mati, tidak memiliki roh.

Dalam buku ini, hal-hal yang mengerikan untuk memulai menulis, membuat perjalanan itu menjadi mudah dan lancar. Kita tidak harus dipaksa untuk menuruti aturan yang ditetapkan dalam buku ini. Kita hanya mengikuti petunjuk dan melaksanakan sesuai dengan kepribadian kita sendiri.

Mungkin kita dapat meniru atau mencontoh tulisan yang diberikan oleh Josip dari pengarang-pengarang terkemuka dunia seperti Leo Tolstoy, Mark Twain, Ernest Hemingway, Charles Dickens, atau Gabriel Garcia Marquez, tetapi nanti, dengan sendirinya kita akan menemukan ciri khas kita sendiri. Sebab, kita telah mengenali tulisan kita sendiri dari beragam latihan yang telah dilaksanakan. Bisa ala biasa.

Menulis, membuat pikiran yang kacau dapat dikurangi, apabila dituangkan, ditumpahkan ke dalam bentuk tulisan. Perasaan tersalurkan lewat pena yang bergerak di atas kertas. Jangan takut untuk memulai menulis. Jangan ragu untuk menuliskan apa yang kita lihat dan rasakan. Karena hanya itu yang dapat dilakukan sebagai penulis pemula. Karena hanya itu yang dapat dilakukan untuk menjadi besar. Maka, duduk dan menulislah.

SANTI MULYANI

Suara Pembaruan, 19 Oktober 2003

SUMPAAH PEMUDA

Memberi Makna (Lain) Sumpah Pemuda

OLEH RUSMAN GHAZALI

SETIAP 28 Oktober, pemuda dan kita semua memperingatinya sebagai hari Sumpah Pemuda. Selain sebagai salah satu catatan cukup penting dalam mempersatukan perjuangan pemuda, juga menjadi penopang utama pencapaian kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 1945.

Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 yang demikian kuat dalam mengokohkan bangunan kebangsaan kita: kami putra-putri Indonesia berikrar satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa Indonesia. Justru sumpah suci tidak terselamatkan oleh pemuda itu sendiri dalam peran dan fungsinya mengisi pembangunan kebangsaan Indonesia.

Nilai sejarah perjuangan kepemudaan kita selama ini dalam mengisi kemerdekaan dengan ide dan gagasan pembangunan cemerlang mengalami kelangkaan di tengah pusaran politik kapitalisme. Pemuda sebagai tulang punggung bangsa tidak berhasil meletakkan nilai perjuangan menjadi mobil cita-cita rakyat Indonesia. Tidak berhasil menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman (tuntutan rakyat), justru kemudian terjebak dalam arus politik pembangunan yang menjauh dari kehendak rakyat.

Posisi pemuda yang mulia sebagai tulang punggung bangsa seharusnya menjadi kendaraan hati nurani rakyat. Artinya, tantangan terbesar dari perjuangan kebangsaan kita sekarang ini adalah menghapus penjajahan bangsa dan negara oleh bangsa kita sendiri dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). Inilah yang tidak diaktualisasi optimal oleh pemuda-pemudi ketika mereka berinteraksi dengan kekuasaan dan kelompok-kelompok kepentingan politik.

Kita tidak dapat memungkirkan peran fungsi pemuda dalam berbagai dimensi

pembangunan, tetapi perannya dalam menyucikan cita-cita perjuangan kepemudaan 1928 tidak berhasil dilakukan. Untuk saat sekarang, bertanah air satu dan berbangsa satu perlu diarahkan oleh barisan pemuda sebagai upaya bersama menikmati sumber daya nasional melalui distribusi keadilan. Sementara berbahasa satu, keberanian untuk satu bahasa dan tindakan dalam menentang korupsi oleh barisan pemuda sangatlah penting sebagaimana semangat Sumpah Pemuda 1928 dalam menentang kolonialisme. Namun, semuanya tak berlangsung sebagaimana harapan rakyat untuk posisi pemuda sebagai tuang punggung bangsa.

Kondisi ini dapat dibaca bahwa posisi pemuda mengalami impitan antara arus idealisme dan pragmatisme ketika mereka berhadapan dengan tembok kekuasaan, terutama dalam menentukan orientasi dan tindakan yang harus dikenai, dikritisi, dan diresistensi dari sekian banyak masalah dan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara, baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal. Pertanyaan yang kemudian mengemuka. Pertama, bagaimana semangat Sumpah Pemuda 1928 direaktualisasi dalam format mengisi kemerdekaan. Kedua, bagaimana eksistensi idealisme pemuda bertahan dalam peran fungsinya mendukung penyelenggaraan negara yang bersih.



DAPAT dijelaskan bahwa peran fungsi pemuda dirasakan semakin terdegradasi, mereka ditengarai ditumpangi banyak "ide pragmatisme". Di sini, eksistensi peran fungsi pemuda terlihat sangat rapuh untuk berhadapan dengan sistem politik negara yang korup, mereka terperangkap untuk mengusung isu-isu yang tidak populer dan kemudian cenderung memperkuat sistem korup yang berlangsung.

Banyak hal yang menunjuk ke arah itu. Pemuda masuk dalam organisasi politik, birokrasi negara dan dunia usaha justru larut dalam praktik korup, tidak berdaya berhadapan arus KKN yang serba canggih. Idealisme mereka luntur dalam badai realisme dan pragmatisme. Organisasi pemuda tak lebih dari sekadar jembatan politik bagi pemuda untuk masuk dalam

jaringan elite penyelenggaraan negara.

Eksistensi perjuangan pemuda hanya mungkin mengonsolidasikan dan merefleksikan kekuatan seperti semangat Sumpah Pemuda 1928, jika mereka selektif terhadap isu dan kebijakan negara yang memang dibutuhkan secara obyektif oleh rakyat. Penggalan ide, gagasan, dan kritik yang cemerlang terhadap masalah dan situasi penyelenggaraan pemerintahan negara tidak bisa tidak hanya dapat diwujudkan melalui api perjuangan pemuda untuk menempatkan korupsi sebagai musuh terbesar dari bangsa ini. Berani secara obyektif untuk bersama menentang praktik KKN jika kekuatan mereka tetap ingin menjadi tulang punggung bangsa.



BERBEDA dengan situasi 1928. Di mana pemuda secara serempak memuncaki predikat pembaruan dalam mendorong perjuangan fisik pencapaian kemerdekaan. Namun, kini situasinya bergeser, yang tentu peran fungsi pemuda akan terukur dengan baik ketika mereka mampu mengusung isu, ide, dan gagasan yang dapat didukung masyarakat luas. Dapat diakui bahwa peran fungsi pemuda sekarang berada pada fase ujian berat, fase kritis untuk tetap tampil menjadi tulang punggung bangsa dalam mengawal gerak reformasi. Karena sesungguhnya posisi pemuda relatif kurang dipercaya oleh publik ketika masuk dalam jaringan resmi penyelenggaraan negara.

Medan perjuangan yang serba kompleks dalam mengisi kemerdekaan, membuat posisi pemuda perlu lebih diorientasikan secara egaliter untuk memperkuat pematatan nilai keadilan dari setiap kebijakan dan program pembangunan negara. Namun, konsekuensinya adalah mampukah pemuda merancang platform perjuangan yang sama dalam rangka memberantas KKN karena kalau tidak

posisi pemuda mudah terjebak dalam kelompok kepentingan atau oleh partai politik. Hal ini memang sangat mengkhawatirkan karena posisi pemuda selama ini, sadar atau tidak, lebih banyak berada dalam real pragmatisme politik.

Loyalitas dan dedikasi posisi pemuda harus tetap berdiri tegak di atas nilai kebenaran dan keadilan. Karena apa pun alasannya, fenomena kepemudaan kini relatif "termaterialisasi" di berbagai arena penyelenggaraan negara sehingga dangkal dan mandul tak berdaya dalam arus politik kapitalisme. Kekhawatiran ini menyeruak karena harapan puncak kita adalah bagaimana perjuangan pemuda dapat menggilas penyelenggaraan negara yang serba korup dari sekian banyak masalah kebangsaan.

Perlu diwaspadai bahwa keinginan dari berbagai pihak untuk merangkul pemuda semakin intens dilakukan oleh banyak parpol, terutama menghadapi Pemilu 2004. Karena mereka menyadari bahwa pemuda sangat potensial dimanfaatkan sebagai sumber pemikir dan pembenar untuk kepentingan politik sesaat. Untuk itu, apa yang dikenal dengan semangat Sumpah Pemuda 1928 perlu direaktualisasi dalam melawan ketidakadilan dan pemiskinan rakyat oleh para penyelenggara negara agar pemuda memang dan benar menjadi tulang punggung bangsa dalam menentang KKN.

Kelangkaan dan mandulnya ide serta gagasan cemerlang dari pemuda masa kini akan menjadi lahan subur tumbuh dan berkembangnya praktik korupsi. Kini dan esok menanti perjuangan pemuda dengan keberanian untuk bersumpah dan berikrar membebaskan rakyat dari "kolonialisme korupsi" oleh bangsa sendiri.

RUSMAN GHAZALI

Dosen FISIP dan Peneliti PPM Unas serta Peneliti Institute for Public Trust Jakarta

O P I N I

Refleksi Sumpah Pemuda 28 Oktober 2003

Sumpah untuk Indonesia

OLEH I B PUTERA MANUABA

SUMPAH Pemuda yang diikrarkan 75 tahun silam, 28 Oktober 1928, dapat kita pandang sebagai cikal-bakal pembentukan negara kesatuan RI. Saat itu *the founding fathers* kita secara antusias menyatakan tiga inti ikrar gagasan perekat bangsa, yakni: "Satu Bangsa", "Satu Tanah Air", dan "Satu Bahasa Persatuan".

Ketika itu ikrar Sumpah Pemuda memiliki makna yang amat signifikan bagi pembangunan kesadaran rakyat RI. Adalah suatu realita historis yang tak terbantahkan dalam sejarah bangsa bahwa ikrar itu memang dapat menggelorakan semangat nasionalisme yang dahsyat. Gelora nasionalisme yang makin membara menyembul menjadi letupan keberanian patriotik untuk melawan segala bentuk penjajahan kolonialis yang mengakibatkan rakyat menderita dan sengsara.

Patut kita akui bahwa Sumpah Pemuda adalah sumpah bagi tegaknya persatuan Indonesia. Sumpah itu telah mampu menyatukan rakyat yang tersebar luas dan tercerai-berai akibat politik *divide et impera* yang dicanangkan penjajah Belanda. Ia menjadi roh pemersatu bangsa. Maka, kemerdekaan yang kita raih dan nikmati hingga detik ini adalah eksekusi dari sumpah itu.

Generasi '28 adalah generasi perintis yang berkomitmen tinggi mempersatukan bangsa dan melepaskan rakyat dari segala bentuk degradasi manusia, terutama yang berupa penjajahan secara berkepanjangan. Atas dasar itulah, maka dapat dibayangkan betapa kegigihan

bangsa yang dipelopori pemuda idealis untuk menjadikan bangsa ini sebagai bangsa yang merdeka, mandiri, dan memiliki jati diri.

Gaung Sumpah Pemuda itu memang mampu menginspirasi gerakan para pejuang bangsa sehingga mereka memiliki tekad dan semangat pantang mundur untuk membela bangsa dan tanah air. Kemerdekaan RI yang berhasil diraih pada 17 Agustus 1945 tentunya tak lepas dari gaung sumpah ini.

Menilik besarnya gaung Sumpah Pemuda mengarusi nilai-nilai perjuangan bangsa, tentu tak satu pun warga bangsa kita meragukan peran peristiwa itu sebagai tonggak sejarah yang selalu diingat dan dikenang para generasi bangsa. Semangat untuk bersatu padu sebagai bangunan sebuah bangsa yang berkarakteristik multikultural. Sumpah itu telah terpancang kuat dalam benak setiap anak bangsa. Tanpa sumpah itu mungkin perjalanan bangsa ini akan berkisah lain. Namun, yang jelas, kini kita telah menjadi satu bangsa dan satu tanah air yang diperantarai oleh bahasa persatuan, yakni bahasa Indonesia.



SUMPAH Pemuda telah menjadi pilar pemersatu bangsa. Karena itu, kini kita wajib mengejantahkan cita-cita para pencetus sumpah itu. Namun, sayangnya, realitas perjalanan bangsa yang melanda negeri kita dalam beberapa tahun terakhir ini rasanya berjalan terbalik. Jika dulu orang rela dan berani berkorban demi bangsa dan tanah air, kini justru makin banyak yang justru mengorbankan bangsa dan tanah air.

Pada titik ini, semangat patriotik bergeser menjadi depatriotik. Makna sumpah itu bagai terganjal batu besar sehingga sumpah tersebut seakan terhenti mengarusi jiwa dan semangat bangsa ini. Akibatnya, Indonesia sebagai sebuah bangsa dan tanah air kini bukannya makin berjiwa, tetapi justru terkoyak. Gejala

depatriotik dan denasionalis ini memang seharusnya lebih dini diantisipasi agar bangsa dan tanah air kita tak makin terkontaminasi dan terpuruk.

Untuk itu peringatan Sumpah Pemuda ini barangkali bisa dijadikan momentum untuk melakukan sumpah untuk Indonesia. Menormati kondisi bangsa yang amat memprihatinkan saat ini, sebagai bangsa kita perlu mengikrarkan sumpah dalam kesadaran inklusif masing-masing, kendati tanpa ada acara seremonial sebagaimana sumpah yang dilakukan puluhan tahun silam. Yang jelas, kita perlu bersumpah secara substantif dalam kesadaran kita sebagai warga yang memang benar-benar mencintai bangsa dan tanah air Indonesia.

Sebagai langkah penyelamatan bangsa, kita perlu mengikrarkan beberapa sumpah untuk negeri ini. Pertama, kita perlu bersumpah untuk tak berbuat korupsi. Korupsi yang merajalela saat ini terang-terang sangat merugikan bangsa dan negara kita. Besarnya korupsi di negeri ini membuat kita memperoleh predikat negara terkorup ke-6 di dunia. Predikat itu tentu saja menampar keras citra bangsa kita dalam pergaulan dunia internasional. Kendati terlambat, kita seyogianya mau bersikeras untuk melawan kemauan korup yang bersemayam dalam jiwa. Kita harus mengikrarkan sumpah antikorupsi secara bersungguh-sungguh dan bukan hanya dalam wacana.

Kedua, kita harus bersumpah untuk hidup sederhana. Mensyukuri apa adanya dengan senantiasa disertai ikhtiar dan doa adalah sikap yang pantas dikedepankan sebagai warga bangsa. Cara hidup seperti ini kiranya juga efektif untuk mengatasi krisis multidimensional di negeri ini. Hidup dalam lingkaran hedonisme hanyalah akan menjerat dan membelenggu kehidupan kita pada keinginan-keinginan tiada terbatas. Pada titik ini kita juga tak bakal mampu menghargai vitalitas hidup sebagai jalan menuju kehidupan yang abadi, yang nir-duniawi. Keterbelengguan hidup hedonis atau materialis hanyalah akan menciptakan generasi hewaniah yang tak mampu menepis godaan duniawi sehingga asyik berkubang dalam kenikmatan-kenikmatan semu.

Ketiga, kita harus bersumpah untuk sadar hukum. Pelanggaran hukum, baik perdata maupun pidana, yang makin merajalela di negeri ini menjadi bukti nyata betapa kita makin tak jera dengan hukum. Ironisnya, di negeri ini, banyak orang yang paham hukum, tetapi justru mempermainkan hukum. Dalam konteks ini hukum hanya diperlakukan sebagai alat yang bisa dibelokkan kesana-kemari. Hukum tak dijadikan lagi sebagai standar menuju hidup tertib, teratur, benar, dan adil pada atmosfer berkehidupan dalam suatu bangsa yang berdaulat. Secara normatif, hukum memang menjadi hasil ke-

sepakatan bersama. Namun, secara manusiawi, hukum juga harus dapat berlaku fleksibel sehingga kebijakan atau vonis hukum seharusnya lebih mengikuti kebergunaannya bagi kemanusiaan itu sendiri.

Keempat, kita harus bersumpah untuk lebih mengedepankan sikap altruistik. Sikap yang lebih mengedepankan demi kepentingan orang lain, bangsa, dan negara. Karena itu, kita mencoba memperkecil debit sikap individualistik dan konsuméristik berlebihan. Dengan sikap altruistik kita harus mampu secara horizontal membantu dan menolong sesama dan mengabdikan diri pada bangsa dan negara. Rasa berbangsa dan bernegara menjadikan kita melakukan dedikasi tanpa pamrih. Seharusnya kita berbuat sesuatu tanpa terlebih dahulu memikirkan imbalannya. Di sini kita bukannya tak perlu imbalan, tetapi mampu memosisikan imbalan hanya sebagai dampak dari apa yang kita lakukan. Dapatkah kita bekerja bukan semata-mata demi uang? Bukankah setiap kerja kita akan memberi dampak? Barangsiapa yang mula-mula bekerja semata-mata demi uang, ia potensial akan terjebak oleh kekuasaan uang itu sendiri. Karena itu, hidup haruslah mengutamakan kerja. Kesalahan filosofis memosisikan kerja dan uang akan membuat kita bekerja terlalu pamrih.

Kelima, kita harus bersumpah untuk berhenti mengatasnamakan rakyat demi kepentingan pribadi atau kelompok. Nasib rakyat adalah yang benar-benar harus dibela serta diperjuangkan dan mereka bukan diposisikan hanya sebagai obyek untuk meraih keuntungan. Sudah menjadi kewajiban utama bagi siapa pun yang berkuasa untuk senantiasa memihak kepada rakyat. Harus ada pemahaman bahwa rakyat harus benar-benar diposisikan sebagai pemegang kedaulatan. Pendelegasian kekuasaan oleh rakyat hendaknya tak diartikan menghilangkan kedaulatannya.

Selain sumpah-sumpah tersebut tentu masih banyak sumpah lainnya lagi yang harus diikrarkan dalam jiwa dan hati agar kita mampu hidup lurus dan berguna di tangan bangsa dan negara ini. Semakin banyak orang bersumpah secara tulus ikhlas dalam standar-standar hidup yang bermakna, citra bangsa kita akan makin bercahaya.

I B PUTERA MANUABA

Dosen Fakultas Sastra
Universitas Airlangga, Surabaya

TAJUK RENCANA

Kedaulatan Rakyat**Semangat Sumpah Pemuda Setelah 75 Tahun**

KR, 28-10-03
HARI ini 28 Oktober 2003, tujuh puluh lima tahun yang lalu para pemuda Indonesia dari berbagai suku, etnik, ras dan golongan bersatu menyodorkan sebuah tekad yang berbunyi "Kami putera-puteri Indonesia mengaku, berbangsa satu bangsa Indonesia. Kami putera-puteri Indonesia bertanah air satu tanah air Indonesia. Kami putera-puteri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan Bahasa Indonesia".

Tetapi dalam perkembangannya lontaran tekad yang tersaji dalam Sumpah Pemuda 1928 itu di kemudian hari berubah, terutama yang terakhir menjadi "Kami putera puteri Indonesia Berbahasa Satu Bahasa Indonesia".

Ada satu tendensi seolah-olah bahwa masuk ke Indonesia hanya perlu berbahasa Indonesia. Dan kelihatan tendensi ini adalah tendensi kapitalistis. Dalam rangka penyediaan tenaga kerja murah investor asing hanya perlu berbahasa Indonesia, tidak perlu mempelajari bahasa daerah lainnya. Dan kenyataannya memang demikian investor asing datang ke Indonesia.

Tetapi di sisi lain, bangsa ini kehilangan satu generasi lantaran bahasa daerah beserta hasil budaya di daerah tak pernah mendapatkan tempat lagi. bahkan di bidang pendidikan bahasa daerah, seperti Bahasa Batak, Bahasa Bali, Bahasa Jawa, Bahasa Banjar, Bahasa Padang tak mendapatkan tempat untuk berkembang.

Dari kata-kata 'menjunjung tinggi bahasa persatuan Bahasa Indonesia' menyiratkan sebuah pemahaman bahwa bahasa daerah diberi tempat hidup dan berkembang selaras dengan perkembangan daerahnya. Dengan begitu manusia Indonesia tidak tercabut dari akar budayanya. Sebab manusia Indonesia menurut warisan tradisinya dibesarkan dalam pendidikan 'tata basa, tata rasa dan tata brata'. Hal ini mengandung arti bahwa masyarakat Indonesia di mana ia hidup pertama-tama harus belajar bahasa ibu pertama yakni bahasa daerah. Baru mereka diperkenalkan dengan bahasa Indonesia. Bahasa ibu mereka yakni bahasa daerah selama puluhan tahun tak lagi diberikan di sekolah. Akibatnya mereka kehilangan kontak dengan budayanya. Dan seolah tercabut dari akar budayanya. Selanjutnya yang lebih mengerikan mereka tidak bisa lagi mengolah rasa, hati manusia jadi seperti pa-

tung. Pendidikan rasa baru akan mendapatkan tempat sesungguhnya kalau mereka belajar bahasa daerah di mana ia hidup.

Bahasa daerah saja sudah tidak mengetahui mana bisa ia memahami olah rasa. Lebih lagi bagaimana ia akan mendalami olah brata. Oleh karena itu jangan disalahkan generasi sekarang ini inginnya terobosan terus.

Semboyan yang muncul pun sudah menjadi: "remaja berfoya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga". Tidak semangat sedikit pun untuk prihatin untuk berjuang.

Keinginan mereka hanyalah memperoleh fasilitas, kenyamanan, kenikmatan hidup. Jalan pintas sudah dimulai sejak kanak-kanak. Menyontek sudah menjadi budaya umum. Tak ada perjuangan hidup. Ini berlangsung sampai di perguruan tinggi. Kemudian usai sekolah masuk kerja dengan menyuap. Jadi pegawai kemudian korupsi, lantaran masuk sudah menyuap. Jalan pintas selalu dicari. Jadi pejabat pun bisa jadi berkat suap menyuap.

Budaya keprihatinan sudah sirna. Yang ada budaya jalan pintas, terobosan. Yang tidak berani terobosan yang 'tinggal di landasan'.

Semangat kebangsaan setelah 75 tahun ini perlu diaktualisasi kembali sebagai sebuah fenomena keberbedaan dalam keanekaragaman. Semangat keragaman harus kembali dikemukakan sebagai sebuah fenomena bangsa yang kaya akan kebudayaan. Meski di kemudian harus menjunjung bahasa persatuan sebagai pemersatu. Tetapi kebudayaan daerah harus terus dikembangkan sebagai wujud penghormatan kepada daerah, kalau otonomi daerah memang tengah digalakkan.

Yogyakarta sebagai pusat budaya Jawa, sebaiknya kembali mengetengahkan kearifan budaya Jawa yang telah terbukti memberikan semangat juang kepada generasi pendahulu. Kembalinya budaya daerah akan memberikan tempat yang baik bagi munculnya kembali bahasa daerah sebagai wahana pengembangan budaya.

Dan lewat bahasa daerah ini bisa digarap pendidikan budi pekerti yang selama ini ditengarai hilang ditelan zaman.

Manusia Indonesia zaman kini seolah tak peduli dengan norma kehidupan yang dahulu begitu ditanamkan oleh para pendiri

bangsa ini sebagai sebuah tonggak sejarah yang pantas dilestarikan. Tetapi kesadaran untuk melestarikan tradisi seolah sirna ditan globalisasi.

Ada pemahaman keliru bahwa modernisasi harus berhadapan dengan tradisi. Padahal leluhur bangsa Indonesia telah menanamkan pemahaman bahwa boleh modern, tetapi kearifan tradisi yang merupakan mutiara atau kristalisasi pengalaman nenek moyang mengenai dunia ini tidak boleh ditinggalkan begitu saja. Kalau sampai kearifan tradisi, seperti terwujudnya Bhinneka Tunggal Ika dengan Pancasila disisihkan, bisa jadi bangsa ini bakal tinggal namanya saja. □ - c

Kedaulatan Rakyat, 28 Oktober 2003

Sumpah Pemuda? Banyak yang Lupa

Gambir, Warta Kota

Hari Selasa, 28 Oktober bertepatan dengan peringatan Peristiwa Sumpah Pemuda sejumlah warga ibu kota dan sekitarnya mengaku tidak tahu dan lupa bahwa hari itu merupakan hari peringatan Sumpah Pemuda.

"Hari ini kan hari Selasa, tanggal 28 Oktober," kata Ny Wati (60) pedagang di depan kantor YLBHI Jalan Diponegoro, Menteng Jakarta Pusat. "Habisnya nggak kayak hari nasional lainnya, selalu diomongin semua orang, misalnya Hari Proklamasi," tambahnya.

Sementara seorang karyawan Radio Swasta di Jakarta, Novi Dodo (45), mengaku tahu bahwa 28 Oktober kemarin adalah hari Sumpah Pemuda karena malam sebelumnya diberi tahu kemenakannya.

Hal senada juga dikatakan M Fadhil (39), warga Beji, Depok yang mengaku ingat karena diberi tahu anaknya yang sudah duduk di bangku SMP. "Ternyata kita sudah lupa dengan hari Sumpah Pemuda," katanya.

Sementara itu dari Kota Bekasi dan Kota Tangerang dilaporkan, peringatan Sumpah Pemuda tahun ini tidak terdengar gaungnya. Bahkan di Bekasi sama sekali tidak ada perayaan Sumpah Pemuda, baik di lingkungan pemerintah setempat maupun di kalangan pemuda.

Rachmat Damanhuri, mantan Ketua Himpunan Mahasiswa Bekasi mengakui hal itu. Namun ia berpendapat agar perayaan Sumpah Pemuda tidak hanya dilihat dari acara seremonial semata.

"Yang harus dilakukan pemuda kini adalah memerdekan diri seperti 55 tahun yang lalu. Sangat disayangkan banyak pemuda yang lebih senang

menjadi kaum yang mencari kesenangan dan bangga disebut generasi MTV," kata Rachmat yang juga Ketua Arisan Pikir.

Sementara itu di Tangerang selain acara apel pagi di Pusat Pemerintahan Kota dan Kabupaten Tangerang yang sekaligus digunakan sebagai tempat perayaan, juga tak ada acara seremonial untuk merayakan Hari Supah Pemuda.

Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Tangerang, Dohiri Adam, mengatakan sepiya peringatan Sumpah Pemuda mencerminkan ketidakpedulian pemerintah setempat akan makna Sumpah Pemuda. "Moral negara bisa dilihat dari kualitas pemudanya. Tanpa keberadaan pemuda mana mungkin negara ini bisa maju," ujarnya.

Ia menyayangkan bahwa pemerintah daerah seolah ikut melupakan hari bersejarah itu. Ia khawatir, lambat laun banyak hari bersejarah dilupakan. Lebih dari itu ia menyayangkan sikap organisasi-organisasi pemuda yang tidak lagi memahami makna Hari Sumpah Pemuda.

Sementara itu seperti dilaporkan Antara, Wakil Presiden Hamzah Haz sangat mengharapkan pemuda Indonesia menjadi pelopor dalam mengisi pembangunan pada masa reformasi, sehingga bangsa dan negara bisa bangkit kembali.

"Pemuda pada 1928 telah menjadi pelopor dan menjadi bagian penting dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat itu. Dan saya harapkan agar pemuda sekarang menjadi pelopor mengisi arti reformasi dalam membangun negara Republik Indonesia" katanya saat memperingati Hari Sumpah Pemuda

ke-75, di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (28/10).

Hadir pada acara tersebut selain menteri para menteri Kabinet Gotong Royong seperti Menteri Hattaj Rajasa, Mendiknas Malik Fadjar, Menko Kesra Jusuf Kalla, juga Ketua DPR Akbar Tandjung, Kapolri Dai Bachtiar dan Ketua Umum Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Idrus Marhan.

Namun bertepatan dengan hari Sumpah pemuda itu di Gedung Joang, Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat, Selasa (28/10), dideklarasikan satu organisasi kepemudaan bernama Garuda Muda Indonesia (GMI). GMI merupakan organisasi yang dibentuk oleh para mahasiswa, profesionalis, LSM dan kalangan olahraga.

"Kami murni, didirikan oleh para kawula muda, yang ingin memberikan sumbangsih kepada nusa dan bangsa. Tidak ada intervensi dari mana pun dalam pendeklarasian GMI," kata Ketua Pempel Deklarasi, Soerachman seraya mengatakan GMI bersifat terbuka, tidak terikat dengan satu partai atau ormas.

Menurut Soerachman sebenarnya GMI akan dideklarasikan pada 17 Oktober lalu, tetapi ditundurkan menjadi 28 Oktober bertepatan dengan Sumpah Pemuda.

"Kalau pada 28 Oktober 1908 lalu ada kesepakatan tentang kebangsaan hari ini GMI juga ingin berpartisipasi dalam menyikapi persoalan kebangsaan," ujarnya.

Inisiator GMI, Ahmad Zulkarnaen, pendeklarasian GMI dika-rekanakan sudah enam tahun reformasi ternyata tidak ada satu pun perubahan bagi masyarakat Indonesia. Padahal pada saat tumbangnya rezim Orba pada 1998, semua elemen bangsa berlomba-lomba ingin melakukan perubahan. (akn/moe/ito)

TERJEMAHAN

LINTAS KOTA

Dilantik, Penerjemah Pemprov DKI

JAKARTA—Sejalan dengan era globalisasi, komunikasi dan interaksi antar bangsa senantiasa terus meningkat dari waktu ke waktu. Perkembangan tersebut telah mendorong munculnya konsep negara tanpa batas (*borderless country*), dimana kegiatan internasional saling kait mengait menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. "Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan ucapan selamat kepada saudara-saudara atas keberhasilannya mengikuti serangkaian tes sebagai prasyarat untuk menjadi penerjemah resmi Pemprov DKI," demikian kata sambutan gubernur DKI Sutiyoso yang dibacakan Astapratur Sekdaprov DKI Moerdiman RM saat melantik delapan penerjemah resmi Pemprov DKI di Balai Agung, Rabu (15/10). Hubungan yang demikian ini, kata Moerdiman, tentunya hanya dapat terwujud apabila pesan yang akan disampaikan oleh masing-masing pihak dapat dipahami oleh pihak lain. Sehingga terjalin suatu komunikasi yang baik diantara pihak-pihak yang melakukan interaksi. "Namun demikian, perbedaan bahasa kadangkala, bahkan tidak jarang menjadi kendala bagi munculnya komunikasi yang efektif diantara mereka. Oleh karena itu, kehadiran penerjemah yang mampu menjembatani secara baik hubungan komunikasi dan korespondensi antara pihak-pihak yang berbeda bahasa, menjadi sangat penting artinya," ujar mantan Sekwan DPRD DKI ini.

Dalam skala global/internasional, dimana kerjasama antar bangsa dalam berbagai bidang kegiatan dilakukan secara intensif. "Kehadiran penerjemah yang memiliki kemampuan berbahasa asing yang baik, sangat diperlukan. Dengan bantuan penerjemah, berbagai kerjasama antar bangsa di bidang politik, ekonomi, sosial dan kerjasama lainnya yang saling menguntungkan (*mutual benefit*) dapat berjalan baik. Bahkan banyak diantaranya yang berkembang pesat," tandasnya. Pada sisi lain, kedudukan Jakarta sebagai ibukota negara, menempatkan Jakarta sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, ekonomi, perdagangan dan pusat berbagai kegiatan lain yang berskala nasional bahkan internasional. Kedudukannya yang demikian, menjadikan Jakarta sering ditunjuk sebagai tuan rumah penyelenggaraan berbagai *event* internasional seperti seminar, konferensi dan forum-forum internasional lainnya. "Oleh karena itu kehadiran penerjemah dalam mendukung kedudukan Jakarta sebagai kota internasional yang berbasis *service city* merupakan kebutuhan. Dengan bantuan penerjemah yang handal, berbagai kesalahpahaman yang mungkin muncul dalam komunikasi atau kerjasama antar bangsa yang diakibatkan oleh perbedaan bahasa, dapat dihindari atau dieleminir," paparnya. Kedelapan penerjemah ini merupakan jebolan dari Universitas Indonesia (UI). **Uli**

Berita Buana, 16 Oktober 2003

BAHASA INDONESIA-RAGAM LISAN (KONGRES)

Dubes Inggris Terbaik Berbahasa Indonesia

JAKARTA (Media): Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional memberikan penghargaan Tokoh Berbahasa Indonesia Lisan Terbaik kepada lima tokoh nasional dan satu warga negara Inggris.

Mereka yang menerima penghargaan adalah Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono, Menkeh dan HAM Yusril Iha Mahendra, pengamat politik Eep Saefulloh Fatah, cendekiawan Nurcholish Madjid, ahli hukum Pradjoto, dan Duta Besar Inggris untuk Indonesia Richard Gozney.

Penghargaan diberikan pada pembukaan Kongres Bahasa Indonesia (KBI) VIII yang berlangsung di Hotel Indonesia, Jakarta, kemarin. KBI VIII dibuka Menko Kesra Jusuf Kalla mewakili Wakil Presiden Hamzah Haz dan akan berlangsung sampai Jumat (17/10).

Mewakili keenam penerima penghargaan, Susilo yang diminta memberikan komentar mengatakan bahasa Indonesia tidak saja menjadi ciri identitas bangsa, tetapi juga menjadi sarana dalam bernegara.

"Bahasa Indonesia bukan hanya menjadi nilai dan jati diri bangsa yang harus dilestarikan, namun juga akan mengalami perkembangan dan perubahan karena adanya tuntutan globalisasi. Proses perubahan yang dinamis itu akan beriringan

dengan perubahan kehidupan bangsa," ujarnya.

Richard Gozney mengaku sangat senang dan menyambut baik penghargaan yang diberikan kepadanya. Selain mampu berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, Gozney pun termasuk orang asing yang pandai mendongeng. Kepandaiannya pernah ia perlihatkan saat mendongengkan cerita untuk anak-anak dalam peringatan Hari Anak Nasional di Jakarta beberapa waktu lalu.

Gozney pun mengungkapkan penghargaan yang besar terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman karena memiliki daya adaptasi yang baik terhadap bahasa asing.

"Saya yakin bahasa Indonesia tidak akan terkesampingkan karena bahasa ini sangat fleksibel. Bahasa Indonesia mampu menyerap berbagai kosakata asing, namun tidak kehilangan identitas. Malah istilah-istilah itu menjadi sangat khas keindonesiaannya," ucap Gozney.

Pada kesempatan yang sama juga diberikan Penghargaan Sastra kepada tiga sastrawan Indonesia, yaitu NH Dini (Yogyakarta), Dorothea Rosa Herliany (Yogyakarta), dan Oka Rusmini (Bali). (TM/Daf/B-3)



Radhar Dahana Memaknai Waktu

Oleh : Faisal Kamandobat dan Raudal Tanjung Banua

KETIKA waktu dihubungkan dengan manusia dan kosmologi yang diciptakannya, ia memiliki pengertian yang kompleks, atau lebih tepat disebut kaya makna. Waktu yang dipahami sebagai peredaran matahari dan bulan, misalnya, menjelma jadi sistem penanggalan, dengan bentuk yang berbeda-beda antara suatu kebudayaan dan kebudayaan lain: Masehi, Qamariyah, Jawa, Cina, dst. Waktu dalam pengertian kosmologis ini lalu membentuk sistem yang "menertibkan" kehidupan sehari-hari kita, dan membentuk tradisi yang khas di dalamnya.

Ketika waktu kosmologis dikaitkan dengan manusia sebagai makhluk eksistensial — yang sadar akan dirinya dan menciptakan makna bagi dunianya — waktu tak cukup semata dipahami sebagai angka pada almanak atau jadwal pada buku harian. Waktu kosmis itu telah berubah menjadi — meminjam istilah Einstein — "waktu tubuh yang berdetak di jantung kita." Kecepatan waktu diukur dari kecepatan jantung manusia, tak semata konstansi peredaran bulan dan matahari, pula rutinitas sirkulasi hari demi hari.

Bukan kebetulan waktu dijadikan "poros" dari refleksi Radhar Panca Dahana dalam antologi puisinya yang berjudul *Lalu Batu* (2003), sebagai kelanjutan dari antologi sebelumnya, *Lalu Waktu* (1994). Tengoklah beberapa judul sajak Radhar yang menggambarkan intensitasnya merenungkan waktu: *Sejarah Hari Ini, 1000 Tahun Weibenburgstr, Koeln 10 pagi, Seperti Waktu Sedia kala, Hikayat Waktu Satu, Hikayat Waktu Dua, Langit Satu, Menjerit Waktu, Menjadi Aku, dst.* Dalam puisi-puisi tersebut, waktu tidak semata sistem kosmologi, melainkan jadi semacam "sistem" sejarah.

Waktu ikut mendefinisikan eksistensi kita sebagai manusia, menyempurnakannya dalam proses sejarah dan pengalaman konkret, dan kemudian menghancurkan kita dalam kefanaan. Menghadapi waktu, manusia hanya sanggup membangun monumen, dan itu pun mungkin tak akan kekal. Di

hadapan kodrat kita yang sementara, waktu adalah peluang dan sekaligus ironi dari apa yang kita cipta dan lakukan. Amir Hamzah pernah bilang, "*Lalu waktu, bukan giliran ku...*"

Tapi Radhar tidak ingin semata terjebak pada sikap "takluk secara ironis" dihadapan waktu yang abadi itu. Manusia menjalani waktu, meninggalkan masa lalu, dan pada saat yang sama manusia punya mimpi dan gambaran masa depan. Bagi Radhar, masa lalu dan masa depan itu menemukan resultansinya pada masa kini yang tengah dialami. Masa kini adalah waktu konkret, waktu historis, dan di situlah kesadaran inanusia berpijak. Filsuf fenomenologi Martin Heidegger dalam *Being and Time* menyebut kesadaran manusia senantiasa terbuka (*intension*) terhadap seluruh fenomena yang hadir dalam kekinian pengalaman manusia.

Radhar, dengan bahasa yang berbeda dengan Heidegger menulis: "*masa depan, kini dan nanti / adalah aku!*" (*Tokyo Yang Pertama*). Dengan bait itu Radhar tidak ingin menjalani manusia sebagai tanaman yang berada di luar atau terpisah dari manusia seperti dalam astronomi, sebaliknya merangkum keseluruhan waktu di dalam manusia. Manusia adalah subjek yang mengendalikan waktu dan bukan sebaliknya. Manusia tidak boleh tunduk pada waktu karena dialah yang menciptakannya. Jika manusia tunduk pada waktu, manusia itu lenyap, dan waktulah yang eksis.

Dalam puisi yang lain, Radhar menyebut kekuasaan manusia atas waktu bukan sebagai sesuatu yang mutlak: "... *kau percaya? kau tidak / percaya? bahwa kita sekarang / tidak ada dalam waktu, namun / dalam penjara yang kita*

inginkan / sekaligus tidak kita harapkan / itulah hari ini (Sejarah: Hari Ini). Bait tersebut jika dijelaskan melalui formulir filsafat Heidegger akan berarti: keterbukaan kita terhadap fenomena yang terangkum dalam pengalaman hari ini adalah suatu "kodrat" yang "memenjarakan" manusia. Percaya atau tidak, diharapkan atau tidak, setiap manusia menerima "kodrat yang memenjarakan" itu sebagai kewajiban, begitu wajarnya hingga kita merasakannya sebagai kebebasan.

Kesadaran akan arti penting waktu dalam kehidupan manusia tidak mungkin dipisahkan dari kesadaran akan arti penting ruang baginya. Pameo umum mengatakan: waktu itu linear, sementara ruang itu plural. Waktu adalah arus searah yang mengalir dari masa lalu, menambatkan kita di masa kini dan mengantarkan kita di masa depan. Sementara ruang itu plural: di mana pun kita berada di Yogya atau Tokyo, Jakarta atau Bantul, manusia tak lepas dari arus waktu yang linear itu. Waktu yang tunggal itu sifatnya pasti, sementara ruang yang plural sifatnya mungkin, meminjam bahasa fisikawan Warner Heisenberg.

Radhar ingin melampaui pengertian ruang dan waktu tradisional di atas, dengan memahami pluralitas ruang sebagai kemungkinan penjelajahan kultural, sebagai kemungkinan untuk mengabdikan pada kosmopolitanisme. Maka tidak heran jika puisi-puisi penyair kelahiran Jakarta yang lebih fasih berbahasa Jawa daripada Betawi ini sarat petualangan di berbagai pusat kosmopolitanisme dunia: Paris, Tokyo, Koeln.

Dengan penjelajahannya itu Radhar ingin melampaui keterbatasan kulturalnya, dengan tanpa meninggalkan sikapnya sebagai subjek yang unik dan otoritatif. Dalam sajak *Tokyo Pertama*, Radhar melukiskan kosmopolitanisme Jepang sebagai, "membiarkan barat menipu timur / di emperan toko dan kaki lima ginza dan shibuya..." sehingga, "...jadilah tokyo, dan manusia / akan lahir darimu." Kosmopolitanisme Tokyo yang "membiarkan barat menipu timur" (tanpa harus dipahami secara ideologis) berasal dari kodrat manusia yang lahir sebagai makhluk kosmopolitan. Tafsir

spekulatif ini, jika disetujui, sama dengan mengatakan: *emang udah dari sononya manusia tuh suka gaul ame yang laen-laen*, kata *engkong* Betawi dengan cerewetnya.



Kesadaran akan keterbatasannya sebenarnya tidak hanya secara kultural, namun juga eksistensial. Sang "aku", sang "kita (manusia) terasa ambigu di hadapan Sang Waktu: "waktu yang berdiam: / silet di tiap mili urat darahku" (*Di Tubuh Subuh*). Dan yang lebih ironis: *perjalanan pendek ini / panjang sekali*" (*Nafas*). Sesuatu yang ironi dan yang ambigu berpadu. Waktu yang menjadi pusat eksistensial sang aku, sekaligus menagih sang aku dengan segala kesakitan, mengingatkan pada Sutardji Calzoum Bachri yang pernah bilang: *maut menabungku / segobang, segobang...* Dan sungguh tak terbayangkan bahwa "hidup yang sekadar mampir minum" ini ternyata tak habis dalam seteguk-dua teguk kopi, melainkan waktu seakan abadi dengan segala sakit dan derita. Membayangkan waktu seakan abadi, tentu saja menambah gairah pada hidup yang fana. Sayup-sayup menggemakan pesan Sang Nabi, "berbuat, seakan kau hidup selamanya; beramal, bahwa kau akan mati besok pagi!"

Dengan segala gairah itu pula, Radhar Panca Dahana melanjutkan penjelajahannya, tanpa lelah. Dalam sakit yang ia derita (dengan kedua ginjal yang tidak berfungsi) Radhar terus berkarya. *Lalu Batu* lahir di tengah situasi penjelajahan tanpa batas itu.

Radhar Panca Dahana juga mementaskan karya-karya terbarunya ini dalam acara "Konser Agung Puisi Sunyi: Lalu Batu", di Auditorium IAIN Sunan Kalijaga, 11 Oktober 2003. Sutradara Dindon WS, Penata Artistik Teguh Otsentrik, Penata musik Emi C. Noer, penata busana Samuel Wattimena dan didukung 11 aktor panggung. Acaranya

ditaja "AKAR Indonesia", bekerjasama dengan Teater Eska, LKiS dan Tim Produksi *Lalu Batu*.

Di samping tampil di Yogyakarta, Radhar Panca Dahana dan rombongannya juga tampil di Denpasar, Malang dan Bandung. Suatu perjalanan yang diakui Radhar sendiri sebagai "tak dapat diduga". Menurutnya, semenjak menderita gagal ginjal, waktu tempuh perjalanannya tidak boleh lebih empat jam, dan kali ini bukan hanya berjam-jam, tapi berhari-hari. "Ini pertarungan saya, apakah menjadi bagian yang terakhir, atau eksemplar awal dari hidup saya," katanya, lirih seperti doa. Sungguh alangkah sukar menduga gerak waktu!

*Faisal Kamandobat dan Raudal
Tanjung Banua, penyair, bergiat di*

Minggu Pagi, 26 Oktober 2003

Bahasa Nasional, Mau Kita Apakan?

◆ Menyambut Kongres Bahasa 2003

OLEH SOENJONO DARDJOWIDJOJO

DARI tiga butir Sumpah Pemuda 1928—Satu Bangsa, Satu Bahasa, dan Satu Tanah Air—yang masih kukuh dipertahankan adalah Satu Bahasa; kedua lainnya mulai digoyang dari Sabang sampai Merauke. Keberhasilan kita memiliki bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional sebagian merupakan hasil perjuangan leluhur yang dapat melihat jauh ke depan arah bangsa ini. Di negara lain yang visinya lebih pendek, bahasa nasional masih belum berfungsi dalam arti sebenarnya. Mari-lah kita tengok mengapa demikian di negara tetangga kita: India, Filipina, Malaysia, dan Singapura.

East India Act untuk pendidikan India sudah disetujui Parlemen Inggris awal 1813. Tahun 1829, Gubernur Jenderal Inggris di India Lord William Bentinck menyatakan, bahasa Inggris adalah kunci bagi seluruh perbaikan; pendidikan umum dan obat mujarab regenerasi India.

Kepala Pendidikan Inggris di India Thomas Macaulay, tahun 1830-an, bahkan menyatakan, tugasnya untuk "menciptakan suatu kelas masyarakat di India, yang warna kulit dan darahnya India,

tetapi selera, pandangan, moral, dan inte-
lektaknya Inggris." Didukung para nasionalis awal India seperti Nehru yang mengatakan, *Hindi is the national language, but English will continue as long as the non-Hindi speakers want*, kedudukan Hindi sebagai bahasa nasional belum terwujud, hingga kini!

Kedudukan bahasa nasional Filipina juga tidak jauh berbeda dengan Hindi. Tagalog sebagai bahasa nasional Filipina sebenarnya sudah dimasukkan ke dalam konstitusi oleh nasionalis Emilio Aguinaldo tahun 1897, diperkuat lagi dalam Dewan Konstitusi Filipina 1936. Tahun 1937 Presiden Quezon mengumumkan, Tagalog menjadi dasar bahasa nasional. Tetapi pada 1946, ketika Filipina menyatakan kemerdekaannya, Tagalog hanya dijadikan satu dari dua bahasa resmi negara itu, satunya lagi adalah bahasa Inggris! Kekhawatiran suku non-Tagalog akan dominasi Tagalog membuat Filipina tidak mampu memiliki bahasa nasional dalam arti sesungguhnya.

Malaysia semula juga hampir sama. Ketika mereka memilih lagu kebangsaan, Kongres Asosiasi Melayu tahun 1940 justru mendesak agar bahasa Inggris lebih disebarluaskan. Kini Malaysia lebih maju, apalagi dengan adanya perintah PM Mahathir Mohamad tahun 1990-an untuk lebih banyak memakai bahasa Melayu. Tetapi, kemajuan bahasa Melayu tampaknya telah menjadi bumerang dalam penggunaan bahasa Inggris. Karena itu, tahun 2002 Mahathir banting setir dan mengizinkan bahasa Inggris dipakai lagi sebagai bahasa pengantar di sekolah.

Setelah lepas dari Malaysia, Singapura mengambil sifat lebih pragmatis. Bahasa Melayu memang menjadi bahasa nasional, selain bahasa resmi lain, Tamil, Cina, dan bahasa Inggris. Tetapi bahasa sehari-hari dan bahasa perdagangan dilaksanakan dalam bahasa Inggris. Dari empat stasiun TV yang ada, yang untuk non-Inggris hanya satu.

Syukur dijajah Belanda

Keadaan itu tidak terlepas dari tipe kolonialisme Inggris (dan AS) yang menurut sejarawan Inggris, Percival Spear, menawarkan dunia Barat ke alam Timur. Ini berbeda dengan pandangan filosofis bangsa Belanda yang cukup puas dengan eksploitasi ekonomi dari rakyat yang dijajahnya. Awal 1890 Kern dan Hurgronje sebenarnya telah mengusulkan pendidikan Barat di Indonesia. Tetapi, usul ini tidak mendapat tanggapan positif dari Pemerintah Hindia Belanda saat itu. Pendidikan SD di Indonesia baru dimulai 1907, SLTP tahun 1917, dan SLTA 1918. Pendidikan tinggi baru dimulai 1920.

Dari segi kemampuan berbahasa Inggris, rakyat India, Filipina, Malaysia, dan Singapura lebih mampu memakai bahasa internasional ini. Mereka lebih dapat menyerap perkembangan ilmu dan teknologi dan merebut pasar kerja kerah putih. Bila kita pergi ke Brunei, Malaysia, dan Singapura, misalnya, TKI kita umumnya menduduki jabatan fiskal (juru masak, pelayan, pembersih), sementara rekan dari Filipina menjadi kasir atau penjaga *front desk* di hotel.

Dari segi bahasa nasional, Indonesia sebenarnya bersyukur dijajah Belanda. Sikap Belanda yang mengabaikan pendidikan bangsa Indonesia tidak menumbuhkan cinta kepada bekas penjajahnya. Di negara-negara bekas Persemakmuran, kota seperti London seolah menjadi kiblat segala kemajuan. Sebaliknya, Indonesia tidak memiliki cinta seperti itu sehingga pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 tidak ada bahasa asing yang menyaingi bahasa Indonesia. Para pelopor nasional dalam Budi Utomo (1908) juga menyadari bahasa pemersatu bangsa bukanlah bahasa Belanda, tetapi bahasa Indonesia.

Lalu, mau kita apakan?

Setelah kini kita memiliki bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, lalu mau kita apakan? Jawabannya pasti: harus kita kembangkan? Caranya? Di sinilah Indonesia, menurut saya, keliru selama ini! Setelah Kongres Bahasa yang pertama tahun 1938, Komite Bahasa tahun 40-an menggariskan pengembangan kosakata bahasa Indonesia dengan: (a) mencari kata dari bahasa Indonesia; (b) bila tidak ada, mencari dari bahasa daerah; (c) bila juga tidak ada, mencari dari bahasa di Asia, dan (d) barulah mencari dari bahasa asing, khususnya bahasa Inggris. Alasan yang dikemukakan, bahasa nasional kita tidak boleh "tercemar" bahasa asing/Barat seperti bahasa Inggris.

Kebijakan tahun 1987 juga tidak jauh berbeda arahnya dengan Komite Bahasa tahun 40-an. Bila ada konsep baru yang masuk, urutan pencarian padanannya adalah dengan mencari kata (a) dalam bahasa Indonesia yang lazim dipakai; (b) dalam bahasa Indonesia yang tak lazim

dipakai; (c) dalam bahasa serumpun yang lazim dipakai; (d) dalam bahasa serumpun yang tak lazim dipakai, dan barulah; (e) bahasa Inggris atau bahasa asing lain.

Dari dua kebijakan ini tampak bahwa arah pengembangan bahasa nasional kita selama ini bukan menuju ke kancah internasional, tetapi malah menyempit ke dunia sendiri. Sementara itu, arus globalisasi tidak mungkin dibendung lagi. Mungkinkah kita menentang arus dengan mengikuti pandangan salah satu pemuka kita yang menolak kata-kata seperti *metode*, *objektif*, dan *bangkrut* dan menggantinya dengan kata-kata "asli" *padika*, *kepros*, dan *jombrot*.

Menurutnya, orang Indonesia yang tidak mengerti makna kalimat "Jadi bisa saja kita langsung berkata bahwa cell untuk tembok yang terlalu cacil bagi mata lendis itu terlalu sungsat..." adalah orang Indonesia yang malas memakai kamus!

Sikap nasionalistik yang sebenarnya *chauvinistic* ini melupakan fakta sejarah dunia. Dua bahasa yang saling bersenggolan pastilah akan saling mempengaruhi. Bahkan bahasa internasional seperti bahasa Inggris pun tidak luput dari pengaruh asing: (a) kata serapan ke bahasa Inggris datang dari bahasa Latin awal tahun 55 sebelum Masehi waktu Julius Caesar menduduki Inggris, (b) senggolan dengan bahasa Perancis yang memuncak tahun 1066 membuat bahasa Inggris mengimpor kata-kata Perancis, (c) kontak dengan kelompok Anglo-Saxon menambah kosakata dari bahasa Belanda dan Skandinavia, (d) dan bahkan kontak dengan bahasa Melayu telah memasukkan kata-kata seperti *bamboo*, *orangutan*, dan *amuck*.

Bahasa Indonesia sendiri juga sudah lama kemasukan kata-kata asing seperti *dewa* (dari Sanskrit), *bendera* (Portugis), *khobar* (Arab), dan *kamar* (Belanda).

Karena itu, kita tidak perlu takut "tercemar" oleh kata-kata Inggris dan kehilangan identitas kita sebagai suatu bangsa. Dari tiga komponen bahasa—sintaksis, fonologi, dan semantik—hampir tidak mungkin sintaksis dan fonologi kita akan tercemar karena kedua komponen ini secara kodrati "tahan banting".

Sampai kapan pun kita pasti tidak akan mengatakan *Kemarin dia inqated, Dia has datang belum?* dan sebagainya. Kita juga tidak mungkin akan menerima bunyi *th* seperti pada kata *thin* dan *they*.

Komponen yang akan menyerap kata asing hanya komponen

semantik, yakni komponen kosakata. Ini bukan pencemaran, tetapi justru perkembangan. Dengan kata lain, arah pengembangan bahasa nasional kita hendaknya malah menuju ke internasionalisasi sehingga urutan penambahan katanya adalah dengan mencari padanan dari: (1) kata Indonesia yang umum, dan (2) kata yang umum dari bahasa daerah yang sekaligus dibandingkan dengan kata internasional/Inggris.

Pada langkah kedua ini dipertimbangkan untung ruginya dengan melihat (i) ketepatan maknanya, (ii) panjangnya kata, (iii) konotasi positifnya, dan (iv) keenakan bunyinya. Bila ternyata kata Inggris lebih memenuhi syarat, adopsilah kata itu dengan menyesuaikan (a) bunyinya, (b) ejaannya, dan (c)

perilaku sintaksisnya. Kenapa kita harus repot-repot cari ke sana kemari, kalau konsep untuk benda ajaib yang dinamakan oleh orang Inggris *computer* itu dapat kita adopsi menjadi *komputer*!

Dalam era globalisasi, apalagi kalau ada keinginan bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi di ASEAN, arah pengembangannya tidak boleh menyempit. Kita justru harus membuka diri untuk dapat bersaing di peredaran internasional. Kita harus memandang jauh ke depan dan bukan malah menengok ke belakang untuk bernostalgia dengan masa silam.

SOENJONO D
Guru Besar Linguistik,
Unika Atma Jaya

Kompas, 13 Oktober 2003

DARI KONGRES BAHASA INDONESIA VIII

Perlukah Undang Undang Bahasa Dibuat?

PENGANTAR REDAKSI: Kongres Bahasa Indonesia VIII berlangsung di Jakarta, 14-17 Oktober 2003. Keikutsertaan media massa dalam kongres tahun ini menjadi sangat penting mengingat tersedianya kebebasan menggunakan bahasa untuk informasi. Di sisi lain, muncul wacana perlunya Undang Undang Bahasa. Inilah catatan wartawan KR yang juga salah satu pemakalah, **Arwan Tuti Artha**, mengenai hasil-hasil kongres itu. (Red)

ORANG Batak tentu bisa menerima informasi dalam bahasa Indonesia. Begitu pula orang Sunda, orang Dayak, orang Minang, dan apalagi orang Jawa. Tetapi, mereka tentu tak bisa menerima informasi yang disampaikan dalam bahasa daerah satu sama lain. Jangan heran bila orang Batak tak bisa menangkap maksud yang disampaikan dalam bahasa Sunda, misalnya. Kata *cunihin* atau *beureum* tak bisa dimaknai secara benar oleh orang Batak, karena mereka tak mengenal kosakata dari bahasa Sunda itu.

Kiranya, berbagai bahasa daerah yang masih dipergunakan masyarakatnya itu sebuah daya tarik tersendiri bagi Indonesia. Oleh sebab itu, bahasa daerah tersebut tidak boleh hilang dari muka bumi ini. Bahasa daerah layak dikembangkan dan dibina dengan berbagai cara, sebagai bagian dari kebudayaan Indonesia. Sementara itu, terjadinya perubahan sebagai sebuah konsekuensi, bahasa asing juga sudah mulai terasa merambah di era globalisasi ini. Kita tak bisa menolaknya.

Bagaimana posisi bahasa Indonesia? Semakin kuat, atau kian terdesak oleh kuatnya bahasa asing itu? Persoalan ini, barulah sebagian kecil saja dari berbagai masalah kebahasaan dan kesastraan, ditambah kian menariknya penggunaan bahasa pada media massa, yang dibahas dalam Kongres Bahasa Indonesia VIII tahun 2003 di Jakarta. Setelah berlalu lima tahun, tiba waktunya menyelenggarakan kongres kembali.

Tentu sudah banyak pandangan, sikap dan persepsi masyarakat atau para ahli yang dibe-

rikan dalam kongres. Sejak pertama kalinya Kongres Bahasa Indonesia tahun 1938 diselenggarakan di Solo, disusul tahun 1954 di Medan, tahun 1978 di Jakarta dan seterusnya setiap lima tahun berlangsung kongres tentu banyak makalah tentang kebahasaan dan kesastraan yang dibahas. Kongres yang diselenggarakan itu sangat boleh jadi cuma membuang-buang uang. Ada kesan begitu, toh tak membuat masyarakat lebih canggih berbahasa. Bahkan tampaknya semakin rusak saja bahasa Indonesia yang dipergunakan masyarakat Indonesia untuk berkomunikasi.

Ya, Kongres Bahasa Indonesia VIII yang berlangsung di Hotel Indonesia Jakarta, 14 sampai 17 Oktober 2003, memang sangat istimewa. Bukan saja karena Presiden Megawati tak jadi membuka di Istana Negara. Tapi, ada peranan media massa yang mulai dibicarakan dalam kongres secara intens, juga banyak sekali makalah yang ditulis peminat, ahli, peneliti atau pemerhati bahasa baik dari dalam maupun luar negeri. Pesertanya pun, tercatat paling banyak, 1.046 peserta yang datang dari seluruh Indonesia. "Masalah kebahasaan di Indonesia tak terlepas dari kehidupan masyarakat pendukungnya," ujar Kepala Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Dr Dendy Sugono, selaku Ketua Panitia Kongres Bahasa Indonesia VIII.

Selama kongres berlangsung, berbagai perdebatan tentang kebahasaan, kesastraan dan media massa, dibahas dalam sidang pleno, sidang kelompok dan diskusi panel. Dalam sidang pleno, misalnya muncul berbagai pemikiran tentang Undang Undang

Bahasa sebagaimana disampaikan Harimurti Kridalaksana. Munculnya gagasan ini juga sepadan dengan pemikiran Prof Dr Koesnadi Hardjasoemantri SH, mengenai perlunya sanksi terhadap pelanggaran berbahasa. Ada yang setuju dibentuk Undang Undang Bahasa, ada yang menolak.

Versi terakhir Undang Undang Dasar Republik Indonesia, terdapat beberapa ketentuan mengenai bahasa, yakni pasal 32 ayat 2, bahwa negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Pada pasal 36, dinyatakan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Itulah sebabnya, barangkali, sewaktu Soeharto masih menjadi presiden, di mana-mana selalu berpidato dalam bahasa Indonesia. Di luar negeri pun begitu. Kemudian, dalam pasal 36C, ditegaskan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan diatur dalam undang-undang. Artinya, diperlukan undang-undang khusus untuk itu.

"Agar sebuah undang-undang bermakna dan bermanfaat bagi masyarakat umum, tentu tidaklah cukup alasan yuridis yakni perintah dari Undang-Undang Dasar seperti itu saja yang dijadikan pertimbangan penyusunannya," kata Harimurti Kridalaksana. Ada dua pertimbangan yang harus dipahami dan dipastikan, yakni perimbangan sosiologis dan pertimbangan filosofis.

Menurut tim perumus kongres ini, kedua pertimbangan tadi harus disertai pemahaman yang cermat tentang situasi bahasa Indonesia dan bahasa daerah dewasa ini. Karena itu, dalam rumusan tersebut disebutkan perlunya memikirkan dan mengadakan pengkajian un-

tuk mengajukan sebuah undang-undang bahasa.

Mereka yang setuju adanya sanksi terhadap pelanggaran berbahasa, sebagaimana diajukan Prof Dr Koesnadi Hardjasoemantri SH, karena melihat penggunaan bahasa Indonesia menampakkan gejala makin kurang memperhatikan kaidah bahasa. Pelanggaran berbahasa semakin banyak, yakni mereka yang tak menggunakan kaidah bahasa yang sudah ditetapkan. Pasal sanksi yang tersedia dalam bidang hukum itu meliputi sanksi administrasi, sanksi perdata dan sanksi pidana. "Sedang kaitannya dengan penggunaan bahasa, sanksi yang perlu diberikan adalah sanksi administrasi, yang arahnya lebih banyak ditujukan kepada pemberian insentif dan disinsentif," kata Koesnadi.

Pemberian insentif dan disinsentif itu, dapat dikaitkan dengan persyaratan kenaikan pangkat bagi pejabat yang bersangkutan. "Cara penilaian kemampuan berbahasa bagi pejabat yang bersangkutan, meliputi penuturan dan penulisan, perlu disusun Pusat Bahasa dan diajukan kepada Badan Kepegawaian Negara untuk dimasukkan ke dalam sistem penilaian jenjang kepangkatan," katanya lagi.

Selain itu, bisa pula dikaitkan dengan pemberian penghargaan kepada pejabat yang paling baik berbahasa Indonesianya, dari tingkat nasional sampai tingkat kabupaten. (*)-d



PARA pemakalah pada diskusi panel peran media massa di daerah dalam memelihara bahasa dan budaya daerah.

KR-IST

MENKO POLKAM SB YUDHOYONO

Tokoh Berbahasa Indonesia Lisan Terbaik

KONGRES Bahasa Indonesia VIII juga memilih tokoh-tokoh nasional yang baik dalam menggunakan bahasa lisannya. Masukan dijarah dari berbagai kalangan, ada keterlibatannya pula dari media massa, kemudian digodok di tingkat pusat. Akhirnya, Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono terpilih sebagai tokoh nasional berbahasa Indonesia lisan terbaik. Selain Susilo Bambang Yudhoyono, terpilih pula Nurcholish Madjid, Yusril Ihza Mahendra, Parjoto, Eep Saifulloh Fatah, dan Duta Besar Inggris untuk Indonesia Richard Gozney.



Susilo Bambang Yudhoyono
KR-DOK

Banyak pihak setuju atas terpilihnya Susilo. Selama ini kita sudah terbiasa mendengarkan pejabat tinggi berbicara dalam bahasa Indonesia, tetapi tak menyadari atas kesalahan-kesalahan tata bahasanya. Ada kecenderungan sekarang ini menggunakan bahasa itu sangat bebas sesuai dengan keinginan si penuturnya. Hal ini kiranya perlu dihadapkan pada program peningkatan kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar, dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan.

Apalagi masyarakat kita ini sangat paternalistik, sehingga masih melihat perilaku pemimpin sebagai *panutan*. Padahal, penggunaan bahasa Indonesia oleh pejabat yang terjadi sekarang ini, menurut Koesnadi, tidak atau belum merupakan teladan yang baik. "Sebaliknya, apa yang dapat dilihat dalam praktik, penuturan bahasa Indonesia maupun penulisan bahasa Indonesia, kurang memperhatikan kaidah bahasa yang telah ditetapkan," katanya.

Jika kita memiliki pejabat yang bahasa Indonesianya baik, rapi, teratur, kiranya akan lebih mudah dijadikan teladan. Masyarakat pun pelan-pelan akan memperbaiki bahasanya.

Tradisi memilih pejabat nasional atau tokoh nasional berbahasa Indonesia yang baik, kiranya patut dipertahankan dan dilestarikan di negeri tercinta ini. Bisa saja momentum Hari Sumpah Pemuda dijadikan bingkai untuk kegiatan ini.

Kongres Bahasa Indonesia tahun 2003 ini juga menarik karena peran media massa mulai diangkat dalam kongres. Bahkan mengundang para redaktur bahasa untuk bicara. Ini terjadi setelah kebebasan pers dan otonomi daerah, sehingga kekuasaan negara atas

pers sudah tak ada lagi. Negara tak lagi mengkooptasi pers. Seperti apa peran pers ini setelah tak lagi terkungkung, memang menarik dilihat. Bagaimana kemunculan bahasa lokal dalam pers berbahasa Indonesia? Seperti apa peran media cetak dan media elektronika dalam meningkatkan mutu penggunaan bahasa Indonesia?

Media massa, tanpa kecuali, memang punya tanggung jawab menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tanggung jawab itu tidak menghalangi kreativitas penggunaan bahasa sesuai dengan keperluan media masing-masing. Media massa perlu pula menyadari peran dan fungsinya sebagai sarana pendidikan bagi masyarakat, termasuk dalam pembinaan bahasa Indonesia. Tidak salah kiranya jika dalam rumusan kongres ini mencantumkan butir agar pekerja pers menyadari pengaruh yang besar dari hasil kerjanya. "Karena itu dituntut kepekaan yang tinggi dalam menggunakan bahasa Indonesia, termasuk dalam mengolah berita dari narasumber yang berkemampuan bahasa rendah," ujar Ketua Tim Perumus Kongres Bahasa Indonesia VIII, Prof Dr Abdul Wahab. (*)-d

